



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
**BAHASA, SASTRA,**  
*dan* **KEKUASAAN**

Diselenggarakan oleh  
Jurusan PBSI FBS UNY  
pada 26 November 2015

**TIM EDITOR:**  
Dr. Maman Suryaman  
Kusmarwanti, M.Pd., M.A.  
Dwi Budiyanto, M.Hum.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
**BAHASA, SASTRA**  
*dan* **KEKUASAAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan**

Editor:  
Maman Suryaman  
Kusmarwanti  
Dwi Budiyanto

**Desain sampul:**  
Dwi Budiyanto

**Tata letak:**  
Gapura Omah Desain

Diterbitkan oleh:  
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Perpustakaan nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
**Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan**  
Yogyakarta:

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta  
Cetakan 1, Nopember 2015  
xiv + 474 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-74971-0-8

# KATA PENGANTAR DEKAN

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita panjatkan pada Tuhan YME karena cinta kasihNya kita bisa bersemuka, bertukar pikiran pada forum yang penting ini dalam keadaan sehat walafiat.

Dulu kita berpikir bahwa karya sastra adalah cerminan dan refleksi realitas. Kemudian kita mengerti bahwa karya sastra memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mempengaruhi dan bahkan mencipta realitas. *Language and literature has the power to create reality.* Hal yang dulunya tampak tidak mungkin kita ubah karena telah mengakar kuat di dalam kultur budaya kita, seperti ketidakadilan kelas dan gender bisa berangsur berubah karena kontribusi diskursus yang mengada dalam teks-teks terutama karya-karya sastra. Karya sastra menjadi teks penting yang mampu mengubah realitas karena diciptakan secara luar biasa sehingga dapat menginspirasi menggerakkan hati dan pikiran manusia. Karya sastra yang inspiratif mampu mengubah ideologi yang tampak sangat kuat sekalipun.

Seminar Bahasa, Sastra dan Kekuasaan ini merupakan seminar yang penting karena di bumi Nusantara ini kedahsyatan bahasa dan sastra dan kemampuannya untuk mengubah realitas belum dilihat dengan seksama. Terbukti pendidikan bahasa dan sastra belum menempati dan ditempatkan pada posisi dominan dan penting dalam pendidikan kita.

Saya mengajak civita academica FBS UNY dan teman-teman dari manapun untuk bersatu padu memperjuangkan pemahaman yang baik dan benar terhadap hal ini sehingga kita memiliki kebijakan bahasa dan sastra yang tepat.

Saya berterima kasih kepada Jurusan PBSI yang telah menggagas dan mengawal seminar ini. Semoga dari seminar ini lahir pikiran-pikiran penting yang mampu meluruskan kebijakan dan langkah konkrit kita dalam memperbaiki kualitas bangsa melalui pendidikan bahasa dan sastra.

Selamat berseminar.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Dekan FBS UNY

Widyastuti Purbani

# KATA PENGANTAR

Bahasa dan kesusastraan pada hakikatnya merupakan salah satu produk peradaban dan budaya masyarakat suatu bangsa. Oleh karenanya, eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang ada dalam masyarakat suatu bangsa, termasuk kekuasaan. Sejarah bahasa dan sastra Indonesia juga telah membuktikan hal tersebut. Pilihan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara dalam yang pertama kali dicetuskan dalam peristiwa Sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 dan kemudian dikukuhkan dalam UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menunjukkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara eksistensi bahasa dengan kekuasaan. Karya sastra, sebagai karya seni yang bermediakan bahasa, tentu juga tidak akan lepas dari kekuasaan. Dengan mempertimbangkan bahasa yang digunakan sebagai media karya, maka sejarah sastra Indonesia pun tidak akan terlepas dari kekuasaan. Dalam hal ini pengakuan dan perkembangan sastra akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Pada periode tertentu, dengan alasan politik kekuasaan karya sastra dilarang dipublikasikan dan dibaca masyarakat. Sebagai gantinya, muncul gerakan untuk menerbitkan karya sastra tertentu yang dianggap bermanfaat bahkan mendukung kekuasaan tertentu.

Berbagai tulisan yang terangkum dalam buku berjudul *Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan* ini merupakan hasil dari penelitian, pengkajian, dan refleksi dari para peneliti dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap persoalan bahasa, sastra, dan kekuasaan, khususnya dalam konteks nasional (Indonesia), lokal, maupun dunia. Kajian yang menjelaskan hubungan antara bahasa dan kekuasaan antara lain dapat dibaca dari

tulisan yang berjudul “Bahasa dan Mentalitas Kebangkitan” (Yudi Latif), “Bahasa dalam Bingkai Kekuasaan” (Teguh Setiawan), “Struktur Mikro Pencitraan Politik di Media Massa” (Afdhal Kusumanegara), “Bahasa Hegemoni Para Penguasa” (Diana Mayasari), “Analisis Pragmatik Bahasa Sandi dalam Wacana Korupsi” (Israr Nuryadi), “Bahasa dan Realitas Kelas Menengah” (Dwi Budiyanto), “Pembentukan Kesadaran Multikultural Melalui Bahasa Komedi: Studi Wacana Kritis *Stand Up Comedy* di Indonesia” (Ari Kusmiatun), juga “Wacana Gosip sebagai Strategi Hegemoni” (Tadkiroatun Musfiroh). Hubungan antara bahasa (Indonesia) dengan kekuasaan juga tampak pada praktik pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai konsekuensi dari globalisasi. Hal ini tampak pada tulisan berjudul “Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi: Permasalahan dan Solusi” (Jimat Susilo), “Bahasa dan Negara: Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Kerangka 65 Tahun Hubungan Dipomatik Indonesia-Tiongkok” (Sudaryanto), “Pengembangan Materi membaca BIPA yang Terintegrasi Kearifan Lokal sebagai Jembatan Komunikasi Antarneegara” (Layli Nurlita dan Siti fathonah), dan “Pengkajian Bidang-bidang Kesalahan Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai B-2 Merupakan Suatu Upaya Peneguhan Posisi Strategi Pengembangan Bahasa Indonesia” (Eko Suroso).

Hubungan antara sastra dengan kekuasaan tampak pada “Sastra dan Kekuasaan” (Suminto A. Sayuti), “Menggugat Kuasa Patriarki Melalui Sastra Feminis” (Wiyatmi), “Karya Sastra sebagai Praktik Konstelasi Kekuasaan Simbolis dan Kekuasaan Struktural Objektif” (Ali Nuke Affandy), “Bahasa, Wacana, dan Kekuasaan dalam Konstruksi G30S” (Yoseph Yapi Taum), “Intimidasi Kuasa Kultural terhadap Perempuan dalam Cerpen Indonesia: sebuah Analisis Mitos Kecantikan” (La Ode Gusman Nasiru), “Kekuasaan dalam Novel *Stardust* Karya Neil Gaiman” (Rahmawati zi), “Membaca Gerwani dalam Cerpen Indonesia” (Else Liliani), “Sastra sebagai Alat Mengkritisi Kekuasaan di Indonesia: Tinjauan dari Masa ke Masa” (Esti Ismawati), “Sastra dan Kekuassn di Era Orde Baru” (Suroso), dan “Representasi Penguasa Orde Baru dalam lakon Wayang *Bambang Indra Gentholek Takon Bapa*” (Kusmarwanti). Berbagai tulisan tersebut secara kritis menjelaskan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa dengan kekuasaan yang ada, seperti digambarkan dan disuarakan, bahkan juga diteriakkan melalui karya-karya sastra. Dari sejumlah tulisan yang ada dalam buku ini, tampak bahwa karya-karya sastra yang ditulis oleh sastrawan ada yang secara tidak langsung meneguhkan kekuasaan, tetapi ada pula yang berada dalam posisi kritis terhadap kekuasaan.

Tulisan-tulisan ini menjadi bahan diskusi dalam Seminar Nasional



Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan yang diselenggarakan oleh Program Studi Sastra Indonesia, bersama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pasca Sarjana S2 Universitas Negeri Yogyakarta pada 26 November 2015. Melalui forum akademik seperti ini, diharapkan akan terjadi tegur sapa ilmiah di antara para peneliti, dosen, mahasiswa, dan pemerhati bahasa dan sastra dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Selain itu, upaya untuk mendokumentasikan dan menerbitkan sejumlah tulisan dalam sebuah buku merupakan hal yang pantas mendapatkan apresiasi. Bagi masyarakat pembaca, termasuk pembaca dari generasi yang akan datang, semoga buku ini mampu menjadi saksi sejarah bahwa eksistensi dan perkembangan bahasa dan sastra dalam konteks lokal, nasional, maupun global senantiasa berjalan seiring dan berseberangan dengan sejarah kekuasaan manusia.

Yogyakarta, 26 November 2015  
Tim Editor



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan ~ v

Kata Pengantar ~ vii

## **Bagian Pertama**

### **BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN : Sebuah Perbincangan Awal**

Bahasa dan Mentalitas Kebangkitan ~ 3

Yudi Latif

Sastra dan Kekuasaan ~ 24

Prof. Dr. Suminto A. Sayuti

Menggugat Kuasa Patriarki Melalui Sastra Feminis ~ 32

Dr. Wiyatmi, M.Hum.

Kekuasaan dalam Bingkai Bahasa ~ 48

Teguh Setiawan

## **Bagian Kedua**

### **SASTRA DAN KEKUASAAN : Sebuah Perbincangan lebih lanjut**

Karya Sastra sebagai Praktik Kontestasi Kekuasaan Simbolis dan  
Kekuasaan Struktural Objektif ~ 65

Ali Nuke Affandy

- Wacana Kekuasaan dalam Karya Seno Gumira Ajidarma *Penembak Misterius dan Saksi Mata* ~ 78  
Andi Batara Indra
- Membaca Gerwani dalam Cerpen Indonesia ~ 93  
Else Liliani
- Sastra sebagai Alat Mengkritisi Kekuasaan di Indonesia: Tinjauan dari Masa ke Masa ~ 106  
Esti Ismawati
- Konsep Cinta Kasih Suami Istri dalam *Serat Ngelmi Pengasih* ~ 128  
Fatkur Rohman Nur Awal
- Bahasa Kekuasaan dalam Karya Sastra  
(Perspektif Epistemologis Michel Foucault) ~ 140  
Ida Sukowati
- Representasi Penguasa Orde Baru dalam Lakon Wayang  
“*Bambang Indra Gentholek Takon Bapa*” ~ 152  
Kusmarwanti
- Kandungan Sastra dalam Budaya *Berege Sasak* Lombok  
Sebagai Upaya Pembangun Jati Diri Bangsa  
dan Mengkritisi Kekuasaan ~ 165  
Lalu Nasrulloh
- Intimidasi Kuasa Kultural Terhadap Perempuan dalam Cerpen  
Indonesia: Sebuah Analisis Mitos Kecantikan ~ 174  
La Ode Gusman Nasiru
- Perkembangan Wacana Karya Sastra Pascareformasi:  
Kasus Novel *Para Gus* Karya Sachree M. Daroini ~ 184  
Muhammad Thobroni dan Ridwan
- Etika Dasar Kekuasaan dalam Budaya Jawa  
Tokoh Ken Arok Novel *Pararaton* Karya Wid Kusuma ~ 191  
Mu'minin
- Kekuasaan dalam Novel *Stardust* Karya Neil Gaiman ~ 205  
Rahmawati Azi 205
- Representasi Ideologi Kepriyayan  
dalam Novel *Para Priyayi, Canting*, dan *Gadis Tangsi* ~ 216  
Wijaya Heru Santosa
- Sastra dan Kekuasaan di Era Orde Baru ~ 232  
Suroso

## **Bagian Ketiga**

### **BAHASA DAN KEKUASAAN**

#### **: Sebuah Perbincangan Lebih Lanjut**

Struktur Mikro Pencitraan Politik di Media Massa ~ 243

Afdhal Kusumanegara

Wacana Gosip sebagai Strategi Hegemoni ~ 255

Tadkiroatun Musfiroh

BAHASA DAN REALITAS KELAS MENENGAH INDONESIA ~ 268

Dwi Budiyanto, M.Hum.

Pembentukan Kesadaran Multikultur Melalui Bahasa Komedi: Studi Wacana Kritis *Stand Up Comedy* Di Indonesia ~ 283

Ari Kusmiatun

Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*) Terhadap Warna Kulit Orang Indonesia pada Iklan Pencerah Kulit *Fair And Lovely* ~ 298

Dadang Rhubido

Bahasa Hegemoni Para Penguasa ~ 309

Diana Mayasari, M. Pd

Analisis Pragmatik Bahasa Sandi dalam Wacana Korupsi ~ 319

Israr Nuryadi

*Linguistic Landscape*: Potret Benturan Kebahasaan ~ 332

Juanda

Kuasa dan Ekologi Bahasa Pengaruhnya pada Psikologi Anak ~ 340

St. Nurbaya

Penamaan Anak sebagai Bentuk Kekuasaan ~ 349

Eva Eri Dia

Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi: Permasalahan dan Solusi ~ 360

Jimat Susilo

Bahasa dan Negara: Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Kerangka 65 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok ~ 369

Sudaryanto

Pengembangan Materi Membaca BIPA yang Terintegrasi Kearifan Lokal sebagai Jembatan Komunikasi Antarnegara ~ 384

Laily Nurlina dan Siti Fathonah

Pengkajian Bidang-Bidang Kesalahan Pebelajar Bahasa Indonesia  
sebagai B-2 Merupakan Suatu Upaya Pemerteguhan Posisi Strategis  
Pengembangan Bahasa Indonesia ~ 398

Eko Suroso

Stereotip Gender Bahasa: Rekonseptualisasi dan  
Redefinisi Perempuan Bangsa Arab ~ 409

Muhammad Ridwan, S.S., M.A.

Humor sebagai Simbol Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*)  
Terhadap Etnis Madura ~ 420

Dwi Laily Sukmawati

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Novel Kalatidha,  
Karya Seno Gumira Ajidarma ~ 432

Sylvie Meiliana

Permainan dan Bernyanyi sebagai Upaya Menumbuhkan Kreativitas  
dalam Pembelajaran Bahasa Pada Anak Usia Dini ~ 445

Drs. Sarwidi, M Hum.

## **Notulen**

**Bagian Pertama**

# **BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN**

**: Sebuah Perbincangan Awal**





# BAHASA DAN MENTALITAS KEBANGKITAN

Oleh: Yudi Latif\*

Woe to that nation whose literature is cut short by the intrusion of force.  
*This is not merely interference with freedom of the press  
but sealing up of a nation's heart, the excision of its memory*  
(Alexander Solzhenitsyn)

Setiap gerakan kebangkitan selalu bermula dari tanda. Tanda baru yang menjadi mercusuar, ke arah mana idaman orang diarahkan; tanda baru yang menjadi pembatas antara tradisi dan inovasi, masa lalu dan masa depan.

Kata, bahasa dan susastera adalah rumah tanda. Karena tidak ada kemungkinan mengada di luar tanda (bahasa), maka sebagai rumah tanda, mereka (kata, bahasa, dan susastera) pun menjadi rumah kehidupan. Meminjam Martin Heidegger, *"Language is the house of being.*

Sebagai rumah kehidupan, upaya perjuangan dan kebangkitan apa pun harus bermula dari bebenah kata, bahasa dan susastera; dengan jalan merebut dan menghidupkan kembali darah kata.

Tak salah jika Partha Chatterjee (pemikir India) dan Reynaldo Ileto (pemikir Filipina) mengakarkan nasionalisme bukan (hanya) pada mesiu, perundingan, kognisi Barat, dan kapitalisme percetakan (*print capitalism*), melainkan pada emosi Dionysian (*passion*) yang dipancarkan

puisi dan daya kata (Chatterjee 1986; Ileo, 1989).

Taruhlah, gerakan kebangkitan dan kebangsaan Indonesia. Budi Utomo bukanlah yang pertama dan satu-satunya aktor kebangkitan. Ia sekadar monumen dari arus sejarah kebangkitan yang melewati fase persiapan (*gestation*), fase pembentukan (*formative*), dan fase pematangan (*consolidation*). Di sepanjang lintasan fase pergerakan ini, perjuangan kata/bahasa sebagai penanda baru memainkan peran penting.

### **Perjuangan Kata sebagai Tonggak Kebangkitan**

Fase persiapan gerakan kebangkitan bermula pada akhir abad ke 19, distimulasi oleh kehadiran secara embrionik ruang publik modern di Hindia (Indonesia). Ruang publik yang dimaksud adalah domain tempat wacana dan opini publik diekspresikan serta tempat kegiatan-kegiatan intelektual dan politik diaktualisasikan.

Seperti diamati oleh Jürgen Habermas (1989), pembentukan tradisi intelektual modern dalam konteks Eropa Barat merupakan bagian dari kemunculan apa yang disebutnya sebagai ‘ruang publik borjuis’ (*bourgeois public sphere*) sekitar abad ke-17 dan ke-18. Ruang publik ini berpusat di seputar wacana kritis mengenai karya-karya sastra dari keluarga borjuis yang berorientasi pemirsa dan berlangsung di lembaga-lembaga sosial yang baru muncul dalam ranah publik: seperti klub-klub, majalah-majalah, jurnal-jurnal, kedai-kedai kopi, salon-salon dan ruang-ruang kafe lantai atas (*cenacles*). Ruang publik ini merupakan sebuah tempat pertemuan bagi lingkaran-lingkaran intelektual dari masyarakat (merkantil) Eropa yang terurbankan, di mana individu-individu perseorangan berbaur ‘demi berbincang secara bebas dan setara dalam wacana yang rasional, sehingga membuat mereka menyatu menjadi sebuah kelompok yang relatif kohesif yang pertimbangan-pertimbangannya bisa menjadi suatu kekuatan politik yang tangguh’ (Eagleton 1997: 9).

Bibit-bibit kelahiran ruang publik modern di Hindia dimungkinkan oleh dampak ikutan dari penerapan ekonomi Liberal pada paruh akhir abad ke-19, yang bertanggungjawab dalam mendorong pendirian pers-pers vernakular (berbahasa lokal) serta dalam penyebarluasan klub-klub sosial bergaya Eropa. Lewat proses pendidikan dan *mimicry* dan dengan cara membaca pers vernakular yang didirikan oleh orang Eropa dan kemudian juga oleh orang keturunan Cina, serta dengan membentuk perhimpunan-perhimpunan, inteligensia pribumi pada akhirnya bisa menciptakan ruang publiknya sendiri.

Wacana dominan pada fase kecambah ruang publik modern

---

\* Ketua Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila

ini berkisar pada isu “kemadjoean”. Kemadjoean dalam arti ini mengekspresikan suatu kehendak untuk mencapai status sosial yang ideal, baik sebagai individu maupun komunitas imajiner, yang meliputi banyak hal: kemajuan pendidikan, modernisasi (yang secara luas diasosiasikan dengan Westernisasi), kehormatan, dan keberhasilan dalam hidup.

Sampai akhir abad ke-19, peran para guru dalam mempromosikan wacana *kemadjoean* sangatlah menonjol, setidaknya karena dua alasan. Pertama, profesi guru hingga masa ini menghimpun porsi terbesar dari orang-orang pribumi berpendidikan terbaik, dan sebagai para pendidik, mereka merupakan pihak yang paling merasa terpenggil untuk mengemban misi suci untuk mencerahkan saudara-saudara sebangsanya. Kedua, fakta bahwa profesi guru kurang dihargai jika dibandingkan dengan posisi-posisi administratif mungkin telah menstimulasi mereka untuk menjadi artikulator dari konsep ‘*kemadjoean*’ dalam rangka menjadikannya sebagai tolok ukur baru dalam menentukan privilese sosial. Peran yang menonjol dari para guru ini menunjukkan bahwa ‘intelektual organik’ dari bibit inteligensia pada akhir abad ke-19 ini terutama berasal dari lingkaran-lingkaran para guru.

Para guru melancarkan tuntutan dan kritik mereka terutama lewat majalah-majalah pendidikan, seperti *Soeloeh Pengadjar* di Probolinggo (yang pertama kali terbit pada tahun 1887) dan *Taman Pengadjar* di Semarang (terbit sekitar tahun 1899-1914). Majalah-majalah itu memainkan peran yang signifikan dalam mengartikulasikan aspirasi-aspirasi guru pribumi. bagi penghapusan diskriminasi dalam pendidikan. Seiring dengan itu, persis menjelang akhir abad ke-19, perkumpulan guru paling berpengaruh terbentuk, yang diberi nama klub ‘*Mufakat Guru*’. Cabang-cabang dari klub ini bermunculan di berbagai kabupaten dan kawedanan di Jawa. Tujuan dari ‘*Mufakat Guru*’ pada pokoknya ialah ‘untuk membuka jalan bagi para guru untuk bersatu dan berdiskusi mengenai permasalahan dan isu kemadjoean.

Tuntutan utama dalam proyek emansipasi kaum guru ini berkisar pada upaya perjuangan kata/bahasa. Yakni perluasan akses terhadap kepustakaan serta peningkatan pengajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah pendidikan guru pribumi dan pengajaran bahasa Belanda bagi semua anak pribumi (Adam 1995: 89).

Dengan trajektori kemadjoean yang telah dirintis kaum guru, sedini awal dekade pertama abad ke-20, terjadilah fase formatif ruang publik modern. Sejauh mengenai perkembangan pers vernakular, dekade pertama abad ke-20 merupakan momentum paling penting dalam sejarah keterlibatan kaum pribumi dalam bidang tersebut. Sementara pada abad ke-19, telah ada beberapa redaktur dan jurnalis pribumi yang bekerja

untuk pers milik orang Belanda/Indo dan orang keturunan Cina, peran kaum pribumi dalam dekade awal abad ke-20 jauh lebih substansial. Di samping jumlah redaktur dan jurnalis pribumi yang meningkat, para anggota dari inteligensia pribumi itu sekarang telah mendirikan pers yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh kalangan pribumi sendiri.

Para jurnalis pribumi yang paling terkemuka pada masa itu berasal dari para pelajar atau mantan pelajar sekolah *Dokter-Djawa*/STOVIA. Di antara mereka, yang paling terkenal ialah Abdul Rivai (lahir tahun 1871) dan Tirta Adhi Surjo (1880-1918). Melanjutkan tradisi perjuangan kaum guru, para jurnalis-inteligensia ini juga memencangkan tongkat kebangkitan lewat bahasa dan konstruksi tanda.

Menulis pada edisi perdana (1902) majalah pengobar 'kemajuan', *Bintang Hindia*, Abdul Rivai memperkenalkan istilah 'bangsawan pikiran'. Dikatakan, "Tak ada gunanya lagi membicarakan 'bangsawan usul', sebab kehadirannya merupakan takdir. Jika nenek-moyang kita keturunan bangsawan, maka kitapun disebut bangsawan, meskipun pengetahuan dan capaian kita bagaikan katak dalam tempurung. Saat ini, pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan kehormatan seseorang. Situasi inilah yang melahirkan 'bangsawan pikiran'."

Tulisan seorang lulusan sekolah Dokter-Jawa ini, mewakili kegetiran anak-anak terdidik dari kalangan priyayi rendah dan non-bangsawan. Karena administrasi pribumi, sebagai lambang kehormatan, diperuntukkan bagi anak-anak priyayi tinggi, anak-anak dari kalangan ini cenderung memilih sekolah menak yang disebut *hoofdenschool* (awal abad 20 menjadi OSVIA). Sementara itu, perluasan birokrasi dan kapitalisme memerlukan tenaga-tenaga pertukangan. Sekolah Dokter-Jawa (awal abad 20 menjadi STOVIA) dan sekolah guru (*Kweekschool*) semula dirancang untuk memenuhi keperluan itu.

Diskriminasi tidak sendirinya lenyap dengan menyandang ijazah. Baik dalam standar gaji maupun status sosial, lulusan STOVIA lebih rendah ketimbang lulusan OSVIA. Situasi inilah yang mendorong kaum terdidik dari keturunan priyayi rendah dan non-bangsawan berjuang memencangkan 'pikiran' sebagai tanda baru kehormatan sosial.

Dalam usaha itu, anak-anak STOVIA bermotivasi tinggi untuk memperjuangkan gerakan-gerakan kebangkitan. Salah satu yang terpenting adalah pendirian perkumpulan Budi Utomo (BU) pada 1908. Dengan melancarkan kritik terhadap kegagalan kepemimpinan priyayi tua dalam melindungi kepentingan rakyat, pada awalnya BU bermaksud memperjuangkan kepemimpinan kaum muda. Meskipun terbukti, pengaruh priyayi mapan masih terlalu kuat, membuat BU segera dibajak oleh kalangan priyayi konservatif.

Betapun, BU menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan gerakan kebangkitan berbasis ‘bangsawan pikiran’. Sejak itu, ‘pikiran’ menjadi peta-jalan bagi ideal-ideal generasi selanjutnya. Memasuki dekade kedua abad ke-20, dengan dibukanya sekolah ala Eropa bagi penduduk bumiputera, seperti HIS (sekolah dasar), MULO (sekolah menengah pertama), dan AMS (sekolah menengah atas), orang-orang terdidik dari keturunan priyayi-rendahan dan non-bangsawan makin besar jumlahnya. Berpijak pada peta-jalan yang telah dipancarkan generasi sebelumnya, angkatan baru kaum terdidik bergerak lebih maju dengan mencampakkan kata bangsawan yang mendahului kata pikiran. Seseorang menulis di *Sinar Djawa* (4 Maret 1914): “Dengan pergeseran waktu, telah muncul jenis bangsawan baru, yakni ‘bangsawan pikiran’. Namun jika bangsawan pikiran ini hanyalah kelanjutan dari bangsawan usul, maka perubahan dan pergerakan tak akan pernah lahir.”

Maka tanda baru segera dicipta, tanda yang sepenuhnya bebas dari imaji kebangsawanan, dan bekhidmat sepenuhnya pada pikiran. Tanda itu bernama ‘kaum terpelajar’ atau ‘pemuda-pelajar’, atau seringkali diungkapkan dalam bahasa Belanda, ‘jong’. Dalam tanda dan peta-jalan seperti inilah generasi Sukarno, Hatta, Sjahrir dan Natsir dibesarkan.

Semua tokoh-tokoh ini lahir pada dekade pertama abad ke-20, dan semuanya tak bisa dikatakan sebagai anak-anak priyayi tinggi. Sukarno hanyalah anak priyayi-rendahan yang mujur bisa masuk ELS karena pertolongan seorang guru Belanda; Hatta adalah anak ulama-pedagang, yang beruntung bisa diterima di ELS karena kekayaan keluarganya; Sjahrir berlatar sedikit lebih baik, ayahnya seorang jaksa pribumi sehingga diterima di ELS; Keluarga Natsir lebih rendah lagi, ayahnya hanyalah seorang jurutulis kontelir, yang membuatnya hanya diterima di HIS. Alhasil, mereka bisa memasuki pendidikan sistem Eropa, berkat kegigihan generasi sebelumnya dalam menciptakan tanda; tanda yang membuat Belanda terpaksa mengendurkan persyaratan keturunan.

Kebetulan juga, generasi ini merupakan buah pertama dari gelombang ‘pem-belanda-an (*Dutchification*) yang intens serta politik asosiasi<sup>1</sup> yang dicanangkan oleh Snouck Hurgronje. Memasuki abad ke-20, bahasa dan budaya Belanda makin penting menyusul perluasan operasi perusahaan-perusahaan swasta Eropa, perluasan birokrasi dan institusi pendidikan, kemudahan hubungan antara Eropa dan Nusantara akibat dibukanya Terusan Suez (1869) serta munculnya arma-armada pelayaran

---

<sup>1</sup> Politika sosiasi bertujuan menciptakan negara Belanda dengan terdiri dari dua wilayah yang berjauhan, yang satu di Eropa Barat-Daya, yang lain di Asia Tenggara, namun secara spiritual saling berdekatan. Caranya, dengan mendidik anak-anak bumiputera secara Eropa.

swasta. Sejak itu, bahasa Belanda menggantikan bahasa lokal dalam pergaulan formal. Saat yang sama, politik asosiasi juga memperluas terpaan Barat terhadap kaum terdidik bumiputera. Kedua hal ini memperluas akses kaum terdidik bumiputera terhadap pengajaran bahasa Belanda dan Eropa lainnya. Dengan bahasa sebagai kunci pembuka kepastakaan dunia, generasi Sukarno mampu berkenalan langsung dengan pemikiran dan wacana semasa tanpa perantara.

Akses kepastakaan kaum inteligensia ini diperkuat oleh kebijakan pemerintahan kolonial untuk mendirikan sebuah ‘rumah penerbitan buku’, yang memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kepenulisan dalam sejarah Hindia di kemudian hari. Pada tahun 1908, pemerintah membentuk sebuah komisi untuk memberikan saran bagi penyediaan bahan bacaan bagi kaum pribumi dan sekolah-sekolah pribumi.<sup>2</sup>

Apapun agenda tersembunyi dari komisi tersebut, yang jelas keberadaan BP berperan penting dalam penyediaan bahan-bahan bacaan yang murah bagi khalayak umum di Hindia. Selain itu, dalam pandangan para kritikus sastra, A Teeuw, lahirnya novel modern Indonesia dan popularitasnya sangat dimungkinkan oleh keberadaan dari Balai Pustaka. Bahkan kebanyakan pujangga nasional dari dekade selanjutnya merupakan mantan pegawai, entah untuk jangka waktu lama atau sebentar, dari BP. Atau paling tidak beberapa karya mereka pernah diterbitkan BP. Dengan demikian, makna penting dari rumah penerbitan (buku) yang disponsori pemerintah ini pada kurun waktu itu adalah dalam fungsinya sebagai medan permagangan bagi para anggota inteligensia untuk meniru aktivitas kesusastraan Barat. Proses peniruan ini membuka jalan bagi keterpautan literati Hindia ke dalam semangat universal ‘*Respublica litteraria*’ (Republik Para Pujangga).

Sementara kesusastraan BP masih bersifat apolitis, sebuah genre kesusastraan politik menemukan medium ekspresinya dalam koran-koran dan majalah-majalah vernakular dalam bentuk literatur

---

<sup>2</sup> Proyek ini, menurut Maier, merupakan bagian dari usaha tak kenal lelah dari pemerintah colonial untuk memperkokoh bahasa Melayu tinggi ‘yang benar’ dengan memisahkannya dari ‘heteroglossia’ bahasa Melayu pasar. Selain itu, kebijakan ini bisa juga ditafsirkan sebagai upaya kolonial Belanda untuk mengembangkan etika, estetika dan politik kepastakaan yang disetujui pemerintah kolonial (Sen dan Hill 2000: 22). Pada tahun 1911, komisi ini menyerahkan laporannya yang disusun oleh penerbitan awal (dengan bantuan komisi tersebut) beberapa cerita daerah dan legenda, serta terjemahan-terjemahan dari kesusastraan Eropa klasik seperti *The Three Musketeers* dan *The Count of Monte Cristo* (Johns 1979: 32). Pada tahun 1917, rumah penerbitan yang mendapat bantuan dari komisi tersebut diberi nama Balai Pustaka (BP).

serial. Contoh-contoh dari genre novel politik yang diterbitkan dalam dekade tersebut ialah *Student Hidjo* karya Mas Marco Kartodikromo, dan *Hikajat Kadiroen* karya Semaun. Sementara karya yang pertama diterbitkan dalam koran *Sinar Hindia* Semarang pada tahun 1918, karya yang kedua diterbitkan oleh koran yang sama pada tahun 1920.<sup>3</sup> Dimuatnya dua cerita bersambung dalam koran tersebut mencerminkan peran penting kesusasteraan dan medianya dalam menyuarakan bahasa nasionalisme. Imajinasi kesasteraan tentang kemerdekaan bahkan mendahului dan memberi inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan yang menjadi agenda gerakan politik di kemudian hari.

Demikianlah, perjuangan kebangkitan selalu dimulai dari kerja wacana. Tanpa kata, perjuangan kehilangan arah. Seperti itu jugalah generasi Sukarno. Praksis wacana lewat kelompok studi, kerja jurnalistik, dan kesasteraan menjadi tahap awal dari perjuangan mereka. Sejak 1924, Hatta terlibat aktif di Perhimpunan Indonesia berikut jurnalnya *Indonesia Merdeka*, seraya tak lupa menulis puisi-puisi patriotik<sup>4</sup>. Pada 1926, Sukarno mendirikan Algemene Studieclub berikut jurnalnya, *Indonesia Moeda*. Saat yang sama ia juga aktif sebagai editor malajah SI, *Bandera Islam* (1924-1927), bahkan selama pembuangan tak luput menulis naskah drama. Seperti Hatta, Sjahrir aktif di Perhimpunan Indonesia, dan kelak berperan penting dalam jurnal *Daulat Rakyat*. Ia pun dikenal sebagai pemain sandiwara dengan erudisinya yang luas di bidang kesusasteraan. Natsir mengikuti beberapa kelompok diskusi dan terlibat intens di Persatuan Islam. Sejak 1929 ia mulai menekuni kerja jurnalistik sebagai ko-editor dari jurnal *Pembela Islam*.

Menulis adalah mencipta, dan mencipta selalu mensyaratkan membaca. Semakin banyak mencipta, semakin banyak membaca; semakin kaya bacaan, semakin kaya hasil penciptaan.

Yang pertama mereka ciptakan adalah nama. Tanda pengenal diri, yang memberi kesadaran eksistensial. Jika tak suka dengan rumah kolonial, hal pertama yang harus dirobuhkan adalah tanda-tanda yang

---

<sup>3</sup> *Student Hidjo* pada dasarnya merupakan kisah tentang seorang pribumi Hindia yang belajar di negeri Belanda dan terlibat hubungan asmara dengan seorang gadis Belanda. Namun, pada akhirnya, dia berpisah dengan gadis itu secara terhormat dan kembali ke Hindia dimana dia menikah dengan seorang gadis pribumi Hindia. Hikajat Kadiroen—yang ditulis saat penulisnya berada di penjara karena dakwaan presdelict pada tahun 1919—bercerita mengenai seorang intelektual muda yang brilian (yaitu Kadiroen) yang mengalami promosi yang cepat dalam pemerintahan (kolonial) pribumi. Meski demikian, karena rasa frustasinya saat melihat adanya jurang antara ideal-idealnya dengan diskriminasi yang ada serta penderitaan rakyat yang disaksikannya, dia berubah menjadi seorang komunis.

<sup>4</sup> Dua yang terkenal, *Beranta Indera dan Hindania*

diciptakannya. Jika Belanda menandai tanah-air ini sebagai Hindia-Belanda, yang diperjuangkan generasi Sukarno adalah memberi nama baru kepada tumpah darahnya. Semula ditemukan sebuah istilah dalam bahasa Belanda ‘Indonesische’, yang merujuk pada suatu geo-kultur di kawasan Austronesia yang berciri kepulauan dan bercorak kultur India. Maka pada 1922, perkumpulan pelajar Indonesia di Negeri Belanda, *Indische Vereeniging*, berubah menjadi *Indonesische Vereeniging*. Pada 1924, Sutomo mendirikan kelompok studi pertama pemuda-pelajar bumiputera dengan nama ‘Indonesische Studieclub’.

Mencipta nama pada akhirnya mengisyaratkan bahasa. Jika yang diperlukan adalah sebuah nama yang otentik, maka bahasa yang digunakan mesti berbeda dengan bahasa kolonial. Maka nama *Indonesische* segera diubah menjadi *Indonesia*. Akhir 1924, *Indonesische Vereeniging* berganti menjadi *Perhimpunan Indonesia*. Lantas, perhimpunan-perhimpunan sosial politik di tanah air mulai mengimbuhkan kata ‘Indonesia’ di balik namanya. Segera saja Indonesia pun menjadi nama bangsa, sedang bahasa Indonesia menjadi identitas-kebangsaan. Monumennya dipancangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dari sinilah kemerdekaan Indonesia menemukan jangkarnya.

### **Pentingnya Keberaksaraan dan Kesusasteraan**

Lintasan fase perjuangan kebangkitan nasional itu secara jelas menunjukkan pentingnya perjuangan kata/bahasa/aksara/sastera. Hal itu bukanlah khas Indonesia, karena sesungguhnya tak ada bangsa yang dapat maju tanpa memuliakan keberaksaraan dan kesasteraan. Setidaknya ada lima hal yang patut dipertimbangkan mengapa upaya memperhatikan hal ini begitu penting.

Pertama tradisi tulis merupakan sarana olah ketepatan. Sementara kelisanan dipandang sebagai pemilikan orang yang “longgar dan liar” (seperti Nebrija, ahli tata bahasa abad ke-15, melukiskan kelisanan Castellan kepada Ratu Isabella), tulisan dipandang sebagai instrumen ketepatan dan kekuatan. Membaca transkripsi dari wacana lisan seseorang merupakan pengalaman sederhana, diisi seperti dengan ketergesa-gesaan, awalan yang keliru, tak bertata bahasa dan tak patut. Seseorang belajar untuk menulis, sebagian, merupakan wahana untuk belajar mengemukakan dirinya secara benar dan tepat dalam pembacaan lisannya (Olson 1996: 3-4).

Kedua, keberaksaraan merupakan ukuran peradaban. Penemuan alphabet oleh orang Yunani dipandang sebagai capaian tinggi dalam evolusi budaya, dicapai sekali dalam sejarah dan kehadirannya berfungsi, hingga saat ini, untuk membedakan budaya alphabet dan non-alphabet.



Ekspresi awal dari ide ini bisa ditemukan dalam karya Rousseau, *Essay on the origin of language* (1966). Menurutnya ada tiga cara menulis yang berhubungan secara tepat dengan tiga perbedaan tahapan bagaimana manusia berhimpun ke dalam suatu bangsa. Melukiskan objek (depicting objects) cocok dihubungkan dengan masyarakat liar; tanda dari kata dan proposisi (*signs of words and propositions*) dihubungkan dengan masyarakat barbar, sert alphabet kepada masyarakat beradab.

Ketiga, keberaksaraan merupakan organ kemajuan sosial. Gambaran yang paling nyata dari demokrasi modern di Barat terletak pada derajat literasinya yang tinggi. Secara umum dipercaya bahwa naiknya tingkat literasi masyarakat mengarah pada kemunculan institusi-institusi sosial yang rasional dan demokratis; juga pada perkembangan industrial serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kemunduran dalam tingkat literasi menimbulkan ancaman terhadap kemajuan dan demokrasi (Lerner, 1958).

Kalangan sejarawan telah mencoba melukiskan secara spesifik tentang relasi antara literasi dan perkembangan sosial di Barat. Cipolla (1969: 8) menemukan bahwa kendatipun pola sejarah tidaklah seragam, ‘tampak jelas bahwa seni menulis secara nyata dan tegas berkaitan dengan kondisi urbanisasi dan hubungan komersial.’ Korelasi ini menarik kesimpulan bahwa literasi merupakan sebab pembangunan, suatu pandangan yang mendorong komitmen UNESCO untuk ‘melenyapkan iliterasi’ pada tahun 2000 sebagai katalis bagi modernisasi (Graff, 1986).

Ada tiga hal ‘yang telah mengubah seluruh wajah dan keadaan sesuatu di muka bumi,’ ujar Francis Bacon (1620/1965: 373) pada abad ke 17: ‘percetakan, mesiu, dan magnet.’ Sementara itu, Lucian Febvre dan Henri-Jean Martin (1976: 263) melukiskan bahwa penanda terpenting dari gerak maju peradaban Barat pada era pencerahan terletak pada transformasi budaya tentara, dari kalangan yang kurang membaca, mau membeli buku, hingga akhirnya punya kepustakaan sendiri.

Keempat, keberaksaraan sebagai instrumen budaya dan perkembangan saintifik. Bahwa tulisan dan literasi sebagian besar bertanggung jawab bagi kemunculan modus pemikiran modern yang khas seperti filsafat, sains, keadilan dan pengobatan. Sebaliknya bahwa literasi merupakan musuh dari ketakhyulan, mitos dan magis. Frazer (1911-1915/1976) dalam kompendiumnya tentang mitos dan keyakinan, *The golden bough*, berdalih tentang tahap-tahap kemajuan dari magik me agama ke sains, suatu pandangan yang selaras dengan pemikiran Hegel (1910/1967), yang menempatkan keberaksaraan pada titik sentral perubahan. Menurutnya, keagungan Yunani terutama bersandar pada literasi alphabet.

Peradaban yang diciptakan Yunani dan Romawi adalah yang

pertama ada di muka bumi yang berdiri di atas aktivitas membaca masyarakat; pertama kali diperlengkapi dengan sarana-sarana berekspresi yang memadai dalam dunia tulis; pertama kali mampu menempatkan dunia tulis dalam sirkulasi umum. Singkat kata, pertama kali menjadi melek (*literate*) dalam kepenuhan arti istilah tersebut, dan untuk mentransmisikan literasi itu kepada kita (Havelock, 1982: 40).

Kelima, keberaksaraan sebagai instrumen dari perkembangan kognitif. Sebagaimana dengan perkembangan budaya, demikian juga halnya dengan perkembangan kognitif. Pengetahuan genuine bisa diidentifikasi dengan apa yang dipelajari di sekolah dan dari buku. Keahlian literasi menyediakan rute akses pada pengetahuan. Kepedulian pertama bersekolah adalah perolehan “keterampilan dasar”, yang dalam hal membaca termasuk “decoding”, yakni, belajar apa yang disebut prinsip alfabet, dan sejauh menyangkut tulisan, termasuk belajar ejaan (*spelling*). Literasi menanamkan derajat abstraksi pada pemikiran yang alpa dari wacana dan budaya lisan. Tingkat kemampuan berfikir manusia bisa direpresentasikan secara rasional oleh level literasi seperti tingkat *basic*, *functional* dan *advance* (Olson, 1996: 7-8).

Tingkat keberaksaraan dan keluasan erudisi manusia pada saat ini mendapatkan ancaman dari berbagai penjuru. Ancaman pertama datang dari “vokasionalisme baru” (*new vocationalism*), yakni suatu konsepsi utilitarian dari lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan keterampilan teknis. Dalam arus ini, pengajaran bahasa mengabaikan dimensi kesasteraan, seraya memberi perhatian yang berlebihan pada pengajaran tata-bahasa dalam disiplin keilmuan dan kejuruan yang spesifik (Godzich, 1994).

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Frank Furedi (2006) sebagai “the cult of philistinism”, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-teres material dan praktis. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya sebagai benteng kedalaman ilmu mengalami proses peluluan kegairahan intelektual, tergerus oleh dominasi etos manajerialisme dan instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis. Orang-orang yang membaca kesusasteraan dan mengobarkan kegairahan intelektual berisiko dicap sebagai ‘elitist’, ‘tak membumi’, dan ‘marjinal’. Kedalaman ilmu dan wawasan kemanusiaan dihindari, kedangkalan dirayakan.

Ancaman kedua, berupa terpaan luas dan intens dari multimedia, khususnya televisi. Selain biasanya terhadap kelisanan, kemaharajalelaannya di tanah air, saat tradisi literasi rapuh dan kesasteraan dimarjinalkan, memberi penguatan terhadap budaya kedangkalan seraya melemahkan

fungsi-fungsi keberaksaraan.

Tekanan pada utilitarianisme dalam kelemahan tradisi literasi dan erudisi memberi ketimpangan pada kehidupan publik. Seperti diungkapkan oleh Habermas (1983), kehidupan dan ruang publik yang sehat memerlukan interaksi yang sepadan dari tiga pendekatan, yang meliputi dimensi kognitif-saintifik, praktis-moral, dan ekspresif-estetik. Menurutnya, ketiga pendekatan itu bernilai setara. Ketika salah satu pendekatan mendominasi dan melemahkan yang lain maka yang akan muncul adalah ketimpangan dan kelumpuhan, yang tercemin dari rusaknya karakter bangsa.

Lumpuhnya karakter bangsa ini tercemin dari bahasa publik kita. Perhatikan halaman depan surat kabar atau perbincangan para politisi. Cuma ada dua bahasa yang kerap dipakai: bahasa politik atau bahasa ekonomi." Bahasa politik, selalu bertanya, 'siapa yang menang' (*who's winning*)? Bahasa ekonomi selalu bertanya, 'dimana untungnya' (*where's the bottom line*)?

Jika kita hendak maju secara budaya dan berkarakter sebagai bangsa, sepatutnya mesti ada satu bahasa lagi dalam wacana publik, yang mempertanyakan, 'apa yang benar' (*what's right*)?" Bahasa ini merupakan bahasa yang unik yang membuat kita tak terlalu nyaman membincangkannya. Dan untuk membuat kita nyaman berbincang dalam bahasa ini di masa depan, diperlukan pendidikan karakter sejak dini.

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Pendidikan karakter menggarap pelbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan kewargaan, dan pengembangan karakter. Pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan siswa.

Pendidikan karakter seringkali diintroduksikan ke dalam kelas dan kehidupan publik lewat contoh-contoh keteladanan dan pahlawanan. Siswa dan masyarakat memeriksa sifat-sifat karakter yang menjelma dalam diri teladan dan pahlawan itu. Nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan ini tidaklah diajarkan (*taught*) secara kognitif dalam rumus "pilihan ganda", melainkan ditangkap (*caught*) lewat penghayatan emotif. Dalam hal ini, medium kesusasteraan dengan karya-karya agungnya bisa memberikan wahana yang tepat bagi pendidikan karakter.

Demikianlah, di Inggris, puisi-puisi Shakespeare menjadi bacaan wajib sejak sekolah dasar dalam rangka menanamkan tradisi etik dan kebudayaan masyarakat tersebut. Di Swedia, aneka sepanduk dibentangkan di hari raya berisi kutipan dari karya-karya kesusasteraan.

Di Perancis, sastrawan-sastrawan agung menghuni pantheon; jejak-jejak singgahnya di beberapa tempat di beri tanda khusus.

Pengaruh kesusasteraan terhadap kehidupan tak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerap kali memengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan merubah dunia. Kisah *Rosie the Riveter*, yang melukiskan sepak terjang seorang pekerja pabarik kerah-biru menjadi pengungkit bagi *Women's Liberation Movement*. Kisah Siegfried, ksatria-pahlawan legendaris dari nasionalisme Teutonik, bertanggung jawab mengantarkan Jerman pada dua perang dunia. Kisah *Barbie*, boneka molek, yang menjadi *role model* bagi jutaan gadis-gadis cilik, dengan memberikan standar gaya dan kecantikan (Lazar, et.al. 2006). Belum lagi kalau kita bicara pengaruh yang ditimbulkan oleh karya-karya Homer, Goethe hingga Ronggo Warsito, yang memberi dampak yang luas bagi *lifeworld* masyarakatnya masing-masing.

## Tragedi Indonesia

Apabila gerakan kebangkitan di masa lalu berhasil memancarkan 'pikiran' dan 'keberaksaraan' sebagai tanda kemajuan, lantas tanda apakah gerakan yang kita ciptakan masa kini, seabad setelah BU berdiri? Inilah pertanyaan genting yang harus dicermati.

Terdapat tanda-tanda bahwa 'pikiran' dan keberaksaraan tak lagi menjadi ukuran kehormatan. Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta, karena kepintaran kembali dihinakan oleh 'kebangsawanan baru': kroni dan kemewahanterdapat indikasi bahwa 'pikiran' dan keberaksaraan tak lagi menjadi ukuran kehormatan.

Penaklukan daya pikir dan daya literasi oleh pragmatisme dan banalisme membuat *mindset* kebangsaan kehilangan daya refleksivitasnya? Tanpa kemampuan refleksi diri, suatu bangsa kehilangan wahana pembelajaran untuk menakar, memperbaiki dan memperbaharui dirinya sendiri.

Tanpa kapasitas pembelajaran, bangsa Indonesia (secara keseluruhan) bergerak seperti zombie. Pertumbuhan penampilan fisiknya tak diikuti perkembangan rohaninya. Tampilan luar dari kemajuan peradaban modern segera kita tiru, tanpa penguasaan sistem penalarannya. Sebagai pengekor yang baik dari perkembangan *fashion* dunia, kita sering merasa dan bergaya seperti bangsa maju. Padahal, secara substantif, tak ubahnya bak Peterpan yang mengalami fiksasi ke fase "kanak-kanak" (jahiliyah). Bahkan bisa lebih buruk lagi. Dalam kasus strategi kebudayaan, kita cenderung mempertahankan yang buruk dan membuang yang baik.

Dalam situasi demikian, gerakan kebudayaan yang mengeluhkan apa yang disebut Taufiq Ismail sebagai "generasi nol buku", yang berpotensi

mengalami kelumpuhan daya tulis, daya baca, dan daya pikir, secara tepat menyasar pusat syaraf kelumpuhan kebudayaan Indonesia.

Gerakan kebudayaan seperti ini penting untuk melakukan koreksi terhadap kecenderungan untuk menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima. Dalam teori sosial secara umum, responsibilitas untuk perubahan biasanya dialamatkan pada faktor-faktor semacam modernisasi, kapitalisme, imperialisme, figur karismatik atau individu-individu berpengaruh.

Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa reformasi sosial tidak akan pernah muncul hanya mengandalkan reformasi politik dan ekonomi, melainkan perlu berjejak pada reformasi sosial-budaya.

Gerakan kebudayaan merupakan jantung dari reformasi sosial. Pada dekade 1960-an, Herbert Marcuse menekankan dimensi estetis dari gerakan sosial pada masa itu, dengan menegaskan bahwa dalam seni, musik dan sastra lah gerakan-gerakan sosial mengingat dan menyimpan tradisi kritik dan perlawanan (Marcuse, 1969). Hal ini diperkuat oleh Richard Flacks dalam analisisnya tentang “tradisi kiri” Amerika, yang mengindikasikan bahwa gerakan sosial seringkali lebih penting sebagai aktor budaya ketimbang politik (Flacks, 1988).

Reformasi sosial merupakan fungsi dari perubahan proses belajar sosial secara kolektif, yang membawa transformasi tata nilai, ide dan jalan hidup (*ways of life*). Dalam hal ini, minat pengetahuan (*knowledge interest*) serta aktivitas produksi ide (*ideas-producing activities*) sangat esensial dalam mengkonstruksikan identitas kolektif baru yang memungkinkan gerakan sosial mampu memelihara vitalitasnya.

Dalam ketiadaan platform politik yang jelas, gerakan kebudayaan menjadi alternatif menjaga kewarasan publik. Adalah melalui sastra, nyanyian dan seni yang lain—yang dibudayakan dalam masyarakat—yang bisa membuat gerakan dan cita-cita sosial bisa bertahan dalam memori kolektif.

## **Menyongsong Revolusi Mental**

Gerakan kebudayaan sebagai ikhtiar untuk merevitalisasi tenaga kejiwaan bangsa ini menemukan resonansinya lewat kampanye kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang memancarkan tanda baru kebangkitan dalam terma “revolusi mental”.

Apakah gerangan revolusi itu? Istilah revolusi terlalu sering disalahpahami. Dalam pemahaman umum selama ini, revolusi sering diasosiasikan sebagai perubahan cepat dalam ranah sosial-politik dengan kekerasan radikal yang menyertainya. Jarang orang yang menyadari bahwa sebelum digunakan dalam wacana dan gerakan sosial-politik,

istilah revolusi sesungguhnya lebih dahulu muncul sebagai istilah teknis dalam sains (*exact sciences*).

Secara denotatif, revolusi berarti “kembali lagi” atau “berulang kembali”; ibarat musim yang terus berganti secara siklikal untuk kembali ke musim semula. Maka dalam sains, istilah revolusi mengimplikasikan suatu ketetapan (konstanta) dalam perubahan; pengulangan secara terus-menerus yang menjadikan akhir sekaligus awal. Pengertian seperti inilah yang terkandung dalam frase “revolusi planet dalam orbit”.

Pada 1543, Nicolaus Copernicus mempublikasikan buku *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, yang sering dinisbatkan sebagai penanda revolusi paradigmatik dalam sains yang mengubah keyakinan tentang pusat alam semesta dari geosentrisme (berpusat di bumi) menuju heliosentrisme (berpusat di matahari). Perubahan mendasar dalam keyakinan ilmiah ini kemudian dikenal sebagai revolusi Copernican. Istilah revolusi dalam kaitan ini bergeser dari pengertian sebelumnya menjadi apa yang didefinisikan Thomas Kuhn sebagai “perubahan dalam susunan keyakinan saintifik atau dalam paradigma”. Dengan kata lain, pengertian revolusi tidak lagi menekankan aspek kesinambungan dalam daur ulang (*unbroken continuity*), melainkan justru dilihat sebagai patahan dalam kesinambungan (*break in continuity*). Sejak itu, revolusi berarti suatu perubahan struktur mental dan keyakinan karena introduksi gagasan dan tatanan baru yang membedakan dirinya dari gagasan dan tatanan masa lalu (Cohen, 1985).

Pengertian revolusi seperti itulah yang diadopsi ke dalam wacana dan gerakan sosial-politik. Penggunaan istilah revolusi dalam bidang politik memperoleh popularitasnya menyusul Revolusi Amerika (1776) dan terlebih setelah Revolusi Perancis (1789). Seperti halnya revolusi dalam sains, pengertian revolusi dalam politik pun pada mulanya mengandung konotasi yang ramah (*benign*), hingga Revolusi Perancis berubah menjadi ekstrem dalam bentuk teror yang menakutkan. Konotasi menakutkan dari istilah revolusi tersebut menguat menyusul publikasi *The Communist Manifesto* pada pertengahan abad ke-19, revolusi 1848, dan gerakan komunis internasional dengan agenda revolusi berskala dunia yang mengandung ekspresi kekerasan yang terkait dengan perubahan cepat.

Bagaimana pun juga, kekerasan dan perubahan cepat bukanlah elemen esensial dari suatu revolusi. Revolusi tidak mesti dengan jalan kekerasan. Pada 1986, Peter L. Berger mempublikasikan buku *The Capitalist Revolution* yang menunjukkan suatu bentuk revolusi nirkekerasan. Revolusi pun bisa ditempuh secara cepat atau lambat. Revolusi industri di Eropa ditempuh dalam puluhan bahkan ratusan tahun. Yang esensial dalam suatu revolusi adalah “kebaruan” (*newness*). Hannah Arendt

(1965) mengingatkan bahwa “Konsep modern tentang revolusi terkait dengan pengertian bahwa jalannya sejarah seketika memulai hal baru. Revolusi mengimplikasikan suatu kisah baru, kisah yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya.” Revolusi menjadi jembatan yang mentransformasikan dunia lama menjadi dunia baru.

Alhasil, revolusi sejati yang punya dampak besar dalam transformasi kehidupan harus mengandung kebaruan dalam struktur mental dan keyakinan. Dengan kata lain, revolusi sejati meniscayakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) yang lebih kondusif bagi perbaikan kehidupan. Urgensi revolusi mental seperti ini sejalan dengan Firman Tuhan dalam Al-Qur’an (QS 13: 11): “*SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENGUBAH APA YANG ADA PADA SEBUAH KAUM HINGGA MEREKA MENGUBAH APA YANG ADA PADA JIWA MEREKA.*”

Kenyataannya, keberhasilan revolusi fisik merebut kemerdekaan serta jatuh banggunya pemerintahan pasca kolonial tidak diikuti oleh perubahan mendasar pada struktur mentalitas bangsa. Pada relung terdalam kejiwaan bangsa ini masih bercokol mentalitas feodalistis yang menghisap ke bawah, tapi mudah bermetamorfosis menjadi mentalitas budak di hadapan tuan-tuan agung. Mentalitas budak (inferior) menjadikan bangsa ini mudah mengekor bangsa lain; saat yang sama sulit menerima kelebihan dan kemenangan sesama bangsanya sendiri.

Dengan struktur mentalitas seperti itu, kemerdekaan dan pembangunan Indonesia tidak diikuti oleh kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan. Lemahnya mentalitas kemandirian membuat wajah perekonomian bangsa ini belum kunjung beranjak dari gambaran perekonomian negeri terjajah yang dilukiskan Bung Karno pada 1930-an. Pertama, sumber daya alamnya hanya dijadikan bahan baku murah oleh negara negara maju. Kedua, negeri kita hanya dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Ketiga, dijadikan tempat untuk memutarakan kelebihan kapital (modal) oleh negara-negara kapitalis tersebut atau dengan kata lain menjadi tempat investasi asing.

Lemahnya mentalitas kedaulatan membuat politik negeri ini tak leluasa mengembangkan pilihan sistem dan kebijakan politik sendiri. Keluar, kewibaan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional kian memudar. Kedalam, pilihan-pilihan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh apa yang disebut Tan Malaka sebagai “kemauan, pelor, atau bambu runcingnya Rakyat Indonesia sendiri”. Tanpa kedaulatan mengembangkan sistem pemerintahan sendiri, demokrasi padat modal membuat pilihan-pilihan politik kerap dimenangkan kepentingan korporasi, karena aspirasi rakyat

tidak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.

Lemahnya mentalitas kepribadian membuat kebudayaan bangsa ini tak memiliki jangkak karakter yang kuat. Tanpa kekuatan karakter, Indonesia adalah bangsa besar bermental kecil; bangsa besar yang mengidap perasaan rendah diri. Bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai pusat teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri. Tanpa kekuatan karakter, kita sulit menjadi pemenang dalam era persaingan global. Sebab seperti diingatkan Napoleon Bonaparte, “Dalam pertempuran (baca: persaingan), tiga perempat faktor kemenangan ditentukan oleh kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara keterampilan manusia dan sumberdaya material.”

Begitu terang-benderang, bahwa krisis mentalitas merupakan akar tunjang dari segala krisis kebangsaan. Bisa dipahami bila pesan Lagu Kebangsaan lebih mendahulukan pembanguna jiwa daripada raga. Celaknya, perhatian yang berlebihan terhadap investasi material membuat kita mengabaikan investasi mental.

Dunia pendidikan yang biasanya dijadikan sandaran terakhir bagi transformasi sosial bukannya memberi harapan, malah menjadi bagian dari krisis itu sendiri. Lembaga pendidikan sebagai benteng kebudayaan mengalami proses pengerdilkan, tergerus oleh dominasi etos instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis.

Suatu usaha “national healing” perlu dilakukan dengan melakukan gerakan revolusi mental melalui proses persemaian dan pembudayaan dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, non-formal maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang kuat

### **Tricita Revolusi Mental**

Sejauh bisa ditangkap dari kampanye kepresidenan Jokowi-JK, visi-misi pemerintahan baru akan berusaha secara terencana, bertahap dan terstruktur mentransformasikan Indonesia menuju bangsa yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk merealisasikan visi-misi “trisakti” tersebut, selain diperlukan dukungan sumberdaya material, keterampilan, dan manajemen, yang paling penting adalah kesiapan mental. Keduanya bahkan menyadari bahwa sandungan utama dalam mengemban visi-misi trisakti tersebut bersumber dari hambatan mental (*mental block*). Bahwa secara umum,



manusia dan bangsa Indonesia mengalami kerentanan dalam mentalitas berdikari, berdaulat, dan berkepribadian, dengan berbagai implikasi destruktifnya bagi perkembangan bangsa.

Usaha revolusi mental harus menyorot aspek terpenting yang menentukan perilaku manusia, yakni karakter personal dan budaya (sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem perilaku sebagai pembentuk karakter kolektif). Sedemikian pentingnya dimensi budaya dalam menentukan transformasi bangsa, sehingga mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menyatakan: “Budaya adalah penentu nasib suatu bangsa.”

Dalam proyek transformasi budaya, perlu diidentifikasi mentalitas inti sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi kelahiran mentalitas-mentalitas turunannya. Dalam merumuskan budaya perusahaan (*corporate culture*), terdapat kesepakatan umum, bahwa jumlah mentalitas inti yang menjadi pusat perhatian itu harus terbatas, sehingga mudah diingat dan terukur. Demikian pula halnya dalam merumuskan budaya kebangsaan-kenegaraan (*civic-state culture*). Kita harus merumuskan beberapa mentalitas inti bangsa ini yang harus diubah dan diperkuat dalam kerangka transformasi budaya bangsa.

Dengan mempertibangkan realitas hambatan mental yang ada serta idealitas nilai-nilai budaya keindonesiaan, gagasan revolusi mental Jokowi-JK bisa berfokus pada tiga mentalitas inti sebagai sasaran utama. Ketiganya berkisar pada cita penguatan mentalitas-budaya kemandirian, mentalitas-budaya gotong-royong, dan mentalitas-budaya pelayanan. Untuk memudahkan pengingatan, Jokowi-JK bisa mengemas ketiga cita revolusi mental itu dengan mencanangkan suatu tanda perubahan, bernama “Tricita Revolusi Mental”.

Pentingnya mentalitas-budaya “kemandirian” berangkat dari asumsi bahwa secara kultural, sebab utama yang membuat manusia-bangsa Indonesia tidak berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah karena manusia-bangsa Indonesia secara umum tidak bisa menghargai dirinya sendiri, kurang percaya diri, kurang aktualisasi diri, lemah pendirian, dan lemah kepribadian. Jika disederhanakan, manusia-bangsa Indonesia tidak memiliki mentalitas kemandirian.

Karena tidak memiliki mentalitas kemandirian, perilaku manusia-bangsa Indonesia cenderung terperangkap dalam dua pilihan ekstrem: melakukan apa yang orang (bangsa) lain lakukan, yang mendorong mentalitas konformis; atau melakukan apa yang diinginkan orang (bangsa) lain, yang menyuburkan mentalitas pecundang dan totalitarian. Revolusi mental harus menumbuhkan mentalitas kemandirian yang membuat manusia-bangsa Indonesia dapat menghargai dirinya sendiri

untuk mengembangkan potensi diri dan mengambil pilihan menurut pendiriannya dalam rangka mencapai yang terbaik.

Pentingnya mentalitas-budaya “gotong-royong” berangkat dari asumsi bahwa nilai penting kualitas dan kepercayaan diri hanya menemukan kepenuhan maknanya dalam jaringan kerjasama dengan yang lain. Setiap huruf Alfabet, dari A sampai Z, merupakan satu karakter yang masing-masing sama pentingnya. Meski demikian, betapapun pentingnya keberadaan setiap karakter (huruf) itu, tidaklah bermakna apa-apa tanpa bersekutu dengan huruf-huruf lain dalam membentuk kata dan kalimat.

Dalam kemajemukan karakter masyarakat Indonesia, gotong royong adalah nilai fundamental bangsa ini. Menurut pandangan Bung Karno, gotong-royong adalah intisari Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama. Dalam pandangannya, “Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari ‘kekeluargaan’...gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan....Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. *Holopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!”

Revolusi mental harus merestorasi warisan budaya gotong-royong yang mulai pudar ini dengan mengembangkannya dalam pengertian yang lebih luas. Restorasi dan transformasi budaya gotong-royong bisa mencakup pengembangan budaya “*silih asih, silih asah, dan silih asuh*”; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; tolong-menolong dengan semangat koperasi; saling menghargai dalam perbedaan seraya aktif meningkatkan pemahaman dan titik-temu dalam perbedaan (*active engagement*); mampu menghargai dan mengapresiasi karya dan prestasi orang lain; serta mampu menjalin sinergi antarpotensi, antaragensi, antarsektor, antarwilayah.

Pentingnya mentalitas-budaya “pelayanan” berangkat dari asumsi bahwa pemupukan kemandirian dan penguatan welas asih kegotongroyongan itu harus bermuara pada pelayanan. Bunda Teresa mengatakan, “Buah dari kecintaan adalah pelayanan”. Dalam realitas hidup bangsa Indonesia, apapun yang dikerjakan Tuhan sebagai pelayanan kepada bangsa ini serba elok, fantastis, subur, dan makmur. Tetapi, apapun yang dikerjakan manusia sebagai pelayanan kepada nusa-bangsanya serba amburadul, asal-asalan, mandul, dan miskin.

Dalam realitas politik hari ini, praktik gotong-royong masih berjalan, namun dalam konotasi toleransi negatif, “tolong-menolong

dalam kejahatan dan pengrusakan”. Gerakan revolusi mental harus menempatkan gotong-royong itu dalam konteks toleransi positif, “tolong-menolong dalam kebaikan dan pembangunan”. Semangat toleransi yang memadukan kemandirian dan kerjasama dalam menunaikan pelayanan publik dan kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab dan bermutu untuk kebaikan dan kemuliaan hidup bersama.

Perubahan pada ketiga mentalitas-budaya inti tersebut bisa menurunkan mentalitas-mentalitas ikutan. Kreativitas dan inovasi, misalnya, akan lahir kalau tersedia ekosistem kreativitas yang merupakan perpaduan dari ketiga unsur tadi. Dalam pandangan Richard Florida (2002), kreativitas = f (talenta+toleransi+teknologi). Dengan kata lain, kreativitas merupakan fungsi dari pemupukan talenta (unsur kemandirian), yang dikukung oleh adanya ruang toleransi untuk saling mengapresiasi (unsur gotong-royong) dan tersedianya sarana teknologis (peralatan teknis, perangkat informasi, organisasi, fasilitator) yang merupakan unsur pelayanan.

Tricita revolusi mental itu harus menjadi landasan ideologi kerja bagi penyusunan platform dengan segala turunan program dan kebijakannya di semua lini dan sektor pemerintahan. Keberadaan ideologi kerja memberikan *framework* (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, penancangan program kerja, serta pilihan kebijakan yang diperlukan.

Dalam implementasinya, gerakan revolusi mental ini tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal: negara yang ambil inisiatif, negara yang menafsir, negara yang melakukan. Cara terbaik mestinya dilakukan dengan pendekatan horisontal dalam bingkai semangat gotong-royong yang melibatkan partisipasi berbagai agen sosial dari kalangan masyarakat sipil, masyarakat media, pekerja budaya, dunia pendidikan dan dunia usaha.

Dengan prioritas dan pendekatan seperti itu, gerakan revolusi mental secara sinergis dan simultan bisa membawa perubahan mendasar pada struktur mental dan keyakinan bangsa. Dengan perubahan mendasar itu, suatu pemutusan dengan mentalitas-budaya dan tantangan dekaden bisa dilakukan sehingga bisa menciptakan suasana kejiwaan yang lebih siap berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Betapapun hal itu merupakan proyek raksasa yang maha berat, tetapi kita tak boleh kehilangan optimisme. Dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kekuatan cinta mengatasi putus asa. Seperti dingatkan kembali oleh Bung Karno: “Dan kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita. Kita harus jantan!

Jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi—rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan—hanya rakyat yang demikianlah dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya.”

## Rujukan

- Adam, A. B. 1995, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*, Cornell University (SEAP), Ithaca.
- Bacon, F. 1965, “The New Organon”. Dalam S. Warhaft (ed.), *Francis Bacon: A selection of His Works* (326-392). Macmillan, Toronto.
- Chatterjee, P. 1986, *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, **United Nations University, London**.
- Cipolla, C. M. 1969, *Literacy and Development in the West*, Penguin, Harmondsworth.
- Eagleton, T. 1997, *The Function of Criticism*, Verso, London
- Febvre, L. & Martin, H-J. 1997, *The Coming of the Book*, Verso, London.
- Flacks, R. 1988, *Making History*, Columbia University Press, New York.
- Frazer 1976, *The Golden Bough*, Tavistock, London.
- Furedi, F. 2006, *Where Have All the Intellectuals Gone?*, Continuum, London.
- Godzich, w 1994, *The Culture of Literacy*, Harvard University Press, Cambridge.
- Graff, H. 1986, *The Legacies of Literacy: Continuities and Contradictions in Western Society and Culture*, Indiana University Press, Bloomington.
- Habermas, J. 1989, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Polity Press, Cambridge.
- \_\_\_\_\_ 1983, “Modernity: An Incomplete Project”. Dalam H. Foster (ed.), *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture* (3-15), Bay Press, Port Townsend.
- Havelock, E. 1982, *The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences*. Princeton University Press, Princeton.
- Hegel, G. W. 1967, *The Phenomenology of Mind*, Harper and Row, New York.
- Ileto, R. 1989, *Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910*, Ateneo University Press, Quezon City.

- Ismail, T. 1966/2005, *Tirani dan Benteng*, Yayasan Indonesia, Jakarta.
- 2005, *Maku (Aku) Jadi Orang Indonesia: Seratus Puisi Taufiq Ismail*, Yayasan Ananda, Jakarta.
- Johns, A. H. 1979, *Cultural Options and the Role of Tradition: A Collection of Essays on Modern Indonesian and Malaysian Literature*, Faculty of Asian Studies & ANU Press, Canberra.
- Kundera, M. 1996, *Testaments Betrayed: An Essay in Nine Parts*, HarperPerennial, New York.
- Lazar A., Karlan. D, & Salter, J. 2006, *The 101 Most Influential People Who Never Lived*, Harper, New York.
- Lerner, D. 1958, *The Passing of Traditional Society*, The Free Press, Illinois.
- Marcuse, H. 1969, *An Essay on Liberation*, Beacon Press, Boston.
- Olson, D.R. 1996, *The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rousseau, J.-J. 1966, "Essay on the Origin of Languages". Dalam J.H. Moran & A. Gode (eds.), *On the Origin of Language: Two Essays by Jean-Jacques Rousseau and Johann Gottfried Herder*, Frederick Unger, New York.
- Said, E. 1983, *The World, the Text and the Critic*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Sen, K. & Hill, D. T. 2000, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, Oxford University Press, Victoria.
- Skármeta, A. 1996, "The Book Show". Dalam W. H. Gass & L. Cuoco (eds.), *The Writer in Politics*, Southern Illinois University Press, Illinois.

# SASTRA DAN KEKUASAAN

**Prof. Dr. Suminto A. Sayuti**  
**Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta**  
**E-mail: suminto1956@yahoo.com**

*Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 wat  
Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya.*

*Hari depan Indonesia adalah duaratus juta mulut menganga, dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 wat, sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian*

*Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main ping pong di atas pulau Jawa yang tenggelam dan membawa seratus juta bola lampu 15 wat ke dasar lautan*

*(Taufiq Ismail, "Kembalikan Indonesia Padaku")*

1/.

Salah satu pengalaman berharga kita di masa lalu, dan mungkin dirasakan hingga hari ini, ketika merambah tahap demi tahap "pembangunan," ialah bahwa perubahan sosial-budaya dengan ideologi pembangunannya secara hakiki selalu dikendalikan, digerakkan, dan atau diarahkan oleh sekelompok manusia yang memiliki kekuasaan. Wacana kekuasaan menjadi wacana yang mengarahkan perubahan sosial yang

terencana itu (lihat: Heddy Shri Ahimsa-Putra, 1993).

Dari sudut bahasa, kata “pembangunan” -- dan bukannya kata “perubahan”-- selalu dianggap sebagai sebuah kata yang meniscayakan nilai-nilai positif. Oleh karena nilai positifnya itu, ia selalu diandaikan mengandung dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka, ia boleh jalan terus tak henti. Perubahan sosial-budaya yang diarahkan oleh nuansa “pembangunan” hampir tidak pernah diperhitungkan implikasi negatifnya terhadap kehidupan masyarakat yang dibangunnya itu. Apabila timbul dampak negatif, dampak itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar, sebagai dampak pembangunan, pembangunan memang memerlukan pengorbanan, *jer basuki mawa beya* (Umar kayam, 1999).

Anggapan semacam itu sebenarnya merupakan *one-sidedness*, kesepihakan. Karena, dalam kenyataannya sebagian besar kepentingan masyarakat hampir selalu terpinggirkan. Berbagai persoalan yang terkait dengan pembangunan hampir tidak pernah dilihat “dari bawah,” tetapi dilihat lewat perspektif segelintir manusia yang memiliki kekuasaan, yang dengan mudah dapat pula atau merasa berhak mengatasnamakan rakyat banyak dan merasa dirinya lebih pintar daripada rakyat itu sendiri. Itulah sebabnya, kepincangan dan atau dampak negatif tidak pernah muncul ke permukaan.

Secara hakiki, misalnya saja dipandang dari sudut pandang *human capital theory*, pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang berencana, dan oleh karena itu, pasti bertujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan adalah meningkatkannya kualitas hidup manusia, baik kualitas yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Perencanaan itu sendiri disusun dan dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia itu sendiri adalah pendukung dan penggerak rencana tersebut. Hal itulah yang oleh HAR. Tilaar (1990) disebut sebagai hakikat semua upaya pengembangan SDM.

Sebagai penggerak pembangunan, manusia harus memiliki kualitas tertentu dalam kecakapannya untuk melaksanakan rencana tersebut. Jadi, faktor manusia memainkan peranan yang begitu strategis dalam pembangunan karena manusialah yang merupakan faktor produktif yang menggerakkan jalannya pembangunan, dan pada saat yang bersamaan manusia itu jugalah yang menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, manusia adalah alat sekaligus tujuan. Manusia yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik, lebih berdimensi, dan lebih kaya dalam arti material dan spiritual, adalah manusia sebagai tujuan direncanakan dan dilaksanakannya pembangunan, bukan sebaliknya. Dalam hubungan ini, pengembangan SDM lebih mengacu pada pengertian mobilisasi dan pemanfaatan potensi manusia dalam suatu proses yang meliputi aspek-

aspek ekonomi dan sosial secara menyeluruh guna mencapai taraf hidup manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang lebih berkualitas.

Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya pengembangan SDM tidak hanya berhenti pada sekedar peningkatan produktivitas manusia sebagai alat produksi atau sebagai sarana ekonomi. Hal inilah yang disebut oleh HAR Tilaar (1990) sebagai konsep pembangunan yang menyeluruh yang bertumpu pada pengembangan SDM. Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa kemajuan hanya merupakan hasil pembangunan ekonomi, merupakan pandangan yang harus dipertimbangkan kembali. Sebaliknya, pandangan yang melihat kemajuan sebagai hasil interaksi antara alat dan tujuan, antara dimensi-dimensi sosial dan ekonomi dalam konteks pengembangan SDM merupakan pandangan yang layak diperhitungkan. Itulah sebabnya kita mendambakan konsep pembangunan yang berpijak pada pendekatan pengembangan SDM sebagai pembangunan yang berdimensi kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan berbagai persoalan masyarakat yang muncul, para sastrawan kita pun mencatatnya, sebagai reaksi kemanusiaan. Baca saja ungkapan-ungkapan dalam sajak-sajak Rendra: *Aku melihat darah di langit. Ya! Ya! Kekerasan mulai mempesona orang. Yang kuasa serba menekan. Yang marah mulai mengeluarkan senjata. Bajingan dilawan secara bajingan. Ya! Inilah kemungkinan yang mulai menggoda orang* (“Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon”); *Gunung-gunung menjulang, Langit pesta warna di dalam senjakala, Dan aku melihat, protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam* (“Sajak Sebatang Lisong”). Tentu saja contoh-contoh semacam itu dapat diperpanjang lagi karena Rendra tidak sendirian. Kita dapat membaca sajak-sajak Darmanto Yatman, Afrizal Malna, Emha Ainun Najib, Taufik Ismail, Sutarji C. Bachri; cerpen-cerpen Umar Kayam, Mochtar Lubis, dan Seno Gumira Ajidarma; novel-novel Pramudya, Ahmad Tohari, dan Ayu Utami; naskah-naskah Putu Wijaya, Rendra, Arifin C. Noor, Nano Riantiarno, dan Ratna Sarumpaet.

Istilah “pembangunan” itu sendiri, setelah sekian lama dipergunakan, akhir-akhirnya lebih menjurus berubah menjadi sebuah “penjara makna” tanpa kita sadari, atau memang kita dibuat tidak sadar terhadap hal itu (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 1993). Kita harus mengartikannya sebagai perubahan kebudayaan dan selalu bersifat positif. Akibatnya, ia dianggap sebagai kata yang mencerminkan satu-satunya kebenaran karena tidak ada pembangunan yang negatif. Ia menjadi begitu hegemonik karena tidak memberikan peluang buat tawar-menawar. Siapapun yang mencoba “menahan” laju pembangunan, dalam arti tidak sejalan dengan garis pemerintah yang berkuasa dengan cara memberikan alternatif dan



tanggapan kritis, akan dituduh sebagai “penghambat pembangunan” dengan berbagai resiko yang harus ditanggungnya, baik yang bersifat sosial, politis, ekonomis, maupun kultural.

## 2/.

Gambaran selintas seperti dikemukakan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa dalam sejarahnya, yakni ketika kritik tajam dibungkam di media massa, ketika budaya akal sehat dikebiri, ketika waskat (pengawasan melekat) digalakkan bersamaan dengan korkat (korupsi melekat) -- pinjam istilah Umar Kayam --, ketika berbagai hal dibuat univokal dan polifoni diharamkan, ketika kebhinekaan dan pluralitas dibuat tidak berdaya, maka daya kreatif maujud lewat dan dalam seni. Oleh sebab itu, sastra bisa dan mungkin saja akan bersifat menggugat, tetapi gugatan yang sekaligus menyodorkan alternatif, yang bisa saja bersifat kritis, konseptualis, negatif, dan terapis. Kutipan teks sajak Taufik Ismail yang menjadi entri tulisan ini dapat dijadikan salah satu contoh yang tipikal. Sajak yang berjudul “**Kembalikan Indonesia Padaku**” itu diciptakan penyairnya pada tahun 70-an, tahun ketika kita sedang “galak-galaknya” melakukan tahapan pembangunan, beberapa tahun setelah lepas dari kekuasaan Orde Lama. Di dalam kutipan tersebut telah dibayangkan bagaimana nasib dan masa depan bangsa kita. Orang boleh berbeda pendapat, apalagi kekuasaan yang hegemonik, terhadap persoalan yang diisyaratkan dalam dan lewat penggalan teks sajak Taufik tersebut. Tetapi, orang juga tidak dapat menyangkal, bahwa apa yang dibayangkan Taufik waktu itu ternyata memiliki kedekatan dengan realitas yang sesungguhnya. Ada homologi struktural antara realitas estetis-literer dan realitas formal.

Pada sisi lain, kekuasaan, kenyataannya, dan ini diyakini dalam waktu yang cukup lama, lebih merupakan sekumpulan teknik untuk mengelola kehidupan publik (lihat: Nirwan Dewanto, 1996). Bahkan, seringkali ia melegitimasi dirinya menjadi satu-satunya penjaga moralitas publik. Untuk itu, kesenian pun, sepanjang dapat ikut mendukung legitimasinya, diberi kesempatan, bahkan diberi ruang gerak seluas-luasnya. Dalam hubungan semacam ini, aspek sastra dalam seni pertunjukan tradisional kita mencatat sejarahnya sendiri. Bagaimana para dalang wayang kulit pada suatu waktu disibukkan untuk membuat lakon “Semar mBabar Jatidiri” dalam berbagai *gagrak* (Ngayogyakarta, Surakarta, Banyuwangi, Semarang, dan seterusnya) merupakan bukti nyata untuk itu, di samping lakon-lakon pesanan seperti “Wahyu Waringin Kencana,” “mBangun Pura Kencana,” sebagai lakon-lakon “politik.”

Ilustrasi di atas mengisyaratkan bahwa ada sastra yang diperhatikan, tetapi ada juga yang harus disingkirkan, diacuhkan,

dan dipasung hingga mampus, merupakan realitas yang pernah kita hadapi. Cukup lama bagi sastrawan semacam Rendra, Mochtar Lubis, dan Emha Ainun Najib untuk dapat menikmati “kemerdekaan” dirinya buat menyuarkan nurani kemanusiaan lewat karya-karya kreatifnya. Sejumlah buku sastra mengalami “penggungtingan” dan pelarangan. Pemiskinan kreativitas lewat cecak dan sensor adalah bukti nyata dari kecerdikan kekuasaan dalam memanfaatkan sastra sebagai faktor kontributif legitimasi keberadaannya. Itulah sebabnya, politik juga akan menjadi berarti: sehimpunan teknik untuk memadukan dan menyatukan berbagai perbedaan dan keberagaman yang ada di kawasan masyarakat sipil. Maka, kebudayaan pun, bagi sastrawan sejati, adalah sebuah arena: sebuah panggung *bargaining* untuk menguji dan memperbaiki mutu dan perilaku kekuasaan.

Sastrawan sejati selalu menyadari bahwa prinsip-prinsip moral dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu dirawat, apalagi ketika pemerintahan dijalankan oleh angan-angan segelintir manusia, dan bukan berdasarkan aturan hukum yang telah disepakati bersama; ketika pertumbuhan organisasi-organisasi kewargaan ditekan, dan bukannya disemai; ketika perbedaan pendapat dibungkam, dan tidak diberi ruang yang cukup (lihat: Anwar Ibrahim, 1998). Sastrawan sejati selalu berupaya menawarkan upaya pencarian keunggulan nilai, dan pengupayaan kebaikan untuk menggantikan sesuatu yang hanya bersifat mediokratis dan beragam atmosfer yang minatnya melulu kepada benda-benda material, bukan pada nilai-nilai intelektual dan artistik. Sastrawan sejati selalu berupaya menawarkan alternatif perubahan menuju penemuan, penghidupan, dan penyegaran kembali semangat kebebasan, individualisme, kemanusiaan, dan toleransi dalam jiwa kita. Keutamaan kecendekiaan dan pengayaan kultural menjadi perhatian utama sastrawan dalam proses kreatifnya, terlebih ketika perspektifnya adalah “berhadapan” dengan kekuasaan. Semua itu dilakukan dalam kerangka “*agar kehidupan bisa terjaga*” (pinjam baris puisi Rendra). Karena, perubahan sosial sebagai bagian dari panggilan sejarah meniscayakan pergeseran yang terus-menerus, retaknya pandangan dunia masyarakat, dan dislokasi, yang bisa saja bermuara pada munculnya histeria sosial yang berpotensi melahirkan manusia yang berwajah garang, berwatak keras, berperilaku brutal dan agresif, serta saling bermusuhan satu sama lain. Oleh karena itu, teks-teks kreatif pun tidak pernah kering dari upaya menanamkan ke dalam dirinya prinsip-prinsip etika dan kebenaran moral yang berasal dari cita-cita peradaban dan warisan intelektual yang benar-benar berakar pada multikulturalitas.

Yang namanya “merdeka” tentulah bukan hanya terbatas pada pengertian merdeka politik (dalam batasan negara dan bangsa),

tetapi juga merdeka dalam hal pemikiran dan jiwa (dalam batasan sebagai manusia-manusia hamba Tuhan). Cita-cita ini mengandaikan pula kemerdekaan dari semua bentuk dominasi manusia lain. Ketika kekuasaan (politik) dihayati dalam sejarah riil kebudayaan, di mana pun, kekuasaan amat biasa memakai ekspresi seni sebagai alat atau kendaraan demi mencapai kepentingannya (lihat: Muji Sutrisno, 1999), dan aspek positifnya sering diabaikan. Padahal, dalam arti positifnya, “ruang dalam” sastra dan kekuasaan sejatinya merupakan ruang tegur-sapa bersama dalam memperjuangkan kemanusiaan. Seperti sudah dilukiskan, dalam kenyataannya kita mencatat bahwa kekuasaan “hanya” memanfaatkan seni, bahkan jika diperlukan memanipulasikannya dengan beragam cara, bukan demi tujuan pemanusiaan. Oleh karena itu, dilema utama para seniman terletak pada pilihan antara mengolah secara kreatif peresapan keresahan, nilai-nilai yang dibungkam kekuasaan dan pilihan berhadapan dengan politik kekuasaan yang mengontrolnya. Titik ekstrem dilema ini ada pada diam-bisunya masyarakat yang tidak pernah disuarakan oleh para seniman, sehingga masyarakat berada dalam tidur panjang keterpasungan.

Masyarakat memang harus dipersiapkan, secara keseluruhan dan tidak dimonopoli oleh sebagian kecil golongan, untuk melakukan transformasi diri dan melepaskan diri dari pengalaman buruk masa lampau, yang dalam bahasa Anwar Ibrahim disebut sebagai tribalisme, feodalisme, kepicikan wawasan, dan fanatisme berlebihan. Hal ini bukanlah berarti mereka harus menghapuskan identitas mereka yang asli, melainkan mereka perlu memperbaharui komitmen kepada nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebajikan, dan kasih sayang, sebagai nilai-nilai universal. Masyarakat terbuka semacam itu tidak mungkin terwujud tatkala rezim kekuasaan menolak pluralisme, polifoni, dan hanya menghendaki satu situasi yang monofonik. Untuk menerjemahkan persoalan tersebut ke dalam realitas, ke dalam kehidupan keseharian dibutuhkan kreativitas, imajinasi, dan keberanian. Dalam konteks inilah teks-teks sastra akan menemukan relevansi dan signifikansinya karena sastra yang baik meniscayakan perhitungan dimensi polifonik.

### 3/.

Penciptaan sastra memang bertolak dari kehidupan keseharian. Dengan kebijakannya, sastrawan biasa menjelajahi realitas pada sisi-sisinya yang paling musykil, yang tak tergapai oleh kaidah masyarakat, apalagi penguasa yang hegemonik, yang baik dan benar, yang penuh kaidah tapi lupa konteks dan tak pernah bersifat situasional. Sastrawan adalah sosok pribadi yang mencoba mengingkari dan sekaligus menerima

dunia; menolak tetapi tidak mampu meninggalkannya. Oleh karena itu, memasuki proses kreatif bagi sastrawan pada hakikatnya adalah menyiapkan sebuah “rancangan” perlawanan, yakni perlawanan tekstual: sebuah pemberontakan (lihat: Albert Camus, 1998) karena pemberontakan adalah sesuatu yang kreatif. Jagat sastra adalah jagat korektif agar kita selalu menimbang dan menimbang lagi jagat kehidupan yang kita miliki.

Keberanian sastrawan dalam mengungkapkan potret kehidupan masyarakat sebagai bentuk “bahasa pilihan”-nya berpotensi memunculkan risiko berhadapan langsung dengan penguasa: pembungkaman. Oleh karena itu, pertimbangan untung ruginya dalam konteks kemanusiaan yang diperjuangkan sudah seharusnya dilakukan: bukan sebagai sebetuk “kekalahan” sastrawan di hadapan kekuasaan, melainkan sebagai upaya budaya yang strategis, yang dalam bahasa Umar Kayam disebut sebagai tesis “dalam rangka.” Dalam hubungan ini, Muji Sutrisno,\*) mencatat adanya empat kemungkinan. *Pertama*, sikap sastrawan yang menyebarkan refleksi irisan-irisan cermin keadaan masyarakat yang dengan kreatif mencari celah-celah ungkapan seninya. *Kedua*, sastrawan berjuang untuk menyebarkan ide-ide pencerahan hasil refleksi ruang batin ciptanya. *Ketiga*, sastrawan mau menghibur saja tanpa mau mengambil tematisasi politik. *Keempat*, sastrawan mau tampil sebagai guru masyarakat yang mau mendidik dengan konsientisasi prinsip kemerdekaan persamaan peradaban dan demokrasi, yang bisa dengan pertunjukan ekspresi simbolik abstrak dan bisa dengan karikatur tajam kritis.

Akhirnya, dengan memperhitungkan pemikiran dan gagasan filosofis dan spiritual masyarakat dalam relasi resiprokalnya dengan kondisi sosial politik di berbagai wilayah di belahan dunia, dan dengan merefleksikan kembali bahwa masa depan peradaban bergantung kepada kembalinya kesadaran spiritual dalam hati dan pikiran umat manusia, sejalan dengan apa yang sudah dikemukakan di depan, dalam hubungan ini sastra dapat dipertimbangkan sebagai salah satu format yang secara spiritual-psikologis ikut mendukung berbagai upaya baru dalam rangka menemukan kembali tatanan sosial dan politik sebagai bagian integral dari rangkaian perubahan sosial.

## **Pustaka Pemandu**

Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Post-Modernisme dan Perubahan Kebudayaan*.

Makalah disampaikan dalam forum diskusi terbatas Lingkaran Studi Ekstase, Fakultas Filsafat UGM, tanggal 18 November 1993.

Selanjutnya lihat juga: Heru Nugroho, *Dialektika Pencerahan dalam Era-Postmodernisme*, sda.; Amich Ahlumami, “*Postmodernisme dan Kebudayaan Kota*” dalam Suyoto dkk,

- Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), h. 97-dst.
- Umar Kayam, “*Budaya Harus Bayar*” dalam *Kompas*, Rabu 17 Maret 1999, h. 4. Menurut Umar Kayam, pepatah Belanda *voor wat hoort wat*, atau pepatah Jawa *jer basuki mawa beya* atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “untuk sesuatu ada sesuatu,” atau “sesungguhnya keselamatan atau kebahagiaan mengandung biaya,” pada zaman Orde Baru telah ditafsirkan secara harafiah.
- HAR Tilaar, “*Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Budaya, Suatu Pemikiran Awal.*” dalam *Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 273 dst.
- Nirwan Dewanto, “*Politik (dan) Kesenian: Pelajaran dari Dua Zaman,*” dalam *Senjakala Kebudayaan* (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 1996) h. 90-dst.
- Anwar Ibrahim, “*Demokrasi dan Masyarakat Madani,*” dalam *Renaisans Asia, Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru* (terj. Ihsan Ali-Fausi, Bandung: Mizan, 1998), h. 49.
- Mudji Sutrisno, “*Ruang Batin Cipta,*” dalam *Kompas*, Minggu 14 Maret 1999, h. 5.
- Albert Camus, “*Seni dan Pemberontakan,*” dalam Ahmad Norma (ed.), *Seni, Politik, Pemberontakan* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1998), h. 1.

# MENGGUGAT KUASA PATRIARKI MELALUI SASTRA FEMINIS

**Dr. Wiyatmi, M.Hum.**

Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: wiyatmi@uny.ac.id

## **ABSTRAK**

*Makalah ini bertujuan menguraikan bagaimana ideologi patriarki yang beroperasi dalam masyarakat dan negara, bahkan juga dalam wacana sastra digugat oleh gerakan sastra feminis. Sastra feminis, yang diciptakan oleh para sastrawan feminis, lahir sebagai genre sastra yang tidak hanya mengusung gagasan kesetaraan gender, tetapi juga ingin menciptakan model penulisan perempuan (écriture feminine). Dalam konteks sejarah sastra Indonesia, tampilnya sejumlah sastrawan perempuan era 2000-an, seperti Ayu Utami, Oka Rusmini, Djenar Maesa Ayu, Dee (Dewi Lestari), Clara Ng, dan Laksmi Pamuntjak dapat ditengarai sebagai puncak perkembangan sastra feminis di Indonesia, setelah sebelumnya diawali oleh Hamidah, Nh, Dini, juga Toeti Heraty. Melalui karya-karyanya, yang hampir semuanya memposisikan tokoh perempuan sebagai subjek, mereka telah berupaya menggugat kuasa patriarki melalui dunia simbolis yang diharapkan mampu menyadarkan masyarakat pembaca mengenai pentingnya keadilan, kesetaraan, dan eksistensi perempuan dalam masyarakat dan negara.*

**Kata kunci:** kuasa, patriarki, sastra, feminis, feminisme

## Pendahuluan

Sastra feminis adalah genre sastra yang mengusung pemikiran (ideologi) kesetaraan gender dan model penulisan perempuan. Melalui karya yang ditulisnya sastrawan menggambarkan dunia yang diwarnai dengan kesetaraan dan keadilan gender, yang menghargai eksistensi perempuan seperti halnya eksistensi laki-laki. Selain itu, sastra feminis juga melakukan kritik terhadap dominasi patriarki dan ketidaksetaraan, serta ketidakadilan gender dalam penulisan sejarah sastra dan kritik sastra. Kemunculan sastra feminis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran dan gerakan feminisme di masyarakat yang juga merambah ke studi sastra.

Feminisme pada dasarnya merupakan ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya (Humm, 2007:15). Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, pelaku dari penindasan perempuan (Humm, 2007:15-18). Feminisme lahir untuk mengakhiri dominasi laki-laki yang berkaitan dengan struktur budaya, seni, gereja, hukum, keluarga inti yang berdasarkan pada kekuasaan ayah dan negara, juga semua citra, institusi, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang tidak dihargai dan tidak tampak (Ruthven, 1985:6).

Dari sejarahnya, feminisme sebagai aliran pemikiran dan gerakan berawal dari kelahiran era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad ke-19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *UNIVERSAL SISTERHOOD* (Abrams, 1999:88; Arivia, 2006:18–19). Sejak kemunculannya pertama kali di Amerika, Eropa, dan Perancis, feminisme telah mengalami perkembangan dan penyebaran yang pesat ke berbagai negara di penjuru dunia. Perkembangan dan penyebaran feminisme tersebut telah memunculkan istilah feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang kedua, feminisme gelombang ketiga, posfeminisme, bahkan juga feminisme Islam dan feminisme dunia ketiga (Tong, 2006).

Makalah ini akan menguraikan eksistensi sastra feminis dalam konteks sastra Indonesia yang ditulis oleh para sastrawan untuk menggugat kuasa patriarki, baik dalam konteks kepengarangan maupun estetika karya sastra. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat ditunjukkan adanya

gerakan yang menginginkan keadilan dan kesetaraan gender melalui dunia simbolis, khususnya karya sastra.

## Sastra Feminis

Di Inggris kelahiran sastra feminis diawali oleh gerakan yang ada di sejumlah perguruan tinggi yang menyadari bahwa hingga tahun 1980-an pembelajaran sastra di universitas-universitas di Inggris didominasi oleh karya-karya penulis laki-laki, terutama Goege Elliot dan Jane Austin, tanpa mengajarkan Emily dan Charlotte Bronte, bahkan menolak Virginia Woolf (Jill LeBihan, dalam Gamble, 2010:163). Hal yang sama juga terjadi di Amerika. Seperti dikemukakan oleh Showalter (1985:128), salah satu dosen sastra Inggris di Universitas Princeton bahwa karya penulis-penulis perempuan telah disingkirkan secara sistematis dari norma kesusastraan yang didominasi oleh laki-laki. Keadaan tersebut mendorong para kritikus feminis untuk menempatkan para penulis perempuan dalam sejarah sastra melalui sastra perempuan (Gamble, 2010:410).

Melalui karyanya *A Literature of Their Own* (1977), Showalter mendorong para peneliti (kritikus) untuk mendapatkan kembali posisi para penulis perempuan dalam sejarah sastra melalui sastra perempuan. Showalter (1985:128-129) membagi sastra perempuan menjadi tiga fase, yaitu fase feminin (1840-1880), ketika penulis-penulis perempuan meniru norma artistik dan standar estetika penulis laki-laki, fase feminis (1880-1920), saat penulis perempuan membuat protes politis dalam tulisan mereka, dan fase female (1920-sekarang), ketika penulis-penulis perempuan telah menemukan jati dirinya. Showalter (1985:130) memperkenalkan istilah ginokritik untuk mengkaji karya-karya yang ditulis oleh perempuan. Ginokritik memberikan perhatian kepada penulis perempuan sebagai pencipta makna tekstual melalui sejatah, gaya penulisan, tema, dan struktur tulisan perempuan secara individu maupun kolektif, serta perkembangan dan konvensi (aturan) tradisi penulis perempuan (Showalter, 1985:129-130).

Di Perancis gerakan sastra feminis dipelopori oleh Helene Cixous, selain Luce Irigaray, dan Julia Kristeva (Sarup, 2003:191). Cixous, seorang novelis dan kritikus sastra Perancis, menggagas praktik menulis feminin yang dihubungkan dengan tubuh (*écriture féminine*). Menurutnya, perbedaan perempuan dengan laki-laki tidak hanya secara seksual, tetapi juga linguistik, sehingga praktik menulis feminin bertujuan untuk menyuarakan dan menulis tentang representasi positif tentang feminitas (Gamble, 2010:262). Melalui *écriture féminine* diharapkan dapat digulingkan maskulinitas sebagai bahasa simbolik (Gamble, 2010:262). Cixous mempraktikkan teorinya mengenai *écriture féminine* dalam karya



fiksi yang ditulisnya yang ditandai oleh penokohan yang tidak pasti, sudut pandang narasi yang tidak stabil, melawan transparansi bahasa yang mencolok, dan menggoyang temporalitas linear (Sarup, 2003:198). Salah satu karya Cixous yang monumental adalah *Le Rire de la Meduse* (1975), yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *The Laugh of Medusa* oleh Keith dan Paula Conan. Dalam karyanya tersebut dia menyuarakan unsur-unsur erotis, ungkapan yang cair dan citra-citra baru, permainan kata-kata dan kekoongan untuk membebaskan tubuh perempuan dari representasi yang ada (Gamble, 2010:262). Selain itu, dia juga mengeksplorasi tema-tema subjektif, akar ragawi bahasa, femininitas, hubungan dengan Yang Lain, dan kemungkinan transformasi sosial dan subjektif (Sarup, 2003:198). Karya fiksinya antara lain adalah *Le Prenom de Dieu* (1967), *Dedans* (1969), *Le Livre de Promethea* (1983).

Kalau Cixous mengaitkan tulisan (sastra) feminis dengan tubuh dan libido perempuan, maka Julia Kristeva menggunakan model analisis Freudian dengan semiologi struktural Lacan. Konsepnya tentang fungsi-fungsi semiotik dan simbolik yang bekerja dalam kehidupan fisik, tekstual, dan sosial didasarkan pada pembedaan dorongan seksual praedipal dan oedipal yang dikembangkan Freud (Sarup, 2003:217). Kristeva tidak mengidentifikasi feminin dengan perempuan secara biologis, atau maskulinitas dengan laki-laki secara biologis. Namun, perbedaan seksual menurutnya ada pada aspek semiotika, saat ibu/anak menyatukan diri, sebuah momen erotisisme, melodi, dan ritme-ritme, keibuan secara jasmani, semua yang mendahului yang simbolis, yang disebut zona paternal (Gamble, 2010:333). Dalam seni dan sastra, titik temu yang semiotis dan yang simbolis berlangsung dalam momen-momen kenikmatan (Gamble, 2010:333). Selanjutnya, Kristeva mengatakan bahwa yang simbolis menekan yang semiotis atau arah-arrah maternal, tetapi hal tersebut muncul ke dalam bahasa dalam bentuk permainan kata-kata atau verbal. Seluruh bahasa menurutnya dibedakan secara seksual. Simbolis maskulin bersifat tetap, dan merayakan koneksi logis dan linearitas, tetapi keistimewaannya ini digugat oleh semiotis yang memuat nada suara feminin sebagai bentuk-bentuk bahasa yang baru yang menghargai kembali femininitas (Gamble, 2010:334).

Selain menjelaskan bahasa secara dalam kaitannya dengan fungsi semiotik dan simbolik maskulin dan feminin, Kristeva juga menjelaskan proses penulisan yang dilakukan perempuan. Menurut perempuan masuk ke tatanan simbolik dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan cenderung menulis dengan satu dari dua cara. Pertama, mungkin mereka menulis buku yang untuk sebagian besar merupakan pengganti kompensasi keluarga, yang meniru struktur keluarga: novel

autobiografi, roman, atau sejarah keluarga. Mereka menulis cerita, citra, atau fantasi sebagai ganti keluarga aktual. Kedua, perempuan menulis sebagai subjek histeris yang terkait pada tubuh dan ritmenya (Sarup, 2003:220). Dari pernyataan ini tampak bahwa Kristeva mendukung lahirnya sastra feminis karena percaya bahwa perempuan memiliki cara menulis yang berbeda dengan laki-laki.

Dalam konteks sastra Indonesia, munculnya sejumlah sasrwan perempuan generasi 2000-an: Ayu Utami, Dewi Sartika, Ratih Kumala, Fira Basuki, Djenar Maesa Ayu, Oka Rusmini, Clara Ng, bahkan juga Dee (Dewi Lestari) dan Abidah El Khalieqy yang mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan hasrat libido, seksualitas, bahkan juga penghayatan tokoh-tokoh perempuan dalam kultur patriarki dapat dikatakan sebagai tengara perkembangan sastra feminis dalam sejarah sastra Indonesia. Melalui karya-karyanya mereka berani memasuki kancah penulisan sastra di Indonesia yang selama ini didominasi oleh para sastrawan laki-laki.

Dominasi sastrawan laki-laki dalam sastra Indonesia tampak dari data yang terdapat dalam *Bibliografi Sastra Indonesia*, Pamusuk Eneste (2001) dan Rampan (1996). Menurut Eneste (2001) sampai tahun 2000 telah terbit 466 judul novel dan 348 judul kumpulan cerpen, tentu belum termasuk cerpen yang berserakan di sejumlah surat kabar dan majalah yang belum sempat dibukukan. Apabila data tersebut ditambah karya tahun 2000 sampai sekarang tentu jumlahnya akan bertambah banyak. Eneste juga menunjukkan bahwa karya-karya tersebut ditulis oleh 5.506 pengarang. Dari jumlah ribuan pengarang tersebut, menurut catatan Korrie Layun Rampan, sampai tahun 1996 (saat ketika dia melakukan penelitian), hanya ada 45 orang novelis perempuan. Data statistik menunjukkan sedikitnya kuantitas perempuan yang ikut perkiprah dalam dunia penulisan fiksi di Indonesia. Berdasarkan data realitas dan data yang dikemukakan oleh Eneste maupun Rampan, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan fiksi Indonesia masih didominasi oleh penulis laki-laki. Hal ini tentu saja berhubungan dengan latar belakang sosio historis masyarakat Indonesia yang berkultur patriarki. Hal ini karena kegiatan tulis menulis berhubungan erat dengan kecendekiaan yang harus dicapai melalui pendidikan, jelas sejak awal kesempatan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan jauh tertinggal dari kaum laki-laki, sehingga kemunculan sastrawan perempuan pun tertinggal dari laki-laki.

Gagasan Cixous mengenai *écriture féminine* ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia. Pada awal tahun 2013, *Jurnal Perempuan* menerbitkan buku kumpulan cerpen berjudul *Menulis Tubuh*, dengan editor dan pengantar Gadis Arivia. Dalam kumpulan cerpen tersebut terdapat cerpen-cerpen karya Dewi Nova, Putu Oka Sukanta, Putu

Wijaya, Oka Rusmini, Ucu Agustin, Djenar Maesa Ayu, Sintia Situmorang, Ayu Utami, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Aisyah, Novita Ardiyawati, Ratri M., Alia Swastika, Dwi Nastiti Arumsari, Indah Surya Wardhani, Uly Siregar, Adji Subela, Fanny Chotimah, Christine Refina, Hikmat Gumelar, Lily Yulianty Farid, Soe Tjen Marching, Ufi Ulfiah, M. Badri, Eliza V. Handayani, Evi Rahmawati Etik Juwita, Shantined, Dewi Ria Utari, Sisca, Helga Worotijan, Purwanti Kusumaningtyas. Dalam pengantarnya Arivia menyatakan bahwa cerpen-cerpen dalam kumpulan tersebut mengangkat tema yang berkaitan dengan ekspresi tubuh dan seksualitas, seperti tampak pada kutipan berikut.

Karya Eliza V Handayani dengan judul “Hak Atas Tubuh, Hak Untuk Ada” memulai diskusi tentang kesehatan reproduksi perempuan yang tidak menikah namun aktif secara seksual. Kritik dilontarkan terhadap ginekolog yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi perempuan. Karya Dwi Nastiti Arumsari dengan judul “Asmaradhana” lebih terbuka membahas kehidupan seksual dengan berbagai tipe laki-laki. Sedangkan Soe Tjen Marching dengan karyanya “Cailleach” mengangkat tema payudara. Berbeda dengan pandangan umum tentang payudara yang selalu digambarkan indah dengan pengertian sepasang, Soe Tjen Marching membahas payudara perempuan yang tinggal satu. Ada rasa risih dan janggal akan tetapi cerpennya berani mengekspresikan bahasa yang jujur dan menukik pada persoalan yang tak lazim di dengar soal perempuan yang berpayudara satu. Penggambaran tubuh yang mengusik pembaca juga ditulis dengan sangat gamblang oleh Djenar Maesa Ayu dengan judul “Menyusu Ayah”. Kekuatan bahasa Djenar menggambarkan sisi gelap seksualitas sebagai sesuatu hal yang wajar memberikan refleksi mendalam tentang persoalan pedofil. Hal yang perlu dicatat di dalam karya-karya Soe Tjen Marching, Djenar Maesa Ayu dan Ayu Utami adalah pembahasan tubuh yang menyatu dengan pikiran.

Penulisan perempuan yang mendiskusikan tubuh mengingatkan kita pada pemikiran feminis-feminis Perancis yang keluar dengan terminologi “menuliskan tubuh” (*writing the body*). Cixous, Irigaray, dan Kristeva merupakan tokoh-tokoh yang mendobrak pemisahan antara *mind* dan *body* serta mengkritik apa yang dinamakan *phallogocentrism*, yakni pemahaman bahwa budaya modern dikonstruksikan secara intelektual yang didominasi oleh pikiran laki-laki atau “phallosentrisme”. Pembongkaran pemikiran laki-laki inilah yang dibutuhkan agar suara-suara marginal seperti perempuan dapat timbul dan memiliki posisi. Tubuh adalah salah satu wacana yang

cukup lama diopresi, apalagi tubuh perempuan dalam perjalanannya selalu dianggap jijik dan kotor (karena seksi dan mengumbar nafsu) sehingga perlu ditutupi atau sebaliknya tubuh perempuan diumbar secara murah dan dijadikan komoditas....

(<http://www.jurnalperempuan.org/reformasi-yang-ditulis-oleh-tubuh-perempuan.html>).

Dari pengantar tersebut tampak adanya arus pemikiran Cixous mengenai *écriture feminin*. Penerbitan antologi cerpen dengan judul *Menulis Tubuh* yang dimotori oleh *Jurnal Perempuan*, (sebuah jurnal pemikiran feminis di Indonesia) tampak merealisasikan pemikiran Cixous tersebut.

### **Menggugat Kuasa Patriarki Melalui Sastra Feminis di Indonesia**

Patriarki adalah sebuah sistem dari struktur sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas, dan mengeksplorasi perempuan (Walby, 1989:213). Sebagai sistem dari struktur sosial patriarki memiliki pengaruh yang sangat luas, tidak hanya di level keluarga, tetapi level masyarakat dan negara. bahkan secara tidak disadari kuasa patriarki juga mempengaruhi berbagai produk sosial, hukum, dan budaya, termasuk karya seni dan sastra. Berbagai karya seni dan sastra di Indonesia bahkan tampak mendukung kuasa patriarki dan memarginalkan kaum perempuan, misalnya *Sitti Nurbaya* (Marah Roesli), *Para Priyayi* (Umar Kayam), *Pengakuan Pariyem* (Linus Suryadi A.G.), bahkan juga *Ayat-ayat Cinta* (Habiburrahman El Shirazy). Dalam sejumlah karya sastra tersebut perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, harus mengalah, dan tunduk pada kuasa patriarki yang disimbolkan pada sosok orang tua dan aturan dan budaya masyarakatnya.

Seiring dengan berkembangnya arus feminisme dan pengarusutamaan gender dalam setiap sendri kehidupan, maka di Indonesia pun mulai muncul sejumlah sastrawan perempuan yang mengusung sastra feminis, khususnya era 2000-an. Kehadiran mereka telah mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk para kritikus. Tanggapan tersebut ada yang bernada memuji seperti halnya disampaikan oleh Gadis Arivia dalam pengantarnya terhadap kumpulan cerpen *Menulis Tubuh*, Sapardi Djoko Damono yang mengatakan bahwa masa depan sastra Indonesia di tangan penulis perempuan (*Kompas* 2 Maret 2006), dan Ibnu Wahyudi yang mengatakan bahwa munculnya sejumlah sastrawan perempuan mengindikasikan akan munculnya generasi baru sastrawan perempuan yang mampu melepaskan diri dari anggapan atau stereotipe yang merendahkan mereka (*Srinthil*, 2006).

Tanggapan negatif antara lain disampaikan oleh Taufiq Ismail dan David Krisna Alka. Dalam Pidato Kebudayaannya di depan Akademi Jakarta pada 20 Desember 2006 yang berjudul “Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka,” Taufiq Ismail mengeluhkan dan merisaukan munculnya arus besar yang menyerbu negeri ini, yakni gelombang yang dihembuskan oleh GSM (gerakan syahwat merdeka) dan aliran SMS (sastra mazhab selangkang) dari para penulis perempuan yang mengangkat tema seksualitas dan tubuh. Para penulis yang dimaksud oleh Taufiq Ismail adalah generasi Ayu Utami dan kawan-kawan. Kritik senada dengan Taufiq Ismail disampaikan oleh David Krisna Alka yang menilai karya-karya Ayu Utami dan teman-temannya sebagai karya antiintelektual karena menjadikan seks begitu liar dan jauh dari kesantunan, seakan tidak ada bahan lain yang lebih mencerdaskan dan menyadarkan daripada sepetar daerah selangkangan (*Sinar Harapan*, 7 Maret 2004). Selain itu, karya-karya Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu dan kawan-kawannya juga sering disebut sebagai sastra wangi dan sastra lendir, yang berkonotasi merendahkan.

Berbagai tanggapan negatif terhadap karya-karya sastra feminis tersebut menunjukkan adanya kuasa patriarki yang selain meremehkan kualitas karya-karya para sastrawan perempuan, juga memberikan anggapan bahwa kaum perempuan harus selalu menjaga sopan santun dalam berekspresi, termasuk dalam mengekspresikan pengalaman keperempuanannya. Kaum perempuan dianggap tidak pantas bercerita tentang seksualitas dan tubuh, terlebih yang berkaitan dengan selangkangan, seperti yang dilakukan oleh Ayu Utami.

*1996. Cerita ini berawal dari selangkangan.*

*Selangkangan teman-temanku sendiri: Yasmin dan Saman, Laila dan Sihar.*

Hahaha. Elu nggak suka ya, cara gue mengawali *diary* ini?

“Norak.”

Ah, Yasmin, dasar lu munafik. Emang kamu pikir apa yang bikin kita berencana ke New York nengok Sakhuntala? Laila ngebet sama laki orang itu, dan elu mau ngentot sama mantann pendeta itu.

“Ya ampun Cok. Kasarnya mulutmu!” “Kita mau lihat pertunjukkan Tala di Lincoln Center. Dan gue punya urusan advokasi dengan Human Rights Watch dan The Free World Forum.”

(Utami, 2001:77).

Lalu, kalau perempuan dianggap tidak pantas bercerita seperti itu, apakah kaum laki-laki pantas? Padahal sejak 1981 Goenawan Mohamad

dalam bukunya *Seks, Sastra*, masyarakat sastra Indonesia sudah memahami bahwa tema seks merupakan hal yang biasa dalam sastra Indonesia. Bahkan jauh sebelumnya, Armijn Pane (*Belunggu*, 1930-an) dan Mochtar Lubis (*Senja di Jakarta*, 1960-an) juga telah mengangkat seksualitas dalam karya mereka. Mengapa ketika hal tersebut digambarkan dalam karya-karya sastrawan perempuan dihujat habis-habisan, terutama oleh para kritikus laki-laki? Jawabnya sederhana, karena merekalah wakil dari suara patriarki.

Meskipun mendapat kritik dan kecaman dari sejumlah pihak, para sastrawan perempuan tersebut tidak juga menyerah. Mereka tetap terus menulis. Dari nama-nama pengerang perempuan yang telah disebut di atas, ada tiga orang yang sangat produktif, yaitu Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, dan Dee. Setelah menulis *Saman* dan *Larung*, Ayu Utami menulis sejumlah novel berikutnya, yaitu *Si Parasit Lajang* (2003), *Cerita Cinta Enrico* (2012), *Pengakuan Eks Parasit Lajang* (2013), *Bilangan Fu* (2008), *Manjali dan Cakrabirawa* (2010), *Lalita* (2012), *Maya* (2014), dan *Simple Miracle* (2015), Demikian pula dengan Djenar Maesa Ayu. Setelah menulis kumpulan cerpen *Mereka Bilang, Saya Monyet* (2002) dan *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* (2004), Djenar juga menulis novel *Nayla* (2005), disusul dengan *1 Perempuan 14 Laki-laki* (2011), dan *SAIA* (2014). Setelah menerbitkan *Supernova, Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh* (2001), Dee (Dewi Lestari) yang semula penyanyi, memantapkan diri menjadi novelis dengan karya selanjutnya, antara lain *Supernova 2, Akar*, (2002), *Supernova 3, Petir* (2004), *Filosofi Kopi* (2003), *Rectoverso* (2008), *Perahu Kertas* (2009), *Madre* (2011), *Supernova 4, Partikel* (2012), dan *Supernova 5, Gelombang* (2014). Kehadiran para pengarang perempuan dan karya-karyanya tersebut dalam kancah sastra Indonesia tentu tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. kalau kita menggunakan fase sastra feminis yang dikemukakan Showalter mereka telah sampai pada fase female, yaitu ketika penulis-penulis perempuan telah menemukan jati dirinya. Menulis dengan gaya penulisan (konvensi) yang mereka ciptakan sendiri yang berbeda dengan karya-karya yang ditulis para sastrawan laki-laki.

Dari sejumlah karya tersebut, ada yang menarik dari karya-karya Ayu Utami, baik pada karyanya yang bergenre autobiografi seperti *Pengakuan Eks Parasit Lajang* dan *Simple Miracles*, maupun novelnya yang mengangkat kembali peristiwa sejarah, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September pada novel *Larung* dan *Manjali dan Cakrabirawa*. Pada kedua novel autobiografinya, Utami dengan jujur dan leluasa mengekspresikan pikiran, pengalaman, dan hasratnya dalam menghayati kehidupannya sebagai subjek perempuan, termasuk

yang berkaitan dengan pengalaman percintaan. Kalau pada kedua karya sebelumnya (*Saman* dan *Larung*), gagasan feminismenya cenderung radikal, maka pada kedua novel autobiografinya, mengarah ke feminisme eksistensialisme. Sebagai perempuan tokoh-tokohnya tidak lagi ingin menaklukkan maskulinitas (seperti tampak pada penaklukan Yasmin, Shakuntala, Laila, dan Cok terhadap teman laki-lakinya dalam *Saman* dan *Larung*), tetapi telah menjelma menjadi subjek dengan kesadaran eksistensialisnya.

Aku akan membuka pintu gerbang itu dan meninggalkan taman.

Setelah kau mencicipi buah dari Pohon Pengetahuan, kau memang harus pergi dari taman surgawi itu. Sekalipun tidak ada malaikat yang mengusirmu, selain dirimu sendiri. Persisnya demikian: setelah kau mengalami rasa pengetahuan... ya, rasa yang menakjubkan itu, rasa yang sekaligus membuatmu makhluk fana... taman itu akan lenyap dengan sendirinya bagimu, seperti istana pasir yang perlahan ditiup angin.

Kini kau hanya bisa melihatnya dengan mata ketigamu: sebuah taman maya yang diam-diam selalu kau rindukan. Sebuah taman di mana kau akan bisa telanjang tanpa menjadi malu dan birahi, sebab birahi dan malu datang bersama-sama, meskipun kau menyangkalnya...

Tapi aku akan membuka gerbang dan meninggalkan Taman. Aku akan membiarkan diriku menghadapi resiko. Aku telah mengetahui diriku. Dan aku ingin ada lelaki yang juga mengetahuinya.

Demikianlah sekali lagi, aku telah memutuskan untuk menutup masa perawanku. Tapi, siapa lelaki itu?

Aku melangkah ke luar taan surgawi....

(Utami, 2010:10).

Kutipan tersebut diambil dari novel *Pengakuan Eks Parasit Lajang*, pada bab “Seorang Gadis yang Melepas Keperawanannya dan Menjadi Peselingkuh.” Tokoh A dalam novel tersebut (dalam fiksi autobiografis merepresentasikan pengarang sendiri) memasuki masa remajanya dengan sebuah kesadaran penuh untuk terlibat langsung dalam kehidupan di luar (masyarakat nyata), setelah berani meninggalkan taman surgawi (rumah orang tuanya) dengan segala kenyamanannya, dia pun siap menghadapi segala resiko, termasuk kehilangan keperawanannya dari laki-laki yang diinginkannya. Bahkan dia siap untuk berselingkuh. Artinya dalam relasinya dengan laki-laki, tokoh A menempatkan posisinya sebagai subjek. Kesadaran akan posisi ini tentu saja berbeda dengan posisi tokoh-tokoh perempuan dalam novel-novel tahun 1930 yang juga ditulis oleh perempuan, *Kehilangan Mestika* (Hamidah, 1934) atau *Manusia Bebas*

(Soewarsih Djojopuspito, 1975), yang walaupun telah terdidik namun masih belum dapat melepaskan diri dari belenggu patriarki.

Pada novel *Larung* dan *Manjali dan Cakrabirawa*, dengan menghadirkan kembali tokoh Calon Arang atau tokoh perempuan yang berkarakter model Calon Arang (Nenek Adjani, neneknya Larung) Ayu Utami melakukan tafsir ulang atas karakter Calon Arang yang dikenal orang selama ini, yaitu seorang nenek sihir penganut ilmu hitam yang jahat dan musuh Raja Airlangga. Dalam *Larung* diceritakan bahwa anak laki-laki Adjani, yang juga ayah Larung, adalah tentara yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965 dan dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga termasuk orang yang harus dibinasakan. Ketika aparat menuju rumah Adjani untuk menjemput anak laki-lakinya, dengan keberaniannya Adjani menghadang mereka di depan pintu, meskipun akhirnya mereka berhasil membawa dan meminasakan anak laki-lakinya yang tidak bersalah itu.

Setahun kemudian. 1965 kau melihat seperti barisan yang sama, kali ini lebih banyak jumlahnya dan lebih nyaring derap dan kentongnya, menuju ke rumah kita. Kau tidak menyadari waktu, tetapi aku mencatat tanggal itu: 21 November. Kau tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi aku menggores semua itu dalam urat-urat jantungku. Mereka datang mengambil anakku, tanpa mengetuk pintu. Sebab sebelum mereka menyentuh daunnya, aku telah berdiri di sana. Telah kudengar sebelumnya, bisik-bisik orang menuduhku menyimpan ular di lipatan stagen. Nenek itu leak, ragda dengan sad tatayi, sebab setiap janda adalah potensi bahaya. Telanjangi dia dari kain pinggangnya maka kita temukan jimat. Telah kudengar itu. Maka kubuka pintu dan kutatap mereka. Tak satu pun mendekatiku tetapi mereka mengambil anakku....

Mereka memfitnahnya, kata ibumu, tidak, kataku, sebab hidup adalah pilihan semena. Suamimu, anakku itu, barangkali bukan komunis, partai yang barangkali tidak kudeta, tapi apa arti semua itu? Orang-orang harus menunjuk orang lain untuk menyelamatkan diri...

(Utami, 2003:68).

Dari kutipan tersebut dapat terbaca suara feminis yang dibawa novel tersebut. Melalui suara nenek Adjani, pembaca diajak mendengarkan suara seorang ibu yang harus kehilangan anaknya dengan kekerasan akibat konflik politik yang terjadi di Indonesia. Sebagai seorang ibu, Adjani tidak percaya bahwa anaknya menjadi bagian dari partai komunis dan terlibat dalam kudeta pada peristiwa G 30 S tahun 1965. Suara tersebut juga



masih tersimak dari novel *Manjali dan Cakrabirawa*. Dalam novel tersebut digambarkan penemuan situs Candi Calwanarang di daerah Jawa Timur, yang berdekatan dengan sebuah desa yang di tahun 1965 dianggap sebagai desa orang-orang PKI. Bersamaan dengan penemuan tersebut, secara tidak sengaja juga ditemukan seorang mantan anggota Gerwani bernama Murni yang selama bertahun-tahun hidup menyendiri di tengah hutan setelah menjalani hukuman di penjara Plantungan karena dianggap terlibat dalam pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya pada malam 1 Oktober 1965. Suaminya, Sarwengi pun dibinasakan karena menjadi anggota Pasukan Cakrabirawa. Novel tersebut menggambarkan bahwa sebagai anggota Gerwani, sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI, Murni yang tidak tahu menahu tentang pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, harus tunduk pada kekuasaan yang membinasakan suaminya, menghukumnya bertahun-tahun, dan menyebabkan dirinya harus terpisah dari anak yang dilahirkannya di penjara. Anak yang dilahirkannya kemudian dirawat oleh Haji Samadiman yang mendidiknya sampai akhirnya berhasil menjadi seorang anggota TNI. Dengan bantuan tokoh Marja Manjali dan Parang Jati, Ibu Murni berhasil menemukan makam suaminya. Parang Jati pun akhirnya mendapatkan jawaban dari ayahnya bahwa Musa Wanara, anak angkat Haji Samadiman adalah anak kandung Murni yang bersuamikan Sarwengi, anggota Cakrabirawa.

Dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki kaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, novel *Manjali dan Cakrabirawa* memberi suara pada tokoh-tokoh perempuan yang telah berkorban dan disingkirkan. Di sini Ayu Utami mengajak pembaca untuk memahami peristiwa tersebut dalam perspektif feminis dan mendekonstruksi pemahaman pembaca tentang keterlibatan Gerwani dan PKI pada pembunuhan para jenderal dalam Gerakan 30 September 1965. Pada bagian akhir novel tersebut pembaca diajak untuk memahami bahwa peristiwa tersebut bukanlah perang antara Pancasila yang suci melawan komunisme yang keji, tetapi harus dipahami bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah konflik politik antara dua kekuatan yang keduanya sama-sama punya kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan. Kesucian dan kekejian hanya wacana oposisi yang mengandung kepentingan ideologis demi kepentingan kekuasaan tersebut. Lebih dari itu, yang penting bukanlah mencari siapa dari keduanya di pihak yang benar atau salah, tetapi memberi perhatian kepada mereka yang menjadi korban, mereka yang tidak terlibat secara langsung tetapi menjadi korban sampai saat ini, khususnya kaum perempuan. Dengan menggunakan kaca mata feminis, pembaca diajak untuk ikut menghayati dan merasakan penderitaan kaum perempuan pasca Gerakan 30 September 1965. Penemuan kembali situs

Candi Calwanarang juga dapat dimaknai sebagai menemukan kembali situs sejarah yang berkaitan dengan sosok perempuan yang di masa lalu dimarginalkan dan dibinasakan karena tidak mau tunduk kepada kekuasaan Raja Airlangga, sebagai simbol patriarki.

Di antara karya-karya Djenar Maesa Ayu, cerpen “Menyusu Ayah” dapat dikatakan salah satu yang cukup mewakili gagasan sastra feminis. Sebelum diterbitkan dalam kumpulan cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)*, cerpen ini pernah dipublikasikan dalam *Jurnal Perempuan* dan mendapat predikat sebagai cerpen terbaik 2002 versi *Jurnal Perempuan*. Cerpen tersebut bercerita tentang seorang anak perempuan yang sejak kecil disusui dengan penis ayahnya. Lama kelamaan teman-teman ayahnya juga ikut bergilir menyusainya. Sampai pada suatu saat, ketika seorang teman ayahnya sedang menyusainya teman sang ayah mereba-raba payudaranya, dan akhirnya menperkosanya. Hal itu menyadarkannya bahwa selama ini dirinya telah diperalat dan dinikmati oleh ayah dan teman-temannya sampai akhirnya ketika teman ayahnya tengah menikmatinya dia memukulkan patung kuda di kepala teman ayahnya hingga laki-laki itu meninggal (“tangan saya meraih patung kuda di atas meja dan menghantamkan ke kepalanya. Tubunya mengejang sesaat sebelum ambruk ke tanah...”). cerpen tersebut ditutup dengan paragraf berikut,

Nama saya Nayla. Saya perempuan, tapi saya tidak lebih lemah dari laki-laki. Karena saya tidak mengisap puting payudara ibu. Saya mengisap penis ayah. Dan saya tidak menyedot air susu ibu. Saya menyedot mani ayah.

Kini saya adalah juga calon ibu dari janin yang kelak akan berubah menjadi seorang anak yang kuat, dengan atau tanpa figur ayah. (Ayu, 2002:112).

Para kritikus patriarkis bisa saja menilai cerpen ini termasuk aliran SMS, GSM, dan jorok. Namun dalam perspektif kritik sastra feminis cerpen tersebut menggambarkan bagaimana seorang anak perempuan, yang masih di bawah umur menjadi korban pedofil. Dia telah dijadikan objek kekerasan seksual ayahnya sendiri. Disusul oleh teman-teman ayahnya. Sebagai anak kecil tentu dia tidak paham bahwa yang dilakukan ayahnya adalah kekerasan seksual karena ayahnya berdalil menyusainya. Oleh karena itu, ketika pada akhirnya dia menyadari bahwa dirinya telah dinikmati dan dijadikan objek kenikmatan seksual ayah dan teman-temannya, dia pun melakukan perlawanan. Dengan menggunakan sudut pandang seorang anak perempuan, cerpen tersebut melakukan kritik tajam

terhadap kuasa patriarki yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak, sebuah kisah yang dapat ditemukan dalam masyarakat, seperti yang terbaca dari berita di media massa.. Dalam cerpen tersebut digambarkan sang ayah yang seharusnya melindungi anaknya, malah berbuat yang merusak anaknya sendiri dan menyerahkan anaknya untuk dirusak oleh teman-temannya sendiri. Dalam cerpen Djenar lainnya "Lintah" digambarkan seorang ibu membiarkan anak gadisnya dirusak oleh pacar ibunya. Dengan menggunakan kacamata anak perempuan, cerpen tersebut mencoba menggugat kuasa patriarki yang tersosok pada superioritas laki-laki pacar ibu yang tinggal di rumah ibu sebagai parasit, menjadi lintah yang tidak hanya menghisab ibu, tetapi juga anak perempuannya.

Gugatan terhadap kuasa patriarki tidak hanya dapat dilakukan melalui penciptaan karya sastra, seperti telah diuraikan di atas. Akan tetapi juga dapat dilakukan melalui kajian (kritik sastra) yang berperspektif feminis, seperti telah dinyatakan oleh Elaine Showalter. Penelitian bersama dengan tim Maman Suryaman, Wiyatmi, Else Liliani, dan Nurhadi (2011) yang menghasilkan produk *Sejarah Sastra Berperspektif Gender* merupakan salah satu upaya untuk melakukan kajian ulang terhadap sejarah sastra Indonesia yang sebelumnya hampir tidak memberikan tempat pada karya-karya yang ditulis oleh para sastrawan perempuan. Dari kajian tersebut sejumlah nama sastrawan perempuan dari generasi 1930-1990-an, yang diabaikan dalam sejumlah buku sejarah sastra yang pernah terbit sebelumnya dimunculkan kembali, seperti Hamidah, Arti Purbadi, Selasih, Soewarsih Djojopuspito, Walujati, Isma Sawitri, Toeti Heraty, Siti Aminah Aziz, S. Rukiah, Eny Sumargo, Marianne Katoppo, Marga T, Nh. Dini, Titis Basino, Naning Pranoto, dan sebagainya. Selain mengungkapkan sejumlah nama sastrawan perempuan penelitian tersebut juga mencoba memahami faktor yang menyebabkan nama dan karya para sastrawan perempuan tenggelam dalam sejarah sastra. faktor tersebut tidak lepas dari jaring-jaring kuasa patriarki struktur ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sastra. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kuasa patriarki tersebut, perlu makin banyak dilakukan kajian ulang terhadap karya-karya sastra di Indonesia dalam perspektif feminis.

## Simpulan

Kuasa patriarki tidak hanya tampak pada tata masyarakat dan negara di Indonesia dan dunia, tetapi juga pada tatanan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karena kuasa patriarki memberikan hak dan kedudukan istimewa kepada kaum laki-laki dan menginferiorikan kaum perempuan, berakibat pada ketidakadilan gender, yang berdampak pada pelanggaran hak-hak azasi manusia, maka harus segera diakhiri. Dalam

wacana ilmu sastra cara mengakiri ketidakadilan gender dilakukan dengan kajian (penelitian) sastra berperspektif feminis. Dalam dunia penulisan sastra, masyarakat perlu memberikan kemerdekaan dan apresiasi kepada para sastrawan perempuan untuk bebas berkreasi dan melahirkan karya-karya sastra feminis yang dapat ikut serta memberikan pencerahan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan, kesetaraan gender, dan menghargai eksistensi perempuan, bukan malah memberikan kecaman dan kritikan yang merendahkan mereka dan karya-karyanya.

Yogyakarta, 11 November 2015

## Daftar Pustaka

- Abrams, M.H. 1981. *A Glossary of Literary Term*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Arivia, Gadis. Editor dan Pengantar. 2006. *Menulis Tubuh, Kumpulan Cerpen Jurnal Perempuan*. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminsme Sebuah kata hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Alka, David Krisna. 2004. "Sastra Indonesia Bukan Gaya Sastra Seks," dalam *Harapan*, 7 Maret 2004.
- Ayu, Djenar Maesa. 2003, "Menyusu Ayah," dalam *Jagan Main-main (dengan Kelaminmu)*. Jakarta: Gramedia.
- Djoko, Sapardi Damono. 2006. "Masa Depan Sastra Indonesia di Tangan Penulis Perempuan." *Kompas* 2 Maret 2006.
- Eneste, Pamusuk, ed. 2001. *Bibliografi Sastra Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Gamble, Sarah. 2010. *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme, dilengkapi dengan Glosarium Tokoh dan Istilah dari A- Z*. Jakarta: Jalasutra.
- Humm, Maggie. 2007. *Ensiklopedia Feminisme*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Mundi Rahayu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
<http://www.jurnalperempuan.org/reformasi-yang-ditulis-oleh-tubuh-perempuan.html>
- Ismail, Taufiq. 2006. "Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka." Pidato Pidato Kebudayaannya di depan Akademi Jakarta pada 20 Desember 2006.
- LeBihan, Jill. Dalam Gamble, Sarah, ed. 2010. "Feminisme dan Sastra," dalam *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme, dilengkapi dengan Glosarium Tokoh dan Istilah dari A- Z*. Jakarta: Jalasutra.
- Rampan, Korrie Layun. 1996. "Novelis Wanita," dalam *Kompas*. 25 Februari 1996.

- Sarup, Madan. 2003. *Post-Structuralism and Postmodernism: Sebuah Pengantar Kritis*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Medhy Aginta Hidayat. Yogyakarta: Jendela.
- Showalter, Elaine. 1985. *The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory*. New York: Pantheon.
- Suryaman, Maman, Wiyatmi, Else Liliani, dan Nurhadi. 2012. *Sejarah Sastra Indonesia Berperspektif Gender*. Yogyakarta: Leukaprio.
- Tong, Rosemary Putnam. 2006. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Aquarini Prabasmoro. Jakarta: Jalasutra.
- Utami, Ayu. 2001. *Larung*. Jakarta: Gramedia.
- Wahyudi, Ibnu. 2005. "Kiprah Perempuan Pengarang di Indonesia Pasca-Saman," dalam *Jurnal Srinthil: Media Perempuan Multikultural*. Jakarta: Desantara.

# KEKUASAAN DALAM BINGKAI BAHASA

**Teguh Setiawan**

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Yogyakarta

## **ABSTRAK**

*Kekuasaan pada dasarnya merupakan usaha untuk dapat mengontrol dan mengendalikan pihak lain. Usaha itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang efektif adalah mengontrol dan mengendalikan lewat bahasa. Dengan bahasa, semua nilai yang menjadi ideologi dapat diperjuangkan untuk diterima sebagai nilai kebenaran umum. Persetujuan atas nilai tersebut dapat menjadi ukuran berkuasa tidaknya suatu kelompok terhadap kelompok lain.*

## **Pendahuluan**

Kata *Indonesia* diciptakan untuk memberi identitas baru pada bangsa, tanah air, dan bahasa. Identitas baru itu tidak dengan mudah untuk dapat diraih. Perlu perjuangan keras agar identitas baru itu diterima oleh publik sebagai suatu entitas baru. Pengakuan atas identitas itu membawa konsekuensi atas hadirnya sebuah negara baru, bangsa baru dan bahasa baru. Artinya, kekuasaan baru akan lahir bersamaan dengan pengakuan atas identitas itu. Perjuangan itu tidak hanya lewat jalur kekerasan (peperangan), tetapi juga lewat bahasa. Melalui bahasa, kelompok dengan identitas baru ini mencoba mempengaruhi dan membujuk semua pihak untuk bergabung dalam satu identitas, yaitu Indonesia.

Dalam perkembangannya, setelah memperoleh keamanan status sebagai bahasa negara dan bahasa nasional melalui kekuasaan sistem hukum yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang berkuasa atas bahasa-bahasa lain. Status ini digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan tujuan untuk mengotrol dan mengendalikan pihak lain yang berbeda. Dalam hubungan itu media masa menjadi penting untuk mengontrol dan mengendalikan pihak lain yang berbeda paham. Disinilah perebutan kekuasaan dimulai, perebutan dalam mengendalikan dan mengontrol pikiran masyarakat agar sama dengan keinginan kelompok.

### **‘Indonesia’ Identitas Baru**

Pernyataan sikap para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda merupakan pengakuan atas kesamaan tanah air, bangsa, dan bahasa. Kesamaan itu diwujudkan dalam satu kata, yaitu Indonesia. Pengakuan tersebut setidaknya memiliki dua makna. Pertama, kata *Indonesia* telah mengikat mereka yang memiliki latar belakang budaya yang berebeda-beda sebagai satu entitas yang bernama Indonesia. Ikatan tersebut telah menghilangkan sekat-sekat perbedaan latar belakang budaya. Konsep diri yang hanya mengakui budaya sendiri sebagai budaya yang lebih baik dan lebih unggul dari budaya lain telah ditinggalkan karena konsep tersebut hanya akan mempertajam persoalan perbedaan. Ikatan dalam payung Indonesia di atas telah membawa konsepsi baru, yaitu kesamaan tujuan di atas perbedaan asal, suku, dan bahasa.

Kedua, kata *Indonesia* menjadi bukti nyata lahirnya identitas baru yang bernama Indonesia. Kata Indonesia telah menjadi identitas atas negara, bangsa, dan bahasa yang mereka cita-cita. Identitas baru ini yang kemudian memper-kuat tekad para pejuang untuk mewujudkan identitas itu. Kata *Indonesia* benar-benar memiliki daya magis yang sangat kuat bagi semua penjuang sehingga Indonesia-lah satu-satunya alasan bagi mereka untuk rela berkorban harta benda dan nyawa. Dalam konsep perjuangan ini kata Indonesia telah mejadi roh untuk merebut kekuasaan dari bangsa asing. Bagi orang asing (penjajah) kata Indonesia menjadi simbol hadirnya kekuatan baru yang berpotensi kuat merun-tuhkan kekuasaannya.

Dalam perjalanannya kata *Indonesia* tidak mudah untuk diperjuangkan, baik sebagai indentitas bangsa, negara, dan bahasa. Sebagai indentitas bahasa kata *Indonesia*, tidak mudah untuk mendudukan bahasa Indonesia berkuasa untuk digunakan di negaranya sendiri. Dalam catatan sejarah (Kridalaksana, 1991) sebelum bahasa Indonesia digunakan sebagai

bahasa pengantar di sekolah dan menjadi bahasa dalam perundang-undangan, pada awal abad 20 bahasa Belanda telah menjadi bahasa yang amat penting di negeri ini. Penguasaan bahasa Belanda tidak hanya menjadi syarat untuk melanjutkan pelajaran barat, tetapi juga sebagai syarat untuk menduduki jabatan-jabatan yang bergaji besar. Kedudukan seperti itu menempatkan orang yang dapat berbahasa Belanda menjadi lapisan strata atas baik dari sisi ekonomi, pengetahuan, pekerjaan, dan kedudukan sosial. Oleh karena itu, banyak bangsa Indonesia yang berduyun-duyun belajar bahasa Belanda agar dapat menjadi golongan atas yang mapan segalanya. Kuatnya kedudukan bahasa Belanda dan perilaku bangsa Indonesia seperti itu mempersulit perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Langkah nyata dilakukan oleh para sastrawan dalam rangka melawan dominasi bahasa Belanda. Tahun 1933 di bawah pimpinan S. Takdir alisjabana, Arminjn Pane, dan Amir Hamzah menerbitkan majalah yang disebut sebagai Pujangga Baru dengan tujuan menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai alat untuk mencapai kebudayaan modern. Inisiatif dan semangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai identitas bahasa semakin menguat. Untuk mewujudkannya digelar kongres bahasa pertama tahun 1938 dengan tujuan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dewan-dewan perwakilan rakyat dan menjadi bahasa dalam perundang-undangan.

Langkah itu tentu saja tidak mendapat respon Belanda. Bagi Belanda menyetujui dan mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di pemerintahan sama saja mengakui adanya kekuasaan lain (negara) yang disebut Indonesia. Belanda benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar kata Indonesia tidak muncul sebagai sebuah identitas, termasuk identitas bahasa. Bahkan pemberlakukan politik Etis sebagai politik balas budi menutup rapat-rapat bahasa Indonesia sebagai nama mata pelajaran dan dan menjadi bahasa pengantar di pendidikan. Belanda hanya membolehkan orang pribumi untuk mempelajari bahasa melayu dengan nama *Malaise Taal*. Penggunaan bahasa Melayu juga hanya dibatasi pada jenjang pendidikan rendah, yaitu MULO. Sebenarnya *ijin* untuk mempepelajari bahasa Melayu di MULO bukan didasarkan pada kesadaran Belanda tentang bahasa Melayu, tetapi didasarkan pada kepentingan Belanda yang memerlukan tenaga terdidik murah untuk memper-lancar tugas pemerintahan dan sebagai bentuk untuk memikat warga pribumi.

Dalam konteks di atas Belanda telah mengambil wujud kekuasaan dalam rupa bahasa. Belanda dengan sengaja memosisikan bahasa Belanda sebagai lambang kekuasaannya. Pekerjaan, posisi sosial, dan derajat kecendikian diukur dari penguasaan bahasa Belanda. Bahkan, Belanda



membatasi orang yang diperkenankan mempelajari bahasa Belanda, yaitu mereka yang berpendidikan atas atau keturunan Belanda, dan orang pribumi yang dianggap pantas untuk mempelajari bahasa Belanda. Pribumi yang mampu berbahasa Belanda dengan baik akan mendapat jabatan yang mapan dan pengakuan dari masyarakat sebagai orang kelas atas. Sebaliknya, Belanda dengan pengaja pula menekan dan membatasi penggunaan bahasa Melayu, dan sama sekali tidak mengakui nama bahasa Indonesia meskipun di kalangan cerdik pandai sudah mengusung nama bahasa Indonesia. Untuk menekan bahasa Melayu (baca bahasa Indonesia), Belanda tidak memberi pekerjaan yang mapan bagi mereka yang menguasai bahasa Melayu dan bahasa Melayu hanya dipelajari di kelas MULO sebagai pelajaran pilihan bukan wajib.

Bagi bangsa Indonesia penggunaan Indonesia sebagai identitas bahasa merupakan keharusan karena pengakuan atas Indonesia sebagai nama bahasa secara tidak langsung mengakui adanya kekuasaan negara dengan nama Indonesia. Keinginan bangsa Indonesia mempunyai identitas Indonesia untuk menamai bangsa, tanah air, dan bahasa dibaca dengan baik oleh Jepang. Oleh karena itu, ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, sebagai salah satu cara untuk menarik pribumi adalah dengan menghapus semua yang berbau bahasa Belanda, dan mengizinkan nama bahasa Indonesia sebagai pengganti *Malaysie Taal* dan dipelajari serta dijadikan bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan. Dalam perspektif bangsa Indonesia, pengakuan nama bahasa Indonesia menjadi suatu kemenangan dan kemajuan serta menandai adanya perkembangan kekuasaan yang telah dibangun oleh para cendekiawan.

Dalam hal ini ada perbedaan cara pandang antara Jepang sebagai penguasa baru pengganti Belanda dan bangsa pribumi (baca Indonesia). Dalam pandangan Jepang, pengakuan bahasa Indonesia merupakan tindakan politik untuk menancapkan kekuasaannya. Sebaliknya, dalam pandangan pribumi, pengakuan bahasa Indonesia merupakan kemenangan politik dalam menghadapi penjajah. Jelaslah, dalam konteks ini bahasa telah menjadi bingkai kekuasaan baik untuk penjajah maupun pribumi.

## **Pelabelan**

Pelabelan merupakan pemberian tanda kepada suatu objek atau entitas tertentu. Dalam proses komunikasi, pelabelan merupakan cara untuk memberi perspektif terhadap suatu entitas. Perspektif tersebut dapat bernilai positif dan negatif. Misalnya di Inggris, istilah *paki* digunakan untuk menyebut keturunan India di Inggris. Siapa saja yang hidup dan lahir dari keturunan India, dengan tanpa memerhatikan tempat kelahiran dan bahasa yang digunakannya akan disebut Paki (Tomas dan

Shan: 1999). Saat kita mendengar kata ini digunakan untuk mengolok-olok atau mencela orang keturunan India, persepsi atau stereotip yang negatif akan terbentuk dalam bentuk tanda *paki*. Istilah ini lahir dari pengalaman negatif yang dialami sekelompok masyarakat dengan orang keturunan India. Karena pengguna bahasa hanya memiliki satu kata untuk menyebut keturunan India dengan label *paki*, pengguna bahasa hanya memiliki satu persepsi orang keturunan India dari sisi negatif.

Kasus serupa sesungguhnya pernah ada pada jaman penjajahan Belanda. Untuk membedakan dirinya dengan orang jajahan, Belanda dengan sengaja menggunakan istilah *inlander* untuk mengacu warga pribumi dengan nilai tambahan negatif. Baginya *inlander* adalah warga kelas tiga yang tidak memiliki pengetahuan, bodoh, dan tak terdidik. Konsep ini lambat laun diterima sebagai kenormalan bagi sebagaian masyarakat kelas atas dan menengah.

Hal itu tidak berbeda dengan kasus masyarakat Malaysia yang menyebut warga negara Indonesia yang bekerja di sana sebagai *Indon*. Sebutan itu digunakan untuk mengacu WNI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam pandangan warga Malaysia pekerja dari Indonesia lebih murah dan dapat dilecehkan dengan begitu mudah. Hal itu sebagai akibat keinginan kuat ribuan pekerja Indonesia di sektor informal ke negara tersebut. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga dari Indonesia, meskipun bukan keturunan atau warga Malaysia, akan menyebut dengan satu kata *Indon*. Dalam hal ini mereka, tanpa memandang dari mana asal negara, hanya memandang tenaga kerja informal dari Indonesia dari sisi negatifnya, yaitu murah, dapat ditipu dan dilecehkan, dan tidak ada perlindungan yang maksimal dari negaranya. Oleh karena itu, kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di sektor informal seringkali terjadi.

Pemberian label negatif seperti itu dapat mengakibatkan kekacauan. Hal itu dapat kita lihat dari label *cina*, orde baru, dan reformasi yang lekat dengan peristiwa tahun 1998. Label *cina* yang digunakan untuk mengacu etnis Tionghoa cenderung berbau SARA. Label *cina* ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada sekitar tahun 1928 kata *Cina* pernah diganti dengan *Tionghoa*. Namun seiring dengan jatuhnya kepemimpinan Soekarno dan masuknya rejim Soeharto, kata *Tionghoa* dikembalikan lagi menjadi *Cina* yang dipertegas dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tertanggal 28 Juni 1967. Dari surat edaran ini dapat diketahui bahwa untuk mengubah kata Tionghoa menjadi Cina diperlukan kekuasaan. Dapat dikatakan label *cina* merupakan produk yang dihasilkan oleh Orde Baru.

Dalam masa Orde Baru posisi *Cina* mendapat angin segar dan

secara tidak langsung telah menempatkan posisi etnis cina dalam kelas strata atas. Kedekatan pemerintah Orde Baru dengan etnis Cina cukup mencolok yang ditunjukkan oleh hubungan yang *akrab* antara presiden dengan tokoh-tokoh konglomerat Cina. Hal itu memberi kesan umum bagi sebagian masyarakat Indonesia bahwa Cina telah mengambil keuntungan besar dari perjuangan yang telah dilakukan oleh warga *pribumi*. Kesan itu semakin kental dengan sikap sebagian warga *cina* yang merasa berbeda dengan warga pribumi, dan terkesan sebagai warga yang eksklusif. Apalagi sebagian korupsi besar yang terjadi pada masa itu melibatkan etnis cina (ingat nama Edy Tansil). Puncaknya, tragedi 1998 menjadi klimaks atas pelabelan cina selama masa Orde Baru. Etnis cina dianggap harus ikut bertanggung jawab krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang disusun oleh krisis politik. Alasan itu menjadi pembenar atas perusakan pada sebagian besar aset cina atau yang berbau cina. Hampir semua orang takut bersinggungan dengan nama identitas *cina*. Bahkan sebuah FTV pun mencoba menampilkan satu potret perlawanan etnis cina dengan judul *Jangan Panggil Aku Cina*, Secara tidak langsung FTV tersebut merupakan refleksi ketidaksukaan mereka untuk disebut cina karena label *cina* sudah terlanjur bernilai negatif.

Dengan berkaca pada tragedi tahun 1998, tahun 2014 pemerintah di bawah kekuasaan Susilo Bambang Yodoyono memnadang penting untuk mengubah nama cina dengan label Tionghoa. Oleh karena itu keluar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 yang intinya mencabut Surat Edaran Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 dan memutuskan untuk penggunaan istilah Cina/China/Tjina menjadi Tionghoa dan mengubah sebutan negara Republik Rakyat China menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), istilah yang dipakai sebelum rejim Orde Baru. Penyebutan dan penggunaan istilah China atau Tjina (ejaan lama) dinilai telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

Apabila label-label itu terus saja digunakan dengan muatan nilai-nilai negatif, tanpa sedikitpun terisi nilai positifnya, akan mendorong semua orang untuk selalu membicarakan label itu dari satu sisi, yaitu sisi negatif. Sebaliknya, apabila label-label tersebut selalu digunakan dengan citra positif-meskipun citra itu dibentuk dengan reduksi makna-semua orang akan menggunakan dan mempresepsi label tersebut dari sisi positifnya saja, kesan-kesan negatif dari label tersebut yang sangat mungkin menyeramkan, mengancam, dan merusak akan hilang. Dengan kata lain, dalam konteks sosial, politik, dan kultural, bahasa telah digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan

makna. Kesuksesan dalam mengontrol makna merupakan perwujudan kekuasaan yang nyata.

Pergantian elite penguasa akan berimplikasi pada pergantian *label*. Setiap elite sesuai dengan ideologinya akan menyusun daftar kata “kamus” yang menjadi ciri khasnya (Santoso, 2003). Penguasa baru ingin menunjukkan kekuasaannya melalui berbagai leksikon dengan makna sesuai dengan maksud penguasa. Pergantian label tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) pergantian daftar leksikon dan (2) pergeseran makna (Rakmat, 1996). Misalnya, pada saat Orde Lama kata *revolusi* merupakan kata yang dianggap tepat mewakili keinginan penguasa Orde Lama, yaitu membangun dunia baru di atas dunia lama, membangun Indonesia yang sama sekali baru. Orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan gagasan revolusi dianggap sebagai kelompok antirevolusi. Sebaliknya dalam era Orde Baru kata *pembangunan* menjadi ciri khas. Kata ini didefinisikan sesuai dengan kepentingan Orde Baru. Orang atau kelompok yang menentang kebijakan atas nama pembangunan dianggap sebagai kelompok anti-pembangunan.

Kata-kata kunci yang menjadi ciri khas penguasa umumnya dijadikan sarana untuk mengklasifikasikan dengan mengontrol lawan (Fairclough, 1989). Seperti kata *revolusi* dan *pembangunan* yang saling berhadapan, pada tahun 1998 saat terjadi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kata *reformasi* juga menjadi sarana untuk mengklasifikasi dan mengontrol lawan. Kata ini sejajar dengan kata *pembangunan* pada masa Orde Baru. Kutipan berikut menandai kuatnya kata *reformasi* sebagai tantangan Orde Baru.

SH: Kalau ada yang menolak sidang istimewa, berarti menghalangi usaha reformasi pemerintah (Santoso, 2003:71).

Pilihan kata *reformasi* pada kutipan di atas digunakan untuk mengontrol pihak-pihak yang tidak setuju dengan sidang istimewa karena mereka yang setuju adalah yang pro reformasi. Dengan kata lain, kelompok atau pihak yang tidak mendukung sidang istimewa dianggap sebagai kelompok anti reformasi. Kata ini sungguh telah menjadi senjata ampuh bagi kaum reformasi untuk melumpuhkan apa yang disebutnya dengan golongan status qua yang tidak menghendaki adanya sidang istimewa. Hampir semua politikus tidak mau disebut sebagai pengikut atau golongan *status qua* yang identik dengan Orde Baru. Mereka ingin disebut sebagai golongan reformasi. Oleh karena itu kata *reformasi* yang pada awalnya digunakan oleh para mahasiswa telah menjadi kosakata penguasa Orde Reformasi.

## **Penggalangan Kekuasaan**

Sebelum membiicarakan perihal kekuasaan dan penggalangan kekuasaan, perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan tentang konsep kelompok yang berposisi dengan individu. Kelompok dalam konteks politik bukan sekumpulan orang yang sedang menunggu bus kota datang atau sekumpulan orang yang sedang mengantri tiket kereta api pulang kampung. Kelompok atau grup yang dimaksud dalam konteks politik adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan ideologi (van Dijk, 2014). Dengan kata lain, ideologi merupakan identitas suatu kelompok. Kelompok ini dapat berupa partai atau usaha bisnis seperti jaringan dagang waralaba, surat kabar dan majalah. Kelompok tersebut akan selalu berusaha untuk menunjukkan identitasnya dan mengotrol kelompok lain dengan ideologinya. Dalam konteks ini telah terjadi usaha untuk menguasai kelompok lain. Apabila kekuasaan dimaknai sebagai kekuatan untuk mengotrol pihak atau kelompok lain, ideologi dapat difungsikan sebagai dimensi mental dalam bentuk pengontrolan atau pengendalian.

Penjelasan di atas mempertegas adanya hubungan yang cukup erat antara ideologi dan kekuasaan. Dalam ilmu sosial dan humanitas, ada banyak konsep kekuasaan. Salah satunya adalah kekuasaan sosial (*sosial power*). Kekuasaan sosial berkaitan dengan kekuasaan kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini kekuasaan mungkin lebih tepat dimaknai sebagai kontrol (van Dijk, 2004). Kontrol ini umumnya diwujudkan dalam bentuk aksi yang dapat berupa membatasi atau melarang gerak kelompok lain. Pembatasan atau pelarangan dapat diwujudkan dalam bentuk pematuhan secara fisik terhadap sebuah aturan tertentu, misalnya, kewajiban untuk membayar pajak, larangan mendirikan bangunan tanpa ijin.

## **Kekuasaan Tersembunyi**

Pengontrolan (baca kekuasaan) tidak selalu tampil dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk nonfisik. Apabila wacana juga merupakan perwujudan dari aksi mengotrol, pemilihan topik, konteks, dan gaya penyajian juga merupakan kontrol atas pihak lain. Media masa berupana bentuk lain pengotrol yang bersita nonfisik. Wacana yang dikembangkan oleh media masa merupakan bentuk pengontrol nyata. Dalam hal ini, kelompok lain tidak memiliki kesempatan dan kekuatan untuk menentukan topik yang akan dimuat surat kabar. Mereka hanya dapat menerima apa yang telah dimuat dalam media masa. Kontrol yang dimainkan oleh media masa adalah kontrol persepsi, pikiran dan pandangan terhadap suatu objek, hal. Dalam padangan Fairclough (1989),

kekuasaan yang disampaikan melalui media masa disebutnya sebagai kekuasaan tersembunyi. Dalam setiap wacana ada maksud yang ingin disampaikan dan diharapkan pembaca menerima dan menyetujui maksud tersebut. Jika demikian yang terjadi, media masa secara tidak langsung telah menguasai cara pandang pembaca terhadap suatu masalah.

Dalam wacana ada pembagian yang tegas antara pembuat dan penginterpretasi; antara pembuat (produsen) dan konsumen (pembaca, pendengar, pemirsa). Wacana media dirancang khusus untuk khalayak masal, sehingga tidak diketahui siapa khalayak pembacanya. Yang dapat dilakukan oleh produsen media itu adalah membidik *subyek yang ideal*, itu mungkin bisa pemirsa, pendengar, atau pembaca.

Produsen menjalankan kekuasaannya atas konsumen dalam bentuk hak tunggal untuk menentukan topik apa yang akan dimuat atau tidak dimuat, bagaimana suatu peristiwa dikemas dan ditampilkan, dan bagaimana arah uraian peristiwa tersebut. Berikut contoh kutipan untuk menunjukkan cara media masa melakukan kontrol secara tersembunyi atas pembacanya.

### **Hukum Masih Tebang Pilih**

Petinggi dan Korporasi yang Terlibat Pembakaran Diminta Diusut Tuntas

Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat dalam perambahan dan pembakaran hutan merupakan kunci mengatasi asap yang sudah setengah abad tidak pernah tuntas. Saat ini, penegakkan hukum dirasakan masih retorika dan tebang pilih.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang dihimpun *Kompas* dalam beberapa pekan ini, lemahnya penegakkan hukum itu masih terjadi di semua wilayah yang saat ini terkena bencana asap.

(*Kompas* 14/11/'15)

Judul artikel di atas sangat jelas menyuarakan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang terkena kabut asap. Ketidakadilan tersebut diungkap dengan tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan perambahan dan pembakaran hutan. Ketidaktegasaan itu diungkapkan secara jelas dengan pernyataan penegakkan hukum dirasakan masih retorika dan tebang pilih. Dari sisi implikatur berbahasa, dapat dipahami bahwa pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap mereka yang memiliki modal besar dan mereka yang memiliki jabatan penting tidak tegas. Pemerintah hanya tegas kepada pelanggar hukum yang secara ekonomi dan status sosial tidak kuat. Artinya, pemerintah tidak berdaya dalam

menghadapi korporasi yang kuat dan orang-orang yang secara politik memiliki kedudukan yang kuat. Bahkan, ada kesan pemerintah melakukan pembiaran atas tindakan korporasi untuk melakukan tindakan pembaka-an hutan. Hal itu dipertegas dengan pernyataan bahwa peristiwa kabut asap tidak hanya terjadi saat ini saja, tetapi sudah terjadi setengah abad. Untuk memperkuat proposisinya atau klaimnya artikel tersebut dengan sengaja mencatumkan nama *Kompas* sebagai pengamat dan pencari informasi. Pencatuman nama *Kompas* berimplikasi bahwa proposisi di atas benar adanya karena dihimpun oleh sebuah lembaga bukan perseorangan. Hanya saja, artikel di atas tidak secara nyata menyebut siapa yang meminta untuk mengusut dan siapa yang harus mengusut. Bentuk pasif *Diminta Diusut Tuntas* sengaja dipilih untuk mengaburkan pelaku, yaitu pelaku yang meminta mengusut para petinggi dan korporasai dan pelaku pengusut. Bentuk kabur tersebut dimaksudkan untuk memberi kesan objektif terhadap isi pemberitaan.

Implikatur-implikatur di atas klaim-klaim yang dinyakan oleh kelompok yang berkuasa merupakan salah satu cara membangun kepercayaan dan membujuk pembaca untuk menyetujui atas klaimnya (Thomas dan Shan, 1999). Dengan implikatur tersbut pembaca dapat memahami asumsi-asumsi yang berada di balik informasi tanpa harus mengungkap asumsi itu secara eksplisit. Dengan demikian akan tumbuh perasaan wajar, normal dan masuk akal pada pikiran pembaca terhadap asumsi dan klaim-klaim tersebut sehingga pembaca secara tidak sadar menerima begitu saja pendapat penguasa sebagai suatu kebenaran, meskipun masih dapat diperdebatkan. Apabila pemikiran yang disampaikan dalam artikel di atas diterima sebagai suatu kebenaran oleh pembaca, sesungguhnya media tersebut telah mengon-trol alam pikiran pembaca. Artinya, artikel dalam media masa tersebut telah menunjukkan kekuasaannya atas pembaca melalui sarana wacana

Pertanyaan muncul, siapa sesungguhnya yang sedang berkuasa di artikel kecil itu? Mungkin wartawan yang menulisnya. Tetapi sudah umum diketahui bahwa wartawan bekerja di bawah arahan seorang editor. Jadi mungkin editor atau lebih luas lagi koran itu sendiri, sebagai sebuah lembaga kolektif. Secara jelas, nama *Kompas* disebut di atas yang secara nyata yang berkuasa adalah lembaga kolektif yang disebut *Kompas*, bukan wartawan atau editor.

Kekuasaan tersembunyi inilah yang digunakan suatu kelompok untuk mengkomunikasikan ideologinya. Penggunaan label *revolusi*, *pembangunan*, *reformasi* yang telah dibahas di atas merupakan contoh nyata kekuasaan yang tersembunyi dengan sarana wacana. Dengan kata lain, ada kerja sama antara penguasa dengan media masa. Penguasa, tidak

harus pemerintah, akan selalu mengulang-ulang label tersebut sebagai cara untuk mengotrol dan mengendalikan pihak lain yang berseberangan dengan ideologinya.

Sebagaimana disebut dia atas bahwa kekuasaan media masa merupakan kekuasaan sosial atau kekuasaan tersebut itu. Kekuasaan ini memerlukan sumber atau dasar kekuasaan sosial seperti kekuatan, uang, gedung, pengetahuan, informasi yang utuh, dan status (van Dijk, 2004). Salah satu modal sosial penting dalam meraih kekuasaan sosial adalah mengases wacana publik. Siapa saja yang dapat mengontrol wacana publik, secara tidak langsung dapat mengontrol pemikiran dan persepsi (termasuk ideologi) masyarakat.

Dari sisi cara pemerolehan kekuasaan, kekuasaan sosial diperoleh dengan cara yang lebih murah dan efektif, yaitu dengan membujuk orang (pembaca) untuk patuh dan menyetujui tujuan pendangannya (Thomas dan Shan, 1999). Dalam konteks ini, media masa berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang diupayakan dan disuarakan olehnya adalah sama dengan yang diinginkan atau dirasakan oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, masyarakat secara perlahan tapi pasti akan menyetujui pandangan-nya.

Sebenarnya ada cara lain untuk memperoleh kekuasaan, yaitu kekerasan. Dalam sejarah sudah banyak peristiwa kekerasan untuk mewujudkan suatu kekuasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini peperangan merupakan salah satu wujud nyata dari kekuasaan lewat kekerasan. Sejarah Indonesia juga pernah merebut kekuasaan dengan cara kekerasan, yaitu saat memerdekakan diri dari tangan penjajang yang sebelumnya merebut kekuasaan kita dengan cara kekerasan pula, yaitu peperangan.

Dalam alam demokrasi, kekuasaan lewat kekerasan ditransformasikan dalam bentuk sistem hukum. Wujudnya adalah segudang peraturan yang mengontrol dan mengendalikan anggota masyarakat. Dengan peraturan tersebut, kelompok lain dapat melarang atau membolehkan suatu perilaku untuk tujuan-tujuan tertentu. Kita membayar pajak, atau membayar denda bagi yang parkir sembarangan atau tidak memiliki surat ijin berkendara. Bagi pelajar, keharusan memiliki nilai TOEFL dalam jumlah tertentu sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa, pekerjaan, atau melanjutkan suatu studi dapat dipandang sebagai wujud kekuasaan lewat sistem hukum.

## **Kekuasaan Bersemuka**

Kekuasaan tidak hanya dapat diraih oleh sekelompok orang yang berideologi sama dan memiliki kekuatan untuk mendukung kekuasaannya.



Dalam tindak komunikasi bersemuka sering kali dijumpai seseorang memiliki dominasi dalam pembicaraan. Dominasi tersebut dilakukan untuk mengendalikan dan mengontrol mitra bicaranya. Dia tidak hanya dapat mengendalikan dan mengontrol topik yang sedang atau yang akan diperbicangkan, tetapi juga kekuatan untuk mengontrol waktu mitra tutur berbicara. Kemampuan tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan adanya kekuasaan individu yang disebut sebagai kekuasaan bersemuka atau nyata (Fairclough, 1989). Dalam kutipan perbincangan berikut ini dapat dilihat kekuasaan individu dalam mengontrol pihak lain.

- Mahasiswa : “Selamat siang Pak.”  
Dosen : “Selamat siang. Ada apa?”  
Mahasiswa : “Saya mau konsultasi [...]”  
Dosen : “Ya, dalam naskah ini di bagian bab II belum ada teori yang secara tegas mengutarakan hubungan antarvariabel, padahal Anda secara substansi akan menguji teori tersebut. Anda tunjukkan di mana keterangan itu ditulis?”  
Mahasiswa : “Sebenarnya sudah ada di ... [ ]”  
Dosen : “Ya benar, tetapi yang Anda nyatakan baru sebatas pengertian variabel yang Anda teliti, Belum ada pernyataan yang mengatakan bahwa variabel tertentu mempengaruhi variabel lain. Lihat pernyataan ini!”  
Mahasiswa : “Jadi saya harus menjelaskan [ ]”  
Dosen : “Ya, Anda harus menjelaskan bahwa secara teoretis variabel X mempengaruhi variabel Y. Jika tidak ada teori yang menyatakan itu, penelitian ini tidak dapat diteruskan. Jadi apa yang harus Anda lakukan ?”  
Mahasiswa : “Baik Pak, akan saya perbaiki sesuai saran Bapak.”

Dalam percakapan di atas ada ciri yang cukup menonjol, yaitu banyaknya waktu dosen menginterupsi percakapan yang ditandai dengan tanda kurung [ ]. Tanda itu mengartikan bahwa mahasiswa belum selesai berbicara, tetapi oleh dosen langsung dipotong. Dalam percakapan tersebut terkesan dosen memborong (mendominasi) semua percakapan. Tindakan menginterupsi atau memotong percakapan merupakan cara dosen untuk mengontrol dan mengendalikan kontribusi mahasiswa. Kontrol gilir tutur itu dapat diketahui dengan pertanyaan dan perintah yang diajukan oleh dosen. Dosen juga mengendalikan apa kontribusi apa yang harus diberikan oleh mahasiswa kepada dosen. Teknik pengendalian yang dilakukan oleh dosen dapat dianggap sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh dosen.

Dalam konstek tersebut mahasiswa itu ‘diletakkan dalam sebuah situasi’ yang tidak memungkinkan untuk tidak menyetujui pernyataan dosen. Ia dalam posisi subordinat. Hubungan kekuasaan lebih tegas dinyatakan dalam ujaran bentuk pertanyaan apa yang harus Anda lakukan? Pertanyaan itu sebenar cukup jelas jawabannya, tetapi sengaja diajukan untuk memberi kesan kekuasaan dosen dan ketidaktahuan mahasiswa.

Berdasarkan contoh di atas, kita dapat mengurai aspek pengendalian sebagai wujud kekuasaan dari tiga aspek, yaitu *Isi (Content)*, apa yang dikatakan dan dilakukan; *Hubungan (Relation)*, hubungan sosial yang dimasukan orang ke dalam wacana; *Subyek (Subject)*, atau ‘posisi subyek’ (Fairclough, 1989). Dari sisi isi dosen memiliki kuasa untuk memilih isi percakapan. Dari sisi hubungan dan subjek, hubungan antara subjek mahasiswa dan subjek dosen tidak seimbang. Dalam hubungan yang demikian, dosen memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa.

## Penutup

Kekuasaan pada dasarnya merupakan kontrol dan pengendalian kelompok atau individu terhadap kelompok atau individu lain. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dengan kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk peperangan atau seperangkat sistem hukum. Kekuasaan dapat pula diraih dengan memanfaatkan bahasa sebagai sarana untuk membujuk pembaca untuk menyetujui dan mengikuti pandangan-pandangan kelompok. Cara ini umumnya dilakukan oleh media masa dan partai. Tidak jarang pelabelan terhadap suatu kelompok untuk memberi citra positif atau negatif juga dilakukan sebagai usaha untuk mengotrol pihak lain. Apabila kekuasaan dikonsepsi secara sebagai kekuatan secara luas untuk mengendalikan dan mengontrol pihak lain, sesungguhnya kita secara pribadi kita semua juga sedang berusaha untuk menjadi penguasa atas diri kita, yaitu mengontrol dan mengendalikan sifat yang kurang baik agar tidak berkuasa atas apa yang kita percayai sebagai sesuatu yang baik dan benar.

## Daftar Pustaka

- A. van Dijk, Teun. 2004. *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction*. Roma: Carroci
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London: Longman.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Kridalaksana, Harimurti. 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: sebuah*

*bungan rampai*. Yogyakarta: Kanisius.

Santoso, Anang. 2003. *Bahasa Politik Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Thomas, Linda dan Shan Wareing. 1999. *Language, Society and Power*. New York : Routledge.



**Bagian Kedua**

# **SASTRA DAN KEKUASAAN**

**: Sebuah Perbincangan lebih lanjut**



# KARYA SASTRA SEBAGAI PRAKTIK KONTESTASI KEKUASAAN SIMBOLIS DAN KEKUASAAN STRUKTURAL OBJEKTIF

**Ali Nuke Affandy**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail: alinukeaffandy@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Karya sastra merupakan praktik sosial hasil dinamika dialektika antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior seorang sastrawan. Internalisasi eksterior dimaksudkan sebagai internalisasi segala sesuatu yang dialami dan diamati dari luar, sedangkan eksternalisasi interior berarti pengungkapan dari segala sesuatu yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari diri seorang sastrawan. Arena produksi kultural sastra pada dasarnya merupakan tempat memperebutkan modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik. Arena praktik kontestasi antara sastrawan dengan sastrawan atau institusi lainnya untuk memperebutkan kekuasaan simbolik ataupun kekuasaan struktural objektif. Dalam kekuasaan simbolik, sastrawan cenderung mengejar kekuasaan untuk mendapatkan legitimasi berupa status klasifikasi karya sastra, pengakuan atau labelisasi karyanya. Sedangkan dalam kontestasi struktural objektif, sastrawan harus menghadapi kekuasaan, karya sastra ciptaannya hadir selain sebagai sebuah eksperimen moral, juga sebagai kenyataan sosial. Ia menghadapi*

*ideologi penguasa, dalam upayanya menancapkan hegemoni, dominasi atau menyubordinasi ekspresi sastra itu.*

**Kata Kunci:** praktik sosial, kontestasi, kekuasaan simbolik, kekuasaan struktural objektif

## **Pendahuluan**

Setiap karya sastra adalah ekspresi diri pengarangnya pada situasi tertentu. Sastra juga produk individu, bersifat individual tetapi juga struktural. Persembahannya kepada masyarakat tak lain dari sumbangan individu (agen) pada kolektivitasnya (struktural). Juga dalam hubungan kekuasaan, standar budaya yang berlaku, sikap pengarang sebagai individu terpancarkan baik dengan sadar atau tidak merupakan habitus pengarang. Sampai di sini tugas pengarang adalah melakukan persepsi, apresiasi dan aksi terhadap semua bidang kehidupan. Laku ini diambil karena pengarang bersangkutan tidak puas, merasa terpojokkan, bahkan tertindas. Ia mendeskripsi, menyeru, melawan, bahkan memberontak.

Hubungan antara teks sastra dan dunia luar teks oleh Swingewood yang dikutip Damono (1979: 19) menegaskan bahwa "sastra berurusan dengan dunia sosial manusia, dengan usaha manusia untuk menyesuaikan diri, dan dengan keinginan manusia untuk mengubah dunia (juga sistem yang berlaku." Salah satu permasalahan yang dihadapi manusia adalah praktik kekuasaan yang selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan berbagai perwujudannya. Keterlibatan sastra dengan persoalan sosial, politik, dan ideologi menghasilkan *literature engagee*, yaitu karya sastra yang digunakan untuk menyebarkan ideologi atau sikap politik tertentu. Tema seputar kekuasaan akan selalu menarik untuk dikemukakan dan diaktualisasikan sepanjang kehidupan manusia karena kendati bersifat netral, pada praktiknya kekuasaan dapat menjadi negatif. Hal itu disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Produksi kultural sastra adalah praktik sosial. Praktik sosial dirumuskan sebagai hasil dinamika dialektika antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior. Internalisasi eksterior dimaksudkan sebagai internalisasi segala sesuatu yang dialami dan diamati dari luar diri pelaku sosial. Sedangkan eksternalisasi interior berarti pengungkapan dari segala sesuatu yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial (Rusdiati, 2003: 33). Aspek interior pelaku sosial dibentuk oleh habitus. Sedangkan aspek eksterior adalah struktur objektif yang ada di luar diri pelaku sosial. Inilah yang disebut arena. Praktik sosial merupakan dialektika antara habitus dan arena. Dengan demikian, perilaku sosial



individu tidaklah bersifat otonom karena ia merupakan produk interaksi antara pelaku sosial dan struktur sosial, interaksi dialektis antara habitus dan arena atau struktur.

### **Praktik Kontestas Kekuasaan**

Praktik adalah hasil pertemuan antara habitus (berikut disposisinya) dengan modal (dalam berbagai bentuknya) dalam sebuah arena tertentu, termasuk arena sastra. Bagi Bourdieu, praktik bisa dipilah berdasarkan tiga ciri. Pertama, praktik selalu berada dalam ruang dan waktu yang spesifik. Ia tidak bisa dipahami sebagai gejala sosial di luar dua kerangka tersebut. Kedua, praktik tidak diorganisasikan atau diorkestrasi secara sadar oleh agen. Akan tetapi praktik juga tidak bersifat kebetulan, karena ia memberikan perasaan tentang apa yang cocok dan tidak dalam suatu keadaan. Ketiga, praktik memilih watak cair yang tidak menentu, ia adalah seni improvisasi. Dalam tataran sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial selalu bersifat sarat ragam dan kompleks. Praktik tidak bekerja di atas dasar aturan-aturan atau norma yang ketat (Hujatnikajenong, 2015: 48).

Setiap praktik kekuasaan terdiri atas konsep praktik kontestasi kekuasaan dan unsur khas praktik kontestasi kekuasaan. Praktik kontestasi produksi kultural sastra pada dasarnya merupakan bentuk tandingan terhadap praktik dominan dalam arena sastra yang dilakukan oleh penulis-penulis mainstream. Penulis tipe ini mengkritik praktik produksi kultural sastra dominan.

Orang-orang yang turut berkontestasi semacam ini biasanya penulis pemula, amatir yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengetahuan soal produksi sastra. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada pula penulis profesional terjun ke dalam bidang ini, untuk menunjukkan keberbedaannya dengan penulis arus utama. Seperti, aktivis, pemrotes atau bahkan warga sekitar. Penulis alternatif menekankan sisi humanis di samping juga mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat objektif. Di sini, penulis menyatakan loyalitasnya kepada masyarakat yang sedang dibela. Sebagai penggerak perubahan sosial, penulis alternatif kerap memaparkan dari sudut pandang yang berbeda.

Di dalam teori praktiknya ini, Bourdieu mampu memberikan penjelasan kultur di masyarakat tanpa harus mengurangi peran individu sebagai agen dan menafikannya dalam konteks sosial (seperti para Marxis). Bourdieu memfokuskan teorinya terhadap hubungan-hubungan kekuatan ekonomi dan politik. Interaksi antara individu dengan institusi, bahkan dengan nilai-nilai penghargaan, selera, kultur dan unsur sosial lain.

## Habitus Sastrawan

Konsep Bourdieu yang paling terkenal adalah “Habitus”. Habitus secara umum diartikan sebagai struktur yang ada dalam diri individu untuk eksistensinya dalam kehidupan sosial. Struktur tersebut tertanam dalam diri individu dan nantinya diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan dalam karya sastranya. Habitus kemudian membentuk sifat yang relatif menetap dalam diri individu. Individu akan bertindak berdasarkan pada habitus dirinya (Wu, 2009: 2). Karya-karya seorang sastrawan cenderung memiliki ciri yang relatif menetap, karena habitus bekerja dibawah ketidaksadaran. Habitus ada saat agen secara tidak sadar mempengaruhi tindakan dan pola perilaku (Mutahir, 2011: 63).

Jadi karya sastra sebenarnya adalah wujud implementasi eksistensi diri atau habitus sastrawan, tindakan dan pola perilaku sastrawan dalam mengejar kekuasaan berupa modal simbolis berupa pengakuan, konsekralisasi atau legitimasi sekaligus reaksi sastrawan sebagai agen terhadap kekuasaan dalam kehidupan sosial (internalisasi struktur objektif). Dengan kata lain, karya sastra merupakan praktik dan representasi sastrawan.

## Modal Sastrawan

Konsep modal sebagai ilmu manusia berbasis interdisipliner yang lentur, yang berupaya memperkenalkan “modal dalam segala bentuk” dan tidak hanya dalam satu bentuk yang diakui oleh teori ekonomi: uang dan barang. Dalam arti ini, Bourdieu hendak mewujudkan sebuah “ilmu umum mengenai ekonomi praktik”, di mana ilmu mengenai praktik ekonomi dalam arti sempit hanya merupakan salah satu subbidangnya (Bourdieu 1986: 242; 1995: 183). Pembalikan teoritik ini perlu kita catat sebab Bourdieu relatif berhasil memberi tafsir baru bahwa modal dalam praktik-praktik sosial yang dihargai, tidak mesti melulu tersekut pada bentuk modal dalam pengertian ilmu ekonomi, yakni barang dan uang, akan tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai modal lain yang bersifat immateriil.

Modal menurut Bourdieu mempunyai definisi yang sangat luas, dan mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolik dan signifikansi secara kultural (Harker, 2009: 10). Bentuk dan wujud modal bisa beragam, bergantung pada ranah tertentu. Sesuatu yang dihargai, artinya menjadi modal, di sebuah ranah belum tentu juga dihargai di ranah lain (Bourdieu dalam Wacquant 1989: 42).

Jadi dapat dirumuskan bahwa modal dapat dimaknai sebagai sekumpulan sumber daya (baik materi maupun nonmateri) yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Modal yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu,

akan menentukan posisi mereka dalam struktur social (Martono, 2012: 32). Semakin banyak dan bentuk modal yang dikuasai seseorang atau sastrawan, semakin memungkinkan untuk mendapatkan kekuasaan yang besar. Adapun bentuk modal bisa dikelompokkan menjadi:

1. Modal ekonomi, yaitu modal yang berupa benda, harta atau uang. Sebagai sastrawan, tidak hanya dituntut mampu menulis, tetapi seorang sastrawan membutuhkan sejumlah modal yang berupa dana berupa barang atau uang agar karyanya bisa diekspresikan, diterima dan diakui oleh orang lain. Karya puisi, cerpen, novel dan drama bisa dicetak, dibukukan atau dibacakan atau dipanggungkan dalam suatu arena kultural.
2. Modal budaya, yaitu kemampuan berbahasa, ekspresi estetika seni, bahkan pendidikan seni sangat mempengaruhi keberhasilan seorang sastrawan dalam menghasilkan karya-karyanya dan penerimaan masyarakat sebagai konsumennya. Modal akademis contohnya, berasal dari pendidikan formal dan bisa diukur melalui gelar atau diploma yang dimiliki. Sedangkan modal linguistik menyoroti kompetensi linguistik sastrawan yang diukur dalam relasinya dengan pasar linguistik spesifik tempat relasi-relasi kuasa yang seringkali dipertaruhkan secara tidak disadari.
3. Modal sosial, yaitu modal yang berkaitan dengan kemampuan interaksi sosial, membentuk jaringan, komunitas, kerja sama dan sebagainya. Sastrawan adalah pekerja bebas tidaklah sepenuhnya benar. Sastrawan membutuhkan komunitas yang merangkul dan mengakui eksistensi kepengarangannya. Antarkomunitas sendiri selalu terjadi persaingan. Tanpa pengakuan komunitas bisa menjadi sastrawan terasing atau “sastrawan mualaf.”
4. Modal simbolik yaitu modal yang mengacu kepada derajat akumulasi prestise, ketersohoran,, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaisance*) dan pengenalan (*reconnaissance*).

## **Arena Sastra**

Arena sastra menawarkan kekuasaan melalui prinsip pengakuan, konsekrasi atau legitimasi. Bourdieu (2010: 17) mengungkapkan bahwa seorang sastrawan bisa terjebak prinsip legitimasi dan situasi ‘kemenduaan’ melalui apa yang disebut *prinsip hierarki heteronom*, yakni pengakuan yang didasarkan pada kesuksesan sebagaimana dapat diukur dari indeks-indeks angka penjualan, yang mendudukan penulis pada posisi subjek yang patuh pada hukum yang berlaku di arena kekuasaan dan ekonomi. Dalam arena ini, prestasi seorang penulis bukan pada seartistik apa karya

yang dibuat, melainkan selaris apa karya sastra itu diserap oleh pasar. Karya –karya Sutan Takdir Alisyahbana, Tetralogi *LaskarPelangi*, novel ‘Islami’ *Ayat-ayat Cinta*, atau bacaan gaul *Dea Lova*, misalnya, berada dalam subarena ini.

Di saat yang sama, arena sastra juga memiliki *prinsip hierarki otonom* yakni derajat konsekstrasi spesifik (prestise kesusasteraan atau artistik) yakni derajat pengakuan yang diterima oleh mereka yang mengakui tidak ada lagi kriteria yang legitimasi dan otonominya didasarkan dari hukum-hukum pasar. Prinsip yang berlaku adalah prinsip sastra untuk sastra: sejauh mana karya yang dihasilkan menawarkan kebaruan atau setidaknya upaya pembaruan gagasan dan estetika dalam sastra. Novel *Hubbu* atau *Cala Ibi*, puisi-puisi Gunawan Muhammad dan Sutardji, mungkin penjualannya tak selaris karya-karya di atas, namun mereka yang tersebut terakhir inilah yang disebut sastrawan, bukan lagi penulis novel atau penulis puisi.

### **Kontestasi Kekuasaan Simbolis**

Sepanjang perkembangan sejarah sastra, selalu saja diwarnai kontestasi antara sastrawan dengan sastrawan atau institusi lainnya untuk memperebutkan kekuasaan simbolik ataupun kekuasaan objektif. Dalam kekuasaan simbolik, sastrawan cenderung mengejar kekuasaan untuk mendapatkan legitimasi, sedangkan dalam kontestasi objektif, sastrawan harus menghadapi kekuasaan, karya sastra ciptaannya hadir selain sebagai sebuah eksperimen moral, juga sebagai kenyataan sosial. Ia menghadapi ideologi penguasa, dalam upayanya menancapkan hegemoni, dominasi atau menyubordinasi ekspresi sastra itu.

Bila dicermati, kontestasi simbolik bisa dilihat mulai dari labelisasi sastra: relegius, sufi, pop, serius, sastrawangi, sastra moral, SMS (*SASTRA MAZHAB SELANGKANGAN*), SSP (Sastra Seputar Kelamin), sastra tanpa serat, sastra propaganda dan sebagainya. Kesemuanya itu mengacu kepada estetika dan etika sastra. Perdebatan tentang label itu tidak pernah ada ujungnya. Pro kontra dan kemenduaan tidak bisa dicegah.

Bukan perkara yang mudah untuk mencari makna dan melabeli teks sastra. Sastra sangat dipengaruhi penggunaan bahasa yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang menjadikannya sulit untuk didekati, kesamaran (*vagueness*), implisit (*inexplicitness*), ketaksaan (*ambiguity*) dan tergantung pada konteks (*context-dependence*) adalah perihwal yang sering menyebabkan kita mengalami kesalahan untuk mencari kebenaran makna dan label dalam teks sastra. Teks sastra selalu berkaitan dengan problematika penafsiran. Yang terjadi adalah munculnya multi-kebenaran yang didapatkan dari proyeksi analisis teks sastra.

Membatasi teks sastra dengan labelisasi adalah kemustahilan. Sebab kajian sastra selalu meluas, satu perbedaan saja, memastikan adanya subgenre baru di dalam sastra. Kemampuan manusia yang selalu terikat dengan simbol, tanda dan identitas adalah penyebab utama. Mereka cenderung untuk memberikan simbol baru pada realitas yang berbeda demi peneguhan identitas—sebagai pembeda atau distingsi dalam kaca mata Bourdieuan.

Sederhananya, etika yang menjlentrehkan oposisi biner (saling berlawanan/berhierarki) sangat disamarkan oleh sastra. Yang benar bisa salah, dan yang salah dapat dipoles menjadi varian kebenaran yang sebelumnya tidak disentuh oleh masyarakat. Sehingga seringkali banyak karya sastra yang dibredel, dilarang dan tidak diterbitkan hanya untuk memenuhi arogansi etika yang selalu mengikat. Sarjono (2006: 3) berpendapat, imajinasi, fantasi, fiksi, dan ekspresi kebaruan yang bebas sebebas-bebasnya bukan “penguasaan tunggal” untuk memperoleh estetika dan stilistik. Semua itu bukan ukuran pencapaian mutu sastra dalam konsep kenusantaraan kita. Ukuran mutu sastra didasarkan atas seberapa jauh kemampuannya menjadi presensi dan representasi tutur aktifitas eksistensial dengan mematuhi, kebulatan, dan kesatuan religiositas, filosofis, etik, dan estetika.

Pilihan salah satu prinsip oleh penulis untuk karyanya tentu saja tidak salah, *SENI ADALAH SOAL INSPIRASI, IMAJINASI DAN HAK ASASI*, seni itu soal selera, dan selera menciptakan warna hingga tampil aliran-aliran dalam khazanah dalam dunia seniman. Hal ini pulalah yang menjadikan arena sastra Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Pro dan kontra selalu ada, sebagai contoh, penulis-penulis yang sealiran Ayu Utami seperti **Clara Ng**, **Dinar Ayu**, hingga **Djenar Mahesa Ayu** tetap berada pada pendirian mereka bahwa tak ada pagar dalam seni. Hal ini berbenturan dengan pemahaman **Taufik Ismail**, **Gola Gong**, hingga **Saut Situmorang** bahwa moral harus juga dikedepankan dalam setiap tulisan. (<http://regional.kompasiana.com/2010/08/03/ayu-utami-jogjadan-selebar-kisah-yang-tersisa-213881.html>). Kecaman **Taufiq Ismail** terhadap maraknya karya sastra yang ia sebut beraliran **SMS (SASTRA MAZHAB SELANGKANGAN)** yang dipunggawai **Hudan Hidayat**, **Ayu Utami**, dan kawan-kawan, tentu tak akan pernah sealur dengan optik penilaian yang dipakai para penentangannya.

Biarlah sebuah karya sastra itu bebas tanpa labelisasi apapun. Karena ketika ada stigma terhadap bentuk sastra, maka ia berpeluang untuk menciptakan konflik di dalam sastra sehingga yang terjadi nilai estetis menjadi hal yang semakin jarang ditemukan dalam karya sastra. Biarlah sastra itu bebas untuk dinikmati, dipandang dari sudut apapun.

Jikalau kita tetap membatasi sastra, maka yang terjadi adalah penindasan terhadap terhadap nilai-nilai atau makna yang sebenarnya ada namun ditiadakan. Akan ada kriminalitas terhadap analisis sastra, sebab pengaruhnya adalah yang berkuasa dialah yang menang dan penafsirannya yang akan diakui orang.

### **Kontestasi Kekuasaan Struktural Objektif**

Hubungan sastra dan kekuasaan bagai dua sisi mata uang, permukaan yang satu tidak bisa dipisahkan dengan permukaan yang lain. Hubungan itu akan selalu beriringan, baik saling bergandengan tangan maupun saling bertentangan. Politik sastra tidak mungkin tidak terjadi, dan kritikus, pengamat dan pembaca umum tidak mungkin tidak ikut terlibat di dalamnya (Bandel, 2013 : 100). Masalah sastra bukan hanya masalah pertunjukan dan karya tetapi juga masalah idealisme dan polemik yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Sejarah membuktikan bahwa keberadaan sastrawan pada masa lalu, acap kali dimanfaatkan oleh pihak kerajaan. Seorang sastrawan dengan hasil karyanya sering dijadikan alat melegitimasi kekuasaan sang raja. Sebut saja Empu Prapanca seorang pujangga pada masa Majapahit ia dipekerjakan di istana oleh raja Hayam Wuruk. Ia juga banyak menulis cerita atau syair tentang kebaikan atau kehebatan sang raja. Ini menunjukkan bahwa sebuah karya sastra diperalat oleh politik untuk memperkokoh kekuasaan.

Sastra yang dominan ini tanpa disadari mengagungkan kelas atau kasta satria, sedang kelas-kelas atau kasta-kasta dibawahnya tidak punya peran sama sekali. Pekerjaan pokok sastra babad, juga mengagungkan kasta satria, yang ditangan para pujangganya menyulap kejahatan atau kekalahan para raja menjadi mitos yang fantastik. (Toer, 2007).

Salah satu contoh bagaimana pujangga Jawa memitoskan kekalahan Sultan Agung, raja pedalaman Jawa, yang dalam operasi militer terhadap Batavianya Belanda pada dekade kedua abad 17 telah mengalami kekalahan total. Akibatnya Mataram kehilangan kekuasaannya atas Laut Jawa sebagai jalan laut internasional. Untuk menutupi kehilangan tersebut pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyai Roro Kidul sebagai selimut, bahwa Mataram masih menguasai laut, di sini Laut Selatan (Samudera Hindia). Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain: bahwa setiap raja Mataram beristerikan Sang Dewi tersebut. Anak mitos lain: ditabukan berpakaian hijau di pantai Laut Selatan. Ini untuk memutuskan asosiasi orang pada pakaian hijau Kompeni Belanda. Tanpa disengaja oleh pujangganya sendiri Sang Dewi telah mengukuhkan kekuasaan para raja Mataram atas rakyatnya. Bahkan menjadi polisi batin rakyat Mataram.

Sastra di sini berhadapan dengan negara, dan dipergunakan oleh negara, dengan fungsi pengagungan kastanya sendiri. Diturunkan dari generasi ke generasi akibatnya adalah menafikan kemajuan zaman, memberikan beban histori yang tidak perlu, membuat orang beranggapan bahwa masa lalu lebih baik daripada yang sekarang.

Arena produksi kultural sastra selalu diwarnai sejumlah aturan yang membayangi ruang gerak mereka. Pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang, sastrawan juga tak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan. Balai Pustaka sebagai penerbit utama karya sastrawan pada masa itu juga tak bisa lepas dari pengaruh dominasi kekuasaan. Sebagai contoh buku-buku sastra yang diterbitkan Balai Pustaka ini harus lolos dari regulasi politik dan etika yang bernama Nota Rinkes. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa hubungan sastra dan kekuasaan pada masa itu memaksa pihak Belanda untuk memperlemah peran sastrawan. Karena dampak sebuah karya sastra sangat besar dalam kehidupan sosial politik. Sebab bacaan pada masa itu masih terbatas apalagi dalam hal ilmu pengetahuan.

Hubungan sastra dan kekuasaan semakin nampak pada masa orde baru. Dominasi kekuasaan dari rezim yang represif sangatlah terasa. Tidaklah sedikit sastrawan yang melakukan perlawanan melalui kritik tajam kepada penguasa dan harus berakhir di jeruji besi, pelarangan tampil berekspresi di muka umum, sampai pada kekerasan penculikan aktivis yang akhirnya hilang entah kemana. Ini menunjukkan bahwa relasi antara sastra dan kekuasaan memang suatu yang nyata adanya. Kadang saling bergandengan tangan tetapi tidak jarang pula saling bertentangan.

Sastra dan kekuasaan di negara terbelakang sampai negara yang paling maju pun karya sastra sangat erat kaitannya dengan hegemoni penguasa. Di Inggris misalnya, banyak karya sastra atau sastrawan yang dibayar agar membuat karya sastra yang bisa melanggengkan kekuasaan raja. Di Amerika juga demikian, karya sastra yang berupa drama, novel dan yang paling modern film sering dijadikan sebagai alat propaganda politik kaum penguasa tertentu. Tidak berbeda halnya dengan kenyataan di atas, karya sastra yang ada di Indonesia. Gambaran yang ada dalam karya-karya sastrawan Indonesia banyak yang berisi propaganda politik tertentu. Tokoh-tokoh seperti W.S Rendra, Muhammad Yamin, Khairil Anwar merupakan sastrawan yang sering menyuarakan kelompok masyarakat tertentu, sebagai upaya mempengaruhi masyarakatnya.

Unsur pembangun yang paling menonjol di dalam karakter karya sastra adalah unsur ekstrinsik yang di dalam hal ini adalah ideologi. Dalam banyak hal, sastrawan yang dipengaruhi ideologi tertentu cenderung menggunakan sastra sebagai “kendaraan kebenaran” atau paham yang mereka anut untuk menyampaikan pikiran mereka. Ketika kebebasan

berekspresi seseorang “dibungkam” dengan aturan yang ada, permainan kata-kata di dalam karya sastra muncul sebagai solusi atau media terbaik untuk mengembangkan dan menyampaikan apresiasi yang sebelumnya tak tersampaikan.

Sastra di beberapa negara menjadi ‘momok’ yang menakutkan bagi para penguasa. Di Rusia pada masa kejayaan Stalin, karya-karya sastra yang menyimpang dari sudut pandang penguasa dan mengganggu kekuasaan disingkirkan dari negara, akibatnya Boris Pasternak dengan karyanya yang dilarang, yakni *Doctor Zhivago* yang nyatanya mendapatkan penghargaan Nobel Sastra. Di Indonesia, realita seperti di Rusia tersebut dengan mudah kita temukan. Wiji Thukul, Pramoedya Ananta Toer, dan beberapa sastrawan Lekra mendapatkan intimidasi dari negaranya sendiri. Selanjutnya, Pramoedya di dalam merespon tulisan Goenawan Muhamad di media *Tempo* menyatakan ‘geram’ atas tingkah pemerintah negaranya sendiri, padahal di Amerika buku-buku karya sastranya diwajibkan di jenjang sekolah tingkat lanjutan. Kemudian, Wiji Thukul mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari negaranya sendiri dan ironisnya karya-karya Wiji Thukul dianggap oleh akademisi negaranya sendiri merupakan karya sastra yang tidak bernilai estetika tinggi, padahal karya-karyanya di negara kincir angin mendapatkan penghargaan *Werthrin Encourage Award*.

Kurun waktu tahun 1981-1988 merupakan sebuah periode di mana kekuasaan Orde Baru melaksanakan pengawasan yang semakin ketat terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang ekspresi kebudayaan. Sejauh menyangkut Tragedi 1965, pemerintah menciptakan tiga sarana-sarana pengingat penting yang dimobilisasikan melalui jalur pendidikan, yaitu: film *PENGKHIANATAN G30S/PKI* (1984), buku *TRAGEDI NASIONAL PERCOBAAN KUP G 30 S/PKI DI INDONESIA* (1989), dan Buku Putih *SEJARAH G30S PEMBERONTAKAN PKI* (1994). Sementara itu, penataran P4 tetap dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Dapat dikatakan bahwa ingatan tentang Tragedi 1965 memasuki wilayah ekspresi kebudayaan.

Tragedi 1965 merupakan sebuah peristiwa kelam yang sangat besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa itu tidak hanya mewariskan luka-luka fisik tetapi juga luka-luka batin akibat terbawanya bangsa ini dalam arus dan suasana kebingasan politik. Enam belas tahun setelah terjadinya G30S, semasa periode 1981-1998, situasi sosial-politik tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberikan kritikan ataupun pandangan yang berbeda daripada pandangan penguasa. Kebebasan pers semakin dibatasi secara sistematis dengan peraturan SIUPP. Kematian sekitar 5000 orang secara misterius akibat operasi yang dikenal sebagai



“Petrus” turut menciptakan suasana yang menakutkan bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan penguasa. Aktivistik-aktivis mahasiswa maupun aktivis politik lainnya banyak yang ditangkap atau bahkan “dihilangkan”.

Situasi seperti ini berpengaruh terhadap produksi seni dan ilmu pengetahuan. Di tengah-tengah situasi sosial-politik yang represif dan militeristik, beberapa produk karya sastra justru muncul dengan semangat perlawanan seperti yang terjadi pada periode 1966-1970. Sebagian lainnya menyoroti Tragedi 1965 secara lebih berjarak.

Negara Orde Baru dalam periode 1981-1998 menunjukkan watak kekuasaan yang semakin otoriter dan militeristik. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi benar-benar dibatasi dan diawasi oleh alat-alat kekuasaan negara, baik dengan cara memaksa (melalui lembaga militer Kopkamtib maupun peraturan kenegaraan) maupun dengan cara membujuk (melalui historiografi dan reproduksi kultural). Sosok negara pada periode ini adalah negara yang maha kuasa, maha menentukan, termasuk hidup dan matinya seorang warna negara Indonesia. Inilah *EPISTEME* Orde Baru dalam periode ini. Akan tetapi, kali ini sastra tidak dapat lagi dijinakkan seperti pada periode sebelumnya (1971-1980).

Orde Baru dibagi menjadi empat masa. Secara cermat, Sarjono (2001: 186) mencatat bahwa setiap masa ditandai oleh kondisi sosial politik yang berpengaruh terhadap penciptaan karya sastra. Masa yang pertama disebutnya Orde Baru I. Bahasan pengajar pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Bandung, ini tentang kecenderungan sastra pada awal Orde Baru ini, sesungguhnya, tak berbeda dengan ahli sastra yang lain; Teeuw dan Keith Foulcher, misalnya. Pada masa itu, dinamika dan partisipasi politik masyarakat demikian tinggi. Pers yang selama Orde Lama dibungkam, diizinkan kembali terbit. Dunia kesenian pun mempunyai ruang dengan dibangunnya Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian Jakarta. Dan, pada saat itulah lahir banyak sastrawan unggul.

Namun masa “makmur” itu tidak berlangsung lama. Masa selanjutnya, yakni era 80-an yang disebut Orde Baru II, sastra berada di tengah lingkungan masyarakat yang mengalami proses depolitisasi. Aktivitas sosial-politik mahasiswa “ditertibkan”, dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari aktivitas politik praktis lewat NKK/BKK. Dalam pada itu, indoktrinasi berupa penataran P4, politik stabilitas, asas tunggal, merupakan lingkungan tempat sastrawan era 80-an hidup.

Di tengah situasi semacam itu, para sastrawan era 80-an dengan berbekal landas estetis era 70-an tergiring masuk ke wilayah yang “sunyi”. Tuhan mulai dipanggil untuk hadir ke kamar-kamar sunyi para penyair.

Tidak mengherankan jika era 80-an ditandai oleh dominannya sajak-sajak ketuhanan dan kecenderungan sufistik.

Pada era 90-an, Orde Baru III, ditandai oleh kecenderungan besar pada keterbukaan; perhatian terhadap hak asasi manusia; upaya pemberian otonomi pada perguruan tinggi; *security approach* mulai dipertanyakan keabsahannya, dan mulai diperkenalkan *prosperity approach*. Namun belum lagi semua ini berjalan mulus, Orde Baru III segera memasuki Orde Baru IV yang ditandai oleh pembredelan *Tempo, Detik, Editor*. Orde Baru IV ini pada dasarnya kembali pada gelagat Orde Baru II, sementara persoalan dan situasi yang dihadapi tidak lagi sama dengan masa Orde Baru II. Di tengah situasi semacam inilah para sastrawan generasi 90-an muncul. Sebagian dari mereka melanjutkan estetika sebelumnya, namun dengan latar sosial politik yang berbeda. Mereka dibesarkan sebagai massa mengambang secara politik, sementara pada saat yang sama mereka berada bukan hanya pada posisi tidak seiring sejalan dengan pemerintah, bahkan bertentangan.

## Simpulan

Yang dibutuhkan sastra Indonesia adalah komitmen kemanusiaan para seniman dewasa yang tidak menyempit pada diri belaka (subjektif). Kita perlu sastra yang bukan Marxis dan bukan kapitalis, melainkan sastra Indonesia yang merdeka dari dominasi siapa pun, termasuk dari dominasi panglima di bidang politik maupun kebudayaan sendiri. Sebuah karya sastra murni tanpa pengaruh atau dominasi apa pun dan siapa pun itu di dalam mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh seorang sastrawan.

## Daftar Pustaka

- Bandel, Katrin 2013. *Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas*. Yogyakarta: Pustaka Hariara.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (penerjemah Yudi Santoso). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- , 1986. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*, New York: Columbia University Press.
- Damono, Sapardi Djoko. 1979. *Sosiologi Sastra: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Fokkema, D.W. dan Elrud Kunne-Ibsch. 1998. *Teori Sastra Abad Kedua Puluh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes (editor). 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Yang Paling*

- Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Penerjemah Pipit „Maizier. Yogyakarta: Jalasutra*
- Hujatnikajennong, Agung. 2015. *Kurasi dan Kuasa*. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mutahir, Arizal. 2011. *Intelektual Kolektif Piere Bourdieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rusdiarti, Suma Riella, “Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan, dalam *Basis*, Nomor 11-12, Tahun Ke-52, Nov-Des 2003, 33.
- Sarjono, Agus R. 2001. *Sastra dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Saryono, Djoko. 2006. *Pergulatan Estetika Sastra di Indonesia*. Malang: Pustaka Kayutangan
- Toer, Pramodya Ananta. 2007. Sastra dan Kekuasaan <https://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/14/sastra-dan-kekuasaan/>
- Wu, Bin. 2009. Whose Culture has Capital?: *Chinese Skilled Migrant Mother Raising Their Children in New Zealand*. Auckland University of Technology. (<http://regional.kompasiana.com/2010/08/03/ayu-utami-jogja-dan-selembar-kisah-yang-ter sisa-213881.html>).

# WACANA KEKUASAAN DALAM KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA *PENEMBAK MISTERIUS DAN SAKSI MATA*

**Andi Batara Indra**

Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: indraandibatara@gmail.com

## **Pendahuluan**

Kekuasaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk yang tidak bisa dihindari oleh manusia, selama manusia tersebut melakukan interaksi di dalam masyarakat. Bentuk dan praktik kekuasaan sudah lama menjadi perbincangan, baik kekuasaan yang berbentuk klasik maupun kekuasaan yang berbentuk modern. Kekuasaan yang berbentuk klasik umumnya terdapat pada sistem kerajaan, sementara kekuasaan modern bisa berbentuk kuasa tubuh, ilmu pengetahuan, ekonomi, kelas sosial, dan lain-lain (Taylor melalui Foucault, 2011: 13-14).

Keberadaan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat menjadi sesuatu hal yang penting untuk diketahui. Kekuasaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi situasi dan kondisi suatu masyarakat. Keberadaan suatu bentuk kekuasaan menjadi alat yang digunakan untuk mengontrol, mengawasi, serta mengubah perilaku individu. Sementara keberadaan sastra di tengah-tengah masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting. Peranan sastra tersebut bisa menjadi sebagai alat untuk merekam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, termasuk bentuk kekuasaan yang terjadi.

Sastra dan kekuasaan dua hal yang berbeda. Perbedaan itu dengan mengembalikan kedudukan sastra sebagai bagian dari kesenian, sementara kekuasaan lebih kepada hubungan yang terjadi di masyarakat. Hal yang

tidak bisa dipungkiri bahwa sastra terkadang berkaitan dengan kekuasaan. Keterkaitan tersebut bisa berbentuk sastra sebagai pengungkapan bentuk kekuasaan yang terjadi di masyarakat ataukah keberadaan sastra itu sendiri di tengah-tengah kekuasaan. Sastra dan kekuasaan menimbulkan perbincangan dan melahirkan berbagai pendapat, baik yang ingin memisahkan hubungan antara sastra dan kekuasaan ataupun yang berpendapat bahwa sastra tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur kekuasaan.

Jika melihat sejarah sastra Indonesia dan menempatkan Balai Pustaka sebagai awal sejarah sastra Indonesia dan pendirian penerbitan Balai pustaka oleh pemerintah Hindia Belanda tidak bisa dipungkiri bahwa sastra dan kekuasaan memiliki hubungan dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Pendirian penerbitan Balai Pustaka oleh pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan menjadi tempat untuk menerbitkan karya sastra tidak serta merta karya sastra yang dikirim ke Balai Pustaka akan diterbitkan, melainkan akan melalui proses penyaringan yang dilakukan oleh komisi *Voor de Volkslektuur* (Iskandar melalui Kratz, 2000: 7). Komisi *Voor de Volkslektuur* akan memeriksa naskah yang dikirim bukan pada wilayah pada kualitas karya, melainkan lebih kepada apakah karya sastra itu tidak membahayakan atau dapat menimbulkan gejolak jika diterbitkan dan dibaca oleh masyarakat. Sehingga beberapa karya sastra tidak bisa diterbitkan bahkan dianggap sebagai bacaan liar.

Sastra dan kekuasaan dua hal yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Said (melalui Viswanathan, 2003: xviii), bahwa membaca karya sastra di luar konteks-konteks politik dan asal usulnya, hanya atas nama apresiasi estetika hanya akan menghasilkan pembacaan yang keliru atau tidak lengkap. Pendekatan-pendekatan seperti itu menutup mata dari adanya keterkaitan yang vital antara estetika dan kekuasaan.

## **Konsep Kekuasaan**

Kekuasaan menurut Foucault bahwa bentuk-bentuk kekuasaan biasanya berbentuk konstitusi (aturan), kedaulatan, dan sebagainya. Foucault memandang kekuasaan dari perspektif Marxis bahwa kekuasaan berbentuk aparat negara. Cara kekuasaan dijalankan secara konkrit dan detail dengan semua spesifikasi, teknik, dan taktiknya yang tak satupun orang dapat memastikannya. Kekuasaan sengaja mengisi dirinya dengan penampilan polemik bahwa seolah-olah sedang beradiah di tengah-tengah konflik atau musuh (Foucault melalui Fonanta & Pasquino, 2002: 144).

Kekuasaan menurut Gramsci (melalui Simon, 2004: 30), bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial

dalam masyarakat sipil juga merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan juga bisa merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Gramsci menggunakan istilah negara integral untuk menjelaskan konsepsi yang baru mengenai watak kekuasaan yang dianggap sebagai hegemoni yang dilapisi dengan kekerasan.

Aredt (2003: 40-44), mengatakan bahwa kekuasaan (*power*) dapat disamakan dengan kemampuan manusia bukan saja untuk bertindak perorangan, melainkan juga bertindak secara bersama-sama. Kekuasaan tidak pernah merupakan hak milik seseorang, kekuasaan merupakan milik satu kelompok dan akan tetap ada jika hanya sepanjang kelompok itu tetap bersama. Jika kekuasaan yang berupa perintah, kekerasan tampak sebagai upaya terakhir untuk menjaga struktur kekuasaan agar tetap utuh terhadap penentangan individual-musuh yang tampak seolah-olah kekerasan adalah prasyarat kekuasaan dan kekuasaan tidak lain adalah bagian depannya. Jadi kekuasaan dan kekerasan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kekuasaan dan kekerasan, meskipun keduanya adalah dua hal yang berbeda, namun bisanya muncul secara bersama-sama. Walaupun kedua hal tersebut digabungkan, kekuasaan merupakan faktor primer dan dominan.

Rousseau (melalui Sudibyo, 2012:3), bahwa individu tidak dapat bertindak dan bersikap di luar kehendak dan persetujuan negara. Negara tidak pernah salah dan tindak dapat dipersalahkan karena kehendak dan tindakan negara selalu selalu merupakan kehendak dan tindakan semua orang. Kekuasaan negara tidak terbatas dan menegaskan jaminan empiris apapun bagi hak-hak rakyat. Secara politis menarik bahwa awalnya negara adalah institusi yang didirikan atas nama warga, namun dalam perkembangannya menjadi kekuatan maha besar yang berhadapan dengan warganya.

Lanjut, Aredt (2003: 50), mengungkapkan bahwa pada saat sekarang ini penyamaan kekerasan dan kekuasaan bersandar pada pemahaman pemerintah sebagai dominasi manusia atas manusia lain oleh alat-alat kekerasan. Jika penaklukan asing berhadapan dengan sebuah pemerintahan lemah dan sebuah negara yang tidak terbiasa dengan pemakaian kekuasaan politik, maka mudah bagi negara tersebut untuk melakukan dominasi.

Foucault (1988: 74-75), mengatakan bahwa instansi yang merepresentasikan kekuasaan adalah negara. Sebuah anggapan bahwa negara dianggap sebagai “seni”. Yaitu, teknik yang sesuai dengan aturan-aturan tertentu di mana aturan-aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan tetapi bertujuan untuk pengetahuan.

Pengatahuan yang sifatnya rasional. Saat ini alasan sebagai ekspresi negara dengan membangkitkan kesewenang-wenangan atau kekerasan. Namun untuk pada saat itu, apa yang ada di dalam pikiran orang adalah rasionalitas tertentu untuk seni mengatur negara yang pada dasarnya adalah memprovokasi. Hal tersebut merupakan pemikiran politik yang baru lahir untuk melihat dan mengamati sifat apa yang diatur oleh negara. Selama beberapa abad, negara menjadi salah satu yang paling luar biasa dan salah satu yang paling mengagumkan dari bentuk pemerintahan manusia.

Foucault (1980: 115), mengungkapkan bahwa sebuah negara akan terus menampilkan kedaulatan-kedaulatan dengan mengatas namakan hukuman. Serta fenomena kekuasaan negara berada pada aparat negara itu sendiri. Misalnya, angkatan darat sebagai bentuk kekuasaan yang mematikan, polisi dan keadilan merupakan contoh dari bentuk hukuman. Hubungan kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara dalam analisis tentu akan melampaui batas negara itu sendiri. Hal yang harus menjadi perhatian bahwa di dalam negara, kekuasaan berada pada aparat negara yang jauh dari mampu menempati seluruh bidang hubungan kekuasaan yang sebenarnya

Foucault (1988: 123), mengungkapkan ada dua model analisis yang digunakan terhadap relasi kekuasaan. Yang pertama adalah, *power as law, Interdiction, and institutional*. Yang kedua, penggunaan militer dalam bentuk kekuasaan *“The military or strategic model in terms of power relations.”* Penggunaan militer merupakan sebuah instrumen dari negara.

## **Wacana Kekuasaan dalam Karya Seno Gumira Ajidarma**

Pengungkapan praktik kekuasaan melalui karya sastra telah banyak dilakukan. Melalui karya sastra, seorang penulis akan memberikan gambaran serta informasi yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik yang terjadi di masyarakat. Posisi inilah yang menyebabkan sebuah karya sastra menjadi sangat vital untuk dilakukan pembacaan berkaitan dengan bentuk kekuasaan dan politik yang terjadi di masyarakat.

Karya sastra sebagai pengungkapan praktik kekuasaan memungkinkan karya sastra sebagai arena refleksi atas peristiwa kekuasaan dan politik yang terjadi di masyarakat. Praktik kekuasaan dan politik yang terjadi di masyarakat yang kemudian terekam ke dalam karya sastra menjadi begitu penting untuk dilakukan pembacaan yang lebih jauh untuk memahami kondisi suatu masyarakat di bawah tekanan dominasi kekuasaan tertentu.

Pengungkapan bentuk kekuasaan yang terjadi masyarakat melalui karya sastra telah dilakukan dan salah satunya oleh Seno Gumira Ajidarma.

Seno Gumira Ajidarma melalui beberapa karya yang telah dituliskannya mencoba memberikan informasi atas suatu bentuk peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya pemerintahan Orde Baru. Seno Gumira Ajidarma tidak hanya sekadar memberikan informasi atas peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran atas kondisi sosial masyarakat di bawah pengaruh kekuasaan Orde Baru.

Melalui karya sastra, khususnya cerita pendek Seno Gumira mengilustrasikan ulang bentuk kekuasaan pemerintah Orde Baru yang dikenal dengan “Penembak Misterius” dan Cerpen Penembak Misterius karya Seno Gumira Ajidarma memberikan informasi yang terjadi pada tahun 1983 sampai pada tahun 1985 yang menjadi praktik pemerintah dalam memerangi kriminalitas di kota-kota dan dengan alasan menjaga stabilitas keamanan nasional. Koran Tempo edisi 21 Mei 1984 mengungkapkan bahwa jumlah korban dari penembak misterius menelan korban lebih dari 10.000 jiwa. Sementara cerpen “Saksi Mata” merupakan peristiwa yang digambarkan oleh Seno Gumira Ajidarma yang dikenal dengan istilah Insiden Dili.

Kumpulan cerpen Penembak Misterius yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma yang menggambarkan bentuk kekuasaan pemerintah Orde Baru di antaranya berjudul *Kroncong Pembunuhan, Bunyi Hujan Di Atas Genteng*, dan *Grhhh*.

## 1. Penembak Misterius

Pada cerpen pertama dalam kumpulan cerpen Penembak Misterius berjudul “Kroncong Pembunuhan” pada cerpen ini menampilkan sosok pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menembak salah seorang tamu pada sebuah acara.

“Dari teras lantai 7 hotel ini, aku masih bisa mengintip lewat teleskop. Angin laut yang basah terasa asin di bibirku. Iseng-iseng sambil menunggu sasaran, aku mencari orang yang berbicara padaku. Dan aku melihat wajah-wajah pada teleskop. Para wanita dengan pakaian malam yang anggun. Ada yang punggungnya terbuka. Cantik sekali. Wanita bersuara halus yang memerintahkanku pun tentu cantik. Aku tak mengira seorang wanita akan terlibat dalam pembunuhan seperti ini...” (Ajidarma, 2007: 4)

Seperti yang dikatakan oleh Rousseau (melalui Sudibyo, 2012:3), bahwa Individu tidak dapat bertindak dan bersikap di luar kehendak dan persetujuan negara. Negara tidak pernah salah dan tindak dapat dipersalahkan karena kehendak dan tindakan negara selalu selalu



merupakan kehendak dan tindakan semua orang. Kekuasaan negara tidak terbatas dan menegasikan jамanian empiris apapun bagi hak-hak rakyat. Secara politis menarik bahwa awalnya negara adalah institusi yang didirikan atas nama warga, namun dalam perkembangannya menjadi kekuatan maha besar yang berhadapan dengan warganya.

Pelaku penembak misterius dalam “Keroncong Pembunuhan” karya Seno Gumira Ajidarma, merupakan alat negara yang ditugaskan untuk menyingkirkan orang atau sekelompok orang yang dinggap berbahaya dengan berbagai bentuk alasan seperti, orang tersebut merupakan penghianat bangsa. Penghianat bangsa harus disingkirkan karena berbahaya akan keutuhan negara. Dengan alasan seperti itu, penembakan yang dilakukan secara tersembunyi atau tindak pembunuhan yang dilakukan dianggap benar adanya.

“Tapi satu hal kau boleh tahu.”

“Apa?”

“Orang itu penghianat.”

“Penghianat?”

“Ya, penghianat bangsa dan negara.”

“Jadi sasaranku adalah seorang penghianat bangsa dan negara.” (Ajidarma, 2007: 5)

Dialog antara penembak dan penyewa atau penyuruh dalam teks tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dilegitimasi dengan alasan penghianat bangsa. Dengan menggunakan alasan sebagai penghianat bangsa, jika penembakan atau pembunuhan yang akan dilakukan, dan bagi penembak itu sendiri tidak akan menimbulkan perasaan simpati atau rasa kasihan karena menganggap tugas yang dilakukannya itu merupakan bagian dari negara atau bagian dari untuk menyelamatkan negara dari penghianat.

Dari cerpen “Keroncong Pembunuhan” yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma, kita bisa melihat dan menarik sebuah pernyataan bahwa seorang yang ditugaskan untuk melakukan pembunuhan pada dasarnya hanya alat yang digunakan oleh negara. Seperti yang dikatakan oleh Foucault (1980: 115), bahwa dalam relasi kekuasaan, aparat militer digunakan sebagai instrument negara.

Cerpen kedua karya Seno Gumira Ajidarma berjudul “Bunyi Hujan Di Atas Genting” memperlihatkan bentuk kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. “Bunyi Hujan Di Atas Genting” menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi sesaat hujan telah reda di mana setiap kali hujan telah reda di situ terdapat mayat yang tergeletak dan bertato. Sebuah alasan yang digunakan pada masa Orde Baru bahwa ketertiban dan keamanan “stabilitas” negara dan rakyat berada dalam

ancaman yang serius yang berasal dari dalam negeri. Anggapan ini merujuk kepada legitimasi atas pembunuhan terhadap orang-orang yang diaanggap berbahaya atau dapat mengganggu keamanan.

“Setiap kali hujan mereda, pada mulut gang itu tergeletaklah mayat bertato. Itulah sebabnya Sawitri selalu merasa gemetar setaip kali mendengar bunyi hujan mulai menitik di atas genting. Pada malam hari, kadang-kadang ia bisa mendengar semacam letupan dan bunyi mesin kendaraan yang menjauh. Namun tak jarang pula ia tak mendengar apa-apa, meskipun sosok mayat bertato tetap saja tergeletak di mulut gang setiap kali hujan reda pada malam hari ...” (Ajidarma, 2007: 15)

Lebih lanjut bagaimana penguasa atau pemerintah membenarkan tindakannya terhadap pembunuhan orang-orang bertato dengan mengatasnamakan untuk menciptakan ketertiban, keamanan negara dan rakyat. Sehingga setiap pembunuhan yang dilakukan terhadap orang-orang bertato masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar demi menjaga keamanan dan bahkan rakyat pun juga merasa senang jika pembunuhan itu terjadi.

“Malahan ia merasa tetangga-tetangganya itu bergembira setiap kali melihat mayat bertato tergeletak dari mulut gang setiap kali hujan reda dan mayat itu disemprot cahaya lampu merkuri yang kekuning-kuningan. Dari dalam rumahnya yang terletak di sudut gang itu, Sawitri mendengar apa saja yang mereka percakapkan. Mereka berteriak-teriak sambil mengerumuni mayat yang tergeletak itu meskipun kadang-kadang hujan belum benar-benar selesai dan anak-anak berteriak hore-hore...” (Ajidarma, 2007: 19)

“Lihat! Satu lagi.”

“Mampus!”

“Tahu rasa dia sekarang.”

“Anjing!”

“Anjing!”

“Kadang-kadang mereka juga mendendang-nendang mayat itu dan menginjak wajahnya...” (Ajidarma, 2007: 19)

Walaupun pada saat pemerintahan Orde Baru ada surat kabar yang memberitakan peristiwa itu, di antaranya koran pos kota 1984 dan tempo edisi agustus 1983, namun masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar. Walaupun sesungguhnya pembunuhan tersebut tanpa melalui proses pengadilan dan hukum secara sah terlebih dahulu.

“Potert mayat-mayat itu kemudian menghilang dari koran-koran. tapi mayat mayat bertato masih bermunculan dengan

ciri yang sama...” (Ajidarma, 2007: 23)

Bisa dikatakan bahwa negara memiliki kekuasaan yang mutlak dan mengontrol semua, baik masyarakat maupun media pada saat itu. Kekuasaan negara semakin kuat dengan alat pengontrol kekuasaannya. Dalam era pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, yang menjadi alat kekuasaan negara adalah militer di bawah komando negara atau pemerintah saat itu.

Peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang bertato tidak hanya dilakukan sekadar melakukan pembunuhan semata, melainkan orang-orang bertato tersebut terlebih dahulu disiksa. Seperti yang digambarkan oleh Seno Gumira Ajidarma pada cerpennya yang berjudul “Bunyi Hujan Di Atas Genting, “Kadang-kadang hanya kedua ibu jari tangannya saja yang disatukan dengan tali kawat. Kadang-kadang kakinya memang tidak terikat, namun mayat-mayat yang tidak terikat itu biasanya lebih banyak lubang pelurunya...” (Ajidarma, 2007: 20)

Selanjutnya, cerita “Grhhh” karya Seno Gumira Ajidarma mencoba merefleksikan bentuk kekuasaan yang telah terjadi pada pemerintahan Orde Baru dengan pembunuhan secara brutal yang dilakukan oleh aparat negara atau alat kekuasaan. Cerita yang berjudul “Grhhh” memperlihatkan kembali korban dari pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya atau dianggap musuh negara. Bahkan pers bisa dikatakan berada dalam kendali kekuasaan. “Pers sekarang selalu membesar-besarkan persoalan yang tidak penting, sambil menutup-nutupi masalah yang sebenarnya...” (Ajidarma, 2007: 29)

Bentuk kekejaman kekuasaan yang dilakukan terhadap orang-orang bertato pada masa pemerintahan Orde Baru kembali digambarkan, bahwa mayat hidup yang bakit berasal dari kuburan yang luas dengan pengertian bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap orang-orang bertato dikuburkan secara massal. Anggapan Orde Baru bahwa orang-orang bertato adalah musuh negara yang bisa mengancam dan keberadaannya dianggap meresahkan sehingga perlu dimusnahkan. “Komandan! Salah satu sombi atau mayat hidup adalah Ngadul! Salah satu korban pembantaian misterius yang lengendaris di lubang besar! Saya bisa mengenalnya pak! Ia muncul di markas” (Ajidarma, 2007: 35)

Cerpen yang berjudul “Arghhh” karya Seno Gumira Ajidrama pada bagian akhir memperlihatkan betapa banyak orang yang dibunuh karena dianggap sebagai penjahat. Bahkan di antara yang terbunuh itu kebenarannya sebagai pelaku tindak kejahatan tidak terbukti bahkan orang-orang yang terbunuh tersebut tidak memiliki hak ataupun kesempatan untuk membela dirinya di pengadilan atau di mata hukum. Bahwa kekuasaan mengontrol individu. Dan pembantaian yang dilakukan

secara misterius yang dituliskan oleh Seno Gumira Ajidarma merupakan pembunuhan yang dilakukan secara tidak wajar.

“Apakah bapak tidak ingat? Bersama Ngadul enam ribu penjahat kelas teri terbantai secara misterius! Masih Ingat pak?”

“Masih kenapa?”

“Kebanyakan mayatnya terkuburkan di lubang besar pak komandan!”

“Aku tahu, lantas kenapa?”

“Ada laporan bahwa banyak di antara mereka sudah tidak aktif lagi pak! Yang terbantai secara misterius itu sudah banyak yang insyaf pak! Dan mereka semua tidak disembahyangkan pak! Waktu itu tidak ada yang berani! Takut ikut terbantai pak! Habis waktu itu siapa saja bisa terbunuh secara misterius pak!” (Ajidarma, 2007: 36)

Pada pemerintahan Orde Baru seolah tidak ada kesempatan untuk berbicara. Karena ketika dianggap mencurikan bisa di ciduk ataupun bisa ikut di bunuh. Hal tersebut yang coba kembali diperlihatkan oleh Seno Gumira Ajidarma dalam cerpennya yang berjudul “Arghhh” bahkan bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Baru baru adalah era pembantaian bagi orang yang dianggap sebagai musuh atau dianggap berbahaya terhadap sebuah bentuk kekuasaan yang ada.

“Kamu mimpi ya bintanga Sarman? Kamu ngelindur! Itu semua omong kosong! Kita sedang mengimpor rudal dari luar negeri! Kamu dengar itu? Enam ribu rudal sedang dikapalkan kemari! Mereka akan dibantai.” (Ajidarma, 2007: 36)

Dari penggalan percapan tersebut, bahwa kekuasaan negara tidak lagi memandang yang dikatakan penegakan hukum. Seseorang atau sekelompok orang yang dianggap berbahaya atau mengancam bentuk kekuasaan yang ada, maka kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tidak akan segan untuk melakukan tindakan pembunuhan. Bahkan dalam skala besar yang berbentuk pembantaian. Bentuk pembantaian yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru digambarkan Seno Gumira Ajidarma dalam cerpen “Arghhh.” Mayat yang hidup kembali dan ingin membalas dendam.

## 2. Saksi Mata

Cerpen selanjutnya karya Seno Gumira Ajidarma terkumpul dalam buku yang berjudul *Saksi Mata*. Cerpen-cerpen yang termuat dalam kumpulan “Saksi Mata” di antaranya *Saksi Mata*, *Telinga*, dan *Listrik* yang memuat konflik berdarah yang pernah terjadi di Timur Timur yang

dikenal dengan istilah Insedan Dili. Seno Gumira Ajidarma melalui karya yang dituliskannya mencoba memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi di Timur-Timur yang dikenal dengan Insedan Dili. Peristiwa yang terjadi dalam kurung tahun 1991.

Cerpen pertama berjudul “Saksi Mata” Seno Gumira Ajidarma menceritakan seorang yang datang ke pengadilan untuk bersaksi atas suatu kasus yang terjadi. Seorang saksi mata yang tidak memiliki mata dan kedua bola matanya telah diambil. Dari kedua bola mata itu terus mengalir darah.

“Hakim mengetuk-ngetukkan palunya. Suara lebah menghilang”

“Seragam tentara maksudnya?”

“Polisi?”

“Hansip Barangkali?”

“Itu lho, Pak, yang hitam-hitam seperti di film-film.”

“Mukanya ditutupi?”

“Iya Pak, cuma kelihatan matanya.”

“Aaah, saya tahu! Ninja, kan?”

“Nah, itu Pak, Ninja! Mereka itulah yang mengambil mata saya dengan sendok.” (Ajidarma, 2010: 10)

Seno Gumira Ajidarma (2010: 15) memberikan catatan kaki “Ninja” berasal dari kata *ninjutsu* yang merupakan istilah bagi seni spionase dalam tradisi Jepang. Seorang prajurit yang melakukan gerakan rahasia ke wilayah musuh untuk mencuri dokumen, meracuni, atau membunuh musuh secara canggih yang pertama kali diajarkan oleh Otomo no Hosoto.

Melalui cerpen “Saksi Mata” seorang saksi mata atas peristiwa pembantaian berdarah sebelum pengadilan terlebih dahulu mendapatkan teror sampai kepada bentuk penyiksaan. Hal tersebut biasa dilakukan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak menginginkan suatu peristiwa terungkap. Maka dari itu, teror sampai kepada bentuk penyiksaan fisik menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk membungkam orang-orang yang melihat kejadian atau peristiwa tersebut.

“Saudara saksi mata masih mengingat semua kejadian itu meskipun tidak bermata lagi?”

“Saya, Pak.”

“Saudara masih ingat bagaimana pembantaian itu terjadi?”

“Saya, Pak.”

“Saudara masih ingat bagaimana mereka menembak dengan serabutan dan orang-orang tumbang seperti pohong pisang ditebang?”

“Saya. Pak.”

“Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang-orang mengerang, dan mereka yang masih setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati?”

“Saya. Pak.”

“Ingatlah semua itu baik-baik, karena meskipun banyak saksi mata, tidak satupun yang bersedia menjadi saksi mata di pengadilan kecuali saudara.” (Ajidarma, 2010: 13)

Dari percakapan tersebut antara saksi mata dan hakim, Seno Gumira Ajidarma memperlihatkan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Melalui alat kekuasaan yang itu pihak militer, pihak penguasa melakukan pembantaian kepada seorang atau sekelompok orang yang dianggap musuh bagi negara. Tidak hanya itu, hal yang bisa juga ditarik bahwa pada dasarnya pembantaian yang dilakukan pihak militer sebagai instrumen kekuasaan negara bisa saja diungkapkan melalui penegakan hukum. Namun, seperti yang digambarkan oleh Seno Gumira Ajidarma, tidak adanya orang yang ingin bersaksi atas peristiwa tersebut, karena ketika seseorang ingin bersaksi atas suatu peristiwa yang menyangkut dengan kekuasaan negara, terlebih dengan pemerintahan Orde Baru, maka seseorang tersebut akan mendapatkan teror bahkan akan mengalami hal yang sama dengan tokoh Saksi Mata dalam cerpen “Saksi Mata,” yaitu teror dan penyiksaan.

Cerpen selanjutnya berjudul “Telinga.” Pada cerpen ini, Seno Gumira Ajidarma menggunakan tokoh Alina yang ingin mendengar cerita kekejaman dari seorang juru cerita. Maka diceritakanlah sebuah cerita seorang kekasih yang bertugas di medan perang dan mengirimkan kekasihnya telinga. Seno Gumira Ajidarma memberikan gambaran penyiksaan dan pemabantaian yang dilakukan oleh pihak militer kepada orang yang dianggap dicurigai sebagai mata-mata pemberontak.

“Kukirimkan telinga ini untukmu Dewi, sebagai kenang-kenangan dari medang perang. Ini adalah telinga seorang yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Kami memang biasa memotong telinga orang-orang yang dicurigai sebagai peringatan atas resiko yang mereka hadapi jika menyulut pemberontakan...” (Ajidarma, 2010: 18)

Seperti yang diungkapkan oleh Rousseau (melalui Sudiby, 2012: 3), Secara politis menarik bahwa awalnya negara adalah institusi yang didirikan atas nama warga, namun dalam perkembangannya menjadi kekuatan maha besar yang berhadapan dengan warganya. Seperti dalam cerpen “telinga” bahwa kini rakyat berhadapan dengan kekuasaan negara. Negara akan melakukan tindakan baik yang berupa teror dan pembunuhan

jika kekuasaan negara merasa terancam. Melalui alat kekuasaan negara yaitu pihak militer melakukan tindakan berdasarkan perintah dari negara untuk membunuh ataupun melakukan penyiksaan bagi orang atau sekelompok orang yang dianggap akan mengganggu suatu bentuk kekuasaan.

Pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan penggunaan aparat militer dalam melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam stabilitas negara yang terekam dengan jelas dalam cerpen “telinga,” bahwa bagaimana militer terbiasa melakukan penyiksaan melalui pemotongan telinga bahkan sampai kepada pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap mencurigakan ataupun sekelompok orang yang melakukan pemberontakan atau melakukan perlawanan terhadap kekuasaan negara.

“Kiriman telinga-telinga yang kau potong dari orang-orang yang dicurigai itu semuanya telah kuterima dengan baik. Terima kasih banyak. Aku memajang semuanya di tempat yang bisa dilihat orang. Setiap kali tamu-tamu bertanya dari mana telinga-telinga itu, kujawab dari pacarku di medan perang yang telah memotong telinga-telinga dari kepala orang-orang yang dicurigai...” (Ajidarma, 2010: 20)

“Jadi, kami bersepakat untuk memenggal saja kepala orang-orang yang dicurigai. Apa boleh buat. Dari kepala-kepala itulah kupotong telinga-telinga yang kukirimkan kepadamu. Bayangkanlah betapa sibuknya. Kami tidak hanya memotong telinga, kami harus memenggal kepala. Itulah sebabnya. Dewi, aku tidak punya waktu untuk membalas suratmu. Aku berharap dikau memakluminya.” (Ajidarma, 2010: 21)

Pada bagian akhir, setelah juru cerita menceritakan cerita “telinga” kepada Alina tokoh dalam cerpen. Ada hal yang menarik untuk diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa melalui militer terhadap orang atau sekelompok orang yang dianggap mencurigakan ataupun melakukan pemberontakan dan tindakan yang dilakukan oleh militer dianggap sebagai sesuatu yang wajar, hal yang normal. Bahkan, apa yang telah dilakukan dengan pemotongan telinga sampai kepada memenggal kepala dianggap sebagai tindakan heroik. Karena apa yang dilakukan oleh militer dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mempertahankan negara dari sekelompok orang yang dianggap mencurigakan yang dapat melakukan pemberontakan terhadap kedaulatan negara itu sendiri.

“Selesai! Juru cerita itu mengakhiri ceritanya.”

“Alangkah kejamnya pacar Dewi itu,” ujar Alina kepada juru cerita itu.

Maka juru cerita menjawab.

“Tapi, banyak orang menganggapnya pahlawan.” (Ajidarma, 2010: 22)

Cerpen selanjutnya berjudul “Listrik.” Pada cerpen ini, Seno Gumira Ajidarma memperlihatkan bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan aparat militer dan salah satunya melalui listrik. Orang-orang yang dianggap mencurigakan ditangkap, lalu kemudian disiksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak militer. Seperti pada tokoh Januario dalam cerpen “Listrik” yang kemudian disetrum untuk menjawab pertanyaan yang dilotarkan pihak penyiksa.

“Cepat katakan! Siapa yang menyuruh kamu orang minta suaka?”

“Viva.... Arrrrrgghhh”

“Kalimat itu tidak pernah diselesaikannya, karena setiap kali ia mengucapkannya, seorang petugas memutar potensiometer di depannya, dan suatu hentakan listrik yang dahsyat menghantam tubuh Januario sehingga ia terpentak bersama kursinya...” (Ajidarma, 2010: 57)

“Januario bungkam. Ia masih tergeletak di lantai tanpa baju. Ia hanya menganakan celana jins yang penuh dengan bercak darah. Tanpa sepatu. Tanpa sandal. Dahinya berpeluh. Bibirnya tebal dan pecah-pecah karena pukulan pentungan karet maupun besi.”

“Viv.... Arrrrrgghhh”

“Orang Amerika itukah?”

“Viv.... Arrrrrgghhh”

“Orang Australia?”

“Viv.... Arrrrrgghhh”

“Orang Belanda?”

“Viv.... Arrrrrgghhh”

“Orang Mahasiswa?”

“Viv.... Arrrrrgghhh”

Seperti yang dikatakan Aredt (2003: 40-44), jika kekuasaan yang berupa perintah, kekerasan tampak sebagai upaya terakhir untuk menjaga struktur kekuasaan agar tetap utuh terhadap penentangan individual-musuh yang tampak seolah-olah kekerasan adalah prasyarat kekuasaan. Kekuasaan dan kekerasan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kekuasaan dan kekerasan, meskipun keduanya adalah dua hal yang berbeda, namun bisanya muncul secara bersama-sama.



Bentuk penyiksaan yang dilakukan pihak militer tidak hanya dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi perlawanan tetapi juga orang yang dianggap dekat orang tersebut juga mendapat perlakuan yang sama. Dari cerpen “Listrik” yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma bentuk penyiksaan yang dilakukan terhadap tokoh Januario lebih ringan jika membandingkan penyiksaan yang dialami oleh kekasih Januario yang tidak tahu menahu soal perkara. Hanya karena anggapan wanita tersebut dekat dengan tokoh Januario, maka wanita tersebut juga mengalami penyiksaan, bahkan lebih parah dari pada apa yang dialami oleh Januario.

“Januario! Mereka memperkosa aku, Januario aku ditelanjangi dan tubuhku disundut rokok kretek! Aku ditidurkan di lantai dan punggungku diinjak-injak dengan sepatu tentara! Telingaku berdenging karena pukulan pentungan karet. Sakit sekali rasanya, Januario, Mereka taruh kaki meja ke atas ibu jari kakiku dan mereka berdiri di atas meja itu. Aku tidak tahan! Mereka ingin tahu tempat persembunyianmu Januario! Tapi, bagaimana aku bisa mengaku kalau kamu selalu merahasiakan kegiatanmu? Mereka tidak percaya itu, Januario! Aku pacarmu, kekasihmu. Mereka pikir aku pasti tahu! Mereka memperkosa aku bergantian! Sakit sekali rasanya, Januario! Aku tidak tahan! Sehabis mereka memperkosaku, aku disetrum, setelah disetrum aku diperkosa lagi....” (Ajidarma, 2010: 60)

## **Kesimpulan**

Sastra dan kekuasaan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Keterkaitan sastra dan kekuasaan bisa berbentuk pengungkapan praktik kekuasaan yang terjadi di masyarakat melalui karya sastra. Seperti yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma, bahwa melalui karya sastra, bentuk kekuasaan yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya pemerintahan Orde Baru jejaknya dapat ditelusiri.

Seno Gumira Ajidarma mencoba membuka ingatan kita terhadap sejarah kelam yang pernah terjadi di masyarakat Indonesia melalui karya sastra yang ditulisnya, tepatnya pada tahun 1983-1985 yang dikenal dengan Penemuan Misterius. Serta peristiwa yang terjadi di Timur Timur pada tahun 1991 yang dikenal dengan istilah Insiden Dili. Kedua peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana kekuasaan negara melalui alat kekuasaannya yaitu pihak militer melakukan tindakan yang berbentuk teror, penyiksaan, pembunuhan sampai pada pembantaian kepada orang-orang yang dianggap musuh bagi negara.

## Daftar Pustaka

- Ajidarma, Seno Gumira. 2007. *Penembak Misterius*. Jakarta Selatan: Galang Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Saksi Mata*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Trologi Insiden*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Arendt, Hannah. 2003. *Teori Kekerasan*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu Penegetahuan.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge Selected Interviews and Others Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Power/Knowledge Wacana Kuasa/ Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- \_\_\_\_\_. Foucault, Michel. *Pengetahuan dan Metode Karya-karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra. (Buku asli diterbitkan tahun 1984).
- Kratz, E. Ulrich. (Ed.). 2000. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Bogor: Kepustakaan Gramedia Populer.
- Said, W. Edward. 2012. *Dunia, Teks, dan Sang Kritikus*. (Terjemahan Sunaryono Basuki). Bali: Bali Media Adhikarsa. (Buku asli diterbitkan tahun 1983).
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gasan Politik Gramsci*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyo. 2012. *Politik Otentik*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Taylor, Dianna. (Ed.). (2011). *Key Concepts Michel Foucault*. British Library: Acumen Publishing.

# MEMBACA GERWANI DALAM CERPEN INDONESIA

**Else Liliani**

Universitas Negeri Yogyakarta

E-mail: else.liliani@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Gerwani adalah salah satu organisasi perempuan terbesar dan modern dalam sejarah bangsa Indonesia. Perannya dalam gerakan feminisme dan organisasi perempuan di Indonesia ternodai oleh fitnah keterlibatannya dengan organisasi terlarang pada masa Orde Baru, yakni PKI. Sampai saat ini, wacana Gerwani masih sering diperbincangkan oleh masyarakat dan konstruksi terhadapnya masih banyak dijumpai dalam berbagai teks, antara lain teks sastra.*

*Makalah ini berhasil menjangkau tiga cerpen yang mengangkat wacana Gerwani. Ketiga cerpen itu adalah “Bunga Busuk” dan “Penguburan Kembali Sitaresmi” karya Triyanto Triwikromo dan “Retakan Kisah” karya Puthut EA. Dengan melakukan pembacaan analisis wacana kritis terhadap ketiga cerpen tersebut, makalah ini menemukan bahwa: (1) ketiga cerpen cenderung mengkonstruksi Gerwani sebagai organisasi perempuan yang positif, mengedepankan perjuangan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan di masyarakat; (2) konstruksi identitas Gerwani yang positif banyak merujuk pada kesaksian tokoh saksi sekaligus pelaku sejarah dalam cerpen, sedangkan konstruksi identitas yang negatif dirujuk dari ujaran tokoh tentara yang menjadi representasi dari kelas penguasa pada*

*masa itu; dan (3) melalui ujaran para tokoh dan teks-teks yang dirujuk untuk menjelaskan identitas Gerwani, ketiga cerpen meyakini bahwa Gerwani adalah sebuah organisasi perempuan yang tidak terlibat dalam peristiwa berdarah bangsa Indonesia. Organisasi ini justru merupakan korban dari konflik kepentingan antara kelas berkuasa dan kelas yang mencoba untuk tumbuh dalam masyarakat Indonesia pada masa itu.*

**Kata kunci:** Gerwani, analisis wacana kritis, cerpen Indonesia

## **Pengantar**

Perjuangan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai sebuah organisasi perempuan di Indonesia. Dimulai 4 Juni 1950 dengan pendirian Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis yang digawangi oleh beberapa pejuang perempuan, salah satunya adalah SK Trimurti, Gerwis tidak saja terlibat dalam perjuangan memerdekakan Indonesia, namun juga turut memberikan andil dalam perjuangan politik di tingkat nasional maupun internasional<sup>5</sup>. Pada 1954, Gerwis mengubah namanya menjadi Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani.

Gerwani adalah organisasi perempuan modern di Indonesia pada masa itu. Gerwani tidak hanya fokus pada masalah politik, melainkan juga aktif dalam perjuangan gender. Meski Gerwani menerima kodrat perempuan, tidak mempermasalahakan keibuan, namun Gerwani mengusung prinsip kesamaan peran laki-laki dan perempuan di bidang sosial politik, menentang seksisme serta dominasi laki-laki (Wieringa, 2010:483).

Gerwani sering disebut-sebut sebagai lembaga milik PKI karena adanya kesamaan isu perjuangan. Padahal, Gerwani bukan organisasi yang berada di bawah naungan PKI. PKI memiliki organisasi wanitanya sendiri yang bernama Wanita Komunis atau Wankom yang diketuai oleh Harti Warjo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gerwani. Mungkin karena adanya dobel kepemimpinan inilah, maka Gerwani sering disandingkan dengan PKI. Hingga puncaknya, pada 1965 Gerwani kena getah dari adanya gerakan revolusioner kaum kiri di Indonesia.

Sampai saat ini, bagaimana peran Gerwani dalam gerakan 30 September 1965 masih diperdebatkan. Buku-buku sejarah yang sudah ada dan disuarakan oleh kelompok berkuasa saat itu cenderung menyatakan keterlibatan Gerwani dalam peristiwa berdarah tersebut. Yang terkenal

---

<sup>5</sup> Tulisan mengenai kiprah Gerwani di tingkat nasional dan internasional selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan Hasan Kurniawan yang berjudul “Kebohongan Tari Harum Bunga Gerwani di Lubang Buaya” di laman [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com)

dari tuduhan terhadap Gerwani dalam peristiwa itu antara lain keterlibatan mereka dalam penyiksaan terhadap para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya dan tarian mereka yang dinamai Harum Bunga.

Perkembangan sosial politik di Indonesia pada akhirnya membawa suatu perkembangan pandangan terhadap Gerwani. Beberapa mantan anggota Gerwani selaku pelaku sejarah mulai banyak memberikan kesaksian mereka. Kisah hidup perjalanan mereka banyak dikupas di media massa. Tulisan mengenai kesaksian mereka juga banyak dijumpai, seperti yang ditulis oleh Saskia E Wieringa dalam bukunya yang berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (2010) dan *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia* karya Hikmah Diniah (2007). Buku-buku yang menulis kesaksian pelaku sejarah 65 atau eks-tapol PKI lebih banyak ditulis, seperti yang terlihat dalam *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* karya Arbi Sanit (2000), *Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965* karya Soegianto Padmo (2000), *Gerakan Rakyat Kelaparan di Gunung Kidul* karya Padjar Pratikno (2000), *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* karya Aminudin Kasti (2001), *Menembus Tirai Asap* karya Haryo Sasongko (2003), *Kesaksian Tapol Orde Baru: Guru, Seniman, dan Prajurit Tjakra* karya Suyatno Prayitno (2003), *Memoar Pulau Buru* karya Hersri Setiawan (2004), *Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-Esai Sejarah Lisan* karya John ROssa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (2004), *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* oleh Robert Cribb (2004), *Diburu di Pulau Buru* karya Hersri Setiawan (2004), *Di-PKI-kan: Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur* karya RAF Webb dan Steven Farram (2005), *Dari Kalong sampai Pulau Buru* karya Adrianus Gumelar Demokrasno (2006), *Kidung pada Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol* karya Hersri Setiawan (2006), *Menyeberangi Sungai Air Mata: Kisah Tragis Tapol '65 dan Upaya Rekonsiliasi* karya Antonius Sumarwan (2007), *Memecah Pembisuan: Tuturan Penyintas Tragedi 65-66* karya Putu Oka Sukanta (2011), dll. Selain dari kalangan akademisi, budayawan, ataupun sejarawan, kalangan sastrawan pun juga banyak yang melakukan pemaknaan ulang terhadap gerakan perempuan Indonesia yang terbesar dan modern saat itu, Gerwani.

Cerita pendek mengenai PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia dalam jagat sastra Indonesia amat banyak dijumpai. Novel yang berbicara mengenai PKI pun tak kalah sedikit. Selama melakukan pembacaan terhadap cerpen-cerpen yang dipublikasikan di media massa nasional, penulis menemukan adanya tiga cerpen yang berbicara mengenai

Gerwani. Ketiga cerpen yang berhasil dijangkau dalam penulisan makalah ini adalah “Bunga Busuk” dan “Penguburan Kembali Sitaresmi” karya Tryanto Triwikromo, serta “Retakan Kisah” karya Puthut EA. “Bunga Busuk” dimuat dalam harian *Jawa Pos* tanggal 1 Juli 2012, “Penguburan Kembali Sitaresmi” dimuat dalam *Kompas* 1 Februari 2015, sedangkan cerpen “Retakan Kisah” dimuat dalam *Kompas* 19 Maret 2006.

## **Membaca Gerwani dalam Cerpen Indonesia dengan Analisis Wacana Kritis**

Peristiwa yang terjadi 50 tahun silam dalam sejarah bangsa Indonesia sampai kini masih saja menarik untuk diperbincangkan dan dimaknai ulang. Munculnya wacana Gerwani dalam tiga cerpen Indonesia, “Bunga Busuk”, “Penguburan Kembali Sitaresmi”, dan “Retakan Kisah” perlu dikritisi dalam rangka melihat bagaimana identitas Gerwani dikonstruksi dalam ketiga cerpen itu, intertekstualitas dan interdiskursivitasnya, serta ideologi apa yang mengada di balik mengemukanya cerpen bertemakan Gerwani tersebut. Untuk itu, tulisan ini menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough.

Fairclough melihat institusi sosial memiliki keragaman formasi ideologis-diskursif yang direpresentasikan oleh beragam kelompok sosial dalam masyarakat (1995:27). Ideologi-ideologi tersebut dinaturalisasikan dalam wacana. Pendekatan ‘kritis’ dalam analisis wacana model Fairclough membawa konsekuensi bahwa analisisnya bertujuan untuk menjelaskan naturalisasi yang ditemukan dalam wacana dan membuat penjelasan mengenai efek dari sebuah wacana (Fairclough, 1995:28). Denaturalisasi menunjukkan bagaimana struktur sosial menentukan wacana dan bagaimana wacana menentukan struktur sosial. Karenanya, analisis wacana kritis menekankan hubungan antara struktur mikro dan makro. Struktur makro ditengarai berkontribusi dalam penciptaan struktur mikro. Selain itu, perlu juga untuk melihat bagaimana ujaran atau teks-teks yang menghubungkan antara struktur mikro dan makro.

Udasmoro menguraikan dengan jelas tahapan analisis wacana kritis yang dikembangkannya dari Fairclough (2014:53). Analisis wacana kritis model Fairclough ini bekerja dalam tiga level. Pertama, dalam tataran mikro. Alat dalam tahap analisis ini adalah alat kebahasaan, khususnya mengamati *lexical choices* yang dijelaskan dalam cerpen. Tahapan kedua adalah analisis tataran meso untuk melihat rujukan-rujukan yang digunakan dalam cerpen. Setiap teks dilihat interdiskursivitas dan intertekstualitasnya dengan teks-teks lainnya untuk melihat bahwa wacana dibentuk oleh sebuah wacana institusional, sejarah, dan relasionalnya. Tahapan terakhir adalah analisis praktik sosial untuk menjelaskan

kekuasaan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh pengarang atau tokoh-tokoh yang dijelaskan oleh pengarang dalam cerpen. Setiap tindakan tersebut ditengarai memiliki muatan ideologis dan kekuasaan.

## **Membaca Konstruksi Identitas Gerwani dalam Cerpen Indonesia**

Gerwani dalam ketiga cerpen ini direpresentasikan secara berbeda melalui berbagai macam tokoh. Dalam cerpen “Bunga Busuk”, Gerwani direpresentasikan dalam tokoh ibu kandung Rosa yang diceritakan melalui tokoh ibu angkatnya, Maria. Sementara, dalam cerpen “Penguburan Kembali Sitaresmi”, Gerwani direpresentasikan melalui tokoh dalang perempuan bernama Sitaresmi dan 23 sindennya, yang diceritakan melalui tokoh aku, seorang saksi sejarah yang membisu selama 50 tahun. Cerpen “Retakan Kisah” merepresentasikan Gerwani dalam tokoh seorang ibu guru yang memberikan kesaksiannya kepada tiga tokoh pencari berita (tokoh ‘aku’, Mirna, dan Andre).

Gerwani dalam cerpen “Bunga Busuk” dikonstruksi melalui penamaan ‘gerombolan perempuan busuk’ yang melakukan penyiksaan terhadap enam jenderal dan satu perwira dengan keji. Konstruksi identitas Gerwani sebagai perempuan busuk ini keluar dari pernyataan para serdadu yang sering singgah di rumah Mayor Prakosa. Artinya, konstruksi Gerwani sebagai pelaku kejahatan yang keji ini dilakukan oleh pihak tentara yang nota bene merupakan wakil dari kelas penguasa.

Gerwani juga disebut dengan ‘celeng’ atau babi dalam cerpen “Bunga Busuk”. Penyebutan yang merendahkan ini muncul melalui cerita seorang penulis buku terkenal, Genjer Wangi dalam bukunya yang berjudul *Kisah Lima Tapol Perempuan* yang dibaca oleh tokoh Rosa ketika dia berusaha mencari akar sejarah hidupnya di perpustakaan. Dalam cerpen itu dikatakan buku itu menuliskan “*Desa ini bisa ditempuh selama sekitar tiga jam perjalanan dengan mobil dari arah Stasiun Tawang. Banyak tanjakan curam dan tajam, melingkar-lingkar seperti labirin yang akan menyesatkan. Jika tidak berhati-hati, para pejalan kaki akan bertemu dan dimangsa macan tutul. Jurang dan ngarai juga mengancam. Jalanan sepi dan penduduk setempat menyebut seluruh kawasan itu sebagai kuburan Celeng.*”

Gerwani dalam cerpen “Penguburan Kembali Sitaresmi” direpresentasikan dalam tokoh dalang perempuan bernama Sitaresmi dan 23 sindennya. Melalui tokoh aku, seorang saksi sejarah bercerita kepada tokoh ‘kamu’, Gerwani dikonstruksi dengan lebih positif dan penuh keharuan-penghormatan dengan penamaan ‘perempuan tangguh,’ ‘pasukan berani mati,’ ‘penjelmaan Dewi Sri –istri Betara Indra- yang tak akan bisa dibunuh oleh manusia sesakti apa pun,’ ‘perempuan malang,’

dan 'perempuan yang tak tembus peluru.' Sita resmi dalam bahasa Jawa sendiri bermakna sinar rembulan. Sita resmi yang Gerwani, dimetaforakan sebagai Dewi Sri yang sakti dan tak kan bisa dibunuh oleh manusia sakti sekalipun. Ini mengandung makna bahwa peran-peran Gerwani tidak akan bisa dihapuskan dalam sejarah masyarakat Indonesia, meski diwarnai 'kemalangan dan kehinaan' dengan adanya pencitraan negatif terhadap mereka. Sementara, dalam cerpen "Retakan Kisah", identitas Gerwani dikonstruksikan dengan bermartabat melalui tokoh guru perempuan, seorang saksi sekaligus pelaku sejarah, yang menyebut dirinya 'saya' dan 'seorang guru.' Tidak disebutkan siapa nama tokoh Gerwani ini. Tokoh 'saya' yang merupakan gerwani ini mengonstruksikan Gerwani sebagai korban dalam peristiwa berdarah yang banyak mengalami penyiksaan seksual dan ketidakadilan hukum.

Tokoh-tokoh Gerwani dalam ketiga cerpen ini selalu disandingkan dengan 'tentara', 'serdadu', 'serdadu culas,' dan 'para penembak.' Tentara, serdadu, serdadu culas, dan para penembak itu adalah konstruksi identitas dari pada aparat pemerintah yang melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap para Gerwani yang dituduh terlibat dalam pembantaian para jenderal. Melalui tokoh aku dalam "Retakan Kisah," Gerwani dikonstruksi sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan jauh dari keterlibatan peristiwa berdarah tahun 1965. Berikut adalah kutipannya: *"Saya benar-benar tidak tahu, Mbak, apa salah saya. Saya ini dari kecil miskin, hanya anak seorang janda. Waktu saya kecil, saya hanya ingin menjadi guru. Ya, karena melihat guru-guru saya. Rasanya kok hidup saya bisa berguna kalau saya menjadi guru. Lalu saya sekolah di Sekolah Guru Taman Kanak-kanak di Yogya. Lulus sekolah, ya saya langsung mengajar TK di kampung saya. Di luar kegiatan mengajar, saya aktif di organisasi itu. Saya juga tidak mengerti, mengapa orang-orang sering menganggap organisasi itu jahat. Wong saya tahunya, di organisasi itu kami diajari untuk ikut mendamaikan suami-istri yang tidak akur. Kami diajari bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, makanya tidak adil kalau seorang suami beristrikan lebih dari satu orang. Kami juga diajari bahwa tidak benar kalau istri itu seperti suwarga nunut, neraka katut."*

Dari kutipan di atas, tampak ada konstruksi identitas Gerwani sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender. Peran Gerwani terlihat dalam pelibatan diri mereka dalam urusan keluarga, seperti mendamaikan permasalahan rumah tangga, pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga, dan dukungan penuh terhadap monogami serta penolakan terhadap poligami. Sayangnya, orang-orang di luar organisasi itu terlanjur menuduh bahwa organisasi (Gerwani) itu jahat.



Berdasarkan pembacaan terhadap *lexical choices* dalam ketiga cerpen, diperoleh konstruksi identitas mengenai Gerwani. Gerwani dilihat sebagai sesuatu yang paradoksal: di balik kemuliannya sebagai sebuah organisasi yang berjuang bagi kesetaraan gender di Indonesia, Gerwani juga lekat dengan sesuatu yang dianggap (di)rendah(kan) dan (di)hina(kan).

Gerwani dikonstruksikan sebagai sebuah organisasi yang mulia sebab memperjuangkan gender dan melakukan pendidikan kesetaraan gender bagi masyarakat. Konstruksi Gerwani di sini sangat jauh berbeda dengan yang dikonstruksikan oleh masyarakat awam dan pihak kelas berkuasa pada masa itu yang diwakili oleh ‘serdadu, serdadu culas, para penembak’ sebagai organisasi yang terlibat dalam peristiwa pembantaian para jendral di balik terjadinya isu perebutan kekuasaan.

Konstruksi Gerwani secara positif disuarakan melalui tokoh aku sebagai para pelaku sejarah yang ditemukan dalam cerpen “Retakan Kisah” dan “Penguburan Kembali Sitaresmi.” Melalui tokoh aku di kedua cerpen tersebut, Gerwani dikonstruksi sebagai korban dan bukan pelaku kejahatan. Para Gerwani itu ditangkap tanpa melalui pengadilan, disiksa baik secara fisik maupun mentalnya oleh para tentara (sebagai wakil penguasa), dilecehkan secara seksual, mengalami stigma negatif yang tidak hanya tersemat pada dirinya saja, melainkan sampai keturunannya. Konstruksi Gerwani secara negatif dan penuh kepedihan disuarakan oleh pengarang melalui sudut pandang orang pertama serba tahu yang mengisahkan percakapan para serdadu di rumah Mayor Prakosa mengenai Gerwani sebagai kumpulan perempuan busuk yang menyiksa para jendral dan perwira. Dalam konstruksi ini, Gerwani (‘perempuan busuk’, ‘celeng’) dianggap bersalah dan melakukan kejahatan kemanusiaan oleh masyarakat dan penguasa yang berkuasa kala itu. Selain itu, penggunaan kata ‘kuburan celeng’ merupakan satu bentuk stigma negatif sekaligus ungkapan merendahkan dari masyarakat terhadap para Gerwani.

## **Membaca Interdiskursivitas dan Intertekstualitas Wacana Gerwani dalam Cerpen**

Interdiskursivitas adalah rujukan-rujukan kata-kata yang diungkapkan oleh orang lain yang dirujuk oleh tokoh atau pengarang. Rujukan kata-kata merupakan mental model atau pikiran yang menjadi model. Mental model merupakan *common sense* yang dilegitimasi oleh berbagai bentuk kekuasaan dan sifatnya individual (Udasmoro, 2014:57).

Melalui narrator dengan sudut pandang orang pertama serba tahu, tokoh Rosa dalam cerpen “Bunga Busuk” mengetahui identitas Gerwani sebagai ‘gerombolan perempuan busuk yang menyilet-nyilet tubuh enam

jendral dan satu perwira' dengan merujuk pada percakapan para serdadu di rumah Prakosa. Identitas mengenai Gerwani yang seperti ini merujuk mental model tentara yang menjadi tangan panjang penguasa. Selain itu, konstruksi identitas Gerwani juga disampaikan oleh narrator dengan sudut pandang orang pertama serba tahu melalui focalisasi eksternal tokoh para perempuan sepuh sebaya Maria sebagai sekelompok orang yang *mencungkil mata orang-orang yang tak berdaya sambil membawakan Tarian Harum Bunga dan menyanyikan lagu "Genjer-Genjer."* Identitas Gerwani dalam hal ini diketahui merujuk pada pemikiran masyarakat awam yang terlanjur mempercayai bahwa Gerwani juga memiliki peran di balik peristiwa berdarah bangsa Indonesia.

Tarian Harum Bunga merujuk pada pengetahuan yang terlanjur beredar dan dipercayai oleh sebagian masyarakat. Konon tarian cabul ini dilakukan oleh para Gerwani saat menyiksa para jendral sebelum akhirnya mereka dimasukkan dalam Lubang Buaya. Dalam kesaksiannya pada Pengadilan Rakyat 1965 di Den Haag 10-13 November 2015, Wieringa menuturkan bahwa anggota Gerwani difitnah sebagai penari telanjang yang dikenal dengan tarian bunga harum (Fauzan, 2015). Fitnah ini diceritakan dari generasi ke generasi bahwa Gerwani telah memperkosa para jendral, menutup mata mereka lalu memotong alat vitalnya. Padahal, menurut kesaksian sejarah, para jendral itu ditemukan tewas dengan kondisi alat vital yang masih lengkap dan mereka dibunuh bukan oleh Gerwani. Sebaliknya, para Gerwani justru banyak mengalami pelecehan seksual<sup>6</sup>.

Tokoh Rosa diceritakan merujuk pada tulisan dalam buku berjudul *Kisah Lima Tapol Perempuan* karya seorang penulis yang ditengarai menulis dengan nama samaran (Genjer Wangi) untuk mengetahui kisah Gerwani. Meskipun dalam dunia nyata buku itu tidak ada<sup>7</sup>, namun pengarang seolah hendak menyakinkan pembaca bahwa kisah pilu para Gerwani yang menjadi tahanan politik itu nyata adanya. Melalui tokoh seorang penjaga perpustakaan dalam "Bunga Busuk", tokoh Rosa juga mengetahui makna Plarungan sebagai tempat pembuangan, tempat melarung atau menghanyutkan mayat (Gerwani). Dengan menggunakan rujukan kata-kata dari tokoh penjaga perpustakaan ini, pembaca

---

<sup>6</sup> Artikel mengenai anggota Gerwani yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual antara lain dapat dijumpai dalam laman <http://1965tribunal.org/> yang berjudul "Pelecehan seksual terhadap Gerwani: Kisah Atikah – Djamilah dan Djemilah"

<sup>7</sup> Buku yang berkisah mengenai para tapol perempuan di dunia nyata dapat ditemukan dalam buku yang berjudul *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan* karya Amurwani Dwi Lestariningsih (Penerbit Buku Kompas, 2011)

diarahkan pada suatu kesimpulan bahwa para Gerwani mengalami akhir yang tragis.

Tokoh 'kamu' yang disebut tokoh 'aku' sebagai 'penganggit kisah' dalam cerpen "Penguburan Kembali Sitaresmi" mendapatkan wacana mengenai Gerwani melalui rujukan dari kata-kata si tokoh 'aku' yang banyak bercerita kepadanya tentang Sitaresmi yang berprofesi sebagai dalang perempuan dan 23 sindennya yang dihukum oleh para tentara. Tokoh 'aku' yang ditempatkan sebagai saksi sejarah ini banyak mengisahkan tentang kesaksiannya mengenai Sitaresmi dan kawan-kawannya yang dituduh membunuh ratusan serdadu dan memberikan kesaksian terhadap pembantaian perempuan-perempuan malang yang dituduh Gerwani: perempuan-perempuan yang dianggap menghina Gusti Allah, dan berbagai alasan lain yang digunakan untuk membunuh siapapun yang dianggap musuh.

Tokoh 'aku' bertutur mengenai rujukan agama yang sering digunakan oleh kelompok yang berseberangan dengan Gerwani untuk mendeskreditkan mereka sebagai sebuah kelompok yang menghinakan Tuhan sebab sering mementaskan lakon "Dewa Sampun Pejah." Dalam teks-teks agama, Tuhan dideskripsikan sebagai Zat yang Abadi, tidak dapat mati. Kepercayaan agama inilah yang sering digunakan untuk memukul gerakan Gerwani yang dianggap melecehkan agama. Padahal, menurut pembelaan tokoh 'aku,' lakon itu sebenarnya diambil dari cuplikan Drupadi yang ditelanjangi oleh Dursasana. Drupadi merasa dewa telah mati sebab suaminya yang berjumlah 5 orang itu tiada kuasa membelanya.

Melalui rujukan kata-kata tokoh 'aku,' ditemukan adanya pembelaan terhadap Gerwani (yang direpresentasikan melalui tokoh Sitaresmi dan sinden-sindennya), bahwa Sitaresmi yang Gerwani itu laksana penjelmaan Dewi Sri, seorang istri dewa yang mulia dan diagungkan sebagai dewi pelindung kelahiran dan kehidupan, mengendalikan bahan makanan, mengatur kehidupan, kekayaan dan kemakmuran. Penilaian ini sangat jauh dengan tuduhan negatif yang dilekatkan pada Gerwani. Tokoh 'aku' yang memberikan kesaksian mengenai Gerwani merujuk pada teks *maskumambang* yang konon dinyanyikan Sitaresmi sebelum dibunuh oleh para regu penembak, meski akhirnya regu penembak itu baru dapat membunuhnya setelah diberitahu rahasia kematiannya oleh Sitaresmi sendiri. Maskumambang sendiri adalah tembang macapat Jawa yang mengisahkan pertanda dimulainya kehidupan manusia di dunia. Berikut adalah tembang maskumambang yang dinyanyikan tokoh Sitaresmi: *kelek-kelek biyung sira aneng ngendi / enggal tulungana / awakku kecemplung warih / gulagapan wus meh pejah-pejah*<sup>8</sup>. Nada getir,

---

<sup>8</sup> Artinya kurang lebih: di mana engkau, Ayah, Ibu? Segera tolonglah

kesedihan, pengharapan tampak jelas dalam tembang yang dinyanyikan dalam tembang maskumambang yang dinyanyikan oleh Sitaresmi.

Melalui tokoh 'aku' yang bertutur tentang Sitaresmi, pembaca akhirnya dapat mengetahui bagaimana posisi tokoh 'kamu' dalam teks ini. Tokoh 'kamu' dalam teks ini ternyata adalah salah seorang anggota dari 'Komunitas Rekonsiliasi Kanan Merah dan Kiri Putih' yang akan berencana membongkar makam dan menguburkan tulang-tulang para anggota Gerwani kembali dengan doa yang sebenar-benar doa. Pengarang dalam cerpen tersebut merujuk pada komunitas di Indonesia yang berupaya melakukan rekonsiliasi sejarah terhadap para 'pelaku' dan 'korban' pembantaian di tahun 1965 sebagai bentuk penyampaian pesan bahwa rekonsiliasi mutlak diperlukan untuk meluruskan sejarah bangsa ini. Forum rekonsiliasi yang ada di Indonesia antara lain Komisi Kebenaran dan *REKONSILIASI* (KKR), Forum Komunitas Tionghoa Indonesia, Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), dll.

Tokoh 'aku' dalam cerpen "Retakan Kisah" merujuk penjelasan dari tokoh 'ia' dengan fokus internal yang berbicara mengenai kisahnya selaku anggota Gerwani yang banyak mengalami ketidakadilan hukum, kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, dan diskriminasi akibat bergabung dengan Gerwani. Dengan melakukan perujukan kata-kata dari tokoh 'ia' selaku pelaku sejarah, tokoh 'aku' seolah hendak meyakinkan pembaca bahwa kesaksian mengenai Gerwani ini bersifat otentik karena dituturkan langsung oleh sumbernya: bahwa Gerwani tak bersalah, Gerwani hanyalah korban dari konflik kekuasaan dari kelompok-kelompok yang berseberangan.

## **Membaca Muatan Ideologis Wacana Gerwani**

Pemilihan kata, rujukan teks atau wacana yang digunakan oleh tokoh atau pengarang merupakan produk dari ideologi. Dari pemilihan kata untuk mengkonstruksi identitas Gerwani, tulisan ini menemukan adanya paradoksal gambaran mengenai Gerwani. Di satu sisi Gerwani adalah gambaran kemuliaan, di sisi lain Gerwani adalah gambaran kehinaan.

Gerwani merupakan gambaran kemuliaan sebab merupakan organisasi perempuan yang mendidik perempuan, pemeliharaan keutuhan dan keharmonisan keluarga, meluruskan anggapan-anggapan yang tak benar sebab penfasiran agama, serta menjadikan wadah bagi perjuangan kesetaraan gender.

Gerwani menjadi gambaran akan kehinaan sebab adanya stigma

---

anakmu ini. Tubuhku terjatuh dalam air yang bening, gelagapan sudah hampir mati.

negatif dan tuduhan-tuduhan politik yang ditimpakan kepada mereka. Gerwani dianggap sebagai salah satu wadah organisasi PKI (padahal Gerwani bukan anak organisasi PKI) yang turut bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah di tahun 1965. Gerwani dianggap sebagai organisasi yang melecehkan agama, hukum, politik, dan nilai-nilai kemanusiaan. Stigma ini khususnya banyak disuarakan melalui tokoh-tokoh yang menjadi kaki panjang penguasa, seperti Mayor Prakoso, para serdadu, para penembak, dan tentara.

Namun, berdasarkan pembacaan mikro dan meso yang dilakukan, cerpen-cerpen yang bertemakan Gerwani menunjukkan dan menyampaikan keyakinannya bahwa Gerwani tidak bersalah dan tidak berandil dalam peristiwa berdarah bangsa Indonesia. Gerwani justru menjadi korban dari adanya konflik kepentingan antara kelas yang dominan dan mencoba untuk bangkit di Indonesia.

Tokoh-tokoh yang bersuara dalam cerpen, baik itu melalui perujukan terhadap ujaran tokoh atau teks, berusaha untuk meyakinkan bahwa Gerwani sejatinya adalah korban. Mereka difitnah oleh kelas yang berkuasa saat itu, dianggap terlibat dengan organisasi terlarang PKI dan berperan dalam pembunuhan keji para jenderal. Mereka adalah korban fitnah, ditangkap tanpa pernah menjalani pengadilan hukum yang adil dan benar, disiksa fisik dan mentalnya, dilecehkan secara seksual (diperkosa, dipaksa mencium kemaluan para tapol, dikencingi, digerayangi kemaluan atau payudaranya) dan verbal (*verbal bullying*).

Tokoh-tokoh yang bersuara dan memberikan kesaksiannya terhadap kiprah dan peristiwa sejarah yang dialami oleh Gerwani merupakan gambaran suara dari kelompok-kelompok di masyarakat yang menginginkan adanya rekonsiliasi sejarah dan pelurusan sejarah bangsa. Meskipun Gerwani dalam penuturan tokoh-tokoh itu adalah korban, namun mereka juga tak menghendaki pelaku penistaan terhadap mereka ganti diburu dan dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap mereka. Tokoh-tokoh itu menghendaki adanya kelegawaan untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru untuk perjalanan bangsa berikutnya.

## Penutup

Gerwani adalah satu cerita yang kelim dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemaknaan terhadapnya akan senantiasa dilakukan, baik oleh para saksi sejarah, pelaku sejarah, ataupun mereka-mereka yang bergerak dalam upaya pelurusan sejarah bangsa. Konflik kekuasaan tak dapat dinafikkan sebagai salah satu faktor yang memperparah peristiwa naas itu.

Sastrawan sebagai anggota masyarakat telah menunjukkan perannya sebagai perekam sejarah dan mengingatkan masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekitar mereka. Melalui semesta imajiner yang ditulisnya, para sastrawan itu memberikan koreksi dan afirmasi terhadap apa-apa yang diyakininya sebagai kebenaran.

Dengan melakukan pembacaan analisis wacana kritis terhadap ketiga cerpen bertemakan Gerwani, yakni “Bunga Busuk”, “Penguburan Kembali Sitaresmi”, dan “Retakan Kisah” tulisan ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, secara garis besar, identitas Gerwani dikonstruksi secara positif. Konstruksi positif ini terutama disuarakan melalui tokoh-tokoh yang berperan sebagai saksi sekaligus pelaku sejarah. Konstruksi negatif mengenai Gerwani muncul melalui suara kaki tangan kelas penguasa yang justru melakukan banyak kejahatan terhadap para Gerwani.

Kedua, konstruksi identitas Gerwani selaku organisasi terlarang yang berperan dalam peristiwa berdarah di Indonesia banyak dirujuk dari pengetahuan umum masyarakat yang terlanjur beredar dari generasi ke generasi dan dari para tentara yang menjadi kaki tangan para penguasa pada masa itu. Tokoh-tokoh yang bersuara dan memberikan kesaksiannya adalah satu bentuk koreksi terhadap pengetahuan yang terlanjur beredar di masyarakat.

Ketiga, melalui tokoh-tokoh yang bersuara dalam ketiga cerpen ini, tampak adanya keyakinan akan ketidakbersalahan para Gerwani. Mereka justru menjadi korban dari konflik kepentingan kelas yang berkuasa dan kelas yang mencoba untuk tumbuh. Selain itu, cerpen-cerpen itu merupakan wakil dari kelompok sosial dalam masyarakat yang menghendaki adanya rekonsiliasi nasional antara pelaku dan korban peristiwa berdarah September 1965 lalu.

## Daftar Bacaan

- EA, Puthut. 2006. “Retakan Kisah” dimuat dalam *Kompas* 19 Maret 2006.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: papers in the critical study of language*. London: Longman.
- Fauzi, Gilang. 2015. “Wieringa: Semua Soal Gerwani Bohong, Tak Ada Tarian Telanjang” diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151112133757-20-91215/wieringa-semua-soal-gerwani-bohong-tak-ada-tarian-telanjang/> pada 10 November 2015
- Kurniawan, Hasan. 2015. “Kebohongan Tari Harum Bunga Gerwani di Lubang Buaya” diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/1047786/29/kebohongan-tari-harum-bunga-gerwani-di-lubangbuaya-1443094028> pada 10 November 2015.

- Triwikromo, Triyanto. 2015. "Penguburan Kembali Sitaresmi" dimuat dalam *Kompas* 1 Februari 2015.
- 2012. "Bunga Busuk" dimuat dalam harian *Jawa Pos* tanggal 1 Juli 2012.
- Udasmoro, Wening. 2014. *Konstruksi Identitas Remaja dalam Karya Sastra*. Yogyakarta: Program Studi Sastra Prancis FIB UGM.
- Wieringa, Saskia Eleonora. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.

# SASTRA SEBAGAI ALAT MENKKRITISI KEKUASAAN DI INDONESIA: TINJAUAN DARI MASA KE MASA

**Esti Ismawati**

Universitas Widya Dharma Klaten

E-mail: ibu\_esti@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini mencoba mendeskripsikan sastra (puisi) sebagai alat untuk mengkritisi kekuasaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif inferensial. Pertanyaannya ialah, bagaimana sastrawan mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam menghadapi kekuasaan di zamannya? seperti apa ekspresinya? Marahkah? Geramkah? Atau justru sebaliknya, halus, penuh eufimisme, penuh simbolisme sehingga penguasa tak merasa dikritisi? Inilah jawabnya.*

## **Pendahuluan**

Ada yang berpendapat bahwa jika ingin melihat kebenaran sejarah, atau sejarah yang tidak dibengkokkan, atau sejarah yang lurus, silahkan membaca karya sastra di zamannya. Pendapat ini ada benarnya mengingat dalam setiap proses penciptaan sastra (dalam tulisan ini khusus difokuskan pada puisi), sastrawan atau penyair atau pemuisi berada pada realitas zamannya dan didukung proses kreatif penciptaan karya yang senantiasa lekat dengan dunia sepi, dunia sunyi, hening. Dalam keheningan tersebut



terjadi suatu pertarungan batin dan atau pertarungan pikir pada diri sastrawan untuk mengungkapkan atau menuliskan secara jujur sesuai dengan isi hati nuraninya (dan kita tahu, hati nurani tidak pernah bohong). Oleh karena itu wajarlah jika ada pendapat yang demikian tadi.

Memang perlu disadari bahwa sastra pada hakikatnya adalah sebuah imajinasi dan kreativitas. Acuan dalam sastra adalah dunia fiksi atau imajinasi meski tak bisa dipungkiri bahwa sastra adalah sebuah transformasi kenyataan ke dalam teks. Sastra menyajikan dunia dalam kata, yang bukan dunia sesungguhnya, namun sebuah dunia yang ‘mungkin’ ada. Walaupun berbicara dengan acuan dunia fiksi, menurut Max Eastman, kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yaitu pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan. Fungsi utama sastrawan adalah membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam kehidupan, dan membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahui (Welleck & Warren, 1990 : 30-31).

Sementara itu Ignas Kleden (Jurnal *Kalam* 1998) menyatakan bahwa batas antara fiksi dan fakta sangat susah ditentukan. Dalam tulisannya, Ignas Kleden juga menanggapi argumen HB Jassin ketika membedah cerpen Ki Panji Kusmin yang berjudul “Langit Makin Mendung” pada tahun 1969-1970. Dalam bahasanya, HB Jassin menyatakan bahwa karya sastra hanya menyajikan kenyataan artistik dan bukan kenyataan objektif yang bisa diadili menurut hukum positif. Menurut HB Jassin imajinasi itu berbeda dengan ilmu yang berisi gagasan-gagasan. Imajinasi lebih daripada gagasan, ia adalah keseluruhan kombinasi dari gagasan-gagasan, perasaan-perasaan, kenangan pengalaman, dan intuisi manusia. Imajinasi adalah sesuatu yang hidup, suatu proses, suatu kegiatan jiwa. Dengan demikian, imajinasi yang dituangkan ke dalam suatu karya seni, tidak identik sama dengan kenyataan sejarah, pengalaman atau pun ilmu pengetahuan. Suatu karya seni mempunyai kenyataan artistik yang tidak identik sama dengan kenyataan objektif atau kenyataan sejarah atau kenyataan ilmu pengetahuan (Kleden, 1998:13-15). Kleden mempertanyakan di mana perbedaan konsep utama dari batasan dua bidang itu, yakni kenyataan artistik dalam karya seni dan kenyataan objektif dalam sejarah dan ilmu pengetahuan sementara kalangan ilmuwan sendiri sudah amat meragukan apakah mungkin berbicara tentang objektivitas. Bagaimana objektivitas sejarah yang terekam dalam sastra perihal kekuasaan, inilah rekaman beberapa puisi yang terkait.

## **Pembahasan**

Jauh sebelum era sastra ‘resmi’ seperti sastra Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45 muncul, ternyata hubungan sastra dan kekuasaan

sudah ada. Tepatnya pada tahun 1918 Mas Marco Kartodikromo, seorang wartawan dari Jawa menulis puisinya di sebuah surat kabar sebagai berikut :

### **SAMA RASA DAN SAMA RATA**

Sair inillah dari pendjara,  
Waktoe kami baroe dihoekoemnja,  
Di-Weltevreden tempat tinggalnja,  
Doea belas boelan poenja lama,

Ini boekan sair Indie Weerbaar,  
Sair mana jang bisa mengantar,  
Dalam boei jang tidak sebentar,  
Membikin hatinja orang gentar,

.....  
Ini sair nama; "Sama rasa"  
"Dan Sama rata" itoelah njata,  
Tapi boekan sair bangsanja,  
Jang menghela kami dipendjara.

Didalam pendjara tidak enak,  
Tertjere dengan istri dan anak,  
Koempoel maling dan perampok banjak,  
Seperti bangsanja si pengampak.

Tapi dia djoega bangsa orang,  
Seperti manoesia jang memegang,  
Koeasa dan harta benda orang,  
Dengan berlakoe jang tidak terang.

Ada perampoek aloer dan kasar,  
Djoega perampok ketjil dan besar,  
Bertopeng beschaving dan terpeladjar,  
Dengan berlakoe jang tidak terang.

.....  
Dia itoelah sama perampoeknja,  
Minta orang dengan lakoe paksa,  
Tidak mengingat kebangsaannja,  
Bangsa manoesia didoenia.

Hal ini baik kami koentjikan,  
Lain hal jang kami bitjarakan,  
Perkara jang mesti difahamkan,  
Dan akhirnja kita melakoekan.

Banjak orang jang mengetahoei,  
Doea kali kami kena doeri,  
Artikel wetboek jang menakoeti,  
Djoega panasnja seperti api.

Kakik kami soeda sama loekak,  
Kena doeri jang koeintjak-intjak,  
Djoega palang-palang jang koedoepak,  
Soedah ada sedikit terboekak.

***Sinar Djawa Rebo 10 April 1918 no. 81***

**BADJAK LAOET**

.....  
Kepala orang boemi jang takoet,  
Lebih senang marika menoeroet,  
Kehendaknja badjak badjak laoet.  
Maskipoen temannja kalang kaboet.

Banjak orang boemi jang ta' soekak  
Toeroet kepalanja jang mengadjak,  
Berdamai dengan si badjak-badjak,  
Dia ta' soekak mendjadi boedoek.

“Lebih baik kita orang mati,  
Dari pada kita menoeroeti,  
Kehendak badjak jang amat kedji,”  
Begitoe kata orang jang berani.

.....  
Kepalanja orang boemi,  
Tidak memikir dibelakang hari  
Tjoema memikir diri sendiri,  
Hidoep besar dan berasa moekti.

Marika itoe kena diboedjoek

Oleh temannja jang soedah maboek,  
Pangkat besar, pajoeng koening, koeloek,  
Itoe barang tanja dia takloek.

Dia takloek pada badjak laoet,  
En toch mengakoe orang jang ketoea,  
Merentah bangsanja jang menoeroet,  
Sabetoelnja dia si pengetjoet.

.....

Dari itoe orang-orang boemi,  
Hidoep melarat setengah mati,  
Dia bekerdja seperti sapi,  
Tjoema mendapat oelang setali.

Apa kabar orang boemi sito?  
Banjak jang mengoeli mikoel batoe,  
Badannja roesak hatinja piloe,  
Pikiran bingoeng mendjadi denggoe.

Saban hari bertambah tambah,  
Bangsa badjak jang datang mitenah,  
Ditanah itoe jang amat moerah,  
Mentjari makan ta' dengan soesah.

Djangan tanja lagi orang boemi,  
Bertambah soesah mentjari nasi,  
Sebab tanahnja jang keloear padi,  
Banjak jang sama di djoeali.

.....

Maka hal ini haroes dipikir,  
Akan goenanja merobah takdir,  
Soepaja kita bisa mengoesir,  
Manoesia bangsa orang.....

Semarang, 23-1.2-18, *Sinar Hindia* 23 Desember 1918.

No.255

Menyambung puisi di atas yang memotret bagaimana kekuasaan di negeri yang gemah ripah ini, berikut dipaparkan beberapa puisi dari beberapa penyair.

Asmara Hadi :

**NASIB TANAH AIRKU**

I

Panas yang terik datang membakar,  
Lemahlah kembang hampirkan mati,  
Tunduk tergantung bersedih hati,  
Mohon air kepada akar.  
mendapat air amatlah sukar,  
Belumlah turun hujan dinanti,  
Musim kemarau belum berhenti,  
Angin bertiup belum bertukar.  
Seperti kembang hampirkan layu,  
Lemah tampaknya, rawan dan sayu,  
Demikianlah 'kau Indonesia,  
Nasibmu malang amat celaka,  
Hidup dirundung malapetaka,  
Tidak mengenal rasa bahagia.

Sangat halus, dan masih samar memotret kondisi tanah airnya. Bandingkan dengan puisi di bawah ini :

**A Mustofa Bisri :**

**NEGERIKU**

mana ada negeri sesubur negeriku?  
sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung  
tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung  
perabot-perabot orang kaya didunia  
dan burung-burung indah piaraan mereka  
berasal dari hutanku  
ikan-ikan pilihan yang mereka santap  
bermula dari lautku  
emas dan perak perhiasan mereka  
digali dari tambangku  
air bersih yang mereka minum  
bersumber dari keringatku

mana ada negeri sekaya negeriku?  
majikan-majikan bangsaku  
memiliki buruh-buruh mancanegara  
brankas-brankas ternama di mana-mana

menyimpan harta-hartaku  
negeriku menumbuhkan konglomerat  
dan mengikis habis kaum melarat  
rata-rata pemimpin negeriku  
dan handai taulannya  
terkaya di dunia

mana ada negeri semakmur negeriku  
penganggur-penganggur diberi perumahan  
gaji dan pensiun setiap bulan  
rakyat-rakyat kecil menyumbang  
negara tanpa imbalan  
rampok-rampok diberi rekomendasi  
dengan kop sakti instansi  
maling-maling diberi konsesi  
tikus dan kucing  
dengan asyik berkolusi

(Mustofa Bisri 1414)

Widi Tukul :

### **DARAH JUANG**

di sini negeri kami  
tempat padi terhampar luas  
samudaranya kaya raya  
tanah kami subur, Tuhan.

di negeri permai ini  
berjuta rakyat bersimbah luka  
anak kurus tak sekolah  
pemuda desa tak kerja

mereka dirampas haknya  
tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
‘tuk membebaskan rakyat

padamu kami berjanji  
padamu kami berbakti  
‘tuk membebaskan rakyat

Saut Situmorang :

**KITA SUDAH LAMA TERLALU MENDERITA**

.....

baru tadi aku lihat lagi kekejaman mereka. kota hangus  
tinggal arang arang  
hitam raksasa tercekik  
asap beracun berbau mayat berbau mesiu.  
orang orang yang ketakutan  
bergerombol  
bagai hewan hewan korban yang akan dipotong  
dan mata mereka memelas minta tolong.  
siapa yang akan menolong?  
tentara tentara itu ketawa waktu tahu  
kamera akan mengabadikan wajah mereka. dan  
wajah mereka begitu akrab begitu biasa  
karena sudah terlalu lama kita mengenalnya.

hei, saudara! begitulah kalian orang Indonesia  
rupanya, ya! membunuh sambil ketawa,  
malah sengaja untuk kamera!!!  
kota hangus dalam kabut asap memberangus  
dan suara ribuan kaki telanjang  
terhapus oleh senyum seorang jendral besar.  
“Timor Timur aman.” “Timor Timur baik-baik saja.”  
“Kan ada jam malam!”

kita sudah terlalu lama menderita  
oleh senyum dan bau mesiu senjata.  
kota arang arang hitam raksasa  
asap beracun berbau mayat mesiu  
orang orang yang ketakutan itu  
adalah kita yang sedang digiring ke pisau penjagal gila.  
bangunlah, wahai orang orang celaka!  
bangunlah Indonesia celaka!  
anjing anjing setan mengepung di mana mana  
darah dagingmu yang mereka minta!

bau mayat bau mesiu  
merusak wajah wajah kita begitu lama  
bagai orang sakit tak tersentuh matahari  
Indonesia perlahan mulai jadi zombie  
dan anjing anjing setan melolong panjang

mengejek langit yang kelam tak berbulan bintang.  
kita sudah terlalu lama menderita  
terbius candu mesiu pembuat takut  
tak ada yang bisa menolong  
kecuali kita sendiri bangun  
dan mengusir anjing anjing setan  
keluar dari Indonesia selamanya.

anjing anjing setan takut pada panas matahari  
yang terpancar dari mata mata berhati nurani.

15 September 1999

ASEP SAMBODJA:  
**ORANG-ORANG PARLEMEN**

orang-orang parlemen  
berpakaian parlente  
tinggal di rumah elite

turun dari mobil  
sepatu mengkilat dari kulit buaya  
perut buncit seperti babi  
ikat pinggang kelelahan menahan celananya

masuk ruang sidang terasa nyaman  
kursi empuk ruang sejuk bebas polusi jakarta  
sidang dimulai, mata pun mulai ngantuk  
palu diketuk, mulut menganga  
sempurnalah segalanya

orang-orang parlemen  
sibuk membela kepentingan partai  
tak ada yang membela kepentingan rakyat

mereka meributkan perkara yang merugikan partai lain  
tapi diam seribu bahasa kalau menyangkut partainya sendiri

mereka bikin undang-undang  
yang bisa memenuhi pundi-pundi mereka sendiri  
bukan demi kemaslahatan rakyat



seperti tikus, begitulah kerja mereka  
melihat orang-orang parlemen bicara  
seperti melihat pedagang kaki lima yang menjual barang  
meyakinkan, barang biasa jadi demikian penting  
barang murahan jadi begitu berharganya

GK, Jokja, 2 September 2010

### **TIKUS KETUA**

entah apa yang ada di benaknya  
entah apa yang ada di otaknya  
ia terobsesi pada tikus

ketua partai ingin anggotanya berkarya  
seperti tikus-tikus yang menggigit, mengrikiti, menggerogoti  
demi kejayaan partai tua

tentu ia ingin diagungkan sebagai tikus ketua  
dan tikus-tikus di partainya mendukungnya jadi raja tikus

ia begitu mengidolakan tikus  
ia ingin partainya nanti bekerja seperti tikus  
yang pintar mengendus-endus kesempatan

lihatlah anggotanya sudah berdandan seperti tikus  
monyong mancung seperti tikus  
perut buncit seperti perut tikus  
tak tahu halal atau haram yang dimakannya

entah apa yang dipikirkannya  
yang pasti ia ingin anggota partainya berkarya seperti tikus

tapi yang pasti bagi kami  
tikus adalah musuh negara yang harus diberantas  
karena sudah lama tikus-tikus itu menggerogoti uang negara  
di bawah pohon beringin  
tikus ketua tengah mengendus-endus peluang  
untuk terus jadi tikus ketua

Ungaran, 19 Agustus 2010

## **KEPADA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

: Puisi yang Tidak Terlalu Serius

ini puisi soal negara  
puisi ini tidak terlalu serius  
sama seperti negara yang tidak serius memberantas korupsi  
orang yang melaporkan kasus korupsi ditahan  
aktivis yang melaporkan kasus korupsi dihajar  
lembaga baru yang menyidik kasus korupsi dihancurkan  
koruptor yang ditahan malah dibebaskan  
kejaksaan sama tidak seriusnya dengan puisi ini  
kepolisian juga tak serius menangani kasus korupsi  
tapi sangat gigit membellow up kasus perkelaminan yang  
dilakukan secara tak serius  
lupa pada kasus rekening buncit yang demikian serius  
televise sudah tak serius memberitakan derita lapindo  
sama tak seriusnya mengusut century  
pertamina tak serius memanager bahan bakar  
setiap hari ada ledakan di rumah rakyat kecil  
teroris sudah berganti tokoh dan sasarannya  
yang jadi korban tetap si kecil  
tapi negara tak serius bertanggung jawab

puisi ini tidak terlalu serius  
seperti negara yang tak serius berantas korupsi

Jokja, 26 Juli 2010

**Handrawan Nadesul:**

**BANGGA AKU JADI RAKYAT INDONESIA**

Bangga aku jadi rakyat Indonesia  
Guru lapar masih tertawa  
Anak makan tiwul lolos masuk universiti  
Petani terus mencangkul meski Pak Camat ingkar janji  
Tak menggerutu setengah hari antre hanya buat obat diare  
Tak gusar berdesakan bayar listrik atau beli karcis kereta api  
Sabar bikin KTP harus menunggu Lurah pulang menjahit safari  
Terima nasib kendati punya karcis di bus berjongkok sampai pagi  
Tengok berpanas-panas di atap kereta api mereka tak sakit hati  
Dicegat polisi belum tentu bersalah mereka tidak berani marah  
Merasa bernegara memang harus begini

Karena teramat mencintai republik ini

.....

Bangga aku menjadi rakyat Indonesia  
Masih gigih berjalan kendati kehilangan mendapat cukup  
makan cukup pangan  
Tak ada dendam yang berjasa terabaikan yang mengabdikan  
tersingkirkan  
Tersaruk-saruk atlet veteran menjual medali buat makan  
Hujan batu di negeri orang karena emas di negeri sendiri  
tak memberi pekerjaan  
Masih tekun menanti kapan di stasiun tempat bisa hidup  
pantas akan tiba  
Kalau mereka masih tak bertanya tak berkata-kata  
Karena teramat mencintai republik sepermai ini

Bangga aku menjadi rakyat Indonesia  
Masih tersenyum padahal sudah lapar sekali  
Masih terdiam padahal sudah perih sekali  
Masih menerima padahal sudah pilu sekali  
Masih bertahan padahal sudah payah sekali  
Belum menangis dari jatuh-bangun berkali-kali  
Dibohongi berulang-ulang kali  
Mereka kuat karena merasa hidup memang harus begini  
Atau barangkali karena yakin Gusti ora sare.

Indonesia, 2008-2011

**Taufiq Ismail :**

**MALU (AKU) JADI ORANG INDONESIA**

II

Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu,  
Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi  
berterang-terang curang susah dicari tandingan,  
Di negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan, sepupu  
dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek  
secara hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu,  
Di negeriku komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan,  
senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedele, terigu dan peuyeum  
dipotong birokrasi  
lebih separuh masuk kantung jas safari,

Di kedutaan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal,  
sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden,  
menteri, jenderal, sekjen dan dirjen sejati,  
agar orangtua mereka bersenang hati,  
Di negeriku penghitungan suara pemilihan umum  
sangat-sangat-sangat-sangat-sangat jelas  
penipuan besar-besaran tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan,  
Di negeriku khotbah, surat kabar, majalah, buku dan  
sandiwara yang opininya bersilang tak habis  
dan tak utus dilarang-larang,

Di negeriku dibakar pasar pedagang jelata  
supaya berdiri pusat belanja modal raksasa,  
Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah,  
ciumlah harum aroma mereka punya jenazah,  
sekarang saja sementara mereka kalah,  
kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka  
oleh satpam akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat,  
Di negeriku keputusan pengadilan secara agak rahasia  
dan tidak rahasia dapat ditawarkan dalam bentuk jual-beli,  
kabarnya dengan sepotong SK  
suatu hari akan masuk Bursa Efek Jakarta secara resmi,  
Di negeriku rasa aman tak ada karena dua puluh pungutan,  
lima belas ini-itu tekanan dan sepuluh macam ancaman,

Di negeriku telepon banyak disadap, mata-mata kelebihan kerja,  
fotokopi gosip dan fitnah bertebar disebar-sebar,  
Di negeriku sepakbola sudah naik tingkat  
jadi pertunjukan teror penonton antarkota  
cuma karena sebagian sangat kecil bangsa kita  
tak pernah bersedia menerima skor pertandingan  
yang disetujui bersama,

Di negeriku rupanya sudah diputuskan  
kita tak terlibat Piala Dunia demi keamanan antarbangsa,  
lagi pula Piala Dunia itu cuma urusan negara-negara kecil  
karena Cina, India, Rusia dan kita tak turut serta,  
sehingga cukuplah Indonesia jadi penonton lewat satelit saja,  
Di negeriku ada pembunuhan, penculikan  
dan penyiksaan rakyat terang-terangan di Aceh,  
Tanjung Priuk, Lampung, Haur Koneng,

Nipah, Santa Cruz dan Irian,  
ada pula pembantahan terang-terangan  
yang merupakan dusta terang-terangan  
di bawah cahaya surya terang-terangan,  
dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai  
saksi terang-terangan,  
Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada,  
tapi dalam kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang  
menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi.

Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak  
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak  
Malu aku jadi orang Indonesia.

1998

### **PRESIDEN BOLEH DATANG, PRESIDEN BOLEH PERGI**

Sebuah orde tenggelam  
sebuah orde timbul  
tapi selalu saja ada suatu lapisan masyarakat di atas gelombang itu  
selamat  
Mereka tidak mengalami guncangan yang berat  
Yang selalu terapung di atas gelombang  
Seseorang dianggap tak bersalah sampai dia dibuktikan hukum  
bersalah  
Di negeri kami ungkapan ini begitu indah  
Kini simaklah sebuah kisah  
Seorang pegawai tinggi gajinya satu setengah juta rupiah  
Di garasinya ada Volvo hitam, BMW abu-abu,  
Honda metalik, dan Mercedes merah  
Anaknya sekolah di Leiden, Montpellier dan Savana  
Rumahnya bertebaran di Menteng, Kebayoran dan macammacam  
indah  
Setiap semester ganjil istri terangnya belanja di Hongkong dan  
Singapura  
Setiap semester genap istri gelapnya liburan di Eropa dan Afrika  
Anak-anaknya ....  
Anak-anaknya pegang dua pabrik, tiga apotik dan empat biro jasa  
Selain sepupu dan kemenakannya buka lima toko onderdil,  
lima biro iklan, dan empat pusat belanja.

Ketika rupiah anjlok terperosok, kepeleset macet dan hancur jadi bubur,  
dia, hah!  
dia ketawa terbahak-bahak karena depositonya dolar Amerika semua  
Setelah matahari dua kali tenggelam di langit Barat,  
jumlah rupiahnya melesat sepuluh kali lipat  
Krisis makin menjadi-jadi  
Di mana-mana orang antri  
Maka 100 kotak kantong plastik hitam dia bagi-bagi  
Isinya masing-masing:  
Lima genggam beras, empat cangkir minyak goreng,  
dan tiga bungkus mie cepat jadi.  
Peristiwa murah hati ini diliput dua menit di kotak televisi  
dan masuk koran halaman lima pagi sekali

### **Realisasi Eufemisme dalam Bingkai Bahasa dan Kekuasaan**

Fowler 1996, via Suroso 2014 mendefinisikan *euphemism is the use of mild or periphrastic expression as substitute for blunt precision or disagreeable*, pemakaian suatu ungkapan yang lembut, samar, atau berputar-putar untuk menggantikan presisi yang kasar, atau suatu kebenaran yang kurang enak. Definisi Fowler tersebut sesuai dengan praktik eufemisme yang digunakan penguasa Indonesia era orde baru untuk memantapkan citra berkaitan dengan kebenaran yang busuk. Contoh: Tingkat ekonomi Indonesia membaik (siapa yang menikmati), Aparat mengamankan demonstran anti kenaikan BBM (menangkap dan mungkin menggebugi), Utang luar negeri dianggap bantuan, Pelacur diganti Pekerja Seks Komersial, .

Menurut Kleden (1998) eufemisme dapat menggambarkan norma-norma terselubung estetis baik untuk pelanggaran moral maupun untuk kenyataan sosial yang pahit. Pendapat Kleden tersebut senada dengan pernyataan Anderson (1990), yang menyatakan bahwa ambiguitas bahasa yang digunakan lewat bahasa para petinggi negara bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, tetapi juga bersembunyi dari realitas dan perilaku yang sesungguhnya.

Dalam memproduksi kata-kata untuk membangun kekuasaan, rezim penguasa biasanya melakukan (1) pemasyarakatan bahasa seperti jabatan adalah amanah, pengentasan kemiskinan, negara kita adalah negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, pemerataan pendapatan, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, (2) memperkasar untuk menangkal kekuatan lawan politik, misalnya SARA (suku, agama, ras, antar golongan), subversif, aktor intelektual, (3) memproduksi

kata-kata yang dapat mengerem dan menurunkan emosi masyarakat, seperti mendhem jero mikul dhuwur, jer basuki mawa bea (Bagi mereka yang ingin sekolah gratis), demi kepentingan umum (Lady Gaga dilarang pentas di Indonesia, Irsjad manji dilarang diskusi di Kampus), dan (4) penyeragaman bahasa atau istilah yang dipakai oleh pejabat. Contoh demonstrasi tidak dilarang tetapi ada ijin dan tidak rusuh, bebaskan rakyat dari ketakutan (nyatanya banak yang masih akut), dll.

Organisasi, Lembaga, Institusi, dan Penguasa, mencoba mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memproduksi bahasa yang dapat mengundang simpati dan dukungan. Namun penggunaan eufemisme dan pencitraan, seharusnya dilawan dengan mendekonstruksi pemakaian bahasa secara transparan dan menerapkan keterbukaan dalam melaksanakan *public relation* atau kehumasan, sehingga masyarakat mendapatkan makna yang sesungguhnya. Perlu dicatat juga bahwa bahasa itu bukan matematika, kadang tidak hanya logika yang berbicara, tetapi rasa.

### **Cara Rendra Mengkritisi Kekuasaan**

Rendra (Willibrordus Surendra Broto Rendra) lahir di Solo, 7 November 1935 – meninggal di Depok 6 Agustus 2009 pada usia 73 tahun adalah penyair ternama yang dijuluki “Burung Merak” yang senantiasa mengkritisi kekuasaan, apa pun bentuk kekuasaan itu. Ia mendirikan Bengkel Teater di Yogyakarta pada tahun 1967. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia mendirikan *Bengkel Teater Rendra* di Depok, pada bulan Oktober 1985. Semenjak masa kuliah ia sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah, yang tentu saja berisi kritik terhadap kekuasaan. “Panembahan Reso,” sebuah lakon drama yang berbicara tentang suksesi kekuasaan, telah dituliskannya. Lakon ini pada zaman Orde Baru nyaris tidak mendapat izin untuk dipentaskan, karena dinilai menyinggung kekuasaan Presiden Soeharto, yang tumbang oleh gerakan reformasi pada tahun 1998 lalu. Bagaimana cara Rendra mengkritisi kekuasaan melalui puisinya? Berikut disajikan beberapa puisi karyanya.

#### **SAJAK MATA-MATA**

.....  
Aku tak tahu. Kamu tak tahu.  
Tak ada yang tahu.  
Betapa kita akan tahu,  
kalau koran-koran ditekan sensor,

dan mimbar-mimbar yang bebas telah dikontrol.  
Koran-koran adalah penerusan mata kita.  
Kini sudah diganti mata yang resmi.  
Kita tidak lagi melihat kenyataan yang beragam.  
Kita hanya diberi gambar model keadaan  
yang sudah dijahit oleh penjahit resmi.

Mata rakyat sudah dicabut.  
Rakyat meraba-raba di dalam kasak-kusuk.  
Mata pemerintah juga diancam bencana.  
Mata pemerintah memakai kacamata hitam.  
Terasing di belakang meja kekuasaan.  
Mata pemerintah yang sejati  
sudah diganti mata-mata.

Barisan mata-mata mahal biayanya.  
Banyak makannya.  
Sukar diaturnya.  
Sedangkan laporannya  
mirip pandangan mata kuda kereta  
yang dibatasi tudung mata.

Dalam pandangan yang kabur,  
semua orang marah-marah.  
Rakyat marah, pemerinta marah,  
semua marah lantaran tidak punya mata.  
Semua mata sudah disabotir.  
Mata yang bebas beredar hanyalah mata-mata.

Hospital Rancabadak, Bandung, 28 Januari 1978  
Potret Pembangunan dalam Puisi

### **AKU TULIS PAMPHLET INI**

Aku tulis pamphlet ini  
karena lembaga pendapat umum  
ditutupi jaring labah-labah  
Orang-orang bicara dalam kasak-kusuk,  
dan ungkapan diri ditekan  
menjadi peng – iya – an



Apa yang terpegang hari ini  
bisa luput besok pagi  
Ketidakpastian merajalela.  
Di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki  
menjadi marabahaya  
menjadi isi kebon binatang

Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi,  
maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam  
Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan.  
Tidak mengandung perdebatan  
Dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan

.....  
Pejambon Jakarta 27 April 1978  
*Potret Pembangunan dalam Puisi*

Sebuah potret mengenai buruknya kekuasaan orde baru dimana koran disensor, mimbar dikontrol dan hanya mata-mata yang leluasa bicara mengenai keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya suasana menjadi kacau, tentara marah, orang-orang marah, salah paham pun terjadi di mana-mana. Bagaimana citraan tentang anak muda masa itu? Inilah jawabnya.

### **SAJAK-SAJAK ANAK MUDA**

Kita adalah angkatan gagap  
yang diperanakkan oleh angkatan takabur.  
Kita kurang pendidikan resmi  
di dalam hal keadilan,  
karena tidak diajarkan berpolitik,  
dan tidak diajar dasar ilmu hukum  
Kita melihat kabur pribadi orang,  
karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa.  
Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus,  
karena tidak diajar filsafat atau logika.

### **SAJAK SEBATANG LISONG**

.....  
matahari terbit  
fajar tiba  
dan aku melihat delapan juta kanak - kanak  
tanpa pendidikan

aku bertanya  
tetapi pertanyaan - pertanyaanku  
membentur meja kekuasaan yang macet  
dan papantulis - papantulis para pendidik  
yang terlepas dari persoalan kehidupan

delapan juta kanak - kanak  
menghadapi satu jalan panjang  
tanpa pilihan  
tanpa pepohonan  
tanpa dangau persinggahan  
tanpa ada bayangan ujungnya

.....  
menghisap udara  
yang disemprot deodorant  
aku melihat sarjana - sarjana mengganggu  
berpeluh di jalan raya  
aku melihat wanita bunting  
antri uang pensiunan  
dan di langit  
para teknokrat berkata :  
bahwa bangsa kita adalah malas  
bahwa bangsa mesti dibangun  
mesti di up-grade  
disesuaikan dengan teknologi yang diimpor

gunung - gunung menjulang  
langit pesta warna di dalam senjakala  
dan aku melihat  
protes - protes yang terpendam  
terhimpit di bawah tilam  
aku bertanya  
tetapi pertanyaanku  
membentur jidat penyair - penyair salon  
yang bersajak tentang anggur dan rembulan  
sementara ketidakadilan terjadi disampingnya  
dan delapan juta kanak - kanak tanpa pendidikan  
termangu - mangu di kaki dewi kesenian

.....  
**Rendra** (ITB Bandung - 19 Agustus 1978)

Dan peristiwa lengsernya orde baru tak luput dari jangkauan Rendra untuk ditulisnya dalam puisi berikut ini :

### **SAJAK BULAN MEI 1998 DI INDONESIA**

.....

O, zaman edan  
O, tatawarna fatamorgana kekuasaan!  
O, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja!  
Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa  
Allah selalu mengingatkan  
bahwa hukum harus lebih tinggi  
dari ketinggian para politisi, raja-raja, dan tentara

O, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan!  
O, rasa putus asa yang terbentur sangkur!  
Berhentilah mencari Ratu Adil!  
Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya!  
Apa yang harus kita tegakkan bersama  
adalah Hukum Adil  
Hukum Adil adalah bintang pedoman di dalam prahara

Bau anyir darah yang kini memenuhi udara  
menjadi saksi yang akan berkata:  
Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat  
apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa  
apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan  
maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa  
lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya

Wahai, penguasa dunia yang fana!  
Wahai, jiwa yang tertenuhng sihir tahta!  
Apakah masih buta dan tuli di dalam hati?  
Apakah masih akan menipu diri sendiri?  
Apabila saran akal sehat kamu remehkan  
berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap  
yang akan muncul dari sudut-sudut gelap  
telah kamu bukakan!  
Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi  
Airmata mengalir dari sajakku ini.

(Sajak ini dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1998 dan dibacakan Rendra di DPR pada tanggal 18 Mei 1998).

## PEREMPUAN YANG TERGUSUR

.....

Sebagai janda yang pelacur  
kamu tinggal di gubuk tepi kali  
dibatas kota  
Gubernur dan para anggota DPRD  
menggolongkanmu sebagai tikus got  
yang mengganggu peradaban.  
Di dalam hukum positif tempatmu tidak ada.  
Jadi kamu digusur.

.....

Rendra (Cipayung Jaya, 3 Desember 2003)

Demikianlah uraian sastra dan kekuasaan dari masa ke masa. Ternyata sastra mampu memotret berbagai sudut kekuasaan dengan bahasa yang anggun, dengan bahasa yang jujur, dan tidak menimbulkan pembusukkan bahasa, karena dibaca sampai kapan pun sastra dalam hal ini puisi di atas tetap indah dan menimbulkan perenungan yang mendalam.

### Simpulan

1. Ada keterkaitan sastra dengan dinamika sosial, politik, dan kebudayaan khususnya menyangkut kekuasaan. Dalam kenyataan, sastra sangat berpengaruh terhadap dinamika dan cara pandangan masyarakat. Termasuk di dalamnya unsur politik dan sosial. Bagaimana kekuasaan berusaha terlibat memantau dan melakukan kebijakan termasuk pelarangan dan anjuran terhadap sebuah karya sastra tampak dalam puisi-puisi di atas.
2. Dalam realisasinya, (hubungan sastra dan kekuasaan) lebih halus pengungkapan sastra daripada pengungkapan bahasa. Ini disebabkan karena di dalam bahasa, cara pengungkapannya cenderung sarkastis (euphemisme yang dibungkus) sedang dalam sastra cara pengungkapannya cenderung lebih halus karena bahasa yang dimunculkan (dalam wujud puisi) melalui proses perenungan dan nurani banyak bicara.

### Daftar Pustaka

- Eneste, Pamusuk. 2001. *Buku Pintar Sastra Indonesia*. Jakarta: Kompas.  
Fowler, Roger. 1996. *Language in the News Discourse and Ideology in the Press*. London: Routledge.  
Junus, Umar. 1985. *Resepsi Sastra. Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia

- Kleden, Ignas. 1998. "Fakta dan Fiksi tentang Fakta dan Fiksi," Kalam. Edisi 11.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Yudi dan Idi Subndy Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Pangung Orde Baru*. Bandung: Mizan Kronik Indonsia Baru.
- Moedjanto. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Satoto, Soediro. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Suroso. 2014. *Bahasa dan Kekuasaan. Peranan Teks dan Konteks dalam Pemaknaan*
- Teew, A. 1988. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Waluyo, Herman Y. 2010. *Pengkajian dan Apresiasi Puisi*. Salatiga: Widya Sari.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1995. *Teori Kesusastaan* (terjemahan). Jakarta: Gramedia.
- W.S. Rendra. 1977. *Potret Pembangunan dalam Puisi*.

# KONSEP CINTA KASIH SUAMI ISTRI DALAM *SERAT NGELMI PENGASIHAN*

**Fatkur Rohman Nur Awalın**

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: fatkurrohman.awalin@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari kajian ini adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Serat Ngelmi Pengasihın yakni konsep cinta kasih khususnya konsep cinta kasih dalam suami istri. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain supaya mengikuti kehendaknya baik secara paksa (kekerasan) maupun secara sukarela. Karya sastra adalah hasil kreatifitas seniman pengarang, baik lama maupun modern, baik lisan maupun tulisan. Hubungan antara sastra dan kekuasaan dalam karya sastra terdapat kandungan ide-ide yang dimiliki pengarang kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisan yang mempunyai nilai estetika, membuat masyarakat tertarik untuk membacanya. Cinta kasih suami terhadap istrinya adalah trêsnı, ngomahi, ngayani, ngajênı, saha ngéman. Sedangkan cinta kasih istri terhadap suaminya adalah bêkti, sumungkêm, mituhu, ngladosi, sêtya, rumêksa, biyantu, ngaji-aji, saha sumarah. Konsep cinta kasih suami dan istri merupakan upaya pengarang kepada pembaca untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut dikristalisasikan*

dan diejawantahkan dalam kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut hubungan suami dan istri akan semakin harmonis dan langgeng.

**Kata kunci:** *Serat Ngelmi Pengasih*, *Cinta kasih*, dan *Suami Istri*

## **Pendahuluan**

Karya sastra dicipta, direka, ditulis, diungkapkan oleh penulis dan dilahirkan karyanya dengan maksud dan menyatakan hal-hal yang berfaedah bagi kehidupan serta peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat (Teeuw, 1984; Damono, 1992).

Salah satu buah karya sastra yang hingga kini masih relevan diselami maknanya adalah *Sêrat Ngèlmi Pangasih*. Serat ini menerangkan cara orang menerapkan cinta kasih, buku ini serapan dari pengetahuan orang-orang pandai pada zaman dahulu. Ditulis oleh R.Poedjahardja di Surakarta. Pada tahun Belanda:1924 atau dalam tahun Jawa Je kata tataraga rupa. (1854) Diterbitkan dan dijual oleh: Tan Khoen Swie. di Kediri 1931.

Membaca, memahami, mencermati dan menikmati karya sastra kita diajak berdialog dengan karya sastra tersebut. Isi *serat ngelmi pengasih* menerangkan bab cinta kasih yang saat ini mencapai titik nadir dan merupakan sebuah keniscayaan bagi kita untuk memahami secara jelas dan gamblang mengenai cinta kasih, utamanya cinta kasih yang berkaitan dengan Suami dan Istri.

Berbagai fenomena yang terjadi saat ini disinyalir salah satunya adalah kurang dipahaminya cinta kasih dan memudarnya makna cinta kasih sendiri. Saat ini cinta kasih hanya dimaknai setengah-setengah, tidak sampai relevansinya dan implikasinya dalam kehidupan, cinta kasih hanya di maknai yang lahir tidak sampai batinnya.

Contoh kasus KDRT (kekerasan rumah tangga), ketidakharmonisan dalam rumah tangga menyebabkan perceraian imbasnya adalah anak kurang kasih sayang akibatnya adalah maraknya kenakalan remaja. Kasus selanjutnya mengenai pemaknaan cinta kasih yang salah adalah pemaknaan cinta kasih antara remaja yang pada ujungnya adalah LKMD.

Contoh cinta kasih yang melegenda seperti cerita dalam Ramayana yang mengisahkan cinta kasih Rama dan Sinta, kisah Taj Mahal, Romeo dan Juliet dan sebagainya. Cinta kasih yang suci dan ikhlas akan membuahkan hal yang manis dan memberikan energi positif.

Korelasi sastra dan kekuasaan dalam *serat ngelmi pengasih* adalah sebagai upaya penulis untuk mempengaruhi pembaca supaya pembaca menerapkan nilai-nilai yang ada dalam serat ngelmi pengasih. Nilai-nilai itu adalah konsep cinta kasih yang ada didunia ini.

Kristalisasi-kristalisasi cinta kasih yang termuat dalam *Serat Ngelmi Pengasih* merupakan internalisasi dari nilai budaya (Jawa) yang menitikberatkan keseimbangan antara kesejahteraan lahir dan batin. Nilai budaya (Jawa) tersebut hingga sekarang masih ada relevansinya walaupun adanya penyesuaian yang merupakan sifat budaya dinamis.

Pengkajian ini berdasarkan kajian sastra dan kekuasaan yakni dengan tujuan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam *Serat Ngelmi Pengasih*. Dalam *Serat Ngelmi Pengasih* terdapat banyak penjelasan cinta kasih, maka fokusnya adalah cinta kasih kepada suami-istri sebagai keniscayaan dalam hidup berumah tangga. Sebagai alasannya adalah sebagai tuntunan dalam menjalani rumah tangga yang penuh kasih sayang. Rumah tangga yang penuh kasih sayang merupakan idaman bagi setiap orang, dengan rumah tangga yang penuh cinta kasih membuat rumah tangga bahagia lahir dan batin.

Bagi yang belum menikah ini dapat dijadikan acuan pemaknaan cinta kasih dan digunakan sebagai bekal untuk pernikahannya, dengan bekal ini akan mempersiapkan pernikahan yang lebih baik dan penuh cinta kasih sehingga bangunan keluarganya kokoh tidak mudah ambruk ketika ada badai yang menerpa.

## **Hubungan Sastra dan Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain supaya mengikuti kehendaknya baik secara paksa (kekerasan) maupun secara sukarela (Putra Astiti 2009:2). Sedangkan karya sastra adalah hasil kreatifitas seniman pengarang, baik lama maupun modern, baik lisan maupun tulisan (Kutha Ratna, 2008:450). Hubungan antara sastra dan kekuasaan dalam karya sastra terdapat kandungan ide-ide yang dimiliki pengarang kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisan yang mempunyai nilai estetika, membuat masyarakat tertarik untuk membacanya. Karena itulah diharapkan isi-isi dalam karya sastra dapat mempengaruhi masyarakat (Ideologi, Kekuasaan dan Korupsi dalam Karya Sastra: <https://paramitaibg.wordpress.com/2014/01/16/ideologi-kekuasaan-dan-korupsi-dalam-karya-sastra/>).

Dalam *serat ngelmi pengasih* hubungan antara sastra dan kekuasaan adalah cara mempengaruhi pembaca dengan memberikan pedoman cinta kasih di dunia ini, khususnya cinta kasih antara suami dan istri. Pedamon tersebut berupa nilai-nilai cinta kasih.

Karya sastra dijadikan media untuk menungkan gagasan, ide dan ideolgi. Dengan membaca naskah tersebut seseroang akan mempunyai pedoman berkaiatan dengan cinta kasih. Cinta kasih yang benar akan membawa keluarga ke jalan yang benar. Namun apabila cinta kasih



diterapkan kejalan tidak benar akan membawa keluarganya kepusaran kenistaan. Banyak hal yang dimulai dari keluarga misal korupsi bisa timbulk dari keluarga yakni melalui bisikan istri atau sebaliknya.

## **Isi Serat Ngelmi Pengasih**

*Serat Ngelmi Pengasih* merupakan karya sastra yang isinya menerangkan konsep cinta kasih. Buku ini merupakan hasil olah pikir dari pengetahuan orang-orang pandai pada zaman dahulu sebagai pedoman menjalani kehidupan yang lebih harmonis.naskah ini ditulis oleh R.Poedjardja di Surakarta. Pada tahun Belanda:1924 atau dalam tahun Jawa Je kata tataraga rupa. (1854) Diterbitkan dan dijual oleh: Tan Khoen Swie. di Kediri 1931.

*Serat Ngelmi Pengasih* dimulai dari kata pengantar dan berurutan diterangkan per bab, adapapun isi dari Serat Ngelmi Pengasih adalah sebagai berikut.

### **I. Uraian ilmu cinta kasih dengan do'a serta caranya.**

1. Cara berkorban
2. Cara memberi
3. Cara mengalah
4. Cara bersabar/lapang dada

### **II. Sarana cinta kasih dengan cara cinta kasih yang tulus.**

1. Cinta pada rejeki
2. Cinta pada suami/istri
3. Cinta pada orang tua/ayah ibu
4. Cinta pada anak/putra
5. Cinta pada sanak-saudara
6. Cinta pada tetangga sekitar
7. Cinta pada teman
8. Cinta pada kenalan
9. Cinta pada atasan/perangkat desa
10. Cinta pada pembantu
11. Cinta pada guru
12. Cinta pada murid
13. Cinta pada musuh
14. Cinta pada binatang

### **III. Kemuliaan cinta kasih dengan berbuat kebaikan dan penjelasan yang dimaksud dengan**

1. Nistha
2. Madya
3. Utama
4. Pemberian nistha

5. Pemberian madya
6. Pemberian utama

Dari daftar isi diatas yang akan menjadi pokok kajian adalah konsep cinta kasih terhadap suami ataupun istri. Dengan adanya penjelasan konsep ini akan menjadikan keluarga yang berkualitas dan membentuk generasi yang lebih baik. Keluarga adalah penyemai benih generasi masa depan.

## Konsep Cinta Kasih Suami Istri

Konsep cinta kasih yang termuat dalam Serat Ngelmi Pengasihian berkaitan dengan Suami Istri, dibagi menjadi dua yakni cinta kasih suami terhadap istri dan cinta kasih istri terhadap suami. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

### 1. Cinta kasih suami terhadap istrinya

Konsep cinta kasih suami terhadap istrinya diejawantahkan kedalam empat tahapan yakni *trêsna*, *ngomahi*, *ngayani*, *ngajèni*, dan *ngéman*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

#### a. *Trêsna*

Tingkat fundamental cinta kasih suami terhadap istrinya adalah *tresna* atau cinta. Cinta ikhwal penting dalam membangun rumah tangga, dengan cinta yang tulus rumah tangga diharapkan harmonis. Konsep cinta kasih dalam *serat Ngelmi Pengasihian* berkaitan *tresna* yakni diterjemahkan hati senantiasa *mathuk* dan *gathuk atunggal rasa*, artinya jiwa raga bersatu satu kata, adanya kecocokan lahir batinnya. Ketika hati sudah menjadi satu saling mencintai maka dalam menjalani kehidupan akan semakin mesra, ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan mengutamakan rasa cinta. Berikut teks yang menjelaskan konsep *tresna* sebagai berikut:

*Trêsna*, lipipun: manah gathuk tuwin mathuk awit badan kèkalih prasasat dados tunggal, dados kèdah ngulinakakên pamoring kalakuan ingkang prayogi, nyondhongakên raosing cipta, sarta ngruntutakên larasing sêdya, supados salaminipun sanpun ngantos pêdhot. Awit tiyang jêjodhoan punika manawi ngantos pêpisahahan sêjatosipun nguciwakakên ing kamanungsan.

Terjemahan-ipun,

**Mencintai**, artinya: hati bertemu menjadi satu dan cocok, sebab dua manusia berbeda jenis kelamin menjadi satu dan menyatu, jadi harus membiasakan dengan tindakan yang baik, cipta rasa dan menyelaraskan tujuan, supaya selamanya bahagia jangan sampai bercerai, sebab bila sampai pernikahan

itu putus, sebenarnya mengecewakan.

## **b. Ngomahi**

Ketika seorang menjadi suami tanggung jawab istri ada di tangannya, salah satunya adalah memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Tempat tinggal adalah rumah yang tetap, nyaman, aman dan disana akan dilahirkan putra penerus. Konsep rumah adalah rumahku adalah surgaku.

Dalam *serat ngelmi pengasih* diterjemahkan dengan istilah *ngomahi*. Artinya suami memberikan rumah untuk tempat tinggal, dalam memberikan rumah dalam serat ngelmi pengasih dijelaskan tempat tinggal itu harus baik dan pantas, walaupun sederhana. Istri harus mau menerima dan manut. Petikannya adalah sebagai berikut.

**Ngomahi**, *liripun: mrênahakên panggénan sapirantosipun ingkang kalayan pantês, supados sampun ngantos katingal saru, sagêda malah katingal samuwa kamanungsanipun.*

Terjemahannya

**Bertempat tinggal**, artinya: memberikan tempat tinggal dan perabotannya, jangan sampai kelihatan kurang bagus, sedapat mungkin tampak lebih menarik.

## **c. Ngayani**

Tanggung jawab wanita ketika sudah menika dalah menjadi tanggung jawab suaminya. Seorang suami memberikan penghidupan yang layak terhadap istrinya supaya rumah tangganya berjalan dengan baik. Dalam serat ngelmi pengasih diistilahkan *Ngayani* yakni memberikan penghidupan bagi istrinya seperti pangan, sandhang dan papan. Suami terhadap istrinya harus memberikan nafkah baik lahir maupun batin, nafkah lahir untuk mencukupi secara lahiriyah misal pakaian, makanan dan sbegainya.

Dalam serat ini tidak dijelaskan nafkah batin namun nafkah batin ini penting dan prelu supaya hidup rumah tangga semakin harmonis. Dengan nafkah batin akan meneruskan keturunan, memeberikan ketentraman dan kenyamanan. Nafkah batin wujud cinta dan wujud memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Keterangannya sebagai berikut.

**Ngayani**, *liripun: nyukani kaya inggih punika nyukani sarana minangka sandhang tédhanipun pawèstri, utaminipun ingkang nyékapi, supados saya ngagêngakên antêping jêjodhoan.*

Terjemahannya

**Menafkahi**, artinya: memberikan nafkah yaitu memberikan pakaian, makanan dan sebaiknya mencukupi, supaya semakin memberikan kemantapan dalam berumah tangga.

#### d. Ngajèni

Suami adalah *tuldha* bagi keluarganya artinya memberikan contoh yang baik, mulai dari perilakunya, perbuatan dan perkataan. Prilaku suami terhadap istrinya dalam serat ngelmi pengasih mapu *Ngajèni* yakni menghormati istrinya. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebisa mungkin tidak berbuat seenaknya dengan istrinya apalagi sampai KDRT.

Dalam *serat ngelmi pengasih* dijelaskan suami tidak diperkenankan menghina, berbuat semena-mena dan suami tidak boleh sok kuasa. Dengan memperhatikan rambu-rambu ini maka keluarga yang dibangunnya semakin berkualitas. Petikannya sebagai berikut.

*Ngajèni, liripun: ngurmati, inggih punika botèn ngrèmèhakên dhatêng pawèstri, botèn ngina, botèn sawiyah-wiyah, tuwin botèn sawênang-wênang.*

Terjemahannya

**Menghormati**, artinya: yaitu tidak merendahkan pada istri, tidak menghina, tidak semena-mena dan tidak sok kuasa.

#### e. Ngéman

Istri adalah anugrah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada suami, ibarat menanam pohon mangga, tidak perlu merawat sampai berbuah. Seorang suami hanya mengunduh ketika pohon mangga sudah matang, tinggal menikmati manisnya buah mangga. Kebaikan maratuwa harus diingat betul, betapa sulitnya merawat buah mangga hingga manis ketika dipetik.

Dalam serat ngelmi pengasih dijelaskan dengan kata *Ngeman*, artinya menjaga yakni menjaga istrinya dengan sebaik-baiknya jangan sampai disia-siakan. Suami menjadi tameng pelindung bagi keluarganya, pengayom dan peneduh. Dengan konsep ini keluarga yang dibangun selalu bersyukur dan memperlakukan dengan baik istrinya. Berikut petikan teksnya di bawah ini.

*Ngéman, liripun: rumêksa.*

Terjemahannya

**Menyayangi**, artinya: menjaga.

## 2. Konsep cinta kasih istri dengan suaminya

Konsep cinta kasih selanjutnya adalah cinta kasih istri dengan suaminya, konsep ini merupakan timbal balik dari konsep cinta suami

kepada istrinya. Hal ini adanya hukum timbal balik supaya adil dan menjadi perhatian. Dalam *serat ngelmi pengasih* cinta kasih istri dengan suaminya diwujudkan rasa *bêkti*, *sumungkêm*, *mituhu*, *ngladosi*, *sêtya*, *rumêksa*, *biyantu*, *ngaji-aji*, *saha sumarah*. Berikut penjelasannya.

#### a. **Bêkti**

Ketika seorang wanita menjadi istri dari seseorang maka dia harus menurut kepada suaminya. Suami merupakan pengganti bapak ibunya ketika sudah menika. Dalam budaya Jawa ada idiom istri itu *suwarga nunut neraka katut*. Artinya seorang istri harus taat pada suami selagi suami pada jalur yang benar.

Dalam *serat ngelmi pengasih* dinamakan *Bekti*, artinya sebagai rasa hormat kepada suaminya. Rasa hormat istri kepada suami dengan cara berbuat baik, tutur bicaranya manis (*nyenengake*, *grapyak*, *sumanak*) dan menomor satukan suaminya. Dengan cara itu istri akan tahu diri dan menjadikannya istri yang sholihah dalam konsep islam. Petikannya sebagai berikut.

*Bêkti*, liripun: *nêmbah utawi tansah damêl kasaénan tiyang jalêr kapundhi-pundhi kapindha dhustri utawi kaangêp guru awit laki punika lêlîntuning rama ibu.*

Terjemahannya

**Berbakti**, artinya: *hormat ialah selalu berbuat kebaikan, suami sangat dihormati diumpamakan atau dianggap pengganti ayah ibu.*

#### b. **Sumungkêm**

Pada saat seorang wanita mau menikah harus mempunyai tekad yang kuat dan mantap. Ketika tekad kuat dan mantap membangun rumah tangga tidak akan goyah. Terpaan angin sekencang angin topan, sekuat badai digurun pasir, dan sedingin ketika musim dingin akan mampu mengendalikannya.

Dalam *serat ngelmi pengasih* diartikan dengan istilah *Sumungkem* artinya seorang istri harus mantab hatinya kepada suaminya, menaati semua peraturan yang baik dan tidak memandang lelaki lain selain suaminya, artinya tidak ada niat untuk berpaling dari suaminya atau berbuat selingkuh. Berikut petikannya.

*Sumungkêm*, liripun: *mantêp botên gînggang pangrêh ingkang utami, sarta botên mangroh ing tingal, kajawi namung mêlêng sawiji dhatêng lakinipun.*

Terjemahannya

**Sangat hormat**, artinya mantab tidak ragu pada peraturan

yang baik, dan tidak menduakan pandangan, selain hanya pada suami.

### c. Mituhu

Perintah suami bagaikan *sabda pandita ratu tan kena wola wali* yakni harus ditaati dan dilakukan selagi perintah itu tidak melenceng dari norma dan kaidah-kaidah yang ada. Namun ketika suami memerintah sesuatu hal yang tidak baik istri wajib menolaknya dan tidak menaatinya.

Dalam *serat ngelmi pengasih* diartikan *Mituhu* artinya memperhatikan suaminya dengan bersungguh-sungguh dan menjalankan sepenuh hati segala perintah yang baik dari suaminya. Taatnya istri kepada suami rumah tangganya akan diselimuti rasa kebahagiaan. Pendidikan anak akan semakin lebih baik. Berikut petikan teksnya.

*Mituhu, liripun: tumêmên, inggih punika ngèstoaka[-21-] kên ing paréntah ngèngêt-èngêt ing piwêlang, tuwin mundhi-mundhi ing piwulang, punapa déné tansah nandukakên ulat manis, têmbung aris, patrap rèh, sêsaminipun.*

Terjemahannya

**Patuh**, artinya : sungguh-sungguh, yaitu melakukan perintah, mengingat-ingat pesan, sikap, aturan dan sebagainya.

### d. Ngladosi

Dalam *serat ngelmi pengasih* cara istri memperlakukan suaminya dinamakan *Ngladosi*, artinya melayani suami dengan sepenuh hati, lahir batin. Apa yang diinginkan suami diberikan selagi keingan itu baik. Istri dalam ilmu fiqiyah bagaikan ladang yang siap ditanami dan dalam budaya jawa istri adalah wanita artinya *wani ditata atau wani nata*.

Istri selalu memperhatikan suaminya perkataan suami dipegang teguh dan dijalan dengan sebagaik-baiknyua. Setelah istri diberi wejangan maka istri harus menjalankannya jika perintah itu baik. Berikut petikannya.

*Ngladosi, liripun: nglampahi pangrèh inggih punika tumindak punapa paréntah ing kakung kalayan pantês, têngêsipun pantêsipun lampahi tiyang èstri, botên manèk krambil.*

Terjemahannya

**Melayani**, artinya : melaksanakan aturan yakni bertindak atas perintah suami dengan pantas, maksudnya pantas sebagai seorang perempuan, tidak memanjat pohon kelapa.

### e. **Sêtya**

Kehidupan tidak selamanya mudah, ada kalanya diatas ada kalanya dibawah seperti roda yang berputar, seperti panah Bethara Kresna yakni senjata cakra. Ketika keadaan dibawah inilah ujian bagi istri mau setia atau tidak.

Dalam serat ngelmi pengasihian dinamakan *sêtya* artinya setia pada suami, seorang istri harus mempunyai kesetiaan kepada suaminya walau keadaan bagaimanapun. Berikut penjelasannya.

*Sêtya, liripun: têtên inggih punika wantah, lugu, tuwin pasaja utawi botên bêbêngèsan tuwin botên lèlèmèran punapa déné botên dora cara.*

Terjemahannya

**Setia**, artinya : tidak dusta, yaitu apa adanya dan sederhana atau tidak selingkuh apalagi berbohong.

### f. **Rumêksa**

Hati, perasaan tidak bisa dibohongi, menjadi yang paling sulit adalah menjada perasaan atau hati. kalau tidak dijaga akan mengakibatkan pertengkaran hebat. Dalam serta ngelmi pengasihian dijelaskan dengan istilah *rumêksa* yakni menjaga perasaan yakni suatu rasa yang yang bisa menimbulkan perasaan malu dan mampu menyimpan rahasia keluarga. Selain mampu menjaga rasa seorang istri juga mampu menyimpan rahasia keluarga. Berikut petikannya.

*Rumêksa, liripun: anjagi karikuhaning kakung ngênêp wados, botên calak lancang sêsaminipun.*

Terjemahannya:

**Menjaga**, artinya : menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan rasa malu suami, menyimpan rahasia, tidak berbuat sekehendak hati sendiri.

### g. **Biyantu**

Bekerja adalah kewajiban suami namun tidak salah apabila istri membantu mencari nafkah. Konsep membantu tidak hanya berlaku pada istri namun suami juga berlaku. Dalam *serat ngelmi pengasihian* dijelaskan dengan istilah *biyantu* atau membantu dalam hal ini adalah sebisa mungkin istri bisa membantu suaminya namun atas dasar izin suami, kalau suami tidak mengizinkan jangan membantah. Jadi ketika istri mau membantu dalam hal nafkah haru seizin suaminya. Berikut petikannya.

**Biyantu**, lirisun: *rêrencangan saha conggahipun punapa ingkang kados kapakên tuwin wrastaning kakung, kêdah dipunlabêti.*

Terjemahannya:

**Membantu**, artinya : menolong sesuai kemampuan atas perintah suami dan membela kesulitannya.

#### **h. Ngaji-aji**

Suami adalah nomor satu, istri harus mampu menomor satukan suami, dalam serat ngelmi pengasihian dijelaskan dengan *ngaji-aji* yakni ngluhuraken suaminya artinya menghormati dan menjunjung tinggi suaminya, mendahulukan kehendak suaminya. Petikannya adalah sebagai berikut.

**Ngaji-aji**, lirisun: *mundhi-mundhi sarta ngluhurakên ing kakung, punapa déné botên mêngku inggih punika botên ngrumiyini karsaning laki.*

Terjemahannya.

**Menghargai**, artinya : sangat menghormati dan menjunjung tinggi suami dan tidak mendahului kehendaknya.

#### **i. Sumarah**

Keluarga yang bahagia dan harmonis dalam serta ngelmi pengasihian dinamakan *sumarah* yakni merupakan selalu menuruti perintah yang baik dari suaminya dan mempunyai welas asih, rukun terhadap keluarganya. Petikannya adalah sebagai berikut.

**Sumarah**, lirisun: *manut miturut pangrèhing prayogi, inggih botên marêngkang pranataning kakung, dados nama gadhah iman tégêsipun kapracayan.*

Terjemahannya

**Berserah diri**, artinya : selalu menuruti perintah baik, tidak boleh tidak menurut aturan suami, jadi berarti mempunyai keyakinan. Kemudian sebagai istri, harus rukun, artinya satu tekad atau tujuan saling memahami.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan konsep cinta kasih suami istri merupakan kesatuan yang utuh tidak bisa dipisahkan. Intinya adalah adanya adanya hubungan sebab akibat. Cinta kasih suami terhadap



istrinya adalah *trêsna*, *ngomahi*, *ngayani*, *ngajèni*, *saha ngéman*. Sedangkan cinta kasih istri terhadap suaminya adalah *bêkti*, *sumungkêm*, *mituhu*, *ngladosi*, *sêtya*, *rumêksa*, *biyantu*, *ngaji-aji*, *saha sumarah*.

Konsep cinta kasih suami dan istri merupakan upaya pengarang kepada pembaca untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut dikristalisasikan dan diejawantahkan dalam kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut hubungan suami dan istri akan semakin harmonis dan langgeng. Bagi yang belum menikah dapat mengambil makna cinta kasih, dengan mamahi cinta kasih tidak hanya berakhir pada hal-hal yang indah, namun ada tanggung jawab di balik itu semua. Selain itu ini dapat dijadikan bekal kelak nanti ketika sudah menikah. Sehingga keluarga yang dibina *kebak katresnan*. Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga yang harmonis akan menjadi model atau contoh dan panutan. Masyarakat akan memandang baik keluarga tersebut.

## Daftar Pustaka

- Putra Astiti, Tjok Istri, 2009. Ideologi dan Kekuasaan “*Hand Out* untuk mata kuliah Ideologi dan Kekuasaan”. Magister Kajian Budaya UNUD : Denpasar
- Kutha Ratna, Nyoman. 2008. *Postkolonialisme Indonesia “Relevansi Sastra”*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sêrat Ngèlmi Pangasih. Perpus Kraton Jogjakarta.
- Sabrina Maharani. 2009. *Filsafat Cinta*. Garasi: Jogjakarta.
- Teeuw. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tusthi Eddy, Nyoman. 2008. *Somah*. Sanggar Buratwangi : Amlapura.
- Ideologi, Kekuasaan dan Korupsi dalam Karya Sastra: <https://paramitaibg.wordpress.com/2014/01/16/ideologi-kekuasaan-dan-korupsi-dalam-karya-sastra/>. Diakses pada tanggal 15 November 2015

# BAHASA KEKUASAAN DALAM KARYA SASTRA (PERSPEKTIF EPISTEMOLOGIS MICHEL FOUCAULT)

**Ida Sukowati**

FKIP UNISDA Lamongan

E-mail: sukowati\_ida@yahoo.com\_

## **ABSTRAK**

*Sastra sebagai sebuah sistem permainan tanda, sebenarnya tidak berkewajiban untuk mengikuti hukum moral tertentu. Dunia sastra adalah sebuah dunia penciptaan yang memiliki role of game (meminjam istilah Wittgenstein) tersendiri, untuk kreatif sastra memerlukan kebebasan untuk keluar dari tekanan moral, adanya dominasi kekuasaan justru membuat sastra semakin memaksimalkan role of game dan bermain dengan kreatifitas. Ketika kekuasaan memasuki ranah penandaan (teks sastra), maka dapat diyakini akan ada resistensi yang terbangun di dalam teks, dalam konsep AWK Michael Foucault dinamakan sebagai unsur yang absen/diam. Sebuah strategi kuasa untuk melakukan kontrol terhadap karya sastra melalui role of game tertentu. Berjalannya fungsi kontrol dalam teks sastra melalui wacana, merupakan contoh berjalannya relasi kuasa ilmu pengetahuan terhadap teks sastra, yaitu gagasan-gagasan dan rekaman strategi kuasa yang dilakukan penguasa untuk melakukan kontrol terhadap karya sastra. Perspektif kuasa Foucault, memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik sosial*

untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Berfokus pada totalitas relasi unsur wacana dan manifes yang terselubung guna membongkar relasi dominasi kekuasaan antarkelompok di dalam karya sastra. Berdasarkan uraian tersebut perspektif Kuasa Michael Foucault cukup memadai ditetapkan perspektif epistemologis untuk mengkaji karya-karya sastra dalam konteks kekuasaan. Berdasarkan uraian tersebut menurut perspektif Foucault terdapat tiga bentuk relasi-relasi kekuasaan yang berkaitan dengan konsep epistemologis bahasa yang model produksi sastra, yaitu. Pertama, relasi kuasa. Kedua, unit proposisi politik wacana kuasa dalam sastra. Ketiga, konteks kuasa.

**Kata kunci:** Epistemologi, Kuasa, Michel Foucault.

## Pendahuluan

Sastra sebagai sebuah sistem permainan tanda, sebenarnya tidak berkewajiban untuk mengikuti hukum moral tertentu. Dunia sastra adalah sebuah dunia penciptaan yang memiliki *role of game* (meminjam istilah Wittgenstein) tersendiri, untuk kreatif sastra memerlukan kebebasan untuk keluar dari tekanan moral, adanya dominasi kekuasaan justru membuat sastra semakin memaksimalkan *role of game* dan bermain dengan kreatifitas, fenomena dasariah yang diperlukan agar konteks sastra dapat berkembang. Bataile (1957: 20-21) bahkan secara ekstrem menyatakan bahwa, sastra boleh mengatakan segalanya dan pemberontakan merupakan dimensi paling menonjol dalam karya sastra. Sebuah realitas subtansial yang ada dalam hasrat penulis, sehingga upaya kuasa untuk memarginalkan hal-hal yang subtansional (penindasan-penderitaan) justru menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kreatifitas terkait. Ketika kekuasaan memasuki ranah penandaan (teks sastra), maka dapat diyakini akan ada resistensi yang terbangun di dalam teks, dalam konsep AWK Michael Foucault dinamakan sebagai unsur yang absen/diam. Sebuah strategi kuasa untuk melakukan kontrol terhadap karya sastra melalui *role of game* tertentu.

Konteks hubungan kekuasaan yang timpang (*the subalterm*), bagaimanapun memaksa pengarang untuk memiliki *role of game* yang memadai, untuk mengolah konflik agar tampak layak muncul dalam institusi sastra, dalam hal ini wacana kuasa dalam sastra. Kondisi sosio psikologis yang mengharuskan penulis memiliki kreatifitas untuk menghindari *political correctness*, agar mampu membawa teks terangkat pada suasana trans penciptaan, dan keluar dari suasana isolasi, mengingat tugas otentik sastra hanya dapat dipahami dalam hasrat untuk berkomunikasi dengan pembaca. Karena *political correctness* dapat menjebak karya sastra

menjadi kebenaran lain yang cenderung mendistorsi unsur intrinsik karya sastra, membuat sastra terbebani oleh moralitas politik yang datang dari luar sastra.

Berjalannya fungsi kontrol dalam teks sastra melalui wacana, merupakan contoh berjalannya relasi kuasa ilmu pengetahuan terhadap teks sastra, yaitu gagasan-gagasan dan rekaman strategi kuasa yang dilakukan penguasa untuk melakukan kontrol terhadap karya sastra. Sejalan dengan itu, ditegaskan oleh Haryatmoko (2013: 3) bahwa kekuasaan wacana memang merupakan lahan sastra. Selanjutnya mengutip Foucault, Haryatmoko menambahkan bahwa konstestasi kuasa dalam sastra harus dipahami sebagai sesuatu yang menyangkut beragam hubungan-hubungan kekuatan yang melekat pada bidang organisasinya (Toer, 1982: 25). Berdasarkan uraian tersebut perspektif Kuasa Michael Foucault cukup memadai ditetapkan perspektif epistemologis untuk mengkaji karya-karya sastra dalam konteks kekuasaan.

Perspektif kuasa Foucault, memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik sosial untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Berfokus pada totalitas relasi unsur wacana dan manifes yang terselubung guna membongkar relasi dominasi kekuasaan antarkelompok di dalam karya sastra. Kontrol menurut Analisis Kuasa Foucault<sup>9</sup> (AWK) tidak selalu bersifat fisik, tapi bisa juga mental atau psikis, misalnya kuasa ilmu pengetahuan, karena prinsipnya tiada legitimasi dalam ilmu pengetahuan tanpa kekuasaan (Yusuf, 2009: 25). Berdasarkan uraian tersebut menurut perspektif Foucault terdapat tiga bentuk relasi-relasi kekuasaan yang berkaitan dengan konsep epistemologis bahasa yang model produksi sastra, yaitu. Pertama, *relasi kuasa*. Kedua, *unit proposisi politik wacana kuasa dalam sastra*. Ketiga, *konteks kuasa*.

## Mengurai Perspektif Kuasa Michel Foucault

Perspektif Kuasa Foucault dikembangkan berdasarkan konsep arkeologi dan genealogi yang digagasnya, menurut Foucault kesadaran epistemologis manusia yang paling asli dan merontokkan konstruksi

---

<sup>9</sup> Analisis Kuasa Foucault (AWK Michel Foucault) memandang bahwa konsepsi kekuasaan tertanam dan dimiliki individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan dan sah secara hukum (*legitimate*), konsep kekuasaan tersebut tidak bersifat *sovereign power*, melainkan *disciplinary power*, dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melalui normalisasi kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. Lihat “*The Order of Think Archeology of Human Sciences*” (Foucault, 2008:11).

pengetahuan adalah realitas keterbatasan yang dimiliki oleh manusia (*the finitude*). Foucault menggunakan analisis keterbatasan (*The analytic of Finitude*) ini untuk menunjukkan fakta ambiguitas manusia antara sebagai subjek dan/atau sebagai objek. Ada pemahaman-pemahaman yang nampaknya tersetruktur dalam proses pembacaan manusia. Manusia, bagi Foucault adalah entitas yang tersetruktur. Ada ranah empiris dan sekaligus yang transenden dalam diri manusia, ada ranah historis yang telah terpikirkan (*cogito*) selama ini dan sekaligus area-area yang sampai sekarang belum atau tidak terpikirkan (*le impanse*) dalam diri manusia.

Foucault menempatkan manusia dalam ruang subjektif-objektifnya yang menjadikan manusia tidak melepaskan sifat-sifat keterbatasan yang ada selama ini. Alasannya, menurut Foucault, selama ini gagasan tentang ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dimiliki oleh manusia ini tidak menghadirkan pemahaman yang komprehensif atau utuh tentang manusia melainkan pemahaman tentang manusia yang disintegratif. Oleh karena itu perlu ada unifikasi di antara reduksi, klarifikasi, dan interpretasi di antara realitas keterbatasan yang ada. Oleh Foucault, ruang-ruang empiris dan transendensi serta moment-moment historis baik yang terpikirkan atau tidak terpikirkan dalam perjalanan kehidupan manusia ditelaah lebih dalam, khususnya dalam 'sampel' objek kajian yang ia pilih yakni; kegilaan, seksualitas<sup>10</sup>, penjara dengan menggunakan ancangan teori yang ia bangun yakni arkeologi.

Selanjutnya melalui genealogi Foucault mengenalkan konsep tentang teknologi kuasa sebagai prinsip utama yang melahirkan kebenaran baik dalam bentuk humanisasi sistem hukum/penghukuman atau bahkan prihal pengetahuan tentang manusia. Menurut genealogi Foucault, kebenaran tidak serta merta membentuk tanpa melalui proses. Ada proses yang terpola sedemikian rupa, sehingga menjadi kebenaran yang dikonstruksikan dan dianggap sebagai yang benar, sebagaimana yang perkembangan yang terjadi terkait konsep kedisiplinan (subtansi penjara). Itulah yang dikonsepsikan Foucault sebagai genealogi. Genealogi menurut Foucault penting untuk menyuarakan dan menyingkap otonomi wacana dan pengetahuan agar tidak terjebak dalam represi kuasa. Genealogi juga dapat menunjukkan bagaimana objektivasi penalaran terbentuk dalam jejak historisnya.

Pada ranah itu pula Foucault menemukan bagaimana sesungguhnya bangunan keilmuan (sosial) yang ada selama ini justru banyak

---

<sup>10</sup> Tentang seksualitas ini Foucault menulis *History of Sexuality* yang terdiri dari tiga jilid. Jilid pertama *The Will of knowledge*, jilid kedua *The Use of Pleasure*, dan jilid ketiga. *Care of Self*. 13 Karya-karya tersebut ditulis pada era tahun 1970-an.

mengandung anomali-anomali. Oleh karena Foucault merasa penting untuk kembali menelaah lebih jauh bagaimana pengetahuan dibentuk (pola *discursive formation of knowledge*), baik itu dalam ranah *episteme*-nya (pengetahuan), maupun dalam ranah *aparatus*-nya dalam bentuk kuasa. Kuasa menurut Foucault itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan menurut genealogi Foucault ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Karena kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.

Keterkaitan antara arkeologi dan genealogi adalah dalam konsep *episteme* dan *aparatus*. *Episteme* merupakan konsep arkeologi Foucault yang dimaknai sebagai bentuk pengetahuan yang berupaya memberi pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan konsep genealogi Foucault yang juga disebut sebagai *episteme*, yakni untuk mengetahui bagaimana terjadinya perubahan dalam rezim pengetahuan dari suatu masa, karena beroperasinya kekuasaan. Sementara *apparatus* sebagai konstruk genealogi dimaknai sebagai struktur elemen-elemen heterogen yang ada dalam sebuah teks, baik yang tertkatakan maupun yang tidak, termasuk pola-pola dan strategi yang mendukung kekuasaan, dan pelbagai ilmu pengetahuan yang mendukungnya. Dengan demikian terlihat bahwa gagasan tentang arkeologi<sup>11</sup> Foucault dan genealogi<sup>12</sup> Foucault yang menjadi benang merahnya adalah Konteks kuasa yang terdiri *dari apparatus* dan *episteme*.

---

<sup>11</sup> Konsep tentang arkeologi yang dipahaminya sebagai tingkatan investigasi arkelogis dalam tingkatan pemikiran dalam suatu proyek yang memfokuskan kajiannya pada apapun yang membuatnya menjadi mungkin. Dengan analisis arkeologis ini akan diketahui pola-pola kemiripan ruang dimana orang berbicara atau ruang dimana seseorang melihatnya. Ada pola-pola yang saling merajut dan membentuk bagaimana gagasan itu dibangun. Bangunan itulah yang dinamai oleh Foucault sebagai *episteme* (pengetahuan) dan menjadi konsep *ketiga*. Tentang *episteme* ini Foucault reeeeeee54menulis; “*In any given culture and at any given moment, there is always only one episteme that defines the conditions of possibility of all knowledge, whether expressed in a theory or silently invested in a practice*”. Lihat Michel Foucault, *The Order of Things: An Archeology of Human Science*, (New York: Ventage, 1973), hlm.xx.

<sup>12</sup> Genealogi adalah cara yang digunakan Foucault untuk menunjukkan bagaimana objektivasi penalaran terbentuk dalam jejak historisnya

Melalui konsep-konsep di atas, Foucault ingin merajut kembali wilayah kata-kata/*mots* (baca: bahasa) dan sesuatu/*choses* (baca: manusia) sebagai sesuatu yang asali dalam tumbuh kembangnya gagasan. Bagi Foucault, kesadaran akan posisi sentral bahasa dan manusia merupakan titik awal lahirnya kesadaran baru tentang pengetahuan manusia. Bahasa dalam hal ini bahasa sastra adalah sebuah sistem yang sengaja dibangun sebagai alat kekuasaan untuk membangun sebuah kesadaran kolektif. Bahasa dalam karya sastra digunakan sebagai *speech act theory*<sup>13</sup> yang berperan sebagai sebuah sistem permainan tanda dan aturan dalam bahasa sastra, sebuah konsep yang disebut Lyotard sebagai *transformation of the game rules for science, art, and literature*<sup>14</sup>.

### **Konsep Epistemologis Michael Foucault dalam Analisis Bahasa Kuasa**

Bahasa kuasa dalam karya sastra berdasarkan uraian epistemologis Michael Foucault tersebut, konsep ontologi bahasa kuasa dapat ditemukan melalui melalui langkah-langkah berikut: (1) seleksi topik, (2) pendalaman data, (3) identifikasi tema, (4) pencarian unsur-unsur wacana yang absen/ tersembunyi, pencarian relasi makna antar unsur wacana, (5) dan kontekstualisasi unsur wacana dalam jaringan kekuasaan-pengetahuan (Alba-Juez, 2009: 47). Bagaimana wacana dalam sastra diproduksi, siapa yang memproduksi, dan apa efek dari produksi wacana tersebut, merupakan inti dari konsep wacana mutakhir yang diperkenalkan Michel Foucault, secara lebih jelas dapat dilihat pada kutipan berikut.

Wacana tidaklah dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi mengikuti Foucault adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek). Wacana dapat diditeksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu (Eriyanto, 2011: 65).

Lebih jauh konsep epistemologis Foucault, merupakan konsep pemikiran yang mendasarkan diri pada hubungan kekuasaan yang

---

<sup>13</sup> Lihat Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition, A Report on Knowledge*.1984. London: Routledge. Page

<sup>14</sup> Teori ini dikemukakan oleh Ludwig Wittgenstein pada 1953 dan ditulis dalam salah satu *masterpiece*-nya nya *The Philosophical Investigation*. 1965. New York: Macmillan. Page 132. Inti teori ini sebagaimana didiskripsikan sendiri oleh Wittgenstein, dalam suatu kesimpulan sebagaimana ditulis dalam aphorisma no 23, yaitu “*Here the term ‘language game’ is meant to bring into prominence the fact that the ‘speaking’ of language is part of an activity, or form of life*”. of an activity, or form of life”.

disalahgunakan, serta ketidakadilan dan dominasi yang terdapat di dalam teks, tuturan atau gambar dalam konteks sosial politik. Perspektif epistemologis Foucault dalam analisisnya menekankan kajiannya pada bahasa dan konteks wacana. Bahasa dalam hal ini dilihat sebagai praktik sosial, sedangkan wacana adalah apa yang ada di balik teks atau apa yang tersirat di balik teks (*beyond*). Sebuah metode wacana dan bahasa; (b) bahasa dilihat sebagai praktik social (meliputi proses produksi teks dan, distribusi, dan permintaan pasar; dan (c) wacana adalah apa yang tersirat dibalik teks, sebagaimana kutipan berikut.

*“CDA is Foucault consolidated here as a ‘three dimensional’ frame work where the aim is to map three aim is to map three separate form of analysis onto one another: analysis of (spoken or written) language texts, analysis of discourse practice (process of text production, distribution and consumption) and analysis of discursive events as instances of sociocultural practice” (Fairclough, 1995: 2).*

Simpulan dari seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa perspektif epistemologis Foucault mengisyaratkan bahwa keberhasilan metode genealogi dan arkeologinya dalam penelitian, terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis multi-track, yakni mikro dan makro, sehingga kajian terhadap wacana kuasa tidak hanya sekedar memberi arti atau memaknainya, tetapi juga menjelaskan konstektualitas teks itu terhadap situasi sosiologi. karena itu Analisis terhadap konsep kuasa dalam karya sastra menurut Ahmad (2010: 20) tidak hanya melakukan elaborasi tetapi juga kritik terhadap teks itu sendiri.

Hal yang menarik dari perspektif epistemologis Foucault adalah tesisnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Foucault mendefinisikan kekuasaan dengan memakai istilah ‘kuasa’ dengan pemahaman yang agak berbeda dengan ahli yang lain. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Kalau para ahli lain memusatkan pengertian kekuasaan pada Negara, maka Foucault memusatkan pengertian kekuasaan kepada individu, subjek yang kecil. Menurut Foucault, strategi kuasa berlangsung dimana-mana (Eriyanto, 2011:65).

Dimana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, dimana saja ada manusia yang mempunyai hubungan satu sama lain dan dengan dunia, di situ



kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, atauran-aturan, dan hubungan itu dari dalam. Setiap masyarakat mengenal beberapa strategi kuasa yang menyangkut kebenaran, beberapa diskursus diterima, dan diedarkan sebagai benar. ada instansi-instansi yang menjamin perbedaan antara benar dan tidak benar. ada macam-macam aturan dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran (Bartens, 1985: 487).

Foucault berpendapat, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran (Aditjondro, 1994: 58). Pengetahuan tidak merupakan relasi samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan merupakan basis kekuasaan. Kuasa memproduksi pengetahuan, karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep Foucault tersebut menurut Aditjondro (1994: 59-60) untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Karena itu perspektif Epistemologis Michel Foucault memadai dipakai sebagai metode untuk mengkaji relasi kuasa dalam karya sastra.

Keingintahuan Foucault terhadap penjara sebagaimana gagasan yang ditulis dalam karyanya yang berjudul *Surveiller et punir (Discipline and Punish)* yang terbit pada 1975, merupakan upaya Foucault untuk mengamati konsep tentang kekuasaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran Foucault bahwa posisi kekuasaan yang melekat pada manusia cenderung instruktif dan homogen. Tesis Hobbes tentang *Leviathan* yang menjelaskan bahwa kedaulatan hasil kesepakatan individu ternyata menurut Foucault adalah sebaliknya, kesepatan antar individu-individu itulah yang membentuk kesepakatan untuk berdaulat. Foucault menganggap penjara adalah representasi dari kedisiplinan yang paling ketat. Kedisiplinan seperti halnya penjara menurut Foucault adalah bentuk nyata dari teknologi, bagaimana manusia memformulasikan konsep epistemologisnya untuk mengkonstruksi nilai aksiologis.

Perspektif epistemologis yang konstruksi aksiologisnya akhirnya digunakan untuk membangun relasi kuasa yang tidak hanya berada dalam tataran kata/*mots* (baca: bahasa), tetapi juga telah memasuki ranah tubuh/*choses* (baca: manusia) sebagai sesuatu yang alami dalam tumbuh kembangnya gagasan. Sebuah konsep epistemologis yang dikenal sebagai

panoptikon, atau kekuasaan yang meliputi, yang menghasilkan yang paling intim yakni seksualitas. Selanjutnya dalam karya sastra hal ini dapat diidentifikasi sebagai Politik wacana. Sebuah strategi pengawasan dan internalisasi politik yang bertujuan untuk membentuk subjek tertentu dalam suatu relasi kuasa. Dan diwujudkan melalui eksplorasi praktik-praktik diskursif yang sistematis dan tidak netral (kebenarannya dibentuk dan dikondisikan sesuai kepentingan kekuasaan). Dan dalam analisis teks sastra dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah epistemologis sebagai berikut.

(1) **Relasi Kuasa** dalam karya sastra adalah relasi kekuatan (*sovereign power*) dan ilmu pengetahuan (*disciplinary power*) yang secara inheren ada dalam kekuasaan, meliputi: a. *strategi kuasa*, adalah praktik sosial yang digunakan untuk melanggengkan mata rantai relasi kekuasaan yang bersifat sistemik dalam sebuah relasi kuasa (bentuk-bentuk relasi kekuatan kekuasaan yang beroperasi melalui wacana dan bahasa kekuasaan melalui pernyataan-pernyataan yang secara ilmiah ditemukan dalam karya sastra). b. *teknologi kuasa*, adalah kekuasaan dan pengaruh-pengaruh kepentingan Negara untuk melakukan control terhadap kuasa (contoh pembentukan Balai Pustaka) pada masa Hindia Belanda. c. *program relasi sosial kuasa*, adalah langkah pengerahan modal sosial untuk memperoleh legitimasi dalam relasi kuasa.

(2) **Unit Proposisi Politik wacana Kuasa**, meliputi: a. *konteks kuasa*, adalah situasi kekuasaan yang menjadi modal politik wacana; b. *mekanisme dominasi dan resistensi*, adalah cara institusi kuasa melakukan dominasi, namun bersifat hidden dan dan inheren dimana perspektif relasi dominasi memosisikan subjek subordinat dalam pilihan tindakan yang sesuai dengan yang dikendaki oleh sistem kekuasaan; c. *ketimpangan dalam distribusi kapital*, adalah ketidakseimbangan dalam sistem distribusi pengetahuan karena adanya penaklukan moral dan intelektual dalam sistem kuasa.

(3) **Konteks Kuasa**, meliputi: a. *episteme*, adalah tata aturan atau rezim pengetahuan (*archeology of knowledge*) yang berkuasa (*genealogy of power*) pada masa tertentu, b. *apparatus*. adalah struktur elemen-elemen heterogen dalam teks sastra, baik yang terkatakan ataupun tidak, yang berupa pola-pola hubungan kekuasaan yang mendukung, dan didukung oleh pelbagai ilmu pengetahuan, semisal wacana, hukum, dan institusi.

## Simpulan

Sastra sebagai sebuah sistem permainan tanda, sebenarnya tidak berkewajiban untuk mengikuti hukum moral tertentu. Dunia sastra adalah

sebuah dunia penciptaan yang memiliki *role of game* (meminjam istilah Wittgenstein) tersendiri, untuk kreatif sastra memerlukan kebebasan untuk keluar dari tekanan moral, adanya dominasi kekuasaan justru membuat sastra semakin memaksimalkan *role of game* dan bermain dengan kreatifitas. Ketika kekuasaan memasuki ranah penandaan (teks sastra), maka dapat diyakini akan ada resistensi yang terbangun di dalam teks, dalam konsep AWK Michael Foucault dinamakan sebagai unsur yang absen/diam. Sebuah strategi kuasa untuk melakukan kontrol terhadap karya sastra melalui *role of game* tertentu. Berjalannya fungsi kontrol dalam teks sastra melalui wacana, merupakan contoh berjalannya relasi kuasa ilmu pengetahuan terhadap teks sastra, yaitu gagasan-gagasan dan rekaman strategi kuasa yang dilakukan penguasa untuk melakukan kontrol terhadap karya sastra.

Perspektif kuasa Foucault, memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik sosial untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Berfokus pada totalitas relasi unsur wacana dan manifes yang terselubung guna membongkar relasi dominasi kekuasaan antarkelompok di dalam karya sastra. Berdasarkan uraian tersebut perspektif Kuasa Michael Foucault cukup memadai ditetapkan perspektif epistemologis untuk mengkaji karya-karya sastra dalam konteks kekuasaan. Berdasarkan uraian tersebut menurut perspektif Foucault terdapat tiga bentuk relasi-relasi kekuasaan yang berkaitan dengan konsep epistemologis bahasa yang model produksi sastra, yaitu. Pertama, *relasi kuasa*. Kedua, *unit proposisi politik wacana kuasa dalam sastra*. Ketiga, *konteks kuasa*.

Perspektif Kuasa Foucault dikembangkan berdasarkan konsep arkeologi dan genealogi yang digagasnya, menurut Foucault kesadaran epistemologis manusia yang paling asali dan merontokkan konstruksi pengetahuan adalah realitas keterbatasan yang dimiliki oleh manusia (*the finitude*). Foucault menggunakan analisis keterbatasan (*The analytic of Finitude*) ini untuk menunjukkan fakta ambiguitas manusia antara sebagai subjek dan/atau sebagai objek.

Keterkaitan antara arkeologi dan genealogi Foucault terletak dalam konsep *episteme* dan *aparatus*. *Episteme* merupakan konsep arkeologi Foucault yang dimaknai sebagai bentuk pengetahuan yang berupaya memberi pemaknaan pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Sementara *apparatus* sebagai konstruk genealogi dimaknai sebagai struktur elemen-elemen heterogen yang ada dalam sebuah teks, baik yang tertkatakan maupun yang tidak, termasuk pola-pola dan strategi yang mendukung kekuasaan, dan pelbagai ilmu pengetahuan yang mendukungnya.

## Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Yunus. 1994. "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas". *Kalam*. No.1, hal. 58. *op.cit.* 59-60.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Foucault, Michael. 1970. *The Order of Things: An Archaeology of The Human Science*. New York: Vintage Books.
- . 1973. *The Birth of The Clinic: An Archaeology of Medical Perception*. London and New York: Routledge.
- . 1975. *Surveiller et punir, Naissance de la prison*. Paris: Gallimard.
- . 1976. *L'histoire de La'sexualité: la volonté de savoir*. Paris: Gallimard.
- . 1977. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books.
- . 1978a. *Governmentality. In The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1978b. *Security, Territory, and Population. In The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . tanpa tahun. *Security, Territory, Population; Lectures at The College de France*. New York: Palgrave MacMillan.
- . 1979. *Discipline and Punish*. Harmondworth: Penguin Foucault.
- . 1982a. *Technology of The Self. In The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1982b. *The Subject and Power. In The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Phanteon Books.
- . 1983. *Structuralism and Post-Structuralism*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- . 1984. *The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol.1*. New York: Vintage Books.
- . 2002. *Pengetahuan dan Metode (Karya-karya Penting Foucault)*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- . 2002. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa Pengetahuan*. Jogjakarta: Bentang.
- . 2007. *The Order of Thing, Archeology of Human*

- Sciences*. (ter. Priambodo & Pradana Boy). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. 2013. "*Foucault: Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan: Mekanisme, Teknik, Strategi Kekuasaan dan Hubungannya dengan Karya Sastra*". Makalah Seminar Unesa.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1982. *Tempo Doloe: Antologi Sastra Pra-Indonesia*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Yusuf, Akhyar. 2009. *Politik Pengetahuan, Episteme, dan Kematian Manusia: Refleksi Pemikiran Posmodernisme Michel Foucault*. Materi Kuliah Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia: tidak diterbitkan.

# REPRESENTASI PENGUASA ORDE BARU DALAM LAKON WAYANG *“BAMBANG INDRA GENTHOLET TAKON BAPA”*

**Kusmarwanti**

Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: kusmarwanti@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Lakon wayang “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa” dalam novel Mantra Pejina Ular karya Kuntowijoyo merepresentasikan profil dan kritik pada penguasa Orde Baru. Raksasa yang menyerang hutan Wanarahaja, serta Kerajaan Puserbumi dan Astinapura yang menyerang Kerajaan Amarta untuk memperluas wilayah merepresentasikan penguasa Orde Baru yang serakah dengan isu-isu pengurusan tanah, monopoli ekonomi, dan korupsi. Patih Sengkuni yang pandai berstrategi dan licik merepresentasikan penguasa Orde Baru yang selalu membangun citra penguasa besar dan baik. Kelicikan Sengkuni juga merepresentasikan upaya penguasa untuk menjaga eksistensinya dan loyalitas pada mesin politik. Sementara itu, kritik terhadap penguasa Orde Baru dipresentasikan oleh Abiyasa yang membawa pesan-pesan demokrasi, yaitu kekuasaan di tangan rakyat, negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat, dan penguasa harus adil. Abiyasa juga memberi isyarat akan datangnya juru selamat dari kalangan rakyat*

*kecil untuk menyelamatkan kerajaan, yaitu Bambang Indra Gentholek (anak Petruk) dan para punakawan.*

**Kata kunci:** penguasa Orde Baru, wayang, demokrasi

## **Pendahuluan**

Lakon wayang “*Bambang Indra Gentholek Takon Bapa*” (Bambang Indra Gentholek Menanyakan Bapak) merupakan salah satu dari 18 lakon yang dipentaskan oleh Abu Kasan Sapari, tokoh utama, novel *Mantra Pejinak Ular* karya Kuntowijoyo. Lakon ini merupakan satu-satunya lakon yang skenarionya ditulis secara lengkap. Lakon ini dipentaskan dalam rangka perpisahan camat dengan warganya karena ia dipromosikan menjadi pembantu bupati. Karena itu, lakon ini mengandung pesan-pesan untuk penguasa, dalam hal ini pejabat seperti pembantu bupati.

Novel *Mantra Pejinak Ular* pernah menjadi cerita bersambung di harian *Kompas* edisi 1 Mei sampai 8 Juli 2000 ini ditetapkan sebagai satu di antara tiga pemenang Hadiah Sastra Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) pada 2001. Dalam novel ini Kuntowijoyo mengangkat latar budaya Jawa yang kental dipadukan dengan situasi Orde Baru dengan kekuasaan yang otoritarian. Banyak sarana digunakan dalam sistem kekuasaan yang otoritarian ini, di antaranya adalah wayang. Wayang sarat dengan falsafah hidup orang Jawa. Selain itu, wayang menampilkan problematika kekuasaan yang kental, yang relevan dengan kondisi kekuasaan Orde Baru.

Dalam novel *Mantra Pejinak Ular* pementasan wayang merefleksikan isu-isu politik zaman Orde Baru, termasuk lakon “*Bambang Indra Gentholek Takon Bapa*” ini. Lakon ini mengangkat para pembesar Puserbumi dan Astinapura yang merepresentasikan penguasa Orde Baru. Hal ini dipertegas dengan kehadiran tokoh Abiyasa yang membawa pesan-pesan tentang demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pesan ini menjadi kritik bagi kepemimpinan Orde Baru dengan pola sentralisasi, gaya pemerintahan yang otoriter dan paternalistik, penyingkiran terhadap orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan ketiadaan mekanisme kontrol yang independen (Juliantara, 2002:391).

## **Lakon “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa”**

Dalam novelnya, Kuntowijoyo (2000:61) menyebutkan bahwa pementasan wayang, seperti teater yang lain, terdiri dari tiga babak. Babak pertama adalah pengenalan masalah, babak kedua adalah terjadinya krisis, dan babak ketiga adalah pemecahan. Selingan atau *gara-gara*

dapat dilakukan di antara babak.

Pementasan wayang “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa” tersebut terdiri dari 3 babak dan 12 adegan. Lakon ini mengangkat empat latar cerita, yaitu Hutan Wanaharja, Kerajaan Puserbumi, Kerajaan Amarta, dan Kerajaan Astina. Lakon dimulai dengan menceritakan asal-usul Bambang Indra Gentholek, anak Petruk, yang lahir di Hutan Wanaharja yang makmur dan sejahtera. Hutan ini pernah diserang oleh raksasa yang menghabiskan isi hutan. Petruk berhasil mengusir para raksasa ini. Sebagai hadiah ia dapat menikah dengan Endang Rara Daulati dan lahir Bambang Indra Gentholek. Merasa telah memiliki bekal yang cukup, ia pun berniat mengabdikan diri ke Kerajaan Amarta, sekaligus membawa misi mencari ayahnya yang menjadi punakawan di kerajaan tersebut.

Pengabdian Bambang Indra Gentholek dimulai dengan menghadapi raksasa-raksasa dari Kerajaan Puserbumi yang menyerang Amarta untuk memperluas wilayah. Sementara itu, di Kerajaan Astinapura, para pembesar kerajaan tengah merancang peringatan ulang tahun raja dengan berbagai perlombaan dan membangun arena lomba. Untuk acara ini, Astinapura memasang patok-patok sampai ke wilayah Amarta tanpa izin. Amarta menghadapi dua musuh sekaligus, yaitu Kerajaan Puserbumi dan Kerajaan Astinapura.

Dalam lakon ini hadir tokoh Abiyasa yang memberikan petuah-petuah tentang kepemimpinan kerajaan, pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan datangnya juru selamat dari kalangan rakyat biasa. Petuah diberikan melalui Arjuna dan punakawan. Juru selamat Amarta yang dimaksud adalah Bambang Indra Gentholek dan punakawan, dan terbukti mereka mengalahkan Puserbumi dan Astinapura.

Di antara 18 lakon wayang yang terdapat dalam novel *Mantra Pejajak Ular* ini, lakon “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa” merupakan lakon yang paling lengkap menggambarkan latar kerajaan dan tokoh-tokohnya. Lakon wayang ini mengangkat konflik-konflik kekuasaan antarkerajaan. Keserakahan untuk menguasai daerah lain sangat dominan dimunculkan dalam lakon wayang ini sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Puserbumi dan Kerajaan Astinapura.

### **Raksasa, Puserbumi, dan Astinapura Simbol Keserakahan Penguasa**

Raksasa mengobrak-abrik Hutan Wanaharja dengan menghabiskan sumber daya yang ada di dalamnya, dan merusak alam milik rakyat. Hal ini tampak dalam kutipan berikut.



Mohon ampun kalau saya mengganggu. Ada raksasa-raksasa yang suka makan kerbau, sapi, dan rusa. Mereka rakus bukan main, *mosok* satu kali makan seekor kerbau habis. Tentu saja tanpa dimasak, tanpa garam, tanpa sambal, tanpa merica. Mereka membuang tulang di sungai sampai sungainya kayak dibendung, *mbludag*. Ternak digiring pergi dan sawah-ladang dirusaki. (Kuntowijoyo, 2000:63)

Sementara itu, Kerajaan Puserbumi dan Astinapura berusaha merebut dan memperluas wilayah sampai Kerajaan Amarta. *Pertama*, Kerajaan Puserbumi yang melakukan penyerangan untuk menguasai Kerajaan Amarta. Motif penyerangan adalah motif ekonomi untuk menyejahterakan rakyat yang jumlahnya terus bertambah sehingga mereka harus memperluas tanah kerajaan untuk menampung rakyat sebagaimana tampak dalam perkataan Raja, “Rakyat semakin banyak memerlukan tanah yang semakin luas. Yang makan bertambah, tapi yang dimakan tetap. Menurut perhitungan para ahli, 25 tahun lagi kita tidak akan bisa memberi makan penduduk. Sudah waktunya kita memperluas kerajaan.” (Kuntowijoyo, 2000:66)

*Kedua*, Kerajaan Astinapura yang ingin memperluas wilayah sampai Kerajaan Amarta. Upaya ini menggunakan cara yang halus, melalui ulah Patih Sengkuni, yang mengusulkan pembangunan arena balap untuk peringatan ulang tahun raja dengan memasang patok-patok sampai ke wilayah Kerajaan Amarta. Motif perluasan tanah kerajaan bagi Astinapura adalah perluasan kekuasaan.

Raksasa, Kerajaan Puserbumi, dan Kerajaan Astinapura dalam lakon “*Bambang Indra Gentholek Takon Bapa*” ini merupakan simbol keserakahan penguasa. Penyerangan dan perluasan wilayah oleh Puserbumi dan Astinapura terkait dengan urusan luar negeri karena terkait kerajaan lain. Dalam masa Orde Baru keserakahan terjadi di dalam negeri. Keserakahan penguasa tampak pada penguasaan terhadap aset-aset negara dan penguasaan jabatan. Keserakahan pemerintah dalam novel *Mantra Pejina Ular* diungkapkan lewat kehadiran Kismo Kengser, seorang laki-laki tua yang tiba-tiba muncul di pasar Tegalpandan pada hari pasaran.

Nama Kismo Kengser berarti tanah tergusur. Nama ini mengisyaratkan adanya pengusuran, baik dalam arti pengusuran fisik (misalnya pengusuran tanah) maupun dalam pengusuran batin (misalnya harga diri, hak hidup, dan sebagainya). Laki-laki tua itu berambut putih panjang terurai dengan sebuah sisir melingkar di kepala, memakai cincin akik besar-besar di jari kanan dan kirinya, mengenakan jubah putih, dan mengempit kain putih. Ia pun duduk di atas kain putih yang lebar, kemudian berpidato. Dalam pidatonya Kismo Kengser banyak

mengkritik pemerintah, mulai dari penggusuran tanah, monopoli, korupsi, sampai Pancasila. Beberapa pesan Kismo Kengser terkait kejahatan pemerintah adalah obral janji kampanye Pemilu, penggusuran tanah, monopoli ekonomi, ketidakadilan, maling atau perampok, dan keruntuhan Orde Baru. Inilah bentuk-bentuk keserakahan sebagaimana keserakahan penguasa Astinapura dan Puserbumi.

Dalam konteks Orde Baru, menjadi pejabat itu menjadi salah satu cara untuk memperkaya diri secara ekonomi. Menurut Anderson (melalui Muhaimin, 1990:247), ada hubungan antara elit-elit politik birokrasi dengan nilai-nilai tradisi Jawa. Secara tradisional, sumber kekayaan terletak pada jabatan-jabatan birokrasi (pada masa Orde Baru birokrasi ini didominasi juga oleh militer). Surplus dari sektor-sektor penting tertentu dari perekonomian dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat atau klik-klik pejabat yang dianakemaskan, baik dari kalangan sipil maupun militer. Hal ini disebabkan oleh posisi-posisi politik yang strategis dan berpengaruh yang ditempati oleh birokrasi Orde Baru. Dalam hal ini *inner circle* (lingkaran dalam) tetap menjadi pihak yang sangat diuntungkan oleh pola koneksi Orde Baru.

Willner (melalui Muhaimin, 1990:247) mengemukakan dua cara yang digunakan oleh struktur elit-elit Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. *Pertama*, persepsi bahwa jabatan birokrasi merupakan sumber penghasilan tambahan. Karena persepsi ini, jabatan birokrasi diperebutkan banyak orang, dengan melupakan bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar di dalamnya. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa raja-raja Jawa mendapatkan kekayaan melalui kekuasaan dengan menarik pajak dan memberlakukan monopoli atas barang-barang yang strategis. Hal ini terulang lagi pada masa Orde Baru sehingga para penguasa akan memanfaatkan posisinya untuk berlomba-lomba menambah kekayaan pribadinya.

Keserakahan pemerintah Orde Baru dapat dilihat dari merebaknya korupsi di berbagai sektor. Bahkan, Soeharto sebagai presiden telah mengukir prestasi hebat dalam praktik korupsi ini. Laporan Bank Dunia tahun 1997 memperkirakan 20-30% dana pembangunan diselewengkan selama Orde Baru. Sementara itu, tahun 2004 Transparency International mengumumkan 10 pemimpin paling korup di dunia. Dari 10 pemimpin itu, 3 di antaranya adalah pemimpin Asia Tenggara yang selalu menggembargemborkan pembangunan. Tiga pemimpin itu adalah Soeharto presiden Indonesia dengan nilai korupsi 15-35 miliar dolar, Ferdinand Marcos presiden Filipina dengan nilai korupsi 5-10 miliar dolar, dan Joseph Estrada presiden Filipina juga dengan nilai korupsi 78-80 juta dolar (Collins, 2008:257).

## Sengkuni dan Citra Raja Besar

Pertemuan para pembesar Kerajaan Astinapura dalam lakon “*Bambang Indra Gentholek Takon Bapa*” membahas ulang tahun Raja Suyudana. Raja menginginkan peringatan ulang tahun besar-besaran dengan kembang api impor. Hal ini didukung oleh Patih Sengkuni dengan perkataannya, “Supaya, orang tahu bahwa Raja Astina adalah raja besar. Supaya, orang tahu bahwa Astina punya tentara besar. Supaya, orang tahu bahwa rakyat Astina 100 persen mendukung raja. Supaya, orang tahu bahwa kekuasaan raja itu tak terbatas.” (Kuntowijoyo, 2000:69).

Perkataan Sengkuni menunjukkan adanya upaya untuk membangun citra raja besar bagi Kerajaan Astinapura, yang tampak dari kekuatan militer dan kesetiaan rakyat. Bagi Sengkuni, cara membangun citra raja besar dilakukan dengan berbagai cara, termasuk cara-cara licik. Dalam lakon tersebut, Sengkuni mengusulkan perlombaan balap kuda dan balap kereta dengan membangun arena balap sampai ke wilayah Kerajaan Amarta. Dengan dalih membuat pesta yang menyenangkan raja dan rakyatnya, Sengkuni melakukan cara-cara licik untuk memperluas kerajaan.

Dalam dunia pewayangan, Sengkuni banyak akal sehingga ia berhasil bekerja sama dengan Dewi Gendari (kakaknya) untuk merebut Astina. Ia berhasil menghasut para Kurawa untuk membunuh Pandawa. Ia berhasil menjatuhkan Pandawa dengan kelicikannya dalam arena perjudian. Kecerdasan berstrategi dan kelicikan Sengkuni dalam novel *Mantra Pejajak Ular* ini merepresentasikan profil penguasa Orde Baru.

Cara cerdas dan licik membangun citra pemerintahan yang baik pada masa Orde Baru tampak pada upaya penggiliran kemenangan lomba desa teladan. Upaya penggiliran ini dilakukan untuk membangun citra bahwa pemerataan pembangunan telah berhasil sehingga semua desa bisa menjadi desa teladan. Dengan begini maka camat akan mendapat pujian bupati dan bupati mendapat pujian gubernur (Kuntowijoyo, 2000:288-289). Pujian dalam hal ini tidak sekadar pujian yang menyenangkan, tetapi pujian menjadi tiket untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Hal ini penting karena ciri khas suasana politik dalam pemerintahan Orde Baru adalah pendekatan *top down* (Magnis-Suseno (1996:x)). Dalam pola *top down* ini terjadi tuntutan untuk menyenangkan pejabat atasan agar kebijakannya menguntungkan pejabat yang di bawahnya. Dalam bahasa yang lebih populer hal ini dikenal dengan istilah Asal Bapak Senang (ABS).

Upaya penggiliran kemenangan desa teladan ini pun ditunggangi dengan program-program yang membangun citra pemerintahan yang baik dan menguntungkan penguasa, seperti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai syarat pemenang lomba

desa teladan. Penataran P4 adalah program unggulan pemerintah yang wajib diikuti oleh masyarakat Indonesia, mulai dari Pegawai Negeri Sipil, warga masyarakat, siswa sekolah, sampai mahasiswa. Penataran P4 merupakan bentuk penyeragaman program dari atas sampai bawah. Menurut Mohammad Sobary (melalui Ibrahim, 2004:262), visi hegemoni suatu negara dipaksakan oleh penguasa melalui institusi, seperti sekolah, media massa, agama, dan sebagainya. Dalam “negara agung” Orde Baru, hegemoni dirancang dan dilaksanakan sampai tingkat desa, seperti jaksa masuk desa, ABRI masuk desa, dan koran masuk desa. Hal ini menunjukkan kuatnya cengkeraman pusat atas desa. Dengan kata lain, pusat memiliki wewenang untuk mengatur desa.

Selain penataran P4, untuk keperluan lomba desa diupayakan juga perpustakaan desa, padahal banyak warga tidak bisa membaca. Keberadaan semua program ini seolah-olah hanya ingin memberi kesan bahwa keberhasilan pembangunan pemerintah telah dapat dicapai.

### **Sengkuni dan Strategi Penjagaan Eksistensi Mesin Politik**

Representasi kecerdasan berstrategi dan kelicikan Sengkuni juga tampak pada rekayasa pemilihan kepala desa sebagai strategi untuk menjaga eksistensi mesin politik, yaitu dengan cara menetapkan Pak Camat yang merupakan kader mesin politik menjadi ketua Pilkades. Pak Camat memiliki hak untuk menentukan calon kades yang lolos dan tidak. Artinya, calon kuat yang menjadi lawan mesin politik dapat disingkirkan sejak awal, yaitu sebelum pemilihan berlangsung.

Selain itu, mesin politik memperpendek jarak pengumuman calon kepala desa dengan waktu pemilihan sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk memilih calon yang lain. Kerja sama antara mesin politik dan calon yang didukungnya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas desa pun merupakan bagian dari rekayasa ini. Dengan berbagai rekayasa ini, kemenangan pemilihan kepala desa dapat diketahui sebelum pemilihan berlangsung (dalam istilah Jawa adalah *weruh sakdurunge winarah*).

Ben Anderson dan James Siegel (melalui Gunawan, 1999:2) menggambarkan adanya proses “*kramanisasi*” dalam bahasa Indonesia yang menekankan pada prinsip kehalusan sebagai topeng. Artinya, bahasa digunakan sebagai topeng untuk menyembunyikan muka, yang mirip dengan pendapat Geertz tentang praktik *ethok-ethok* (pura-pura) pada subkultur priyayi Jawa. Lebih lanjut, Gunawan melihat hal ini dalam pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan *ethok-ethok*, misalnya pemilu *ethok-ethok*, wakil rakyat *ethok-ethok*, pengadilan *ethok-ethok*, partai *ethok-ethok*, presiden *ethok-ethok*, dan sebagainya. Praktik *ethok-ethok* ini menunjukkan adanya rekayasa dan kemauan dari atas, tanpa

mempertimbangkan suara dan aspirasi rakyat sehingga semua kepentingan dapat berjalan sesuai keinginan penguasa.

Sebagai contoh, pemenang lomba desa teladan dalam novel *Mantra Pejinak Ular* ternyata juga praktik *ethok-ethok*. *Ethok-ethok* kerja keras ternyata hasilnya sudah diputuskan sebelumnya. Karena itu, citra pemerataan pembangunan yang direncanakan pun berarti juga *ethok-ethok*. Pilkades juga dapat menjadi contoh praktik *ethok-ethok* ini. *Ethok-ethok* pemilihan terjadi dengan sangat demokratis, ternyata hasilnya pun telah direncanakan sebelumnya. Karena itu, muncullah istilah *weruh sakdurunge winarah*. Filosofi politik priyayi Jawa pun mewarnai jalannya pemerintahan yang mestinya bisa lebih demokratis.

Pada masa Orde Baru praktik *ethok-ethok* ini juga terjadi pada penyampaian kebijakan pemerintah, demokrasi, dan pemilihan presiden. Orang yang berkuasa di Jawa tidak harus berteriak ketika memerintah, atau bahkan tidak perlu memerintah sama sekali. Pada masa Orde Baru Soeharto berusaha menerapkan konsep ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah jarang disampaikannya secara langsung, tetapi lewat menteri-menterinya dengan sisipan “atas petunjuk Bapak Presiden”. Ia juga seakan membiarkan lembaga-lembaga politik menjalankan fungsinya masing-masing, padahal ia memiliki campur tangan di dalamnya. Ia seolah di belakang layar, tetapi sebetulnya ia di depan. Ia seolah menjadi orang yang tidak tersentuh (*untouchable*). Ia juga menampilkan citra orang yang tidak memiliki ambisi. Pencalonan dirinya sebagai presiden tiap lima tahun sekali selalu muncul dari kebulatan tekad atau mulut orang lain. Setelah itu, ia dengan bijak mengatakan bahwa ia tidak bisa menolak keinginan rakyat yang mempercayainya sebagai presiden untuk kesekian kali (Eriyanto, 2000:41-42).

Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap Pilkades. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Pemilihan kepala desa sebagai unsur terkecil dari sebuah pemerintahan menjadi sarana bagi kekuasaan. Hal ini disebabkan keberhasilan pemilihan kepala desa adalah keberhasilan pemilu karena kepala desa akan menjadi alat kampanye pemilu. Keberhasilan pemilu adalah keberhasilan pemilihan wakil rakyat dan pemilihan presiden.

Karena itu, dalam bahasa politik, posisi-posisi atas (seperti kepala desa, camat, bupati, dan gubernur) adalah posisi kunci. Bagi kekuasaan sendiri, atasan dan orang-orang yang berpihak pada upaya untuk melapangkan jalan bagi tegaknya kekuasaan akan dipertahankan pada posisi-posisi strategis. Hal ini berlaku pada Camat I Kemuning yang tunduk patuh pada perintah mesin politik pemerintah. Selain itu, Camat I Kemuning adalah orang yang pandai mengambil hati atasan. Hal ini tampak pada upayanya merayakan hari ulang tahun, sebagaimana Patih

Sengkuni bekerja keras untuk memeriahkan peringatan ulang tahun Raja Suyudana, Pak Bupati pada saat kunjungan lomba desa teladan. Perayaan ulang tahun adalah urusan pribadi yang tidak sewajarnya dikaitkan dengan urusan pekerjaan dan politik kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan Camat Kemuning dipromosikan menjadi pembantu bupati di daerah Semarang.

Sebaliknya, bagi kekuasaan, atasan dan orang-orang yang tidak berpihak pada upaya untuk melapangkan jalan bagi tegaknya kekuasaan akan disingkirkan. Hal ini berlaku pada Camat II Kemuning dan Abu Kasan Sapari. Camat II Kemuning adalah orang yang pintar, jujur, berpihak pada rakyat, memiliki pendirian, dan bersih. Akan tetapi, karena sifat-sifat baik inilah Camat II Kemuning akhirnya disingkirkan dengan cara dipindahtugaskan ke daerah lain. Camat II Kemuning ini dianggap tidak bisa menunjukkan loyalitasnya pada pemerintah. Parameter loyalitas bagi mesin politik adalah kemenangan pilkades dan pemilu. Pada beberapa kesempatan, Camat II Kemuning ini memang tidak mengikuti perintah Mesin Politik, misalnya pada saat pemilihan kepala desa.

Selama masa kepemimpinannya, Camat II Kemuning memang lebih terbuka dan objektif terhadap berbagai upaya untuk menegakkan kebebasan berdemokrasi. Ia membiarkan Abu Kasan Sapari mendalang untuk kampanye tiga calon lurah yang tidak dijagokan Randu, yaitu calon lurah Gondangsari, calon lurah seorang guru madrasah, dan calon lurah guru SLTP. Ia juga berani menyatakan ketidaksepatannya dengan mesin politik yang memintanya untuk memutuskan jarak waktu pengumuman calon lurah dengan pemilihan selama tiga hari saja. Ia memilih mengikuti keputusan bupati dengan jarak dua minggu karena menurutnya lebih adil untuk semua calon lurah. Hal inilah yang membuatnya dianggap tidak serius memperjuangkan Randu. Ia pun mendapat hukuman dengan dipindahtugaskan ke daerah lain

Lemahnya loyalitas pada mesin politik juga terjadi pada Bupati Karangmojo dan para camat di kabupaten tersebut, termasuk Camat I Tegalpandan. Mereka dianggap gagal dalam Pemilu. Akibatnya, mereka dipindahtugaskan ke daerah lain atau dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, mesin politik akan menempatkan orang yang dianggapnya sangat loyal pada Randu. Randu adalah nama partai yang diusung oleh mesin politik.

Selain Camat II Kemuning, bupati Karangmojo, dan Camat I Tegalpandan, Abu Kayan Sapari juga dianggap tidak memiliki loyalitas untuk melapangkan jalan bagi kekuasaan. Ia mengusung calon kepala desa yang tidak didukung oleh Mesin Politik. Hal ini dilakukannya dengan melakukan pementasan wayang untuk calon yang tidak didukung mesin politik. Akibatnya, ia pun dipindahtugaskan ke kecamatan lain, yaitu Kecamatan Tegalpandan.

Loyalitas bagi seorang pegawai negeri bagi pemerintah Orde Baru

adalah bagian dari upaya pengaderan. Golkar sebagai mesin politik Orde Baru beranggotakan para pegawai negeri. Keanggotaan pegawai negeri pada partai ini menjadi keharusan. Jika seorang pegawai negeri menolak menjadi anggota Golkar, maka ia bisa dikeluarkan dari pegawai negeri, tidak bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi, atau dihambat kenaikan pangkatnya (Budiman, 1996:53). Dalam novel ini hal tersebut terjadi pada Camat II Kemuning, Camat I Tegalpandan, Bupati Karangmojo, dan Abu Kasan Sapari.

## **Abiyasa dan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan**

Ketika Amarta kalah menghadapi Puserbumi, Kresna meminta Arjuna dan Punakawan untuk meminta nasihat Abiyasa. Nasihat Abiyasa disampaikan Arjuna pada Kresna seperti tampak dalam kutipan berikut.

Menurut Eyang Abiyasa kita tidak perlu khawatir sebab pada waktunya akan datang orang kecil sebagai juru selamat. Eyang berpesan supaya kita memperhatikan tiga paugeran dalam memerintah. Pertama, kekuasaan itu di tangan rakyat tidak di tangan para pembesar kerajaan. Kedua, rakyat itu punya hak, dan para pembesar harus menjamin terlaksananya hak itu sebagai amanat Tuhan. Ketiga, para pembesar harus bertindak adil, tidak boleh pilih-kasih, meskipun pada kerabatnya. (Kuntowijoyo, 2000:72)

Dalam nasihat Abiyasa terkandung pesan tentang demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. *Pertama*, kekuasaan ada di tangan rakyat. Nasihat Abiyasa ini merupakan kritik terhadap sistem negara korporasi yang mendudukkan negara sebagai pengendali dalam berbagai hal. Peran negara dalam masa pemerintahan Orde Baru sangat dominan di segala aspek kehidupan. Negara secara efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap masyarakat yang berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi. Melalui mekanisme politik pengendalian, negara masuk ke berbagai wilayah dan melumpuhkan berbagai kekuatan prodemokrasi. Partai politik, ormas, lembaga legislatif, pers, organisasi profesi, mahasiswa, dan berbagai kelompok penekan berhasil dikendalikan, bahkan kadang dengan kekuatan represif (Tim Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2004:480).

Padaahal, kekuasaan politik hanya dapat stabil dengan pengakuan mereka yang dikuasai. Kekuasaan (*power*) harus dibedakan dengan paksaan dan penindasan (*force*). Kekuasaan adalah suatu pola hubungan antarmanusia yang tinggi derajatnya dan hidup dari pengakuan bebas mereka yang berada dalam hubungan kekuasaan itu (Magnis-Suseno, 1996:xii).

Dalam kondisi seperti ini rakyat tidak memiliki peran untuk terlibat dalam aktivitas pemerintahan. Rakyat didudukkan sebagai subjek yang pasif dan tidak diizinkan bersuara. Hal ini sejalan dengan pendapat Hikam (1999:52) bahwa di bawah Orde Baru negara menjadi sangat dominan dan intervensionis di dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tidak terlibatnya rakyat dalam kekuasaan menunjukkan tidak tegaknya demokrasi dalam suatu negara. Keraf (1999:69-70) berpendapat bahwa melibatkan rakyat dalam pemerintahan akan berdampak positif pada rakyat dan menguntungkan negara. *Pertama*, lepasnya ketergantungan rakyat pada pemerintah karena rakyat menjadi lebih berdaya. Rakyat bukan subjek yang pasif dan terpasung kreativitas berpikir dan membuatnya. Dengan keterlibatan ini rakyat juga akan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*). *Kedua*, terjadi perubahan dan pembalikan pola pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Penentu pembangunan adalah rakyat karena rakyatlah yang menjadi penentu keputusan. *Ketiga*, terjadi *sosial learning process* sehingga anggapan bahwa rakyat bodoh tidak ada lagi. Kebodohan rakyat selama ini sesungguhnya terjadi juga atas peran negara, misalnya memberi informasi yang salah, tidak memberi kesempatan untuk brekreasi karena banyak kebijakan lahir secara *top down*. *Keempat*, demokrasi akan tumbuh perlahan-lahan dengan kesempatan yang dimiliki oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Inilah sesungguhnya hakikat demokrasi.

*Kedua*, penguasa harus menjamin terlaksananya hak-hak rakyat. Nasihat kedua Abiyasa adalah memberikan hak-hak rakyat secara utuh. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki. Ketiga hak yang disebutkan oleh Abiyasa ini merupakan sindiran bagi pemerintah Orde Baru. Tidak terpenuhinya hak memiliki dalam novel *Mantra Pejina Ular* tampak pada kritikan Kismo Kengser di pasar yang menyebutkan adanya monopoli ekonomi, penggusuran, munculnya perampok berdasi, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Collins (2008:245) yang menyebutkan demokrasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, perlindungan hak-hak minoritas, dan tersedianya fasilitas untuk membahas perbedaan pandangan politik.

*Ketiga*, penguasa harus adil. Adil bagi penguasa adalah memberikan hak kepada rakyatnya tanpa memandang status dan kedekatan. Ketidakadilan penguasa akan membuat rakyat bereaksi. Hal ini dapat dilihat pada maraknya demonstrasi yang memprotes ketidakadilan penguasa menjelang runtuhnya Orde Baru. Bergeraknya rakyat melawan pemerintah ini bisa jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap feodalisme yang selama ini tertanam kuat dalam rezim Orde Baru.



Prinsip nasihat Abiyasa adalah partisipasi rakyat dalam pemerintahan sehingga penguasa tidak menjadi aktor tunggal. Dalam lakon “Bambang Gentholek Takon Bapa” tampak pada munculnya pahlawan-pahlawan dari kalangan rakyat kecil, yaitu Bambang Indra Gentholek dan para punakawan yang berhasil mengalahkan Puserbumi dan Astinapura.

## Penutup

Lakon wayang “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa” dalam novel *Mantra Pejina Ular* karya Kuntowijoyo merepresentasikan profil penguasa Orde Baru. Raksasa yang menyerang Hutan Wanaraharja serta Kerajaan Puserbumi dan Astinapura yang menyerang Kerajaan Amarta untuk memperluas wilayah adalah simbol keserakahan. Dalam novel *Mantra Pejina Ular* hal ini diperkuat dengan hadirnya Kismo Kengser yang berpidato di pasar Tegalpandan yang menunjukkan adanya kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, yaitu mulai dari penggusuran tanah, monopoli ekonomi, korupsi, sampai Pancasila.

Lakon “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa” juga mengangkat tokoh Patih Sengkuni yang pandai berstrategi untuk membangun citra penguasa yang besar, yaitu dengan menggelar pesta ulang tahun raja dengan besar-besaran. Dalam novel *Mantra Pejina Ular*, citra penguasa yang besar dan hebat tampak pada upaya menggilir kemenangan lomba desa untuk membangun kesan keberhasilan pemerataan pembangunan. Upaya ini juga dilakukan untuk mendapat pujian pejabat di atasnya. Syarat kemenangan lomba desa adalah pelaksanaan penataran P4 yang ditanggung oleh kepentingan pemerintah. Penataran P4 membawa misi untuk mengatur masyarakat untuk tunduk patuh pada pemerintah.

Kelicikan Sengkuni juga merepresentasikan upaya penguasa untuk menjaga eksistensi mesin politik. Penguasa merekayasa pemilihan kepala desa agar kepemimpinan tetap jatuh pada kader dari mesin politik. Selain itu, penguasa akan menyingkirkan orang-orang dan pejabat yang dianggap tidak loyal pada mesin politik dan memberi jabatan pada orang-orang yang memberi loyalitas yang tinggi.

Lakon “Bambang Indra Gentholek Takon Bapa” juga menampilkan tokoh Abiyasa yang membawa pesan-pesan demokrasi yang merepresentasikan kritik pada penguasa Orde Baru. Pesan-pesan tersebut adalah kekuasaan di tangan rakyat, negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat, dan penguasa harus adil. Abiyasa juga memberi isyarat akan datangnya juru selamat dari kalangan rakyat kecil untuk melawan Kerajaan Puserbumi dan Astinapura. Juru selamat itu adalah Bambang Indra Gentholek dan para punakawan.

## Daftar Pustaka

- Budiman, Arief. 1996. "Pemilihan Umum: Masih Perlu kah?" dalam *Mendemokraskan Pemilu* (Ed. Ifdhal Kasim). Jakarta: ELSAM.
- Clark, Marshall Alexander. 2008. *Wayang Mbeling Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan pembangunan
- Eriyanto. 2000. *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Yogyakarta: Insist Pustaka Pelajar
- Gunawan, Bondan. 1999. "Reformasi, Keutuhan Bangsa, dan Pertukaran Sosial" dalam *ABRI dan Agenda Perubahan*. Jakarta: Seskoad
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
- Ibrahim, Julianto. 2004. "Hegemoni Orde Baru dan Budaya Tandingan: Tafsir Masyarakat Atas Foto Ajaib di Blitar Tahun 1996" dalam *Mempertanyakan Jati Diri Bangsa* (Ed. Sumijati Atmosudiro). Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan FIB UGM
- Juliantoro, Dadang. 2002. *Negara Demokrasi untuk Indonesia*. Solo: Pondok Edukasi
- Keraf, A. Sony. 1999. "Paradigma Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat" dalam *ABRI dan Agenda Perubahan*. Jakarta: Seskoad
- Kuntowijoyo. 2000. *Mantra Pejina Ular*. Jakarta: Kompas
- Magnis-Suseno, Franz. 1996. "Kata Pengantar: Kedaulatan Rakyat, Bukan Kedaulatan Tuan" dalam *Demokrasi dan Civil Society* (Hikam, Muhammad AS). Jakarta: LP3ES
- Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES
- Tim Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia. 2004. *Dinamika Konflik dan Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building)*. Yogyakarta: INPEDHAM

# **KANDUNGAN SASTRA DALAM BUDAYA *BEREQE* SASAK LOMBOK SEBAGAI UPAYA PEMBANGUN JATI DIRI BANGSA DAN MENKRITISI KEKUASAAN**

**Lalu Nasrulloh**

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta,  
E-mail: laluarul90@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Karya sastra yang ada di bangsa ini sangat banyak, bentuk dan macamnya. Baik yang tercipta dari hasil imajinasi penyair yang masyhur sampai yang tercipta dari hasil kreasi orang-orang yang hanya bisa berimajinasi semata. Inilah kelebihan dari karya sastra. Ia bisa lahir hanya dari sebuah pengalaman. Karya sastra yang terlahir di bumi nusantara ini banyak ragamnya, dari yang berbau politik, romantik, hingga yang berbau kritik. Begitu pun halnya dengan kebudayaan. Budaya yang terdapat di seluruh penjuru tanah air Indonesia ini cukup beragam. Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke belahan Indonesia timur mempunyai budaya dan tradasi masing-masing yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Indonesia timur, Sasak Lombok salah satunya, yang mempunyai banyak tradisi yang unik yang masih “terpendam” belum diungkap kepermukaan. Sasak Lombok*

mempunyai tradisi *Bereqe* yang merupakan rangkaian dari acara pra sunatan. Dalam prosesi adat *Bereqe Sasak Lombok* ini, tidak hanya menunjukkan adat dan budaya Sasak semata, melainkan terdapat kandungan sastranya di dalam rangkaian prosesinya. Rangkaian tersebut orang Sasak menamakannya *memace*. Kemudian orang yang menjadi pembacanya disebut *pedande*. Bacaan yang dibaca itu mengandung nilai dan petuah-petuah yang luhur, yang tentunya sarat dengan nilai sastra juga.

Inilah pembuktian faktual bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Sasak Lombok sebenarnya mempunyai banyak sisi positif yang dapat dibanggakan, walaupun sejarah mengatakan Sasak Lombok mempunyai sejarah yang begitu kelam. Bahkan dalam sebuah naskah dikatakan bahwa orang Sasak Lombok tidak mempunyai daya kreatifitas, kalau pun ada itu semata-mata mengadopsi dari daerah lain. Diakui atau tidak, itulah sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang terlibat dalam sejarah kelam bangsa Sasak. Akan tetapi apapun yang dikatakan oleh para sejarawan, tidak selamanya seratus persen benar. Ada hal-hal yang tidak terungkap oleh sejarah yang kemudian hanya orang yang tinggal di daerah tersebutlah yang tahu mengenai hal ikhwalnya, yang tentunya secara turun-temurun. Layaknya tradisi *Bereqe Sasak Lombok* ini. Inilah yang kemudian perlu dibanggakan dan dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya sebagai salah satu penguat dan pembangun jati diri bangsa.

**Kata kunci:** sastra, budaya *bereqe*, jati diri, kekuasaan

## Pendahuluan

Sebagai bangsa yang multietnik, multirelegius, dan multibudaya, sudah saatnya menyadarkan diri untuk tetap menjaga keharmonisan di antara pelaku-pelaku budaya lainnya, terhadap pelaku-pelaku agama dan etnik lainnya. Sehingga dengan demikian keharmonisan di dalam berbangsa dan bernegara akan terasa dan tercapa. Sudah sepantasnya kita jadikan bangsa Indonesia yang tercinta ini sebagai *utopia*. Negeri yang bisa mencicipi keindahan dari kemerdekaan. Semua hal dan cita-cita seperti ini bisa saja direalisasikan, asalkan semua mahu ikut terlibat dalam prosesnya. Sebagai salah satu jalan adalah melestarikan budaya. Kelestarian budaya sangat berpengaruh terhadap penguatan identitas bangsa. Oleh karena itu jati diri budaya harus tetap digenggam dan terus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena hal ini menjadi tonggak keberhasilan suatu bangsa.

Seorang antropolog dan sejarawan dari Meksiko, Migual Leo'n-Portilla mengatakan bahwa identitas (jati diri) budaya itu sangat penting

bagi suatu bangsa. Apabila, identitas itu hancur, hilang, dan musnah, maka bangsa yang bersangkutan akan menderita trauma yang mendalam. Kehilangan atau kehancuran identitas akan membawa disintegritas masyarakat, bahkan membawa kepada *alienasi*, terasing, renggang dan mudah tunduk (Achadiati Ikram, 2009: vii). Merujuk dari pendapat tersebut, maka tidak mengherankan kalau bangsa Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Karena identitas budaya bangsa yang berakar dari budaya lokal sudah mulai tergerus seiring perkembangan zaman. Arus globalisasi semakin deras menerjang bangsa ini. Globalisasi sudah memukul mundur glocalisasi. Kalau bangsa ini ini tidak segera bangkit dan sadar maka mahu tidak mahu bangsa ini akan mejadi bangsa yang trauma, terasing bahkan bangsa yang mudah tunduk. Dan ini yang terjadi yang kita rasakan hari ini. Bangsa yang seharusnya memiliki kedaulatan, memiliki prinsip, memiliki kekuatan dari sumber daya alam dan budaya, sekarang sudah mulai tergegang sedikit demi sedikit oleh orang asing.

Sudah sejak lama bangsa ini memikirkan cara terbaik untuk melakukan penghalauan terhadap globalisasi. Memang di sisi lain globalisasi memiliki pengaruh positif, akan tetapi di sisi lain mempunyai pengaruh negatif pula. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para budayawan, sejarawan, dan para sastrwan lewat wacana-wacana karifan lokal, para sejarawan lewat naskah-naskah sejarah budaya, serta para sastrawan lewat karya-karya yang mengangkat tema tradisi dan budaya. Usaha yang demikian itu sudah lama diproklamirkan akan tetapi belum menuai hasil yang maksimal, semakin gencar usaha ini dilakukan, semakin deras pula arus globalisasi yang datang. Dengan demikian, wacana kearifan lokal harus terus dikomandangkan, tulisan maupun naskah yang berbaur lokal harus terus ditulis dan diciptakan. Karena inilah cara terbaik yang bisa ditempuh. Para generasi penerus bangsa harus diperkenalkan sejak dini dengan kebudayaan lokal masing masing disamping diedukasi dengan kebudayaan nasional.

Tradisi *Bereqe* Sasak Lombok ini bersifat *streetif* dan *aloplatis*. Prosesi yang terjadi pada zaman dulu tentunya tidak sama dengan yang dipraktekkan zaman sekarang, kadang bergantung dari kemauan *epen gawe* (yang menghelat pesta). Akan tetapi maksud dari *streetif* tersebut bukan berarti tradisi *bereqe* Sasak Lombok tidak konsisten, akan tetapi terdapat pergeseran dari segi propertinya saja, kalau dari segi ensensi tetap terjaga dan terlaksana. Masyarakat Sasak sebagai agen budaya lokal atau tradisi *Bereqe* tersebut merasa bangga memiliki warisan budaya yang sarat akan nilai-luhur. Apabila kondisi sudah seperti ini akan tercipta sifat fanatik dari masyarakat pelaku adat tersebut.

Kondisi seperti inilah yang nanti kan menjadi pelopor identitas dan

jati diri budaya bangsa. Sehingga secara tidak langsung jati diri bangsa Indonesia akan terbentuk. Sikap seperti ini yang seharusnya ditanamkan kepada para generasi, supaya mereka tahu dan sadar betapa pentingnya melestarikan budaya lokal, sebagai hasil karya nenek moyang. Kemudian ada power yang tersimpan dalam setiap tradisi lokal tersebut kalau para pelaku budaya benar-benar perhatikan dan hayati. Kekuatan luhur ini akan selalu membisiskkan ke dalam nurani setiap masyarakat budaya untuk selalu ingat akan buah karya agung tersebut. inilah esensi dari budaya lokal sebagai cikal bakal tumbuh kembangnya budaya universal. Maka bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multibudaya ini harus tetap besinergi dan mengayomi budaya-budaya daerah tersebut supaya tetap terjaga dan semakin kaya.

## **Hubungan Sastra dan Budaya**

Secara definitif (Yohanes Sehandi, 2014: 48) mengatakan antropologi sastra adalah studi mengenai karya sastra dengan relevansi anthropos (manusia). Senada dengan pendapat Welck & Warren tersebut (Michael Ryan, 2011: 157) menegaskan sastra adalah salah satu cara penting untuk menyirkulasikan gagasan dalam budaya. Welck & Warren (dalam Sehandi, 2014: 5) mengatakan sastra suatu kegiatan kreatif, sederetan karya seni.

Merujuk dari penjelasan mengenai sastra tersebut, bahwa sastra budaya merupakan satu ruang lingkup yang saling melengkapi. Lalu budaya yang mengandung gagasan sastra seperti halnya yang terdapat dalam prosesi tradisi *bereqe* Sasak Lombok cukup memberikan sinyal positif dan semakin menguatkan karya sastra untuk selalu sejalan dalam membentuk identitas sebuah bangsa. Bagaimana tidak, sebuah daerah yang memiliki tradisi unik dan indah akan, ketika dipertontonkan di negara orang, maka kesan bangsa dari pelaku budaya dan bangsa tempat terlahirnya budaya tersebut akan menjadi terhormat. Misalnya tari kecak dari Bali, Reog Ponorogo, Saman dari Aceh, yang secara faktual sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kemudian dari peristiwa tersebut yang pertama mendapat apresiasi adalah bangsa, yakni bangsa Indonesia. Dari peristiwa nyata tersebut, tradisi *Bereqe* Sasak Lombok yang menurut orang Lombok mempunyai daya seni yang luar biasa dan mempunyai nilai luhur yang tinggi, kenapa tidak bisa terungkap. Inilah fenomena yang terjadi sekaligus sebagai pekerjaan rumah bagi para budayawan, sastrawan, serta sejarawan Lombok untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Sasak Lombok mempunyai kreatifitas yang tidak kalah bagusnya dari daerah Jawa, Bali, maupun Aceh.

## Hubungan Bahasa dan Budaya

Burhan Nurgiantoro (2014: 5) mengatakan bahasa adalah unsur terpenting dari kebudayaan. Belajar bahasa suatu bangsa, pada hakikatnya juga mempelajari budaya bangsa tersebut. Brown (dalam Nurgiantoro, 2014: 6) menegaskan bahwa bahasa merupakan bagian dari budaya, dan budaya bagian dari bahasa. Kaitannya dengan tradisi *Bereqe* Sasak Lombok, bahasa memiliki peran penting dalam hal ini, kenapa demikian, karena hampir disebagian sesi dalam prosesi *Bereqe* tersebut terjadi interaksi satu arah. Dalam artian, orang-orang yang terlibat dalam prosesi tersebut, seperti pedanda sibuk dengan bacaan syair dan tembangnya, *Inen bubus* (dukun) sibuk dengan jampian-jampian yang diperuntukkan kepada anak yang akan disunat. *Para Sekehe* (personil) *gendang beleq* (kesenian tradisional Lombok) sibuk dengan *kekayaq* (syair) sebagai bagian dari gending tabuhan semua alat musik yang sedang dimainkan. Sehingga tercipta sebuah harmonisasi keindahan nada dan suara yang menakjubkan. Hal ini membuktikan bahwa bahasa sebagai perantara dalam merealisasikan budaya. Bahasa sebagai alat peraga budaya dan seni. Tanpa ada bahasa kebudayaan akan menjadi cacat dalam sisi estetikanya.

Kemudian Suhardi mengemukakan definisi bahasa secara lebih universal, bahasa sebagai sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat sosial untuk saling berkomunikasi, bekerja sama dan mengidentifikasi diri (Suhardi, 2013: 5). Dalam hal ini, semua bahasa yang digunakan dalam prosesi upacara *bereqe* ini, semua menggunakan bahasa Sasak. Baik bacaan-bacaan *Inen bubus* saat menyiramkan air bubus kepada anak yang hendak disunat, *para sekehe* yang melantunkan kidung *gendang beleqnya*, dan *bujangge* yang membacakan syairnya. Hal ini membuktikan bahwa upacara *bereqe* tersebut hanya dilakukan oleh orang Sasak. Karena sudah dapat diidentifikasi dari proses komunikasinya yang menggunakan bahasa Sasak.

## Tradisi Bereqe sebagai Identitas Budaya Suku Sasak Lombok

Tradisi *Bereqe* Sasak Lombok merupakan salah satu adat suku Sasak pada saat seorang anak yang hendak disunat. *Bereqe* ini sendiri merupakan sebetulnya acara syukuran sebelum seorang anak disunat, yang di dalamnya terdapat prosesi dengan menggunakan perlengkapan adat, seperti *andang-andang* (sesajen), *dulang* (tempat berbagai jenis makanan), *bubus* (air jampian), daging panggang yang diperuntukkan untuk anak yang akan disunat, supaya tetap tegar dan semangat sebelum disunat. Adapun prosesi yang lain seperti tabuhan *gendang beleq* untuk mengiri prosesi *bereqe*, pembacaan syair atau tembang oleh pedande, serta penyiraman bubus

atau air jampian kepada anak yang akan disunat dan kepada semua orang yang ikut dalam prosesi *Bereqe* tersebut. Adapun tujuan dari pelaksanaan prosesi *Bereqe* tersebut adalah sebagai ungkapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya gawe atas terkhitannya anak yang bersangkutan. Kemudian sebagai wujud pelestarian budaya. Karena bagi masyarakat Lombok kalau tidak melaksanakan adat dikira berkhianat atas peninggalan nenek moyang dan akan mendapat *tulah manuh* (kualat).

Idetitas sekaligus kekuatan yang dimiliki oleh orang Sasak ini, sebagai salah satu wacana bahwa orang Sasak memiliki pendirian dan prinsip yang kuat, yang kemudian bisa dijadikan sebagai modal untuk membangun peradaban. Bahasa, tingkah laku, serta seni yang terkandung dalam prosesi bereqe adat Sasak Lombok ini sudah pantas dikatakan bahwa orang Sasak mandiri dalam hal kebudayaan, dan ini sekaligus untuk menampik bahwa orang Sasak tidak selamanya dikatakan serba adopsi dari bangsa yang pernah menjajah bangsa Sasak, yakni Bali. Lewat prosesi bereqe ini bangsa Sasak bisa membuktikan hal tersebut. merupakan sesuatu hal naif kalau sebagian besar kebudayaan yang berkembang di bangsa Sasak merupakan hasil adopsi. Saat ini penulis menegaskan, semua perspektif itu salah.

Orang Sasak memiliki daya kreatifitas tersendiri dan budaya tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa Bali yang dianggap pengadopsi budaya kepada bangsa Sasak. Sasak, memiliki budaya *merarik, perisaian, nyongkolan, begawe, dan bereqe* yang menjadi pembahasan penulis dalam makalah singkat ini. Sapardi Djoko Damono dalam acara sarasehan sastra mengatakan, semua karya sastra dan seni meskipun terlahir dan tercipta di benua Eropa, namun digaungkan dan dikembangkan di benua Asia, maka karya sastra dan seni tersebut mutlak milik benua Asia.

Kaitannya dengan budaya bereqe Sasak Lombok ini yang merupakan khas budaya daerah Sasak, karena dari segala sisi mencerminkan keSasakannya. Adapapun perkakas budaya yang terdapat dalam budaya bereqe Sasak Lombok tersebut, antara lain sebagai berikut.

### 1. *Bujangge*

*Bujangge* adalah orang yang menjadi pembaca syair atau tembang. Orang yang boleh menjadi *bujangge* harus dari kalangan yang paham adat dan agama. Baik itu tokoh adat maupun tokoh agama. Kemudian *bujangge* harus bisa membaca huruf kawi, karena bacaan tembang tersebut dari bahasa kawi, serta suara dan nafas harus bagus dan panjang. Karena cara membacanya dengan nada tinggi dan berlenggok-lenggok.

### 2. *Inen Bubus*

*Inen bubus* merupakan salah seorang dukun Sasak Lombok yang mempunyai silsilah keluarga yang pandai dalam mengobati penyakit.



*Inen bubus* ini juga harus pandai *mamaq* (memakan daun sirih yang dicampur dengan buah pinang), karena dia harus *menyembeq* (memberi tanda pada bagian tubuh anak yang akan disunat dari sisa kunyahan daun sirih dan pinang yang berubah menjadi warna merah). Di samping itu juga Inaen bubus ini bertugas mengguyurkan air yang sudah dijampi ke anak yang akan disunat dan ke seluruh orang yang terlibat dalam prosesi bereqe tersebut.

### 3. *Sekehe*

*Sekehe* merupakan personil *gendang beleq* yang menjadi penabuh dan menyanyikan *kekayaq* atau syair-syair Sasak Lombok, sebagai pengiring prosesi Bereqe tersebut. dengan adanya tabuhan gendang beleq ini, membuat acara menjadi lebih hidup dan meriah. Karena disuguhkan gending-gending yang membangkitkan semangat berbudaya, dan terkadang akan menimbulkan kesusakan masyarakat Sasak Lombok untuk lebih mencintai budayanya.

### 4. *Gendang Beleq*

*Gendang beleq* merupakan musik tradisional Lombok yang terdiri dari perkakas seperti, gendang besar, suling, gong, *cemprang* (piringan yang terbuat dari besi kuningan yang berbentuk cembung), *rincik* (cemprang yang ukuran kecil yang ditaruh pada sebuah wadah), *terompong* (gong dalam ukuran kecil yang ditaruh dalam sebuah wadah), dan penegas suara. Semua alat tersebut dibunyikan dengan irama dengan perpaduan gending yang menghasilkan suara yang mengetarkan hati.

### 5. *Andang-andang*

*Andang-andang* ini merupakan sesajen yang terdiri dari gulungan benang, beras, daun sirih, buah pinang, apur, air putih satu gelas, dan *kepeng tepong* (uang logam yang sudah dilubangi).

### 6. *Dulang*

*Dulang* adalah tempat atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang berisikan berbagai jenis makanan, seperti buah-buahan, makanan tradisional Lombok (*keludan, ketimus, apem, cerorot, pangan-wajik, poteng-banget, jasi, naga sari, kaliadem, dan lain-lain*), ayam panggang, serta uang kertas atau uang logam. *Dulang* ini yang nantinya setelah prosesi pembacaan tembang oleh pedande selesai, maka seluruh isi *dulang* tersebut diperebutkan oleh masyarakat yang menyaksikan prosesi tersebut, baik itu anak-anak, orang dewasa, pemuda, bahkan orang tuapun boleh ikut serta dalam aksi perebutan tersebut.

## **Wujud Refleksi dari Tradis *Bereqe* bagi Penguat Jati Diri Bangsa dan Mengkritik Kekuasaan**

Kekayaan sebuah bangsa tidak bermakna kalau tidak ada kekayaan budaya. Kekayaan budaya memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap perkembangan suatu bangsa. Bagaimana tidak, Bali terkenal bukan saja dari segi pariwisatanya, namun dari tradisi dan budayanya yang mereka tunjukan dalam setiap even budaya. Begitu juga dengan daerah Jawa, Aceh, Sumatra sampai dengan daerah Indonesia bagian timur seperti NTT dan Papua. Tradisi *Bereqe* ini salah satu dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat Sasak Lombok di samping tradisi yang lainya yang lebih fenomenal seperti tradisi *Merariq*, *Nyongkolan*, *bau Nyale*, *Gendang Beleq*, dan *Perisaian*. Kesemuanya ini menjadi identitas bangsa yang menjadi ciri khas masing-masing daerah yang apabila tidak dilestariakan (punah) akan mengakibatkan suatu daerah atau bahkan bangsa akan menjadi kehilangan jati diri dan identitas, yang akhirnya akan menjadi bangsa yang lemah dan mudah tunduk pada zaman.

Tradisi *bereqe* mengandung unsur religi di dalamnya serta mengandung nilai-nilai luhur yang menjadikan pelakunya semakin harmoni dan bersatu. Tradisi *Bereqe* ini dapat menimbulkan rasa saling menghargai dan semakin kompak. Karena di dalam prosesinya tidak mengenal bulu dan usia bahkan tahta. Anak-anak, orang dewasa, guru, buruh, bangsawan, jajar karang (bukan bangsawan), boleh ikut nimbrung di dalamnya. Dengan demikian harapan dari budaya tersebut akan tercapai yaitu menyatukan masyarakat dan menguatkan idetitas, baik itu identitas masyarakat, daerah, serta bangsa. Sehingga akan menjadi masyarakat, daerah dan bangsa yang mempunyai peradaban sebagai tonggak kemajuan bangsa. Suatu hal yang terungkap sebagai salah satu media penyelarasan dengan semua kaum, yakni dalam prosesi *bereqe* ini semua pihak boleh nimbrung. Hal ini membuktikan bahwa, manusia itu sama dihadapan Tuhan yang membedakannya hanya ketaqwaannya saja. Kemudian dalam hal ini, penulis mengatakan tidak ada subordinat dan superior dalam bahasa. Bahasa di dunia ini sama semua. Tidak ada istilah bahasa halus, bahasa madya dan sebagainya. Kesemuanya ini hanya dijadikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mengatakan dirinya berkuasa.

### **Penutup**

Bangsa Indonesia harus melestarikan budaya lokal kalau mahu diakui oleh dunia. Karena bangsa Indonesia kaya dengan budaya, oleh karena itu harus menjadi negara yang berbudaya dan berperadaban.

Tradisi lokal Sasak seperti *Bereqe* ini sebisa mungkin harus ada pengakuan dan penghargaan sebagai warisan budaya, supaya para pelaku budaya semakin yakin dan giat dalam melestarikan budaya yang sebagai penguat jati diri bangsa. Budaya dan sastra harus tetap seiring dan sejalan agar dapat menciptakan sebuah keindahan, keharmonisan, dan bisa menjadi pengokoh jati diri bangsa secara konsisten. Sastra yang terdapat dalam semua kegiatan harus tetap ditonjolkan sebagai bagian dari warisan budaya. Dalam tradisi masyarakat Sasak sendiri banyak sekali kidung-kidung Sasak yang ditembangkan dalam prosesi agama dan prosesi adat, seperti halnya dalam acara *serakalan* adat Sasak dan kidung yang dilantunkan oleh para *sekehe gendang beleq* ketika mengiring pengantin (*nyongkolan*). Kesemuanya ini merupakan cara dan jalan untuk melestarikan kebudayaan daerah serta sebagai sarana mengkritik kekuasaan.

### **Daftar Pustaka**

- Ikram, Achadiati. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Bahasa, Sastra, dan Aksara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurgiantoro, Burhan. 2014. *Stilistika*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Ryan, Michael. 2011. *Teori Sastra Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sehandi, Yohanes. 2014. *Mengenal 25 Teori Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suhardi. 2013. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

# INTIMIDASI KUASA KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM CERPEN INDONESIA: SEBUAH ANALISIS MITOS KECANTIKAN

**La Ode Gusman Nasiru**  
Universitas Halu Oleo Kendari  
E-mail: gusman.nasiru@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini berangkat dari permasalahan dua tokoh perempuan dalam TPI dan KYJ yang terintimidasi oleh kuasa kultural di luar dirinya. Kuasa tersebut mewujud dalam kenyataan tentang kecantikan yang termitoskan. Keduanya tidak dapat berekspresi atas konstruksi cantik bentukan pengarang, persis mitos kecantikan mengekang para perempuan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana mitos kecantikan dalam tangkup kuasa kultural mengintimidasi kedua tokoh dalam cerita.*

*Penelitian ini menggunakan teori mitos kecantikan yang dikembangkan Naomi Wolf. Teori ini dapat berlaku sebagai kaca pembesar demi melihat bagaimana kecantikan memperoleh kekuatan untuk menguasai dan menyerang tokoh dalam cerpen Kumala dan Noor. Melalui teori ini, kita dapat melihat sejauh mana teori ini mengintimidasi perempuan.*

*Dalam penelitian ini, ditemukan fakta bahwa melalui TPI dan*

*KYJ kedua pengarang berusaha melepaskan diri dari kekangan mitos kecantikan. Tokoh mereka dibentuk dengan pola pikir yang lebih dinamis, bahwa kecantikan bisa diubah kedalam bentuk yang lain. Akan tetapi, secara tidak sadar mereka malah melanggengkannya melalui pembentukan konsep ideal pada tokoh. Terjadi kontestasi antara keinginan pengarang keluar dari lajur mitos kecantikan dan kenyataan bahwa mereka masih terkurung dalam tangkup mitos kecantikan itu sendiri. Benturan-benturan ide tidak hanya terjadi antara pengarang dan mitos kecantikan, tetapi juga antara tokoh dan pengarang. Demi menghadapi kenyataan yang membelenggu dan menindas tubuh mereka, para tokoh berusaha untuk meruntuhkan konsep ideal yang telah diredefinisi oleh pengarang. Hasil akhirnya, kontestasi dan benturan tersebut semakin memperkuat kenyataan bahwa konsep cantik ideal hanyalah sebungkus ide yang nisbi belaka.*

**Kata Kunci:** mitos kecantikan, kuasa kultural, ruang intimidasi, perempuan dan kecemasan.

## **Pendahuluan**

Sejarah mencatat sudah sejak lama laki-laki menggunakan motif-motif norma dan moral sebagai alibi demi melegitimasi posisinya menjadi individu penentu atas perempuan yang dianggap sub-ordinat. Laki-laki, dengan begitu, mendesak perempuan untuk terus menjadi eksistensi yang termarginalkan, terpinggirkan, dan hanya sekadar pelengkap. Mereka yang menjadi penguasa dan pembentuk budaya membuat perempuan merasa bahwa apa yang selama ini mereka alami tidak lain kecuali bagian dari takdir dan kodrat yang harus mereka pikul tanpa perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bernada skeptis.

Muara dari bentukan budaya itu memberi kebebasan mutlak kepada laki-laki untuk mengendalikan perempuan. Mereka berusaha mengubahnya sesuai dengan keinginannya. Untuk tidak dianggap lainnya manusia dengan jiwa dan pemikiran yang abnormal dalam konstruksi sosial yang melanggengkan dinasti kekuasaan laki-laki, perempuan menyerahkan dirinya secara pasif kepada kemauan laki-laki dan membiarkan terjadinya asimilasi. Dengan demikian, laki-laki menjadi pemilik perempuan dengan cara memanfaatkannya, yaitu dengan merusaknya (Beauvoir, 2003: 207).

Jika dibandingkan dengan masa silam, saat ini lebih banyak perempuan yang kaya, berkuasa, dan mendapatkan pengakuan penuh dalam hukum di masyarakat, tetapi dalam hal perasaan tentang 'keadaan diri yang berkaitan dengan fisik', kita bisa lebih jauh khawatir dibandingkan dengan generasi nenek-nenek kita (Wolf, 2004: 25). Masyarakat tengah

berada dalam pertentangan melawan feminisme yang menggunakan citra kecantikan perempuan sebagai senjata politis untuk menentang kemajuan perempuan. Inilah yang kemudian disebut sebagai mitos kecantikan.

Pemahaman tentang cantik dan menjadi cantik sebagai bagian dari budaya kontemporer pada gilirannya juga merasuk dalam tema-tema besar karya sastra. Seperti halnya yang terjadi dalam dua cerpen Indonesia yang berjudul *Tahi Lalat di Punggung Istriku*—selanjutnya disingkat TPI—oleh Ratih Kumala (dimuat dalam kumpulan cerpen *Un Soir du Paris, 2010*) dan *Kaki yang Jelita*—selanjutnya disingkat KYJ—karya Agus Noor (dimuat dalam kumpulan cerpen tunggal, *Selingkuh Itu Indah, 2003*).

Dalam TPI kita dapat merasakan atmosfer penilaian laki-laki yang kejam terhadap apa yang melekat pada diri perempuan. Laki-laki menilai kecantikan perempuan hanya dari tahi lalatnya. Penilaian laki-laki merenggut kepercayaan diri perempuan sekaligus haknya sebagai istri untuk menikmati cinta dan perhatian dari suaminya. Justifikasi suami terhadap cantik-tidaknya istrinya dengan mengacu pada tahi lalat di punggung sang istri tampak benar memukul telak harga diri perempuan, terlebih dalam kapasitasnya sebagai seutuh-utuhnya manusia. Ketika akhirnya tokoh istri mengangkat tahi lalatnya melalui bantuan medis dengan harapan memperoleh kembali cinta suaminya, hal itu malah tidak mengubah apa-apa.

Sementara itu, KYJ menghadirkan kisah Kaka yang di tengah puncak karirnya harus mengalami musibah yang menghantam kondisi psikisnya. Sebelumnya, ia lebih dikenal sebagai model yang memiliki kaki yang jelita. Kaka ditengarai rela merasakan sakit yang sangat dengan memotong kaki yang tersisa karena seolah telah mendapat garansi rasa cinta yang kadarnya jauh lebih besar dari suaminya ketika ia hanya memiliki satu kaki. Persepsi yang keliru ini melahirkan keyakinan untuk tidak memiliki satu kaki pun demi mendapatkan cinta yang lebih besar lagi dari suaminya.

Benturan-benturan konstruksi kecantikan hasil bentukan laki-laki—dan pada akhirnya juga perempuan—secara kultural berkuasa menuntut perempuan takluk dalam koridor-koridor yang sesuai dengan fantasi laki-laki tentang tubuh mereka. Hal demikian membawa mereka pada rasa cemas yang melelahkan. Bentangan permasalahan di atas menggiring kita pada pertanyaan: bagaimana mitos kecantikan mengintimidasi perempuan?

## **Ruang-ruang Intimidasi**

Situasi kultural yang futuristik tampak mewarnai peristiwa dalam cerpen TPI. Di dalamnya ada bagian yang menginklusi perangkat-perangkat modernitas—dalam hal ini operasi plastik—demi kepentingan

pemenuhan upaya “mempercantik diri” oleh perempuan. Ini adalah salah satu gerbang masuk bagi keleluasaan mitos kecantikan dalam rangka melumpuhkan kepercayaan diri perempuan yang sejatinya digunakan dalam perjuangan mereka demi meningkatkan kualitas diri.

“Angkat saja, Jeng...,” kata Ratri suatu hari saat dia sedang memijatku, perempuan paruh baya yang tak pernah menikah itu sudah sepuluh tahun ini menjadi tukang pijat langgananku. Aku bercerita padanya perihal suamiku dan tahi lalat di punggungku.

“Angkat?”

“Iya, pakai laser. Ada lho teknologi seperti itu.”  
(Kumala, 107)

Informasi pemanfaatan teknologi modern dalam kaitannya dengan kesehatan memang telah luas menyebar, dari kalangan masyarakat akar rumput hingga mereka yang berpendidikan dan berkedudukan sosial. Para pengiklan menginvestasikan milyaran dana untuk dapat menyetir media yang menciptakan konsep-konsep tentang yang ideal (Wolf, 2004: 7). Hal ini melatarbelakangi pengetahuan Ratri tentang penggunaan sinar laser dalam dunia kesehatan modern.

Media tidak hanya menjajah pola pemikiran masyarakat kelas dua, tetapi juga membekap ruang-ruang kesadaran mereka yang lebih modern. Ketika perempuan modern didorong untuk percaya bahwa bagian-bagian tubuh kita yang normal dan sehat adalah penyakit, kita telah memasuki fase baru dari tekanan medis yang begitu mengerikan, hingga tak seorang pun ingin memandang ke arahnya (Wolf, 2004: 444). Lewat penggalan itu, Kumala mengisyaratkan bahwa perempuan-perempuan masa kini tengah terjebak dalam dua hal besar yang tidak mereka sadari: desakan konsep cantik ideal *a la* media masa dan tekanan medis yang menyesakkan. Keduanya ada adalah anak kandung dari dinamika kultural masa kini.

Sama halnya dengan wacana yang dikembangkan Noor. Ia menghadirkan rasa sakit sebagai satu narasi yang tak kalah ironisnya

Kaka jadi bangga pada kaki kirinya. Malah ia sering membatin, kenapa hal seperti ini tak terjadi dari dulu-dulu, ya?! Tahu begini, sudah gue potong aja kaki kanan gue. Lalu ia elus-elus kaki kirinya, melulur dan memijatnya dengan perasaan bangga—seperti seorang ibu yang memiming-minang anak tercintanya (Noor, 116).

Kaka dideskripsikan sebagai ia yang baru saja bangkit dari keterpurukan setelah kecelakaan yang menimpa. Para dokter terpaksa memotong kaki kanannya. Awalnya Kaka tidak dapat menerima kenyataan. Pengarang kemudian memasukkan intervensi pemikiran yang aneh tetapi

terdengar masuk akal. Bila tokohnya lebih bersinar ketika ia kehilangan satu kaki itu berarti bahwa ia akan jauh semakin bersinar ketika tidak memiliki kaki sama sekali!

Kita tentu tidak melihat kesakitan yang ditanggung Kaka dalam penggalan narasai di atas. Akan tetapi, ilustrasi tentang rasa sakit sebagai jalan lapang menuju pelanggengan mitos kecantikan itu telah nyata terlihat. Permainan logika yang dihidupkan pengarang membawa perempuan pada pemahaman bahwa menempuh rasa sakit itu selalu baik pada akhirnya. Rasa sakit adalah anak kunci yang dibutuhkan dalam membuka pintu bernama kecantikan demi memasuki ruangan keberhasilan yang membahagiakan.

Ketika perempuan meributkan apa yang tidak perlu diributkan di situlah dokter bedah kosmetik berdiri sebagai prajurit garda depan untuk melawan semua hal yang dianggap perempuan sebagai musuh utama mereka. Akhirnya, apa yang selama ini diwanti-wanti oleh Wolf berubah wujud menjadi sesuatu yang nyata: mitos kecantikan mengarahkan langsung proses bedah plastik pada kepentingan finansial dari profesi paramedis.

Lalu Ratri menjelaskan bahwa tetangganya yang punya tahi lalat di hidug juga mengangkatnya dengan laser. Harganya memang sedikit mahal, tetapi tidak berbekas dan tidak sakit. Maka, siang saat suamiku bekerja aku diantar Ratri ke dokter kulit untuk mengangkat tahi lalat di punggung (Kumala, 107).

## **Perempuan dan Kecemasan**

Perempuan dalam mitos kecantikan didefinisikan sebagai makhluk yang tidak akan pernah mencapai rasa puas terhadap penampilan diri mereka sendiri. Adalah rasa cemas dan rendah diri yang menghantui mereka setelah wabah mitos kecantikan telah benar-benar menjadi epidemi pembunuh harga diri yang menghalangi para perempuan mengaktualisasikan segala kreatifitas mereka di ruang publik, terkhusus dalam lingkup pandang mata lelaki. Perempuan dalam konteks ini dibuat khawatir tentang “keadaan diri yang berkaitan dengan fisik”. Rasa cemas dan khawatir tersebut juga tampak terlihat jelas dalam penggalan narasi Noor dalam KYJ di bawah ini.

Lantas, bagaimana ia mesti mempertahankan citra itu bila hanya punya satu kaki?

Kaka benar-benar shock! Rasanya ia ingin menabrakkan diri sekalian ke kereta api. Biar lumat. Tamat.

....



Kaka menatap Bibim. “Kamu bisa ngomong begitu, karena kamu tak mengalaminya sendiri. Kamu tak merasakan bagaimana remuknya aku!” (Noor, 111)

Kecemasan perempuan tentang tubuh mereka yang selalu dianggap ‘tidak sempurna’ adalah bagian dari politik mitos kecantikan (Wolf, 2004: 10). Perempuan dipaksa untuk melihat kembali hal-hal yang ada di dirinya untuk kemudian disesuaikan dengan keinginan masyarakat sebagaimana kondisi sosial mengharuskan mereka mewujud dalam bentuk yang “ideal”. Disabilitas membuat Kaka merasa cemas terhadap penilaian orang-orang kepadanya. Penilaian yang menyingkirkannya dari profesi yang selama ini telah ia geluti dan melambungkan namanya. Rasa cemas menghentikan perjuangannya dalam mencapai eksistensinya sebagai manusia yang bebas.

Kaka mengalami ketakutan yang muncul dalam pemikirannya; ketakutan tak dapat mempertahankan citranya sebagai foto model. Ketakutan-ketakutan terimplementasi dalam niatnya mengakhiri hidup. Kecemasan sepenuhnya dilandasi rasa rendah diri yang akut. Ia tak akan menjadi apa-apa dalam pandangan orang banyak dengan kondisi fisik demikian.

Kutipan kalimat *“lantas, bagaimana ia bisa mempertahankan citra itu bila hanya punya satu kaki?”* mengindikasikan sesuatu yang lebih dalam ketimbang sekadar rasa marah yang disebabkan derita cacat fisik. Dapat dikatakan, tokoh Kaka merasa cemas kakinya hilang bukan hanya karena ia kemudian tiba-tiba cacat, tetapi lebih karena ia tidak lagi dapat menjadi model. Profesi telah membentuknya menjadi pribadi yang harus secara mendetail memperhatikan kecantikan tubuh dan penampilannya dalam batas yang paling sempurna. Pemaparan itu menunjukkan betapa mitos berkuasa menggeser titik tumpu kecemasan perempuan dari “takut menjadi cacat” ke “takut tidak dianggap cantik” oleh masyarakat.

Hal demikian sesuai dengan asumsi bahwa mitos kecantikan bahkan bisa membuat perempuan merasa cemas terhadap penambahan usia mereka (Wolf, 2004: 17). Sama dengan apa yang mitos lakukan terhadap Kaka yang cemas dengan kecacatan bukan karena sekadar betransformasi menjadi penyandang cacat dalam kaca mata masyarakatnya, tetapi lebih jauh dari itu, masyarakat akan menganggapnya tidak cantik lagi hanya karena ia tidak dapat kembali menggeluti profesi foto model seperti dahulu. Dengan taktiknya, mitos kecantikan membuat perempuan meributkan hal-hal yang tidak pantas dipedulikan dan memperdebatkan gejala-gejala yang jauh lebih mencengangkan ketimbang penyakit.

Ia jadi benci dengan suaminya. Pantas laki-laki itu kelihatan biasa-biasa saja ketika ia kena celaka. Rupanya

karena ia punya simpanan. Begitu, ya?! Karena ia tak lagi sempurna, laki-laki itu jadi punya alasan untuk mencari *demenan* yang sempurna. Kalau ketahuan, laki-laki itu toh akan dengan senang meninggalkannya. Dasar laki-laki begundal! Kaka jadi uring-uringan. Labil. Gampang meledak, tetapi juga gampang sesenggukan. Malah tak jarang mengurung diri dalam kamar seharian (Noor, 119)

Mitos kecantikan selain menyerang perempuan juga menyerang laki-laki (Wolf, 2004: 18). Hal demikian sejalan dengan tindakan Bibim yang juga merasa cemas dengan kondisi Kaka pascakecelakaan. Hingga akhirnya, Bibim menunjukkan perselingkuhannya dengan Monika, dan mematahkan argumen kita sebelumnya. Bibim tak kuasa untuk tidak mencari perempuan lain. Ia tidak dapat bertahan hanya mencintai Kaka yang cacat. Bibim tidak benar-benar menemukan kepuasa seksual dari invaliditas istrinya. Mitos kecantikan mengaitkan cantik dan seks dengan cara yang salah; menciptakan anggapan yang pasti benar bahwa perempuan haruslah “cantik” untuk dapat menjalankan fungsi seksualnya. “Kecantikan” telah didefinisikan kembali sebagai seks. Artinya, bahwa Bibim yang telah terserang ideologi mitos kecantikan akan terus berusaha mencari perempuan “cantik” untuk dapat memenuhi seksualitasnya. Bahwa Kaka tidak lagi dianggap dapat menuntaskan gairah seksual Bibim, itulah tujuan sebenar-benarnya mitos kecantikan.

Rasa cemas juga menyerang seorang istri yang khawatir pada penilaian suami dalam TPI.

Dia sangat suka meraba punggungku, berlama-lama menciumi punggungku dan tahi lalat itu. Dia juga kerap menyemburkan spermanya di atas tahi lalat itu saat kami bercinta. Hingga suatu hari, aku tak pernah lagi diciumnya. Dia hanya menciumi punggungku. Dia hanya mencium bibirku atau keningku atau pipiku. Aku harus memintanya dulu untuk mencium bibirku, jika tidak dia tak akan ingat. Setiap ada kesempatan, dia selalu mencium punggungku. Aku mulai membenci tahi lalat di punggungku, aku cemburu (hal. 107).

Apa yang membuat tokoh istri begitu menyerahkan nasib tubuhnya di tangan dokter bedah adalah hal yang patut kita perhatikan. Ketika berhubungan intim, ia kerap tidak mendapatkan kepuasan. Aktifitas seksual itu tampak hanya tertuju pada pemuasan nafsu birahi suaminya. Hingga kemudian dengan sendirinya terbentuk pertarungan antara tokoh istri dan tahi lalat yang membuatnya berinisiatif menyingkirkan lokus objek seksual suaminya melalui jalan operasi laser dengan bertujuan

meraih kembali kepuasan seksual dan harga dirinya sebagai seorang perempuan. Keinginan yang dimediasi tenaga paramedis.

### **Cantik Ideal yang Runtuh**

Di awal narasi TPI, Kumala tampak langsung menukik masuk ke dalam jantung permasalahan mitos kecantikan. Ia membuka paragraf dalam wacananya dengan kalimat yang demikian tendensius, menghadirkan diferensiasi konsep cantik dalam identitas yang berbeda dengan asumsi cantik kolektif.

Ada tahi lalat di punggung istriku. Cantik sekali. Tepat di sebelah kiri atas punggung, mendekati pundak. Itu adalah tahi lalat terseksi yang pernah kulihat. Perempuan-perempuan mungkin bisa punya bermacam tahi lalat yang cantik; di dada, di pinggir ketiak, di atas bibir, di dagu, tapi tak ada yang secantik tahi lalat di punggung istriku.

Atmosfer dekonstruktif dalam nukilan cerpen di atas demikian terasa. Kumala dengan cermat menempatkan markah yang tendensius. Ia menyeret pembaca pada satu pemahaman bahwa tokoh suami menganggap “secantik” apa pun perempuan, kalau mereka tidak memiliki tahi lalat yang sama persis bentuk dan tempatnya dengan apa yang dimiliki istrinya, mereka tidak akan menjadi cantik. Kata *cantik* yang diberi pengtuasi tanda petik dalam kalimat sebelumnya merujuk pada cantik yang konvensional, yang selama ini diartikan sebagai perempuan dengan bentuk tubuh ideal serupa model. Artinya, sejak awal Kumala berambisi menyingkirkan semua konsep cantik yang ketat untuk kemudian digantikan dengan batasan yang ia definisikan sendiri.

Kumala tidak sendiri. Cantik ideal dalam mitos kecantikan juga menyerah oleh ideologi Noor yang memasukkan definisi kecantikan berdasarkan hasil imajinasinya.

Kaka membuktikan, bahwa kecantikan tak hanya diukur dari mancungnya hidung, sensualnya bibir atau seberapa lentik bulu mata seseorang. Pada Kaka, keindahan dan sensualitas itu justru pada kakinya yang tak hanya langsung tetapi juga kukuh padat. Itulah citra kecantikan saat ini, yang tak melulu molek, sintal, berwajah indo; namun juga mesti juga mengisyaratkan kepribadian yang matang. Dan kaki kaka adalah pengejawantahan itu semua. Kaki Kaka mengekspresikan totalitas gairah hidup (Noor, 110-111).

Kita dengan jelas dapat melihat bagaimana secara gamblang Noor melukiskan keindahan kaki Kaka. Baginya kecantikan adalah

apa yang ia perikan lewat deskripsi penokohnya. Noor kelihatan sangat mengkultuskan kaki perempuan itu. Ia juga menghidupkan wacana persaingan yang kental dengan konsep ideal menurut mitos kecantikan. Ia tidak segan menyerang indikasi cantik yang mengakar dalam masyarakatnya. Menurutnya, penampakan fisikal yang selama ini diagungkan sebagai indikasi kecantikan tidak cukup mengukur cantik tidaknya seseorang. Itu bukan apa-apa dibandingkan pesona kaki yang memiliki daya magis. Citra cantik yang absolut adalah apa yang tampak dan muncul dari pesona kaki seorang perempuan. Upaya Noor mereposisi lokus cantik ideal dari wajah dan keseluruhan tubuh perempuan menjadi bagian dari tubuh itu sendiri adalah indikasi nyata bagaimana ia berhasrat untuk lepas dari kungkungan cantik ideal berdasarkan patron mitos kecantikan.

Sampai di sini, kita tidak dapat berhenti hingga akhirnya kita temukan fenomena yang lebih jauh daripada sekadar upaya redefinisi yang dibentuk oleh kedua pengarang untuk kedua tokohnya dalam cerpen teranalisis. Narasi cerita yang sekaligus menyuguhkan fakta menarik bagi para pembaca adalah bahwa apa yang telah didefinisi pengarang berdasarkan definisi mitos kecantikan, didefinisikan kembali secara tidak sadar oleh tokoh-tokoh mereka sendiri. Ini menarik mengingat pengarang tidak bisa tidak menciptakan tokoh-tokoh yang meredefinisikan kembali konsep yang telah dengan cermat mereka bangun sejak mula. Indikasi yang paling kentara hingga sejauh ini adalah benar bahwa pada prinsipnya konsep cantik yang ideal itu tidak ada. Tidak pernah ada. Ia selalu berubah, tidak pernah tetap, nisbi, untuk menemukan bentuk-bentuk baru yang terus-menerus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Perempuan cukup meyakini dirinya cantik, untuk kemudian dapat membebaskan diri dari pemikiran yang mengunci mereka pada kuasa kultural yang intimidatif.

## **Kesimpulan**

Mitos kecantikan mengopresi kedua tokoh dengan bentuk intimidasi yang rapi dan terorganisir. Mula-mula mitos kecantikan memasuki bisnis media massa dengan menampilkan sosok perempuan yang konon ideal sesuai dengan mimpi pasar industri. Mitos ini kemudian dengan sangat halus hadir menjadi bagian dari dunia medis. Media menghadirkan informasi teranyar dalam dunia kesehatan yang berkaitan dengan keinginan perempuan mengubah tampilan demi mencapai maksud mereka—mengubah tampilan mereka lebih “cantik” dari pada sebelumnya. Dengan begitu, kedua tokoh perempuan dalam TPI dan KYJ akhirnya tersengat rasa cemas terhadap kondisi tubuh mereka sendiri.

Mitos kecantikan juga menawarkan rasa sakit dan/atau meminta bayaran finansial dari para perempuan. Bentuk-bentuk opresi konsep ideal tuhan kecantikan melahirkan satu gerakan yang disadari penuh oleh kedua pengarang: redefinisi mitos kecantikan. Kedua pengarang merayakan pertandingan-pertandingan dan benturan-benturan konsep kreasi mereka dengan apa yang tuhan kecantikan telah takdirkan. Hasilnya, Kumala dan Noor menciptakan satu bentuk redefinisi yang nyata bertentangan dengan indikator kecantikan dalam dinamika masyarakat.

Namun, senyatanya kedua pengarang tidak benar-benar lepas dari mitos kecantikan. Mereka boleh saja dikatakan telah membuat satu konsep cantik yang baru. Akan tetapi, mereka tetap terkurung dalam ruh mitos kecantikan yang selalu berusaha membuat batasan konsep cantik bagi perempuan. Hal ini tentu merugikan perempuan, karena mereka terus dipaksa untuk menyesuaikan tampilan fisik mereka dengan standar cantik yang baru. Padahal, dengan sendirinya perempuan akan bebas dari intimidasi kultural ini sejauh mereka percaya bahwa cantik adalah bentuk eksklusifitas perempuan. Mereka lahir menjadi perempuan dalam kondisi cantik yang terberi. Cantik tidak pernah dibentuk!

## Daftar Pustaka

- Beauvoir, Simone de. 2003. *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Noor, Agus. 2003. *Selingkuh Itu Indah*. Yogyakarta: Galang Press.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2010. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wiyatmi. 2012. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasi dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wolf, Naomi. 2004. *Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan*. Yogyakarta: Niagara.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Gegar Gender*. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.
- Kumala, Ratih. 2010. "Tahi Lalat di Punggung Istriku". Dalam Ratih Kumala (editor). *Un Soir du Paris: Kumpulan Cerpen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

# PERKEMBANGAN WACANA KARYA SAstra PASCAREFORMASI: KASUS NOVEL *PARA GUS* KARYA SACHREE M. DAROINI

**Muhammad Thobroni dan Ridwan**

Universitas Borneo Tarakan

E-mail: galangkautsar@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Pasca gerakan reformasi 1998 yang menumbangkan orde baru di bawah rezim Suharto, seperti terjadi euforia gerakan dan perkembangan pemikiran di tanah air. Euforia itu tidak hanya tampak pada perkembangan politik mutakhir tapi juga dalam konteks dinamika kebudayaan, khususnya kesusastraan di Indonesia. Berbagai karya diterbitkan dengan berbagai judul dan tema, bahkan tema-tema yang pada orde baru dianggap kurang mendapatkan ruang seperti seksualitas dan wacana “kiri” pada pasca reformasi 1998 memenuhi rak-rak toko buku. Pada era ini muncul penulis-penulis muda –banyak pula yang mantan aktifis gerakan reformasi 1998, dan sebagian mereka juga mendirikan penerbit-penerbit alternatif. Banyak diterbitkan buku-buku sastra, khususnya novel dengan agenda gerakan sosial, baik terungkap secara eksplisit maupun implisit dalam karya sastra pasca reformasi 1998. Sebutlah misalnya Perempuan Berkalung Surban (Abidah El Khaliqy), Peta yang Retak (M.Ali), Cantik Itu Luka (Eka Kurniawan),*

atau *Para Gus* (Sachree M. Daroini).

*Para Gus*, sebuah novel yang ditulis oleh Sachree M. Daroini. Novel ini meskipun diterbitkan pada 2004, namun cukup representatif untuk dikaji mengingat bercerita tentang fenomena-fenomena gerakan sosial yang terjadi pada tahun-tahun sebelum dan sesudah gerakan reformasi 1998. Novel ini menawarkan sisi menarik dengan mengusung dunia santri dalam tradisi gerakan sosial, perubahan sosial dan perlawanan meskipun tradisi pesantren telah dikenal sebagai “tradisi perlawanan”, khususnya terhadap kaum penjajah. Wacana kesantrian menarik diamati dan dikaji mendalam, setelah terjadi pergeseran dan transformasi di dunia santri dengan pemetaan makna dan ideologi keagamaan. Beberapa pihak menawarkan konsep baru tentang kaum santri, yang berbeda dengan tawaran Clifford Geertz dalam *Agama Jawa: Santri, Priyayi, dan Abangan*. Konsep “santri” Geertz mulai digugat dan didekonstruksi sebab dianggap bias.

**Kata kunci:** *Para Gus*, kaum santri, sastra pascareformasi 1998

## **Pendahuluan**

Pasca gerakan reformasi 1998 yang menumbangkan orde baru di bawah rezim Suharto, seperti terjadi euforia gerakan dan perkembangan pemikiran di tanah air. Kebebasan berpikir, berpendapat dan bersuara benar-benar telah dimanfaatkan oleh banyak rakyat untuk mengekspresikan gagasan dan ide-ide mereka, setelah sekian tahun – khususnya pada era orde baru selama 32 tahun, merasa dibungkam hak berbicara dan bersuara mereka.

Euforia itu tidak hanya tampak pada perkembangan politik mutakhir tapi juga dalam konteks dinamika kebudayaan, khususnya kesusastraan di Indonesia. Berbagai karya diterbitkan dengan berbagai judul dan tema, bahkan tema-tema yang pada orde baru dianggap kurang mendapatkan ruang seperti seksualitas dan wacana “kiri” pada pasca reformasi 1998 memenuhi rak-rak toko buku. Pada era ini muncul penulis-penulis muda –banyak pula yang mantan aktifis gerakan reformasi 1998, dan sebagian mereka juga mendirikan penerbit-penerbit alternatif.

Karya-karya Pramudya Ananta Tour yang pada era orde baru hanya dikonsumsi secara *sirri* (sembunyi-sembunyi) juga diterbitkan ulang, dan dibaca dengan bangga oleh berbagai kalangan. *Ronggeng Dukuh Paruk* (RDP) diterbitkan ulang setelah beberapa bagian yang digunting negara, kembali ditampilkan –khususnya yang mengangkat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tragedi G30S yang melibatkan militer dan intelejen. Selain itu, terbit pula buku-buku sastra, khususnya novel yang

ditulis dan diterbitkan memiliki agenda gerakan sosial, baik terungkap secara eksplisit maupun implisit dalam karya sastra pasca reformasi 1998. Sebutlah misalnya *Perempuan Berkalung Sorban* (Abidah El Khaliqy), *Peta yang Retak* (M.Ali), *Cantik Itu Luka* (Eka Kurniawan), atau *Para Gus* (Sachree M. Daroini).

Seiring dengan perkembangan karya-karya tersebut, tradisi studi sastra pun mengalami hal serupa. Meskipun telah dilakukan sejak dulu, namun harus diakui, pasca reformasi 1998 studi sastra dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra marxis terus-menerus mendapatkan ruang di berbagai penelitian dan kajian sastra. Pendekatan sosiologi sastra marxis tersebut dirasakan kian perlu untuk digalakkan setelah melihat semakin banyak karya sastra yang mengangkat tema-tema gerakan sosial atau perlawanan kelas.

Peneliti tertarik untuk mengambil bagian dan partisipasi dalam mengembangkan penelitian dalam pendekatan sosiologi sastra marxis, dengan cara melakukan studi “sederhana” atas sebuah karya yang terbit pasca gerakan reformasi 1998 yaitu *Para Gus*, sebuah novel yang ditulis oleh Sachree M. Daroini. Novel ini meskipun diterbitkan pada 2004, namun cukup representatif untuk dikaji mengingat bercerita tentang fenomena-fenomena gerakan sosial yang terjadi pada tahun-tahun sebelum dan sesudah gerakan reformasi 1998.

Selain itu, novel ini juga menawarkan sisi menarik yang lain yaitu mengusung dunia santri dalam tradisi gerakan sosial, perubahan sosial dan perlawanan meskipun tradisi pesantren sejak dulu telah dikenal sebagai “tradisi perlawanan”, khususnya terhadap kaum penjajah. Wacana kesantrian dewasa ini menjadi kian menarik untuk diamati dan dikaji secara mendalam, setelah terjadi pergeseran-pergeseran dan transformasi di dunia santri, dengan segala pemetaan makna dan ideologi keagamaan mereka.

Bahkan, beberapa pihak telah menawarkan beberapa konsep terbaru tentang kaum santri, yang berbeda dengan tawaran Clifford Geertz yang dipublikasikannya lewat *Agama Jawa, Santri, Priyayi, dan Abangan*. Konsep “santri” yang diberikan Geertz itu tidak saja telah mendapatkan banyak pembanding, tapi juga telah mulai digugat dan didekonstruksi karena dianggap memiliki bias dalam penelitiannya, meskipun harus diakui dalam sebuah penelitian sangat sulit untuk benar-benar menempatkan diri secara obyektif. Terlebih lagi, seorang peneliti memiliki keterbatasan-keterbatasan termasuk akses informasi dan waktu penelitian, sehingga tak jarang peneliti mencari “jalan pintas” dengan mengambil informan dengan pola yang paling mudah.



## Pembahasan

Novel *Para Gus* ini bila dibaca secara runut dan kronologis, akan tampak memberikan cerminan yang pas tentang konsep santri baru jenis pertama yang dikenalkan oleh Nurkhalik Ridwan. Bercerita tentang perjalanan hidup seorang santri kesayangan seorang kiai; dengan kemampuan yang mumpuni di bidang kajian kitab kuning dan tradisi ritual-spiritual yang cukup kuat, harus memilih jalan hidup yang berbeda dengan keinginan teman dan orang-orang di sekitarnya.

Abdi-lakon dalam novel ini, memilih urbanisasi ke kota meski tanpa direncanakan sebelumnya. Di dunia baru ini dia terjebak pada hiruk pikuk gerakan perlawanan –demonstrasi, gerakan sosial, dan sebagainya. Dan pada bagian akhir, sadarnya Abdi, bahwa dirinya adalah seorang putra dari seorang tokoh dan pentolan kaum santri baru –yang bila menilik penjelasan Nur Khalik Ridwan, lebih mendekati kriteria kelompok santrinya Amrozi CS yang melakukan gerakan keagamaan secara *underground*, mirip eks NII atau DI/TII. Dan disadari, saat ini gerakan semacam itu masih marak, khususnya di kampus-kampus umum.

Karya sastra tidaklah lahir dari ruang yang vakum, namun sebaliknya karya sastra terlahir dari rahim sosial yang mengandungnya. Pengarang (sastrawan) berinteraksi dengan kehidupan manusia dan alam sekitarnya, dan karenanya tak heran bila karya sastra yang diciptakannya seringkali tak terhindarkan dari nilai-nilai dan ideologi yang berkembang di masyarakat dimana pengarang hidup.

Para pengarang –sadar atau tidak- tidak jarang mengusung nilai-nilai atau ideologi yang berkembang di masyarakat dimana dia hidup, melalui tema, amanat, dialog lakon, setting, dan unsur-unsur lain di dalam karya sastra. Unsur-unsur intrinsik dalam sastra pun kerap kali mengalami “intervensi” dari unsur ekstrinsik.

Penelitian ini berusaha membedah aspek perlawanan dan gerakan sosial yang dilakukan generasi baru kaum santri menurut konsep Nur Khalik Ridwan dalam *model pertama*.

*Para Gus* dimulai dengan perjalanan hidup seorang bocah laki-laki, Abdi, berusia 12 tahun. Abdi mewakili tipologi kebanyakan anak-anak di desa yang terobsesi sebagai “anak sholeh” dan menginginkan mendalami agama dan ajarannya di sebuah pesantren. Hal ini terungkap dari dialog antara Gus Jalal, pengasuh pesantren Al Isyraq Kepanjen Malang, dengan Abdi:

“Siapa wali yang mengantarkanmu?”

“Sendiri, Kyai?”

“Sendiri?” Gus Jalal mencoba memastikan. Walau sebenarnya banyak para santri yang sowan sendirian

kepadanya tanpa wali atau orang tua mereka untuk mengaji dan mondok menjadi santri. Tapi, rata-rata mereka berumur lebih dari tujuh belas tahun. Sedangkan Abdi, baru berumur dua belas, tiga belas, atau justru sebelas tahun. Abdi tak pernah hafal dengan umurnya.

“*Inggih, Kyai!*” Abdi semakin tak keruan. Ada perasaan bimbang. Apa mungkin dia diperbolehkan nyantri dengan tanpa wali atau orang tua yang mengantarkan atau menitipkannya. Mungkin dia akan disangka anak haram atau haram jadah seperti yang pernah Lik Iyem ceritakan waktu ia masih bersamanya.

(Daroini, 2004:5-6)

Bertahun-tahun Abdi membangun tradisi kesiantriannya. Di pesantren Abdi mulai mengenal dunia kosmopolit dengan mengenal anak-anak sebayannya dari berbagai latarbelakang, seperti: petani, buruh, nelayan, atau bahkan anak-anak dari kota. Selain menguasai kitab-kitab klasik seperti *Ihya'* Jilid II, Abdi juga mulai mengenal kisah-kisah dari sesama temannya.

Meskipun sebenarnya santri sendiri banyak yang dari kalangan gus, yaitu orang tuanya seorang kyai dari pondoknya masing-masing. Tapi, kebanyakan orang tua santri di Pondok Al Isyraq adalah buruh, pedagang, petani, atau orang-orang kota (Daroini, 2004: 23-24).

Ada masanya, seseorang yang sejak kecil menekuni tradisi keagamaan dan kesiantrian yang ketat, mulai menemukan hal-hal lain dari pengalaman keagamaannya. Seorang santri yang melakukan ziarah spiritual dan ritualitas seperti Abdi, mulai menemukan berani bertanya tentang kebenaran agamanya. Pengalaman Abdi ini menjadi satu masa, di mana Abdi mulai meninggalkan masa beragama dengan pendekatan doktrin, dogmatik, dan skriptualis menuju tradisi beragama yang mengedepankan substansi, penalaran, dan rasionalitas.

“Apakah benar semua yang dikatakan Gus Jalal, Kang?” tanya Abdi suatu ketika pada Ibad.

“Apa yang kau maksudkan?”

“Kebenaran agama!” ujarnya sambil membuang pandangan ke ujung senja yang mulai mengerami siang dengan keangkuhan malamnya. Lalu meneruskan kalimatnya, “kebenaran Tuhan, malaikat, dosa, neraka, surga, dan semua yang tak pernah kita ketahui dalam kehidupan yang nyata ini.” (Daroini, 2004: 119-120).

Kritisisme yang ditampilkan pengarang lewat ungkapan Abdi tersebut merupakan awal dari gerakan perlawanan yang kelak akan dilanjutkan Abdi. Sikap kritis Abdi tersebut akan mengantarkan yang bersangkutan memiliki perspektif sendiri dalam melakukan kritik wacana agama, bahwa agama dan wahyu turun dalam konteks ruang dan waktunya. Interaksi Abdi dengan lingkungan sosialnya, dengan orang-orang yang ditemuinya, dan pengetahuan keagamanya saling berbenturan yang melahirkan refleksi kehidupan.

Yang terjadi dalam diri Abdi adalah sebuah guncangan kemanusiaan atas tuntutan diri yang berkembang seiring dengan umur dan pertumbuhannya. Kedirian yang harus ditemukan sebagai jati diri, memaksanya untuk menunjukkan kebenaran dirinya. Tapi di sisi lain, dia sadar bahwa dia adalah diri yang belum ditemukan sehingga orang lain pun dianggap juga yang harus ditaklukkan, agar sama dengan dirinya. Demikian juga nurani, hati dan pikirannya harus sesuai dengan pemuda yang sudah mendekati dua puluh tahun ini. Bagi Abdi, itulah kebenaran yang harus disampaikan walau orang lain pun belum bisa memahami dan menerimanya. Jika demikian, tidak ada yang lain kecuali akan menambah keraguan pada diri kemanusiannya.

.....  
“Air matamu itu tak akan berhenti di sini, jika kau akan menurutinya. Karena manusia akan selalu menangis dan sendiri, jika dia tahu akan keberadaannya di atas bumi ini,” kata Gus Tour sambil meraih rokoknya.

.....  
“Tertawalah ... karena tak ada tempat lagi untuk tertawa pada masa tuamu nanti,”suara Gus Tour di tengah tawanya yang sangat besar dan angker. Abdi menikmati suara itu juga, sebagaimana dia menikmati suasana yang dibangun di rumah itu. Penuh kemanusiaan dan kebebasan, tak ada sekat yang mengantar manusia pada nurani yang kecil. (Doroini, 2004: 132-135).

Perjalanan hidup itu telah membentuk Abdi muda yang mulai mengenal dirinya sendiri. Abdi pun menyempatkan diri untuk menengok kampung halamannya, di mana dia terlahir dari rahim ibu dan rahim sosialnya untuk pertama kali. Saat pulang kampung itulah Abdi kembali harus berhadapan dengan realias sosialnya di kampung halamannya sendiri. Benturan idealisme keagamaan dan realitas di kampungnya semakin keras dan membangunnya dalam pandangan keagamaan yang terus berkembang.

## Penutup

Karya sastra yang terbit pascareformasi 1998 di Indonesia memiliki corak variatif dan menarik, termasuk karya sastra berlatar keagamaan. Novel *Para Gus* karya Sachree M. Daroini menjadi salah satu novel yang menawarkan ciri unik di mana keagamaan ditampilkan dalam wacana kesusastraan secara kritis, bukan dalam bentuknya yang verbal dan formal, tetapi substansi. Agama hadir melalui karya sastra secara subversif, mendorong transformasi sosial dan perubahan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Damono, Sapardi Djoko. 1979. *Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Daroini, Sachree M. 2004. *Para Gus*. Yogyakarta: Penerbit Alinea
- Dhofier, Zamakhsari. 1982. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: Penerbit LP3ES
- Eagleton, Terry. 2002. *Marxisme dan Kritis Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Sumbu
- Ridwan, Nurkhalik. 2004. *Santri Baru: Pemetaan, Wacana Ideologi dan Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Gerigi Pustaka
- Salim HS, Hairus & Ridwan, Muhammad (ed). 1999. *Kultur Hibrida, Anak Muda NU di Jalur Kultural*. Yogyakarta: Penerbit Lkis

# ETIKA DASAR KEKUASAAN DALAM BUDAYA JAWA TOKOH KEN AROK NOVEL *PARARATON* KARYA WID KUSUMA

**Mu'minin**

STKIP PGRI Jombang

E-mail: mukminin.stkipjb@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang etika dasar politik kebudayaan Jawa dalam novel *Pararaton* karya Wid Kusuma diantaranya: etika dasar politik tradisional, kosmologi politik, konsep teologi politik, politik dan ilmu kadigjayan, serta manajemen politik keraton. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan etika dasar politik kebudayaan Jawa dalam novel *Pararaton* karya Wid Kusuma dengan cara mengutip kata-kata atau kalimat sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Etika Dasar Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa Tokoh Ken Arok Novel *Pararaton* Karya Wid Kusuma adalah suatu aturan dasar dalam menjalankan sebuah kekuasaan oleh Ken Arok dalam etika kekuasaan kebudayaan Jawa.

**Kata kunci:** etika, dasar politik, kebudayaan Jawa

## Pendahuluan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Namun, dapat pula dilihat bahwa perubahan terjadi karena sikap masyarakat sebagai persemaian nilai-nilai budaya ikut berkembang dan berubah. Kedua hal itu mempengaruhi secara timbal balik, begitu juga akibatnya pun terjadi sejalan dengan perubahan nilai budaya serta sikap masyarakat. Purwadi (dalam Narbuko, 2007:3). Kebudayaan pada dasarnya merupakan segala macam bentuk gejala kemanusiaan, baik yang mengacu pada sikap, konsepsi, ideologi, perilaku, kebiasaan, karya kreatif, dan sebagainya. dengan kata lain, kebudayaan merupakan fakta kompleks yang selain memiliki kekhasan pada batas tertentu juga memiliki ciri yang bersifat universal.

Kebudayaan secara umum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahannya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan budaya adalah gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap kehidupan masyarakat. Semua itu sesuai dasar sifat manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.

Sesuai dengan penjelasan dan uraian tersebut apa yang menjadi permasalahan dalam lingkungan sosial budaya tidak jauh berbeda dengan isi cerita yang terkandung pada novel, karena apa yang terdapat pada sebuah novel merupakan sebuah cerminan dan imajinatif dari pengarang untuk menggambarkan peristiwa kebudayaan pada masa lampau yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat waktu itu.

Salah satu novel yang merupakan sebuah penafsiran untuk mengungkapkan cara-cara dan etika dasar kekuasaan dalam sejarah kebudayaan Jawa dipandang dari asal-usul peristiwa dan keterkaitan budaya yang bersifat sosial salah satunya yaitu novel yang berjudul *Pararaton* karya dari Wid Kusuma.

*Pararaton* merupakan novel cinta penuh perjuangan dan sepek terjang seorang tokoh Budaya Jawa yang sangat fenomenal di negeri ini. Novel yang mengisahkan banyak kejadian heroik yang dilakukan oleh tokoh yang pada akhirnya melahirkan kebudayaan Jawa pada masa kerajaan Singasari dalam kurun waktu 1222-1292 Masehi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mengkaji karya sastra menggunakan pendekatan sosiologi sastra berdasarkan etika dasar kekuasaan kebudayaan Jawa yang terdiri dari beberapa analisis permasalahan yang terdapat di dalam novel. Sedangkan karya sastra yang

digunakan objek dalam kajian ini adalah novel yang berjudul *Pararaton* karya Wid Kusuma terbitan Diva Press Tahun 2011. Seperti karya sastra lainnya yang menceritakan sejarah dan munculnya cara berkuasa di jaman kerajaan Singasari melalui dialog antartokoh dan alur ceritanya.

Novel *Pararaton* ini menceritakan perjalanan Ken Arok dan Ken Dedes tentang cermin kehidupan dalam epos kehidupan anak yang patut disimak. Kisah sejarah, perjuangan dan cinta Ken Arok dan Ken Dedes yang diwarnai dengan suasana intrik dan konflik, romantisme, siasat licik, dan pertumpahan darah melalui pentas sejarah kelim Singasari. Inilah setidaknya yang patut dijadikan pelajaran sejarah masa lalu dalam memperdebatkan masalah seputar tiga “ta”, yakni tahta, harta dan wanita.

## Landasan Teori

**Etika.** Etika merupakan bagian filsafat etis. Yakni, filsafat yang mencari kebenaran tentang aksiologis. Dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim dipahami sebagai sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia, Endraswara (2010: 24).

Magnis-Suseno (dalam Endraswara, 2010:18) mengartikan etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Pengertian ini memuat pandangan bahwa etika itu merupakan rambu-rambu normatif untuk menilai apakah pekerti seseorang dianggap mencerminkan budi luhur atau tidak. Penyimpangan terhadap etika berarti juga sekaligus mengingkari terhadap nilai budi luhur. Begitu pula etika kebijaksanaan Jawa, tentu dapat diartikan sebagai norma yang digunakan masyarakat Jawa untuk menilai pekerti seseorang dalam kehidupannya.

**Kekuasaan.** Kekuasaan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk operasional tenaga gaib alam semesta sendiri. Jadi kekuasaan bukanlah sekedar bentuk hubungan tertentu antarmanusia, bukan suatu gejala khas kehidupan bermasyarakat yang tak ada sangkutnya dengan kekuatan-kekuatan alam. Melainkan, sama dengan semua kekuatan sosial dan alamiah lainnya, berakar pada kekuatan gaib atau adiduniawi alam semesta sendiri, Magnis-Suseno (2001:34). Sedangkan menurut Andrain (dalam Damsar, 2010:72), kekuasaan dimengerti sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (asset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain.

Kekuasaan menurut paham Jawa adalah segala kekuatan yang

menyatakan diri dalam alam dan juga merupakan energi Tuhan tanpa bentuk yang selalu kreatif meresapi seluruh kosmos. Konsep kekuasaan Jawa mengandung tiga gejala kekuasaan yang dapat diamati dari perkembangan sejarah kerajaan-kerajaan Jawa khususnya Mataram. Pertama, kekuasaan itu konkret. Kekuasaan itu diturunkan oleh Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Esa atas dasar “wahyu keprabon” kepada “wakilnya” di dunia ini. Kekuasaan politik adalah ungkapan kesaktian atas dasar wahyu, walaupun penuh misteri, tetap konkret. Kedua, kekuasaan itu homogen, bersifat satu dan sama, karena jumlah kekuasaan dalam alam semesta selalu tetap. Menurut paham Jawa.

Kekuasaan merupakan ungkapan realitas yang sama, berasal dari sumber tunggal yang sama, berkualitas sama dan lebih dulu ada daripada hal lainnya, termasuk pengertian baik dan buruk. Paham ini berasal dari anggapan bahwa hakekat alam semesta itu tetap, tidak bertambah luas atau menyempit. Ketiga, kekuasaan tidak mempersoalkan dari mana ia berasal dan kemudian menyerap sebagai gumpalan kekuasaan baik kawan maupun lawan.

**Budaya Jawa.** Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang panjang. Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa sanksekerta “Buddhayah”. Yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya yaitu daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Dan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa tersebut, (Widagdho, 2008:18).

Kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku, Spradley (dalam Moleong, 2011:23). Prof. Dr. Koentjaraningrat (dalam Widagdho, 2008:19) mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam masyarakat.

**Dasar Politik Tradisional.** Orang Jawa mempunyai harapan mengenai masa depan yang berhubungan dengan nilai spritualitas, yaitu melalui apa yang sering dinamakan *Puji Pangastuti*, Anshoriy (2008:17). Masa kini, dalam kesaksian orang Jawa, adalah masa yang dipenuhi oleh berbagai gelombang permasalahan, yang satu sama lainnya saling berkaitan.

Menurut Maurice Crick (dalam Damsar, 2010:11) menjelaskan bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Di satu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, dimana individu ataupun kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan dominasinya terhadap



masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Disisi lain politik dianggap sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.

Konsep-konsep besar yang bersifat “ramalan masa depan”, khususnya mengenai Gelombang Ketiga, bagi orang Jawa menjadi semacam “primbon baru” dan dimaknai sebagai “referensi kebudayaan” (Anshori, 2008:17). Sinuhun Pakubuwono IX (dalam Anshoriy, 2008:19) ketika menguraikan “filsafat” Hanacaraka mengatakan bahwa *caraka* (cipta, rasa, karsa) sebagai utusan Tuhan menyatu di dalam nafas, *ambegan*, jadi bukan sekedar pengetahuan atau ilmu, melainkan laku (tingkah laku).

Orang Jawa dikenal memiliki cara berpikir yang berjenjang, yaitu: nalar, manah dan menggalih. Dengan nalar kita mendapatkan argumentasi, alasan, wawasan, penjelasan dan analisis (lebih ke arah metode berpikir deduktif). Manah berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan dasar masalah, yakni bagaimana menuju sasaran yang tepat dalam memecahkan masalah. Sedangkan berpikir Menggalih bersifat integralistis, komprehensif, multidisipliner dan multidimensional untuk dapat mencapai sebuah esensi (tentu pengertian “esensi” disini berbeda dengan pengertian “esensi” pada filsafat eksistensialisme, namun lebih ke arah “esensi” humanisme). Berdasarkan pola pikir khas Jawa yang berjenjang tersebut maka kekuasaan harus jatuh pada sosok Satria yang dikenal sebagai pemimpin yang merakyat atau Panakawan.

Kebudayaan Jawa pun sudah terdapat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal sebagai Sang Hyang Widhi, Sang Hyang Antaya dan sebagainya. Jika dilihat dari pandangan eksistensialisme menurut Anshoriy (2008:11), raja/pemimpin massa adalah individu yang telah mencapai tahapan kesadaran religius. Berbeda dengan rakyat yang dipimpin, hanya mencapai tahapan kesadaran statis. Hanya individu yang telah mencapai kesadaran religius yang dapat memimpin massa yang hanya mencapai kesadaran-kesadaran dibawah kesadaran religius tersebut (statis dan etis).

**Kosmologi Politik.** Roda sejarah selalu berputar. Manusia lahir dan mati. Negeri timbul dan tenggelam. Negara-negara membangun kemakmuran dan kejayaan, namun pada akhirnya kemakmurannya pun akan pudar. Begitu pula dengan negeri Singosari, negeri ini tercatat hampir satu abad memimpin rakyat Jawa kepuncak peradaban. Meskipun demikian, kekuasaannya pun tidak langgeng.

Menurut para pakar sejarah, Kraton Singosari berpusat di daerah Malang, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Singasari, sekitar Dinoyo. Jawa sebelum munculnya Singasari, terdapat empat kerajaan yang

dikatakan para pujangga dengan pasemon *Catur rana segara asat*. Artinya, ada empat gerbang mahkota namun samudra kering. Maksudnya, terdapat empat Negara, yakni Daha, Jenggala, Ngurawan, dan Koripan. Meskipun demikian rakyat menderita karena seringnya terjadi perebutan kekuasaan, intrik-intrik jahat, persaingan pengaruh, dan sebagainya. akhirnya pada awal abad ke- 12 muncullah Ken Arok dari Pakuwon Tumapel mengatasi keempat kerajaan itu.

Ken Arok berhasil mempersatukan keempat negara itu dan mendirikan panji-panji Singosari. Dengan segala kesakralan dan pengaruhnya, Ken Arok berhasil membangun tahta Singasari menjadi kuat, berpengaruh dan diakui rakyat. Dalam kondisi seperti itu, Sakralisasi kekuasaan (*sacralization of power*) menjadi sedemikian penting dan lumrah bagi Ken Arok, Anshoriy (2008:20-21).

Konsep *Negara Gung*, memperlihatkan bagaimana legitimasi kekuasaan seorang raja terhadap para kerabat dan rakyatnya. Suatu cerminan hubungan *patron-client relationship* yang dalam bahasa politik keraton Jawa disebut sebagai *manunggaling kawula gusti*. Berkuasanya seorang raja sehingga ia memiliki kekuasaan memerintah, mengatur, menghukum, menguasai daerah-daerah lain. Pembahasan tentang konsep yang ada di dalam kekuasaan itu sendiri, tergantung pada kebudayaan politik mereka, (Anshoriy, 2008:21).

Menurut Moedjanto (dalam Anshoriy, 2008:22), dalam segala persoalan, raja memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tergambarkan kekuasaan itu sentralistik tidak terbagi-bagi dan merupakan kebulatan yang tunggal serta tiada yang mampu menandingi. Kenyataan ini diungkapkan melalui bahasa Jawa yang amat plastis, yang berbunyi *endi ana surya kembar*, berarti tidak membenarkan adanya kekuasaan lain yang sederajat dengan dirinya. Berbicara tentang kekuasaan negara, Sunoto (dalam Anshoriy, 2008: 22) mengatakan kita dihadapkan pada berbagai kemungkinan, antara lain dari raja, dari rakyat, dan dari Tuhan.

**Konsep Teologi Politik.** Di dalam *Serat Wulangreh* disebutkan bahwa raja berkedudukan sebagai wakil Tuhan dan memerintah berdasarkan hukum keadilan. Oleh karena itu, rakyat wajib mengikutinya; dalam hal ini, unsur raja, rakyat, dan Tuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, (Anshoriy, 2008:24-25).

Teologi adalah pengetahuan mengenai sifat-sifat Tuhan, dasar-dasar kepercayaan terhadap Tuhan dan agama terutama pada kitab-kitab suci, KBBi (2011:557). David Easton (dalam Damsar, 2010:11) mengatakan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Sedangkan James A. (dalam Damsar, 2010:11) memberi pengertian politik sebagai pemerintah, publik, dan alokasi nilai dari pihak yang berwenang

Kekuasaan negara biasanya disangkutpautkan dengan sang raja. Kekuasaan raja tidak datang begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang gigih dari pribadi raja atau dinasti yang bersangkutan. Karena pribadinya yang hebat itu, ia memperoleh dukungan rakyat melalui tokoh-tokoh rakyat, misalnya para pendeta. Karena pribadinya itu pula ia ditaati oleh rakyat. Perlu diingat bahwa manusia atau bangsa Jawa hidup dalam lingkungan alam tertentu dan dipengaruhi olehnya. Lingkungan alam di Jawa membuat manusia percaya bahwa ada kekuatan yang bersifat akodrati yang ikut memegang peranan penting dalam tata kehidupan. Kekuatan tertinggi dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari perspektif ini, dapat diasumsikan bahwa hakikat asal-usul kekuasaan negara adalah raja orang yang paling berkuasa, rakyat sebagai pendukung negara, dan Tuhan Yang Maha Kuasa, (Anshoriy, 2008:25).

Raja adalah orang yang telah berhasil melewati masa ujian berat sehingga mendapat *kanugrahan* (kebahagiaan) dari Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari pada itu, raja dilukiskan sebagai keturunan dewa-dewa, atau setidaknya telah mendapat petunjuk dan perlindungan dari para dewa, (Anshoriy, 2008:28). Pengakuan hal semacam ini disahkan oleh para pendeta. Dalam hal raja-raja di Jawa, kita menjumpai legitimasi semacam ini. Selain ketiga asal usul kekuasaan negara tersebut di atas karena raja mempunyai kewibawaan atau kharisma sedemikian besarnya maka tidak hanya dirinya sendiri yang mempunyai status demikian, tetapi juga keturunannya. Itulah sebabnya *keturunan* juga mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan kekuasaan negara.

Sunoto (dalam Anshoriy, 2008:26) mengatakan jika Tuhan menetapkan bahwa yang mendapat pulung adalah seorang tertentu maka yang lain kemudian mengakuinya. Pengakuan rakyat ini penting karena dengan demikian ia mendapatkan dukungan rakyat. Itulah sebabnya, tidak disangsikan lagi bahwa seorang raja di Jawa mempunyai kedudukan yang sangat besar baik dalam hal menetapkan dan melaksanakan peraturan maupun memberi hukuman jika terjadi pelanggaran. Betapa besarnya kekuasaan raja dapat dilihat dari berbagai ungkapan, antara lain *sabda pandhita ratu, idu geni*.

**Politik dan Ilmu Kadigjayan.** Orang desa sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga yang disebut negara. Loyalitas orang desa terhadap hukum dan pemerintah, tercermin dalam idiom formal mereka; *desa mawa cara negara mawa tata* (desa dengan adat istiadat, negara dengan undang-undang). Meskipun secara material mereka sering dirugikan, rasa ruginya itu akan terobati oleh ungkapan *kagem negara*. Setia pada pemerintah akan mendatangkan berkah karena pemerintah dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam

memelihara dan mengupayakan tatanan sosial yang *gemah ripah loh jinawi karta raharja*.

Kadigjayan adalah kebesaran, kemansyuran dalam memimpin (KBBI, 2011:202) sedangkan Koentjaraningrat (dalam Anshoriy, 2008:30) menyanggah gagasan Ben Anderson bahwa kadigjayan sebagai satu-satunya komponen yang diperlukan untuk melaksanakan kekuasaan itu, ibarat kekuatan energi bersifat sakti serta keramat yang dengan sendirinya dapat digunakan.

Seorang pemimpin dalam suatu masyarakat berkebudayaan Jawa perlu juga memperhitungkan semua komponen kekuasaan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin secara universal. Selain itu, memperingatkan bahwa konsepsi orang Jawa mengenai kekuasaan sebagai kekuatan energi yang sakti dan keramat adalah suatu konsepsi yang simbolik, (Anshoriy, 2008:30).

**Manajemen Politik Keraton.** Kata atau istilah manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, Follet (dalam Sule-Saefullah, 2008:5). Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya, Nickles dan Hugh (dalam Sule-Saefullah, 2008:6).

Politik adalah suatu hal dimana sejak jaman dahulu sampai sekarang keberadaannya selalu menjadi topik yang sangat diperhatikan. Definisi politik menurut Caporaso dan Levine (dalam Damsar, 2010:11) adalah sebagai pemerintahan, publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. David Easton (dalam Damsar, 2010:11) menjelaskan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan.

Politik dipahami sebagai kekuatan (*power*), kewenangan (*authority*). Kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), konflik dan resolusi (*conflict and resolution*), kebijakan (*policy*), (Damsar, 2010:11-12). Sedangkan keraton (dalam KBBI, 2011:240) dijelaskan merupakan negara atau istana tempat raja dan ratu.

Sejak zaman Jawa kuno, kekuasaan kraton-kraton Jawa selalu dipegang oleh "darah biru". Karena kaum darah biru ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa. Oleh karena itu pulung kekuasaan ini selalu berpindah-pindah tapi tidak jauh dari orang memiliki kekuatan magis spiritual tinggi dan menerima *wahyu cokroningrat*, (Anshoriy, 2008:32-33)

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan sesuatu baik itu peristiwa dan yang lainnya dengan menggunakan pengumpulan data pada teknik alamiahnya. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data-data. Penelitian diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun yang bersifat rekayasa, (Sukmadinata, 2012:72).

Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan adalah dari novel *Pararaton*, karya Wid Kusuma dan merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh Diva Press tahun 2011. Data dapat diartikan juga sebagai bahan mentah yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya, data bisa berupa fakta atau keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa kutipan yang dijadikan sebagi ukuran dalam memberi sebuah makna terhadap novel *Pararaton yang berhubungan dengan* Etika dasar politik kebudayaan Jawa

## Pembahasan

**Dasar Politik Tradisional.** Dasar politik tradisional yang bersifat ramalan masa depan dalam novel *Pararaton* berawal dari adanya ramalan bahwa pengganti raja dari kerajaan Tumapel bukanlah dari para bangsawan keturunan kerajaan melainkan dari trah luar kerajaan yaitu gabungan antara tiga trah yakni trah brahmana, trah kesatria, dan trah sudra. Berikut data yang memperkuat hal ini.

“Brahmana yang memimpin rapat itu memberikan gambaran bahwa menurut wisik, Pakuwon Tumapel akan menjadi kerajaan besar, tetapi penguasanya menjadi tumbal dan akan dibesarkan oleh penguasa dari luar trah yang berkuasa sekarang. Raja yang berikut merupakan gabungan tiga trah, yaitu trah kesatria, brahmana, dan trah sudra yang disamakan menjadi sudra yang lahir disebelah timur tlatah Kawi.”

Kutipan data di atas menunjukkan adanya konsep politik tradisional yang menggambarkan bahwa seseorang yang menggantikan raja Tunggul Ametung dari kerajaan Tumapel berdasarkan ramalan masa depan yang sudah diketahui oleh para brahmana. Hal tersebut diperkuat dari data yang menyebutkan “wisik” yaitu gambaran atau pandangan masa depan yang diperoleh oleh para brahmana ketika bersemedi. Seseorang yang

berasal dari tiga trah yakni trah brahma, kesatria, dan sudra.

**Kosmologi Politik.** Konsep *Negara Gung*, memperlihatkan bagaimana legitimasi kekuasaan seorang raja terhadap para kerabat dan rakyatnya. Suatu cerminan hubungan *patron-client*. Seorang raja memiliki wewenang untuk memerintah, mengatur, menghukum dan menguasai daerah-daerah lain. Terdapat beberapa pernyataan menyangkut tentang kosmologi politik yang dilakukan oleh Ken Arok dalam pemerintahannya memerintah kerajaan Singasari, lihat data-data di bawah ini.

“Jika suatu daerah yang dikunjungi ternyata petingginya tidak mendukung dan mengakuinya, saat itu diminta lengser dan diganti dengan punggawa kepercayaannya dan ditempatkan orang-orang terpercaya yang mendukung gagasan dan rencananya”

Penyataan pada kalimat *jika suatu daerah yang dikunjungi ternyata petingginya tidak mendukung dan mengakuinya, saat itu diminta lengser dan diganti dengan punggawa kepercayaannya*, menggambarkan suatu legitimasi atau kewenangan seorang raja atas daerah-daerah yang ingin dikuasanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Ken Arok tersebut. Dengan kekuasaannya ia merasa berhak untuk melakukan

**Konsep Teologi Politik.** Raja adalah orang yang telah berhasil melewati masa ujian berat sehingga mendapat *kanugrahan* (kebahagiaan) dari Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari pada itu, raja dilukiskan sebagai keturunan dewa-dewa, atau setidaknya telah mendapat petunjuk dan perlindungan dari para dewa. Pandangan semacam itu terdapat dalam kutipan di bawah ini.

“Bapak Lohgawe, bagaimana kalau aku memakai gelar Batara Siwa Buddha, tetapi bukan aku ingin meminta para pinisepuh dan sesepuh Kasiwan dan Kasogatan untuk menyembah. Ini hanyalah gelar upaya strategi untuk mengalahkan Sri Maharaja Kertajaya.”

Batara Siwa Budha adalah dewa yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Alasan mengapa Ken Arok menggunakan nama gelar Batara Siwa Buddha adalah karena Ken Arok teringat akan janji para Dewa di atas gunung Lejar dahulu pada saat wisudanya atas terpilihnya menjadi serang raja di tlatah Jawa. pada saat wisuda dulu para dewa berjanji akan membantu usahanya dalam mengembangkan kepemimpinannya. Alhasil seperti sebuah keajaiban pertempuran itu dimenangkan olehnya. Karena para prajurit dan dia sendiri seperti mendapatkan berlipat-lipat energi dan kekuatan pada saat bertempur.

**Politik dan Ilmu Kadigjayan.** Orang Jawa jaman dahulu

percaya bahwa seseorang yang berkuasa pasti mempunyai keistimewaan dari pada manusia pada umumnya. Itu semua sudah digariskan sejak ia lahir. Disamping itu juga seorang pemimpin pastinya mempunyai politik yang bisa menguntungkan bagi dirinya secara pribadi sebagai modal untuk memperkuat kekuasaannya dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Oleh karena itu, seseorang yang mendapatkan *pulung* untuk terpilih menjadi seorang raja pastinya mempunyai kelebihan dari orang lain. Kelebihan itu bisa berupa kelebihan supranatural dan kelebihan dalam berpikir atas dirinya yaitu berpolitik untuk masa depannya. Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut ini.

Tiba-tiba dari ubun-ubun Ken Arok keluarlah berbondong-bondong kelelawar yang jumlahnya tak terhitung banyaknya menyerbu pohon jambu itu dan memakannya sepuas-puasnya”

Kalimat *tiba-tiba dari ubun-ubun Ken Arok keluarlah berbondong-bondong kelelawar* menunjukkan bahwa Ken Arok bukanlah manusia sembarang manusia. Ia adalah seorang manusia yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Itulah sebabnya ia dinobatkan sebagai calon pemimpin tanah Jawa.

**Manajemen Politik Keraton.** Manajemen politik keraton dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mempertahankan atau mendapatkan suatu kekuasaan untuk mencapai kekuatan dan kewenangan dalam memerintah melalui kegiatan orang lain dalam suatu negara atau istana. Politik yang digunakan pun berpatok pada manajemen politik yang digunakan oleh kerajaan masing-masing. Walaupun kekuasaan selalu berpindah-pindah tapi tidak jauh dari orang memiliki kekuatan magis spiritual tinggi.

Manajemen politik keraton sangat penting artinya bagi Ken Arok. Apalagi sebelum diresmikan sebagai raja di Kerajaan Tumapel menggantikan raja Tunggul Ametung. Ia telah menyepakati tiga perjanjian pada saudara Tunggul Ametung jika ia ingin menduduki tahta tertinggi di Tumapel. Salah satu janji yang ia sepakai yakni jika ia menjadi seorang raja di Tumapel ia harus dapat memajukan kerajaan Tumapel dan dapat menjadikan kerajaan Tumapel semakin besar dari pemerintahan Tunggul Ametung. Itu dianggap oleh Ken Arok sebagai Pekerjaan Rumah yang besar baginya. Oleh karena itu, untuk mencapai pada tujuan tersebut Ken Arok membuat beberapa manajemen-manajemen keraton. Seperti halnya diceritakan pada kutipan berikut.

## Data 1

“Saat penobatan itulah, Ken Arok memilih nama abhiseka atau nama nobatannya Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi, nama Tumapel diganti menjadi Singasari, disaksikan oleh Kasiwan dan Kasogatan, termasuk dari Daha. Ayah angkatnya yang bernama Dang Hyang Lohgawe diangkat menjadi penasihat dan pendeta istana”

Kutipan tersebut menunjukkan langkah awal yang dilakukan oleh Ken Arok saat penobatan dirinya menjadi raja di kerajaan Tumapel yaitu memilih nama Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi sebagai nama penobatannya dan nama Tumapel diganti pula olehnya menjadi Singasari. Sedangkan ayah angkatnya Dang Hyang Lohgawe yang selama ini telah membantunya pun diangkat sebagai penasihat dan pendeta istana. Langkah ini tak lain adalah sebagai cambuk awal ia memerintah dan juga sebagai balas jasanya kepada Brahmana Dang Hyang Lohgawe yang telah membimbingnya menjadi orang baik dan membantunya dalam gerak langkahnya untuk menjadi raja di Tumapel sebelum digantinya selama ini.

## Penutup

Bentuk dasar politik tradisional yang dianut masyarakat pada jaman kerajaan Singasari adalah beberapa bentuk Dasar politik tradisional yang merupakan gambaran fakta politik yang dianut oleh masyarakat pada jaman dulu yaitu berupa ramalan masa depan. Salah satunya yang dialami oleh Ken Arok dalam memperoleh derajat yang tinggi yaitu menjadi seorang raja di tanah Jawa. Yang terdapat campur tangan langsung dari para dewa dan dukungan para brahmana yang diberi amanat mendapat suatu pandangan masa depan atau wangsit yang para brahmana peroleh pada saat semedi, juga dukungan dari para pujangga akan kepercayaan ramalan masa depan.

Bentuk kosmologi politik dalam novel *Pararaton* antara lain semakin berkembangnya kerajaan Singasari dalam kepemimpinan Ken Arok sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam sutau pemerintahan kerajaan karena berkuasanya seorang raja memiliki kekuasaan memerintah, mengatur, menghukum, menguasai daerah-daerah lain. Seperti yang dilakukan oleh Ken Arok untuk memperluas wilayahnya dan mengangkat para bawahannya pada posisi yang tepat serta meningkatkan daerah-daerah kekuasaannya menjadi tingkatan-tingkatan seperti yang semula setingkat keakuwaan ditingkatkan menjadi setingkat adipati atau seorang juru. Sedangkan daerah yang luas masih setingkat kabuyutan ditingkatkan menjadi keakuwaan dan dimaju tumbuhkan menjadi daerah perkotaan.



Sehingga pemerintahan kerajaan Singasari menjadi teratur.

Gambaran-gambaran yang membuktikan adanya teologi politik yang terdapat dalam novel *Pararaton* yaitu kekuasaan negara biasanya disangkutpautkan dengan kekuatan. Kekuasaan raja tidak datang begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang gigih dari pribadi raja atau dinasti yang bersangkutan. Karena pribadinya yang hebat itu, ia memperoleh dukungan rakyat melalui tokoh-tokoh rakyat, misalnya para pendeta. Karena pribadinya itu pula ia ditaati oleh rakyat. Perlu diingat bahwa manusia atau bangsa Jawa hidup dalam lingkungan alam tertentu dan dipengaruhi olehnya. Lingkungan alam di Jawa membuat manusia percaya bahwa ada kekuatan yang bersifat akodrati yang ikut memegang peranan penting dalam tata kehidupan. Kekuatan tertinggi dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bentuk-bentuk adanya kekuatan supranatural dan politik-politik kekuasaan yang terdapat dalam novel *Pararaton* yaitu seorang pemimpin dalam suatu masyarakat berkebudayaan Jawa perlu juga memperhitungkan semua komponen kekuasaan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin secara universal. Selain itu, memperingatkan bahwa konsepsi orang Jawa mengenai kekuasaan sebagai kekuatan energi yang sakti dan keramat. Tergambar dalam diri Ken Arok yang bisa mengeluarkan cahaya yang terang benderang dan dapat mengeluarkan beribu-ribu kelelawar pada saat ia tidur terlelap karena ia menginginkan untuk makan jambu di rumah kyai Sangenggeng.

Bentuk yang menunjukkan adanya aturan atau manajemen keraton oleh Ken arok yang terdapat dalam novel *Pararaton* adalah berhasilnya Ken Arok menguasai wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Singasari sampai pada berhasilnya Ken Arok memenangkan peperangan dengan kerajaan Daha dan menguasainya serta berhasilnya Ken Arok membuktikan janjinya pada saudara Tunggul Ametung untuk memajukan kerajaan Singasari sesuai dengan manajemen yang ia gunakan.

## Daftar Pustaka

- Anshoriy, Nasruddin. 2008. *Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Endraswara, Suwardi. 2010. *Etika Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- \_\_\_\_\_, Suwardi. 2011. *Metodologi Pengertian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Caps.
- Kusuma, Wid. 2011. *Pararaton*. Jogjakarta: Diva Press.

- Magnis, Franz dan Suseno. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Etika Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid Dkk. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1994. *Teori Pengkajian Fiksi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2012. *Teori, metode, dan teknik Penelitian sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Semi, Attar. 2012. *Metode penelitian Sastra*. Bandung: CV Angkasa.
- Suharso, Dkk. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang Widya Karya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah. 2008. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Widagdho. 2008. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

# KEKUASAAN DALAM NOVEL *STARDUST* KARYA NEIL GAIMAN

**Rahmawati Azi**

Universitas Halu Oleo, Kendari

E-mail: rahmawati\_ati76@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*Literary work from Marxism point of view is a power representation through language. For that reason, postmodern provides some strategies to counter that representation. Hutcheon declared that literature as a tool of power representation must be seen by irony, it means that the postmodern reader should have realized the representation, so that it could be dedoxified or denaturalized. Nevertheless, postmodern literatures don't stagnance only in just denaturalizing representation but also contest and legitimaze it. This strategy is called as double coding. Stardust is the postmodern (historiographical metafiction novel) which is double coding of some kinds of representation, they are the representation of rationalism, white man supremacy, patriarchy, and antropocentricm. Those representation are doble coded that the new representation is occurred.*

**Keywords:** power, representation, irony, denaturalization, historiographical metafiction and double coding.

## Pendahuluan

Hubungan antara bahasa, sastra dan kekuasaan telah menjadi perhatian utama dalam kritik sastra Marxis. Marx dan para pengikutnya percaya bahwa kekuasaan mewujudkan dalam karya sastra, sebab karya sastra mengandung ideologi kelompok dominan, pembaca dibentuk secara ideologis oleh karya sastra. Bahasa menjadi media untuk menunjukkan struktur hierarki kekuasaan dan menetapkan konsepsi-konsepsi kebenaran, aturan dan realitas (Ashcroft, 2002).

Jika Marx hanya sampai pada tataran mengenali ideologi yang ada pada karya sastra, para pengikutnya bergerak lebih maju dengan tidak berhenti pada ambisi sekedar mengetahui ideologi kelas penguasa di dalam karya sastra tersebut. Althusser misalnya, percaya bahwa kelompok dominan pemilik ideologi membentuk masyarakat dan “memberinya identitas” dengan ideologi kelas dominan tersebut. Pembentukan ideologi tersebut terjadi salah satunya adalah dengan memanfaatkan karya seni. Menanggapi pemebentukan ideologi dari kelas dominan tersebut, Althusser mengusulkan sebuah revolusi dari kelas tertindas, revolusi tersebut bukanlah sebuah revolusi fisik namun revolusi dimaksud adalah kelas tertindas harus membuat karya seninya sendiri sebagai resistensi terhadap ideologi kelas dominan (Bressler, 2007; 195).

Pengikut Althusser adalah Linda Hutcheon yang melihat hubungan antara bahasa, kekuasaan dan kebudayaan. Bagi Hutcheon, kebudayaan adalah efek representasi dan bukan sumber representasi, yang bekerja melalui bahasa dan representasi, oleh karena itu posmodernisme menolak “keilmiahan representasi” tersebut dan mengajukan teknik denaturalisasi. Posmodernisme mendenaturalisasi karya kultural, menegaskan bahwa kita hanya dapat memahami dunia melalui sistem jaringan makna yang terbentuk secara sosial, wacana kebudayaan kita. Seni posmoderen berusaha mendenaturalisasi konfensi dan representasi kebudayaan. Representasi posmoderen adalah keseluruhan citra, gagasan, produk (dan produsen) ideologi yang sadar diri (Hutcheon, 2002:2-10). Representasi pengetahuan tersebut dimediasi oleh kekuasaan dan keterbatasan representasi kita. Hal ini yang diterapkan didalam narasi dan historiografis maupun fiktif. (Hutcheon, 2002:83). Bagi posmodernim, bahasa mengonstruksi apa yang kita anggap sebagai “realitas”. Sesuatu yang kita terima begitu saja tanpa berpikir, dan menganggap sesuatu yang kita sebut realitas tersebut sebagai sesuatu yang terkonstruksi, realitas tersebut di antaranya adalah kapitalisme, sistem patriarchal dan humanism liberal. Bagi Hutcheon, representasi tersebut sebenarnya bersifat “kultural” (kita ciptakan) bukan terberi (Hutcheon, 2002:2).

Sifat posmodrnisme Hutcheon adalah menggabungkan antara

self reflektif dan ideologis. Posmodern merespon ideologi dengan “mengganggunya”, dengan maksud untuk mengungkap implikasi metodologis dari makna yang diciptakan oleh kebudayaan kita melalui representasi dan narasi. Selanjutnya Hutcheon merespon keyakinan yang kuat dari kaum humanis terhadap bahasa. Dia menyoroti kekerasan yang terkandung dalam bahasa dan sifatnya yang multifungsi, (Raja, 2010).

Posmodernisme Hutcheon bekerja pada apa yang disebut dengan “diskursus”. Baginya diskursus itu bersifat paradox sebab ia adalah alat dan sekaligus merupakan hasil dari kekuasaan. Ketidakstabilan bahasa disebabkan oleh cara bahasa menggabungkan dan mengkombinasikan kekuasaan dan pengetahuan tergantung dari pemilik kekuasaan dan konteks dari kekuasaan tersebut, (Raja, 2010).

Dalam merespon kekuasaan, Hutcheon menyatakan bahwa posmodernisme menginvestigasi dan membongkar perangkat sistem dalam mencapai kekuasaannya. Karya sastra dengan strategi tersebut disebut sebagai metafiksi historiografi, cara kerjanya adalah menantang seperangkat sistem kekuasaan dengan menginterogasi peranan bahasa dalam menciptakan kekuasaan dan pengetahuan dengan cara menginterogasi media-media kekuasaan yakni fiksi, sejarah dan teori kritik. Fiksi posmoderen berambisi merekonstruksi sejarah dari versi pihak yang kalah sehingga kebenaran sejarah tidak memiliki wacana yang tunggal tetapi plural. Posmodernisme menganggap bahwa sejarah diciptakan berdasarkan narasi penguasa sehingga posmodernisme memberikan kesempatan kepada kaum terjajah untuk menceritakan sejarahnya sendiri. Dalam metafiksi historiografi kita memiliki sejarah jamak, baik pecundang maupun pemenang, sejarah regional dan kolonial, sejarah orang-orang yang terbungkam maupun orang yang dapat bicara lantang juga sejarah laki-laki dan perempuan (Hutcheon, 2002:97-104). Posmodern terus menerus memertanyakan, menginterogasi representasi dan mengkritiknya dengan cara ironi, ((Raja, 2010).

Posmodernisme mempersoalkan (*contesting*) yang memperkuat dan sekaligus meruntuhkan kekuatan representasi sejarah, Hutcheon menyebutnya sebagai parodi. Parodi dalam hal ini melampaui parodi modern yang mengulang representasi dengan maksud mengolok-oloknya. Parodi posmoderen merupakan semacam revisi atau pembacaan ulang terhadap representasi sejarah. Parodi posmodernisme merupakan pengakuan sejarah (dan melalui ironi, politik) representasi yang mempersoalkan dan mendenaturalisasi nilai. Sebagai bentuk representasi ironis, parodi dikodekan secara ganda (*double coding*) dalam pengertian politik yaitu parodi melegitimasi dan meruntuhkan apa yang diparodikan (Hutcheon, 2002 : 148-150) .

Neil Gaiman dikategorikan sebagai penulis posmodern oleh *The Dictionary of Literary Biography* sekaligus sebagai sepuluh besar penulis terbaik<sup>1</sup>. Sedangkan Jack Zipes, seorang pengamat *fairy tale*, mengatakan bahwa dunia lain dalam seluruh karya Neil Gaiman merupakan posmodern romantik. Akan tetapi, nilai-nilai posmodernisme yang diusung dalam karya-karya Neil Gaiman berbeda dengan karya posmodern lain yang nihilistik. Neil Gaiman dan sejumlah penulis posmodern yang tergabung dalam *Inkling*. Kelompok ini memelopori sebuah genre fantasi yang terkenal dengan *Mythopoeic Fantasy Literature*. Deskripsi dan istilah *mythopoeia* dikembangkan oleh J.R.R. Tolkien tahun 1930an. Penulis dalam genre ini menggabungkan tema-tema mitologi tradisional dan arketip-arketip ke dalam fiksi. *Mythopoeia* juga menciptakan hal-hal berupa mitos. Usaha mengelaborasi dan merepresentasikan “kemasalaluan” menjelma dalam bentuk sastra fantasi *mythopoeic*. Banyak karya sastra yang bermuatan tema-tema mistik, namun hanya beberapa yang mendekati misi *mythopoeia*. *Mythopoeia* dapat menciptakan sebuah dunia yang benar-benar independen seperti halnya dunia *Middle-earth*-nya Tolkien (Cooper, 2011: 1-7; Marek, 2008).

*Inklings* memiliki pandangan dunia dan estetika sendiri. Estetika dimaksud adalah seperti apa yang dikatakan Anadón, 1989 mengutip Borges tentang ciri estetika karya fantasi yang memiliki estetika “*doubleness*” yakni; karya seni di dalam karya seni, mimpi/dunia hayal menginvasi realitas serta perjalanan melintasi waktu. Kritikus menganggap bahwa sastra fantasi sangat mirip dengan aliran romantic Jerman yang bersifat idealisme subjektif dimana “kerinduan akan Tuhan” berimplikasi pada “dunia yang *double*”. Sastra fantasi merayakan pluralitas dunia dimana dunia dunia dikonstruksi secara *double*; sakral/profan, realis/irealis ditumpuk dalam satu karya. Hal ini diistilahkan oleh Umberto Eco sebagai *double coding* (Himes, 2008: 12-17; Anadón, 1989).

Makalah ini mengangkat permasalahan berupa representasi di dalam novel *stardust*. Dalam sudut pandang politik posmodernisme Linda Hutcheon, *Stardust* bergerak setidaknya pada empat wilayah representasi yakni, kekuasaan patriarki atas keperempuanan, kekuasaan barat atas timur, kekuasaan rasio atas hal-hal yang irasional, serta kekuasaan manusia atas alam. Poin terakhir menjadi konsentrasi gerakan postmodern menanggapi kehancuran ekologi besar-besaran di planet kita.

## Analisis

### Kuasa Rasio dan Strategi *Double Coding*

Novel *Stardust* menghadirkan realisme dan irealisme secara bersamaan. Kehadirannya dapat dilacak pada latar tempat yang dapat dirujuk pada dunia nyata. Dunia nyata tersebut adalah Inggris pada masa kekuasaan ratu Victoria. Latar dunia nyata tersebut ditampilkan secara bergantian dengan latar dunia peri. Latar realis mengandung unsur rasionalitas, sedangkan latar irealis mengandung unsur irasionalitas.

Rasionalitas dalam *Stardust* dapat dilihat dari latar tempat yang menggambarkan dunia nyata, yakni sebuah desa di Inggris yang berjarak semalam perjalanan ke London dengan menggunakan mobil atau truk. Latar tempat yang dunia nyata di atas mengandung konsekuensi latar kultural desa Tembok yang rasional, desa yang dihuni oleh manusia biasa yang hidup di zaman modern dengan pemikiran-pemikirannya yang rasional. (Gaiman :8). Tokoh *Dunstan* mempresentasikan rasionalitas ini, tokoh ini digambarkan sebagai seorang yang praktis, demikian juga pacarnya *Daisy Hemstock*. Pembicaraan mereka adalah seputar hal-hak yang rasional, tentang kehidupan sehari-hari. Kerasionalan di sini menegaskan latar desa Tembok sebagai dunia nyata., (Gaiman : 19-20). Kehidupan di desa Tembok adalah kehidupan yang biasa sebagaimana orang-orang di zaman modern, di desa itu ada fasilitas sekolah di mana murid-muridnya diajarkan ilmu pengetahuan modern, tentang ilmu bumi, ilmu hitung, hingga sejarah.

Berbanding terbalik dengan desa Tembok yang rasional dan dihuni oleh manusia biasa, lengkap dengan latar kulturalnya yang rasional, kerajaan Stromhold yang hanya dibatasi oleh tembok dengan desa *Tembok*, sebuah tempat yang di beri nama lain 'Timur' oleh penduduk desa *Tembok*, adalah sebuah tempat yang berada di seberang tembok desa. Negeri Timur ini berpenghuni makhluk-makhluk aneh dan ganjil, bangsa peri berbagai jenis. Sedangkan wacana antroposentris memer kaya representasi irasionalitas negeri peri, berbagai makhluk antropomorfik memainkan peranan dalam kehidupan di dunia peri, kayu dan daun kayu yang berbicara, bulan yang bercakap-cakap, sekumpulan pohon di hutan yang menjadi pembegal, dan bintang-bintang yang digambarkan sebagai gadis-gadis yang bersaudara (gambaran lengkap dapat dilihat pada pembahasan tentang kuasa manusia atas alam).

Perlawanan sastra posmodern bersinggungan dengan poskolonial ketika posmodern dan poskolonial sama-sama mendekonstruksi ortodoksi yang ada terutama dalam hal delegitimasi realisme dan nasionalisme. Seperti yang telah dikatakan di muka bahwa *Stardust* memuat *double coding*

antara rasionalisme dan irasionalisme, namun irasionalisme *Stardust* bukanlah irasionalisme fiksional yang dikenal dalam analisis sastra posmodern, irealisme *Stardust* berhubungan dengan wilayah kultural yang dinamakan wilayah Timur. Irealisme *Stardust*, sebagaimana tradisi fantasi *mythopoeic* adalah ruang bagi remitologisasi, *Stardust* dalam hal ini memungut repertoar budaya dari wilayah timur tersebut untuk membangun mitologinya, namun sebelum membangun mitologi tersebut, wilayah kultural timur disajikan berdasarkan sudut pandang orientalis sebelum akhirnya representasi tersebut dihancurkan.

### **Kuasa Barat Atas Timur dan Strategi *Double Coding***

Di atas telah disinggung tentang representasi ketimuran dalam *Stardust*, persinggungan posmodern dan poskolonial juga terjadi pada wilayah representasi cultural. Poskolonial dipandang sebagai bagian dari posmodernisme dan poststruktural ketika klaim perbedaan, *otherness*, hukum moral, manusia lain dan normakultural diartikulasikan. Oleh karena itu “ketimuran” dalam *Stardust* hanya dapat dibaca dalam kerangka konsep-konsep orientalisme Said dalam bukunya yang berjudul *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat Dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek* terj. Ahmad Fawaid (2010). Representasi Eropa tentang Timur dalam hal irasionalitas Timur, kemisteriusan dan eksotisme Timur, geografi imajinatif Timur serta Timur yang “berbahaya” (Gaiman : 25).

Bagi orang-orang Eropa, Timur hanya bersebelahan dengan kawasan mereka<sup>2</sup>. Pada paragraph ini digambarkan terdapat dua “Timur”, Timur pertama adalah wilayah sebelah timur desa, sedangkan “timur” kedua adalah “Timur di seberang Tembok”. Timur seberang Tembok ini adalah dunia peri, penduduknya terdiri dari tukang-tukang sihir, para peri dan makhluk-makhluk ganjil lainnya, (Gaiman : 31).

Wilayah “Timur seberang Tembok” inipun menjadi persoalan yang tidak sederhana. Luas wilayahnya tidak digambarkan secara rasional melainkan digambarkan sepuluh kali lebih luas dari negeri Inggris, dan semakin bertambah luas sebab setiap negeri yang “terusir dari peta”, telah melarikan diri ke negeri peri.

Negeri peri adalah representasi dari negeri orang-orang terjajah, negeri orang-orang yang secara paradigma tidak diakui oleh narasi besar Barat dengan modernismenya. Dunia peri telah sekian lama termarjinalisasi oleh negeri “seberang Tembok”. Negeri tersebut berada di timur. ‘Timur’ yang ambigu ini ditegaskan dengan hadirnya representasi lain yang menyeret kita kepada pemahaman bahwa timur yang dihadirkan pada novel ini adalah negara-negara Dunia Ketiga. Kode-kode tersebut



dapat ditangkap melalui beberapa penjelasan bahwa; negeri peri adalah negeri yang terusir dari peta, negerinya orang-orang terjajah, misterius, dan berbahaya. Representasi tentang timur yang menawan, eksotik dan berbahaya ini adalah representasi wacana yang dikonstruksi oleh orientalis serta para pengembara Eropa yang menjelajahi Timur (negara-negara Dunia ketiga). Gadis Timur digambarkan berkulit gelap nan menawan, bahkan berbahaya sebab jika pemuda desa Tembok berkenalan akrab dengannya pemuda tersebut akan tertenum (Gaiman: 14 ).

Said mengatakan Geografi imajinatif adalah merupakan salah satu praktik orientalis, Eropa menjadikan Timur sebagai layaknya papan tulis yang jejaknya bisa dihapus, namun demikian sejumlah pengkaji Timur telah menemukan bahwa bahasa dan peradaban Timur jauh lebih tua dari bahasa dan peradaban Eropa. Balfour mengatakan bahwa usia peradaban negeri sungai nil jauh lebih tua, bahkan mesir sudah melewati zaman keemasannya ketika Eropa masih berada pada zaman pra-sejarah<sup>3</sup>. Representasi orientalisme ini digambarkan Gaiman sebagai, “*sejak permulaan sejarah, setiap negeri yang terhapus dari peta*” namun wilayahnya “*sepuluh kali lebih luas dari Inggris*”. (Gaiman : 12).

Representasi tentang keberbahayaan, eksotisme timur, dan kemisteriusan Timur ini dapat dilihat pada kunjungan tokoh Dunstan ke negeri peri pada suatu event pekan raya (Gaiman 12-15), di sana Dunstan berjumpa dengan gadis peri yang menawan, misterius dan eksotik, setelah gadis peri tersebut memberikan kepada Dunstan barang dagangannya dengan cuma-cuma, hanya meminta pada Dunstandengan ciuman di pipinya, Dunstan mendadak seperti orang linglung yang membuat warga desa tembok geger. Kelinglungan Dunstan tersebut merupakan bagian dari representasi kemisteriusan dan keberbahayaan timur. Bagi Eropa, Timur adalah kawasan yang membingungkan, misterius, berbahaya namun menggoda karena eksotismenya<sup>4</sup>,

Selain stigma tentang dunia Timur di atas, paragraph-paragraf berikutnya mendeskripsikan pengasingan negeri peri (Gaiman :6). Posmodernisme mengandung representasi, parodi dan ironi. Setelah merepresentasikan pandangan kultural Eropa terhadap Timur, Gaiman kemudian menuliskan Timur dari sudut pandang orang Timur sebagai jawaban (hutcheon menyebutnya dengan istilah kontestasi), atas wacana orientalisme di atas. Gaiman kemudian menyajikan wacana Timur dari sudut pandang pemilik budaya yang diwakili oleh tokoh *Lady Una*, putri raja *Stromhold*, *Si Katai*, sebagai ketua *Persaudaraan Istana* di negeri peri, bahkan Gaiman menggunakan sudut pandang *Dunstan Thorn* yang merupakan warga desa Tembok, serta seorang tokoh manusia biasa yang berasal dari luar negeri peri dan di luar desa Tembok untuk menegaskan

representasi Timur yang lebih masuk akal.

Tokoh *Lady Una* menjawab representasi tentang *Dunstan Thorn* yang dalam pembahasannya sebelumnya dianggap telah tertengung oleh warga peri representasi tersebut bahkan menertawai anggapan bahwa Dunstan sedang tertengung. Sebelumnya ketika Dunstan pertama kali berjumpa dengan Lady Una di kios bunga, tokoh yang diberi nama "*Dunston's lodger*" (pemandok Dunstan), mengatakan bahwa pertemuan Dunstan dan Lady Una adalah hadiah dari dia sebagai bayaran karena Dunstan telah menampungnya di pondoknya. Secara implisit tokoh tersebut mengatakan bahwa Lady Una adalah "dambaan hati Dunstan". Dalam hal ini representasi yang disajikan merupakan *counter* wacana dari anggapan bahwa Timur dan perempuan Timur adalah sumber bahaya, si tokoh "*Dunston's lodger*" (pemandok Dunstan) membalikkan wacana tersebut dengan mengatakan bahwa Lady Una adalah berkah bagi Dunstan, dambaan hatinya dan Dunstan pantas mendapatkannya sebagai hadiah karena kemurahan hatinya (Gaiman 11-13).

Tokoh *Dunstan* sendiri memainkan representasi tentang fisik Timur, *Dunstan* merasa riku ketika mengambil bunga dari tangan si gadis peri dan mulai menyadari bahwa tangannya terlalu besar dan canggung "tidak seindah dan seanggun tangan si gadis peri" (Gaiman 14). Representasi ini menghancurkan superioritas dan perasaan "serba lebih baik" orang Eropa terhadap timur. *Dunstan* bahkan merasa malu terhadap bentuk fisiknya yang dianggapnya tidak seindah perempuan Timur tersebut (Gaiman 14-16).

Seperi telah dikatakan di atas, satu tokoh lagi yang menjadi alat representasi adalah *Si Katai berbulu*. Tokoh disebutkan sebagai "ketua persaudaraan istana" yang sengaja mencari *Tristran Thorn* sebab ia curiga bahwa *Tristran* adalah keturunan *Raja Stromhold*. Dalam kebersamaannya dengan *Tristran*, *Si Katai* terkejut sebab *Tristran* menghafal syair "*How Many Miles To Babylon*" yang merupakan mantra hebat di negeri peri. *Tristran* mengatakan padanya bahwa di desa Tembok itu adalah syair anak-anak, atau semacam syair *nina bobok*, dan *Si Katai* mengatakan bahwa "di seberang tembok ini ada orang yang rela membanting tulang selama tujuh tahun demi mantra hebat itu, dan di tempatmu itu hanya menjadi syair *nina bobok*?" nasib mantra hebat *Stromhold* ini adalah representasi dari nasib mitologi dan hikayat Timur yang tak mampu dipahami oleh kaum orientalis<sup>5</sup>, dan dengan demikian menuduh bangsa Timur sebagai yang kekanak-kanakan, yang karya sastra dan sejarahnya pun hanya berupa mitos dan dongeng.

## Kuasa Patriarki dan Strategi *Double Coding*

*Stromhold* adalah kerajaan di negeri peri yang semua rajanya adalah laki-laki. Para pangeran *Stromhold* harus saling membunuh untuk menjadi raja di *Stromhold* (Gaiman :28). Para patriarki *Stromhold* tersebut merupakan simbolisasi androsentrisme.

Maskulinitas diperagakan oleh para penguasa *Stromhold* mencapai titik yang paling ekstrim. Pembunuhan sesama saudara menandai hasrat para penguasa *Stromhold* akan kekuasaan, keperkasaan, kesigapan dan pembunuhan ini merupakan simbolisasi androsentrisme. Tak ada tempat bagi feminitas dalam arena patriarki *Stromhold*, bahkan putri satu-satunya kerajaan *Stromhold* yakni *Lady Una*, sebagai simbol feminitas diculik dari kerajaan sejak kecil oleh seorang perempuan sihir dan dijadikan budak. (Gaiman 59-63) menggambarkan intrik dan saling bunuh yang diperagakan penguasa *Stromhold* dalam petualangan mereka mencari batu simbol kekuasaan *Stromhold*. Batu Rubi yang dilemparkan penguasa *Stromhold* ke delapan puluh satu ke udara, menjadi syarat bagi siapa saja yang akan menjadi raja *Stromhold*, dalam mencari batu ini, para para pangeran *Stromhold* saling bunuh sampai akhirnya tidak tersisa lagi satupun pangeran *Stromhold* yang hidup. Kematian para penguasa patriarki *Stromhold* ini merupakan simbolisasi kematian patriarki, kekuasaan modern yang dianggap memiliki sifat maskulin yang berat sebelah oleh para pemikir posmodern.

Setelah wacana patriarki dikontestasi, kemudian *Stardust* mengajukan teknik *double coding*nya. Androsentrisme dilebur dengan wacana feminitas untuk melahirkan representasi baru. “Hati bintang” adalah simbol spritualitas perempuan. Tokoh *Yvaine* adalah perempuan yang berasal dari langit. Ratu penyihir sangat menginginkan hati bintang tersebut untuk kembali berkuasa, akan tetapi *Yvaine* telah memberikan hatinya pada *Tristran*. Bersatunya *Yvaine* dan *Tristran* adalah simbolisasi dari apa yang dicita-citakan posmodern sebagai “anugerah dwi kutub”, kelaki-lakian dan keperempuanan yang bekerja sama di dalam kosmos. *Yvaine* sendiri dalam kutipan di atas digambarkan sebagai bintang senja. Dalam mitologi kuno, bintang senja adalah *Venus*. *Venus* dalam mitologi adalah simbolisasi dari dua kutub yang sangat bertentangan, *Venus* adalah symbol kebahagiaan sekaligus malapetaka. Sifat venus yang bipolar ini mengejawantah dalam diri *Yvaine*. Hal ini terlihat ketika ia menjadi ratu *Stromhold* sepeninggal suaminya *Tristran*, seperti terlihat dalam kutipan berikut.

*“My sisters called me Yvaine,” she told him. “For I was an evening star.” “Look at us,” he said. “A fine pair. You with your broken leg, me with my hand.”* (Gaiman 75)

(Saudara-saudaraku memanggilku Yvaine, karena aku bintang senja” katanya. “lihatlah” kata si lelaki “kita adalah pasangan serasi. Kau dengan kakimu yang patah, dan aku dengan kakiku yang patah”).

Kutipan di atas menggambarkan bahwa masing-masing *Tristran* dan *Yvaine* memiliki cacat. “kecacatan” keduanya adalah simbolisasi kekurangsempurnaan feminitas dan maskulinitas. Oleh sebab itu pada pembahasan sebelumnya wacana maskulinitas dan feminitas dikontestasi, hal ini disimbolkan dengan berakhirnya kekuasaan matriarkhi “di era dunia pertama”, dan patriarkhi di “era dunia kedua”. Maskulinitas dan feminitas ini digantikan oleh relasi dwikutub laki-laki perempuan yang harmonis yang terepresentasi pada tokoh *Tristran dan Yvaine* (Gaiman : 80).

### **Kuasa Manusia Atas Alam dan Strategi *Double Coding***

Pandangan tentang alam dalam *Stardust* melampaui antroposentrisme modern yang menganggap bahwa manusia berada di atas alam oleh karena itu berhak untuk mengekspolitasinya, di lain pihak, *Stardust* pun melampaui antropomorfisme ekologi dalam yang menganggap bahwa manusia sejajar secara apa adanya dengan makhluk lain di alam semesta. Penolakan posmodern terhadap konsepsi modern bahwa “manusia adalah tuan segala ciptaan”, tidak berarti harus merendahkan derajat manusia menjadi sama dengan seekor ngengat. Komitmen posmodern adalah membangun spritualitas yang memberikan perhatian pada masalah ekologis namun tetap memperhatikan kesejahteraan manusia.

Dalam *Stardust*, digambarkan tentang negeri peri yang mengandung nilai-nilai antropomorfis, pohon-pohon dapat berbicara, bersahabat dan bermusuhan dengan manusia (Gaiman 34-48). Salah satu daerah di negeri peri berjejer beberapa gunung yang diberi nama gunung kaki, perut, dada dan kepala, pemberian nama ini berdasarkan kepercayaan penduduk negeri peri bahwa daerah itu adalah raksasa yang sedang tidur dan entah kapan akan bangun. Bintang-bintang sesungguhnya adalah gadis-gadis cantik yang bersaudara, sedangkan ibu mereka adalah dewi bulan. Setiap beberapa dekade terdapat bintang jatuh, jika bintang itu jatuh di negeri peri, maka dia akan tetap menjadi seorang gadis, namun jika dia jatuh di desa tembok, maka wujudnya akan menjadi batu. (Gaiman : 49-61)

Dalam *Stardust*, *double coding* terjadi pada saat *Tristran* diangkat menjadi raja stromhold dan melakukan sejumlah perjanjian damai, di antaranya adalah perjanjian damai dengan kerajaan elang di *High Crags*

(Gaiman ; 50). Istri *Tristran* sendiri, *Lady Yvaine* yang merupakan bintang jatuh merupakan personifikasi dari alam, bersatunya *Tristran* dan *Yvaine* merupakan simbolisasi penyatuan manusia dan alam.

## Penutup

Karya sastra sebagai hasil representasi kekuasaan dilihat oleh sastra posmodern dengan “sadar diri”. Kesadaran posmodern terhadap kekuasaan bahasa yang mewujud di dalam karya sastra melahirkan *counter discourse*. Karena karya sastra adalah representasi kebudayaan melalui bahasa, maka posmodern melihatnya secara ironi untuk kemudian mendenaturalisasi representasi tersebut. *Stardust* adalah perwujudan representasi posmodern terhadap kekuasaan. Dengan politik *double coding*, representasi yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang “alamiah” didenaturalisasi untuk kemudian dikode gandakan dengan wacana tandingannya sehingga melahirkan representasi baru. Representasi baru itulah yang menjadi ciri khas posmodern yang merayakan pluralitas dunia.

## Daftar Pustaka

- Anadón, José, 1989; *Power” In Literature And Society* The “Double” in Gabriel García Márquez’s *The Autumn of the Patriarch*. Working paper
- Ashcroft, Bill, dkk. 2003. *Menelanjangi Kuasa Bahasa: teori dan praktik sastra poskolonial*. Yogyakarta: Qalam
- Azi, Rahmawati, 2013; *Spiritualitas Posmodern dalam Novel “Stardust” Karya Neil Gaiman*. Tesis tidak dipublikasikan
- Bressler, Charles E. 2007, *Literary Criticism: An Introduction To Theory And Practice*. London: Person Education
- Cooper, Rich. 2011. *Radical Realms: A Materialist Theory Of Fantasy Literature*. Retrieved from <http://web.ebscohost.com>
- Gaiman, Neil. 1999, *Stardust*, New York. Avon
- Griffin, David Ray; *Spirituality And Society ; Posmodern Vision*. New York: State University Of New York Press, Albany
- Himes, Jonathan B. 2008. *Trust Breathed Throughsilver : The Inklings’ Moral And Mythopoeic Legacy*

# REPRESENTASI IDEOLOGI KEPRIYAYIAN DALAM NOVEL *PARA PRIYAYI, CANTING, DAN GADIS TANGSI*

**Wijaya Heru Santosa**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Email: wijayaheru\_ust@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to describe the ideology represent aristocrate author, ideological hegemony, and the response of readers to the novel *The gentry, Canting, and Girl Tangsi*. The method used descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews, read carefully and critically, and documents. The data was analyzed by a cultural approach, hegemony, pragmatics, and the reception reader results showed that there is a variation of the three authors in interpretation aristocracy ideology. Aristocracy as subordinate to the ruling group, and the results revealed that readers reception gentry who idolized society as noble, but his behavior deviation of moral teachings. Therefore, if three of the novel will be taught at school, teachers should be proficient in selecting and sorting parts suitable novel for mental age of the child.*

**Keywords:** representation, hegemony, ideology, reception, pragmatic

## Pendahuluan

Budaya priyayi sering direpresentasikan pada novel yang dimungkinkan sesuai dengan dunia pengarang, sikap, pandangan hidup, kelas sosial, pendidikan pengarang, lingkungan sosial budaya pengarang, yang biasa ditampilkan melalui perilaku para tokoh dan komentar pengarang, Khususnya pengarang Jawa yang bercerita tentang warna lokal Jawa sejak zaman Hindia Belanda hingga zaman pascakemerdekaan. Makna novel tersebut akan dipahami oleh pembaca. Hasil interpretasi pembaca ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman pembaca yang berhubungan dengan latar belakang sastra, sosial budaya, dan bahasanya.

Banyak novel warna lokal Jawa yang bertemakan kehidupan priyayi. Namun, di antara novel-novel tersebut yang akan diteliti adalah novel yang menceritakan peristiwa kehidupan priyayi dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman Jepang, perang revolusi kemerdekaan, hingga zaman Orde Baru. Dilihat dari peristiwa penceritaannya, novel yang akan diteliti adalah novel *Para Priyayi* oleh Umar Kayam *Canting* oleh Arswenda Atmowiloto, dan *Gadis Tangsi* oleh Suparto Brata.

Novel *Para Priyayi* dipilih karena novel tersebut ditulis oleh Umar Kayam dengan serius selama satu tahun di Yale University Amerika Serikat. Di samping itu, Pengarang novel *Para Priyayi* adalah seorang pendidik, akademisi, budayawan, dan birokrat yang memiliki pandangan kritis terhadap berbagai fenomena kehidupan sosial. Dalam novelnya, Umar Kayam mampu memanfaatkan rekaman realitas individu yang tidak merupakan data-data sejarah dan sosiologi yang hanya bisa merekonstruksi data-data faktual, tetapi dengan novel tersebut rekaman-rekaman fenomena sosial menjadi bermakna (Luthfi, 2007:94).

Selanjutnya, novel *Canting* karya Arswendo Atmowiloto dipilih untuk diteliti karena novel tersebut merupakan *best seller* pada tahun 1986. Novel tersebut juga pernah dibuat sinetron, yang kebetulan Umar Kayam berperan sebagai Pak Bei. Arswendo adalah pengarang dan seorang jurnalis yang produktif. Ia sudah belasan kali memenangi sayembara penulisan mendapat Hadiah Buku Nasional, dan beberapa penghargaan tingkat ASEAN. Selain hal tersebut, Arswendo Atmowiloto lahir dan dibesarkan di Solo dimungkinkan banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan priyayi Solo. Karena berlatar belakang jurnalis, Arswendo menulis perilaku priyayi Solo dimungkinkan juga mendekati kebenaran.

Novel *Gadis Tangsi* karya Suparto Brata diteliti karena merupakan salah satu dari trilogi novel *Kerajaan Raminem* dan *Mahligai di Ufuk Timur*. Novel *Gadis Tangsi* menceritakan kehidupan priyayi bangsawan yang betul-betul diketahui oleh Suparto Brata karena Suparto Brata sebagai anak bangsawan Keraton Surakarta. Suparto Brata pernah hidup

di lingkungan bangsawan Keraton Surakarta dan pernah hidup bersama Bupati Sragen pada saat ia mengikuti ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada Bupati Sragen. Suparto Brata sudah menghasilkan ratusan tulisan fiksi baik dalam bahasa Indonesia yang dibuat sejak tahun 1951. Suparto Brata juga terlibat dalam penulisan buku riset kesejarahan. Oleh sebab itu, novel *Gadis Tangsi* yang ditulis oleh Suparto Brata dimungkinkan merupakan representasi dari fakta-fakta yang diungkapkan secara fiktif. Agar didapatkan makna sepenuhnya, representasi ideologi pengarang yang terdapat dalam novel perlu dipahami secara tekstual dan secara reseptif.

## Kajian Literatur

Penelitian yang relevan dengan representasi ideologi kelompok priyayi dilakukan Andrzej Diniejko (2012) yang berjudul "*Charles Dickens as Social Commentator and Critic*" menemukan bahwa akibat industrialisasi terjadi pelanggaran ekonomi, moral, lingkungan hidup dan hukum yang dilakukan oleh kelas penguasa pada zaman Raja Victoria di Inggris. Para penguasa tersebut pada umumnya adalah para aristokrat atau kelompok priyayi.

Dalam kaitannya dengan hegemoni penjajah, penelitian Mary West (2009) yang berjudul "*Article 'n Paradise Lost': n Ondersoek swart arbeid en wit ongemak in stedelike Suid-Afrika.: Marlene van Niekerk se kortverhaal "Kleinvingeroefening rondom die nosie van hibriditeit"*" article from *Jornal of Literary Study* (2009) mengungkap hasil tentang hegemoni kulit putih di Afrika Selatan dan konflik tentang juragan berkulit putih dan juragan berkulit hitam di Kota Madame Hood. Dalam cerita tersebut seakan bangsa Afrika Selatan kehilangan surga karena adanya rejim *apartheid* yang menimbulkan trauma orang kulit hitam akibat kekerasan.

Selanjutnya, Penelitian tentang resepsi novel juga dapat dilihat pada Wright (2010) yang berjudul "Resepsi Awal Bukit Fool". menyimpulkan bahwa novel tersebut didaktik yang menarik perhatian pembaca karena mengungkapkan perang, otoritarianisme, kebencian dan dengan memperkenalkan unsur nasib dan kekejaman hidup yang sangat erat berhubungan dengan faktor politik, sosial, dan budaya pada masyarakat tempat kejadian dalam novel tersebut dengan masyarakat pembaca yang sedang dilanda kebingungan *factual tragedy* faksionalisme, kesukuan, dan politik *apartheid*. Novel tersebut cukup mencengangkan bagi pembaca.

Penelitian tentang priyayi dilakukan oleh Nugraheni (2009) dengan judul *Makna Totalitas dalam Karya Sastra*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam makna karya sastra melalui pendekatan strukturalisme genetik Lucien Goldmann guna memperoleh



makna totalitas novel *Para Priyayi* dan novel *Jalan Menikung* karya Umar Kayam.

Dalam penelitian disimpulkan bahwa makna totalitas dalam dua novel tersebut merupakan kritik Umar Kayam sebagai priyayi cendekiawan terhadap budaya priyayi yang tidak sesuai dengan esensi makna priyayi yang luhur. Para priyayi pada umumnya kurang taat di dalam menjalankan perintah agama sehingga banyak yang memiliki gaya hidup yang menyimpang dari moral agama padahal priyayi merupakan teladan masyarakat (Santosa, dkk., 2012: 272). Selanjutnya, Ahmadi (2014: 101-102) menyatakan bahwa sebagian besar karakter novel merupakan kekuasaan politik kaum bangsawan yang memaksakan budaya mereka dan keyakinan kepada rakyat jelata untuk menjaga tradisi aristokrasi mereka.

Berdasarkan hasil-hasil kajian tersebut dapatlah dinyatakan bahwa novel merupakan representasi ideologi pengarang tentang realitas fenomena hegemoni kelompok masyarakat yang berkuasa kepada masyarakat sipil. Demikian pula, novel *Para Priyayi*, *Canting*, dan *Gadis Tangsi* merupakan representasi dari tiga pengarang tentang hegemoni priyayi Jawa kepada masyarakat sipil yang memiliki nilai pragmatik. Untuk memahami novel secara totalitas juga diperlukan resepsi pembaca riil.

## **Metode Penelitian**

Data representasi ideologi pengarang dalam novel dikumpulkan dengan wawancara dan dokumen. Data hegemoni ideologi pengarang yang direpresentasikan dalam novel dikumpulkan dengan menentukan penggalan-penggalan kalimat yang menunjukkan hegemoni ideologi pengarang. Data respons pembaca dikumpulkan dengan mewawancarai pembaca riil yang terdiri dari guru, siswa SMA, mahasiswa, budayawan, dan dosen. Data-data dianalisis dengan pendekatan budaya, hegemoni Gramscy yang dikembangkan Raymond Williams, dan pragmatika atau resepsi pembaca.

## **Pembahasan hasil Penelitian**

### **Idelologi Kepriyayian Umar Kayam, Arswendo Atmowiloto, dan Suparto Brata**

Vladimir Jdanov (dalam Escapit, 2005: 8) menyatakan bahwa sastra harus dipandang dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, latar belakang unsur sejarah dan sosial yang mempengaruhi pengarang. Kriteria pertama suatu karya seni adalah tingkat kesetiannya dalam mengungkapkan kenyataan dengan segala kerumitannya. Menurut

Ratna (2010:1), pada umumnya pengarang memiliki pengalaman yang relatif sama dengan anggota masyarakat lain, tetapi dalam hal tertentu memiliki kekhasan berkarya yang berbeda walaupun peristiwanya sama disebabkan oleh proses belajar dan pembawaan dirinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, priyayi yang dipotret Umar Kayam adalah priyayi dalam diri Umar Kayam itu sendiri sama dengan priyayi yang dipotret oleh Suparto Brata, tetapi berbeda dengan priyayi bangsawan yang dipotret oleh Arswendo Atmowiloto. Ia memotret priyayi dari luar kelompok priyayi. Oleh sebab itu, harapan-harapan dan kritik yang diungkapkan oleh Umar Kayam hampir sama dengan harapan dan kritik yang diungkapkan oleh Suparto Brata. Sebagai seorang akademisi, Umar Kayam memotret priyayi merupakan proses dengan jalan pendidikan. Bagi Umar Kayam, siapa saja bisa menjadi priyayi asal pandai dengan jalan sekolah. Suparto Brata memandang priyayi dari aspek genetika. Namun, orang yang sukses di bidang pendidikan dan kaya sebagaimana Teyi merupakan orang yang memiliki derajat setara priyayi, tetapi bukan priyayi karena bukan keturunan bangsawan. Arswendo (wawancara 12-10-2012) melalui novelnya berpendapat bahwa priyayi itu adalah derajat, pangkat, kekayaan, dan kekuasaan. Orang yang mendapatkan salah satu tersebut sudah bisa dikatakan priyayi apabila dijalani dengan kepantasan.

Arswendo Atmowiloto melalui novel *Canting* bermaksud mengungkapkan betapa berat tanggung jawab seorang priyayi di dalam menghadapi perubahan zaman yang makin kapitalistik. Tanggung jawab priyayi sangat berat untuk mempertahankan budaya batik tulis yang bersaing dengan batik *printing*. Batik tulis sebagai simbol budaya tradisional feodalistik dan batik *printing* sebagai simbol budaya modern kapitalistik.

Suparto Brata memandang priyayi dari aspek genetika, tetapi di dalam menuliskan novel *Gadis Tangsi*, tidak bermaksud hanya mengungkapkan konsep priyayi yang bangsawan atau priyayi karena pendidikan. Akan tetapi, Suparto Brata lebih menekankan konsep modern dan primitif. Orang yang modern adalah orang yang mampu membaca dan menulis dan menguasai berbagai bahasa sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekerja. Orang yang primitif hanya mencari pekerjaan dari naluri atau kodrat tanpa perlu ilmu yang diperoleh dari membaca dan menulis.

Suparto Brata mencipta novel *Gadis Tangsi* bukan karena ingin berdiskusi tentang priyayi dan kawula, tetapi ingin mengungkapkan kelompok masyarakat primitif dan modern dengan mengontraskan kedua kelompok tersebut, dan bangsa Belanda. Menurut Suparto Brata, orang awam apabila mengenal baca tulis dan berbagai bahasa akan memiliki

taraf hidup yang modern, tetapi priyayi yang tidak mengenal baca tulis, identik dengan priyayi primitif yang tidak siap menghadapi perubahan zaman. Oleh sebab itu, budaya baca tulis identik dengan budaya modern perlu dilakukan oleh priyayi dan *kawula alit*.

Tiga novel yang dicipta oleh pengarang Jawa memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara novel *Para Priyayi*, *Canting*, dan *Gadis Tangsi*. Umar Kayam Suparto Brata, dan Arswendo Atmowiloto merepresentasikan budaya priyayi memandang bahwa priyayi adalah kelompok *elite* masyarakat yang memiliki fasilitas sosial ekonomi yang dijamin oleh kerajaan dan Pemerintah Hindia Belanda. Umar Kayam merepresentasikan priyayi intelektual atau priyayi capaian yang bekerja pada gupermen karena Umar Kayam sendiri keturunan dari priyayi intelektual sehingga novel *Para Priyayi* sebetulnya merupakan representasi dari kakek dan keluarga Umar Kayam itu sendiri. Kepriyayian yang didapatkan oleh Sastrodarsono disebabkan oleh kerja keras orang tuanya yang telah lama memiliki cita-cita agar anaknya menjadi priyayi kemudian menyekolahkan anaknya ke sekolah guru dan mendapatkan pertolongan dari orang yang telah menjadi priyayi yaitu *Ndoro Seten Kedungsimo*. Setelah menjadi priyayi, Sastrodarsono menolong Lantip yang sebelumnya bernama Wage anak dari Ngadiyem penjual tempe. Kemudian, pada akhir cerita justru Lantip itulah bisa hidup sebagai priyayi yang selengkap-lengkapnyanya di banding anak cucu Sastrodarsono. Umar Kayam memaknai priyayi bukan dari segi genetik, tetapi sejauhmana seseorang mampu melaksanakan pengabdian bagi kemanusiaan dan mampu menjaga moral.

Arswendo Atmowiloto merepresentasikan priyayi bangsawan yang hidup di sekitarnya dengan memfokuskan pada kehidupan priyayi bangsawan yang mempertahankan kepriyayiannya di tengah-tengah perubahan masyarakat. Priyayi yang direpresentasikan adalah priyayi bangsawan (Bei Sestrokusuma) yang sebagian besar hidupnya bergantung pada usahanya sendiri walaupun priyayi tersebut pernah berjasa kepada negara dan digaji oleh keraton. Di samping itu, Arswendo Atmowiloto juga merepresentasikan betapa seseorang yang berasal dari buruh batik berjuang dengan bekerja keras untuk menjadi priyayi.

Berkat niat orang tua yang bekerja keras dengan hidup laku prihatin dengan cara menahan berbagai keinginan yang tidak relevan dengan tujuannya, anak buruh batik tersebut bisa menjadi priyayi karena mendapatkan wahyu yaitu dinikahi oleh seorang bangsawan. Arswendo lebih memaknai priyayi sebagai orang yang mampu melaksanakan perannya sebagaimana Pak Bei yang memiliki jiwa pemimpin, memiliki nasionalisme, solidaritas sosial, dan penganut *kejawen*. Selain itu, Arswendo juga memaknai priyayi melalui tokoh Bu Bei dan Ni.Bu Bei

sebagai simbol orang proletar yang karena kerja kerasnya yang diiringi dengan laku prihatin sehingga bisa meraih wahyu kepriyayaan. Ni sebagai sosok perempuan priyayi genetik yang mempertahankan kepriyaiannya dengan budaya berdagang dengan dasar mau membalas budi kepada buruh-buruh batik yang telah mengantarnya menjadi priyayi genetik terdidik.

Suparto Brata melalui novel *Gadis Tangsi* merepresentasikan kehidupan priyayi bangsawan (Kapten Sarjubehi dan istrinya yang bernama Putri Parasi). Kapten Sarjubehi yang bekerja sebagai perwira kumpeni yang hidup dengan berbagai fasilitas. Pasangan suami istri tersebut dicitrakan oleh pengarang sebagai orang yang berbudi luhur, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki solidaritas sosial yang tinggi, bergaya hidup penuh dengan kemewahan. Kapten Sarjubehi direpresentasikan sebagai orang yang sabar di dalam menghadapi istrinya yang memiliki penyakit kronis.

Kehidupan priyayi bangsawan tersebut digambarkan secara kontras dengan kehidupan orang kecil atau kawula. Suparto Brata merepresentasikan orang kecil sebagai orang yang tidak beradab, bodoh, jorok, dan kasar serta hidupnya hanya bekerja untuk kepentingan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang kecil yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja keras dan memiliki cita-cita untuk menjadi orang kaya seperti Raminem yang selalu memberi tugas kepada anaknya yang bernama Teyi untuk berdagang pada masa anak-anak. Berkat kerja keras Teyi yang selalu dimotivasi oleh orang tuanya (Raminem), Teyi tekun belajar di sela-sela mencari uang dan berhasil menjadi perempuan intelektual yang setara dengan perempuan keraton. Berkat cita-cita dan usahanya, Teyi berhasil mendapatkan wahyu yaitu dijadikan istri Raden Mas Kus Bandarkum seorang bangsawan keponakan Putri Parasi Suparto Brata memaknai priyayi sebagai orang yang mampu memelihara dan mengembangkan etiket kepriyayaan dan mampu menyerap budaya Eropa untuk kepentingan kemanusiaan. Bagi Suparto Brata, priyayi yang ingin memiliki fasilitas hidup harus *mimikri* terhadap hegemoni penguasa kolonial sebagaimana Raja Surakarta, Pangeran Jayaningrat, Kus Bandarkum, pasangan suami-istri Kapten Sarjubehi dan Putri Parasi dan Teyi.

### **Priyayi sebagai Subordinat Hegemoni Penguasa**

Posisi kelompok priyayi sebagai kelompok residual di dalam tiga novel *Para Priyayi*, *Canting* dan *Gadis Tangsi* walaupun secara umum memiliki kecenderungan kesamaan, tetapi tiga novel tersebut masing-masing tokoh priyayi memiliki variasi penerapan nilai-nilai kepriyayaan di dalam menghadapi hegemoni kelompok penguasa. Dengan tiga novel

tersebut terdeskripsikan kelompok penguasa pada zaman prakemerdekaan. Deskripsi novel *Para Priyayi* secara umum menampilkan hegemoni kekuasaan Hindia Belanda, Jepang, zaman revolusi yang berakhir pada zaman awal Orde Baru. Di dalam novel *Canting* dideskripsikan hegemoni kekuasaan pada zaman setelah kemerdekaan dan pada awal Orde Baru. Kekuasaan pada zaman Hindia Belanda tidak diungkapkan secara detail karena pengarangnya tidak mengalami kehidupan pada zaman Hindia Belanda. Di dalam novel *Gadis Tangsi*, deskripsi yang diungkapkan hanya hegemoni kekuasaan pada zaman Hindia Belanda atau pada zaman prakemerdekaan.

Kelompok priyayi pada novel *Para Priyayi* merupakan kelompok priyayi pegawai gupermen di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Priyayi yang ingin memiliki karier tinggi harus menyesuaikan dengan selera penguasa Hindia Belanda. Di bawah jaring-jaring hegemoni kekuasaan, priyayi menerapkan nilai-nilai kepriyayian yang memiliki akses negosiasi atau konsensus dengan kepentingan hegemoni penjajah. Nilai-nilai yang digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah nilai-nilai kesetiaan atau pengabdian kepada atasan dan nilai-nilai mau bekerja keras, dan menjadi orang abangan. Dengan memilih sebagai penganut abangan, seseorang akan tidak mendapatkan kontrol ketat dari penguasa Belanda. Selain itu, bangsa Belanda lebih dekat dengan kelompok abangan daripada dengan kelompok puritan

Tokoh Sastrodarsono bisa menjadi priyayi karena mau bekerja keras dilandasi dengan kejujuran dan kesetiaan kepada atasan. Begitu juga dengan tokoh Lantip, yang di dalam meraih kepriyayian memiliki kesamaan cara dengan Sastrodarsono. Baik Lantip maupun Sastrodarsono yang berasal dari orang desa proletar menjadi priyayi karena mau bekerja keras membantu orang yang sudah menjadi priyayi. Perbedaan Sastrodarsono dengan Lantip, Sastrodarsono yang menjadikan dirinya priyayi karena orang tua Sastrodarsono dibantu pihak lain untuk dicarikan koneksi sekolah di sekolah rakyat desa dan dijadikan guru bantu menjadi subordinat penguasa.

Agar Sastrodarsono memiliki kemampuan bernegosiasi dengan para penguasa, Sastrodarsono menjadi anggota kelompok *kesukan*. Di dalam kelompok tersebut, Sastrodarsono mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkembangan pemerintahan dan memiliki wawasan tentang kepriyayian yang lebih luas. Sastrodarsono dapat menimba pengalaman kepriyayian dari *Rama* Jeksa, Mantri Candu, dan Dokter Soedradjat. Dari para priyayi tersebut, Sastrodarsono memiliki wawasan kepriyayian yang berguna untuk mengembangkan kariernya dan membina

keluarganya. Sastrodarsono membentuk anak-anaknya supaya menjadi priyayi, anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda dengan harapan agar anak-anaknya setelah lulus bisa bekerja di lingkungan gupermen.

Apabila Sastrodarsono menjadi subordinat Pemerintah Hindia Belanda, Lantip menjadi subordinat pemerintah pada awal Orde Baru. Proses Lantip untuk menjadi priyayi hampir sama dengan Sastrodarsono yaitu dengan mengembangkan etos kerja keras dan kesetiaan kepada atasan. Sastrodarsono memiliki kesetiaan kepada Keluarga *Ndoro Seten Kedungsimo* yang telah membantunya, Lantip memiliki kesetiaan kepada Keluarga Sastrodarsono. Bahkan, oleh Keluarga Sastrodarsono Lantip diakui dan diberi kekuasaan untuk mewakili anak turun Sastrodarsono di dalam menyambut pemberangkatan jenazah Sastrodarsono dan mengurus permasalahan yang dihadapi oleh anak turun Sastrodarsono.

Kepiayian Lantip juga tampak pada kemampuan bernegosiasi dengan pihak penguasa pada zaman awal Orde Baru dan Noegroho dalam membantu permasalahan Hari yang berkaitan dengan keterlibatan Hari sebagai anggota Lekra. Namun, posisi Lantip sebagai dosen dalam kaitannya dengan hegemoni kelompok dominan bukan sebagai tokoh yang memiliki peranan penting, tetapi juga hanya sebagai subordinat dari penguasa yang memegang prinsip ketulusan, kesetiaan, dan memiliki etos kerja keras untuk kepentingan orang-orang yang sudah pernah berbuat baik kepadanya.

Selanjutnya, apabila tokoh Sastrodarsono dibandingkan dengan tokoh Pak Bei memiliki perbedaan yang mencolok. Tokoh Sastrodarsono berasal dari petani desa, tokoh Pak Bei adalah priyayi bangsawan yang memiliki perusahaan batik. Selain itu, Pak Bei memiliki berbagai pengalaman pendidikan, kemiliteran, dan memiliki anak buah yang banyak sedangkan Sastrodarsono hanya memiliki pengalaman sebagai guru di gupermen. Kelompok hegemoni yang dihadapi oleh Sastrodarsono hanya gupermen, tetapi yang dihadapi oleh Pak Bei adalah negara di dalam pemerintahan Soekarno dan kelompok residual yaitu kekuasaan Sinuhun Pakubowono.

Pak Bei di dalam menghadapi hegemoni penguasa lebih berani bila dibanding dengan Sastrodarsono dan Lantip karena secara sosial ekonomi Pak Bei mampu berdiri sendiri. Pak Bei bukan pegawai pemerintahan sehingga leluasa untuk memberikan kritik-kritik kepada kebijakan penguasa yang hegemonis. Akan tetapi, Sastrodarsono dan Lantip sebagai pegawai pemerintah sulit menghadapi kebijakan pemerintah karena mereka sendiri merupakan orang pemerintah. Bila tiga tokoh tersebut dibandingkan dengan Kapten Sarjubehi juga memiliki perbedaan walaupun

Pak Bei dengan Kapten Sarjubehi sama-sama seorang bangsawan yang dekat dengan raja.

Namun yang perlu dicermati raja yang dihadapi Pak Bei berbeda dengan raja yang dihadapi oleh Kapten Sarjubehi. Raja yang dihadapi oleh Pak Bei merupakan raja yang sudah tidak mempunyai kekuasaan, baik secara sosial politik maupun secara militer. Raja yang dihadapi oleh Kapten Sarjubehi adalah raja yang pada masa prakemerdekaan masih memiliki kekuasaan di wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Posisi raja sebagai adik dari ibu Putri Parasi sangat menguntungkan Kapten Sarjubehi sebagai opsir di legiun kasunanan. Peluang besar seperti itu dimanfaatkan oleh Putri Parasi untuk memutasikan Kapten Sarjubehi agar menjadi opsir kumpeni dengan gaji yang lebih besar. Dengan posisi seperti tersebut, Kapten Sarjubehi lebih memilih menjadi subordinat kumpeni daripada menjadi subordinat kasunanan.

Pak Bei sebagai intelektual tradisional selalu mengeritisi kebijakan pemerintah yang hegemonis tanpa pretensi apa pun. Begitu juga ketika berhadapan dengan kelompok residual, Pak Bei mengeritisi kekuatan *Sangga Buana* yang disakralkan oleh orang-orang keraton, tetapi mendapatkan kecaman dari kelompok residual. Kepriyayian yang dipegang oleh Pak Bei adalah ikhlas di dalam menghadapi berbagai keadaan. Atas dasar keikhlasan tanpa pretensi apa pun dan demi kepentingan orang banyak, Pak Bei rela dikecam orang-orang yang menjilat penguasa hegemonis, baik penguasa negara maupun penguasa di keraton. Posisi raja yang dihadapi oleh Pak Bei hanya sebagai kepala keluarga atau *trah* keraton sehingga raja dan kelompoknya merupakan kelompok yang mengadakan revolusi pasif dengan cara menjaga mitos kesakralan keraton sebagai simbol kejayaan leluhur di masa lampau. Walaupun Pak Bei selalu mengeritisi kebijakan presiden dan kebijakan keraton, tetapi Pak Bei tetap menjadi subordinat pemerintah dan keraton karena Pak Bei percaya pada mitos wahyu. Pak Bei percaya bahwa Bung Karno menjadi presiden karena Bung Karnolah mendapatkan wahyu dan sinuhun menjadi raja karena sinuhunlah yang mendapatkan wahyu, demikian pula Pak Bei menjadi juragan batik karena memiliki wahyu sebagai juragan batik.

Kepercayaan kepada mitos wahyu juga terdapat pada Bu Bei dan Teyi sebagai perempuan priyayi yang berasal dari orang kecil. Untuk mendapatkan wahyu diperlukan kerja keras dan hidup prihatin dalam arti menahan keinginan yang tidak relevan dengan tujuan. Mitos wahyu tersebut digunakan oleh kelompok residual untuk melestarikan hegemoninya sebagai priyayi yang memiliki mitos bahwa status priyayi adalah status keluhuran budi. Walaupun orang kecil memiliki kepandaian apabila tidak diperistri oleh seorang priyayi maka tidak ada artinya status

orang tersebut karena bukan termasuk golongan priyayi. Untuk menjadi golongan priyayi dan mempertahankan kepriyaiannya diperlukan budaya kepriyayan yang berupa kesetiaan kepada atasan, mau bekerja keras, dan percaya bahwa kekuasaan itu didapat karena wahyu atau amanah dari Tuhan sehingga untuk mendapatkannya seseorang perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan laku prihatin.

Bu Bei dengan menjalani proses laku prihatin di dalam meraih kepriyayan akhirnya menjadi priyayi yang memiliki dominasi kekuasaan untuk memasarkan produknya di Pasar Klewer sehingga menjadi priyayi yang paling kaya di lingkungan keraton. Teyi dengan berbagai kerja keras dan laku prihatinnya bisa menjadi priyayi pendamping Kus Bandarkum selaku bangsawan yang memiliki posisi baik sebagai subordinat di keraton dan pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, Sastrodarsono dan Lantip dengan ketekunannya bisa meraih status priyayi pada zamannya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa novel *Para Priyayi*, *Canting* dan *Gadis Tangsi* merupakan novel yang mendeskripsikan bahwa hegemoni yang dihadapi oleh priyayi adalah hegemoni yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan setelah kemerdekaan hegemoni diciptakan oleh pemerintah dengan segenap kekuatan politik dan militernya. Untuk menghadapi tersebut, kelompok priyayi menjadi subordinat dari penguasa hegemoni dengan menerapkan budaya kepriyayan yang berwujud kesetiaan kepada penguasa, berusaha bekerja keras, dan ikhlas di dalam menghadapi segala kontrol dari atasan.

### **Respons Pembaca pada Novel *Para Priyayi*, *Canting*, dan *Gadis Tangsi* yang Berkaitan dengan Nilai-Nilai Pendidikan**

Novel *Para Priyayi*, *Canting*, dan *Gadis Tangsi* secara umum direspons pembaca mengandung isi bahwa tokoh-tokoh priyayi memiliki perilaku keutamaan pada *wong cilik* yang memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan persaudaraan. Tokoh priyayi memiliki keluhuran budi membantu *wong cilik* di dalam memperbaiki statusnya dari *wong cilik* menjadi priyayi. Tokoh priyayi dalam novel *Para Priyayi* adalah *Ndoro Seten Kedungsimo* yang membantu anak Atmokasan yang bernama Soedarsono yang kemudian bernama Sastrodarsono untuk menjadi guru bantu. Sastrodarsono setelah menjadi priyayi menolong Wage anak keponakannya yang bernama Ngadiyem, setelah ikut Sastrodarsono anak tersebut diganti nama Lantip. Setamat sekolah rakyat, Lantip dititipkan oleh Sastrodarsono kepada Hardoyo, anak Sastrodarsono, hingga Lantip kuliah sampai menjadi dosen.

Tokoh priyayi di dalam novel *Canting* adalah Pak Bei yang mencintai Tuginem anak buruh batik. Pernikahan Pak Bei dengan Tuginem



merupakan perilaku utama seorang priyayi di dalam memperbaiki status sosial dan ekonomi Tuginem yang kemudian menjadi Bu Bei. Di dalam memerankan dirinya sebagai priyayi capaian, Bu Bei tidak kalah dengan istri bei-bei yang lain karena Bu Bei sanggup mengelola perusahaan batik Pak Bei sampai mendominasi pemasaran di Pasar klewer. Dengan bekal kesetiaan, ikhlas di dalam menerima sesuatu, Bu Bei juga berhasil menjadi seorang ibu rumah tangga yang memiliki banyak anak hingga anak-anaknya bisa sekolah di perguruan tinggi dan bisa bekerja sebagai priyayi.

Di antara anak-anak Bu Bei, yang paling menonjol adalah anak bungsu Bu Bei yang bernama Ni. Anak tersebut selain sejak janin disangsikan oleh Pak Bei apakah benih Pak Bei atau bukan, juga memiliki perilaku yang jauh berbeda dengan kakak-kakaknya dan memiliki keberanian berbeda pendapat dengan keluarganya. Keberanian Ni tampak pada saat Ni setelah lulus sekolah farmasi menolak dibelikan apotik oleh orang tuanya, tetapi justru memilih melanjutkan usaha batik orang tuanya, yang sebetulnya sejak masih kecil Ni dijauhkan dari berbagai urusan perbatikan karena Bu Bei tidak mau terungkit kesangsian Pak Bei tentang eksistensi Ni yang pernah dikandungnya.

Pilihan Ni yang berbeda dengan keluarga menjadikan Bu Bei terkejut dan mendadak pingsan hingga meninggal. Seeninggal Bu Bei, hubungan Ni dengan kakak-kakaknya menjadi makin meruncing. Bahkan, kakak-kakaknya makin curiga bahwa Ni bukan keturunan Sestrokusuman. Atas perlakuan kakak-kakaknya Ni tidak peduli, ia tetap berkonsentrasi untuk melanjutkan usaha batik orang tuanya. Atas kekukuhan tekad Ni di dalam mengambil keputusan dan berani menghadapi resiko tersebut menjadikan Pak Bei makin yakin bahwa Ni adalah roh Pak Bei karena memiliki kesamaan prinsip dengan Pak Bei di dalam menghadapi permasalahan. Dengan pernyataan Pak Bei bahwa Ni betul-betul anaknya dan penghargaan Pak Bei kepada kekukuhan keputusan Ni, membuat Ni makin kagum kepada kepribadian Pak Bei sebagai priyayi yang bijaksana, berwibawa, dan kharismatis bagi keluarganya.

Tokoh priyayi di dalam novel *Gadis Tangsi* adalah Putri Parasi, Kapten Sarjubehi, dan Kus Bandarkum. Tokoh Putri Parasi juga memiliki perilaku utama yaitu menolong Teyi untuk mengentaskan Teyi dari gadis tangsi yang liar, buta huruf menjadi gadis yang mampu baca-tulis dan mampu mempelajari segala keterampilan dan etika keraton yang merupakan sumber acuan utama budaya Jawa. Peran Kapten Sarjubehi dalam kaitannya dengan perkembangan pribadi Teyi, Kapten Sarjubehi ikut memfasilitasi segala kebutuhan Putri Parasi untuk memberikan pelajaran etika dan baca tulis kepada Teyi. Selain itu, Kapten Sarjubehi juga memperkenalkan Teyi dengan Kus Bandarkum sehingga Teyi dapat

terbuka untuk merenungi bahwa masa depannya bergantung pada keberanian dirinya di dalam mengubah keadaan. Atas dasar nasihat Kus Bandarkum Teyi meninggalkan suami sahnya untuk memperoleh wahyu kepriyayian dari Kus Bandarkum.

Tokoh *Ndoro* Seten Kedungsimo, Pak Bei, dan Putri Parasi, Kapten Sarjubehi, dan Kus Bandarkum hampir memiliki kesamaan fungsi di dalam mengentaskan status sosial *wong cilik* menjadi priyayi. *Wong cilik* yang dibantu oleh priyayi dalam novel-novel tersebut pada umumnya memiliki potensi diri untuk berkembang ditandai dengan suka bekerja keras. Selain memiliki mentalitas kerja keras, tokoh-tokoh *wong cilik* memiliki integritas yang tinggi kepada patronnya sebagaimana Atmokasan yang menampakkan kejujurannya di dalam mengerjakan sawah *Ndoro* Seten Kedungsimo dengan selalu menyetorkan hasil panen tanpa mengurangi sedikit pun untuk kepentingan pribadi. Perilaku Atmokasan tersebut menjadi salah satu sebab anak Atmo Kasan yang bernama Darsono ditolong oleh *Ndoro* Seten Kedungsimo untuk menjadi priyayi. Anak Atmokasan ditolong juga karena memiliki potensi sebagai guru karena sekolah guru dan selalu dimotivasi oleh orang tua dan kakeknya untuk menjadi priyayi. Selanjutnya, Lantip yang ditolong oleh Sastrodarsono merupakan keponakan Sastrodarsono yang *ngenger* di rumahnya dan disekolahkan karena Sastrodarsono melihat tanda-tanda Lantip merupakan anak yang memiliki potensi cerdas dan rajin.

Tokoh Pak Bei memilih Tuginem sebagai istrinya karena Pak Bei memandang bahwa Tuginem memiliki perbedaan dengan gadis-gadis buruh batik yang lain. Pak Bei memandang Tuginem sebagai gadis yang suka bekerja keras dan terbiasa hidup prihatin. Dalam perkembangan kehidupan, ternyata pilihan Pak Bei tidak salah bahwa Tuginem cakap di dalam mengelola perusahaan dan memiliki *human relation* yang baik dengan para pelanggan selain Tuginem memiliki integritas yang tinggi kepada komitmen yang dibuat oleh Pak Bei.

Tokoh Teyi dididik Putri Parasi tentang etika Jawa dan kemampuan baca-tulis karena Putri Parasi memandang Teyi sebagai anak yang cerdas, jujur, dan selalu memegang teguh nasihat orang tua walaupun orang tua Teyi mendidik secara otoriter. Didikan orang tua tersebut menjadikan Teyi sebagai gadis kecil yang pandai mencari uang dan terlatih mampu hidup mandiri dan berbeda dengan gadis-gadis lain.

Kesamaan antara *Ndoro* Seten Kedung Simo, Sastrodarsono, Lantip dengan Pak Bei karena mereka masing-masing disebut priyayi. Akan tetapi, kepriyayian *Ndoro* Seten Kedung Simo, dan Sastrodarsono merupakan priyayi gupermen, dan Lantip merupakan priyayi sejak pascakemerdekaan sedangkan Pak Bei merupakan priyayi bangsawan yang diperoleh secara

genetik walaupun Pak Bei merupakan priyayi yang terdidik. Begitu juga, dengan Putri Parasi, Kapten Sarjubehi, dan Kus Bandarkum merupakan priyayi bangsawan yang terdidik secara barat. Semua priyayi tersebut merupakan orang-orang yang memiliki fasilitas sejak zaman penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka sehingga mereka menjadi orang yang terpandang di masyarakat dan segala perbuatan dan tindak-tanduknya cenderung dijadikan contoh oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat mengharap priyayi-priyayi memiliki kewibawaan dan memiliki moral yang baik sebagaimana tokoh-tokoh di dalam tiga novel yang membantu saudara dan orang yang hidup di bawahnya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memotivasi untuk bekerja keras dan memiliki ketulusan di dalam bekerja serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, tokoh perempuan dalam novel *Para Priyayi* yaitu Ngaisah istri Sastrodarsono dan Soemini anak Sastrodarsono berbeda dengan tokoh Bu Bei dan Ni yang terdapat pada novel *Canting* berbeda pula dengan tokoh Teyi dan Putri Parasi pada novel *GadisTangsi*. Tokoh Ngaisah dan Soemini merupakan priyayi, tetapi sebagai ibu rumah tangga yang hanya berperan mendidik anak-anak berbeda dengan tokoh Bu Bei yang berasal dari *wong cilik* memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak dan sebagai pengusaha batik yang sukses.

Tokoh perempuan dalam novel *Para Priyayi* merupakan ibu rumah tangga murni yang setia kepada keluarga dan tokoh perempuan dalam novel *Canting* selain sebagai ibu rumah tangga yang setia kepada keluarga juga memiliki kemampuan sebagai pengusaha sebagaimana Bu Bei dan Subandini atau Ni serta kakak Ni yang bernama Wening Dewamurti. Perempuan-perempuan bangsawan tersebut memiliki kesamaan kemampuan berusaha dengan tokoh Teyi yang berasal dari *wong cilik*. Namun, tidak sama dengan Putri Parasi karena fisik Putri Parasi sakit-sakitan hanya sebagai istri yang dimanjakan oleh suaminya. Walaupun begitu, Putri Parasi memiliki mentalitas edukatif emansipatif seperti Ibu Kartini dan berhasil mendidik kompetensi dan kepribadian Teyi sehingga Teyi dihargai masyarakat.

Dari segi moralitas, tokoh Ngaisah istri Sastrodrasono tidak pernah tersangkut kasus karena Ngaisah hanya setia kepada Sastrodarsono, Di mata Ngaisah, Sastrodarsono adalah lelaki lugu anak petani *jekek* yang tidak mau berbuat yang aneh-aneh dan bekerja hanya untuk membangun keluarga besar priyayi. Berbeda dengan Pak Bei yang berlatar belakang keluarga ningrat kaya yang memiliki kehidupan borjuis, suka bepergian ke luar negeri dan membicarakan bintang-bintang film yang cantik. Moralitas Pak Bei sebagai ningrat selain sembeda, berwibawa, bertanggung jawab kepada keluarga, juga pernah memiliki *selir* sebagaimana bangsawan kaya

pada umumnya. Pak Bei bersama bangsawan yang lain juga tak lepas dari kegiatan berfoya-foya dengan dalih *Ngrumpaka Kabudayan Jawi* yang diselenggarakan setiap Selasa Kliwonan. Pak Bei juga memiliki kegiatan spiritual yang bertujuan mengendalikan hawa nafsu dan pengagum Ki Ageng Suryamentaram.

Putri Parasi memiliki moralitas baik karena setia kepada suami, kemana pun suami pergi ia selalu mengikuti walaupun sakit padahal dia anak bangsawan kaya di Surakarta yang bertempat tinggal di istana Jayaningratan, dan setiap hari dilayani oleh para dayang-dayang. Dia ingin hidup sederhana sebagaimana istri-istri perwira kumpeni yang lain yang tinggal di rumah kecil dalam tangsi. Kesetiaan Putri Parasi diimbangi dengan kesetiaan suaminya yang selalu membuat Putri Parasi senang, terutama di dalam memfasilitasi Putri Parasi untuk membimbing Teyi. Namun, setelah ditinggal mati Putri Parasi, Kapten Sarjubehi mengangkat Keminik, teman Teyi untuk *dimunci*. Dengan begitu, Kapten Sarjubehi yang semula orang baik-baik karena kesepian tidak bisa menahan nafsunya sehingga mengadakan hubungan seksual dengan Keminik di luar pernikahan. Hal yang sama tersebut juga dilakukan antara Teyi dan Kus Bandarkum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut priyayi sebagai sosok yang menjadi idola masyarakat terletak pada segi intelektualitas, kekayaan, kerja keras, dan pengabdian kepada orang banyak. Akan tetapi, dalam hal moralitas seksual pada umumnya para priyayi cenderung menyimpang. Oleh sebab itu, masyarakat seakan maklum pada perilaku priyayi yang berhubungan dengan tradisi memiliki selir. Apalagi perilaku tersebut didukung oleh tradisi priyayi bahwa perempuan merupakan subordinat laki-laki. Walaupun perempuan memiliki nafkah lebih banyak daripada laki-laki, tetapi sebagai istri, perempuan tersebut harus berbakti kepada suami.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pengumpulan data dapatlah disimpulkan bahwa ideologi tiga pengarang yang berhubungan dengan kepriyayan ada variasi perbedaan. Umar Kayam berpandangan bahwa priyayi bukan sekadar keturunan, tetapi yang lebih penting adalah semangat pengabdian untuk kepentingan masyarakat. Arswendo memandang bahwa priyayi berkaitan dengan moral. Untuk bisa menjadi priyayi yang baik priyayi hendaknya mampu berdagang. Selanjutnya, Suparto Brata memandang bahwa priyayi itu diperoleh dari keturunan, apabila ada orang yang pandai karena pendidikan atau berdagang orang itu memiliki derajat setaraf priyayi, tetapi bukan priyayi.

Hegemoni yang direpresentasikan tiga pengarang adalah hegemoni

kelompok dominan kepada kelompok priyayi. Hegemoni kepriyayaan yang terdapat dalam novel *Para Priyayi* dan novel *Gadis Tangsi* adalah priyayi sebagai subordinat kelompok dominan pemerintah Hindia Belanda. Hegemoni yang terdapat dalam novel *Canting* adalah hegemoni kelompok dominan, dalam hal ini, pemerintah zaman Rezim Soekarno keraton kasunanan, dan kelompok priyayi dengan kepriyaiannya bertindak sebagai subordinat. Kelompok priyayi menjadi pendukung kelompok dominan karena ingin mempertahankan posisinya di masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Tiga novel direspons oleh pembaca guru, siswa, SMA, mahasiswa, budayawan, dan dosen memiliki fungsi sebagai bahan ajar dengan memilah dan memilih bagian-bagian yang sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam kurikulum karena tiga novel tersebut ada hal yang cocok tidak cocok dengan nilai-nilai pendidikan karakter untuk siswa SMA.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Meysam. Cultural Hegemony in Charles Dickens's *A Tale of Two Cities*. *International Journal of Literature and Arts*. 2014, 2(4): 98-103.
- Brata, Suparto. 2004. *Gadis Tangsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Diniejko, Andrzej. 2006. *Charles Dickens as Social commentator and Critic*. The Victorian Web. <http://www.victorianweb.org/index.html>.
- Escapit, Robert. 2005. *Sosiologi Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kayam, Umar. 2009. *Para Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Luthfi, Ahmad Nashih. 2007. *Biografi Umar Kayam, Manusia Ulang-Alik*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Sastra dan Cultural Studies. Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santosa, Wijaya Heru. 2012. "Nilai-nilai Kepriyayaan Jawa dalam Novel-Novel *Para Priyayi, Canting, dan Gadis Tangsi* : Kajian Budaya, Ideologi, dan Sosiopragmatika" *Jurnal Pengajian Melayu* Jilid 23, 2012.
- West, Mary. 2009. "Paradise Lost": 'n Ondersoek na swart arbeid en wit ongemak in stedelike Suid-Afrika: Marlene van Niekerk se kortverhaal "Klein vingeroefening rondom die nosie van hibriditeit". *Journals > Humanities journals > Journal of Literary Studies* articles > September 1.
- Wright, Laurence. 2010. "Resepsi Awal Bukit Fools". Bahasa Inggris di Afrika 31,2(2004):105+ Seni Gale. *Humaniora dan Pendidikan Standar Paket*. Web. 22 Mei 2010.

# SASTRA DAN KEKUASAAN DI ERA ORDE BARU

**Suroso**

Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: surosoLSIP@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Sastra secara langsung atau tidak langsung ditentukan berhubungan dengan ideologi. Oleh karena sastra tidak dapat dilepaskan dari politik. Berkaitan dengan kenyataan itu, seringkali terjadi pencekalan terhadap sastra. Bahkan pencekalan yang tidak masuk akal dilakukan oleh penguasa dapat berubah menjadi senjata makan tuan. Sastra yang dicekal justru menjadi dikenal oleh dunia internasional, karena dinobatkan sebagai peraih hadiah nobel. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kategori karya sastra yang dianggap membahayakan rejim pada masa orde baru dan hubungan bahasa sastra dan ideologi.*

**Kata Kunci:** sastra, kekuasaan, rejim Orde Baru

## **Pendahuluan**

Pada rejim Soeharto (1966-1998), disebut juga era orde baru, melalui Kejaksaan Agung pemerintah melarang beberapa buku sastra untuk dimiliki, disimpan, diedarkan, dan dibaca. Buku-buku sastra yang dimaksud terutama adalah buku-buku yang ditulis oleh para pengarang

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dianggap pemerintah pada waktu itu berafiliasi pada komunis. Salah seorang korban pelarangan buku tersebut adalah Bambang Isti Nugroho, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang dijatuhi hukuman penjara karena membaca dan mengedarkan buku *Bumi Manusia*, salah satu buku seri pertama Tetralogi pulau Buru karya Pramudya Ananta Toer.

Selain buku sastra masih ada beberapa terbitan yang dilarang penguasa Orde Baru karena dianggap kritis terhadap pemerintah. Salah satunya publikasi Majalah Independen. Majalah tersebut terbit secara diam-diam melalui gerakan di bawah tanah sebagai bahan bacaan alternatif untuk menyikapi pemerintahan Soeharto pasca di Era kejatuhan Soekarno. Hal-hal yang berbau Soekarno dilarang. Beberapa terbitan bahkan dibredel karena menyuarakan kepentingan masyarakat. Surat Ijin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) Tempo, Detik dan Editor dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No 123/KEP/MeNPEN/1994 tanggal 21 Juli 1994 (Utami, 1994:107).

Mengapa rejim Soeharto yang disebut juga era Orde Baru begitu represif terhadap karya sastra dan karya jurnalistik? Menurut Heryanto (1996), barangkali rejim menganggap bahwa karya sastra sebagai isme punya tradisi panjang untuk merayakan keterbukaan makna, ketidakterpaduan, kemajemukan, ketidakpastian atau ambiguitas. Tentu saja sastra yang dimaksud adalah sastra yang tidak terkungkung oleh romantisme dan humanisme, namun sastra yang postmodernisme, satu di antaranya adalah otokritik terhadap kecongkakan ilmu dan kekuasaan Barat di dunia dalam pembangunan di Indonesia.

Tulisan ini akan mendeskripsikan kategori karya sastra yang dianggap membahayakan rejim pada masa orde baru dan hubungan bahasa sastra dan ideologi.

## **Bahasa dan Ideologi**

Bahasa sebagai medium sastra dan ideologi tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan antara bahasa dan kekuasaan karena perilaku ideologi hanya dapat diamati dari praktik kekuasaan (Fairclough (1989). Hubungan antara bahasa dan kekuasaan mulai terjalin ketika Jean Baudrillard, Jurgen Habermas, dan Antonio Gramsci (Via Latif dan Ibrahim, 1996:15) mengemukakan gagasan mereka mengenai bahasa dan kekuasaan. Habermas memandang bahwa bahasa sebagai medium untuk menghubungkan sang subjek dengan tiga wilayah yaitu wilayah eksternal, wilayah sosial, dan wilayah dunia. Wilayah eksternal mengacu pada situasi di luar masyarakat tempat subjek berada. Wilayah sosial mengacu pada totalitas hubungan antarpribadi yang memiliki aturan normatif

dalam masyarakat. Wilayah dunia mengacu pada maksud-maksud dan pengalaman subjektif penutur. Dengan demikian konteks hubungan bahasa sastra dengan tiga wilayah ini menunjukkan bahwa bahasa sastra adalah media dominasi dan kekuasaan.

Pengaruh dimensi eksternal dalam bahasa memunculkan istilah kekuatan (*force*) dan hegemoni (*hegemony*) kekuatan lebih ditafsirkan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang lain menaati syarat-syarat tertentu. Hegemoni sebagai kepatuhan aktif dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas yang berkuasa melalui penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, politik atas teks dan penafsirannya.

Jika pada orde Soeharto mampu menciptakan kata-kata yang dapat menekan, menyudutkan, mengerem, dan menyeragamkan kata, puisi-puisi Wiji Tukul pun, mampu memberikan kekuatan moral rakyat yang anti Soeharto untuk melakukan perubahan. Akibat dari kuasa rejim waktu itu, Wiji Tukul sampai saat ini dihilangkan dan tak tak tahu dimana berada. Dengan kata lain, rejim akan melalui konstruksi bahasa yang diciptakan mengembangkan dan memperluas kekuasaannya dan pengkritik rejim menggunakan bahasa untuk mematahkan pengaruhnya.

Simak puisi berikut yang menunjukkan bahwa bahasa puisi memiliki kuasa untuk menggerakkan masa melawan rejim (*Tempo*, 2013).

## PERINGATAN

Jika rakyat pergi  
ketika penguasa pidato  
kita harus hati-hati  
barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat sembunyi  
dan berbisik-bisik  
ketika membicarakan masalahnya Sendiri  
penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Bila rakyat tidak berani mengeluh  
Itu artinya sudah gawat  
dan bila omongan penguasa  
tidak boleh dibantah  
kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang  
suara dibungkam kritik dibungkam tanpa alasan



dituduh subversif dan mengganggu keamanan  
maka hanya ada satu kata: lawan!

Sebetulnya kalimat terakhir dalam puisi Wiji Thukul “maka hanya satu kata: lawan! terpengaruh oleh puisi yang dibuat temannya Pardi di Teater Jagat, berjudul bambu runcing. “... Ini penindasan yang tidak boleh kita biarkan/Tapi jika bambu runcing kita hancur luluh/Terbakar api senjata musuh/Pada kita masih ada satu kata: LAWAN!”. Kalimat terakhir pada puisi *Peringatan* Wiji Thukul bagai maknit pergerakan demo menentang rejim Orde baru pada 1998 yang menjatuhkan Soeharto dari jabatan presiden yang telah dikuasai selama 32 tahun pada 21 Mei 1998 dan diangkatnya Wakil Presiden BJ. Habibie untuk menjabat Presiden RI selama 1 tahun untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu di era reformasi 1998. “Maka hanya ada satu kata:lawan!. Puisi mampu memiliki hegemoni menggerakkan massa dan mengubah rejim selain juga partisipasi para penggerak reformasi Indonesia.

Bukan hanya puisi Wiji Thukul yang memberi kekuatan moral, puisi-puisi Cak Nun (Emha Ainun Najib), Linus Suryadi AG, Gus Mus (KH Mustofa Bisri), dll. Gus Mus dicekal tidak boleh membacakan puisinya dalam *Poetry ReadingSolidaritas Bosnia* pada pertengahan tahun 1990-an (Budidarma, 2007”191). Dramawan Ratna Sarumpait juga dicekal di beberapa kota ketika mementaskan drama “Marsinah Menggugat” oleh Teater Satu Merah Panggung. Drama tersebut berkisah pembunuhan Marsinah, aktivis Buruh Pabrik di Sidoarjo yang diculik, disiksa, diperkosa, dibunuh, dan mayatnya dibuang di hutan jadi di Kabupaten Nganjuk. Aparat keamanan bersenjata lengkap membubarkan pentas teater Marsinah Menggugat di Bandung, bagaikan menghadapi atu batalyon tentara musuh.

Walaupun tidak secara langsung mengkritik pemerintah Drama N. Riantiarno, Puisi Taufik Ismail dalam *Tirani dan Benteng* dan *Malu Aku jadi Orang Indonesia* (MAJOI), puisi Sutardji Calzoum Bahri, dan Cerpen Putu Wijaya, menggunakan bahasa yang memiliki hegemoni berdampak pada para pembacanya. Kritik dalam karya sastra dapat dilakukan secara tidak langsung seperti yang terjadi di Thailand, Hongkong, Korea, dan Negara-negara Asia lainnya (Hartono via Budidarma, 2007:190).

## **Bahasa dan Politik**

Menurut Budidarma (2007:183), sastra langsung atau tidak langsung ditentukan oleh politik. Oleh karena sastra merupakan kias zamannya, maka sastra tidak dapat dilepaskan dari politik. Berkaitan dengan kenyataan itu, seringkali terjadi pencekalamn terhadap sastra.

Bahkan ada cekal yang tidak masuk akal, karena ketakutan penguasa. Kadang cekal ini berubah menjadi senjata makan tuan. Sastra yang dicekal justru menjadi dikenal oleh dunia internasional, karena dinobatkan sebagai peraih hadiah nobel. Sebenarnya cekal tidak hanya terjadi dalam sastra, namun juga dalam berbagai aspek kehidupan. Salman Rusdy penulis Inggris keturunan India, sampai saat ini masih difatwa hukuman mati oleh pemerintah Iran karena menulis novel yang merendahkan Nabi besar umat beragama. Fatwa ini belum dicabut walaupun Salman Rusdy masih hidup di Inggris dan dikawal oleh Scotland Yard.

Beberapa novel Indonesia yang menjadi pembicaraan hangat hubungannya dengan kekuasaan adalah Novel *Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur* (Melibas, 2003) karya Muhidin M Dahlan karena berkisah tentang tokoh agama tertentu dan praktik beragama dalam sebuah lembaga dan organisasi umat. Tampak sebagian pembaca tertentu kurang berterima narasi yang dikisahkan dalam novel tersebut. Novel *Sang Penghadang* karya Taufik Tan (Manhaj, 2008) berkisah tentang misiologi yang dilakukan agama tertentu terhadap kepercayaan lain dengan pola misiologinya. Membelokkan akidah agama untuk pindah agama lain karena kekuasaan. Kedua novel berkisah dua agama yang berbeda namun ada sesuatu yang ingin dikemukakan melalui paparan bahasanya yaitu kuasa bahasa untuk mengubah orang pada ideologi dan keyakinannya. Dari kedua novel tersebut pembaca disarkan untuk memahami betapa besarnya kuasa bahasa melalui narasi tokoh yang mampu mengubah iman seseorang. Bagi pemeluk agama tertentu, membaca novel *Keluarga Permana* Karya Ramadhan KH akan memperoleh informasi betapa susahny akibat orang yang melakukan perkawinan antaragama.

Novel-novel terkenal Indonesia karya Pramudya Ananta Toer, Eka Kurniawan, Andrea Hirata yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa pada pameran buku di Frankfurt Jerman misalnya, tidak lepas dari politik. Mengapa orang-orang Barat menyukai kisah tetralogi pulau Buru mdalam novel *Bumi Manusia*, kisah sekolah reyot di Bangka Belitung dalam novel *Laskar Pelangi*?. Selain berkaitan dengan kuasa bahasa, ada faktor lain yang menyebabkan buku terebut berkategori kelas dunia. Selain faktor sejarah, kemanusiaan, dan pengorbanan, ada faktor politik yang menyebabkan buku-buku tersebutdiperhitungkan di dunia internasional. Buku *best seller Laskar Pelangi* karya Andrea Hirata misalnya, karya tersebut belum berkategori sastra serius menurut para kritikus sastra, namun menjadi terkenal karena penulisnya pernah tinggal di Prancis dan memiliki jaringan internasional. Dengan demikian, selain faktor bahasa ada faktor lain yang menjadikan karya sastra terkenal atau tidak. Selain faktor kritikus sastra, faktor media massa dan media sosial berperan

dalam “menduniakan” karya sastra Indonesia. Oleh karena itu, berbagai pihak dapat bekerja ekstra menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia ke dalam berbagai bahasa dunia untuk berpeluang mendapatkan penghargaan nobel sastra.

## **Kuasa Bahasa**

Selain bahasa tulis, karya sastra lebih memiliki kuasa jika dipentaskan dalam bentuk pembacaan fragmen, baca puisi, dan pementasan karya drama. Orang seperti Rendra dan Emha Aiunun Nadjib mampu menghipnotis pembaca sastra dengan karya-karya yang dibacakan melalui *poetry reading* atau baca puisi. Bahkan untuk melihat Rendra membaca puisi orang harus membeli tiket pertunjukan yang tidak murah. Mendengarkan Rendra Baca Puisi “Sajak Sebatang Lisong” di Kampus ITB pada 1972 misalnya, betapa hidup kata-kata yang diucapkan penyair ini. Walaupun puisi itu dibacakan lebih dari tiga dasawarsa, makna puisi tersebut masih kontekstual pada zaman sekarang. Bahasa sastra yang dibacakan mampu menghipnotis, memberi semangat, kontemplasi, dan pencerahan soal kemanusiaan, kebudayaan, bahkan keangkuhan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dan para kroninya.

Bagi penguasa memberangus karya sastra tidaklah mudah. Protes melalui karya seni dapat dilakukan melalui lirik bermediakan bahasa. Lirik puisi yang dinyayikan oleh Iwan Fals seperti *Bento dan Bongkar*, dan *Presiden*, misalnya jelas mengkritik pribadi-pribadi seperti penguasa serakah atau presiden yang tak mampu mengatasi penggangguran. Penguasa tidak bisa memenjarakan penulis dan pelantun lagu, namun hanya mencekal Iwan Fals tour musik di 100 kota.

Kini zaman sudah berubah, novel-novel dan karya sastra penulis Lekra yang pernah dilarang oleh pemerintah sudah tercetak dan dijual bebas di toko buku dan dengan mudah pembaca memilikinya. Masihkah penguasa melihat bahwa karya sastra dianggap sebagai produk membahayakan? Paradigma ini harus ditinggalkan ketika persoalan keberaksaraan nasional kita masih dalam titik nadir. Perlu publikasi karya sastra besar-besaran. Perlu penerjemah profesional yang menduniakan karya sastrawan Indonesia, perlu regulasi yang memudahkan penulis dan penerbit agar pembaca bisa memperoleh bacaan yang murah dan mudah. Bangsa Indonesia menjadi melek aksara dengan memperoleh berita dan cerita melalui karya sastra anak bangsa.

Sastra selain mampu memberi manfaat dan kenikmatan, sastran mampu memberi kuasa bahasa untuk mengubah rejim. Bangsa Indonesia memiliki puisi yang sangat indah yang diciptakan dan dibacakan oleh para pemuda pada Kongres 28 Oktober 1928 “Menjunjung Bahasa Persatuan

Bahasa Indonesia” Bahasa selain dapat berfungsi mempersatukan juga dapat mengubah keadaan seperti yang ditulis oleh para penyair, novelis dan cerpenis dan dramawan kita.

### **Rekomendasi Pengembangan Kesusasteraan**

Setelah bahasa Indonesia dirumuskan lebih dari 80 tahun pasca sumpah pemuda untuk mewujudkan bangsa yang berkepribadian dalam bidang budaya sudah selayaknya menempatkan sastra bagian dari politik sastra nasional. Menurut Rosidi (1984: 121) Jika sastra dianggap penting sederajat dengan kedudukan bahasa Indonesia, perlu ada upaya pendidikan sedemikian rupa agar setiap anak Indonesia mengenal sastra nasionalnya dengan baik. Mengingat sastra nasional Indonesia itu terdiri dari sastra dalam bahasa nasional dan bahasa daerah, baik klasik maupun modern, tidakkah memang perlu suatu pendidikan yang berencana dan teratur dalam mempelajari dan menerjemahkan karya-karya sastra dalam bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing, baik yang klasik maupun modern.

Beberapa gagasan yang dikemukakan oleh Rosidi (1984:123) mengenai pendidikan sastra yang saat ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya diantaranya (1) menyediakan buku-buku sastra Indonesia secara lengkap, baik buku terjemahan, saduran baik dari sastra daerah maupun sastra dunia baik klasik maupun modern; (2) memberikan rangsangan bagi karya kreatif dengan memberi hadiah tahunan berdasarkan karya, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta; (3) memberi rangsangan bagi penerbitan karya sastra dan pasar pembelinya. Penerbit minimal mencetak 1000 eksemplar untuk disebar ke 1000 perpustakaan atau 500 perpustakaan dengan mendapatkan 2 eksemplar.

Melalui politik pendidikan kesastraan diharapkan bangsa Indonesia mampu memahami kebudayaan dan pikiran bangsanya, mampu berkepribadian Indonesia dan menghargai karya-karya kemanusiaan bangsa lain melalui penerjemahan karya sastra. Sastra akan mampu memberikan pencerahan manakala pembaca mendapatkan kemanfaatan dengan memahami ekspresi para tokoh latar yang digambarkan, jalan cerita, dan tema yang ditulis pengarangnya.

### **Daftar Pustaka**

- Budidarma. 2007. *Bahasa, Sastra, dan Budidarma*. Surabaya: JP Books
- Dahlan, Muhidin M. 2003. *Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur*. Jakarta: Melibas
- Fairclough. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK.

- Heryanto. 1996. "Bahasa dan Kuasa: Tatapan Postmodernisme" dalam *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Latif dan Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Rosidi, Ajip. 1984. "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Kesusasteraan" dalam *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Taufik Tan. 2008. *Sang Penghadang*. Depok: Manhaj.
- Tempo. 2013. "Biji yang Tumbuh dari Kor Kapel". *TEMPO Edisi Khusus "Teka-Teki Wiji Thukul"*. Edisi 13-19 Mei 2013
- Utami, Ayu (Ed). 1994. *BREDEL 1994 Kumpulan Tulisan tentang Pembredelan TEMPO, DETIK, EDITOR*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.



**Bagian Ketiga**

# **BAHASA DAN KEKUASAAN**

**: Sebuah Perbincangan lebih lanjut**





# STRUKTUR MIKRO PENCITRAAN POLITIK DI MEDIA MASSA

**Afdhal Kusumanegara**

Universitas Negeri Malang

Email: afdhalkusumanegara@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan struktur mikro pencitraan politik pada teks berita politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2012 dalam surat kabar Harian Fajar. Struktur mikro teks berita berdasarkan analisis wacana kritis model van Dijk meliputi (1) latar, (2) detil, (3) maksud, (4) pranggapan, (5) bentuk kalimat, (6) koherensi, (7) koherensi kondisional, (8) koherensi pembeda, (9) pengingkaran, (10) leksikon dan (11) grafis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan elemen-elemen struktur mikro oleh penulis teks berita atau redaksi surat kabar memberikan pencitraan politik kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu yang dipengaruhi oleh skema kognisi sosial, yaitu skema diri, skema peran dan skema peristiwa.*

**Kata Kunci:** struktur mikro, pencitraan politik, teks berita, kognisi sosial

Keberadaan media massa sangat vital bagi kepentingan politik. Kebijakan-kebijakan politik, termasuk visi-misi kampanye politik, tidak akan tersampaikan dengan baik tanpa dukungan media massa sebagai penyampai informasi. Pentingnya kehadiran media massa, karena dianggap mampu merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, di tingkat lokal maupun global (Sudibyo (2004:1).

Berita tersampaikan secara luas melalui media massa. Melalui berita, informasi yang dibutuhkan masyarakat akan segera didapatkan dengan mudah, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berita dapat berupa informasi baru mengenai sebuah peristiwa, berbagai hal, atau individu dan laporan media seperti wacana di radio, TV, dan surat kabar (van Dijk, 1988:4).

Akan tetapi, berita tidak lepas dari kepentingan tertentu. Berita cenderung tidak bebas dari kepentingan di luar pemberitaan (Roekhan, 2010). Sebab, proses pembentukan berita merupakan proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi memengaruhinya (Ardianto, 2012). Hal itu didukung oleh pernyataan Baran (2012:22), hanya 49% yang berpikir bahwa organisasi pemberitaan media memiliki profesionalitas yang tinggi. Media massa sebagai produsen sekaligus distributor informasi, bagaimanapun juga dimiliki oleh entitas tertentu, seperti individu ataupun institusi sebagai pemilik modal. Dengan demikian, media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi ideologis (Sudibyo, 2004:2).

Fungsi ideologis memengaruhi produksi berita. Berita yang ditampilkan di media massa sudah pasti mengandung ideologi dari pihak tertentu. Berita tidak mungkin merupakan cerminan dan refleksi dari realitas, karena berita yang terbentuk hanya cerminan dari kepentingan kekuatan dominan (Eriyanto, 2012:32). Kekuatan dominan itulah yang mempunyai akses luas untuk menyebarkan ideologinya.

Salah satu kekuatan dominan yang ada dalam struktur sosial masyarakat ialah tokoh politik. Tokoh politik berasal dari berbagai kalangan (pejabat pemerintah, niagawan, dan akademisi) yang mempunyai akses luas terhadap masyarakat. Akses tersebut dapat berupa jaringan media atau bahkan kepemilikan media. Tokoh politik memiliki dominasi dan kuasa terhadap entitas masyarakat yang lain karena memiliki modal akses tersebut. Penguasaan media utama seperti surat kabar atau televisi oleh pengusaha yang memiliki kekuatan ekonomi, akan menempatkan media menjadi alat tawar politik dengan calon penguasa (Haryati, 2013).

Pencitraan politik di media massa merupakan penggambaran diri tokoh politik yang ingin diciptakan melalui bantuan manajemen media,

baik secara koordinatif maupun nonkoordinatif. Gambaran diri tersebut sangat dibutuhkan oleh para tokoh politik untuk menampilkan dirinya di mata masyarakat luas. Citra dalam politik lebih dari sekadar strategi untuk menampilkan kesan baik terhadap pemilih, tetapi bisa merupakan negosiasi atau upaya membangun kesepakatan yang dibuat oleh kandidat dan pemilih (Haryati, 2013).

Berdasarkan studi pendahuluan, muatan-muatan pencitraan politik secara proporsional maupun yang nonproporsional banyak ditampilkan pada berita, seperti yang ditampilkan oleh *Harian Fajar*, khususnya berita mengenai Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2012. Pencitraan politik tersebut banyak ditampilkan pada masa kampanye.

Pencitraan politik dalam teks berita dapat ditelaah melalui analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis memandang dirinya sebagai penelitian yang terlibat secara politis dengan suatu kebutuhan emansipatoris, seperti usulan untuk meningkatkan daya pemahaman berita dan teks hukum (Titscher, Meyer, Wodak, & Vetter, 2009:240). Dengan menggunakan paradigma kritis, model analisis ini dianggap mampu membongkar 'sesuatu' di balik teks. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna (Eriyanto, 2012:6). Artinya, teks tidak hanya dipandang sebagai teks semata. Teks harus juga dipandang sebagai pertarungan kekuatan, seperti pencitraan politik dan ideologi.

Selain itu, peneliti dalam riset analisis wacana kritis harus memiliki sikap kritis atau berparadigma kritis. Peneliti analisis wacana kritis harus memandang pilihan bahasa itu sebagai cerminan niat, ideologi, dan pikiran seseorang (Rahimi & Riasati, 2011). Lebih khusus, van Dijk (2008:65) menjelaskan bahwa penganalisis mesti menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan diperankan, direproduksi, atau dilegitimasi oleh teks dan percakapan kelompok atau institusi yang dominan.

Surat kabar *Harian Fajar* dijadikan sebagai objek penelitian karena (1) surat kabar ini merupakan media yang cukup besar di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, (2) aktual dalam pemberitaan politik dan (3) memiliki relasi tertentu dengan pemerintah. Ada tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur sebagai partisipan politik pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2012. *Pertama*, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (*incumbent* [Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel]). *Kedua*, Ilham Arief Sirajuddin (Walikota Makassar)-Aziz Qahar Muzakkar (Anggota DPR RI). *Ketiga*, Andi Rudiyanto Asapa (Bupati Sinjai)-Andi Nawir Pasinringi (Bupati Pinrang).

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur mikro teks

berita politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2012 di surat kabar *Harian Fajar* dan ditinjau dari aspek kognisi sosialnya. Dengan demikian, dapat diketahui modus pencitraan politik pada teks berita tersebut.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lebih khusus, dikategorikan ke dalam penelitian analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisis van Dijk (1988) yang menelaah struktur teks dan kognisi sosialnya. Penelitian ini menelaah dimensi struktur teks, khususnya pada struktur mikronya. Untuk keperluan analisis, ada kemungkinan untuk membedakan proses kognitif atau praktik sosial dengan komunikasi tekstual dan struktur berita (van Dijk, 1988:9).

Van Dijk mengelompokkan elemen-elemen wacana (struktur mikro) ke dalam empat dimensi, sebagaimana yang diuraikan Eriyanto (2012:228–229) dari berbagai sumber yang ditulis oleh van Dijk. *Pertama*, dimensi semantik yang melihat makna yang ditekankan dalam teks berita (latar, detil, maksud, dan pranggapan). *Kedua*, dimensi sintaksis yang melihat struktur kalimat yang dipilih (bentuk kalimat, koherensi [kondisional dan pembeda] dan pengingkaran). *Ketiga*, dimensi stilistik yang melihat pilihan kata yang dipakai (leksikon). *Keempat*, dimensi retorik melihat cara-cara penekanan dalam teks berita (grafis).

Sumber data penelitian berupa teks berita di surat kabar *Harian Fajar* pada masa kampanye Pilgub Sulsel 2012, yakni pada edisi terbit September–Oktober 2012. Data dikumpulkan melalui tiga tahapan, yaitu (1) dokumentasi, (2) teknik baca-simak dan (3) pencatatan. Peneliti mengumpulkan data lapangan di lokasi, yakni langsung mengamati teks berita. Artinya, sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, yaitu menggunakan lingkungan yang alamiah. Data dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam rentang waktu September 2012–Februari 2013. Selain itu, peneliti sebagai instrumen kunci, yakni mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi atau dengan kata lain menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi (Creswell, 2014:261).

Analisis data digunakan berdasarkan tahapan analisis Miles & Huberman (1994:10–12), yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data penelitian dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan pengamatan. Cara ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu, digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi

yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data sejenis dari sumber data di lingkup yang berbeda.

## Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memaparkan struktur mikro teks berita politik Pilgub Sulsel 2012 dalam surat kabar *Harian Fajar* untuk mengetahui pencitraan para partisipan politik, maka hasil penelitian ini diklasifikasi menjadi 11 bagian berdasarkan elemen-elemen struktur mikro teks berita, yaitu (1) latar, (2) detil, (3) maksud, (4) pranggapan (5) bentuk kalimat, (6) koherensi, (7) koherensi kondisional, (8) koherensi pembeda, (9) pengingkaran, (10) leksikon dan (11) grafis. Pada pemaparan hasil penelitian, masing-masing elemen diwakili satu sampel berita yang dipilih dalam jangka periode terbit September—Oktober 2012.

**Pertama**, latar. Latar merupakan elemen yang dapat dilihat secara sepintas. Latar tertentu digunakan oleh pembuat teks berita untuk menentukan pandangan khalayak. Seperti yang tampak pada data berikut.

“Kemesraan itu tampak saat Syahrul yang mendampingi mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berkunjung ke Bone. Syahrul dan JK dijamu di rumah jabatan Bupati Bone.”

Data (1) yakni berita utama rubrik Pemilukada edisi Selasa 18 September 2012 dengan judul “Syahrul-Idris Mesra di Depan JK”. Latar yang mendasari wartawan dalam berita tersebut yakni menampilkan hubungan internal DPD Partai Golkar yang kembali membaik. Sebagaimana diketahui bahwa Syahrul Yasin Limpo merupakan *incumbent* pada Pilgub Sulsel 2012.

**Kedua**, detil. Detil merupakan elemen yang menginformasikan keterangan secara lengkap dan panjang lebar. Jika informasi dianggap tidak menguntungkan bagi penulis teks berita, maka informasi disampaikan dalam jumlah yang sedikit.

“Bila perlu, lanjutnya, itu akan diiklankan di media massa. Kita akan buka, seperti apa hasil pemeriksaan dokter terkait jantung, terkait paru-paru, terkait darah, terkait narkoba, dan aspek-aspek kesehatan lain yang memang penting diketahui publik terkait kesehatan calon pemimpinnya,” imbuh Selle.

Data (2) merupakan teks berita politik edisi Selasa 25 September 2012. Kalimat tersebut menginformasikan keterangan mengenai semua hasil pemeriksaan dokter yang akan memperkuat kondisi pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahar Mudzakkar. Selle merupakan juru bicara pasangan tersebut.

**Ketiga**, maksud. Elemen ini hampir sama dengan detil. Jika dianggap menguntungkan penulis teks berita, maka item informasi akan disampaikan secara eksplisit, namun tidak mendetil. Sebaliknya, jika informasi dianggap merugikan, maka item informasi akan disampaikan secara implisit.

“Mantan anggota DPR-RI itu mengusap rambut SYL dan memberinya wejangan. Berangkat ke KPU, Syahrul serta Agus dilepas dengan salawat badar.”

Data (3) merupakan teks berita di edisi Sabtu 15 September 2012 yang berjudul “Awal Pilgub Damai”. Dalam berita tersebut, perjalanan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dinarasikan lebih mendapat dukungan dari keluarga dan komunitas agama. Dibanding dengan narasi perjalanan pasangan lain yang dinarasikan sekadarnya saja. Bahkan ada pasangan yang tidak dinarasikan secara eksplisit.

**Keempat**, pranggapan. Pranggapan digunakan penulis teks berita untuk mendukung makna teks. Pranggapan ditandai dengan keberadaan premis yang dipercaya kebenarannya.

“Misalnya di Tana Toraja, dalam bersosialisasi Aziz tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Toraja. Jadi, walaupun isu syariat Islam dikembangkan di sana untuk menjegal, Aziz bisa menjawab itu melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat, kuncinya.”

Data (4) merupakan teks berita edisi Selasa 9 Oktober 2012. Kalimat kedua merupakan pranggapan untuk mendukung makna pernyataan pertama, yakni meskipun terdapat kendala, Aziz Qahhar Mudzakkar dapat mengatasinya dengan komunikasi yang baik.

**Kelima**, bentuk kalimat. Bentuk kalimat aktif dan pasif dapat menentukan posisi seseorang dalam sebuah peristiwa. Pokok ide yang dianggap penting ditempatkan di awal kalimat. Hal itu dapat menunjukkan bagian yang difokuskan/ditonjolkan oleh penulis teks berita.

“Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (kiri), Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (kanan) dan pasangan Garuda-Na (bawah) saat tiba di Private Care Center RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Minggu, 23 September 2012.”

Data (5) merupakan teks berita edisi Senin 24 September 2012. Kalimat itu menunjukkan pasangan yang ditonjolkan dengan menempatkannya di bagian awal, sedangkan pasangan yang lainnya ditulis setelahnya.

**Keenam**, koherensi. Koherensi merupakan elemen yang

menggambarkan cara penulis teks berita menghubungkan atau memisahkan beberapa peristiwa. Bentuk koherensi yang dimaksud seperti “dan”, “tetapi”, “karena”, “meskipun”, dan “lalu”.

“Saya mendaftar bukan untuk kekuasaan, tetapi semata memperbaiki kehidupan rakyat.”

Data (6) merupakan teks berita politik di edisi Sabtu 15 September 2012. Pernyataan “saya mendaftar bukan karena kekuasaan” dan “semata memperbaiki kehidupan rakyat” merupakan dua pernyataan yang berbeda. Gabungan dua pernyataan tersebut membentuk pencitraan tertentu karena ditengahi bentuk koherensi “tetapi”.

**Ketujuh**, koherensi kondisional. Koherensi kondisional menunjukkan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Anak kalimat hanya berfungsi sebagai penjelas, sehingga ada atau tidaknya anak kalimat, tidak akan memengaruhi maksud inti kalimat. Jadi, kalimat penjelas menjadi cerminan kepentingan penulis teks berita. Anak kalimat ditandai dengan pemakaian kata “yang”.

“Ketua DPD I Golkar yang piawai berorasi itu cukup sukses mengundang simpati pendukung.”

Data (7) merupakan teks berita politik edisi Sabtu 15 September 2015. Pada kalimat tersebut, terdapat anak kalimat yang ditempatkan di tengah kalimat, yaitu “yang piawai berorasi”. Anak kalimat tersebut memberikan efek positif kepada Ketua DPD I Golkar (Syahrul Yasin Limpo).

**Kedelapan**, koherensi pembeda. Koherensi pembeda menunjukkan dua pernyataan yang ingin dibedakan oleh penulis teks. Pembedaan ini akan membentuk pemaknaan positif atau negatif bagi pembaca. Koherensi pembeda ditandai dengan penggunaan kata “dibandingkan” atau “sebaliknya”.

“Pada beberapa kunjungan Gubernur Sulsel ini, di Kabupaten Bone, Idris kerap tidak berada di daerah in dan memilih menghadiri kegiatan dinas di Jakarta. Sebaliknya, saat Ilham Arief Sirajuddin berkunjung ke Bone, saat pelaksanaan halal bi halal. Idris Galigo menyambut kedatangan Wali Kota Makassar yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel itu di rumah jabatan Bupati Bone.”

Data (8) merupakan teks berita politik edisi Selasa 18 September 2012. Dua kalimat mendeskripsikan sikap Idris Galigo sebagai Bupati Bone yang berbeda saat menjamu Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin.

**Kesembilan**, pengingkaran. Pengingkaran menunjukkan sikap penulis teks atau tokoh yang digambarkan seolah menyetujui sesuatu,

padahal dia tidak setuju. Hal tersebut dilakukan dengan menampilkan argumen yang dapat menyangkal persetujuannya.

“Dia mengakui ikut dalam massa yang mengantar pasangan IA saat mendaftar ke KPU beberapa waktu yang lalu, namun Zamanjuddin mengaku keikutsertaannya tidak menggunakan atribut Golkar melainkan atribut Pemuda Pancasila”

Data (9) merupakan teks berita edisi Senin 1 Oktober 2012. Kalimat tersebut menunjukkan adanya pengingkaran yang dilakukan oleh Zamanjuddin sebagai anggota tim sukses dari pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar.

**Kesepuluh**, leksikon. Leksikon dipakai penulis teks berita dalam pemilihan kata untuk menyikapi suatu peristiwa. Pilihan kata menunjukkan tujuan atau ideologi tertentu.

IA Kejar Kemenangan di Bantaeng

Data (10) merupakan judul berita edisi Minggu 13 Oktober 2012. Pilihan kata “kejar kemenangan” mencitrakan optimisme Ilham Arief Sirajuddin.

**Kesebelas**, grafis. Grafis digunakan untuk menonjolkan bagian-bagian yang dianggap penting, seperti pemakaian huruf tebal, huruf miring, atau tampilan berupa tabel dan gambar.

“Dia mengambil posisi tepat di tengah-tengah (*possina*) masjid untuk shalat”

Data (11) merupakan teks berita edisi Sabtu 15 September 2012. Referen kalimat tersebut mengacu pada Syahrul Yasin Limpo. Kata “*possina*” (pusat) sebagai bahasa daerah digunakan agar lebih dimaknai penting oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

## Pembahasan

Pencitraan politik merupakan hal penting yang diinginkan calon gubernur dan wakil gubernur di surat kabar *Harian Fajar*. Akan tetapi, sangat tidak memungkinkan jika proses produksi berita dilakukan secara langsung oleh para calon. Oleh karena itu, penulis teks berita memegang peranan penting dalam memberikan pencitraan politik kandidat tertentu kepada publik. Secara tradisional, sifat sosial dalam hubungan tersebut dapat diperhitungkan karena partisipan (produsen dan penerima) berperan sebagai aktor sosial yang spesifik dalam konteks sosial (van Dijk, 1994:108). Dengan demikian, posisi wartawan atau penulis teks berita sangat menentukan proses pembentukan teks berita, karena hal itu dapat



menghubungkan masyarakat sebagai penerima berita dan teks sebagai pembawa pencitraan politik. Aspek itu disebut sebagai kognisi sosial (van Dijk, 1988:95).

Kognisi sosial didefinisikan sebagai sistem yang berkaitan dengan representasi sosial, sebuah sistem yang mencakup seperangkat strategi untuk memanipulasi interpretasi sosial, interaksi, dan wacana secara efektif (van Dijk, 1990:166). Contoh representasi sosial adalah penampilan, asal, tujuan sosial ekonomi, dan kepribadian.

Interpretasi sosial, interaksi atau wacana dalam berita dapat dipahami berdasarkan suatu skema, yaitu kerangka mental penulis teks berita berupa gambaran mental, pengetahuan, dan penilaian suatu peristiwa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Skema tersebut berpengaruh terhadap pembentukan pencitraan politik calon gubernur dan wakil gubernur dalam berita. Skema yang dimaksud dapat didasarkan pada skema diri (*self scheme*), skema peran (*role scheme*) dan peristiwa (*event scheme*) (Augoustinus & Walker, 1995:38–42).

Untuk menafsirkan pengaruh kognisi sosial berdasarkan ketiga skema tersebut, perlu dikaitkan dengan situasi dan latar belakang produsen teks berita dan individu sasaran pencitraan. Situasi dan latar belakang yang dimaksud adalah posisi produsen teks berita (*Harian Fajar*) dan posisi atau jabatan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan untuk masa jabatan 2013–2018.

### ***Skema Diri***

Skema diri berkaitan dengan cara diri penulis teks berita dipandang oleh orang lain atau komunitasnya. Penulis teks berita atau jajaran redaksi berada dalam lingkungan perusahaan surat kabar yang mempunyai afiliasi dengan pejabat pemerintah. Secara historis, surat kabar *Harian Fajar* didirikan oleh tokoh-tokoh provinsi (Alwi Hamu dan Muhammad Jusuf Kalla) yang tentunya membuat redaksi surat kabar juga akan lebih mementingkan pejabat-pejabat lingkup provinsi (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang). Demikian juga sebaliknya, ia akan mengabaikan calon yang dianggap tidak berelasi secara tidak langsung dengan redaksi surat kabar *Harian Fajar* (Andi Rudyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi). Skema diri ini memengaruhi kualitas elemen-elemen struktur mikro pencitraan politik dalam teks berita Pilgub Sulsel 2012.

### ***Skema Peran***

Skema peran merupakan cara penulis teks berita memandang dan menggambarkan peran individu yang akan ditampilkan dalam berita.

Ditinjau dari skema peran, penulis teks berita menempatkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar secara proporsional dan signifikan dalam teks berita. Hal itu disebabkan karena *Harian Fajar* merupakan surat kabar yang cakupan penyebarannya meliputi provinsi Sulsel dan berpusat di Makassar sebagai ibukota provinsi. Sebagai surat kabar provinsi, redaksi *Harian Fajar* cenderung menonjolkan individu yang memiliki posisi pada tataran provinsi, dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang sebagai *incumbent* pada Pilgub Sulsel 2012. Begitupula dengan Ilham Arief Sirajuddin yang pada saat masa kampanye menjabat sebagai walikota di Makassar, kota tempat redaksi *Harian Fajar* beroperasi. Skema peran ini juga memengaruhi kualitas elemen-elemen struktur mikro pencitraan politik dalam teks berita Pilgub Sulsel 2012.

### ***Skema Peristiwa***

Skema peristiwa merupakan tampilan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi produksi teks berita. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang terkait langsung dengan masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini, pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, memiliki potensi yang lebih besar untuk memunculkan peristiwa-peristiwa yang dapat diliput oleh wartawan. Hal tersebut berbeda dengan pasangan Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi yang berposisi sebagai kepala daerah (Sinjai dan Pinrang). Skema peristiwa ini memengaruhi kuantitas penggunaan elemen-elemen struktur mikro dalam teks berita Pilgub Sulsel 2012.

Dengan demikian, skema kognisi sosial menyebabkan munculnya penggunaan elemen-elemen struktur mikro teks berita. Ditinjau dari skema diri, skema peran dan skema peristiwa, penggunaan elemen-elemen struktur mikro teks berita cenderung menampilkan dan menggambarkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar dalam menampilkan pencitraan politik mereka secara dominan. Demikian juga untuk pasangan Andi Rudyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi yang secara kuantitas dan kualitas pencitraan politiknya tidak banyak ditampilkan dalam teks berita politik surat kabar *Harian Fajar*. Jika ketiga pasangan tersebut ditampilkan secara bersamaan dalam suatu penggunaan elemen, maka yang ditampilkan terlebih dahulu secara berturut-turut adalah pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, kemudian yang terakhir Andi Rudyanto Asapa-Andi

Nawir Pasinringi. Berbagai hal tersebut memberikan efek pencitraan politik tertentu kepada masing-masing pasangan calon.

## Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, terdapat pencitraan politik yang dilakukan oleh penulis teks berita. Pencitraan tersebut dapat dilihat berdasarkan elemen-elemen struktur mikro teks yang dirumuskan van Dijk, yaitu (1) latar, (2) detil, (3) maksud, (4) pranggapan (5) bentuk kalimat, (6) koherensi, (7) koherensi kondisional, (8) koherensi pembeda, (9) pengingkaran, (10) leksikon dan (11) grafis. Penggunaan elemen-elemen tersebut dipengaruhi oleh skema kognisi sosial, yaitu skema diri, skema peran dan skema peristiwa. Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dan Ilham Arief Sirajudin-Aziz Qahhar Mudzakar lebih banyak dicitrakan secara positif dibandingkan dengan pasangan Andi Rudyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi pada teks berita politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2012 di surat kabar *Harian Fajar*.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada (1) penulis teks berita, editor ataupun redaksi berita hendaknya tetap objektif dan berimbang agar pembaca teks dapat mengetahui seluruh partisipan politik secara komprehensif, (2) pembaca tetap mencermati teks berita yang diterbitkan dengan melihat elemen-elemen struktur mikro dalam teks berita dan (3) peneliti berikutnya dapat meneliti struktur mikro teks di jenis media massa yang lain dengan menggunakan ancangan teori yang sama atau berbeda.

## Daftar Pustaka

- Augoustinus, M. & Walker, I. 1995. *Social Cognition: An Integrated Introduction*. London: SAGE Publication.
- Baran, S.J. 2008. *Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya* (jilid 1 edisi 5). Terjemahan S. Rouli Manalu. 2012. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. 2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryati. 2013. *Pencitraan Politik Menjelang Pemilu 2014*. *Jurnal Observasi*, 11 (2): 173–190.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications Inc.

- Rahimi, F. & Riasati, M.J. 2011. *Critical Discourse Analysis: Scrutinizing Ideologically-Driven Discourses*. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (16): 107–112.
- Roekhan. 2010. *Kekerasan Simbolik di Media Massa*. 38 (2): 253–265, (sastra.um.ac.id), diakses 6 September 2015.
- Sudibyo, A. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKiS.
- Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R., & Vetter, E. 2000. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Terjemahan Abdul Syukur Ibrahim (ed). 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- van Dijk, T.A. 1988a. *News Analysis: Case Studies of International and National News in The Press*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- \_\_\_\_\_. 1988b. *News as Discourse*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- \_\_\_\_\_. 1990. Social Cognition and Discourse. Dalam Howard Giles & Peter Robinson (eds.), *Handbook of Language and Social Psychology*. New York: John Wiley & Sons.
- \_\_\_\_\_. 1994. Discourse and Cognition in Society. Dalam David Crowley & Davis Mitchell (eds.), *Communication Theory Today*. Cambridge: Polity Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.

# WACANA GOSIP SEBAGAI STRATEGI HEGEMONI

**Tadkiroatun Musfiroh**

Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia  
Jurusan PBSI FBS Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRAK

*Wacana gosip merupakan wacana verbal dengan power negatif yang besar. Wacana ini memiliki perangkat yang relatif kompleks, relatif membawa kesenangan, tetapi mengandung risiko bahaya yang besar terkait identitas dan reputasi. Oleh karena power negatifnya tersebut, wacana gosip dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan. Strategi yang digunakan sebagai strategi hegemoni adalah labelling, empati dua muka, pencitraan, dan manipulasi ideologi. Dalam kondisi tertentu, strategi tersebut efektif, tetapi adakalanya tidak efektif karena faktor kontradiksi yang muncul dalam diri pembuat gosip.*

**Kata kunci:** wacana gosip, strategi hegemoni, pencitraan, *labelling*,

## Pengantar

Wacana verbal pada hakikatnya adalah eksekusi ujaran yang memiliki tiga lapisan daya. Ketiganya menjalin berkelindan tak terpisahkan. Berwacana berarti menyajikan satuan lingual yang berdaya makna, berdaya maksud, dan berdaya efek (lihat Searle, 1962). Seseorang berbicara, tidak menyajikan aspek verbal, sintaksis, dan semantik saja,

tetapi juga menyampaikan daya maksud yang dapat berpengaruh pada orang lain, bahkan orang banyak. Tidak berlebihan jika Wodak (1996) mengatakan bahwa wacana adalah bentuk perilaku sosial.

Sebagai bentuk perilaku sosial, wacana tidak netral, karena daya maksud wacana selalu berpihak pada pewacana. Selalu ada ideologi yang secara terang-terangan atau diam-diam menyusup ke dalam teks. Oleh karena itu, wacana dapat dimanfaatkan untuk apa pun oleh penciptanya, termasuk dan terlebih wacana gosip.

Wacana gosip memiliki daya jelajah yang luas. Dalam setiap kegiatan, formal maupun informal, wacana gosip muncul dengan berbagai versinya. Di ruang rapat, di meja makan, di lapangan tenis, bahkan di kursi pesawat, gosip muncul silih berganti. Kemunculannya pun khas, yakni tidak mempedulikan sinkron atau tidak sinkronnya gosip dengan realita. Gosip muncul begitu saja sebagai wacana yang sulit dilacak realita pembangunnya.

Wacana gosip dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan konsumen menerima dengan logika mereka. Oleh karena itu, penciptaan wacana gosip membutuhkan perangkat wacana yang kompleks dan canggih, bahkan mungkin lebih canggih daripada wacana faktual. Seperti dinyatakan oleh Keanne (2003: 240) wacana gosip merupakan genre yang memiliki kelindan seperti pori-pori yang tidak terpisahkan dengan wacana yang lain.

Gosip memang wacana, yang karenanya ciri-ciri kewacanaan yang dapat dianalisis secara kritis. Sebagai wacana, gosip juga terkait dengan permasalahan sosial, memiliki relasi kekuasaan, terkait dengan budaya dan masyarakat secara dialektis, bekerja secara ideologis, terkait historisnya, hubungan antara teks dan masyarakat tidak langsung (melalui mediasi), analisis terhadapnya bersifat interpretatif dan eksplanatoris, serta merupakan bentuk dari perilaku sosial penuturnya (Fairclough & Wodak, 1997; Van Dijk, 2015).

Dewasa ini, wacana gosip hadir dalam sendi kehidupan termasuk di dunia kerja. Perang wacana seringkali tidak terelakkan. Gosip bahkan digunakan sebagai senjata. Gosip dimanfaatkan sebagai senjata pembangun citra, baik citra diri maupun lawan politik. Dengan demikian, wacana gosip dalam perspektif analisis wacana kritis bukan sekedar obrolan tentang orang lain atau cerita negatif seseorang atau pergunjangan (KBBI, 2015), melainkan sebuah teks yang dikonstruksi sedemikian rupa demi memenuhi tujuan tertentu secara efektif. Dalam batas tertentu, wacana gosip, bahkan, terkait dengan hegemoni.

Topik ini menarik, karena wacana gosip konon memiliki pengaruh yang kuat. Dalam artikel "*The Power Gossip and Rumour Have in Shaping*

*Online Identity and Reputation: A Critical Discourse Analysis*” Nycyk (2015) menyatakan bahwa gosip dan rumor terkait erat dengan hegemoni. Gosip dimainkan orang melalui media online untuk membujuk pembaca, mempercayai informasi yang berbahaya tentang lawan politik. Gosip dan rumor digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan reputasi lawan politik. Riset di atas membuktikan bahwa wacana gosip (dan rumor) memiliki daya besar dalam mempengaruhi persepsi publik. Wacana gosip tidak lagi berbicara tentang perspektif. Lebih dalam lagi, wacana gosip berbicara tentang migrasi keyakinan, perpindahan ideologi yang “*malik grembyang*”.

Menurut Besnier (2009: 14), analisis gosip sebagai wacana harus memperhitungkan dinamika dan pergeseran sifat kategori, hubungannya dengan bentuk-bentuk wacana serta aksi sosial yang lain. Hal ini karena wacana gosip memiliki perguliran yang sulit diramalkan sehingga sekali kita mengikuti wacana tersebut, kita tidak bisa berhenti sampai menemukan kebenarannya. Wacana gosip ini telah menjadi topik bahasan yang melibatkan banyak disiplin dan subdisiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, sosiolinguistik, dan analisis wacana kritis.

## **Pembahasan**

Gosip menurut Besnier (2009: 12-13), adalah pertukaran informasi antara orang pertama dan kedua tentang orang ketiga, tanpa kehadiran orang ketiga yang sedang dibicarakan. Gosip dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan sering dihentikan karena dianggap sebagai cermin moral rendah. Ketidakhadiran orang ketiga dalam lingkaran gosip, menjadikan gosip mudah bergulir dan akhirnya menjadi fenomena umum. Perguliran gosip kadang sulit dikendalikan dan menjadi informasi yang penting. Gosip tentang skandal gedung putih, misalnya, mula-mula samar tetapi akhirnya merebak dan terbukti.

Sebagai wacana, gosip menjadi produksi dan konsumsi berbagai kalangan. Hasil riset menunjukkan bahwa gosip berkaitan dengan reputasi, prestise, moral, budaya, dan politik. Gosip bukan monopoli pekerja, tetapi telah menjadi masalah serius para pendidik dan tokoh agama di dunia (Besnier, 2009: 94). Hal ini mengindikasikan, gosip telah merambah ke segala sendi dan dimensi kehidupan.

Bagaimana gosip memiliki daya dan potensi? Kajian Nycyk (2015) membuktikan bahwa gosip (dan rumor) memiliki potensi bahaya yang besar (yang mungkin lebih besar daripada potensi bahaya wacana genre lain). Gosip bukan hanya menimbulkan kemarahan, sakit hati, dan keinginan untuk membalas dendam, lebih dari itu, gosip (dan rumor) juga dapat mengakibatkan stigma dan mempermalukan orang-orang yang

menjadi korbannya. Identitas dan reputasi mereka dinilai negatif.

Bagaimana gosip dapat dijadikan strategi hegemoni? Fakta dalam budaya kita menunjukkan bagaimana strategi ini digunakan secara masif. Dalam rapat kerja, pertemuan resmi, perkumpulan, strategi ini kerap dimanfaatkan orang atau sekelompok orang untuk membicarakan hal negatif orang ketiga. Gosip, bahkan, dimunculkan oleh atasan dengan alasan berkeluh-kesah, meluruskan aturan, atau membina bawahan.

## **Antara Kesenangan dan Bahaya**

Dalam budaya tertentu, gosip terkait dengan stigma. Orang mewarisi stigma dari orang tuanya dan gosip mengukuhkan hal itu. Kisah-kisah yang terbumbuhi sehingga menjadi gosip, dikenakan pada keturunan mereka, sehingga muncullah gosip, seperti “Si A itu anak haram. Ibu di A, yakni si B hamil dari laki-laki yang bukan suaminya” benar atau tidaknya gosip menjadi tidak terkontrol dan memunculkan stigma yang menyulitkan hidup banyak orang.

Membudayanya gosip disebabkan oleh rasa senang yang ditimbulkan. Penggosip menikmati kesenangan yang ditimbulkan dari gosip, terutama jika yang digosipkan terkena stigma sosial. Pihak yang digosipkan harus bekerja keras membuktikan kepada khalayak bahwa apa yang digosipkan itu salah. Sedikit saja tergelincir (Besnier, 2009: 95), orang akan percaya pada gosip yang beredar.

Di balik kesenangan bergosip, sebenarnya ada bahaya yang diam-diam mengancam. Menurut Murphy (1998: 510), gosip selalu terkait politik. Bahayanya adalah, semua orang tahu politik itu kotor, kejam, dan tidak jujur. Apalagi jika gosip dikaitkan dengan hukum. Gosip bisa membawa pelaku gosip ke ranah hukum. Tuduhan yang paling dekat adalah pencemaran nama baik dan pembocoran rahasia negara. Selain itu, sumber data gosip yang kerap labil dan bergulir, membawa dampak buruk bagi yang digosipkan, karena materi gosip akan meluas dan berpotensi membunuh karakternya.

Tujuan gosip bukanlah kebenaran meskipun mungkin berusaha memunculkan fakta ke permukaan. Bahaya utama gosip bagi permasalahan karakter adalah menipiskan karakter bagi para pelakunya dan membunuh karakter pihak ketiga. Meskipun berusaha memunculkan fakta, gosip tetap menyisakan atau menyembunyikan kebenaran demi kepentingan penggosipnya sendiri.

Partisipan gosip adalah orang-orang yang memiliki hubungan egaliter dan (kadang) intim. Ini etikanya. Oleh karena itu, gosip bersifat tertutup dan beredar pada kalangan terbatas. Etikanya, gosip seharusnya tidak bocor. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu yang memicu,



gossip bisa menjadi bocor dan menyebar kuat. Sms mesra yang salah kirim, misalnya, bisa memicu gossip karena penerima sms akan berusaha mencari tahu dan menemukan data baru. Pencarian ini dapat dipastikan terkait orang lain, dan sms menyebar dengan cepat.

Persebaran gossip seringkali menjadi tidak terkontrol. Gossip mungkin bermula dari omongan ajudan dengan teman sejawatnya, lalu teman sejawatnya curhat ke teman yang lain. Orang terakhir inilah yang memiliki peluang besar untuk menyebarkannya, apalagi jika orang tersebut merasa memiliki nara sumber, yakni ajudan sang pejabat. Perubahan situasi dari konteks pribadi ke konteks publik pun terjadi, dan gossip menyebar dengan cepat. Risiko dan bahaya gossip menjadi kuat ketika gossip dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Gossip dapat dimanfaatkan lawan untuk menutup akses seseorang dalam karir dan jabatan.

## **Wacana Gossip dan Hegemoni**

Wacana gossip merupakan fenomena multifaset yang hadir pada hampir setiap sendi kehidupan. Banyak orang tidak menyadari kehadiran wacana gossip ini. Salah satu tandanya adalah merebaknya curhat, keluh kesah, informasi sepihak, bisik-bisik politis, berita-berita miring yang didukung bukti foto dan ulasan yang meyakinkan. Konsumen gossip seringkali tidak menyadari unsur “interpolasi” di dalam gossip. Akan halnya pelaku dan pemercaya gossip, bahkan, mengira bahwa upaya “pelurusan” adalah musuh ideologi.

Bagaimana wacana gossip terkait hegemoni? Para ahli analisis wacana kritis berpendapat wacana tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Michael Foucault, Teun Van Dijk, dan Fairclough (1995; 2003) kesemuanya mengaitkan antara wacana dan kekuasaan. Ketiganya membicarakan aspek-aspek fungsional politis dan peranan strategis, serta memfokuskan pembahasannya pada fungsi dan peranan wacana terkait dengan kekuasaan (hegemoni). Foucault, bahkan, mengaitkan wacana dengan politik, kedaulatan, dan kekerasan. Buah pikiran Foucault tentang wacana dan kekuasaan diinterpretasikan dan diulas-ulang oleh penerusnya dalam *Foucault on Politics: Security and Wars* (2008).

Wacana gossip sebagai bagian dari wacana, juga memiliki hubungan ganda dengan hegemoni. Pertama, praktik hegemonik dan perjuangan hegemonik mengambil bentuk berwacana gossip, baik gossip dalam interaksi lisan maupun tertulis. Sebagian praktik hegemoni terkait wacana gossip. Seperangkat wacana (gossip) secara implisit mewujudkan ideologi tertentu, pengetahuan dan keyakinan tertentu, serta hubungan khusus (lihat Fairclough, 1995: 94).

Kedua, wacana gossip sendiri merupakan bidang hegemoni budaya,

dan hegemoni kelas atau kelompok masyarakat. Hegemoni budaya dalam lingkup wacana gosip juga memiliki relasi yang berbeda. Pelaku gosip mungkin bukan pemegang kekuasaan, tetapi bisa jadi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penguasaan. Kita menyebutnya sebagai pembisik. Meskipun memiliki kedudukan yang tidak tinggi secara formal, pembisik memiliki otoritas terhadap pihak yang dibisiki. Pembisik sesungguhnya adalah pelaku, yakni perilaku wacananya didasarkan pada praktik-praktik yang tidak seimbang. Dalam praktik medis tradisional, misalnya, dokter melakukan praktik konselor, tetapi tidak demikian dalam kasus lain. Menurut Fairclough (1995: 94) hegemonik mungkin perlu diperjuangkan atau direkonstruksi ulang.

Wacana, kaitannya dengan hegemoni, seperti dinyatakan Fairclough (2003), juga terkait dengan berbagai variasinya. Dalam dunia kekuasaan yang relatif steril seperti kampus pun, wacana gosip (dengan variasi rumor, fitnah, atau isu) hadir dalam bentuk yang lebih “ilmiah” dan “terbungkus”. Sasarannya adalah orang atau kelompok yang berseberangan, bahkan mungkin orang yang dianggap tidak akomodatif terhadap keinginan pelaku. Konsumennya adalah orang atau kelompok yang peka terhadap isu negatif, mudah percaya pada stigma, baik dalam lingkup ideologi yang sama maupun berbeda.

### **Gosip sebagai Strategi Hegemoni**

Gosip sebagai strategi, berarti cara yang ditempuh dengan membuat dan memanfaatkan gosip demi meraih tujuan tertentu. Tujuan tersebut dengan hegemoni. Cara-cara tersebut terkait dengan indikator kerusakan nama baik, identitas, bahkan reputasi seseorang.

Observasi selama kurang lebih tiga tahun ini mengarah pada empat strategi gosip untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Temuan ini didasarkan pada data-data gosip verbal yang beredar dan diperoleh dari berbagai sumber. Satu topik gosip, dituturkan oleh minimal lima sumber dan dikuatkan dengan datang tertulis dengan media sms, whatsapp, dan BBM. Data disajikan setelah melalui proses pemilihan dan pemilahan, menghapus data yang tidak bersaksi, dan menghilangkan kata-kata yang bersifat emotif.

Analisis tekstual terhadap wacana gosip menunjukkan bahwa diksi, kohesi-kohherensi, struktur dan modalitas yang digunakan, setidaknya, mengacu pada labelling, pencitraan, empati dua muka, dan manipulasi ideologi. Labelling berarti memberikan label pada individu atau kelompok tertentu, pencitraan berarti membangun citra positif, empati dua muka berarti empati yang memiliki kontradiksi dengan eksekusi, dan manipulasi ideologi berarti rekayasa terkait kepercayaan

dan haluan pandang.

Analisis praktik kewacanaan juga menunjukkan bahwa produksi teks, penyebaran teks, dan konsumsi teks terkait dengan strategi *labelling*, empati dua muka, pencitraan, dan manipulasi ideologi. Strategi ini juga dikuatkan oleh analisis dimensi makro strukturalnya. Berikut ini wacana gosip yang dimaksud.

### **“Kurang Baik Soal keuangan” atau “KBSK”**

(1) “Sungguh dilema, jika saya mengangkat X, karena ada info dia kurang baik soal keuangan. (2) Jika saya tidak mengangkatnya, saya menyakitinya. (3) Jika saya mengangkatnya, tentu saya berdosa. (4) Inilah beratnya menjadi pemimpin, terkadang dibenci karena keputusan yang dilematis. (5) Saya harus ikhlas.”

### **“Saya Punya Alasan Kuat” atau “SPAK”**

Saya kuasa menolak hasil pemilihan dalam kondisi terpaksa. (2) Saya mengganti Y dengan alasan kuat. (3) Saya tahu bahwa Y membangun kerajaan dalam perusahaan. (4) (Ia) memanfaatkan divisinya sebagai ladang cari uang. (5) Semua kerja sama masuk kantongnya sendiri. (6) Semua tugas dilakukan sendiri. (7) Selain itu, keahlian Z paling sesuai untuk divisi itu.

### **“Akibat Kurang Ikhlas” atau “AKI”**

(1) Bukan saya mengingkari janji tetapi justru Pak Q yang kurang ikhlas menerima. (2) Jabatan baru ini mengharuskan beliau melepas tugas lama dan fokus pada tugas baru. (3) Pak Q tidak mau melepas. (4) Saya harus bagaimana? (5) Saya tidak berani mempertaruhkan perusahaan

### **“Karena Berbeda Golongan” atau “KBG”**

(1) Saya hanya perpegang pada agama. (2) Mereka berbeda keyakinan dengan kita. (3) Wajar saja kalau mereka tidak setuju dengan kebijakan Saya. (4) Biarkan saja mereka semaunya, tapi saja tetap lurus. (5) Tujuan kita hanya mengemban amanah.

### **“Karena Memalsu Umur” atau “KMU”**

(1) Saya tidak memandang orang itu dekat atau tidak. (2) Semua sama di mata hukum. (3) Z itu memalsu umur. (4) SDM tidak teliti. (5) Pembatalan mutasi itu penting. (6) Kita harus menciptakan disiplin aturan internal perusahaan.

## Strategi *Labelling*

Strategi *labelling* dapat dilihat pada wacana “KBSK” Pada wacana ini, Direktur Utama (selanjutnya disebut DU) memberikan label kepada bawahannya. *Labelling* itu dilakukan ketika DU batal mengangkat X sebagai manajer cabang, padahal dua hari sebelumnya, DU telah mengumumkan di hadapan rapat umum bahwa ia akan mengangkat X (sekarang kepala bagian) sebagai manajer cabang. Pembatalan itu menulsi banyak kritik. Di sinilah DU menggunakan strategi *labelling* dalam wacananya. Strategi ini dilakukan pada rapat khusus oleh DU tanpa kehadiran X.

Secara tekstual, penggunaan frase kurang baik soal keuangan pada kalimat (1) merupakan diksi-diksi untuk *labelling*, yakni melabeli X sebagai pihak yang tidak jujur. Frase ini memiliki makna yang luas dan multitafsir karena meskipun terasa halus (perhatikan penggunaan kata kurang sebelum baik) justru memiliki jangkauan tafsir yang luas. Kurang baik soal keuangan dapat ditafsirkan sebagai korupsi, manipulasi, penyalahgunaan wewenang keuangan, dan sebagainya.

Produksi teks KBSK melibatkan pihak ketiga, yakni pihak pemberi informasi. Pada level kecil, informasi ini langsung naik ke level redaksi. Tanpa proses negosiasi yang panjang, wacana KBSK lahir. *Labelling* diberikan tanpa pengolahan kewacanaan yang mencukupi. Strategi ini dikuatkan dengan tingkat penyebaran teks ke ranah yang relatif internal, dan konsumsi teks pun menjadi terbatas. Pada dimensi ini, strategi wacana gosip ini relatif tidak bocor, kecuali pada saat pengumuman pembatalannya sendiri.

Dimensi praktis sosial-budaya sebagai dinyatakan Fairclough (1995: 2003) juga muncul melalui strategi ini. Konteks di luar teks, yakni informasi tentang X yang tidak baik dalam keuangan cukup mempengaruhi lahirnya wacana ini. *Labelling* “KBSK” ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kualitas informasi yang terbatas (Jika kuat mungkin akan menunjuk pada indikator yang lebih jelas) Meskipun terbatas, konteks situasional justru kuat mempengaruhi, yakni situasi pada saat informan memberikan informasi kepada DU. Dilihat dari konteks institusi, wacana ini memang tidak seharusnya lahir. Seharusnya DU mempertimbangkan ulang validitas informasi. Di sinilah terlihat, gosip (sama sekali) tidak mempertimbangkan validitas informasi. Dengan bebas, *labelling* diberikan DU kepada X karena sistem budaya yang tidak lazim.

Pada wacana “Saya Punya Alasan Kuat” atau “SPAK” strategi *labelling* juga kembali dilakukan DU. Strategi ini juga terkait dengan penggantian personal dalam kekuasaan. Dalam konteks ini, DU tiba-tiba mengganti kepala divisi. Penggantian itu cukup menyita perhatian banyak pihak karena bertentangan dengan fakta pemilihan (Y terpilih

secara aklamasi) dan terkesan mendadak. Beberapa pertanyaan tentang penggantian itu ditolak DU. Satu bulan kemudian, karena protes yang terus dilakukan banyak pihak, pada saat rapat terbatas DU memunculkan wacana sebagai klarifikasi.

Secara tekstual, kalimat (1) hingga (6) pada “SPAK” merupakan wacana yang kohesif dan koheren. Kalimat (7) meskipun tampak agak sumbang, sejatinya masih terkait dengan topik yakni penggantian kepala divisi dari Y kepada Z. Y diganti karena alasan pada (3), (4), (5), (6), dan keberadaan Z pada kalimat (7). Keputusan DU mengganti Y dengan Z karena terkait kelakukan Y dan keberadaan Z. Apabila membaca teks di atas, orang akan memahami bahwa penolakan DU sangat meyakinkan. Diksi pada kalimat (3) hingga kalimat (6) merupakan *labelling* DU terhadap Y. *Labelling* itu dimunculkan dalam bentuk list-indikator, yakni makar pada kalimat (3), penyalahgunaan wewenang pada kalimat (4), korupsi pada kalimat (5), monopoli pada kalimat (6). Keempat indikator tersebut cukup meyakinkan sebagai *labelling*.

Secara kewacanaan, wacana SPAK diproduksi dalam lingkup internal dan tanpa klarifikasi atau hak jawab dari Y. Penyebaran teks ini dilakukan melalui personal dalam lingkaran informal dan menyebar. *Labelling* dari praktik kewacanaan ini tidak terlalu efektif karena DU mendapatkan perlawanan. Sangat mungkin, pemilih Y membuat strategi antihegemoni sehingga konsumsi teks ini menjadi menyempit.

Pada wacana “Akibat Kurang Ikhlas” atau “AKI” *labelling* diberikan DU kepada bawahannya demi menemukan alasan pembatalan jabatan kepada Q. Konteksnya adalah, DU berjanji pada Q akan memberikan jabatan baru di Pusat. Hal tersebut diketahui banyak orang. Faktanya, setelah waktu yang ditentukan, janji itu tidak ditepati. DU mengangkat orang baru. Reaksi publik terjadi. DU akhirnya melakukan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan dalam rapat, dalam posisi Q tidak di tempat. *Labelling* ini cukup efektif karena ada fakta dan konteks pendukung, yakni Q memiliki kegiatan yang cukup banyak.

Koherensi wacana “AKI” tidak selamanya ditandai dengan alat kohensi. Meskipun demikian, kesemuanya menunjukkan kepaduan wacana, yakni jabatan yang tidak jadi diberikan kepada Pak Q karena pak Q tidak mau melepas jabatan lama. Pada kalimat (1) jabatan tidak muncul secara eksplisit, tetapi muncul pengertiannya setelah kata menerima. Barulah pada kalimat (2) jabatan baru dan tugas baru muncul. Pada kalimat (3), jabatan baru tidak muncul tetapi tetapi terasa kehadirannya setelah kata melepas. Kalimat (4) dan (5) tetap terkait dengan topik dan menjadikan wacana di atas koheren.

*Labelling* pada wacana “Karena Berbeda Golongan” dimunculkan DU

untuk mempertahankan diri dari gempuran kelompok kritis. Kelompok ini perlu dilabeli sebagai “golongan” agar konsumen wacana menjadi berpihak kepada DU. Label “berbeda keyakinan” menjadi pembatas bagi kelompok kritis untuk tidak melakukan aksi lebih luas. Strategi ini menggunakan alat kohesi pronomina mereka (2), (3), dan (4) serta penggunaan diksi berbeda dan keyakinan pada kalimat (2). Penggunaan kata kita pada (2) dan (5) mengajak publik untuk memihak dan menyerta. Penyebaran teks ini relatif efektif karena publik akhirnya pecah. Konsumen percaya dan memegang label ini untuk menandai kelompok kritis. Dari dimensi keberwacanaan, wacana ini dipengaruhi oleh konflik antarkubu di luar DU. Dalam hal ini, DU memanfaatkan situasi tersebut. Selain itu, sistem sosial mendukung DU sebagai tokoh dalam kelompok mayoritas.

*Labelling* kelima dilakukan DU pada wacana “Karena Memalsu Umur” Wacana ini dimunculkan dalam situasi formal dan informal dengan maksud klarifikasi. Meskipun demikian, wacana ini akhirnya termasuk gosip karena fakta “memalsu umur” tidak pernah terklarifikasi. *Labelling* sebagai pemalsu umur diterima Z tanpa ada hak jawab. Strategi ini relatif efektif karena publik sebagian percaya dengan gosip ini. Ketidaksiuaian antara usia Z dengan ketentuan perpindahan karyawan, mendukung gosip ini. *Labelling* itu ditunjukkan dengan konstruksi makan umur pada kalimat (3).

## **Strategi Empati Dua Muka**

Pada wacana “KBSK” kalimat (2) “Jika saya tidak mengangkatnya, saya menyakitinya” memiliki makna simpati dua muka, karena di satu pihak menunjukkan empati di lain pihak menunjukkan *condition* yang membenarkan keputusan. Empati yang ditunjukkan pada klausa saya menyakitinya (2) dikontradiksikan dengan saya berdosa (3). Dengan demikian, kohesi jika dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan *condition* bagi terlaksananya *behaviour* di luar teks, yakni pembatalan pelantikan.

Strategi simpati dua muka pada wacana gosip “KBSK” dimunculkan karena DU berkepentingan memenuhi permintaan pembisiknya sekaligus menyelamatkan mukanya sendiri. Ciri negatif terhadap korban dipilih dari permasalahan yang peka secara ideologi, yaitu kejujuran dan korupsi. Informasi perihal korupsi si X sengaja diibandingkan demi melanggengkan umur wacana itu sendiri.

Strategi empati dua muka digunakan DU pada wacana “Akibat Kurang Ikhlas” . Pak Q digambarkan sebagai tokoh yang teringkari di satu pihak tetapi rakus di pihak lain. DU memunculkan dirinya sebagai pihak yang bersimpati tetapi sesungguhnya memberikan antipati dengan

memberikan gambaran yang bertentangan dengan simpati awalnya. Konteks situasi yang melingkupi wacana ini memang relatif kental karena Q juga memiliki kelompok yang berpengaruh. Wacana ini sesungguhnya memiliki risiko karena Q sangat mungkin memberikan klarifikasi.

## Strategi Pencitraan

Strategi pencitraan merupakan strategi yang paling banyak digunakan DU dalam wacana gosipnya. Pada wacana “KBSK”, penggunaan kata dilema dan dilematis, berdosa, menyakiti, berat, dibenci, ikhlas, merupakan kata-kata yang oleh pelaku dikenakan pada dirinya sendiri. Kata-kata ini berfungsi membangun citra diri pelaku sebagai direktur yang dalam keadaan serba sulit, di satu pihak menyakiti di lain pihak berdosa. Fungsi ini semakin ketika pelaku memunculkan kata dibenci (kalimat 4) dan ikhlas (kalimat 5). Citra yang dibangun sebagai pemimpin yang ikhlas menanggung akibat tergambar jelas dalam teks ini.

Strategi pencitraan diri pada wacana “SPAK” ditandai dengan penggunaan klausa saya kuasa pada (1), frase alasan kuat pada (2) klausa saya tahu. Satuan lingual tersebut merupakan kesatuan lingual yang dimanfaatkan pelaku untuk membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang punya kekuasaan, punya pengetahuan, dan punya alasan. Untuk menguatkan statemennya, DU menggunakan kalimat (3) hingga (6). Kalimat-kalimat tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa Y layak ditolak dan diganti. Modalitas kuasa pada kalimat (1) menunjukkan bahwa hasil pemilihan tidak lebih berkekuatan hukum daripada ketetapan dari DU sebagai Direktur Utama.

Pencitraan diri yang dimunculkan DU pada wacana “AKI” adalah citra pribadi yang adil dan tegas. Hal itu tergambar jelas dari teks dan kewacanaan. Penggunaan klausa “Bukan saya mengingkari janji” pada kalimat (1) dan kalimat (5) “Saya tidak berani mempertaruhkan perusahaan” menunjukkan bahwa apa yang dilakukan DU terhadap Q bukanlah pengingkaran melainkan ketegasan dan keadilan. Penggunaan negasi tidak pada berani sebelum mempertaruhkan menandai hal itu. Wacana gosip ini memiliki penyebaran yang relatif tidak luas (untuk tidak disebut sempit) karena rumor bahwa Q akan menerima jabatan baru telah terjadi dan Q memiliki kualifikasi jabatan tersebut.

Pencitraan diri sebagai strategi hegemoni kuat terlihat pada wacana “KBG”. DU secara jelas mencitrakan dirinya sebagai sosok yang agamis, seperti pada berpegang agama (kalimat 1), tetap lurus (kalimat 4), dan mengemban amanah (kalimat 5). Penggunaan kata ganti saya dimanfaatkan DU untuk menunjukkan bahwa yang menghadapi golongan yang berbeda itu utamanya adalah dirinya, sedangkan yang memegang keyakinan

adalah bersama atau kita. Pencitraan diri ini relatif efektif karena strategi *labelling* mendukung sense-nya sebagai pemimpin kelompok sekaligus pribadi yang dihormati dalam kelompok itu.

Pencitraan diri juga dilakukan DU pada wacana “KMU”. DU secara jelas menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak terpengaruh dengan kedekatan atau tidak. Baginya, orang yang salah harus diberi sanksi, seperti halnya Z yang batal mutasi karena umurnya belum mencukupi dan memalsu umur. Pernyataan pada kalimat (1) cukup eksplisit dalam pencitraan. Demikian halnya dengan kalimat (2), meskipun tidak menggunakan pronomina pertama tunggal, tetapi tetap menyiratkan. Kalimat (6), meskipun menggunakan pronomina kita, tetap mengacu pada citra diri DU sebagai pemimpin di dalamnya. Meskipun terlihat jelas pencitraan diri DU pada wacana KMU, strategi ini relatif tidak efektif karena DU ditandai publik sebagai pihak yang mudah terprovokasi oleh kedekatan. Munculnya gosip dan rumor adalah juga dari informasi orang terdekat tanpa melalui proses klarifikasi.

### **Strategi Manipulasi Ideologi**

Ideologi pun bermain dalam wacana “KBSK”. Penggunaan modalitas tentu pada kalimat (3) dan modalitas harus pada kalimat (5) pada “KBSK” merupakan modalitas perintah pada pelaku. Modalitas itu memberi ruang makna bahwa apa yang dilakukan Direktur hanya kewajiban dan keharusan. Ruang makna baru yang muncul adalah semua itu bukan keinginan Direktur.

Pada wacana “SPAK”, manipulasi diindikasikan oleh diksi. Penggunaan kata membangun dan kerajaan pada (3) memanfaatkan dan ladang pada (4), masuk kantong pada (5), dikerjakan dan sendiri pada (6), memorakkan keyakinan orang terhadap validitas pemilihan. Pemilihan sebagai perwujudan demokrasi belum tentu terbaik apabila yang dipilih justru orang yang memiliki ciri-ciri buruk sebagai pemakar, diktator, koruptor, dan monopolis.

Strategi manipulasi ideologi muncul kuat pada wacana “KBG”. Ideologi digunakan sebagai penyekat dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga publik percaya bahwa dasar kritik dari kelompok kritis adalah pertentangan ideologi. Inti masalah dari kritik dikaburkan bahkan dinafikan sehingga tidak ada satu pun yang mengenai pribadi DU. Meskipun demikian, tidak semua kelompok menjadi konsumen gosip ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wacana memiliki “pangsa pasarnya” masing-masing.



## Penutup

Wacana gosip muncul dan tersebar dalam hubungan yang egalitar dan tertutup. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu gosip menyebar ke ranah publik. Gosip kadang disengaja disebarkan untuk dimanfaatkan sebagai strategi mempertahankan kekuasaan. Sejatinya, wacana gosip itu memiliki risiko dan bahaya, meskipun mengandung kesenangan bagi pelakunya. Wacana verbal memiliki power negatif yang besar, terutama power untuk menghancurkan reputasi seseorang. Wacana ini memiliki perangkat yang relatif kompleks, dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan. Strategi yang digunakan sebagai strategi hegemoni adalah *labelling*, empati dua muka, pencitraan, dan manipulasi ideologi. Dalam kondisi tertentu, keempat strategi tersebut efektif, tetapi adakalanya tidak efektif. Ketidakefektifan gosip adalah apabila terdapat kontradiksi strategi dengan fakta yang terjadi. Oleh karena risiko yang cukup besar serta kemungkinan terjadi bumerang, penggunaan gosip sebagai strategi hegemoni tidak disarankan untuk dilakukan.

## Daftar Pustaka

- Besnier, Niko. (2009). *Gossip and the Everyday Production of Politics*. Hawaii: University of Hawai'i Press.
- Dunbar, Robin. (1997). *Grooming, Gossip, and the Evolution of Language*. London: Faber and Faber.
- Dynel, Marta. (2010). "Not hearing things – Hearer/listener categories in polylogues", *mediAzioni* 9, <http://mediazioni.sitlec.unibo.it>, ISSN 1974-4382.
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. New York: Longman Group.
- Fairclough, Norman. (2003). *Analysing Discourse Textual analysis for social research*. London: Routledge
- Nycyk, Michael. (2015). "The Power Gossip and Rumour Have in Shaping Online Identity and Reputation: A Critical Discourse Analysis." *The Qualitative Report* 2015 Volume 20, Number 2, Article 2, 18-32. Diunduh 13 November 2015
- Rosnow, Ralph L., and Gary A. Fine. 1976. *Rumor and Gossip: The Social Psychology of Hearsay*. New York: Elsevier

# BAHASA DAN REALITAS KELAS MENENGAH INDONESIA

**Dwi Budiyanto, M.Hum.**

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta  
e-mail: *matahati01@yahoo.com*

## ABSTRAK

*Penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mengalami lonjakan yang sangat besar. Diperkirakan kelas sosial ini telah berjumlah 130 juta penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dari kalangan kelas menengah ini tentu saja akan membawa banyak perubahan. Sebagai kelompok sosial yang memiliki daya beli ekonomi tinggi, pendidikan yang baik, dan status sosial yang diperhitungkan, kelas menengah seringkali membawa perubahan-perubahan signifikan bagi sebuah negara. Tulisan ini mengkaji pemakaian bahasa di kalangan kelas menengah Indonesia dan bagaimana bahasa yang digunakan memperlihatkan realitas kelas sosial ini. Jika periode sebelumnya (tahun 1980-an) terjadi pergeseran pemakaian bahasa dari bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia, terutama di kalangan keluarga muda kelas menengah perkotaan, saat ini pola itu bergeser lagi dari pemakaian bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau campuran Indonesia-Inggris. Stratifikasi sosial kebahasaan yang lebih bergengsi menjadi alasan, selain perkara-perkara teknis, seperti keefektifan dan keringkasan pesan. Selain itu, pemakaian bahasa*

*di kalangan kelas menengah Indonesia memperlihatkan realitas bahwa kelas menengah berkecenderungan semakin religius, memiliki perhatian yang besar terhadap keluarga dan anak, serta memiliki daya kritis dan kepedulian sosial-politik yang baik. Bahasa yang digunakan beraspirasi dan berorientasi pada cara pandang, nilai-nilai, serta perilaku kelas menengah yang lebih bergengsi, terkesan urban, bahkan kosmopolitan.*

**Kata kunci:** bahasa, kelas menengah

## **Pengantar**

Kelas menengah Indonesia ternyata tumbuh dengan cepat, terutama setelah berhasil melewati GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita US\$3000 pertahun pada 2010. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan penduduk kelas menengah Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per hari US\$2-20) telah mencapai 8-9 juta penduduk pertahun (Yuswohady, 2015: 5; Kasali, 2010: 21). Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini berkisar 130 juta penduduk. Proporsi jumlah penyebaran kelas menengah antara Jawa dan luar Jawa ternyata tidak signifikan. Berdasarkan data Susenas 2012, penduduk kelas menengah di luar Jawa sebesar 55 juta dan di Jawa sebesar 77 juta.

Kenaikan penduduk kelas menengah ini akan diikuti dengan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan cara pandang (*paradigm*), nilai-nilai (*values*), dan perilaku (*behavior*) sebagai implikasi dari perubahan Indonesia menjadi negara maju. Yuswohady (2015: 29) menjelaskan bahwa saat ini dan beberapa tahun ke depan akan terjadi perubahan cepat penduduk Indonesia menuju terbentuknya kelas menengah yang didorong oleh perubahan-perubahan fundamental. Perubahan-perubahan tersebut adalah naiknya daya beli dan tingkat ekonomi masyarakat, meningkatnya pendidikan yang menjadikan kelas menengah Indonesia lebih berpengetahuan (*knowledgeable*) dan beradab (*civilized*), dan kelas menengah akan makin terkoneksi satu sama lain dengan adanya teknologi sosial (*social technologies*).

Perubahan-perubahan di atas biasanya akan diikuti oleh kecenderungan berbahasa yang juga mengalami perubahan dan pergeseran. Hal ini memungkinkan terjadi sebab, sebagaimana dijelaskan Soedjatmoko (1996: 183-184), suatu bahasa mencerminkan perkembangan dan perubahan-perubahan sosial, karena bahasa memang merupakan alat komunikasi sosial. Oetomo (1996: 195-198) menjelaskan terjadinya pergeseran pemakaian bahasa kelas menengah Indonesia di dalam keluarga. Pada 1980-an ternyata telah muncul gejala penggunaan bahasa

Indonesia (ragam informal dengan interferensi bahasa Jawa) di rumah dan di lingkungan kelas menengah Indonesia. Pada beberapa keluarga di Jawa, sebutan *bapak* atau *ayah* dan *ibu*, berganti dengan sebutan *papa* dan *mama*. Bibi yang sebelumnya dipanggil *bulik* atau *budhe* beralih dipanggil *tante*, dan *paman* yang sebelumnya dipanggil *paklik* atau *pakdhe* kemudian beralih disebut *om*.

Kecenderungan tersebut terutama terjadi pada keluarga muda yang sedang beraspirasi pada mobilitas vertikal menuju kelompok masyarakat yang lebih mapan dalam kehidupan sosial-ekonominya (Oetomo, 1996: 196). Perubahan yang tampak sederhana tersebut ternyata menunjukkan kecenderungan kelompok kelas menengah Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia pada stratifikasi kebahasaan yang lebih tinggi dan bergengsi daripada bahasa daerah. Pemakaian kata sapaan yang berubah di atas, ternyata tidak terjadi dalam keluarga muda yang berasal dari etnik berbeda. Dalam keluarga yang suami-istri berasal dari etnik sama-sama Jawa juga mengalami kecenderungan yang sama. Ketika bahasa Indonesia telah menguat sebagai bahasa nasional, yang dianggap lebih bergengsi daripada bahasa daerah, gejala pemakaiannya yang berinterferensi dengan bahasa Inggris juga menunjukkan kecenderungan yang hampir sama; kelas menengah beraspirasi dan berorientasi pada komunitas yang dianggap lebih modern melalui bahasa yang digunakannya.

Ketika saat ini jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menunjukkan kenaikan yang sangat pesat, perubahan-perubahan cara pandang, nilai, dan perilaku mereka akan diikuti pada perubahan dalam pemakaian bahasa yang berbeda dengan kelas sosial lain. Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang wajar. Trudgill (2000: 23) menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan internal suatu masyarakat sesungguhnya terefleksikan dalam pemakaian bahasa mereka. Kelompok sosial yang berbeda, biasanya, akan menggunakan variasi bahasa yang berbeda pula.

Gejala-gejala di atas menarik dicermati karena tidak hanya berkaitan dengan pemakaian bahasa kelas sosial tertentu di masyarakat tetapi juga menunjukkan proses transformasi sosial yang menyertainya. Ia tidak hanya memperlihatkan terjadinya perubahan perilaku berbahasa tetapi juga menunjukkan gejala perubahan cara pandang, nilai, dan perilaku kelas menengah Indonesia. Pertanyaan yang dapat diajukan atas fenomena tersebut adalah (1) fitur-fitur bahasa seperti apa yang dibentuk oleh kelas menengah Indonesia akhir-akhir ini? (2) Fitur-fitur bahasa tersebut apakah menunjukkan cara pandang, nilai-nilai, serta perilaku yang merupakan karakter khas dan unik masyarakat kelas menengah Indonesia?

## Perkembangan Bahasa Kelas Menengah Indonesia

Ketika beberapa kepulauan di Nusantara telah memfungsikan dirinya sebagai pusat-pusat emporium yang berpengaruh pada abad XV, beberapa daerah mulai terhubung dalam kepentingan perniagaan yang saling menguntungkan. Malaka pada abad itu merupakan salah satu pusat emporium yang besar. Pada akhir abad XV telah terdapat banyak kota pelabuhan di Sumatera, Jawa, Maluku, dan pulau-pulau lainnya yang berfungsi sebagai pusat perdagangan daerah (Kartodirdjo, 2014: 10). Sumatera terkenal karena tekstil, emas, dan barang tenunan. Jawa merupakan penghasil dan pemasok beras terbesar. Sementara itu, Maluku – Ricklefs (2001: 27) menyatakan bahwa nama kepulauan ini pada hakikatnya berasal dari istilah para pedagang Arab bagi daerah tersebut, *jazirat al-muluk* atau ‘wilayah banyak raja’ – merupakan kepulauan rempah-rempah (*Spice Islands*) yang sangat terkenal.

Hubungan perdagangan tersebut akhirnya membutuhkan sarana komunikasi yang dapat saling menjembatani antar kepentingan. Ricklefs (2001: 59) mencatat bahwa kelompok-kelompok yang melakukan perniagaan laut dengan menggunakan bahasa Melayu dan Portugis sebagai *lingua-franca*-lah yang dapat berhasil menembus batas-batas bahasa tersebut. Jadi, sejak Malaka menjadi bandar perniagaan pada abad XV, bahkan mungkin sejak Sriwijaya berjaya (abad VII hingga XIII), bahasa Melayu telah digunakan dalam komunikasi antar pedagang di kepulauan Nusantara. Namun, menurut Oetomo (1996: 207) bahasa Melayu tidak pernah menjadi bahasa di ranah keluarga di bandar-bandar di kawasan yang asalnya bukan termasuk wilayah bahasa dan budaya Melayu. Itu artinya, pada era tersebut, bahasa Melayu hanya digunakan sebatas dalam kepentingan perdagangan.

Pada abad XVII bahasa Melayu tidak hanya digunakan untuk kepentingan perdagangan, tetapi juga digunakan dalam dunia kerja. Ketika gelombang imigran Tionghoa masuk ke wilayah Nusantara, terutama melalui Batavia, dalam jumlah besar, bahasa Melayu dipelajari sebagai pengantar. Pada 1719 tercatat sebanyak 7.550 orang imigran datang di Batavia dengan kapal *jung*. Sementara itu, pada 1739 jumlah imigran telah bertambah menjadi 10.574 orang (Daradjadi, 2013: 29). Interaksi komunitas Tionghoa dan komunitas Jawa pada akhirnya mengharuskan komunitas Tionghoa mengenal cara atau metode orang Jawa dan biasanya menggunakan bahasa Melayu, terutama Melayu kasar, sebagai *lingua franca* serta sedikit tahu bahasa Jawa (Carey, 2015: 40). Kecenderungan imigran Tionghoa mempelajari bahasa dan budaya Jawa mulai memudar setelah Geger Pacinan pada 1740–1743. Perang aliansi komunitas Tionghoa – Jawa melawan VOC selama tiga tahun lebih itu menimbulkan

kekhawatiran besar pihak kolonial Belanda. Oleh karena itu, Belanda memberlakukan *wijkenstelsel*, sistem pembatasan tinggal komunitas Tionghoa hanya di Pecinan, setelah sebelumnya mereka dapat berbaur dengan orang Jawa. Sejak saat itulah, seperti diungkapkan Oetomo (1996: 202), tidak ada alasan kuat bagi komunitas Tionghoa untuk mempelajari tingkat-tingkat bahasa Jawa yang dulu menjadi kelaziman.

Sebagai gantinya, mereka mulai intensif mempelajari bahasa Melayu, sebab bahasa itulah yang dijadikan bahasa pemerintahan kolonial. Kahin (2013: 53) menyatakan bahwa Belanda sendiri yang sering menggunakan bahasa Melayu dalam pemerintahan. Pihak kolonial berpandangan bahwa gengsi orang Belanda dan rasa rendah diri orang Indonesia dapat dipertahankan dengan cara melarang orang Indonesia menggunakan bahasa Belanda ketika berbicara dengan orang Belanda. Namun, efek dari pembatasan tersebut tidak terduga oleh pihak kolonial. Menurut G.H. Bousquet, seperti dikutip Kahin (2013: 53), kaum nasionalis telah menggunakan bahasa Melayu sebagai senjata untuk melawan pengaruh Belanda.

Bahasa Melayu yang semula berfungsi sebagai *lingua franca* di kalangan pedagang di kepulauan Nusantara telah memperluas perannya sebagai wahana integrasi politik dan alat perjuangan antikolonial (Soedjatmoko, 1996: 183). Jika peran sebelumnya dimainkan oleh para pedagang maka peran kedua digerakkan oleh para intelektual dengan Islam sebagai kohesi terbentuknya nasionalisme yang menghancurkan solidaritas-solidaritas sempit (Kahin, 2013: 53). Jika menelusuri sejarah pergerakan Indonesia maka dapat diketahui bahwa semangat integrasi politik dan antikolonialisme dimotori oleh para pedagang dan kaum terdidik sekaligus. Merekalah bagian kelas menengah Indonesia, tokoh-tokoh muda dan terdidik, yang mengerahkan tenaga serta perhatian bagi pengembangan bahasa nasional.

Ketika kelompok-kelompok muda terdidik tersebut bersepakat mengukuhkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, sesungguhnya ia memperlihatkan simbiosis antara bahasa dengan paham kebangsaan. Keberadaan *lingua franca* yang telah menjembatani interaksi antarsuku dan daerah di kepulauan Nusantara selama ratusan tahun sebelumnya telah memicu lahirnya nasionalisme Indonesia, dan sebaliknya, nasionalisme mengokohkan dan menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia pada masa-masa revolusi kemerdekaan juga digunakan untuk mengekspresikan semangat perlawanan terhadap kolonialisme secara massif. Penggunaan sapaan “bung”, “saudara”, dan “(a)bang” menyaran pada semangat kerakyatan dan egalitarianisme, rasa kesejajaran.

Setelah proklamasi (dan bahkan sebelumnya), seperti dijelaskan Kleden (2003: 33), sarjana-sarjana terbaik Indonesia terlibat aktif dalam pembentukan istilah-istilah baku untuk kepentingan keilmuan dalam bahasa Indonesia. Muncullah kemudian istilah-istilah *berat jenis* dalam fisika, *akar serabut* dalam ilmu tumbuh-tumbuhan, *fluorida*, *klor/klorin*, dan *kalsium* dalam kimia, dan sebagainya. Dengan demikian, babak baru perjalanan bahasa Indonesia dimulai saat itu: dari *lingua franca* menjadi bahasa persatuan (sarana integrasi politik dan antikolonialisme), serta dari bahasa persatuan menjadi bahasa pendidikan dan pengajaran. Saat itu Indonesia mulai menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Ricklefs (2001: 290) menyampaikan data bahwa antara 1953 dan 1960 jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta. Fenomena ini memberikan dua keuntungan. *Pertama*, jumlah melek huruf meningkat. Pada 1930 jumlah penduduk yang melek huruf hanya 1,7 persen, tetapi pada 1961 jumlahnya telah mencapai 46,7 persen. *Kedua*, kondisi ini semakin memantapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena pemakaiannya di seluruh sistem pendidikan, semua komunikasi resmi, dan juga media massa.

Demikian panjang perjalanan bahasa Indonesia. *Babak pertama*, bahasa Melayu/bahasa Indonesia menjadi *lingua franca*. Sebagai *lingua franca*, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi tidak menjadi penunjuk identitas pemakainya. Pemakaiannya banyak digunakan dalam kepentingan perdagangan di kepulauan Nusantara dan juga dunia kerja, terutama ketika imigran Tionghoa mulai berdatangan di Batavia. Proses ini berlangsung ratusan tahun. *Babak kedua*, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ia menjadi wahana integrasi politik dan alat perjuangan antikolonialisme di Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 merupakan titik awal secara formal babak kedua ini. *Babak ketiga*, bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan pengajaran. Bersamaan dengan prioritas pemerintah Indonesia pasca revolusi kemerdekaan yang menekankan pada bidang pendidikan, bahasa Indonesia berperan untuk mentransfer pengetahuan. Sejak saat itulah bahasa Indonesia semakin kuat posisinya sebagai bahasa nasional. Pengguna bahasa Indonesia pun semakin luas.

Ketika saat ini kondisi masyarakat telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan beberapa periode sebelumnya, bagaimana wajah bahasa Indonesia? Meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama, bahkan cenderung menggeser pemakaian bahasa daerah. Anak-anak sekarang lebih akrab dengan bahasa Indonesia, dan menganggap pelajaran bahasa Indonesia lebih mudah daripada pelajaran bahasa daerah. Bahasa

Indonesia tidak lagi menjadi sarana komunikasi formal, tetapi telah menjadi bahasa keseharian, terutama di daerah-daerah urban.

## **Bahasa dan Wajah Kelas Menengah**

Definisi mengenai kelas menengah sebenarnya masih diperdebatkan. Namun, seringkali ia diidentikkan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, lebih berpendidikan, dan memiliki posisi sosial lebih baik (Pambudy, 2012: 16). Karena kondisi kelas menengah yang lebih baik itulah, mereka diharapkan menjadi agen perubahan. Asia Development Bank (ADB) mendefinisikan kelas menengah berdasarkan kemampuan ekonomi mereka. Kelas menengah merupakan masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebesar UD\$2-20 (Yuswohady, 2015: 10). Apapun definisi yang menyertainya, kajian dalam tulisan ini tidak akan diarahkan pada perdebatan definisi dari sejumlah pakar mengenai kelas menengah. Tulisan ini diarahkan untuk melihat fenomena peningkatan kelas menengah Indonesia sebagai realitas sosial di masyarakat dari segi kebahasaan.

Sebagaisaranakomunikasi, bahasadigunakan untuk mengungkapkan pikiran, nilai-nilai, dan juga kecenderungan perilaku penggunaannya. Dengan demikian, kajian dari segi kebahasaan – yang secara umum – digunakan kelas menengah Indonesia akan dapat memetakan dan melihat realitas dan eksistensi kelas tersebut dalam masyarakat Indonesia. Jika para pemasar (*marketer*) memetakan kecenderungan kelas menengah dari perilakunya sebagai konsumen, akankah kajian dari sisi kebahasaan menghasilkan temuan mengenai wajah kelas menengah Indonesia yang sama? Jika para pemasar mengenali perilaku kelas menengah untuk memetakan strategi pemasaran, pengenalan realitas kelas menengah Indonesia dari segi kebahasaan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya transformasi sosial yang diakibatkan keberadaan kelas ini di Indonesia.

Dengan mencermati kecenderungan pemakaian bahasa yang digunakan sebagian besar kelas menengah Indonesia, perubahan cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku mereka di tengah masyarakat dapat dipahami dengan lebih baik. Terdapat beberapa karakteristik kelas menengah Indonesia ditinjau dari pemakaian bahasanya.

**Pertama**, masyarakat kelas menengah Indonesia menunjukkan makin religius. Karakteristik ini sangat berbeda dengan masyarakat kelas menengah di negara lain. Menurut survei Gallup di dunia pada 2009, Indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara paling religius setelah Bangladesh, Nigeria, dan Yaman (Yuswohady, 2014: 5). Ada kecenderungan bahwa pada umumnya ketika suatu masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan maka masyarakat tersebut akan semakin sekuler. Akan



tetapi, fenomena tersebut tidak terlihat pada kelas menengah Indonesia. Kelas menengah Indonesia cenderung semakin religius dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penggunaan kata “hijab” dan “hijaber” mengiringi fenomena masyarakat kelas menengah Indonesia yang ingin berpakaian muslimah sesuai aturan syariat. Munculnya pakaian muslimah tersebut sejalan dengan kegandrungan masyarakat untuk kembali pada ajaran agama (Pambudy, 2012: 26). Penggunaan kata “hijab” menggantikan kata “jilbab” yang sebenarnya bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Padahal, makna “hijab” secara leksikal adalah 1) dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain, 2) dinding yang membatasi hati manusia dengan Allah, dan 3) dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta waris. Namun saat ini, kata “hijab” mengalami pergeseran makna secara kontekstual sebagai pakaian muslimah dengan gaya modis.

Kelas menengah Indonesia juga memroduksi kata “hijaber” sebagai istilah populer untuk menyebut komunitas Muslimah yang memakai hijab dalam gaya modis. Kalimat */dia sekarang hijabers/* lebih banyak digunakan untuk menunjuk perubahan cara dan gaya berpakaian seseorang daripada kalimat */dia sekarang berjilbab/*. Penyematan kata “hijabers” pada seseorang menjadi karakteristik khas kelas menengah Indonesia yang cenderung terhubung satu sama lain (terkoneksi) dan menyukai berkomunitas. Dengan demikian, pemakaian kata “hijabers” tidak hanya menunjukkan realitas kelas menengah Indonesia yang makin religius, tetapi sekaligus juga memperlihatkan kecenderungan mereka yang berusaha untuk mengidentifikasi, menginspirasi, dan mengorientasi pada komunitas religius.

Kata “hijab” memiliki stratifikasi sosial kebahasaan yang saat ini terasa lebih modern, bergengsi, prestise, modis, dan urban dibandingkan dengan kata “jilbab” yang meskipun tampak prestise, modern, dan urban, tetapi tidak terkesan modis. Kata “hijab” – dan juga “jilbab” ternyata lebih bergengsi dan modern dibandingkan dengan pemakaian kata “kerudung.” Kata “kerudung” terkesan memiliki stratifikasi sosial kebahasaan yang lebih tradisional, kurang bergengsi, tidak modern, dan tidak mewakili kelas urban. Jadi, dari pemakaian bahasa, kelas menengah Indonesia berkeinginan untuk menampilkan kehidupan mereka yang religius, cerdas, terdidik, urban, dan tentu saja modis.

Kelas menengah Indonesia juga menggunakan kata “ODOJ” dan “ODOJ-er” dalam komunitas baca Al-Quran. ODOJ sebenarnya merupakan akronim dari *One Day One Juz*. Sebuah program baca Al-Quran (tilawah) dengan menargetkan satu hari satu juz. Popularitas program ODOJ yang

mendapat sambutan luas dari kelas menengah Muslim melalui *WhatsApp* menggeser pemakaian baca Al-Quran atau tilawah dengan hanya menyebut kata “ODOJ.” Kadangkala, dalam pemakaian sehari-hari, akronim “ODOJ” telah digeser menjadi kata kerja yang bermakna ‘baca Al-Quran’ atau ‘tilawah’. Pemakaian kata “ODOJ-ers” tidak hanya menunjukkan realitas kelas menengah Indonesia yang makin terbiasa untuk membaca Al-Quran, tetapi sekaligus juga memperlihatkan kecenderungan mereka yang berusaha untuk mengidentifikasi diri mereka pada komunitas religius.

Tentu saja pembentukan kata “hijabers”, “ODOJ-ers”, atau yang sejenis dengan itu, seperti “gowesers” – untuk menyebut komunitas penyepeda, “jokower” – untuk menyebut relawan pendukung Jokowi, mengikuti pola pembentukan kata dalam bahasa Inggris, seperti *follower*, *reviewer*, *writer*, dan *driver*, tetapi dilakukan secara manasuka, untuk tidak menyatakan “semena-mena.” Gejala pembentukan dan pemakaian kata-kata tersebut merupakan ragam ekspresi campuran Indonesia-Inggris yang (lagi-lagi) menunjukkan aspirasi kosmopolitan masyarakat kelas menengah. Jadi, kegemaran beringgris-inggris tersebut salah satunya ditujukan untuk menciptakan kesan gagah dan berkelas. Bahasa Inggris atau segala bahasa yang terlihat seperti bahasa Inggris dianggap memiliki stratifikasi sosial kebahasaan yang lebih tinggi dan bergengsi daripada bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Namun, gejala di atas sebenarnya menunjukkan kecenderungan kelas menengah Indonesia untuk saling terhubung dan tergabung dalam komunitas. Kata “hijabers”, “ODOJ-ers”, “gowesers”, dan yang lain menyaran pada bentuk jamak. Fenomena kebahasaan ini memperlihatkan kecenderungan kelas menengah untuk membentuk komunitas. Kecenderungan berkomunitas dan saling terkoneksi tersebut terlihat pula dalam pemakaian bahasa untuk menyebut program-program sosial dan religius mereka: *Sedekah Rombongan*, *Majelis Dhuha Nasional*, *Sedekah Harian*, *Komunitas Tahajud Berantai*, *Komunitas Hijaber*, *Komunitas Jilbaber*, *Komunitas Pejuang Subuh*, dan sebagainya.

Saking gandrungnya masyarakat kelas menengah terhadap pakaian hijab dan jilbab, muncul kata baru, yaitu “jilboobs” yang menunjuk pada komunitas pemakai jilbab tetapi memperlihatkan lekuk-lekuk bagian tubuh secara vulgar, terutama bagian payudara. Terlepas dari respon kontroversial yang diakibatkan oleh kemunculannya, sebagai fenomena sosial dan kebahasaan, kehadiran “jolboobs” juga memperlihatkan kecenderungan di atas. Kata “jilboobs” berasal dari kata “jilbab” dan “boobs” (payudara) yang digabungkan. Fenomena terakhir menunjukkan bahwa terdapat pula sejumlah orang dalam kelas menengah Indonesia yang memiliki aspirasi untuk meraih identitas modern, urban, dan religius

berdasarkan tampilan luar dan bukan sebagai pandangan hidup dan nilai-nilai yang diajarkan agama. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa berpakaian Muslimah telah bergerak sebagai sebuah tren di samping kesadaran religiusitas.

**Kedua**, orang tua dari kelas menengah Indonesia semakin memiliki perhatian terhadap keluarga dan pendidikan anak. Yuswohady (2015: 261) menjelaskan bahwa ada dua kecenderungan besar terhadap tren pendidikan anak yang berkembang di kelas menengah, yaitu (1) gaya pendidikan anak yang mementingkan pendidikan karakter, dan (2) kecenderungan gaya mendidik orang tua yang semakin demokratis tetapi cenderung memiliki keterlibatan yang rendah dengan anak (*low involvement*) karena kesibukan mengejar karier.

Pada aspek kebahasaan kelas menengah Indonesia ternyata melakukan perubahan pada kata sapaan dari *ayah* dan ibu, *papa* dan *mama*, menjadi *ayah* dan *bunda*. Gejala ini secara massif dapat dijumpai pada keluarga-keluarga muda kelas menengah Indonesia. Kata “ayah” dan “bunda” memiliki stratifikasi sosial kebahasaan yang lebih tinggi, berkelas, bergengsi, dan urban tetapi sekaligus juga lebih memperlihatkan kelekatan (*bonding*) orang tua dengan anak. Selain itu, pemakaian kata “ayah” dan “bunda” lebih terasa demokratis, terbuka, dan menunjukkan keterlibatan yang tinggi (*high involvement*) orang tua dalam mendidik anak-anak.

Jadi, dari aspek kebahasaan yang digunakan kelas menengah – terutama dalam pemakaian kata sapaan – terlihat mereka memiliki orientasi, cara pandang, dan nilai-nilai dalam mendidik anak-anak yang cenderung demokratis dan berusaha terlibat secara penuh dalam pendidikan anak. Keluarga muda kelas menengah Indonesia juga cenderung menekankan keterbukaan dan kesetaraan di hadapan anak-anak. Di luar aspek kebahasaan, fenomena kelekatan seorang ayah di wilayah publik terlihat sangat jelas. Dibandingkan ayah-ayah kelas menengah beberapa dekade yang lalu, para ayah dari keluarga muda kelas menengah Indonesia saat ini cenderung lebih memiliki kedekatan dengan anak-anak. Pemandangan yang lumrah di mall-mall seorang ayah menggendong bayi sambil menyelempangkan tas berisi popok dan pakaian ganti anak tanpa rasa canggung. Sesuatu yang jarang dilakukan para ayah dua-tiga dekade sebelumnya.

Namun, yang perlu mendapat catatan, penggunaan kata sapaan “ayah” dan “bunda” tidak dengan sendirinya memperlihatkan cara mendidik anak dari keluarga muda kelas menengah yang lebih demokratis dan terbuka. Jika cara mendidik anak belum sepenuhnya demokratis dan memiliki keterlibatan tinggi, cara yang paling mudah adalah mengadopsi pemakaian bahasanya. Ketika karakter-karakter dalam mendidik anak

belum sepenuhnya tepat, bahasalah yang seringkali merupakan hal pertama yang diambil oleh mereka yang beraspirasi masuk ke kelas menengah baru perkotaan. Dengan demikian, tanpa sadar bahasa kelas menengah telah menggiring keluarga muda perkotaan untuk beraspirasi dan berorientasi pada cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku mendidik anak yang diyakini lebih baik oleh kelas menengah, yaitu demokratis, terbuka, setara, dan mementingkan pendidikan karakter.

Kecenderungan beraspirasi dan berorientasi pada keharmonisan keluarga juga terlihat di kelas menengah Indonesia. Salah satunya pada fenomena pemasangan stiker *Happy Family* di mobil, dengan menampilkan kartun semua anggota keluarga; ayah, bunda, dan nama semua anak, atau (kadang) menyertakan pula nama hewan piaraan. Gejala ini menunjukkan aspirasi pemiliknya sebagai keluarga sejahtera, mapan, dan harmonis. Kalimat “Happy Family” menunjukkan makna dan aspirasi di atas, selain pemakaiannya dalam bahasa Inggris (sekali lagi) dipakai karena memiliki stratifikasi sosial kebahasaan yang lebih bergengsi. Jika dikaji lebih lanjut, misal melalui pendekatan semiotik, pilihan bentuk kartun (ayah, ibu, dan anak) bisa jadi menunjukkan makna dan aspirasi tertentu dari kelas menengah kita. Kartun “ayah” berpeci dan “bunda” berjilbab, misalnya, menunjukkan aspirasi pemiliknya sebagai keluarga yang religius dan menerapkan aturan-aturan agama di keluarganya.

Pemakaian kata “ayah” dan “bunda” ternyata juga dilekatkan pada nama seseorang, terutama mereka yang dikenal sebagai pakar pendidikan anak atau guru yang mengajar anak-anak. “Ayah Edy”, “Ayah Irwan”, “Bunda Elly Risman”, dan “Bunda Neno Warisman” merupakan contoh-contoh pemakaian kata “ayah” dan “bunda” di depan nama tokoh. Gejala ini memperlihatkan kecenderungan kelas menengah untuk menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai figur ayah dan figur bunda yang diidealkan. Figuritas sebagai ayah atau bunda dan kepakaran dalam pendidikan anak dilekatkan pada nama-nama tertentu sehingga yang bersangkutan dianggap memiliki kelayakan serta kompetensi untuk berbicara tentang pendidikan anak. Fenomena ini sekaligus menjelaskan tentang kecenderungan orang tua kelas menengah Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak, sekaligus kebutuhan mereka akan ilmu pengasuhan anak dan model yang dapat dijadikan panutan.

**Ketiga**, kelas menengah Indonesia semakin kritis dan peduli. Kecenderungan ini sedikit berbeda dengan tuduhan yang diarahkan pada kelas menengah bahwa mereka terlalu konsumtif dan tidak peduli terhadap persoalan-persoalan di sekitarnya. Pambudy (2012: 16-19) memberikan sejumlah fakta dan analisis mengenai kecenderungan kelas menengah yang lebih dominan mempengaruhi gaya hidup daripada

persoalan-persoalan sosial-politik. Sebagai kelompok sosial terdidik, kuat secara ekonomi, dan terkoneksi dengan pihak lain, kelas menengah Indonesia memperlihatkan kecenderungan untuk bersikap kritis dan memberikan kontribusi secara lebih nyata atas persoalan-persoalan yang dihadapi negara. Kelas menengah yang terkoneksi jaringan internet itu, memanfaatkan keaktifan mereka di jejaring sosial media untuk bersikap kritis dan peduli. Pengguna internet di Indonesia pada 2014 mencapai 107 juta dan diperkirakan meningkat menjadi 139 juta pada 2015 (Yuswohady, 2015: 269-273), sebagian besarnya jelas adalah kelas menengah.

Ketika Sumatera dan Kalimantan berhadapan dengan masalah asap, sebagian orang tergerakkan untuk melakukan aksi nyata. Mereka memproduksi pesan-pesan sosial yang menggerakkan banyak orang untuk terlibat. Mulailah bermunculan sikap kritis dengan tagar **#MelawanAsap**. Pengantar salah satu video yang diunggah warga *netizen* di Youtube bertuliskan pesan sebagai berikut. *“Kami tidak diam! Video ini adalah suara keresahan dari masyarakat Riau yang ikut andil dalam pergerakan #MelawanAsap. Kami ingin satu suara bahwa kami tidak ingin asap ada lagi di rumah kami, Riau.”* Pesan tersebut sangat jelas dan mendorong banyak warga *netizen* untuk memberikan dukungan. Gerakan online di jejaring sosial ini pun ternyata mampu menggerakkan banyak pihak untuk melakukan banyak aksi nyata.

Kelas menengah terdidik yang sangat akrab dengan internet itu memproduksi pesan-pesan sosial untuk peduli terhadap korban asap. Pesan-pesan tersebut, antara lain: */Terus mengkampanyekan bhwa #MelawanAsap hrus scr bersama-sama. Hidup dari dan untuk alam bukan korporasi pembakar lahan/ (@claralistyaD), /Ayo #MelawanAsap. Hidup dr alam untuk alam dan akan kembali ke alam. Stop merusak alam!/ (@claralistyaD), dan /Kak @NOAH\_ID bikin acara konser pertemuan semua sahabat NOAH se-Indonesia dong buat menggalang dana #MelawanAsap/ (@D\_andesi)*. Tentu pesan-pesan sejenis sangat banyak di jejaring sosial. Tidak hanya pada saat tragedi kebakaran hutan, pada banyak isu-isu sosial politik—terutama yang dinilai merugikan banyak orang—kelas menengah memberikan respon cepat, kritis, dan peduli. Bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan diproduksi melalui piranti-piranti jejaring sosial yang sangat diakrabi kelas menengah Indonesia.

Berdasarkan bahasa yang diproduksi, kelas menengah Indonesia akan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, singkat, tetapi memiliki pesan yang jelas dipahami. Boleh jadi karena pesan-pesan tersebut sebagian besar disampaikan melalui media sosial yang terbatas jumlah karakternya, misal *Twitter* yang hanya dibatasi 140 karakter,

sehingga kepadatan pesan sangat diutamakan. Akhirnya, pesan-pesan tersebut disajikan dengan bahasa yang cenderung ringkas dan efisien dalam menyampaikan pesan. Tidak hanya menyampaikan pendapat kritis, kelas menengah Indonesia juga cenderung untuk mengundang keterlibatan banyak pihak dan menggagas aksi-aksi nyata. “Kami tidak diam!”, “ayo #MelawanAsap”, dan “stop merusak alam!” dalam kutipan-kutipan di atas menunjukkan keringkasan pesan yang disampaikan.

Namun, fenomena pergeseran pemakaian bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bentuk campuran bahasa Indonesia-Inggris sangat mendominasi. Selain pesan-pesan kritis yang disampaikan melalui tagar #MelawanAsap, ada juga bentuk lain, seperti #SaveRiau, #SaveKPK, #PrayForRiau, dan #PrayForGaza, yang menggunakan bahasa Inggris. Selain karena lebih ringkas dan pendek, stratifikasi sosial kebahasaan bahasa Inggris yang lebih bergengsi bisa jadi menjadi alasan pemilihan pemakaiannya. Itulah sebabnya, para profesional pemasaran berusaha menjual imaji gengsi kompleks perumahan ke konsumen kelas menengah Indonesia dengan menampilkan nama-nama berbahasa Inggris. Jika pada periode sebelumnya nama-nama perumahan masih bernuansa lokal, seperti penggunaan kata pondok, griya, puri, atau taman, saat ini nama perumahan ditambahi kata berbahasa Inggris, seperti *residence*, *regency*, atau untuk hunian bersekat dengan kata *apartement*, *suit*, dan *condominium*. Sementara kata *food court* mulai banyak digunakan untuk menggeser pemakaian kata “kantin.”

Jadi, meskipun realitas kelas menengah Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang makin religius, perhatian terhadap keluarga dan anak-anak, serta kritis dan peduli terhadap kondisi sosial-politik, mereka tetap memperlihatkan aspirasi dan orientasi sebagai kelas menengah yang berkelas dan bergengsi. Pilihan-pilihan kata dan pemakaian bahasa di kalangan kelas menengah Indonesia saat ini memperlihatkan kecenderungan tersebut. Mereka ingin menampilkan diri sebagai kelas sosial yang mapan secara ekonomi, berpengetahuan dan religius, menikmati fasilitas dan kemewahan kelas menengah tapi tetap kritis dan peduli terhadap kondisi sekitarnya.

## Penutup

Persinggungan kelas menengah Indonesia dengan bahasa Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dalam tinjauan sejarah, antara perkembangan bahasa Indonesia dan dinamika kelas menengah senantiasa berjalan beriringan. Pada tahap awal, perkembangan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* selama beratus-ratus tahun jelas tidak dapat dipisahkan dari komunitas pedagang di kepulauan Nusantara.

Penobatan bahasa Melayu/bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang menjadi sarana integrasi politik dan antikolonialisme jelas dimotori oleh kelas menengah terdidik. Selanjutnya dari bahasa pemersatu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pendidikan dan pengajaran. Dinamika ini tidak dapat dipisahkan dari kelas menengah terdidik yang mengalami mobilitas vertikal menjadi pemimpin-pemimpin bangsa saat itu.

Ketika pertumbuhan kelas menengah Indonesia saat ini menunjukkan angka statistik yang mencengangkan (130 juta), persinggungannya dengan bahasa Indonesia tidak terelakkan. Kelas menengah Indonesia menempatkan bahasa Indonesia dalam stratifikasi sosial kebahasaan yang bergengsi, modern, dan urban, meskipun masih ditempatkan di bawah bahasa asing (terutama bahasa Inggris). Kuasa bahasa yang diproduksi kelas menengah Indonesia ternyata menciptakan transformasi sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan pengamatan terhadap pemakaian bahasa di kalangan kelas menengah, dapat diketahui kecenderungan umum mereka, termasuk cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku kelas ini. Cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku kelas menengah Indonesia, yang terlihat dalam penggunaan bahasa mereka, ternyata menjadikan masyarakat beraspirasi dan berorientasi ke arah kelas menengah. Gejala ini memungkinkan terjadinya proses transformasi sosial di tengah masyarakat.

Proses mengidentifikasi diri menjadi bagian dari kelas menengah Indonesia tersebut terlihat dari realitasnya yang (1) menunjukkan tanda-tanda makin religius, (2) memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak, dan (3) kelas menengah Indonesia ternyata lebih kritis dan peduli terhadap permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kesimpulan ini lebih bersifat positif dari anggapan sejumlah pihak yang menggambarkan kelas menengah sebagai kelompok yang konsumtif dan hedonis. Anggapan bahwa kelas menengah sangat konsumtif dan hedonis, boleh jadi, tidak sepenuhnya salah. Namun, berdasarkan kajian dari segi kebahasaan (yang digunakan kelas menengah) dan kecenderungan kehidupan sosial mereka, ternyata kelas menengah Indonesia memperlihatkan sebagai kelas sosial yang sejahtera, cerdas, terdidik, religius, kritis, dan peduli. Tentu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat perkembangan kelas menengah Indonesia yang semakin dinamis.

## Daftar Pustaka

Carey, Peter. 2015. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825*. Depok: Komunitas Bambu.

- Daradjadi. 2013. *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta: Kompas.
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 – 1900. Dari Emporium sampai Imperium*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kasali, Rhenald. 2011. *Cracking Zone*. Jakarta: Gramedia.
- Kleden, Ignas. 2003. *Bahasa Indonesia: Dari Lingua Franca ke Bahasa Politik dalam Nuradji (Peny.), Dari Katabelece sampai Kakus: Kumpulan Kolom Bahasa Kompas*. Jakarta: Kompas.
- Oetomo, Dede. 1996. *Bahasa Indonesia dan Kelas Menengah Indonesia dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Ed.), Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2012. “Gaya Hidup Suka Mengonumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi?” dalam Prisma, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Vol. 31, No.1, 2012.
- Ricklefs, M.C. 2001. *A History of Modern Indonesia since c.1200* (Third Edition). London: Palgrave.
- Soedjatmoko. 1996. *Bahasa dan Transformasi Bangsa dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Ed.), Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Trudgill, Peter. 2000. *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*. England: Penguin Books.
- Yuswohady. 2015. *8 Wajah Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Marketing to The Middle Class Muslim*. Jakarta: Gramedia.



# PEMBENTUKAN KESADARAN MULTIKULTUR MELALUI BAHASA KOMEDI: STUDI WACANA KRITIS *STAND UP COMMEDY* DI INDONESIA

Ari Kusmiatun  
Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRAK

*Multikultur menjadi sebuah pemikat sekaligus pemicu kerawanan sosial di Indonesia. Interaksi dan komunikasi yang didasarkan pada latar suku, agama, ras, budaya, seni, adat, dan ideologi berbeda sangat rentan dengan konflik. Kesadaran multikultur harus ditanamkan pada masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmoni. Salah satu langkahnya adalah melalui program tayangan di media massa berupa stand up comedy. Sebuah hiburan kreatif yang mampu menggunakan bahasa sebagai alat mengubah stigma, tanpa nada menggurui dan tanpa menimbulkan sakit hati. Bahasa dalam stand up comedy membawa pesan implisit yang secara sengaja dirangkai komika untuk membentuk kesadaran multikultur masyarakat penyimaknya. Studi wacana kritis terhadap stand up comedy ini membedah tidak hanya wacana teks, tetapi juga konteks. Analitis terhadap bahasa komedi dalam tayangan stand up comedy meliputi kosakata, gramatika, dan struktur teks. Konteks yang akan dicermati melibatkan konteks situasi dan konteks budaya. Kajian ini menyuguhkan sebuah pembedahan wacana komedi*

*yang dapat menjadi alat pendidikan multikultur bagi masyarakat Indonesia melalui kekuatan bahasa komedi.*

**Kata kunci:** kesadaran multikultur, bahasa komedi, *stand up comedy*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang kaya, tidak hanya dari sumber daya alamnya tapi juga dari budaya dan masyarakatnya. Indonesia dikenal sebagai nusantara yang merupakan pertemuan dari berbagai ras, suku, agama, bahasa, seni, adat, budaya, dan ideologi. Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Kondisi itu merupakan sebuah kebanggaan sekaligus pemicu kekhawatiran karena masyarakat multikultural sangat rawan dengan konflik dan disintegrasi.

Adanya konflik dalam masyarakat Indonesia seringkali dipicu dan dipacu oleh sikap primordialisme suku, agama, ras yang berlebihan. Kondisi ini sering menjadi bagian dari komunikasi dan interaksi. Bagaimanapun manusia adalah *homosocius* yang tidak lepas dari suatu komunikasi dan interaksi terhadap sesamanya. Interaksi yang terjadi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Esensi komunikasi adalah pada proses, yakni aktivitas yang melayani hubungan antara pengirim dan penerima pesan melampaui ruang dan waktu (Liliweri, 2011:5). Komunikasi dan interaksi yang terjalin antarpribadi dalam masyarakat Indonesia dapat berlangsung melalui pertukaran simbol linguistik, baik verbal maupun nonverbal. Peran bahasa menjadi sangat penting dalam hal ini.

Bahasa menjadi sebuah jalan bagi masyarakat untuk saling membuka diri dan menjalin komunikasi. Menggunakan sistem tanda (bahasa), masyarakat dapat saling berinteraksi. Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang menjembatani semua suku bangsa dengan bahasa daerahnya untuk dapat saling berkomunikasi dengan baik. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional yang salah satu fungsinya adalah sebagai pemersatu antardaerah yang ada di Indonesia. Perbedaan dalam sistem tanda, yakni bahasa antarsuku di Indonesia dapat teratasi dengan keberadaan bahasa Indonesia. Hal ini senada yang ungkap Rifai'i (2014: 117) bahwa bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa merupakan salah satu solusi yang cukup efektif untuk menyelesaikan beberapa masalah sosial yang terjadi.

Membangun masyarakat multikultural yang damai dan demokratis membutuhkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah yang sekarang ini marak menghisap layar kaca dan digemari anak muda yakni *stand up comedy*. *Stand up comedy* menjadi sebuah genre baru dalam dunia hiburan di tanah air. Di dalamnya banyak menyoal kondisi faktual

yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Pemikiran yang ada dibungkus dengan bahasa komedi, tidak menggurui dan tidak menimbulkan sakit hati. Bahasa komedi dalam *stand up comedy* mampu membawa sebuah hal tabu dan beresiko menjadi ringan dan ditangkap dengan riang. Komedi atau humor dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan secara tersirat dan tersurat bagi pencipta humor, sehingga penikmat humor tidak merasa tersindir atau tersinggung secara langsung (Rohmadi, 2008: 111).

Kajian kali ini membahas tentang pembentukan kesadaran multikultur pada masyarakat Indonesia melalui *stand up comedy* yang ditayangkan dalam berbagai media massa nasional, yakni televisi. Kajian ini adalah sebuah kajian analisis wacana kritis. Kajian di dalamnya tidak hanya mengungkap aspek bahasa, tetapi menghubungkannya dengan konteks untuk mengungkap pesan implisit di balik bahasa dan simbol visual lainnya. Studi wacana kritis melihat bahasa dalam teks sebagai pengungkap sesuatu hal lain yang ada dalam konteks (Darma, 2009).

Pendekatan yang digunakan dalam analisis teks ini adalah pendekatan mikrostruktural dan makrostruktural. Pendekatan mikrostruktural karena teks tayangan *stand up comedy* tidak lepas dari dimensi teks bahasa. Analisis wacana kritis memanfaatkan piranti linguistik dan memberi kepemilikan struktur linguistik dalam teks bahasa. Menurut Fairclough (1989), tahap pemberian ini berupa analitis terhadap kosakata, gramatika, dan struktur teks. Pendekatan makrostruktural berkaitan dengan konteks situasi dan konteks kultural. Hal ini memfokuskan kajian pada interpretasi konteks dari *stand up comedy* yang ada.

Beberapa *stand up comedy* berisikan hal berbau kesukuan dan masalahnya secara variatif. Di balik candaan itu, ada pesan dan ideologi tersimpan yang ingin disampaikan komika (orang yang melakukan *stand up comedy*) pada masyarakat. Tulisan ini merupakan sebuah studi wacana kritis yang masih sederhana dan berfokus pada bahasa para komika dalam menciptakan wacana humor ketika ber-*stand up comedy*. Kajian lebih mendalam dengan penelitian akan dilakukan lebih lanjut. Tulisan ini memanfaatkan data berupa tayangan-tayangan *stand up comedy* yang ada di beberapa program televisi nasional. Beberapa contoh telah dipilih secara selektif untuk mewakili topik multikultur dalam *stand up comedy* yang dilakukan para komik. Tulisan ini akan mendeskripsikan beberapa data sebagai contoh bahan atau materi *stand up comedy* yang mengandung maksud terpendam guna membangun stigma baru dalam masyarakat sebagai sebuah upaya penumbuhan kesadaran masyarakat multikultural. Melalui kajian ini, masyarakat akan makin sadar dan pintar dalam menikmati tayangan *stand up comedy* yang mengusung topik kultur sehingga dapat mewujudkan kehidupan multikultural di Indonesia

yang harmoni, saling merima, saling memahami, saling mengerti, dan hidup berdampingan secara damai.

## **Masyarakat Multikultural di Indonesia**

Dunia mengenal Indonesia sebagai sebuah negara multikultural. Namun demikian, multikultural di Indonesia berbeda dengan multikultural di negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Finlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Keragaman yang ada di negara lain berasal dari bangsa lain, sedangkan di Indonesia keragaman terbentuk dari etnis yang ada di dalam Indonesia sendiri. Dengan kata lain, keragaman bangsa Indonesia datang dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri (Hanum, 2013:107). Berbagai macam suku dengan latar adat, budaya, bahasa, ras, agama hidup di negara ini sejak awal keberadaannya dahulu.

Keberagaman suku dan budaya menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara mozaik yang indah, tetapi juga rentan masalah. Adanya kasus peperangan, kekerasan, ketegangan antarsuku dan perpecahan agama adalah potret buram kerentanan masalah keragaman Indonesia. Kadang ketegangan itu hanya dipacu oleh hal sederhana, tetapi ditangkap dengan persepsi yang berbeda. Beberapa kasus konflik sosial di Indonesia menjadi sebuah refleksi bagi warga negara ini untuk menilik perbedaan itu bukan sebagai alat pemecah, namun sebagai warna bangsa yang indah dan mempesona.

Beberapa masalah sosial dan konflik yang terjadi pada masyarakat Indonesia sesungguhnya berakar dari kurang sadarnya masyarakat pada kehidupan multikultur bangsa. Berbagai macam suku dengan berbagai latar budayanya kadang menjadi pangkal masalahnya. Seseorang yang hidup dalam lingkungan suku tertentu sejak kecil akan mendapat secara otomatis memiliki persepsi atas kehidupan dan budaya dalam sukunya. Dengan adanya suku lain dengan budaya yang berbeda, kadang menjadi suatu hal yang “berbeda”. Perasaan “berbeda” ini diberikan secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Sayangnya, generasi penerus hanya menerima secara mentah-mentah saja sehingga pada akhirnya akan terbangun stigma perbedaan yang kuat. Inilah ihwal perpecahan yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, perlu upaya penyadaran bahwa keberagaman bangsa ini adalah sebuah modal besar bangsa Indonesia untuk dikenal dunia dan membanggakan. Kepekaan adanya perbedaan harus diasah guna mewujudkan masyarakat multikultur yang harmonis.

Pendidikan multikultural sudah mulai digalakkan. Bank (1993) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk

gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah agar seseorang dapat menerima perlakuan yang setara dan adil, saling memahami latar kultur yang berbeda, dan saling menghormati dan toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Hal ini akan menghindari konflik sosial di masyarakat.

Sayangnya, pendidikan kultural masih menyentuh lembaga formal. Padahal kecenderungan perpecahan etnis justru muncul pada masyarakat di luar pendidikan formal. Oleh karena itu, sarana pemberian pendidikan formal secara umum menjadi sebuah perhatian. Media paling efektif untuk ini adalah media massa. Penyebaran informasi melalui berbagai program dalam media massa menjadi salah satu pilihan. Media akan membangun stigma dalam masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan guna membangun stigma kehidupan harmoni dalam keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Stigma dalam masyarakat ini yang akan membekas dan menjadi acuan dalam kehidupan keseharian. Stigma lama yang berbau primordialisme suku, agama, ras, dan lainnya dapat digusur dengan stigma baru yang lebih memahami indahnyanya keberagaman.

### ***Stand Up Comedy: Genre Baru dalam Dunia Komedi di Indonesia***

*Stand up comedy* adalah sebuah genre di dalam komedi, biasanya satu orang di atas panggung melakukan monolog yang lucu dan memberikan pengamatan, pendapat, atau pengalaman pribadinya (<http://www.kompasiana.com>). Secara harfiah *stand up comedy* dimaknai sebagai komedi berdiri. Orang yang melakukannya disebut pelawak tunggal (*stand up comedian*), komik, atau komik berdiri (Setyawan, 2015). Para komik berada di atas panggung dan mengutarakan keresahan, mengangkat kenyataan, memotret kehidupan sosial masyarakat, dan menyuguhkannya kembali pada masyarakat secara jenaka.

Genre komedi ini saat ini tengah *booming* di panggung hiburan Indonesia. Diawali dengan adanya program seni komedi ini di sebuah televisi swasta sekitar tahun 2011, *stand up comedy* mulai dikenal dalam dunia industri hiburan tanah air. Kini beberapa program stasiun televisi nasional menyajikan program ini dan genre ini mulai dikenal makin luas di Indonesia.

Para komik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berdasar profesinya, para komik ada yang bekerja sebagai pengacara, dosen, polisi, penulis, pejabat, motivator, mahasiswa/siswa, tukang ojek, pesulap, dan sebagainya. Berdasar asal daerahnya, para komik berasal dari Jawa Timur,

Yogyakarta, Padang, Ambon, Papua, Medan, Kupang, Bima, Tegal, Jakarta, Bekasi, Makassar, Lampung, dan daerah Indonesia lainnya. Komedi ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menggelutinya. Ada beberapa komik yang merupakan keturunan China dan keturunan Arab. Latar belakang para komik ini menjadikan isi lawakan yang mereka sajikan bervariasi, karena dalam *stand up comedy* para komik harus mengolah materinya secara mandiri dan berasal dari pemikirannya sendiri.

Materi dalam *stand up comedy* biasanya dipandu dengan topik tertentu. Latar belakang para komik yang bermacam-macam akan memberi warna dalam materi yang dibuatnya. Latar sosial dan budaya daerah para komik memunculkan bahan kultural yang bervariasi. Multikultur dalam materi lawakannya disebabkan oleh pemikiran sang komik dari observasi yang mereka lakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Keberterimaan dan ketidakberterimaan budaya dalam lingkungan suku yang berbeda juga menjadi bidikan dalam materi lawakan. Para komik membawa pesan tersembunyi dalam lawakannya.

### **Bahasa Komedi dan Struktur Teks *Stand Up Comedy***

*Stand up comedy* didasari oleh keterampilan menulis. Bahan lawakan yang akan disajikan di panggung diuliskan sebelumnya. Komik menata kata-kata dan kalimat menjadi sebuah alur yang layak saji dan dapat mengundang tawa. Bahasa komedi yang digunakan adalah bahasa keseharian yang digunakan dengan trik tertentu. Humor dapat membuat orang tertawa apabila mengandung satu atau lebih dari keempat unsur, yaitu kejutan, yang mengakibatkan rasa malu, ketidaksaukakaan, dan yang membesar-besarkan masalah (Rohmadi, 2008:111). Semua unsur tersebut dalam *stand up comedy* dilakukan dengan rangsangan verbal dan bantuan motorik komiknya. Rangsangan verbal berupa kata-kata yang disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan efek tawa. Komik harus menuliskan dulu bahan lawakannya baru ia sajikan dalam monolog di panggung.

Bahasa komedi biasanya memainkan kata-kata khusus, dalam *stand up comedy* kosakata dipilih untuk menuangkan opini dan memancing hal lucu. Kadang-kadang sengaja dipilih dengan unsur bunyi yang sama, tetapi lebih banyak adalah sebuah naratif dengan kosakata keseharian yang dipahami banyak orang tetapi membuat pembelokkan arti atau keterkejutan arti yang tidak diduga penonton. Untuk menguji keberhasilan sebuah materi *stand up comedy* yang ditulis, biasanya komik melakukan *open mic*. *Open mic* adalah ajang latihan bagi para komik untuk mencoba materi yang akan mereka bawakan dalam *show*.

Materi dalam *stand up comedy* pada dasarnya berisi *bit-bit*. *Bit*

adalah *joke* dalam *stand up comedy*. *Bit* terdiri atas *set-up* dan *punc line*. *Set up* adalah bagian pengantar dan penghubung yang tidak lucu, yang menjadi premis ke bagian yang lucu. *Puch line* adalah bagian yang lucu dari sebuah *bit*. Penataan retorika para komik dalam *stand up comedy* mengatur letak *bit-bit* mereka menjadi sebuah sajian yang mampu membuat penonton tertawa. Berbagai teknik dapat dilakukan, seperti *one linear* atau *call back*.

## **Pembentukan Kesadaran Multikultur melalui *Stand Up Comedy* di Indonesia**

Pesan yang dibungkus dalam materi *stand up comedy* sering kali secara eksplisit juga dikemukakan oleh para komik. Ada banyak refleksi keseharian yang mereka garap menjadi materi *stand up comedy*. Salah satunya adalah tentang budaya, kultur yang ada di Indonesia. Multikultur yang kadang rawan dibicarakan, mereka angkat dengan bahasa komedi sehingga menjadi tak lagi terasa rasis. Walaupun, mereka juga sangat berhati-hati agar unsur SARA ini tidak menjadi hal yang merugikan.

Multikultur seringkali muncul sebagai bahan *stand up comedy* meskipun topiknya bervariasi. Biasanya para pemilik kultur itu sendiri yang mengangkat kultur daerahnya, meski dalam sorotan baik maupun tidak. Asal daerah para komik yang beragam menjadikan multikultur dalam *stand up comedy* di Indonesia terasa lengkap. Materi *stand up comedy* yang ada mencermati kultur dari sudut kebiasaan hidup, cara hidup, makanan, tempat wisata, kondisi lingkungannya, pembangunan, dan sebagainya. Semua dilemparkan pada penonton dari sudut pandang komik. Misalnya saja berbicara tentang Indonesia bagian Timur, komik yang berasal dari Indonesia Timur mengungkapkan keresahan dalam pikirannya dalam materi *stand up comedy*. Beberapa komik yang berasal dari Indonesia Timur adalah Ari Keriting, Abdur, Ephy Sekuriti, Rigen, Musdalifah, dan sebagainya. Berikut contoh materi *stand up comedy* yang mengungkap Indonesia bagian Timur.

Kemarin itu saya habis show di Makasar. Kemudian di Makasar itu setelah show itu ada dua orang laki-laki yang datang menghampiri saya begitu. Mukanya macam terumbu karang begitu. Sumpah...sumpah... Dia mirip sekali dengan terumbu karang asli bahkan kalau kita taruh di dasar laut ikan akan memilih bertelur di mukanya. Mereka datang ke sana dan lihat saya merasa haru kak abdur abdur... kita minta foto. Kami minta foto ini karena kita sama-sama dari Timur. Teman-teman mungkin bagi kalian kata-kata “kita dari Timur” itu biasa saja, tapi bagi saya kata-kata itu bermakna sekali.

Menurut saya kalau ada orang Timur berani bilang “kita sama-sama dari Timur”. Itu berarti menandakan kalau mulai sekarang ini saat ini ada orang Timur yang mulai tumbuh bangga jati diri jadi orang Timur. Dulu waktu saya pertama kali kuliah di Malang, kalau saya kenalan di depan kelas saya orang dari Timur semua orang tertawa ha ha ha.... lalu ada suara dari belakang “sumber air su dekat”. Saya bilang apa salahnya dengan Timur, perasaan saya di depan kelas kan untuk kenalan bukan tukar galon (tawa). Tiap kali mengaku timur pasti ditertawakan dan pasti diejek. Saya penasaran saya cari kenapa orang tertawa kalau dengar kata dari Timur kan timur kan biasa T I M U R kan biasa. Kecuali kalau saya kenalan saya bilang ya teman-teman semua saya dari timur - timur mana? Timur yang dicuri kancil. Nah kalau itu mungkin saja, mungkin mereka akan tertawa sambil lempar kursi. Jadi saya kalau kenalan suka malu-malu sembunyi-sembunyi identitas kalau kenalan saya bilang teman-teman semua, biar mereka terkesima begitu, ... nama saya Abdur Arshyad biasa dipanggil Abdur. Saya anak asli keturunan keraton Solo. Semua kelas tertawa dan bahkan dosennya bilang “sumber air su dekat”. (*Abdur – Super Stand Up Comedy*)

Bahasa yang digunakannya sederhana, keseharian, dan dilisankan dengan logat ketimuran yang kental. Muncul bahasa Papua yang biasa memendekkan kata dalam “*sumber air su dekat*” (sumber air **sudah** dekat). Kalimat ini adalah kalimat ledakan yang biasanya digunakan buat orang Indonesia Timur. Didalamnya, Abdur mengungkap sebuah fenomena bahwa masyarakat masih memandang Indonesia Timur lebih rendah daripada daerah lain di Indonesia, dalam materi itu penyebutan Solo (bagian dari Jawa) juga memaknai ke arah yang sama. Kalimat ditata dengan sedemikian rupa sehingga kalimat *...nama saya Abdur Arshyad biasa dipanggil Abdur. Saya anak asli keturunan keraton Solo. Semua kelas tertawa dan bahkan dosennya bilang “sumber air su dekat”* menjadi sebuah *punch line* dalam *bit*. Ada ideologi tersimpan yang ingin Abdur sampaikan bahwa kedudukan semua itu sama, jangan ada perbedaan lagi antara orang Indonesia bagian manapun. Tersirat sebuah ideologi penyadaran perlunya pengakuan dari banyak orang terhadap wilayah Indonesia yang jauh dan memiliki perbedaan. Ledakan yang kadang melekat pada sebuah suku diangkat dengan santai. Kondisi sama terjadi dengan materi *stand up comedy* yang dibawakan Pras Teguh, mahasiswa dari Padang dengan istilah “*padang bengkok*”. Mereka menyampaikannya dengan canda, meskipun sesungguhnya mereka ingin menyampaikan bahwa sebutan-sebutan ejekan berbau etnis itu sangat tidak nyaman



bagi mereka. Kesadaran toleransi kultur ini yang ingin disampaikan oleh mereka. Ketidakberterimaan akan etnisnya yang diposisikan “kiri” dalam konteks tertentu, kadang menjadi bahan yang diolah secara jenaka juga. Seperti yang dilakukan Dodit, komik asal Surabaya berikut ini.

Selamat malam muda mudi masa kini. **Saya itu berang ya dengan film yang tidak adil.** Orang Jawa selalu dapat peran jadi pembantu. Kalau saya nanti ditawarkan main film Malam Minggu Miko, saya nggak akan mau jadi pembantu. Saya pemain biola kok. Saya kenal juga Mas Radit. Minimal saya jadi partner. Partnernya Mas Anca. Saya menemui **di jakarta ini banyak orang Jawa yang jadi pembantu** mungkin itu makanya dibikin film. **Padahal di Jawa orangnya mandiri, semua dikerjakan sendiri, tidak ada yang butuh pembantu, lah wong semuanya pembantu.** (Dodit Mulyanto – Stand Up Comedy Indonesia)

Ia menggunakan *delivery* agak panjang dalam *bit*-nya dengan awal perasaan tidak nyamannya dia “*Saya itu berang ya dengan film yang tidak adil.*” Set up yang ia bangun adalah hal kondisi nyata yang menempatkan posisi orang secara kurang baik lalu mengungkap hal positif tentang orang Jawa “*Saya menemui di jakarta ini banyak orang Jawa yang jadi pembantu mungkin itu makanya dibikin film. Padahal di Jawa orangnya mandiri, semua dikerjakan sendiri, tidak ada yang butuh pembantu.*” Namun kemudian membalikkan dengan kejutan sebagai *punch line* “*lah wong semuanya pembantu.*” Dodit ingin menyam[ai]kan bahwa film Indonesia masih diskriminatif dengan etnis tertentu dan ia ingin menyadarkan masyarakat akan hal itu.

Pandangan masyarakat tentang sifat karakter orang dari daerah berbeda diungkap dengan bahasa yang santai oleh para komik. Berikut beberapa cuplikan ujaran komik dalam *show*-nya berkait sifat seseorang dari berbagai suku yang ada.

Saya pernah ditolak. Waktu saya lulus S1 pada waktu itu, saya lamar seorang perempuan, asli orang Jawa. Saya ditolak gara-gara saya belum punya pekerjaan. Saya bilang “ibu... gampang pekerjaan bisa dicari”. Masalah selesai. Alasan berikutnya dia bilang “mas... saya tidak suka kalo anak saya sampeyan bawa ke Timur”. Saya bilang saya akan buat rumah di sini dan ibu bisa tinggal dengan dia. Masalah selesai. Alasan berikutnya si ibu bilang “mas... saya itu tidak suka sama orang Timur karena orang bilang orang Timur itu **jahat-jahat**”. Saya langsung berdiri di depannya dan saya bilang “siapa bilang orang timur itu jahaaaaaat” (*gaya pukul-pukul hantam*) heehhhh....orang Timur itu tidak ada yang jahaaaaaat...

(*gaya injak hantam*). Saat itu masalah selesai. Hubungan saya juga selesai. (*Abdur – Super Stand Up Comedy*)

Selamat malam... enak di Bandung neh.. nafasnya bau-bau peuyem neh...memang betul tadi ada angkot Margahayu raya... emang betul kalo ada orang Batak kalo nggak jadi rentenir ya narik angkot kalau nggak warung... warung pun **galak**... tuh beli terasi di si Ibu Batak, padahal tuh warung ada namanya. (*Boris Bokir – Metro TV Show*)

Jogja dan Jawa Tengah itu dikenal **sopan** ya... perasaannya halus, tapi bukan makhluk halus. Salah satunya suka minta maaf...di bis keinjek malah minta maaf.... orang Jawa mah gitu orangnya. Gak pernah marah-marah... (*Setyawan TT – Stand Up Comedy Show*)

Ketiga contoh materi *stand up comedy* di atas hanya contoh dari sekian banyak materi yang dapat digali dari sifat kedaerahan. Orang timur digambarkan suka marah dan kekerasan, orang Batak yang galak, orang Jawa yang tidak berani dengan nada sindirian kata sopan dan suka minta maaf. Orang Timur dalam stigma masyarakat adalah kasar dan jahat. Abdur ingin sampaikan itu bukan hal yang benar. Meskipun gaya akhir ia pakai perilaku motorik yang berlawanan dengan bahasa lisan yang ia sampaikan sebagai sebuah *punc line* dalam *bit*. Boris juga mengungkap pandangan umum bahwa orang Batak itu kasar dan galak, koskata langsung ia ungkap dengan kata **galak** dan lainnya ia sampaikan melalui gambaran pekerjaan yaitu **rentenir** dan **tukang angkot**. Sebaliknya Setyawan mengungkap kesan bahwa orang Jawa sopan dan tidak pernah marah, ini berbalikan kesan yang ingin disampaikan adalah bahwa orang Jawa tidak mempunyai keberanian seperti daerah lainnya. Tiap komik mempunyai cara masing-masing dalam melempar *bit* pada penonton. Gambaran sifat karakter daerah disampaikan dengan santai dan justru menjadi *bi-bit* yang mengundang tawa pecah dari penontonnya.

Pola kebiasaan yang buruk diungkap dengan bahasa komedi membuat bahan yang nampaknya “tabu” tapi menjadi biasa. Salah satunya adalah kebiasaan orang Madura. Hal ini diangkat oleh komik asal Madura sendiri (Muslim) dan menjadi bahan lawakannya dalam *stand up comedy*.

Assalamualaikum. Alhamdulillah di Madura ada mall sekarang. Tapi yang tidak ada di Madura itu satu - rel. Alasannya sederhana, demi keselamatan katanya. Jangankan rel ... jalan Suramadu aja dibongkar. Apalagi rel. Gak bayangin neh ada kereta lewat tiba-tiba relnya hilang loooohhhloohh... (*Muslim –super stand up Seru*)

... orang Madura sama besi ada chemistry. Jalan-jalan

wuuuihh becak (gerak ambil), becak (gerak ambil) .... apalagi rel kereta. (Muslim- super stand up Seru)

Indonesia itu benderanya merah putih, ini melambangkan orang Madura. Orang Madura itu dresscode nya merah putih merah putih. Jadi, orang paling nasionalis itu orang Madura. Betul nggak? Tapi kalau kalian tahu senjata khas Madura itu itu clurit. Clurit itu bentuknya tanda tanya. Bentuk tanda tanya itu tanda ketidakpuasan akan sekitar. Kenapa? Karena orang madura itu selalu dihina-hina, dipersalahkan ... Suramadu hilang bautnya... nah itu Madura katanya. Ya kalau itu benar ya udahlah.... kabel di daerah itu madura ilang itu orang Madura.. ya oke lah, pesawat tenggelam, hilang, waahh... Sli... sodaramu Slim itu... itu belum tentu salah loh. (Muslim- super stand up Show)

Kebiasaan orang Madura yang asal mengambil barang diungkap dengan kata keseharian namun jenaka. Muslim menggunakan kalimat naratif untuk mengungkapkannya. Ia mengungkap orang Madura suka mengambil, tapi di sisi lain ia mengatakan bahwa itu adalah tuduhan-tuduhan. Secara eksplisit ia gunakan komedi untuk mengungkap keresahan rakyat Madura yang selalu dituduh dan disalahkan. Meskipun ia menggunakan *punc line* dengan kata “*Ya kalau itu benar ya udahlah....*” dan “*itu belum tentu salah loh*“. Selain mengungkap kebiasaan Muslim juga mengangkat keresahan kondisi di Madura. Kondisi pembangunan yang tidak merata. Ia ungkap di awal dengan kalimat “*Alhamdulillah di Madura ada mall sekarang*”. Keteringgalan di beberapa wilayah juga menjadi bahan menarik dalam beberapa materi *stand up comedy*. Ideologi penyadaran akan keadilan secara menyeluruh bagi semua etnis dan daerah banyak digunakan komik untuk materi *stand up*. Berikut beberapa cuplikannya.

Giliran gua kenapa background- nya hutan. Ini gua sadar karena gua selalu menceritakan Bima sebagai tempat yang primitif. Kadang saya suka merasa menyesal sekarang. Bima gak seprimitif itu, Bima bukan hutan. Sama kota lain. Ada orang orang ada, piring, gelas, celana levis kita tahu, handphone kita tahu., media sosial lagi musim, frenster. Gue mau cerita neh orang Timur suka banget gitaran. Orang Timur kalau gitaran sampe pagi. Anak kos an juga gitu. Nah gue orang Timur sekalian anak kos an yang bisa bayangin main gitar dari pagi ketemu pagi. ... tak bisa menyalakan lampu... tak bisa menyalakan kendaraan.. itu gambaran di Timur kesejahteraan belum merata, jadi kendaraan dan lampu kita belum tahu. (Rigen - stand up comedy Show)

Di Padang itu jarang ada diskotik. Kita susah buat dugem. Kalau mau kita pergi ke organ tunggal. (Pras Teguh – *stand up comedy Indonesia*)

Di Indonesia Timur kalau ibu-ibu mau melahirkan, mereka harus berjuang mengarungi lautan garam. Sedangkan di Jakarta ibu-ibu sibuk main instagram. (Abdur – *Stand Up Comedy indonesia*)

Para komik mengajak penonton untuk memikirkan daerah lain yang belum maju. Geografis Indonesia yang luas belum merata pembangunannya dan mereka mengajak masyarakat untuk mengenal daerah berbeda dan menyampaikan pesan bahwa di daerah-daerah lain itu juga bagian dari Indonesia yang perlu diperhatikan. Kondisi daerah memang menjadi bahan yang sering dijumpai. Ejekan dan cercaan dalam materi para komik terkesan menjadi hal biasa. Misalnya kota Bekasi yang digambarkan oleh Yanto Blek.

Ada yang bilang kalau daerah bekas kuburan itu angker, kalau bekas rawa itu banyak nyamuknya, jangan-jangan Bekasi nih dulu bekas neraka ya... panas... saking panasnya jalanan pecah-pecah... jalannya panas dalam. Anak mudanya juga aneh ya alay... kayak saya alay juga .... (Yanto Blek – *stand up comedy show*)

Para penonton yang hadir meskipun berasal dari daerah yang sama, ikut tertawa tanpa merasa itu sebuah pelecehan. Kondisi yang sama mereka rasakan diunggah untuk mengarah pada sebuah penyadaran. Bahasa digunakan untuk mengungkap makna implisit (Fairclough, 1995). Penyadaran dalam ranah agama juga dilakukan Muslim dalam tampilannya saat bicara tentang Jakarta.

Kalian di jakarta belum bebas, belum merdeka dari kemacetan.... macet aja bangga. Saya sumpah demi Allah saat itu mau Jumatan di jalan kecil aja macet. Bayangin... jalan kaki aja macet. Padahal dalam Islam 3 kali tidak jumatitan itu kafir, 3 minggu saya di Jakarta. Kafir saya.... (Muslim- *super stand up Seru*)

Muslim berasal dari Madura yang dikenal sebagai masyarakat taat agama. Dia mengungkap kondisi Jakarta dan kondisi religius dalam sebuah *bit*. Penyadaran nilai religius yang dilakukan Muslim dalam materi itu. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai objek dalam lawakan meskipun ia ingin menggelitik masyarakat secara umumnya.

Beberapa komik keturunan Tiongkok dan Arab juga mewarnai dunia *stand up comedy* di Indonesia. Dalam lawakannya mereka menggunakan

dirinya sebagai objek untuk mengungkap keberadaan para etnis Tionghoa dan Aran yang hidup di Indonesia dan menjadi bagian dari Indonesia. Beberapa komik berketurunan Tiongkok misalnya Ernest, Liant, Mongol, Erwin, dan lainnya. Berikut contoh materi stand up comedy yang membicarakan etnis Tiongkok.

Selamat siang Tangerang... perkenalkan, nama saya Liant. Dan gue ini mau sedikit curhat tentang gak enak nya jadi orang Cina yang hidup di Indonesia. Wah yang orang Cina langsung .. itu kita itu kita .... Biasa aja, Cina udah gak eksklusif lagi. Waktu saya kecil dulu, selalu dikata-katain.. Cina cina cinaaaa.... gak tahu yang belakang tuh selalu naik vokal... Cinaaaa.... Kalau dikatain pinginnya ngebales. Yang ngatain banyakan, gak berani, takut digebukin. Di lain hari kelepasan gue, kelepasan ngebales. Sebelumnya mari kita anggap suku mayoritas di kelas gue itu suku aborigin, ini biar gak mengundang sara aja, padahal Jawa. Jadi saya dikatain.”Cina lu...” saya balas... “Aborigin lu...” itu satu kelas ngok semua. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah tragedi, hari itu mereka pesta Cina guling. Ya maksud tuh stop ngatain orang Cina ... gak enak banget dikatain gitu... bener. Bahkan ada yang ngatain jahat banget gini “ah dasar lu Cina balik aja ke negara lu, negara Cina”. Gue kasih tahu sama lu ya... orang Cina di Indonesia itu paling kasihan, kenapa? Karena kita di Indonesia jadi minoritas, kita kalau ke negara Cina juga jadi minoritas. Lu tau kenapa? Karena kami nggak bisa bahasa Cina. (*Liant – Stand up comedy Indonesia*)

Orang-orang selalu nganggep kalao orang Cina itu di cap pelit, gue kasih tahu lo semua hari ini bahwa anggapan itu belum... tentu... salah. (*Liant – Stand up comedy Indonesia*)

Dalam cuplikan di atas, Liant menyampaikan perasaan seorang keturunan Tiongkok di Indonesia. Hal itu penuh dilakukan secara vulgar dalam kata dan kalimat yang diguanakannya. Namun demikian, penonton tetap tertawa dan dengan teknik *call back* Liant mampu membuat beberapa tawa di sela materi lawakannya. Ideologi yang ada dalam materi di atas adalah keinginan untuk sebuah pengakuan keberadaan etnis Tionghoa untuk menjadi bagian Indonesia. Ada harapan untuk tidak dihina dan dilecehkan dan diterima dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang masih seperti gambaran Liant memang masih banyak di Indonesia. Liant dengan bahasa yang vulgar tapi jenakan mengajak masyarakat untuk membuka diri dan mengakui keberadaan etnisnya.

Masih banyak materi *stand up comedy* yang mengusung multikultur. Ini menjadi sebuah jalan pembentukan kesadaran bagi

masyarakat dalam melihat Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Komik menghadirkan berbagai lawakan dengan pesan itu dan berharap bahwa penontonnya, masyarakat pada umumnya, dapat menangkap pesan yang ada. Para komik memanfaatkan bahasa komedi sebagai sebuah pengungkap ideologi karena ada relasi kuat antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan (Fairclough, 1989). Akan tetapi, acara *stand up comedy* adalah sebuah acara hiburan. Bantuan media massa sangat membantu akan penyebarannya. Bagaimanapun, bahasa yang diangkat dalam media akan mempunyai kuasa (Thomas & Waering, 2007). Pembentukan kesadaran ini menjadi bagian dari memberi hiburan pada masyarakat tapi bermuatan pendidikan yang perlu terus dilakukan.

## Penutup

Bahasa komedi menjadikan bahan yang tabu menjadi ringan untuk dibincangkan. *Stand up comedy* sebagai sebuah genre baru dalam dunia hiburan Indonesia memberi ruang untuk memberikan penyadaran akan multikultur di masyarakat Indonesia. Bentuk materi multikultur yang ada mencakup sikap etnis, kebiasaan, profesi, kondisi daerah, agama, keberadaan ras tertentu, dan sebagainya. Semua disajikan dengan bahasa yang sederhana, kata-kata sehari-hari yang mudah dicerna, dan kalimat yang sengaja dibuat dengan teknik humor untuk mengundang tawa. Logat daerah yang kental dalam penyajian *stand up comedy* menjadi pemikat tersendiri dan pengenalan keberagaman bahasa. Bahasa menjadi sarana bagi komik untuk menyampaikan pesan tersembunyinya. Kesadaran masyarakat akan multikultur di Indonesia akan mengatasi konflik sosial yang ada.

## Daftar Pustaka

- Banks, James A. (1993). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn & Bacon.
- “Belajar Mudah Standup Comedy”. (2015). Dunduh dari [http://www.kompasiana.com/yogianugrah/belajar-mudah-standup-comedy\\_54f96763a33311ac048b4foa](http://www.kompasiana.com/yogianugrah/belajar-mudah-standup-comedy_54f96763a33311ac048b4foa)
- Darma, Yoce Aliyah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Fairclough, Norman. (1989). *Language and Power*. England: Longman.
- Fairclough, Norman (1995). *Critical Language Awareness*. Diterjemahkan oleh Hartoyo dalam *Kesadaran Berbahasa Kritis*. New York: Longman Publishing.
- Hanum, Farida. (2013). “Ilmu Pendidikan dan pendidikan dalam

- Multikultural” dalam *Pendidikan untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta: Ash Shaff.
- Rifai'i, Syawaludin Nur. (2014). “Kedudukan, Peran, dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia” dalam *Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Interlude.
- Rohmadi, Muhammad. (2008). “Teknik Penciptaan Wacana Humor sebagai Bentuk Wacana Rekreatif dalam Komunikasi Persuasif” dalam *Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Setyawan, Cheandy. (2016). *Pengertian dan Cara Stand Up Comedy*. Diunduh dari <http://cheandysetyawan1996.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-cara-jadi-stand-up-comedy.html>.
- Thomas, Linda & Wareing, Shan (2007). *Bahasa, Masyarakat, & Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

# **KEKERASAN SIMBOLIK (*SYMBOLIC VIOLENCE*) TERHADAP WARNA KULIT ORANG INDONESIA PADA IKLAN PENCERAH KULIT *FAIR AND LOVELY***

**Dadang Rhubido**

Magister Ilmu Linguistik Universitas Airlangga Surabaya

E-mail: dadangrhubido@gmail.com

## **Pendahuluan**

Manusia tidak pernah lepas dari peristiwa komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi adalah iklan. Kasali (1992:9) mendefinisikan iklan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa iklan merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh produsen ke konsumen. Pesan tersebut merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terkandung aspek bahasa, baik itu verbal maupun nonverbal.

Bahasa yang digunakan dalam iklan biasa disebut bahasa iklan. Bahasa iklan merupakan bahasa yang dipakai untuk menyampaikan segala macam bentuk pesan mengenai suatu produk yang ditujukan pada masyarakat. Bahasa iklan berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari karena iklan dibatasi oleh faktor ruang dan waktu. Ruang yang dimaksud adalah kolom iklan pada media, sementara waktu adalah durasi penayangan pada media elektronik baik radio maupun televisi. Selain itu, gaya bahasa pada iklan memiliki karakteristik yang berbeda dengan



bahasa pada umumnya yaitu, singkat, padat, lancar, sederhana, lugas, dan menarik.

Bahasa iklan haruslah persuasif. Seperti yang dikemukakan oleh Wright dalam Widyatama (2007: 15) bahwa iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasi. Iklan dipandang sebagai suatu alat yang efektif untuk memperkenalkan barang maupun jasa kepada masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam iklan haruslah bersifat persuasi artinya bahasanya harus bersifat membujuk dan memengaruhi pemirsa untuk melakukan apa yang ada dalam iklan tersebut.

Iklan menduduki peranan yang dominan dalam industri. Iklan juga merupakan senjata awal suatu perusahaan dalam memasarkan produknya. Pembuat iklan berusaha untuk membuat iklan yang dapat memengaruhi masyarakat untuk memakai produknya. Desain serta pemilihan tanda merupakan suatu hal yang menjadi perhatiannya. Pesan yang terkandung dalam iklan harus memiliki suatu daya untuk memengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Oleh karena itu, pesan iklan harus mengandung efek psikologis yang dapat memengaruhi masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai bila pesan komunikasi yang digunakan mengandung persuasi.

Tanda- tanda yang ditampilkan dalam sebuah iklan selalu mengandung makna tertentu yang telah melalui proses konstruksi yang disengaja. Iklan bukanlah realitas yang bebas makna. Makna iklan selalu datang dari pihak yang mendominasi yaitu para pembuat iklan. Dengan demikian makna iklan bisa berubah- ubah sesuai dengan apa yang hendak dicapai dan diperjuangkan oleh pembuat iklan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa iklan berfungsi untuk memersuasi mesyarakat. Namun di sisi lain, fungsi iklan tidak hanya mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk, mendeskripsikan produk, tetapi iklan juga berdampak untuk membentuk suatu sistem nilai.

Iklan membutuhkan media periklanan. “Media periklanan merupakan metode komunikasi umum yang membawa pesan periklanan, yaitu: televisi, majalah, surat kabar, dan sebagainya” (Shimp, 2003:504). Masing-masing media periklanan memiliki karakteristik yang berbeda, meliputi biaya untuk memasang iklan serta sasaran konsumen yang dituju. Hal tersebut berpengaruh terhadap berapa anggaran yang disiapkan untuk promosi dan siapa segmen pasar yang dituju oleh produsen. Televisi sebagai salah satu media periklanan memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dibanding media lain. Kelebihannya antara lain adalah,

pertama biayanya lebih efisien, artinya biaya yang dikeluarkan untuk memasang iklan di televisi memang cukup besar, namun sesuai dengan keunggulannya yang memiliki kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang luas tersebut mengakibatkan efisiensi biaya. Kedua, kemampuan menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen yang disebabkan oleh adanya dua tekanan pada dua panca indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan pendengaran. Oleh karena itu, akan lebih banyak lagi kreativitas-kreativitas yang tercipta sebagai kombinasi antara audio dan visual yang tentunya akan dapat meningkatkan daya tarik sebuah iklan. Ketiga, kemampuan untuk memengaruhi khalayak luas karena disamping iklan di televisi lebih kreatif, kenyataannya banyak dari masyarakat meluangkan waktunya di depan televisi. “Televisi dianggap sebagai media hiburan, penyedia informasi, dan sarana pendidikan yang hemat dan praktis” (Kasali, 1992:21).

Salah satu iklan yang paling banyak muncul di televisi adalah iklan kosmetik. Perempuan dan kecantikan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perempuan ingin selalu menjadi pusat perhatian sehingga kecantikan adalah syarat mutlakunya. Dimanapun berada dan kapanpun waktunya, perempuan harus selalu tampil cantik dan menarik. Kebutuhan akan kecantikan tersebut membuat perempuan menjadi ladang komoditas yang tiada habis-habisnya. Wacana kecantikan digunakan sebagai ladang bisnis yang menjanjikan bagi para produsen kosmetik. Para produsen kosmetik terus berusaha mendengungkan wacana-wacana tentang kecantikan yang ideal. Dari waktu ke waktu, para produsen kosmetik akan terus-menerus mencoba untuk menyodorkan konsep-konsep baru (atau konsep lama yang diperbarui) kepada masyarakat dan perempuan tentunya, tentang apa itu yang dinamakan kecantikan ideal. Salah satu kecantikan wanita yang ideal adalah wanita yang memiliki kulit putih.

Konsep perempuan yang cantik adalah perempuan yang berkulit putih sebenarnya tidak bisa terlepas dari sisi historis bangsa Indonesia. Menurut hasil penelitian Prabasmoro (2003) dan Yulianto (2007) (dalam Puspa, 2010: 312) keterpesonaan masyarakat Asia (termasuk Indonesia) akan kulit yang lebih putih tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu Indonesia sebagai sebuah negara jajahan bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Jepang yang semuanya berkulit lebih cerah dari kulit bangsa Indonesia.

Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun hingga meninggalkan dampak yang masih terasa hingga sekarang. Penjajahan tersebut tidak hanya secara fisik dengan mengambil kekayaan Indonesia, tetapi juga penjajahan tersebut terjadi pada hampir semua sektor kehidupan, seperti politik, sosial, budaya, dan agama. Pada masa penjajahan, bangsa penjajah menempatkan dirinya sebagai kelas *superior*, sedangkan bangsa pribumi

(*Inlander*) menduduki kelas *inferior* sebagai bangsa yang terjajah. Bangsa terjajah tentunya tidak ingin diperlakukan sebagai bangsa yang kedudukannya di bawah bangsa penjajah. Bangsa pribumi tetap ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah dengan melakukan perjuangan kelas hingga bisa menyamai apa yang dimiliki bangsa penjajah. Bhaba (1994: 86) mengemukakan sebuah konsep yang kemudian dikenal dengan "*mimicry*" menyebutkan bahwa bangsa terjajah berusaha menghimpun kekuatan untuk melawan penjajahan dengan cara meminjam berbagai elemen budaya untuk peniruan. Kaum terjajah berusaha menyamakan kelasnya dengan kaum penjajah dengan membangun identitas atau persamaan untuk menaikkan martabatnya agar sederajat dengan kaum penjajah. Peniruan yang dilakukan pribumi kepada bangsa penjajah lebih banyak melalui melalui gaya hidup yang menurut Bhabha sebagai hasrat masyarakat terjajah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan untuk mencapai kemajuan dan menempatkan diri setara dengan bangsa penjajah. Perlawanan dalam mimikri atau peniruan ini merupakan strategi untuk menghadapi penjajah agar mendapatkan peningkatan martabat. Untuk mencapainya memerlukan representasi subjek (Bhaba, 1994: 44).

Peniruan-peniruan yang dilakukan bangsa pribumi terhadap bangsa penjajah sedikit banyak akan membuat bangsa pribumi kehilangan identitas. Dalam perjuangan kelasnya, bangsa pribumi tanpa sadar telah menjadi korban diskriminasi bahwa bangsa pribumi memiliki kelas yang lebih rendah dari bangsa penjajah sehingga bangsa pribumi menganggap perlu melakukan penyamaan kelas. Konsep tersebut menurut Bourdieu disebut sebagai "kekerasan simbolik" (*symbolic violence*). Menurut Bourdieu (1995) dalam Indi Aunullah (2006:111), kekerasan Simbolik adalah sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok/ ras/ suku/ gender tertentu. Diskriminasi tersebut menyebabkan korban merasa bahwa dirinya lebih rendah (jelek) dari konsep ideal yang mereka inginkan. Perasaan tersebut menyebabkan korban kekerasan simbolik akan melakukan perjuangan untuk mencapai situasi yang mereka anggap ideal. Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terjadi karena adanya kuasa simbolik (*symbolic power*) dan dominasi simbolik (*symbolic dominance*).

Kuasa simbolik (*symbolic power*) dan dominasi simbolik (*symbolic dominance*) merupakan kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi kenyataan sosial secara semena, tetapi kesemenaannya tidak disadari. Dalam arti inilah kuasa simbolik merupakan kuasa untuk mengubah dan menciptakan realitas yakni

mengubah dan menciptakannya sehingga diakui dan dikenali secara absah (Bourdieu dalam Indi Aunullah, 2006).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang terjadi pada iklan kosmetik pencerah kulit yang ditayangkan di televisi dan bagaimana latar belakang munculnya kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap warna kulit bangsa Indonesia. Objek penelitian yang dipilih adalah iklan pencerah kulit *Fair & Lovely* Versi Shiren Sungkar dengan alasan sebagai berikut: (1) iklan tersebut memiliki frakuensi kemunculan di televisi yang cukup tinggi, (2) bintang iklan pada iklan tersebut adalah Shiren Sungkar yang berdarah Arab-Minang, dan (3) iklan tersebut bercerita tentang perjuangan seorang wanita pribumi yang ingin kulitnya lebih putih seperti Shiren Sungkar.

Penelitian ini bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa kita harus bangga dengan warna kulit yang kita miliki. Warna kulit tersebut akan menunjukkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Iklan-iklan pencerah kulit beredar sebagai upaya dalam mencapai tujuan komersial dengan memanfaatkan hegemoni publik yang telah berlangsung sejak pascakolonialisme di Indonesia.

## Pembahasan

### Gambaran Umum tentang Iklan *Fair & Lovely* Versi Shiren Sungkar

Iklan *Fair & Lovely* Multivitamin Versi Shiren Sungkar berdurasi selama 15 detik dibintangi oleh Shiren Sungkar. Shiren Sungkar adalah aktris Indonesia berdarah Arab- Minang. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Mark Sungkar dan Fanny Bauty yang dilahirkan di Jakarta, 28 Januari 1992.

Iklan *Iklan Fair & Lovely* Multivitamin Versi Shiren Sungkar menceritakan tentang seorang wanita kru film yang mengagumi kulit cerah dari bintang film Shiren Sungkar. Kru film tersebut menginginkan wajahnya cerah seperti Shiren Sungkar. Kemudian Shiren Sungkar merekomendasikan *Fair & Lovely* Multivitamin kepada kru film tersebut. Setelah beberapa lama, kulit kru film tersebut menjadi lebih cerah. Kru film tersebut berterima kasih karena berkat Shiren dan *Fair & Lovely* Multivitamin kulitnya menjadi lebih cerah. Cerita tersebut tampak pada data linguistik berikut.

Kru film : “Wajahmu cerah! Ingin deh punya wajah sepertimu!”  
Shiren Sungkar : “*Fair & Lovely* Multivitamin ABCD.”  
Suara pria : (*Fair & Lovely* Multivitamin mengandung Allantoin A,

vitamin B,C,D. Dipakai setiap hari)  
Shiren Sungkar : “Wajahmu cerah!”  
Kru film : “Berkatmu dan *Fair & Lovely ABCD*”  
Suara pria : (*Fair & Lovely Multivitamin*)

## **Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*) terhadap Warna Kulit Orang Indonesia**

Menurut Fitzpatrick (<http://rhizomagoldensea.com>), dermatologis terkemuka asal Amerika, mengelompokkan lima jenis warna kulit manusia yang masing-masing mempunyai karakter serta kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelima jenis tersebut adalah *very fair*, *fair*, *medium*, *olive*, serta *brown* atau *black*. Kelima jenis warna kulit ini terbilang cukup mewakili beragam warna kulit seluruh manusia di dunia. Kulit bangsa Indonesia termasuk jenis *medium* atau orang sering menyebutnya sawo matang. Warna kulit ini berada di tengah antara kulit putih dan kulit hitam. Karakteristik jenis warna kulit *medium* adalah walaupun warnanya agak kecoklatan namun jika terpapar sinar matahari masih bisa lebih gelap.

Dalam iklan *Fair & Lovely Multivitamin* versi Shiren Sungkar terdapat kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap warna kulit orang Indonesia. Warna kulit *medium* atau sawo matang dianggap tidak menarik. Warna kulit putih dianggap lebih menarik daripada warna kulit *medium* atau sawo matang. Wanita dianggap cantik dan menarik apabila berkulit putih. Hal tersebut tampak pada jalan cerita iklan yang menceritakan bahwa seorang bintang film (diperankan oleh Shiren Sungkar) haruslah cantik. Kriteria kecantikan tersebut salah satunya adalah berkulit putih. Hal itu tampak dari tampilan iklan berikut.





Potongan iklan di atas menceritakan bahwa terdapat seorang wanita kru film yang sedang berbicara dengan seorang artis wanita (diperankan oleh Shireen Sungkar) di sebuah studio film. Seorang wanita itu didefinisikan sebagai kru film karena tampak dari pakaian yang ia kenakan bertuliskan “Studio 10 Crew”. Dari tampilan iklan tersebut tampak bahwa kulit bintang film (Shireen) lebih putih daripada kulit kru film. Dari tampilan iklan tampak bahwa warna kulit kru film wanita tersebut adalah *medium* (sawo matang) sedangkan warna kulit Shireen adalah putih. Warna kulit putih Shireen didapatkan dari warna kulit ayahnya yang berasal dari kerurunan Arab. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk menjadi bintang film yang cantik dan menarik haruslah berkulit putih.

Kemudian dalam adegan tersebut terdapat dialog yang terjadi antara kru film dan Shireen Sungkar. Bunyi dialognya adalah sebagai berikut.

Kru film : “Wajahmu cerah! Ingin deh punya wajah sepertimu!”

Shireen Sungkar : “*Fair & Lovely* Multivitamin ABCD.”

Dari dialog tersebut tampak bahwa kru film wanita tersebut tidak suka (tidak percaya diri) dengan warna kulitnya. Hal itu tampak dari keinginannya untuk memiliki warna kulit yang cerah seperti Shireen Sungkar. Menurut Bourdieu (1995), hal tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Terdapat sebuah hegemoni secara tidak sadar bahwa masyarakat diarahkan untuk meyakini bahwa kulit sawo matang itu tidak menarik jika dibandingkan dengan warna kulit putih. Diskriminasi tersebut sudah mengarah pada diskriminasi suatu ras tertentu karena warna kulit merupakan salah satu identitas ras.

Pada iklan tersebut kru film wanita membenarkan bentuk hegemoni bahwa kulit sawo matang itu tidak menarik. Karena tidak menarik, kru film wanita tersebut ingin mengubah warna kulitnya menjadi lebih cerah. Warna kulit sawo matang dianggap sebagai kelas sosial yang rendah, sedangkan warna kulit putih dianggap sebagai kelas sosial yang tinggi. Kru film wanita tersebut beruaha melakukan perjuangan kelas menuju kelas sosial yang lebih tinggi.

Pada akhir iklan ditunjukkan bahwa perjuangan kelas yang dilakukan oleh kru film wanita untuk memiliki kulit yang lebih cerah berhasil. Hal tersebut tampak pada dialog berikut ini.

Shiren Sungkar : “Wajahmu cerah!”

Kru film : “Berkatmu dan *Fair & Lovely ABCD*”

Keberhasilan perjuangan kelas untuk memiliki kulit yang lebih putih membuat kru film merasa puas dan bahagia. Hal tersebut tampak pada tampilan iklan berikut.



Pada potongan iklan di atas tampak bahwa kru film tersebut begitu bahagia dan puas dengan pencapaiannya. Kebahagiaan tersebut tampak dari senyuman yang mengembang dan gestur tubuh yang menunjukkan sikap percaya diri.

Menurut Bourdieu (1995), Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terjadi karena adanya kuasa simbolik (*symbolic power*) dan dominasi simbolik (*symbolic dominance*). Kuasa simbolik (*symbolic power*) dalam iklan ini diperankan oleh produsen *Fair & Lovely* sekaligus sebagai

pemasang iklan. Produsen memiliki modal ekonomi untuk memasang iklan yang berfungsi menyebarkan isu tentang warna kulit. Pemasang iklan menyebarkan, memanfaatkan dan mengembangkan isu publik bahwa wanita cantik itu berkulit putih. isu publik bahwa wanita cantik itu wanita yang berkulit putih, menurut Bourdieu (1995) termasuk sebagai dominasi simbolik (*symbolic dominance*). Perhatikan tabel berikut.

<i>symbolic power</i>	<i>symbolic dominance</i>	<i>symbolic violence</i>
Produsen kosmetik pemutih kulit sebagai pembuat iklan	Adanya kesepahaman masyarakat Indonesia bahwa wanita berkulit putih itu cantik	Warna kulit sawo matang sebagai identitas orang Indonesia itu tidak cantik/ tidak menarik

Tabel 1: Bentuk *symbolic power*, *symbolic dominance*, dan *symbolic violence* pada iklan *Fair & Lovely* versi Shiren Sungkar

## Hubungan Warna Kulit Putih dengan Sejarah Kolonialisme di Indonesia

Keterpesonaan masyarakat Indonesia terhadap kulit putih tidak lepas dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Menurut hasil penelitian Prabasmoro (2003) dan Yulianto (2007) (dalam Puspa, 2010: 312) menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara wacana ‘kulit putih’ yang saat ini sangat marak di negara-negara Asia dengan ‘keterpesonaan’ mereka akan ras kulit putih. Keterpesonaan masyarakat Asia (termasuk Indonesia) akan kulit yang lebih putih tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu Indonesia sebagai sebuah negara jajahan bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Jepang yang semuanya berkulit lebih cerah dari kulit bangsa Indonesia. Dengan kata lain terdapat wacana kolonial (*colonial discourse*) yang kental dalam iklan-iklan produk pemutih kulit tersebut. Hal senada diungkapkan juga oleh Goon dan Craven (2003) (dalam Puspa, 2010: 312) yang menyatakan bahwa masalah pemutih kulit ini bisa dikritisasi dari sudut pandang historis bangsa-bangsa Asia. Mereka menyebut iklan produk-produk pemutih kulit sebagai iklan neokolonial.

Keterpesonaan bangsa Indonesia terhadap kulit putih merupakan usaha menyamakan kelas terhadap bangsa penjajah. Hal tersebut menurut Bhaba (1994) disebut dengan *mimicry*. Bhaba (1994) menyebutkan bahwa bangsa terjajah berusaha menghimpun kekuatan untuk melawan penjajahan dengan cara meminjam berbagai elemen budaya untuk peniruan. Kaum terjajah berusaha menyamakan kelasnya dengan kaum penjajah dengan membangun identitas atau persamaan untuk menaikkan martabatnya agar sederajat dengan kaum penjajah. Usaha-usaha peniruan



tersebut mencakup berbagai aspek sosial dan budaya, sebagai contohnya adalah cara berpakaian, cara berbicara, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, bahkan masalah penampilan yang lain seperti gaya rambut termasuk warna kulit. Warna kulit bangsa pribumi dengan bangsa penjajah berbeda. Bangsa Belanda memiliki kulit putih sedangkan bangsa Indonesia berkulit sawo matang. Sebagai usaha membangun identitas yang sederajat dengan bangsa penjajah, bangsa pribumi berusaha melakukan peniruan warna kulit. Usaha peniruan warna kulit agar lebih putih menimbulkan sebuah keterpesonaan yang akhirnya memicu sebuah anggapan bahwa warna kulit putih lebih menarik dari pada warna kulit sawo matang. Keterpesonaan masyarakat Indonesia terhadap warna kulit putih dianut hingga sekarang. Hal tersebut dimanfaatkan sebagai ladang bisnis bagi pelaku ekonomi.

## Kesimpulan

Keterpesonaan masyarakat Indonesia terhadap warna kulit putih menyebabkan adanya adanya pihak yang melakukan kekerasan simbolik (*simbolik violence*) terhadap warna kulit sawo matang sebagai Identitas bangsa Indonesia. Kekerasan simbolik (*simbolik violence*) tersebut justru malah dibenarkan dan disetujui oleh masyarakat Indonesia. Larisnya produk pencerah kulit membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menyetujui kekerasan simbolik (*simbolik violence*) yang terjadi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh produsen kosmetik untuk membuat iklan yang menyinggung isu warna kulit tersebut guna merai keuntungan komersil.

Keterpesonaan masyarakat Indonesia terhadap kulit putih tidak lepas dari sisi historis bangsa Indonesia yang pernah dijajah bangsa Eropa khususnya Belanda. Keterpesonaan tersebut sebagai bentuk peniruan identitas terhadap bangsa penjajah sebagai usaha penyamaan status.

## Daftar Pustaka

- Aunullah, Indi. 2006. *Bahasa dan Kuasa Simbolik dalam Pandangan Piere Bourdieu*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada.
- Bhabha, Homi. K. 1994. *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Kasali, Rhenald. 1992. *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Puspa, Ratih. 2010. *Isu Ras dan Warna Kulit dalam Konstruksi Kecantikan Ideal Perempuan*. Jurnal Komunikasi FISIP, Volume 23, Nomor 4, 312-323.
- Shimp, Terence A. 2000. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu Jilid I*. Terjemahan oleh

Revyani Sjahrial dan Dyah Anikasari. Jakarta: Penerbit Erlangga.  
Widyatama, Rendra. 2007. *Pengantar Periklanan*. Yogyakarta: Pustaka  
Penerbit Publisher.  
www.rhizomagoldensea.com. 2015. *Kenali 5 Jenis Warna Kulit Menurut  
Ahli Dermatologi*.

# BAHASA HEGEMONI PARA PENGUASA

**Diana Mayasari, M. Pd**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Jombang

E-mail: dianamayasari.stkipjb@gmail.com

## ABSTRAK

*Bahasa dan kekuasaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Para penguasa dengan ideologi yang dimilikinya seringkali menggunakan media bahasa sebagai sarana menerapkan ideologi tersebut. Makalah ini akan menyajikan ulasan berkaitan dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan hegemoni dari penguasa terhadap kaum minoritas. Dengan bersikap kritis pada implikatur, bahasa muslihat, bahasa persuasi dari penguasa. Sikap ini diharapkan dapat meminimalisir segala bentuk hegemoni dari para penguasa.*

**Kata kunci:** ideologi, hegemoni, bahasa persuasi

## Pendahuluan

Bahasa bukanlah realita kosong bagi penuturnya disana tempat ideologi dan kekuasaan bersemayam. Eriyanto (2001:3) menyebutkan bahwa bahasa merupakan aspek utama dari penggambaran suatu subjek, dan melalui bahasa ideologi tergambar di dalamnya. Khususnya bagi para kaum yang dominan dari sebuah negara sebut saja pemerintah, politikus, dan kelompok kelas menengah ke atas; bahasa memiliki andil

besar untuk menampakkan kekuasaannya. Kekuasaan adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak, akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Di Indonesia sendiri kekuasaan banyak berkaitan dengan para politikus. Moore dan Hendri, 1982: 127 (Thomas dan Wareing, 2007: 18) mendefinisikan politik sebagai kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan yang dikehendaki terjadi; sehingga dengan meneliti dari sebuah kekuasaan, kita akan mengetahui siapa yang mengendalikan dan demi kepentingan siapa kekuasaan tersebut dijalankan.

Lalu bagaimana hubungan antara kekuasaan, ideologi, dengan bahasa? Tanpa kita sadari bahasa sering kali menunjukkan kekuasaan; bahkan kekuasaan juga diterapkan dan dilaksanakan melalui bahasa. Sebut saja dalam undang-undang, pidato, rapat, sidang; di sana terdapat aturan yang mencerminkan kekuasaan siapa yang boleh berbicara dan bagaimana melaksanakan berbagai acara tersebut, siapa yang berhak diperintah menepati undang-undang dan siapa yang lepas dari berbagai aturan tersebut. Bahasa merupakan media tersampainya aturan-aturan tersebut. Agar berbagai aturan tersebut berlaku secara wajar dan masuk akal maka perlu adanya ideologi yang diterapkan; tidak lagi dengan kekerasan atau paksaan melainkan dengan membujuk orang untuk patuh secara sukarela melalui bahasa. Ideologi diartikan sebagai sesuatu yang membuat keyakinan-keyakinan yang ingin ditanamkan penguasa kepada warganya menjadi terasa “wajar dan masuk akal” sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mempertanyakan ideologi yang akan dijalankan (Thomas dan Wareing, 2007: 53).

Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembaca bahwa senyatanya bahasa tidak hanya media kosong tanpa maksud atau ideologi yang hendak disampaikan oleh penyimaknya. Senada dengan pendapat tersebut, Eriyanto (2001: 4) menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan oleh *kaum yang mendominasi* tidak digunakan secara netral. Bahasa merupakan representasi yang berperan membentuk subjek tertentu, tema-tema tertentu, strategi tertentu, bahkan ideologi tertentu bagi penuturnya. Kelompok yang dominan bisa jadi akan membuat kelompok lain bertindak, berbicara sesuai kehendaknya. Kenapa hal tersebut terjadi? Van Dijk mengatakan bahwa kelompok dominan lebih mempunyai akses untuk melakukan hal tersebut, yakni dengan adanya pendidikan yang tinggi, pengetahuan, uang yang lebih daripada kelompok yang tidak dominan. Fenomena ini mengajak kita untuk lebih kritis terhadap bahasa.

## Kajian Teori

Kita tentu masih mengingat dengan jelas pada situasi pemilihan presiden. Media komunikasi kita, seperti televisi, koran, dan radio dikuasai oleh masing-masing calon dan kubu pendukungnya. Saat itu pasangan dengan nomor urut pertama Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan nomor urut kedua Jokowi dengan Yusuf Kalla. *TV One* dan *ANTV* berdasarkan asumsi publik merupakan stasiun televisi yang mendukung pasangan nomor urut pertama, setiap berita yang muncul adalah bentuk-bentuk dukungan dan berita positif bagi pasangan tersebut. Berbeda lagi dengan *Metro TV* yang terus mendengungkan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif dan berbagai hal yang mampu menambah dukungan bagi pasangan nomor urut dua. Bahkan masing-masing stasiun televisi tidak lagi menutupi kekurangan dari lawan pasangan yang didukung dan sengaja memublikasikan agar masyarakat berpihak pada pasangan yang diusung oleh kelompok sosial yang mempunyai perusahaan media tersebut.

Dengan melihat tayangan dari masing-masing stasiun televisi tersebut; tanpa disadari para pemilik stasiun televisi tersebut telah menghegemoni para penyimaknya agar mereka mendukung salah satu calon yang diusung atau bahkan memberikan dampak yang lainnya. Tayangan ini juga mengaburkan segala kebenaran dari lawan pasangan yang diusung. Disinilah andil bahasa sangat besar. Thomas dan Wareing (2007:21) menyebutkan bahwa bahasa mencerminkan “kebenaran” dari kelompok yang dominan dan “menyembunyikan kebenaran” dari kelompok yang kurang dominan. Lalu saat ini muncul pertanyaan lagi bagaimana bahasa menjadikan suatu hal menjadi wajar dan manipulasi kebenaran bagi kaum minoritas?

Ada berbagai cara agar kekuasaan diterima rakyat. *Pertama*, dengan cara mendapatkan persetujuan dengan membujuk orang untuk patuh secara sukarela. Bentuknya, melaksanakan kekuasaan lewat penciptaan pertujuan atau setidaknya menciptakan kerelaan untuk membiarkan kekuasaan itu berjalan (Fairclough, 1989: 4). Membujuk bahwa apa yang diinginkan oleh kelompok dominan sama dengan apa yang diinginkan kelompok minoritas. Cara ini dapat ditempuh dengan merubah ideologi melalui bahasa. Ideologi di sini diartikan sebagai keyakinan yang dirasa logis dan wajar (Jones dan Wareing dalam Thomas dan Wareing, 2007: 54).

Sebuah rumusan mengindikasikan hegemoni para penguasa adalah melihat bahasa tersebut melalui ideasional, yakni adanya muatan ideologi yang disampaikan oleh penutur, relasi antara penutur dengan media jika tuturan itu disampaikan melalui media, identitas dari wartawan dan peliput serta bagaimana bahasa ideasional tersebut hendak ditampilkan

(Eriyanto, 2001: 286-288). Bahasa yang digunakan dalam menerapkan ideologi menggunakan implikatur, bahasa muslihat, bahasa persuasi yang di dalamnya terdapat gaya bahasa pernyataan dalam tiga bagian, penggunaan pronomina, (Thomas dan Wareing, 2007:55-76).

**Implikatur.** Implikatur dapat digunakan untuk membuat orang secara tidak sadar menerima pendapat kita yang semestinya berlawanan dengan keyakinan orang lain. Brown dan Yule (1996: 31) menyebutkan bahwa implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan penutur. Senada dengan pendapat tersebut; Grice menunjukkan bahwa sebuah implikatur merupakan proposisi yang diimplikasikan melalui ujaran dari sebuah kalimat dalam satu konteks, sekalipun proposisi itu bukan bagian dari pokok yang dibicarakan sebelumnya. Di sini Grice lebih menekankan konteks yang turut memberi makna dalam sebuah tuturan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa implikatur merupakan maksud atau makna implisit dari sebuah tuturan yang sesuai dengan konteks tanpa melihat makna harfiah dari tuturan tersebut.

Schiffrin (2007:549) menjelaskan bahwa konteks berkaitan dengan situasi, pengetahuan, dan pengetahuan situasi dilihat dari berbagai cara pandang yang berbeda dalam sebuah wacana. Senada dengan pendapat tersebut Djajasudharma (2010:27) menyebut konteks berkaitan dengan wacana yang disampaikan dalam tuturan dibentuk oleh unsur-unsur situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan saluran atau media yang digunakan. Konteks tidak lepas dari komunikasi antarpenutur Hymes membagi ke dalam tiga unit analisis, meliputi situasi (*situation*), peristiwa (*event*), dan tindak (*act*).

Situasi komunikatif (*communicative situation*) merupakan konteks di mana komunikasi terjadi seperti upacara, perkelahiran, perburuan, pernikahan, perdebatan diskusi, pembelajaran di dalam kelas, konferensi, pesta dan lain sebagainya. Peristiwa komunikatif (*communicative event*) merupakan unit dasar untuk tujuan deskriptif komunikasi yang sama meliputi: topik yang sama, peserta yang sama, ragam bahasa yang sama. Tindak komunikatif (*communicative act*) umumnya berbatasan dengan fungsi tunggal interaksional, seperti pernyataan referensial, permintaan, atau perintah, yang mungkin berupa tindak verbal atau tindak nonverbal (Muriel, 2003: 23-24).

Peristiwa tutur adalah sebuah aktifitas berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, dalam

waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer, 2010: 47). Dalam peristiwa tutur terdapat komponen tutur yang dipaparkan Hymes sebagai penentu pemakaian ragam bahasa. Komponen tutur memiliki kaitan dengan sociolinguistik mikro, yakni berkenaan dengan siapa berbicara dalam bahasa apa, kepada siapa, tentang apa dan sebagainya. Dengan memahami komponen tutur ini akan meminimalisir hegemoni penguasa, jika kita meninjau aspek-apeknya.

Sumarsono dan Patrina (2004: 325) mengatakan bahwa seseorang yang ingin menganalisis *etnografi wicara* tidak cukup dengan menganalisis situasi, peristiwa dan tindak tutur seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Melainkan harus menyertakan komponen tutur. Hymes Dell lebih lanjut mengemukakan bahwa berbagai komponen harus disertakan dalam deskripsi etnografis komprehensif tindak tutur. Klasifikasi yang ia usulkan dikenal dengan SPEAKING, di mana setiap huruf dalam akronim tersebut adalah singkatan untuk komponen komunikasi yang berbeda. Tabel di bawah ini menunjukkan komponen ini dengan definisi singkat dari masing-masing.

Akronim	Istilah	Definisi	Penjelasan
S	<i>Situation</i>	Mencakup : <i>Setting</i> (latar) berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. <i>Scene</i> (suasana) mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan.	Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda sebagai contoh berbicara dilapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan dalam situasi ramai tentu berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu orang banyak membaca dan dalam keadaan sunyi.
P	<i>Participants</i>	Merujuk pada <i>speaker, sender, addressor, receiver, addressee</i> yakni pihak-pihak peristiwa komunikasi, yakni penutur dan laan tutur	Hal ini berkenaan dengan Satus sosial dan kelas sosial partisipan yang menentukan ragam bahasa yang digunakan. Ragam bahasa sesama politikus, dengan ragam bahasa antara politikus dengan presiden

E	<i>Ends</i>	Merujuk pada <i>purpose-outcome</i> ( <i>maksud-hasil</i> ) dan <i>purpose-goal</i> ( <i>maksud-tujuan</i> ) pertuturan.	Peristiwa tutur yang terjadi di ruang sidang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara ( <i>purpose-outcome</i> ); Jaksa ingin membuktikan kesalahan terdakwa, pembela berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberkan keputusan yang adil ( <i>purpose-goal</i> ).
A	<i>Act Sequences</i>	Mengacu pada bentuk pesan ( <i>message form</i> ) dan isi pesan ( <i>message content</i> ). Bentuk pesaan ( <i>message form</i> ) berkenaan dengan dengan kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya. Isi pesan ( <i>message content</i> ) berkenaan topik	Bentuk pesan berkaitan dengan bahasa yang digunakan partisipan atau cara mengungkapkan pesan atau topik pembicaraan. Sedangkan isi pesan berkaitan dengan topik atau perubahan topik yang terjadi dalam tuturn sehingga <i>Act Sequences</i> merupakan pusat komponen tutur.
K	<i>Key</i>	Mengacu pada nada, cara, dan jiwa tuturan dilakukan agar pesan disampaikan.	Dengan senang hati, dengan serius, atau dapat ditunjukkan juga dengan gerak tubuh dan isyarat (nonverbal) serta pemanjangan atau pemendekan kalimat ujaran sebagai menguat ekspresi tuturan.
I	<i>Instrumentalities</i>	Mengacu pada jalur bahasa ( <i>channel</i> ) yang digunakan dan juga mengacu pada kode ujaran ( <i>form of speech</i> ) yang digunakan.	Jalur bahasa merujuk pada tulisan, lisan, melalui telegraf atau telepon, sedangkan kode ujaran mengacu pada bahasa, dialek, fragam atau register, gaya bahasa (gaya tutur) dan varietas bahasa.



N	<i>Norms</i>	Mengacu pada norma berinteraksi dan norma interpretasi terhadap ujaran dari lawan bicara.	Berhubungan dengan cara berinterupsi, cara bertanya, di dalam norma ini terdapat perilaku khas dan sopan santun dalam tuturan. Sedangkan norma interpretasi antara masyarakat dapat berbeda sesuai dengan budaya yang dimilikinya.
G	<i>Genres</i>	Mengacu pada kategori bahasa penyampaian	Peribahasa, narasi, puisi, pepatah, doa, teka-teki dan sebagainya.

Lalu bagaimanakah implikatur yang dapat digunakan oleh penguasa? Banyak slogan-slogan yang kita dengar, seperti contoh “suara golkar adalah suara rakyat”. Maksud dari slogan tersebut adalah Partai Golkar adalah wakil dari rakyat. Kalimat tersebut juga menghegemoni partai lainnya, yakni bahwa partai-partai lainnya tidak menyuarakan suara rakyat. Dengan adanya slogan tersebut bagi orang yang sepakat bahwa Partai Golkarlah yang layak untuk dipilih, sehingga partai-partai yang lain tersisihkan. Hal ini terasa wajar dan masuk akal bagi orang-orang yang sepakat dengan slogan tersebut.

Contoh lain, ketika dulu Jokowi kampanye, sering kali menyebutkan *Indonesia Hebat, Presiden merakyat* sehingga para penyimak yang sepakat akan memiliki ideologi bahwa ketika Jokowi telah menjadi presiden maka Indonesia menjadi lebih hebat, dari segi politik, ekonomi, kerjasama dengan berbagai bidang dengan luar negeri juga menjadi lebih baik. Selain itu presiden merakyat, artinya slogan ini akan merubah paradigma masyarakat yang setuju bahwa ketika presiden mereka dari rakyat biasa tentunya akan lebih mengetahui kondisi rakyat senyatanya, sehingga hal ini akan menambah suara bagi Jokowi.

Contoh di atas menunjukkan bagaimana bahasa mampu mengubah ideologi masyarakat dengan menggunakan implikatur, yakni untuk menyiratkan atau mengimplikasikan bahwa kita sepakat situasi akan lebih baik dari pada masa sebelum pemilihan presiden dengan adanya perubahan ideologi penyimaknya. Selain itu, pernyataan tersebut akan menghegemoni calon pasangan lainnya bahwa kalau mereka terpilih tidak akan menjadikan Indonesia menjadi lebih kuat, malah lebih lemah dari berbagai aspek.

**Bahasa Muslihat.** Banyak sekali bahasa muslihat yang digunakan para penguasa kita untuk digunakan sebagai tipu daya dalam memperoleh kekuasaan. Tentu masih dapat kita ingat dengan baik sering kali ketika

diberikan pertanyaan wartawan, Jokowi tidak mampu menjawab secara tegas. Jawaban yang diberikan ” masih dalam tahap penggodokan, atau “masih saya pelajari kasusnya” dan sebagainya. Para politisi sangat jarang menggunakan bahasa”ya” atau “tidak”, pasti mereka menggunakan kalimat lain sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi segala kekurangannya.

Orwell (Thomas dan Wareing, 2007: 63-64) mengajukan aturan agar semua penulis dan pembicara yang ingin mewujudkan komunikasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami. Hal ini berlaku sebaliknya bagi para penguasa yang sengaja ingin menerapkan *hegemoni*. Aturan tersebut adalah sebagai berikut.

Usahakan tidak menggunakan bahasa perumpamaan atau gaya bahasa yang sudah terbiasa di media cetak, karena hal ini akan mempersulit pemahaman penyimak. Para penguasa sengaja menggunakan gaya bahasa dan biasa yang terdapat di media cetak sehingga menghegemoni penyimanya.

Gunakan kalimat efektif yang mampu mewakili maksud yang ingin disampaikan daripada menggunakan bahasa yang mubadzir. Peristiwa ini sering dilakukan politisi, para pengacara, dokter dan akdemisi dengan tujuan untuk *mengintimidasi*, membuat orang lain *segan*, atau bahkan ada pula yang membingungkan para penyimaknya.

Buang kata yang tidak perlu. Penggunaan kata yang berlebihan digunakan oleh para penguasa untuk membuat pernyataan yang lebih mengesankan, sehingga pernyataan itu sulit dimengerti oleh penyimaknya.

Gunakan bentuk aktif. Penggunaan bentuk pasif sering kali digunakan oleh para penguasa untuk membuat informasi yang disampaikan lebih sulit dipahami, bersifat formal, dan hanya sedikit saja isi yang disampaikan. Cara ini akan berakibat bagi kaum yang memiliki pengetahuan rendah khususnya masyarakat menengah ke bawah cenderung membiarkan berbagai macam kalimat (slogan) yang dilontarkan penguasa. Mereka membiarkan dan menyetujui karena sebenarnya adalah efek dari ketidakpahaman informasi yang disampaikan.

Hindari penggunaan istilah asing. Penggunaan istilah asing bagi penutur hanya bertujuan untuk membuat penyimaknya terkesan dengan melihat betapa hebatnya penutur dengan berbagai istilah asing yang ia ketahui. Dengan demikian penggunaan istilah asing banyak digunakan oleh penguasa dengan alasan *statemen* mereka tanpa ada penolakan dan terkesan menguasai berbagai hal sesuai dengan banyaknya kata asing yang digunakan. Namun disisi lain penyimak merasa bosan, segan, tidak berdaya dan merasa bodoh. Sehingga menganggap bahwa apa yang disampaikan penutur adalah benar.

Gunakan kata yang bernilai positif dan sebisa mungkin menghindari perkataan yang buruk. Aturan 1-5 tentunya kita bisa mengoreksi dari pembicara yang melanggar aturan tersebut. Namun, aturan yang ke-6 ini tanpa perlu adanya koreksi jika penguasa lebih sering menggunakan bahasa yang bernilai negatif di muka publik sudah tentu ada rasa enggan untuk mendengarkan bagi penyimaknya.

Contoh realitanya saja ketika ada debat dari pasangan calon presiden. Kala itu pasangan Prabowo Subianto dengan terang-terang membahas soal kebijakan Jusuf Kalla mengenai impor beras yang mengakibatkan harga beras di Indonesia menjadi murah namun banyak merugikan petani. Bahasa ini jelas tidak menguntungkan pasangan Prabowo malah bahasa tersebut memberikan efek arogansi, fulgar dan memunculkan cibiran bagi pasangan tersebut karena belum jelas kebenarannya. Sedangkan pasangan Jokowi Yusuf Kalla senyatanya banyak melanggar aturan 1-5 tersebut. Alhasil bagi masyarakat awam debat tersebut pasangan Jokowi-JK berada dalam posisi unggul.

**Bahasa Persuasi.** Retorika adalah bentuk bahasa persuasi yang digunakan oleh para kaum dominan, yakni para penguasa; baik politisi, iklan produk. Dalam retorika muncul beberapa aspek yakni gaya bahasa dan pernyataan dalam tiga bagian.

**Gaya bahasa.** Banyak gaya bahasa yang digunakan oleh kaum dominan di negeri kita dengan bahasabahasa yang abstrak. Namun karena keabstrakan tersebut para penyimak menyetujui gaya bahasa tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Contoh ekonomi yang kuat. Gaya bahasa disebutkan Thomas dan Wareing (2007: 72) memiliki fungsi penting dalam bahasa kaum dominan ambil contoh saja para politikus. Gaya bahasa ini memuat berbagai ide yang abstrak sehingga lebih mudah dipahami selain itu juga memiliki kekuatan ideologi yang besar. Hal ini dikarenakan bahasa tersebut menghubungkan gaya bahasa penutur dengan pengalaman sehari-hari yang mempunyai makna emosional besar bagi penyimaknya.

**Pernyataan dalam tiga bagian.** Pidato pertama kali presiden terpilih Jokowi setelah pelantikan diakhiri dengan kata "kerja, kerja, kerja", cara ini dipilih untuk menekankan perintahnya tersebut dengan membuat pernyataan dalam tiga bagian. Hal ini sebagai sarana retorika yang ampuh digunakan oleh kaum dominasi untuk menyerukan ideologinya.

**Penggunaan pronomina (kata ganti orang) secara retorik.** Penggunaan kata ganti orang dalam retorika juga memiliki pengaruh yang besar. Pembicara harus hati-hati dalam menyebutkan kata ganti untuk dirinya sebagai pembicara, dan menyebutkan kata ganti pendengarnya.

## Penutup

Tulisan ini diharapkan membantu pembaca untuk lebih kritis terhadap segala bentuk dominasi ideologi dari kaum yang dominan, yakni para penguasa. Dengan demikian, kita tidak dengan mudah menerima segala bentuk ideologi yang tidak sesuai; maka kita berhak untuk menolaknya. Melalui sikap kritis terhadap bentuk implikatur, bahasa muslihat, bahasa persuasi dari penguasa; kita akan tahu maksud yang implisit dari penguasa tersebut; sehingga dengan membaca makalah ini istilah hegemoni tidak melekat pada kehidupan kita.

## Daftar Pustaka

- Brown, Gillian dan Gerge Yule. 1996. *Analisis Wacana* (edisi terjemahan oleh I. Soetikno). Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Chaer, Abdul., Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djajasudharma, Fatimah. 2010. *Wacana Pemahaman dan hubungan antarunsur*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Saville, Muriel., Troike. 2003. *The Ethnography of Communication: An Introduction (Third Edition)*. London: Blackwell Publishing.
- Schiffrin, Deborah. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarsono dan Partana, Paina. 2004. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda dan Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Henry. Guntur. 2008. *Menyimak sebagai suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Thomas, Linda dan Wareing, Shan. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar ( Terjemahan Sunoto dkk.).

# ANALISIS PRAGMATIK BAHASA SANDI DALAM WACANA KORUPSI

**Israr Nuryadi**

Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pascasarjana S2  
Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: israrnuryadi@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Bahasa tidak lagi hanya sebagai media komunikasi, tetapi berkembang menjadi permainan makna yang diperuntukkan untuk kepentingan tertentu. Dalam wilayah kekuasaan bahasa mengalami pergeseran fungsi dan bentuk, penutur dalam mengungkapkan maksudnya menggunakan bahasa sandi atau mengganti kata atau suku kata menjadi kabur dan sulit dipahami oleh kelompok lain. Penyandian tersebut tidak terlepas dari kerja sama anggota kelompok yang menyepakati penggunaan bahasa dalam bentuk lain. Apel Malang dan Apel Washington adalah salah satu contoh bahasa sandi yang digunakan oleh pelaku korupsi untuk menyamarkan makna sesungguhnya, sederhananya, Apel tersebut merujuk pada nama buah dan daerah asalnya, tetapi itu hanyalah bahasa sandi dari uang rupiah dan dollar.*

**Kata kunci:** Bahasa sandi, makna, wacana korupsi.

## Pendahuluan

Akses teknologi untuk berkomunikasi yang semakin mudah, sepertinya tidak hanya diciptakan begitu saja. Di belakang itu diciptakan pula akses untuk mengontrol, melacak, atau menyadap isi dalam komunikasi tersebut. Percakapan telepon, pesan pendek, maupun bentuk komunikasi lain melalui dunia maya akan segera diketahui. Sejumlah negara mendirikan lembaga yang dipersenjatai akses merekam komunikasi kelompok tertentu (penguasa) baik di negeri sendiri maupun penguasa penting di negara lain. Negara maju memanfaatkannya untuk mematai-matai aktivitas penguasa negara lainnya sedangkan negara berkembang memanfaatkannya untuk keperluan tertentu di dalam negeri sendiri terutama mengawasi individu atau kelompok yang diindikasikan melakukan penyelewengan yang bisa merugikan negara. Di Indonesia, akses ini dipakai oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusus yang terakhir memanfaatkannya sebagai alat penyelidikan kasus korupsi atau penyelewengan anggaran negara, riwayat percakapan yang tersimpan ditelusuri dan dikaitkan dengan bukti lainnya. Terbongkarnya beberapa kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari pengusutan komunikasi yang berhasil direkam oleh teknologi yang dipakai oleh badan tersebut.

Teknologi penyadapan difokuskan pada pelaku dan konten percakapan, medianya adalah bahasa yang digunakan. Pada kasus korupsi, seseorang atau kelompok yang terindikasi melakukan penyelewengan atau korupsi akan segera ditelusuri riwayat komunikasinya, dengan siapa melakukan komunikasi, kepentingannya apa, serta bahasa yang digunakannya seperti apa. Akan tetapi, muncul pertanyaan, yaitu bukankah setiap orang memiliki ranah yang bersifat pribadi dan pastinya akan sangat keberatan jika ranah tersebut dikontrol atau diketahui oleh orang lain? Hal yang bersifat privasi tersebut takutnya akan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Akan tetapi, jika menilik lebih kritis lagi, penyadapan itu sah-sah saja karena selain manfaat bagi lembaga penyadap tersebut, data-data yang berhasil direkam disimpan dan dilindungi dengan baik sehingga hanya digunakan pada keadaan tertentu serta dikelola oleh profesional yang telah diambil sumpah.

Terbongkarnya beberapa kasus korupsi, banyak berawal dari riwayat percakapan, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Yang membuatnya menarik adalah bahasa yang digunakan, beberapa kata atau kalimat dimunculkan sebagai kode rahasia untuk mengaburkan penafsiran. Bentuk penggunaan bahasa sandi yang terjadi di dalam kelompok tertentu menjadi salah satu alternatif yang dimanfaatkan sekelompok tertentu untuk melakukan tindakan, bahkan sampai kepada bentuk transaksi yang sifatnya sangat rahasia. Tidak bisa dipungkiri, bahwa ternyata penggunaan

bahasa sandi menjadi salah satu media berkomunikasi yang digunakan beberapa pejabat untuk melakukan penggelapan, penyogokan, sampai kepada jumlah nominal yang digunakan dalam proses transaksi.

Mengingat penggunaan bahasa sandi yang hanya dapat dimengerti baik sesama kelompok ataupun berdasarkan kesepakatan tentang arti sebuah “kata atau kalimat,” antara orang yang satu dengan orang yang lain, ataupun antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya sangat menarik untuk dijabarkan apa dan bagaimana arti bahasa sandi yang digunakan para politisi dalam melakukan praktik dalam ruang lingkup pemerintahan.

## **Pragmatik**

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengaran atau (pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya dari pada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri.

Tipe pragmatik perlu melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Diperlukan suatu pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang disesuaikan dengan orang yang mereka ajak bicara. Di mana, kapan, dan dalam keadaan apa. Bisa dikatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual.

Pragmatik juga merupakan ilmu yang menyelidiki bagaimana cara dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar dapat sampai kepada suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur. Bentuk studi pragmatik untuk menggali betapa banyak sesuatu yang tidak dikatakan, ternyata menjadi bagian yang disampaikan. Bisa dikatakan bahwa studi pragmatik merupakan studi pencairan makna yang tersamarkan.

Pandangan ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menentukan pilihan antara yang dituturkan dengan yang tidak dituturkan. Jawaban yang mendasar jawaban yang terkait dengan gagasan jarak keakraban. Keakraban itu baik, baik yang keakraban fisik, sosial, ataupun konseptual, yang menyiratkan adanya pengalaman yang sama. Jadi bisa dikatakan bahwa studi pragmatik meliputi beberapa ruang lingkup, (1) studi tentang maksud penutur, (2) tentang makna kontekstual, (3) tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan dari pada yang dituturkan, (4) studi tentang ungkapan dari jarak hubungan (Yule, 1996:

3-12).

Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Di antara tiga bagian perbedaan ini hanya pragmatik sajarah yang memungkinkan orang ke dalam suatu analisis dengan tujuan bahwa seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi, maksud dan tujuan, dan jenis-jenis tindakan.

Dalam pragmatik terdapat dua prinsip, yaitu kerja sama dan implikatur. Kerja sama menuntut pelaku komunikasi untuk tidak saling membingungkan, mempermainkan, atau menyembunyikan informasi satu sama lain, itu adalah konsep kerja sama sederhana. Selain itu, kerja sama berarti menyepakati beberapa subjek pembicaraan dan menyamarkannya sehingga makna dari kesepakatan tersebut hanya dipahami oleh kelompok mereka. Sementara itu, implikatur adalah penggalan makna tambahan dari apa yang disampaikan. Artinya, menggali makna tambahan dari makna utama. Dalam implikatur terdapat implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Yang terakhir menjadi acuan pembahasan tulisan ini, di mana pelaku percakapan (pelaku korupsi) menggunakan beberapa bahasa sandi di luar konteks percakapan yang mengakibatkan penggalan makna tambahan bagi orang lain tetapi menjadi biasa bagi pelaku karena sebelumnya bahasa tersebut telah disepakati.

## **Bahasa**

Harimurti Kridalaksana (1985:12) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Artinya, ujaran yang diproduksi alat ucap untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak atau kelompok lainnya. Hal ini senada dengan pendapat Gorys Keraf (1984:1) bahwa bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat, berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa bahasa merupakan ujaran hasil produksi alat ucap yang digunakan sebagai alat komunikasi.

## **Fungsi Bahasa**

Sebagaimana salah satu fungsi bahasa dapat menciptakan makna baru, bahwa bahasa menjadi salah satu ekspresi yang menggambarkan bagaimana bahasa digunakan secara kreatif untuk menciptakan makna baru. Bahwa terkadang seseorang akan menemukan kata-kata yang sebelumnya tidak pernah diketahui, tapi orang tersebut tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya, begitupun sebaliknya (Thomas dan Wareing, 2007:



11-12).

Dimensi lain bahasa adalah bahwa bahasa juga memiliki berbagai tujuan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa mungkin akan mengarah kepada penggunaan bahasa secara referensial, secara efektif, ataupun secara estetik. Penggunaan bahasa secara referensial, misalnya, ketika seseorang mengatakan “letakkan bunga-bunga itu di atas meja.” Kalimat tersebut dikatakan referensial karena memberikan informasi tentang apa yang hendak ditaruh dan di mana harus ditaruh.

Bahasa dalam hubungannya dengan kekuasaan tidak terlepas dari politik. Apabila disepakati bahwa tindakan-tindakan politik dilakukan dan dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan, maka sudah sewajarnya apabila bahasa menempati posisi penting. Bahasa tampil sebagai representasi dari ruang penggelaran (*deployment*) berbagai macam kuasa. Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu ruang (*space*) tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan hegemoni tandingan terjadi (Hikam melalui Yudi Latif, 1996:77).

Ariel Heryanto dalam Yudi Latif (1996: 95) kemudian menegaskan bahasa sebagai alat pada hakikatnya dianggap netral. Ia baru bersifat baik atau tidak baik dalam praktik penggunaannya oleh pihak tertentu. Dengan demikian, si pengguna adalah subjek-subjek yang merdeka dan dengan bebas bisa menunggangi, memperlambat, menjungkirbalikkan, menyamakan, atau secara kreatif menyusun bahasa indah. Pelaku korupsi dalam berkomunikasi akan menyesuaikan bahasa dengan konten percakapannya, menyamakan makna sesungguhnya dengan menyandikan beberapa kata atau suku kata.

## **Bahasa Sandi**

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (KBBI). Bahasa dengan kata lain adalah tanda atau simbol yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Fenomena bahasa yang digunakan oleh koruptor yang merujuk pada sandi menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya sebagai media komunikasi tetapi lebih jauh lagi digunakan sebagai pengantar pesan yang bersifat rahasia.

Istilah “sandi” telah mulai dipakai sejak masa kerajaan-kerajaan di tanah air dulu, seperti Kerajaan Majapahit. Saat itu, telah muncul istilah “Telik Sandi”, “Candra Sengkala” dan lainnya yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan persandian. Sebenarnya sejak manusia

berkomunikasi satu sama lain dan ada hasrat atau kepentingan untuk merahasiakan pembicaraannya, sejak itulah baik disadari maupun tidak disadari mereka telah mempergunakan persandian. Mereka akan berusaha mencari jalan dan cara bagaimana merahasiakan sesuatu terhadap pihak yang mereka anggap tidak berhak mengetahui (Sumarkidjo, 1972: 5).

Secara luas, persandian juga dikenal dengan sebutan kriptologi. Istilah “kriptologi” berasal dari bahasa latin yang terdiri dari “kriptos” yang berarti tersembunyi (rahasia) dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi kriptologi adalah ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia (Sumarkidjo, 1972: 9). Kriptologi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi adalah cara (sistem, metode) yang mengolah tata tulisan dalam berita sehingga menjadi tata tulisan yang berlainan dan tidak bermakna (*incoherent*). Sedangkan kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem serta kunci-kuncinya.

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronik (komunikasi elektronik) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan para industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu. Perlu diamati lebih dalam dan tajam apakah “umum dan terbuka” itu benar-benar mampu melindungi konfidensialitas atau kerahasiaan pada umumnya.

Dalam hubungan komunikasi, sistem persandian dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan sistem komunikasi terbuka dan sistem komunikasi tertutup. Sistem komunikasi terbuka adalah sistem komunikasi yang (tidak rahasia), di mana peluang pihak lawan untuk memperoleh informasi yang dikomunikasikan lebih besar, dan penyadap yang berhasil memperoleh informasi tersebut dapat langsung memahami isinya. Misal A mengirim berita atau informasi kepada B dalam bentuk teks terang. Apabila penyadap/pendengar dapat memperoleh beritanya, maka dia akan bisa mengerti isi informasi/berita yang dikirimkan A kepada B. Sedangkan sistem komunikasi tertutup terjadi atas kebalikan sistem komunikasi terbuka. Pada sistem komunikasi tertutup (rahasia) berita/informasi sebagai obyek transmisi harus dilindungi. Di sinilah peran persandian muncul untuk mengamankan informasi yang bersifat rahasia, yang tidak ingin diketahui oleh pihak lain. Sebagai contoh, A akan mengirimkan berita rahasia kepada B, maka untuk menjamin kerahasiaan berita tersebut dari pihak penyadap, diperlukan teknik enkripsi sedemikian hingga meskipun penyadap/pendengar berhasil memperoleh berita yang sudah tersandikan

tersebut, dia tidak bisa mengerti isi berita yang dikirimkan A kepada B (Sumarkidjo, 1972: 27).

## **Analisis Wacana Korupsi**

Istilah korupsi berhubungan dengan kekuasaan. Pelakunya adalah pemangku jabatan yang berperilaku menyimpang, memanipulasi, menipu, menyeleweng, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mengeruk sebanyak mungkin pundi-pundi kekayaan dari perbuatan yang menyalahi aturan (Handoyo, 2013: 18-19). Lebih lanjut Alatas (via Handoyo, 2013:27) mengemukakan ciri-ciri korupsi, yang salah satunya, adalah keserbarahasiaan. Dimaksud serba rahasia karena mulai dari perencanaan hingga eksekusi dilakukan dengan cara terselubung seakan berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu elemen penting dalam tindakan korupsi adalah komunikasi dengan media bahasanya. Salah satu yang perlakuan terhadap bahasa adalah penyandian kata tertentu yang mengandung makna tertentu. Misalnya, nominal, jenis transaksi, jenis pembayaran dan lain-lain.

*“NANTI IBU DITEL SAMA ORANG KITA YA?” dan “TAPI APEL WASHINGTON YA BU,” SERTA “1 KILO DULU YA BU. KRN STOCK KU HABIS. DIUSAHAKAN SEBELUM SELESAI ISTIRAHAT SDH ADA.”*

*“OKE DEH, TAPI JANGAN LUPA KEKURANGANNYA APEL MALANG AJA YA.”*

(<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/27/15160071/Sandi.Koruptor.dari.Kopi.Coro.sampai.Empek-empek?page=all>) edisi Senin, 27 Juli 2015 | 15:16 WIB) versi cetak 27 Juli 2015 halaman 5.

Percakapan tersebut dilakukan oleh Mindo Rosalina Manulang (penutur), Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, dan Angelina Sondakh (mitra tutur), mantan politisi partai Demokrat. Kata cetak tebal adalah bentuk bahasa sandi. Dari kata yang bercetak tebal tersebut menjadi bahasa yang sifatnya tertutup yang dalam artian bahwa bahasa itu digunakan hanya dalam konteks komunikasi tertentu. Jika seseorang mendengar percakapan tersebut, atau sekelompok orang yang tidak memahami makna sesungguhnya dari balik kata “APEL WASHINGTON,” AKAN MENGARAHKAN KEPADA JENIS BUAH. NAMUN DALAM STUDI PRAGMATIK, BAGAIMANA MENGUNGKAPKAN MAKNA DI BALIK UJURAN. APAKAH MAKNA ITU BERDASARKAN MAKNA YANG SESUNGGUHNYA ATAUKAH TIDAK.

TERNYATA PERCAKAPAN TERSEBUT MENUNJUKKAN

BAHWA KATA “APEL WASHINGTON” “1 KILO,” DAN “APEL MALANG,” TIDAK MENGARAH KEPADA JENIS BUAH, TETAPI SALAH SATU SANDI YANG DIGUNAKAN DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN TERTENTU. BAHASA SANDI MENJADI BAHASA RAHASIA YANG BERTUJUAN DALAM KOMUNIKASI TERTENTU. PENGGUNAAN KATA DALAM BAHASA SANDI MENJADI BIAS DARI MAKNA YANG SESUNGGUHNYA, SEHINGGA MAKNA YANG TERJADI DALAM TINDAK KOMUNIKASI HANYA DIPAHAMI ANTARA PENUTUR DAN PENERIMA TUTURAN. HAL TERSEBUT BISA SAJA TERJADI BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENUTUR DAN PENERIMA TUTURAN MAKNA DARI KATA YANG DIGUNAKAN SEPERTI KATA YANG ADA DI ATAS YANG MAKSUD DARI KATA TERSEBUT HANYA DIPAHAMI ANTARA PENUTUR DAN PENERIMA TUTURAN.

PENGGUNAAN “Apel Washinton” bukan lagi mengarah kepada makna apel dari Washinton, melainkan memiliki makna lain yang berarti uang dollar. Makna “APEL WASHINGTON” MENGARAH KEPADA JENIS MATA UANG YANG SEBELUMNYA ANTARA PENUTUR DAN PENERIMA TUTURAN TELAH MENYEPAKATI MAKNA DARI “APEL WASHINGTON” YANG MENGARAH KEPADA JENIS MATA UANG. SEMENTARA ITU, JIKA BAHASA SANDI TERSEBUT UNTUK ORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG TIDAK MEMAHAMI MAKNA DI BALIK “APEL WASHINGTON” AKAN MENGARAHKAN KEPADA JENIS BUAH. SEMENTARA “1 kilo” juga menjadi bahasa sandi. “1 kilo” tidak lagi mengarah kepada maksud kata yang lazim digunakan sebagai penanda berat. Melainkan “1 kilo” menjadi bahasa sandi yang memiliki maksud jumlah yang disepakati. Begitupun dengan “apel Malang”, sama dengan “APEL WASHINGTON” YANG MAKNA KATANYA BUKAN LAGI JENIS BUAH DARI SALAH SATU KOTA, TETAPI JENIS mata uang, yaitu, rupiah.

Dari sini bisa dipahami bahwa bagaimana kata atau kalimat bisa menimbulkan makna baru. Timbulnya makna baru tersebut berdasarkan kesepakatan antara penutur dan penerima tutran ataupun ataupun bahasa tersebut telah menjadi bahasa dalam komunikasi tertentu antara kelompok di mana makna dari kata atau kalimat tersebut hanya dipahami kelompok tertentu pula sehingga umumnya dikatakan sebagai bahasa sandi. Selain apel, masih banyak nama-nama nama yang digunakan di mana makna tersebut hanya keluar dari makna yang umumnya dipahami oleh orang-orang. Misalnya, semangka yang artinya miliar rupiah, melon yang artinya ratusan juta rupiah, sementara apel diasosiasikan dengan puluhan juta rupiah.

*“Ass..(Assalamualaikum) Pak, Bu atut lg (lagi) ke singapur (Singapura), brg (barang) yg (yang) siap 1 ekor untuk lebak aja (saja) jam 14 siap tunggu perintah bpk (bapak) aja (saja) sy (saya) kirim ke mana..,” kata Susi melalui pesan pendek kepada Akil, 1 Oktober 2013.*

(<http://nasional.kompas/read/2014/03/06/1131563/Ini.kronologi.Suap.kepada.Akil.Mochtar,edisi6Maret2014>).

Melalui pesan singkat, Susi Tur memakai bahasa sandi “1 ekor” yang menandakan besaran nominal uang yang telah disepakati sebagai mahar demi memuluskan penyelesaian sengketa pilkada. Dalam percakapan tersebut juga disebut sandi “3 ton”, yang berarti sejumlah 3 miliar. Kasus di atas menandakan proses perahasiaan bahasa dengan mengubah kata di belakang nominal.

Kasus korupsi pengadaan Al-Quran melibatkan pengurus Departemen Desentralisasi dan Pembangunan Daerah, Fahd A. Rafiq, dan Dendy Prasetya, putra anggota Komisi Agama DPR Zulkarnaen Djabar.

Fahd kerap menitip pesan kepada Dendy, “Itu jatah ‘ustad dan pesantren’, jangan diutak-atik.” Pada kesempatan lain, Fahd berpesan, “Apakah ‘kaveling untuk kiai’ sudah disediakan?”  
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/22/063630223/kacang-pukul-kode-suap-untuk-annas-maamun,edisiSenin,22Desember2014|13:29WIB>).

Istilah “kiai”, “ustad”, dan “pesantren”, kata sumber *TEMPO*, diduga merupakan sandi bagi para penerima dana hasil proyek tersebut. “Kiai” merujuk pada para politikus di Senayan, “ustad” buat simbol para pejabat di Kementerian Agama, sedangkan “pesantren” untuk partai politik sedangkan “kaveling” berarti jatah yang sudah disepakati.

Berbeda dengan contoh 1 dan 3, walaupun tetap memakai bahasa sandi tapi yang digunakan untuk kamuflase bukan buah-buahan atau binatang tetapi merujuk kepada sandi lokal yang mempunyai masih mempunyai hubungan secara umum. Kasus ini terjadi di kementerian agama dan bahasa sandi yang digunakan tidak jauh-jauh dari lingkup keagamaan. Pengaburan makna tetap merujuk sesuai kapasitas persona.

## **Kode-kode Fathanah**

Rekaman percakapan via BlackBerry Messenger (BBM) ditampilkan di layar besar. *“Makasih Ibu, saya udah terima. Salam Putih,”* tulis Fathanah dalam pesan BBM.

“Salam Putih maksudnya apa?” tanya jaksa penuntut umum yang dipimpin Muhammad Rum. “Maaf kalau yang ini saya melibatkan PKS,” jawab Fathanah. “Saya minta maaf.” (<http://news.liputan6.com/read/589505/kode-kode-fathanah-mulai-daging-busuk-hingga-arbain-miliar>) By Sugeng Triono on 18 Mei 2013 at 00:07 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi di persidangan Ahmad Fathanah, bukti percakapan tersebut ditampilkan dan ditelusuri, setelah hakim menanyakannya, ternyata merujuk ke salah satu partai politik yang memiliki warna dasar putih. Kepada sopirnya, Fathanah menggunakan kata sandi untuk menyebut uang tersebut dengan istilah ‘daging busuk’.

“Saya bilang ke sopir saya, jangan jauh-jauh ya dari situ. Di situ ada daging busuk,” kata Fathanah saat bersaksi di pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/5/2013).

“Kenapa pakai istilah daging busuk?” tanya Jaksa kepada Fathanah.

“Karena ini kan masalah perdagingan,” jawabnya sambil tertawa.

(<http://news.liputan6.com/read/589505/kode-kode-fathanah-mulai-daging-busuk-hingga-arbain-miliar>) By Sugeng Triono on 18 Mei 2013 at 00:07 WIB.

Bahasa yang digunakan di sini adalah daging busuk, dalam persidangan Fathanah enggan menyebut makna yang sebenarnya dan berkilah bahwa itu adalah candaan, tapi setelah hakim yang memimpin sidang meminta penegasan, barulah diketahui bahwa maksudnya adalah uang suap dan kebetulan berhubungan dengan masalah impor daging di Kementerian Pertanian.

Dalam persidangan juga ditampilkan percakapan antara Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq melalui pesan BBM. Percakapan membahas mengenai penambahan kuota impor daging sapi itu menggunakan bahasa Arab.

Berikut percakapannya:

3535: Ke Ibu EL kapan kita **BAKTEN?**

0797: Nah..ana kan kasih jadwal, mudah-mudahan besok pagi atau..

3535: Besok pagi. **ISMAK ISMAK E KALAM LA ARAB YA ANA. EE EE HUWA HIYA TUKDHIL KHAMANIYA ALAF BATRUK TON ALHEIM**

0797: He eh

3535: **EE TSAMANIYA ALAF ALHEIM EE HUWA HIYA TA I DUNNA KULLU ANNUKHUJ ARBAIN**

## **MILYAR CASH**

0797: *E he*

3535: **LAHAM TO ALLAF**

0797: **HIYA TURID KAM TURID E**

3535: *Ya*

0797: **EE TAHIL KAM TSAMANIA FAKOD**

3535: *Kalau bisa ASYARA dua puluh ribu tiga puluh ribu tapi yang yang riil yang dia mau masukkan itu adalah lapan ribu*

0797: *Ya. ya oke. Jadi itu ada dua ya*

3535: *Hee*

0797: *Ada dua EE ada dua hal. Pertama dia harus meyakinkan menteri*

3535: *Iyak*

(<http://news.liputan6.com/read/589505/kode-kode-fathanah-mulai-daging-busuk-hingga-arbain-miliar>) By Sugeng Triono on 18 Mei 2013 at 00:07 WIB.

Komunikasi di atas melibatkan Lutfi Hasan dan Ahmad Fathanah dalam bahasa Arab dengan tujuan menyandikan maksud dan makna sebenarnya, alasan lain memakai bahasa Arab karena mereka fasih berbahasa Arab. Jadi, bahasa yang digunakan tetap bertujuan untuk menyamarkan makna yang sebenarnya. Ketika melihat pesan tersebut seakan hanya sebuah percakapan biasa tetapi setelah ditelusuri dan diterjemahkan, barulah makna yang sebenarnya akan terungkap. Contoh di atas sepertinya bukan penyandian bahasa secara mutlak, tetapi melakukan alih bahasa. Karena latar belakang keduanya yang religius maka ketika memakai bahasa Arab dalam percakapannya akan terasa biasa.

*“Pagi, Bapak. Hari ini bisa ketemu orang kebugaran, ya, Bapak? Jamnya sehabis Magrib di Senayan City.”* Disusul percakapan selanjutnya, *“Pagi, Pak. Habis Magrib, Bapak instruktur kebugaran minta ketemu selepas Magrib di Senayan City.”* Rosa juga punya istilah lain. Misalnya, dalam percakapan dengan Nazaruddin pada 22 Juli 2010, Rosa menyebutkan, *“Saya lagi menuju Gambir habis dari olahraga, Pak.”*

(<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/12/07/063370297/apa-nama-sandi-menpora-di-kasus-wisma-atlet>) edisi Rabu, 07 Desember 2011 | 06:49 WIB.

Percakapan di atas adalah bagian dari terbongkarnya kasus wisma atlet, bahasa sandi yang digunakan tidak begitu rumit dan mengarah ke makna sebenarnya. Orang kebugaran berarti orang di kementerian

pemuda dan olah raga, dengan sedikit memakai bahasa kiasan. Bapak instruktur kebugaran tidak lain ialah sang menteri, serta kata olahraga yang berarti gedung kementerian pemuda dan olah raga. dari analisis di atas diperoleh fakta bahwa bahasa selain sebagai media menyampaikan berita juga sebagai pembawa makna rahasia dengan menyandikan makna yang sebenarnya.

## **Kesimpulan**

Sepintas bahasa tidak memiliki hubungan dengan kekuasaan jika dilihat dari ranah kajiannya, tetapi apabila dilihat dari fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa dan kekuasaan seakan tidak bisa dipisahkan, terutama dalam wilayah politik. Bahasa politik memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap wahana interpretasi khalayak banyak. Dalam konsep kekuasaan, bahasa tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi semata, tapi lebih jauh lagi digunakan sebagai permainan makna yang diperuntukkan oleh kelompoknya sendiri dengan menyandikan kata atau suku kata sehingga mengaburkan makna yang sesungguhnya.

Bahasa sandi yang digunakan penutur dalam berkomunikasi dengan mitra tuturnya telah disepakati sebelumnya. Artinya, konten percakapan diawali dengan kerja sama anggota kelompok.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Wareing, Shan & Linda Thomas. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ombak.
- Kridalaksana, Harimurti. 1985. *Tata bahasa deskriptif bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumarkidjo, Wahyudi Tri. 1972. *Pengantar Kriptografi*. Bogor: Sekolah Tinggi Sandi Negara
- Kheraf, Goris. 1984. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Yudi. (Ed.). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.

### **Internet**

<http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1131563/Ini.Kronologi>.



Suap.kepada.Akil.Mochtar, edisi 6 Maret 2014.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/22/063630223/kacang-pukul-kode-suap-untuk-annas-maamun>, edisi Senin, 22 Desember 2014 | 13:29 WIB).

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/27/15160071/Sandi.Koruptor.dari.Kopi.Coro.sampai.Empek-empek?page=all>) edisi Senin, 27 Juli 2015 | 15:16 WIB) versi cetak 27 Juli 2015 halaman 5.

<http://news.liputan6.com/read/589505/kode-kode-fathanah-mulai-daging-busuk-hingga-arbain-miliar>) By Sugeng Triono on 18 Mei 2013 at 00:07 WIB.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/12/07/063370297/apanama-sandi-menpora-di-kasus-wisma-atlet>) edisi Rabu, 07 Desember 2011 | 06:49 WIB.

# ***LINGUISTIC LANDSCAPE:*** **POTRET BENTURAN KEBAHASAAN**

**Juanda**

Universitas Samawa (Unsa) Sumbawa

E-mail: juanda\_unsa14@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

*Kebijakan bahasa mengkaji tiga hal, yaitu: ekologi bahasa, ideologi bahasa, dan perencanaan bahasa. Secara de facto akan memengaruhi praktek-praktek bahasa, khususnya bahasa di ruang publik. Salah satu objek bahasa di ruang publik adalah linguistic landscape (LL), seperti penggunaan bahasa untuk nama jalan, tempat bangunan, museum, institusi, merek dagang, pertokoan, dan sebagainya. Artikel ini membahas tentang fenomena-fenomena kebahasaan di ruang publik dan faktor-faktor yang memengaruhinya.*

**Kata kunci:** kebijakan bahasa, ekologi bahasa, ideologi bahasa, perencanaan bahasa, dan *linguistic landscape*

## **Pendahuluan**

Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan tentu harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh penuturnya. Pelestarian dan pengembangan bahasa disadari sangat urgen, yaitu bertujuan untuk memproteksi arus

kolonialisasi dan hegemonisasi bahasa tertentu. Proteksi tersebut semata-mata supaya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia (BI) mempunyai ruang gerak dan tempat mulia di bangsanya.

Sebagai lembaga yang dibebankan tugas kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BP2B) harus mampu melihat ekologi-ekologi bahasa yang terjadi di lingkungan sosial-budaya. Ekologi bahasa tidak hanya difokuskan pada persekolahan atau pada perencanaan bahasa—khususnya di sekolah, akan tetapi juga memperhatikan apa-apa saja yang terjadi di tengah masyarakat yang lebih luas, misalnya tingkat supramakro, makro, mikro, dan inframakro.

Praktek-praktek bahasa yang kian lepas kontrol cenderung dibiarkan begitu saja, bahkan bahasa Indonesia mulai kehilangan kedudukan dan fungsi sosial-budayanya. Bahasa Indonesia seolah-olah ingin “diamputasi” dan “dimutilasi” (kedudukan dan fungsi). Ditambah lagi kecangnyanya aruh globalisasi yang membawa berbagai komoditi kebahasaan dan kebudayaan.

Kita tentu sering mendengar berita atau menyaksikan berita (elektronik/non-elektronik), yang sangat bombastis dan “heroik.” Misalnya, operasi pasar yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atau Kementerian Kesehatan atau dinas terkait, berkaitan dengan maraknya daging berformalin atau beras plastik dan atau beras berformalin, dan sebagainya. Apakah hal yang sama berlaku bagi bahasa Indonesia? Ternyata, tidak!

Akhir-akhir ini, kita mungkin pernah melihat baik sengaja atau sebaliknya, nama-nama jalan, toko, papan pengumuman, instansi, tempat bimbingan belajar, kos-kosan, dan sebagainya, yaitu menggunakan bahasa asing—sebut saja bahasa Inggris, sebagai nama tempat. Seolah-olah penamaan ingin menegaskan bahwa bahasa tersebut lebih dapat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat global. Apa betul bahasa Indonesia tidak diterima secara regional dan global? Bahasa Indonesia sedang mendapat tantangan sangat berat dari bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Penuturnya mulai terpedaya dengan pesona-pesona dan janji-janji bahasa-bahasa asing tersebut.

Dalam konteks kebijakan bahasa, penggunaan bahasa asing sebagai nama tempat tentu saja dapat diartikan betapa Indonesia begitu gampang dan longgarnya, bahkan takluk dengan globalisasi. Selain itu, posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat juga dipertanyakan.

Hak-hak bahasa Indonesia harus dikembalikan pada posisi yang terhormat dan tidak boleh ditawar lagi. Kita ingin membangun bangsa dengan tangan sendiri; merdeka juga dengan perjuangan sendiri. Kita juga tentu tidak ingin membangun bangsa ini dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang justru akan semakin merongrong dan menjajah kedaulatan

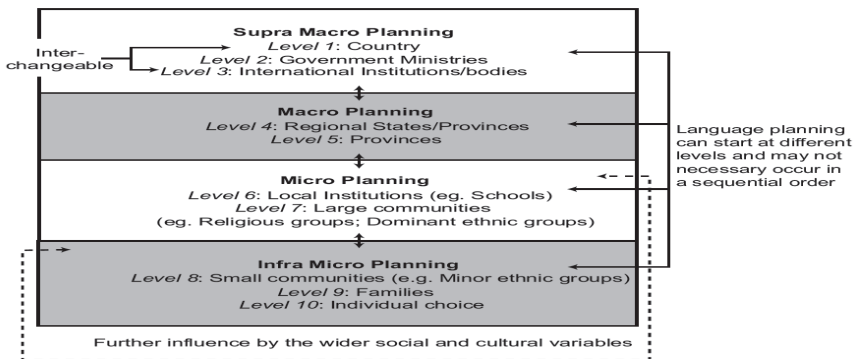
bangsa. Tulisan ini akan membahas empat hal, yaitu: (1) fenomena-fenomena bahasa di ruang publik; dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi fenomena-fenomena tersebut.

## Pembahasan

Halliday (Brown, 2007: 224) mengemukakan tujuh fungsi bahasa, yaitu: (1) fungsi instrumental; (2) fungsi regulatoris; (3) fungsi representasional; (4) fungsi interaksional; (5) fungsi personal; (6) fungsi heuristik; dan (7) fungsi imajinatif. Sementara Wood (Sudaryanto, 1990: 13) mengatakan sepuluh fungsi bahasa, yaitu: fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi interaksi, fungsi perorangan, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, fungsi pragmatif, fungsi matetik, fungsi interpersonal, dan fungsi ideasional. Fungsi-fungsi bahasa tersebut merupakan pengembangan dari fungsi-fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Halliday.

Dalam konteks LL yang paling banyak digunakan di ruang publik adalah fungsi representasional. LL tersebut dapat saja terjadi di level supramakro, makro, mikro, dan inframikro. Pada level supramakro, meliputi negara, kementerian, dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi internasional; level makro mencakupi propinsi dan kabupaten; level mikro terdiri dari institusi lokal (misalnya sekolah) dan komunitas (kelompok agama mayoritas atau etnis mayoritas); level inframakro meliputi etnis minoritas, keluarga, dan individu. Seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1: Level-level Perencanaan Bahasa



Sumber: Catherine Chua Siew Kheng and Baldauf (2011: 939).

## ***Linguistic Landscape***

Landry & Bourhis (Spolsky, 2009: 67) adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah *paysage linguistique*, kemudian lebih populer dengan istilah *linguistic landscape* (LL), yaitu digunakan untuk mengetahui persepsi siswa SMA terhadap penggunaan bahasa pada ruang publik di Kanada. Kata */landscape/* diambil dari *paysage* yang bermakna pemandangan atau potret kebahasaan.

LL merujuk pada objek-objek bahasa yang dijadikan tanda di ruang publik. Sebagai contoh, penggunaan bahasa di rambu-rambu jalan, nama tempat, nama jalan, nama bangunan, nama institusi, nama rumah sakit, nama sekolah, pasar, nama perkantoran, dokumen, nama majalah, nama koran, iklan, papan pengumuman, merek dagang, nama toko, dan sebagainya merupakan domain LL (Shohamy, 2006: 110-112; Spolsky, 2004).

Penggunaan bahasa Indonesia berlandaskan pada Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928); UUD 1945; Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas; Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Permendiknas RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan; Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya; Permendikbud RI No. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa dan Permendikbud RI No. 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa; PP RI No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

## **Fenomena-fenomena Bahasa di Ruang Publik**

Berikut ini merupakan contoh-contoh penggunaan bahasa di ruang publik.

Gambar 2: Nama Hotel



Gambar 3: Nama Hotel



Sumber: dokumentasi diambil dari 10-11 Nopember 2015

Lewat politik kebijakan, bahasa dapat ditingkatkan fungsi dan kedudukannya sehingga sangat tidak masuk akal suatu bahasa mampu berkembang dan mengekspansikan diri tanpa didukung oleh kebijakan (perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan sebagainya). Penetapan fungsi dan kedudukan bahasa menjadi penting ketika merumuskan peta perencanaan, pembinaan, dan perkembangan bahasa. Jadi, perundang-undangan merupakan legitimasi yang berfungsi sebagai upaya melindungi, membenarkan, dan menguatkan kedudukan bahasa tersebut.

BI sudah ditetapkan statusnya melalui UUD 1945, kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.” Secara eksplisit, perundangan tersebut sudah menetapkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama nama-nama tempat, jalan, dan sebagainya. Artinya, BI sudah mempunyai pijakan formal yang diakui dan dilindungi secara *de jure*, sedangkan penggunaan bahasa lain, yaitu bahasa asing dapat diartikan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penama (subjek-subjek yang memberikan nama).

Gambar 2 dan 3 merupakan nama hotel yang menggunakan bahasa Inggris. Jika diterjemahkan ke dalam BI akan menjadi: Hotel Yogyakarta dan Hotel Victoria. Tampaknya penggunaan bahasa asing cenderung dianggap ekonomis dan kultural (modernis), sebaliknya BI tidak penting, padahal dari sinilah kita membangun peradaban dan tentu saja memakmurkan bangsa. Selain itu, bahasa inilah letak nasionalisme, bahkan bahasa ini pulalah yang dapat menancapkan nilai-nilai, termasuk ideologi bangsa dan kebudayaan (Hasan Alwi, 2011: 7-8; Shohamy, 2006). Pembicaraan dan penggunaan bahasa juga secara langsung mendiskusikan kebudayaan dan kebangsaan. Dalam hal ini, BI harus dipandang sebagai representasi ideologi negara bangsa Indonesia, walaupun keberadaan heterogenitas bahasa tidak terhindari. Dengan kata lain, muara dari kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa adalah mengontrol ragam bahasa dan menanamkan ideologi bangsa.

## **Faktor yang Memengaruhi Fenomena Bahasa di Ruang Publik**

Bahasa Inggris global (*global English*) atau biasanya disebut Globish tidak hanya berkaitan dengan identitas-identitas kultural penggunaannya,

akan tetapi juga mencakupi persoalan-persoalan nilai-nilai dan hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan, termasuk kebebasan memilih bahasa. Dalam perspektif poskolonial, penggunaan bahasa Inggris tidak lepas dari empat dimensi, yaitu: skolastik, linguistik, kultural, dan ekonomi (Kumaravadivelu, 2012: 7).

Dimensi pertama, skolastik, yaitu memandang bangsa Barat jauh lebih maju dan menarik daripada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Konstruksi propaganda ini lebih banyak melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Barat sangat baik, sedangkan ilmu pengetahuan lokal cenderung dipandang sebelah mata dan diremehkan, khususnya bahasa, pengajaran, dan sumber daya manusia. Demikian juga halnya dalam BI yang dilihat sebagai bahasa lokal, bukan regional dan atau internasional, bahkan lebih kejam lagi BI bukan sumber ilmu pengetahuan. Bandingkan dengan hipotesis bahasa Graddol (Maurais, 2003: 17).

Dimensi kedua, linguistik, yaitu mengatakan bagaimana pengetahuan dan penggunaan bahasa lokal direkayasa dan dibuat tidak relevan untuk berbagai tujuan, termasuk tujuan nama lembaga atau tempat-tempat kecantikan, seperti terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 4: Nama Bank



Gambar 5: Nama Pusat Kecantikan



Sumber: dokumentasi penulis yang diambil dari 10-11 Nopember 2015

Bank Lippo (Lippo Bank) dan Pusat Kecantikan London (*Centre Beauty London*) mungkin mempunyai makna yang sama, akan tetapi mempunyai fungsi yang jelas berbeda. Seperti dijelaskan sebelumnya, fungsi representasional lebih dominan daripada fungsi-fungsi lainnya, yakni untuk mengafirmasikan betapa Globish tersebut begitu gampang diterima dan tentu saja berorientasi ekonomi. Oleh karena penutur bahasa Inggris lebih mapan dan sejahtera daripada penutur-penutur BI. Pernyataan ini benar-benar menyesatkan.

Dimensi ketiga, kultural, yaitu mengatakan bahwa pembelajaran bahasa harus berkaitan dengan budaya-budaya bahasa tersebut. Terakhir, dimensi ekonomi, yaitu menganggap bahwa dengan belajar dan menguasai bahasa Inggris, maka tingkat kemakmuran dan kesejahteraan pun berdampak positif. Dengan penamaan bahasa Inggris, maka nilai prestise dan identitas semakin lebih tinggi dan berbudaya. Peradaban

dan kebudayaan tersebut hanya dimiliki oleh bangsa Barat, sedangkan Indonesia tidak beradab dan berbudaya dari sisi bahasanya. Apakah peradaban itu akan diciptakan atau dihadirkan oleh Globish, penulis yakin tidak akan pernah. Dalam sejarah umat manusia, setelah kebudayaan suatu bangsa dirongrong, maka tunggulah kehancuran.

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pasal 25 menyebutkan bahwa BI sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selain itu, BI juga sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia tidak hanya sekadar sebagai alat perjuangan kemerdekaan, tetapi telah ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Secara ontologis, BI adalah manifestasi dan representasi bangsa yang menghargai kemajemukan dan multikultural. Bahasa adalah identitas yang melekat pada setiap penuturnya. Nilai-nilai kejuangan dan patriotisme yang terdapat dalam BI tetap dipelihara dan dijaga oleh pemerintah.

## Penutup

Fenomena-fenomena bahasa di ruang publik, terutama penggunaan bahasa Inggris atau Global English (Globish) terjadi di berbagai tempat, seperti: nama hotel, nama bank, pusat kecantikan, nama toko, iklan, merek dagang, dan sebagainya. Dengan landscape ini jelas Globish semakin mengurangi dan akan mengamputasi serta memutilasi fungsi dan kedudukan BI. selain itu, penggunaan bahasa Inggris juga tidak lepas dari empat dimensi, yaitu: skolastik, linguistik, kultural, dan ekonomi.

Fenomena-fenomena bahasa di ruang publik dan faktor-faktor yang memengaruhinya sangat diharapkan menjadi perhatian pemerintah, terutama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Semua data yang ada dalam artikel ini tentu perlu ditindaklanjuti mengenai kebijakan bahasa, khususnya *linguistic landscape* yang terdapat di lingkungan sosial budaya.

## Daftar Pustaka

Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning And Teaching* (5<sup>th</sup>ed.). New York: Pearson Education.



- Catherine Chua Siew Kheng., & Baldauf, R. B. Jr. (2011). Micro language planning. Dalam Hinkel, E. (Ed.), *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning* (Vol. II) (pp. 936-949). New York: Routledge.
- Hasan Alwi. (2011). *Fungsi Politik Bahasa*. Dalam Hasan Alwi & Dendy Sugono (Eds.), *Politik Bahasa* (pp. 6-15). Jakarta: Depdiknas.
- Kumaravadivelu, B. (2012). *Language Teacher Education for A Global Society*. London: Routledge Tylor & Francis Group.
- Maurais, J. (2003). *Towards A New Linguistic World Order*. Dalam Maurais, J., & Morris, M. A. (Eds.), *Language in a Globalising World* (pp. 16-17). Cambridge: Cambridge University Press.
- Permendiknas RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
- Permendikbud RI No. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa dan Permendikbud RI No. 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa
- Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya
- PP RI Nomor 57 Tahun 2014, tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Shohamy, E. (2006). *Language Policy: Hidden Agendas And New Approaches*. London: Routledge Tylor & Francis Group.
- Spolsky, B. (2009). *Language Management*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2004). *Language policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudaryanto. (1990). *Menguak Fungsi Hakikat Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- Undang-undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

# KUASA DAN EKOLOGI BAHASA PENGARUHNYA PADA PSIKOLOGI ANAK

**St. Nurbaya**

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Bahasa dan Seni UNY

E-mail: stnurbayanur@gmail.com.

## **Pengantar**

Penggunaan bahasa oleh orang tua di rumah maupun oleh guru ketika proses pembelajaran pada semua jenjang dan jenis institusi merupakan salah satu basis ekologi bahasa yang selalu dilandasi oleh dua sumbu relasi, *pertama* sumbu relasi yang bersifat ordinat dan *kedua* sumbu relasi bersifat subordinat. Sumbu relasi pertama yang ordinat adalah orang tua yang menempatkan diri sebagai penguasa di rumah, dan pendidik sebagai orang yang melakukan tranformasi ilmu serta memiliki kedudukan sebagai orang yang berkuasa terhadap peserta didik. Sumbu relasi kedua yang subordinat adalah anak sebagai subjek yang dikuasai atau peserta didik yang berkedudukan sebagai orang yang menerima ilmu dan sebagai subjek didik yang dikuasai.

Praktik-praktik penggunaan bahasa yang terjadi 1) di lingkungan rumah tangga dan oleh keluarga terutama oleh ibu/bapak dan orang dewasa lainnya 2) di lingkungan institusi pendidikan oleh guru atau tenaga memiliki kecendrungan penggunaan bahasa sebagai penguasa atau ordinat dan yang dikuasai (subordinat). Praktek penggunaan bahasa oleh

orang berada pada pada posisi ordinat (yang berkuasa) dan subordinat (yang dikuasai) antara pendidik dan peserta didik menunjukkan adanya stigma hubungan bahasa, kelas sosial dan identitas sosial antara para pengguna bahasa (Thomas, 1999:291).

Penggunaan bahasa (frasa atau kalimat tertentu) oleh orang tua maupun oleh pendidik yang ditujukan untuk peserta didik dalam interaksi di rumah maupun dalam pembelajaran di sekolah dapat mengkonstruksi dan destruksi perkembangan psikologi seperti perubahan sikap maupun destruksi psikologi lainnya pada peserta didik diungkapkan oleh Krauss Robert M&Chiu Chi-Yue bahwa “ *Language is implicated in most of the phenomena that lie at the core of social psychology: attitude change, social perception, personal identity, social interaction, intergroup bias and stereotyping, attribution, and so on*”. Implikasi nyata penggunaan bahasa oleh orang tua maupun proses pembelajaran yang terjadi pada institusi pendidikan dapat diamati pada praktik-praktik penggunaan bahasa ketika mendidik anak di rumah tangga, proses pembelajaran, maupun dalam proses perkuliah, diskusi, atau pada saat santai (bercanda) sekalipun.

## **Pembahasan**

### **Keluarga dan Institusi Pendidikan sebagai Basis Ekologi Bahasa**

Haugen (1972) mendefinisikan ekologi bahasa sebagai studi tentang bahasa sebagai sebuah kode komunikasi dalam masyarakat. Konteks masyarakat dalam pengertian Haugen sangatlah luas. Masyarakat dalam pengertian Haugen dapat dimaknai sebagai tempat terjadinya peristiwa komunikasi, dan para komunikatornya menggunakan bahasa sebagai kode untuk mengekspresikan fungsi referensial dan fungsi afeksi suatu bahasa. Fungsi referensial terkait dengan bagaimana cara mendeskripsikan kejadian dan dampak dari representasi tersebut terhadap cara berpikir, sementara fungsi afektif dari bahasa terkait dengan siapa yang boleh/berhak mengatakan apa, di mana, atau fungsi bahasa yang berkaitan dengan kekuasaan maupun status sosial. (Thomas,1999:14).

Pemaknaan masyarakat sebagai tempat terjadinya komunikasi harus disertai terpenuhinya unsur 1) topik komunikasi, 2) komunikator, dan (3) situasi ketika komunikasi terjadi. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, maka keluarga dan institusi pendidikan dapat dikategorikan sebagai sebuah ekologi bahasa, karena di dalam keluarga dan institusi pendidikan seperti sekolah, bahasa berfungsi untuk memperjelas proses transformasi ide, pikiran, bahkan nilai-nilai pendidikan, sebagaimana Lie (2004) mengatakan sebagai berikut.

*In our educational systems, language does the educating, language organizes the educational activities, and language supervises, controls and evaluates the educational process. And language, in a significant sense, creates education, perpetuates it, and reproduces it.*

Mengacu pada pendapat Lie di atas maka dapatlah dikatakan bahwa keluarga dan institusi pendidikan adalah basis dari ekologi bahasa. Sebagai basis ekologi bahasa, keluarga berkomunikasi menggunakan bahasa untuk mengemban fungsi referensial dan fungsi afeksi penggunaannya. Demikian halnya dengan pelaku-pelaku dalam institusi pendidikan yang menggunakan bahasa sebagai pendukung fungsi “*agen of change*” yang diembannya. Kesadaran akan fungsi-fungsi tersebut, maka idealnya praktik-praktik penggunaan bahasa baik di dalam keluarga maupun di dalam institusi pendidikan seharusnya diarahkan untuk mengkonstruksi psikologi siswa. Akan tetapi, praktik-praktik penggunaan bahasa dalam keluarga dan pada institusi pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai media konstruksi psikologi peserta didik, tetapi sebaliknya banyak praktik penggunaan bahasa di institusi sekolah, justru mengarah pada munculnya destruksi psikologi pada peserta didik.

## **Kuasa Bahasa Guru di Sekolah**

Aktualisasi fungsi “*agen of change*” yang di emban institusi pendidikan seharusnya digunakan untuk transformasi nilai kebaikan dan kesantunan dalam semua jenjang pendidikan untuk mengkonstruksi psikologi siswa ke arah yang positif. Oleh sebab itu maka seluruh komponen sumber daya manusia atau pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam proses transformasi ilmu di sekolah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang praktek-praktek penggunaan bahasa secara benar dan santun.

Praktik penggunaan bahasa yang dimaksud adalah penggunaan bahasa yang dilakukan dengan baik, cara yang baik dan benar serta mengarahkan anak atau peserta didik pada pembiasaan hal-hal positif. Praktik penggunaan bahasa yang positif harus terus ditanamkan sejak dini, mulai dari dalam keluarga, serta dalam institusi pendidikan oleh semua anggota keluarga dan pelaku-pelaku pendidikan. Praktek-praktek penggunaan bahasa yang positif oleh orang tua dalam keluarga atau oleh guru dalam institusi pendidikan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikologis peserta didik.

Beberapa cara yang dilakukan untuk mengkonstruksi psikologi positif siswa, baik oleh orang tua dalam keluarga maupun oleh guru

dalam proses pembelajaran, adalah dengan memanfaatkan pola-pola komunikasi dan penggunaan bahasa yang positif ketika berinteraksi. AlQuran mengajarkan siapapun yang mempercayanya untuk selalu menggunakan bahasa yang santun, sopan, beradab, yang sesungguhnya menjadi penanda pembicara yang memiliki kepribadian yang baik, mulia serta menunjukkan adanya penghormatan terhadap kepada pihak yang lain yang menjadi teman/lawan bicara. Prinsip bercakap dengan lemah lembut ini juga ditegaskan dalam ayat al-Quran surah Ali-Imran 3:159 yang terjemahannya sebagai berikut.

*“Maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras tentulah mereka menjauhkan diri dari engkau”.*

Ayat di atas menurut Abdul Aziz Mohd Zin seperti dikutip Ahmad (2009) menjelaskan bahwa dakwah/pembelajaran mesti dilakukan untuk “melemahkan hati” dengan kata-kata atau tuturan yang lemah lembut dan dengan kosakata yang bermakna baik, sehingga yang didakwai/pembelajar mau mengikuti ajaran-ajaran yang ditranformasikan oleh pendakwah/guru/ orang tua. Ayat ini pun memberikan pelajaran yang harus dilakukan oleh manusia dalam proses berkomunikasi baik kepada atasan kepada teman sebaya maupun kepada anak didik untuk melihat relasi penggunaan bahasa yang santun dengan tumbuhnya nilai kebaikan, dan jika berlaku atau berkata kasar akan menjauhkan peserta didik dengan pendidik demikian sebaliknya. Artinya ada 2 pilihan, berkata kasar tidak santun akan menjauh guru, orang tua dari anak didik yang wujudnya “membantah” atau “membenci” sebaliknya berkata baik, santun akan mendekatkan peserta didik dengan guru dalam arti “ menurut, taat, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa oleh “ penguasa” baik orang dewasa, guru memiliki dampak yang dapat mendekonstruksi dan konstruksi psikologi siswa.

Thomas Gordon (1997:127), membagi pola komunikasi dan pemakaian bahasa, yang dapat mengkonstruksi psikologi positif, dengan pola komunikasi “konstruktif”. Pola komunikasi “konstruktif” merupakan pola komunikasi yang menempatkan posisi orang tua dan anak berada dalam relasi *equal*, menempati ruang dan nilai kebersamaan demi tetap tegaknya posisi orang tua yang dituakan dan anak yang dianakkan dalam arti “butuh perhatian dan arahan”. Orang tua dan guru dapat memilih kosa kata, frase, dan atau kalimat-kalimat positif yang “konstruktif” sehingga dapat merangsang tumbuh kembang anak. Kalimat-kalimat yang dapat digunakan tersebut, seperti termuat di bawah ini.

No.	Kalimat Penghargaan	Kalimat Penguatan	Kalimat Doa
1.	Lihat... betapa bagusnya kamu melakukan itu....”	Mama yakin, kamu pasti bisa Nak, coba lakukan lagi	Anak sholeh ku
2.	Terimakasih, kamu telah menepati janji....”	Mama yakin, kamu akan mampu mengatasinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan!”	Anak rajinku
3.	Papa sungguh berterimakasih, kamu telah mau berusaha...	Mama yakin, kamu sesungguhnya anak baik, hanya mungkin kali ini kamu sedang terpengaruh oleh teman-temanmu yang tidak baik. Apakah kamu mau bila mama membantumu untuk bisa menjadi baik seperti dulu lagi?”	Insyallah, akan baik-baik saja.

Douglas Bloch (1992) mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa kekuatan kalimat positif, selalu diperdengarkan oleh orang tua yang anak-anaknya sukses, sebaliknya kata-kata negatif selalu didengar oleh anak-anak yang gagal. Kata-kata yang diucapkan ibu guru kepada anak membawa pengaruh besar bagi hidupnya, karena setiap kata atau kalimat yang diucapkan sekaligus membawa pesan tersirat tentang dirinya, baik berhubungan dengan kemampuan maupun ketidakmampuannya. Begitu si anak menyimpan pesan itu dalam batinnya, pesan itu lama-lama menjadi suatu keyakinan dan pembenaran atas setiap kegagalan yang dialaminya. Bahkan, seringkali kata negatif yang telah terserap dalam alam bawah sadarnya tetap bekerja, meskipun ia tidak menyadarinya. Setelah dilakukan pengelompokkan orang tua yang anak-anaknya sukses adalah orang tua yang dalam proses mendidik anak selalu menggunakan relasi pola komunikasi dengan menggunakan bahasa (kosakata, frase, dan kalimat) yang mampu mengkonstruksi psikologi positif anak-anak atau siswa. Hasil lain yang sangat mencengangkan pada anak-anak yang sukses, ternyata orangtuanya selalu menggunakan kalimat-kalimat sebagai berikut.

No.	Jenis Kalimat	Contoh
1.	Menghargai	Alhamdulillah, apapun hasilnya kamu telah berusaha
2.	Memuji,	Bagus, tulisanmu menarik untuk dibaca
3.	menyetujui,	Ibu setuju dengan rencanamu, asal kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu
4.	memberi evaluasi positif.	Lukisanmu sudah bagus, hanya perlu ditambahkan warna kuning, supaya kontras
5.	Meyakinkan kembali	kamu pasti menjadi murid yang sukses
6.	memberi simpati,	Oh, nggak apa-apa kalau sekarang belum menang, Ibu bisa merasakan kesedihanmu
7.	<i>memberi dukungan</i>	Saya mengerti bahwa akan ada pertandingan sore ini, kita akan nonton bersama tapi jangan lupa kita masih harus belajar sampai jam satu.

## Hubungan Penggunaan Bahasa oleh “Penguasa“ dengan Destruksi

### Psikologi Siswa atau Peserta Didik

Apa hubungan antara penggunaan bahasa oleh “penguasa” bahasa dan ekologi bahasa dan perkembangan psikologi peserta didik? Salah satu jawabannya adalah, bahwa keduanya berevolusi berdasarkan proses sosialisasi dan enkulturasi, yang berlangsung di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan berbagai ruang publik Menurut Duszak and Okulska (2011), lembaga pendidikan merupakan salah satu ruang dan tempat terjadinya destruksi psikologi siswa akibat penggunaan bahasa oleh guru, maupun oleh teman.

Penggunaan bahasa oleh orang tua di rumah, atau oleh guru yang menjadi panutan di sekolah memengaruhi psikologi peserta didik. Pengaruh penggunaan bahasa tersebut ada yang bersifat negatif atau yang mendestruksi psikologi. Douglas Bloch (1992) mengatakan anak-anak yang terbiasa mendengar kosa kata, frase, dan kalimat-kalimat kasar, jorok, tidak santun yang diucapkan orang tuanya, guru, atau teman sebayanya, kelak ketika dewasa akan memiliki kecenderungan untuk mengatakan hal yang sama, bahkan pengaruhnya menjadi luar biasa.

Penggunaan bahasa oleh “penguasa” dalam ekologi bahasa yang positif akan mengkonstruksi psikologi peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kepribadian positif sebaliknya ekologi bahasa yang negatif akan

mendestruksi psikologi siswa, sehingga siswa yang terbiasa dengan ekologi bahasa yang negatif secara psikis akan terganggu.

Penelitian Douglas Bloch (1992) tentang pengaruh penggunaan kata-kata yang diucapkan oleh dua kelompok orang tua kepada anak-anaknya menunjukkan hasil yang berbeda dari dua kelompok orang tua yang berbeda. Douglas Bloch menemukan hasil bahwa, kalimat positif, selalu diperdengar oleh orang anak-anak yang sukses, sebaliknya kata-kata negatif selalu didengar oleh anak-anak yang gagal. Kata-kata yang diucapkan orang tua di dalam ekologi rumah tangga maupun di ekologi pendidikan kepada anak membawa pengaruh besar bagi hidupnya karena setiap kata atau kalimat yang diucapkan sekaligus membawa pesan tersirat tentang dirinya, baik berhubungan dengan kemampuan ataupun ketidakmampuannya. Anak menyimpan pesan itu dalam batinnya, pesan itu lama-lama menjadi suatu keyakinan dan pembenaran atas setiap keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya. Bahkan, sering kali kata negatif yang telah terserap dalam alam bawah sadarnya tetap bekerja, meskipun ia tidak menyadarinya.

Deskripsi hasil penelitian Douglas Bloch (1992) terhadap anak-anak yang ada di penjara karena kasus kejahatan menemukan data yang luar biasa. Tujuh puluh lima persen (75%) orang tua yang anak-anaknya kena kasus kejahatan memiliki pola komunikasi dengan kalimat-kalimat sebagai berikut.

No.	Jenis Kalimat	Contoh
1.	memerintah, mengkomando, mengatur	jangan pergi, buang permen karet itu !, Jam 10 nanti kamu harus mandi.
2.	memberi peringatan, mengancam	jika kamu tidak berbaris, akan kubiarkan kamu berdiri di situ sehari penuh!"
3.	memoralisasi, mengkhotbahi	seharusnya kamu tahu bagaimana mengerjakan itu !.
4)	mengajar, menggunakan logika, memberikan fakta	Buku untuk dibaca bukan untuk dicoret-coret.



5.	berolok-olok, menggoda/mengusik, menyindir, melencengkan pembicaraan dan mengalihkan komentar	Saya tak pernah mengajar di depan segerombolan monyet sebelumnya
6.	menghakimi, mengkritik, tidak menyetujui, menyalahkan	Kamu nakal, kamu memang bersalah, kamu benar-benar tidak bisa diatur.
7.	membentak, menirukan, menghina	Jangan pergi, dasar bodoh, tolol,
8	menginterpretasi, menganalisis, mendiagnosis	Kamu melakukan itu untuk menarik perhatian., Ayo. Apa yang kamu peroleh dengan melakukan itu ?Kamu hanya ingin mendapatkan pujian

## Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa oleh “penguasa” (orang tua, guru) dapat menimbulkan pengaruh buruk dan pengaruh baik pada psikologi anak. Penggunaan bahasa yang baik dan santun, bukan hanya sebuah kebutuhan melainkan sebuah kewajiban sekaligus “tututan agama” yang harus dilakukan oleh manusia.

## Daftar Pustaka

- Al-Quran. 2012. Departemen Agama. Republik Indonesia
- Ahmad, Nazelibin, Mohd. 2009. Prinsip Alquran tentang Kesantunan Berbahasa. <https://cikgunazeli.wordpress.com/2009/12/13/prinsip-al-quran-tentang-kesantunan-bahasa/> Diakses 10 November 2015.
- Ainer Haugen. 1972. *The Ecology of Language*. Standfor University Press. California.
- Duszak Anna and Okulska Urszula (Editor). *Age and Language Studies* dalam Language, Power and Social Process Richard J. Watts. 2011. Language,. Printing: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen De Gruyter. Mouton.
- Gordon, Thomas. 1997. *Menjadi Guru Efektif*. PT. Gramedia Pustaka

Utama. Jakarta.

- Krauss Robert M & Chiu Chi-Yue *Language and Social Behavior*. Handbook of Social Psychology (4th ed.), Vol. 2. (pp. 41-88). Boston: McGraw-Hill. Diunduh dari [www.springer.com/.../9780387328751-p9](http://www.springer.com/.../9780387328751-p9) tgl 11 November 2014.
- Lier Van Leo. 2004. *The Ecology and Semiotics of Language Learning A Sociocultural Perspective*. Kluwer Academi Publisher. Boston.
- Thomas, Linda & Wareing, Shan. 1999. *Language, Sociate, and Power*. Routledge. New York.
- Richard J. Watts. 2011. (Editor) *Language, Power and Social Process*. Printing: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen De Gruyter. Mouton.

# PENAMAAN ANAK SEBAGAI BENTUK KEKUASAAN

**Eva Eri Dia**

STKIP PGRI Jombang

E-mail: evaeridia@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Seiring dengan waktu, nama anak di Indonesia mengikuti perubahan tren yang sedang berkembang di masyarakat. Jika dulu nama anak mencerminkan budaya sosial dan budaya suku, sekarang nama anak tidak lagi mencerminkan karakteristik ras dan budaya, namun lebih pada stereotip yang membedakan jenis kelamin antara nama anak laki-laki dan perempuan saja. Nama anak di era sekarang lebih banyak mengadopsi bahasa asing, lebih besar adalah bahasa Arab. Perubahan tren ini menunjukkan bahwa kekuasaan terbesar atas nama anak terletak pada orang tua selaku pemilik, baik itu dari keluarga yang rendah, menengah, dan atas, menggunakan kekuasaan yang sama, sehingga tidak menunjukkan perbedaan kasta, ataupun kelas sosial.*

**Kata kunci:** penamaan, budaya, gender, kekuasaan orang tua

## **Pendahuluan**

Apalah arti sebuah nama? Terkadang sebagian orang berpikiran bahwa nama itu tidak penting. Nama dianggap sebagai identitas yang tak ubahnya sebagai label bahwa si A cowok dan si B cewek, atau si A menganut

agama Islam dan si B tidak diketahui agamanya apa. Mengapa demikian? Dalam nama anak terlihat klasifikasi-klasifikasi dari karakteristik pemilik nama. Untuk orang Indonesia, nama tradisional sebenarnya sangatlah sederhana, karena pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia cenderung memberikan nama dengan satu kata saja. Kemudian, untuk membuat perbedaan, hanya ditambahkan dengan nama keluarga atau yang merujuk pada anak dari siapa.

Jika dulu pembeda itu nampak terlihat dari pemberian nama orang tua kepada anaknya. Sebagai sebuah contoh nama anak dari keturunan Jawa, nama anak laki-laki melekat identitas ke-Jawa-annya dengan nama Joko atau Selamat, dan nama anak perempuan bisa Siti atau Sri. Misalnya nama dalam Islam, orang tua ingin agar anaknya kelak menjadi sosok yang meneladani. Dalam agama lain pun, seseorang ada juga yang memberi nama sesuai dengan tokoh agamanya. Tidak hanya nama yang sama dengan idolanya, terkadang nama seseorang diberikan karena peristiwa yang dialami saat melahirkan atau sebelum melahirkan. Nama juga bisa terbentuk karena percampuran nama orang tua atau nama kakek dan nenek atau nama dari nama belakang bapaknya. Nama juga bisa bermakna sesuatu yang dikarang-karang sendiri oleh orang yang memberikan nama, baik orang tua, nenek, kakek, paman, bibi, atau anggota keluarga yang lain karena ingin sesuatu yang belum tercapai atau karena alasan lain. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, bisa dibedakan nama-nama yang populer di kalangan kaum santri, keraton, petani, serta buruh yang lebih akrab dengan tradisi kuno, termasuk dunia pewayangan. Nama memiliki makna dan doa orang tua yang akan berpengaruh pada pertumbuhan jiwa anaknya. Terlebih jika sebelum memberi nama, orang tuanya melakukan puasa serta mengadakan tasyakuran dan doa bersama agar makna dan doa yang terkandung bagaikan sebuah energi bagi masa depannya.

Makna positif penting untuk diperhatikan dalam proses penamaan anak agar tidak memiliki arti negatif ataupun buruk. Nama dapat merupakan paduan harmonis makna yang dalam dan nilai sastra yang tinggi. Lutterer (1967:581-587) menyebutkan bahwa “faktor rasa sosial” menekankan fakta bahwa nama seseorang adalah produk lingkungan, sosial, keluarga, sekolah, teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Orang tua yang melahirkan bayi pasti betul-betul memikirkan nama yang akan diberikan untuk anaknya. Nah, berdasarkan rasa kepemilikan inilah yang membuat orang tua menjalankan kuasanya melalui proses pembuatan nama. Pemberian nama selalu dipikirkan baik-baik oleh orang tua karena diyakini sebagai ciri keluarga dan mengandung doa atau harapan. Namun, dalam hal ini untuk membedakan gender selalu menjadi peran penting dalam sebuah penamaan anak. Pembuatan nama pun terkadang

membutuhkan waktu yang lama, penuh pertimbangan, dan menyita pikiran orang tua.

Nama juga dapat dimaksudkan untuk membuat si pemilik nama mempunyai nilai seni atau kreativitas. Nama merupakan harapan orang tua terhadap anak mereka. Sebuah nama memproyeksikan kepribadian dan masa depan anak. Beberapa orang percaya bahwa pemberian nama dapat menentukan nasib seseorang. Nama seseorang juga memiliki makna yang merupakan sebuah harapan atau keinginan. Pemberian nama untuk anak-anak yang dinanti ternyata tidak hanya melihat pada agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh si orang tua, namun mereka juga harus memerhatikan adat dan kebiasaan yang berlaku di tiap daerah. Ada yang menggabungkan antara Jawa dengan Indonesia, Jawa dengan Arab, Indonesia dengan Arab, Indonesia dengan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, Sansekerta, dan sebagainya. Selain itu, pada generasi kakek-nenek.

Menurut Socrates (dalam Djajasudarma, 2009:31-32) nama harus sesuai dengan sifat acuan yang diberi nama. Pendapatnya merupakan kebalikan dari yang dikemukakan Aristoteles. Nama berupa kata-atau kata-kata yang merupakan label dari makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa. Nama-nama bila diperhatikan tidak hanya nama benda atau peristiwa yang di sekitarnya ada yang berubah, nama baru (kosa kata baru) pun muncul dari zaman ke zaman.

## **Relasi Kuasa dan Kelas Sosial**

Chaer dan Agustina (2010: 39-41) mengatakan bahwa hubungan bahasa dengan masyarakat berupa bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu masyarakat. Tingkatan sosial di dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi: (1) kebangsawanan dan (2) kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkatan pendidikan lebih baik memperoleh kemungkinan untuk memperoleh taraf perekonomian yang lebih baik pula. Namun, kondisi ini kadang tidak mutlak. Bisa saja taraf pendidikannya lebih baik, namun taraf perekonomiannya kurang baik. Sebaliknya, yang memiliki taraf pendidikan kurang, tetapi memiliki taraf perekonomian yang baik. Dalam masyarakat kota besar yang heterogen dan multietnis, tingkat status sosial berdasarkan derajat kebangsawanan mungkin sudah tidak ada, atau sudah tidak dominan lagi. Masyarakat kota besar lapisan tingkatan dilihat dari status sosial ekonomi. Dalam hal ini penamaan anak tidak lagi memandang kelas sosial sebagai penanda sebuah golongan kelas. Namun, penamaan untuk masyarakat rendah, menengah, dan atas hampir memiliki ciri yang sama karena orang tua menganggap bahwa nama itu

pantas diberikan kepada anaknya dengan berpegang pada sebuah tren atau keinginan anaknya diterima dan ditempatkan pada tempat yang sama tanpa melihat status sosial.

Dalam Santoso (2012:61) mempertegas bahwa kajian budaya mengeksplorasi bagaimana diri seseorang menjadi laki-laki atau perempuan, bagaimana seseorang dibentuk sebagai pribadi-pribadi melalui penamaan. Identitas bukanlah sesuatu yang eksis karena identitas memiliki keuniversalan atau esensial. Identitas merupakan konstruksi diskursif, produk diskursus atau cara bertutur yang terarah. Identitas dibangun dan diciptakan oleh representasi sebuah bahasa. Sebuah identitas akan selalu melalui proses negosiasi yang sifatnya dinamis. Lebih lanjut Santoso (2012:4-6) menyatakan bahwa penguasa memiliki kemungkinan yang lebih banyak memilih bahasa daripada yang dikuasai. Perbedaan kekuasaan mengakibatkan perbedaan di dalam karakteristik bahasa yang dipilihnya, baik di dalam pilihan fonologi, gramatikal, maupun leksikal. Seperti yang dipaparkan Fowler dalam Santoso bahwa kekuasaan yang memiliki relasi timbal balik orang tua adalah anak. Bentuk kekuasaan yang simetris orang tua terhadap anak salah satunya adalah bentuk kekuasaan yang berwujud sebuah penamaan. Nama diberikan orang tua kepada anak sebagai bentuk kekuasaan orang tua yang memiliki persepsi orang tua. Rumus umum kekuasaan yang memiliki relasi timbal balik yang tidak simetris atau tidak sejajar ditawarkan oleh Fowler dalam Santoso (2012:5) sebagai berikut.

### **Penguasa**

redaktur surat kabar  
redaktur televisi  
laki-laki  
guru  
dosen  
orang tua  
pemilik modal  
juragan  
dokter  
pemerintah  
elite partai politik  
elite agama  
pewawancara  
negara maju  
fisik kuat  
penegak hukum

### **Yang dikuasai**

pembaca atau konsumen  
penonton  
perempuan  
siswa  
mahasiswa  
anak  
peminjam  
pekerja  
pasien  
warga negara  
pemilih atau konstituen  
umat  
pelamar kerja  
negara berkembang  
fisik lemah  
masyarakat hukum

darah “biru”  
pemegang gelar bangsawan  
pemegang gelar akademik

masyarakat awam  
masyarakat yang tidak bergelar  
masyarakat akademik yang tidak  
bergelar

Pada paparan ketidaksimetrisan relasi di atas dapat dipahami bahwa kehidupan manusia yang dianggap memiliki peradapan tinggi pun sangat akrab dengan ketidaksimetrisan relasi dalam komunikasi. Komunikasi yang nyata lebih banyak didominasi oleh adanya ketimpangan relasi antarpelaku daripada adanya kesetaraan, kesamaan, atau keadilan. Bahasa merupakan sarana mekanisme utama dalam proses konstruksi sosial. Bahasa digunakan sebagai instrumen konsolidasi dan manipulasi konsep-konsep serta relasi timbal balik untuk menjalankan kekuasaan kontrol itu. Bahasa tidak hanya digunakan untuk mengeksploitasi keberadaan otoritas dan hak-hak istimewa dengan cara yang jelas, tetapi juga untuk mengangkat status dan peran.

Kekuasaan orang tua kepada nama anak menjadi kajian yang menarik juga dalam penentuan gender atau jenis kelamin yang sesuai dengan nama tersebut. Seperti yang diungkap Darma (2009:172-173) bahwa dalam lingkungan budaya masyarakat berkembang aturan tentang pembagian gender yang dapat diamati, ditiru, dan diperkenalkan secara khusus pada anak laki-laki dan perempuan, sehingga muncul stereotip tertentu tentang apa yang pantas bagi laki-laki atau perempuan. Stereotip sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan peran gender dapat diilustrasikan bahwa nama seorang anak perempuan itu selalu menunjukkan segi kecantikannya, lemah lembut, dan anggun, sedangkan nama anak laki-laki cenderung menunjukkan kegagahannya, kejantanannya (cowok), dan terkesan angkuh. Stereotip nama anak laki-laki dan nama anak perempuan tidak bisa diubah, walaupun diubah akan terkesan aneh bagi masyarakat. Perempuan ditempatkan pada karakteristik yang dianggap khas perempuan, demikian juga sebaliknya.

Lebih lanjut Darma (2009:181) menjelaskan bahwa ideologi gender yang disosialisasikan dalam masyarakat mendorong agar laki-laki menjadi maskulin dan perempuan menjadi feminin. Bentuk kepribadian dan sifat-sifat yang dianggap wajar di masyarakat membuktikan bahwa ideologi gender dikonstruksi secara sosiokultural. Dalam arti ideologi gender adalah menjadi standar, ciri, norma, dan nilai yang disosialisasikan, dikuatkan, dan dipertahankan, baik secara halus maupun dipaksakan oleh masyarakat. Pelestarian ideologi gender keberadaannya didukung oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tafsir agama, budaya etnis, dan politik.

## Penamaan sebagai Proses Perlambangan

Nama sangat dekat diidentifikasi dengan pemiliknya sehingga dapat menggambarkan reputasi, baik atau buruk. Konsep tentang nama diri berakar pada tradisi, dan dapat ditemui nama-nama itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membedakannya dari nomina pada umumnya dengan cara menuliskannya dengan huruf kapital (Ullmann, 2009:85-90). Lebih lanjut Ullmann menyatakan bahwa nama orang memiliki lima kriteria, yaitu keunikan, identifikasi, denotasi dan konotasi, bunyi distingtif, dan kriteria gramatikal. Ahli tata bahasa dari Yunani, Dyonisius Tharx dalam Ullmann (2009:86), mempunyai simpulan pembeda antara nama (orang) dengan benda, bahwa nama ialah bagian dari tuturan yang tidak bisa diubah yang menjadi pusat badan atau aktivitas, dan bisa dibuat untuk umum ataupun individu. Hal inilah kriteria nama itu memiliki keunikan, bahwa nama merupakan markah identifikasi atau pertanda jati diri seseorang. Nama menunjukkan individu yang dinamakan namun nama itu tidak menunjukkan atribut-atribut (sifat-sifat) apa saja yang dipunyai oleh orang tersebut. Nama memiliki makna sendiri-sendiri, jadi tidak ketinggalan ada pada yang didenotasikan, namun ada pada yang dikonotasikan. Nama objek yang tidak mengkonotasikan yaitu nama orang, dan ini tidak memiliki makna. Suara distingtif merupakan identifikasi dan pembeda pada suara. Pembeda nama dan fungsi pada nama orang dan nama benda itu bisa dilihat dari kekhususan gramatikal.

Chaer (2002:44-52) menjelaskan bahwa lambang atau kata adalah sebuah nama atau label dari yang dilambangkan. Pemberian nama atau label terhadap benda atau peristiwa yang ada di sekeliling bersifat arbitrer, tidak ada hubungan wajib. Pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Secara kontemporer proses penamaan atau penyebutan terhadap sesuatu dapat ditelusuri dengan peristiwa-peristiwa berikut, yaitu:

### 1. Peniruan Bunyi

Kata-kata yang terbentuk dalam bahasa Indonesia terbentuk dari hasil peniruan bunyi, maksudnya nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut dan suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut.

### 2. Penyebutan Bagian

Dalam hal ini penamaan dapat menggunakan gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal (*pars pro toto*) dan gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian (*totem pro parte*). Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri yang



khas atau yang menonjol dari benda itu dan yang sudah diketahui umum.

**3. Penyebutan Sifat Khas**

Penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena dalam peristiwa itu terjadi transposisi makna dalam pemakaian yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Di sini terjadi perkembangan yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol, sehingga kata sifat itu yang menjadi nama bendanya.

**4. Penemu dan Pembuat**

Nama-nama benda dibuat berdasarkan nama penemunya atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah *appellativa*.

**5. Tempat Asal**

Nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Nama kota atau nama tempat terjadinya peristiwa bisa menjadi acuan.

**6. Bahan**

Dalam hal ini ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda tersebut. Penamaan tersebut disesuaikan dengan jenis bahan tersebut, misalnya kaca, kayu, besi, bambu, dan lain sebagainya.

**7. Keserupaan**

Pada peristiwa ini, nama benda dibuat berdasarkan kesamaan sifat atau ciri dari makna leksikal kata tersebut. Penggunaan berbahasa banyak kata yang digunakan secara metaforis, artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya disamakan atau dibandingkan dengan makna leksikal tersebut.

**8. Pemendekan**

Kata-kata yang berbentuk sebagai hasil penyingkatan biasa disebut akronim. Bentuk akronim dalam penamaan ini terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu.

**9. Penamaan Baru**

Kata atau istilah baru dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Kata-kata atau istilah-istilah lama yang sudah ada itu perlu diganti dengan kata-kata baru, atau sebutan baru, karena dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang halus, atau kurang ilmiah.

Berdasarkan paparan asal usul pelambangan sebuah benda atau kata-kata dalam Indonesia dapat disimpulkan bahwa proses penamaan anak oleh orang tua dapat telusuri dengan menggunakan sembilan prinsip tersebut. Namun, dalam hal ini kesembilan teori itu bukanlah mutlak terhadap peristiwa yang melatarbelakangi penamaan anak tersebut. Karena, bentuk kekuasaan orang tua terhadap nama anak dapat dipengaruhi peristiwa yang bermacam-macam, salah satunya adalah menggunakan peristiwa nama hari, nama weton, nama bulan, urutan atau penomoran jumlah anak, peristiwa yang sedang tren, nama ayah, nama ibu, atau penggabungan dari nama ayah dan ibu, marga keluarga, dan lain sebagainya.

### **Penamaan sebagai Bentuk Kebahasaan Pembawa Ideologi**

Menurut Ullmann (2009:98), motivasi pemberian nama ada tiga perbedaan cara yaitu: secara fonetik, morfologi, dan semantik. Motivasi fonetik merupakan beberapa suara atau bunyi, yang merupakan tiruan struktur nama fonetik. Produk motivasi morfologi jumlahnya nama tidak terbatas dan adanya tiruan nama dari beberapa elemen. Motivasi semantik adalah pemisah nama yang nyata dan tidak nyata. Fakta nama ini dapat menentukan makna bagian mereka.

Makna kata dapat dibangun dalam kaitannya dengan benda atau objek di luar bahasa. Dalam konsepsi ini, kata berperan sebagai label atau pemberi nama pada benda-benda atau objek-objek yang berada di alam semesta. Makna kata juga dapat dibentuk oleh konsepsi atau pembentukan konsepsi yang terjadi dalam pikiran pengguna bahasa. Proses pembentukannya berkaitan dengan pengetahuan atau persepsi penggunaan bahasa tersebut terhadap fenomena, benda atau peristiwa yang terjadi di luar bahasa. Dalam konteks ini, misalnya penggunaan bahasa akan tidak sama dalam menafsirkan makna kata tertentu. Makna kata juga dapat dibentuk oleh kaitan antara stimulus, kata dengan respons yang terjadi dalam suatu peristiwa ujaran.

Chaer (1994:44) menyatakan bahwa penamaan merupakan sebuah proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu kepada suatu referensi yang berada di luar bahasa. Plato di dalam suatu percakapan yang berjudul ‘Cratylus’ menyatakan bahwa lambang itu adalah kata di dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang dihayati di dunia nyata berupa rujukan, acuan, atau sesuatu yang ditunjuk oleh lambang itu. Oleh karena itu, lambang-lambang atau kata-kata itu tidak lain daripada nama atau label yang dilambangkannya, mungkin berupa benda, konsep, aktivitas, atau peristiwa. Dalam penelitian ini, subjek yang akan dibahas adalah nama yang ditujukan untuk manusia.

Nama (untuk orang) merupakan bagian dari penamaan yang memiliki maksud kata atau segala sesuatu yang berkaitan satu demi satu, memiliki rasa, doa dari yang membuat atau yang memberikan sebuah nama untuk orang yang diberi nama tersebut. Nama bisa terdiri atas satu kata, dua kata, tiga kata, sampai lima kata atau lebih, bergantung pada yang menamainya. Nama merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena berfungsi untuk membedakan orang satu dengan orang lainnya. Santoso (2012:161) menegaskan bahwa kajian terhadap nama menunjukkan adanya dimensi kuasa dan solidaritas dari pilihan terhadap nama. Senada dengan Santoso, Mary Talbot (dalam Fairclough, 1995:193) memandang bahwa kesadaran terhadap bahasa dalam dunia sosiolinguistik membantu untuk memberikan wewenang terhadap masyarakat untuk berbagai aspek identitas sosial mereka, termasuk jenis kelamin, yaitu sebagai pria dan wanita.

Nama merupakan bentuk wacana yang mengandung ungkapan maksud tersembunyi dari orang tua atau orang memberi nama. Wacana itu dikuasai secara sosial dan dikondisikan secara sosial. Hubungan antara teks dan struktur sosial dimediasikan oleh konteks sosial wacana. Wacana akan menjadi nyata, beroperasi secara sosial, sebagai bagian dari proses-proses perjuangan institusional masyarakat. Asumsi-asumsi akal sehat wacana akan memasukan ideologi sesuai dengan hubungan kekuasaan tertentu (Darma, 2009:68-80).

Berkaitan dengan wacana nama-nama orang, kompleksitas hidup manusia ditingkatkan melalui organisasi-organisasi sosial dan aktivitas teknologis. Manusia melakukan proses kategoris sebagai bagian dari sebuah strategi umum untuk menyederhanakan dan mengatur kehidupannya. Manusia menghubungkan dunia melalui pelbagai sistem pengklasifikasian atau penggolongan dengan menyederhanakan fenomena objektif dan membuatnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola. Menurut Fowler (1986:19) bahasa adalah medium efisiensi dalam pengkodean kategori-kategori sosial. Ketika kebudayaan tertentu memerlukan ekspresi diskriminasi, peran bahasa sebagai pengkategorian tampak amat jelas. Terkait dengan pengklasifikasian, perlu dikemukakan dua jenis makna yang dapat dimasuki oleh penutur: (a) makna alamiah, dan (b) makna sosial. Makna alamiah bersifat semesta (universal), makna sosial bersifat merefleksikan organisasi masyarakat dan hubungannya dengan lingkungan. Makna sosial dihasilkan dari konstruksi sosial realitas (Santoso, 2012:72).

## **Nama sebagai Simbol Kekuasaan Orang Tua**

Kajian terhadap penamaan dan rujukan pribadi menunjukkan

bahwa terdapat dimensi kuasa dan solidaritas dari pilihan terhadap penamaan (Santoso, 2012:161). Senada dengan Anang Santoso, Mulyana (2008: 305-310) Nama diri sendiri adalah simbol pertama dan utama bagi seseorang. Nama dapat melambangkan status, citra dan budaya, untuk memperoleh citra tertentu (pengelolaan kesan) atau sebagai nama hoki. Nama pribadi adalah unsur penting identitas seseorang dalam masyarakat, karena interaksi dimulai dengan nama dan baru kemudian diikuti dengan atribut-atribut lainnya. Nama yang kita terima sejak lahir tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita, tetapi juga mempengaruhi orang lain untuk memperlakukan kita, dan terpenting, mempengaruhi kita dalam mempersepsi diri sendiri. Nama adalah bagian dari konsep-diri yang sangat penting. Bahkan nama juga menunjukkan kesadaran seseorang. Perubahan nama orang yang tadinya non-muslim menjadi muslim adalah salah satu pertanda perubahan jati-dirinya dan hubungannya dengan alam semesta. Nama bersifat simbolik. Nama yang bagus atau keren menimbulkan kesan yang positif pada pendengar atau pembaca nama itu. Nama memberi suatu makna. Nama mempengaruhi cara mereka mempersepsi, pengharapan, dan cara memperlakukan. Alasan perubahan nama bukan hanya masalah hoki namun masalah dengan persepsi masyarakat yang mungkin berkaitan dengan masalah hoki juga.

Selain hoki, orang tua lebih melihat penamaan itu adalah sebuah kepercayaan atau bisa dikatakan stereotip. Mulyana (2008:237-240) memaparkan bahwa stereotip adalah sebuah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Kelompok-kelompok ini termasuk ras, etnik, kaum tua, berbagai pekerjaan dan profesi, atau orang dengan penampilan fisik tertentu. pada umumnya stereotip bersifat negatif, namun dalam penamaan ini stereotip dimaknai sebagai persepsi yang positif. Penamaan yang dilakukan oleh orang tua selain mengandung doa, harapan, karakteristik, dan ciri keluarga, nama juga mengandung ramalan yang dilihat orang tua untuk bisa dijadikan sebuah kenyataan dalam kehidupan si anak kelak.

## **Penutup**

Kuasa secara konseptual memiliki dua makna, yaitu (1) ketidaksimetrisan antarpartisipan dalam peristiwa-peristiwa kewacanaan, dan (2) ketidaksamaan kapasitas dalam mengontrol bagaimana sebuah teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial budaya tertentu. Dalam penamaan anak terdapat bentuk kekuasaan orang tua terhadap anak akibat hubungan yang tidak simetris. Dari ketidaksimetrisan tersebut maka orang tua mempunyai hak dalam menentukan nama berdasarkan peristiwa-peristiwa yang di dalamnya terdapat stereotip-

stereotip berdasarkan kelas sosial dan budaya yang menyertainya. Bentuk stereotip tersebut berwujud ramalan-ramalan orang tua dan juga perilaku gender untuk membentuk karakteristik si anak.

### **Daftar Pustaka**

- Chaer, Abdul. 2002. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik. Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Djajasurdarma, Fatimah T. 2009. *Semantik 2. Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama
- Fairclough, Norman. 1992. *Kesadaran Bahasa Kritis*. Terjemahan: Hartoyo. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Fairclough, Norman. 1997. *Critical Discourse Analisis: The Cutical Study of Language*. London-New York: Longman.
- Lutterer, Ivan. 1967. *Sociolinguistics and the study of personal name*. in: *Graur A (ed.) Actes du Xe Congres International des Linguistes I. Editions de l'academie de la republique socialiste de Roumanie, Bucarest*. Ullmann, Stephen. 2009. *Pengantar Semantik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis: Menguasai Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ullmann, Stephen. 2009. *Pengantar Semantik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

# PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

**Jimat Susilo**

PBSI, FKIP Unswagati Cirebon  
Email: jimat\_cirebon@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Bahasa Indonesia lahir tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi mengemban fungsi yang lebih besar yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya tidak hanya di lingkungan lokal, tetapi sudah merambah ke dunia global. Kurang lebih ada 45 negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia bahkan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan. Begitu pesatnya perkembangan bahasa Indonesia yang mampu bersaing dengan bahasa-bahasa di dunia ini mengakibatkan terjadinya pengaruh bahasa-bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia.*

*Hal ini tidak bisa dipungkiri akibat arus globalisasi telah membawa perubahan dalam pemakaian bahasa. Sebuah akulturasi budaya, teknologi, ekonomi, dan politik ikut berperan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sehingga banyak ditemukan kosa kata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia yang pemakaiannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dilakukan secara*

*lisan maupun tulisan.*

*Untuk menjaga pemertahanan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, Salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan bahasa adalah melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar dalam dunia pendidikan. Melalui pendidikan bahasa ini, diharapkan pemertahanan bahasa Indonesia akan semakin kokoh dan kuat meskipun arus globalisasi yang terus menggerus eksistensi bahasa Indonesia.*

**Kata kunci:** pendidikan, bahasa Indonesia, dan globalisasi.

## **Pendahuluan**

Saat ini, dunia telah memasuki abad XXI atau sering disebut juga milenium III. Perubahan abad dan perubahan milenium ini diprediksikan akan berdampak pada struktur ekonomi, struktur kekuasaan, dan struktur kebudayaan dunia. Fenomena paling menonjol yang tengah terjadi pada kurun waktu ini adalah terjadinya proses globalisasi. Salah satu pengaruh arus globalisasi, yaitu terjadinya imperialisme terhadap bahasa. Bahasa yang sudah mapan dan kuat akan tetap bertahan, sementara bahasa yang belum kuat akan mengalami penindasan. Tidak terkecuali dengan keberadaan bahasa Indonesia yang saat ini mulai mendapat pengaruh besar dari bahasa asing terutama bahasa Inggris.

Di dalam UU No. 24 tahun 2009 Pasal 28 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat Negara yang lain yang disampaikan di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya, di dalam pasal 36 ayat 3 dijelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama gedung, jalan, apartemen, perkantoran, kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha dan lembaga pendidikan.

Dasar hukum ini sudah sangat jelas tentang pemakaian bahasa Indonesia. Namun, realita berbicara lain. Pemimpin dan pejabat negara yang telah banyak menyerap anggaran negara untuk membuat undang-undang tersebut, namun mereka sendiri yang melanggarnya. Banyak pemimpin atau pejabat negara dengan bangganya berpidato di luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris. Menteri Perdagangan yang tidak selektif mengizinkan merk dagang dengan menggunakan bahasa asing. Demikian juga, Menteri Pendidikan yang mengizinkan lembaga-lembaga pendidikan dengan menggunakan bahasa asing, bahkan pernah mengkotak-kotakkan standar sekolah, yaitu SBI, RSBI, dan SSN. SBI dan RSBI yang mewajibkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.

Uraian di atas merupakan salah satu contoh fenomena yang terjadi dalam arus globalisasi. Pengaruh bahasa asing telah merasuki dalam segi-segi kehidupan berbahasa. Masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Melihat fenomena tersebut, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai lambing kebanggaan dan identitas suatu bangsa.

Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sudah selayaknya menjadi panutan dalam pemertahanan bahasa Indonesia. Hal ini seperti yang termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.

## **Peran Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia**

Salah satu implementasi peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan yaitu dimasukkannya bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran inti dalam pendidikan di setiap satuan pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia sebagai wujud dalam menempatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern telah mengubah paradigma tentang pendidikan bahasa Indonesia. Gelombang globalisasi telah mewarnai terjadinya perubahan sosial yang cukup menonjol. Salah satu dampak arus globalisasi yaitu akan berpengaruh pada dunia pendidikan khususnya masalah identitas bangsa yang tercermin dalam sikap lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada penggunaan bahasa Indonesia (Muslich, 2010: 18). Dengan kata lain, sikap kedwibahasaan pengajaran bahasa tidak terhindarkan meskipun dalam pemakaiannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tolkfson (1991) mengatakan bahwa pengajaran bahasa bersifat politis selalu melibatkan dua bahasa yang memiliki perbedaan budaya pada umumnya dan penggunaannya sesuai dalam situasi tertentu.

Ada pepatah yang mengatakan “bahasa menunjukkan bangsa”, artinya bahwa dengan bahasa dapat menunjukkan identitas atau jati diri bangsa. Tanpa bahasa maka tidak ada negara. Begitu pentingnya bahasa dalam sebuah negara. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia. Salah satu fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar dalam dunia pendidikan. Alwi



(2003: 9) menyatakan bahwa pendidikan bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan bahasa Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah belum terjangkaunya pendidikan bahasa Indonesia ke pelosok-pelosok nusantara. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia secara aktif. Untuk itu, diperlukan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia seperti yang disampaikan Alwi (2003: 12) bahwa pemasyarakatan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

- a. penentuan prioritas kelompok sasaran;
- b. pengembangan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
- c. pemanfaatan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya;
- d. peningkatan kerja sama dengan semua pihak yang dapat memperlancar pemasyarakatan bahasa Indonesia di Indonesia;
- e. peningkatan mutu tenaga pemasyarakatan;
- f. Pemanfaatan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia.

Dari uraian tersebut, terlihat banyak unsur atau pihak yang terlibat dalam pendidikan bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sumber daya manusia, lembaga pemerintahan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi merupakan unsur-unsur yang dapat membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Jika pendidikan bahasa Indonesia sudah dilakukan secara menyeluruh di Indonesia dengan baik, tidak pelak lagi tujuan pendidikan nasional akan terwujud.

## **Pemertahanan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi**

Globalisasi melambangkan suatu realitas global yang menekankan hidup dalam konseptual lingkungan yang baru, yang ditandai dengan teknologi informasi. Globalisasi dapat dipahami sebagai kekuatan yang melancarkan sejumlah tekanan pada standar dan membuat tuntutan dalam semua masyarakat (Javis 2007 dalam Chaterine Chua Siew Kheng dan Richard B. Baldauf Jr, 2011: 971). Dengan demikian, globalisasi terdiri dari proses sosial multidimensi yang saling ketergantungan sosial di seluruh dunia intensitas, menciptakan hubungan yang lebih dalam antara orang-orang dari seluruh dunia (Steger, 2003).

Leclerc (1994: 1994 - 2007) dan Polsky ( 2009) memberikan contoh negara-negara yang mendudukan bahasa sebagai suatu hal yang harus dipelajari oleh warga negaranya. Denmark dan Eslandia mewajibkan warga asing yang tinggal di negara tersebut belajar bahasa Denmark dan Eslandia. Mexico mengharuskan semua pengumuman publik menggunakan bahasa Spanyol. Belanda mewajibkan semua urusan administratif menggunakan bahasa Belanda.

Berdasarkan contoh-contoh di negara barat tersebut, *bagaimanakah dengan kondisi bangsa Indonesia?* Sejarah telah mencatat, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Solo. Ikrar yang diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia ini memperlihatkan betapa pentingnya bahasa bagi suatu bangsa. Tanpa bahasa, bangsa tidak akan berkembang, tidak mampu menggambarkan dan menunjukkan dirinya secara utuh dalam dunia pergaulan dengan dunia lain. Sudah 77 tahun bahasa Indonesia memperlihatkan ciri-cirinya sebagai alat komunikasi yang mutlak diperlukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah membuktikan diri sebagai bahasa yang tahan uji. Dalam mengemban misinya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan keperluan dan perkembangan bangsa Indonesia, walaupun ada perkembangan yang bersifat positif dan negatif. Perkembangan ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan modern. Gejala inilah yang disebut era globalisasi.

Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk bahasa Indonesia, yang dalam itu, sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek itu.

Pendidikan bahasa Indonesia saat ini di tengah-tengah arus globalisasi telah membuktikan jati dirinya. Namun perlu disadari bahwa adanya pengaruh baik dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya akan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa pada era globalisasi ini. Akibat pergaulan antarbangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi akan memengaruhi kosa kata bahasa Indonesia. Banyak istilah-istilah asing yang akan diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa di dunia maya, internet, *FACEBOOK* misalnya, memberi banyak perubahan bagi struktur bahasa Indonesia yang oleh beberapa pihak disinyalir merusak bahasa itu sendiri. Berlandaskan alasan globalisasi dan prestise, masyarakat mulai kehilangan rasa bangga menggunakan bahasa nasional. Tidak hanya pada rakyat kecil, 'krisis bahasa' juga ditemukan pada para pejabat negara. Hal tersebut memunculkan istilah baru, yaitu 'Indoglish' kependekan dari 'Indonesian-English' untuk fenomena bahasa yang kian menghantam bahasa Indonesia. Sulit dipungkiri memang, bahasa asing kini telah menjamur penggunaannya. Mulai dari judul film, judul buku, judul lagu, sampai pemberian nama merk produk dalam negeri. Kita pun merasa lebih bangga jika lancar dalam berbicara bahasa asing. Namun, apapun alasannya, entah itu menjaga prestise, mengikuti perkembangan zaman, ataupun untuk meraup keuntungan, tanpa kita sadari secara perlahan kita telah ikut andil dalam mengikis kepribadian dan jati diri bangsa kita sendiri.

Sekarang ini penggunaan bentuk 'Inggris' sudah banyak menggejala. Dalam bidang internet dan komputer kita banyak menggunakan kata *MENDOWNLOAD*, *MENGUPLOAD*, *MENGUPDATE*, *DIENTER*, *DIRELEASE*, *DIDISCOUNT*, dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam bidang komputer saja, di bidang lain pun sering kita jumpai. Selain bahasa Asing, kedudukan bahasa Indonesia juga semakin terdesak dengan pemakain bahasa-bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa gaul ini sering kita temukan dalam pesan singkat atau sms, *CHATTING*, dan sejenisnya. Misalnya dalam kalimat '*GUE GITU LOH..PA SICH YG GA BS*' dalam kalimat tersebut penggunaan kata ganti aku tidak dipakai lagi.

Globalisasi memang tidak dapat dihindari. Akulturasi bahasa nasional dengan bahasa dunia pun menjadi lebih terasa perannya. Menguasai bahasa dunia dinilai sangat penting agar dapat bertahan di era modern ini. Namun sangat disayangkan jika masyarakat menelan mentah-mentah setiap istilah-istilah asing yang masuk dalam bahasa Indonesia. Ada baiknya jika dipikirkan dulu penggunaannya yang tepat dalam setiap konteks kalimat sehingga penyusupan istilah-istilah tersebut tidak terlalu merusak tatanan bahasa nasional.

Fenomena di atas dapat mengakibatkan pergeseran bahasa Indonesia. Fenomena pemertahanan dan pergeseran bahasa sebenarnya telah ada sejak bahasa-bahasa itu mulai mengadakan kontak dengan bahasa lainnya (Grosjean, 1982). Kontak antardua suku atau suku bangsa yang masing-masing membawa bahasanya sendiri-sendiri lambat laun mengakibatkan terjadinya persaingan kebahasaan. Pada umumnya, di

dalam persaingan kebahasaan terjadi fenomena-fenomena kebahasaan yang diawali dengan kedwibahasaan, diglosia, alih kode/campur kode, interferensi, dan akhirnya permertahanan dan pergeseran bahasa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan pergeseran dan kepunahan suatu bahasa. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai tempat di dunia, faktor-faktor tersebut seperti loyalitas bahasa, konsentrasi wilayah pemukiman penutur, pemakaian bahasa pada ranah tradisional sehari-hari, kesinambungan peralihan bahasa-ibu antargenerasi, pola-pola kedwibahasaan, mobilitas sosial, sikap bahasa dan lain-lain. Romaine (1989) mengatakan bahwa faktor-faktor itu juga dapat berupa kekuatan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, kelas sosial, latar belakang agama dan pendidikan, hubungan dengan tanah leluhur atau asal, tingkat kemiripan antara bahasa mayoritas dengan bahasa minoritas, sikap kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, perkawinan campur, kebijakan politik pemerintah terhadap bahasa dan pendidikan kelompok minoritas, serta pola pemakaian bahasa.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pembinaan bahasa melalui pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan dilakukan dengan adanya perubahan kurikulum yang menempatkan pendidikan bahasa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dunia pendidikan yang syarat pembelajaran dengan media bahasa menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi yang primer. Sejalan dengan hal tersebut, bahasa baku merupakan simbol dalam dunia pendidikan dan cendekiawan. Penguasaan Bahasa Indonesia yang maksimal dapat dicapai jika fondasinya diletakkan dengan kokoh di rumah dan di sekolah mulai TK (Taman Kanak-kanak) sampai PT (Perguruan Tinggi). Rusyana (1984:152) menyatakan bahwa dalam membina masyarakat akademik, penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar akan menimbulkan masalah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap mempunyai peranan dalam menuju arah pembangunan masyarakat akademik idaman.

Fenomena yang terjadi dalam pergeseran bahasa Indonesia sebagai akibat gelombang arus globalisasi ini tentu menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mempertahankan eksistensi atau jati diri bahasa Indonesia di mata dunia internasional. Salah satu cara untuk mempertahankan bahasa Indonesia dari berbagai tantangan yang di era globalisasi ini adalah melalui pendidikan bahasa Indonesia. Peran guru, khususnya guru bahasa Indonesia, sangat diperlukan dalam menjaga atau mempertahankan bahasa dari pergeseran bahkan sampai punahnya bahasa.

Muslich (2010: 67-70) memberikan gambaran peranan guru dalam pendidikan bahasa Indonesia, yaitu *pertama*, guru sebagai pembimbing

artinya guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak didiknya tentang bahasa yang digunakan peserta didik; *kedua*, guru sebagai model artinya guru harus memberi contoh kepada peserta didik dalam menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar; *ketiga*, guru sebagai administrator artinya guru harus dapat mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia; *keempat*, guru sebagai inovator artinya guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan bahasa dan kreatif selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk terampil berbahasa Indonesia; *kelima*, guru sebagai evaluator artinya guru harus terampil membuat alat evaluasi yang tepat yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh siswanya.

Peran guru tersebut tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh berbagai pihak, di antaranya keluarga, masyarakat, bahkan sampai pada para pemimpin bangsa. Semuanya harus bersama-sama mempunyai sikap berbahasa Indonesia sebagai identitas atau jati diri bangsa. Tanpa adanya kerja sama semua pihak dalam melestarikan bahasa Indonesia dari pengaruh globalisasi, usaha untuk mempertahankan bahasa Indonesia tersebut akan mengalami kegagalan. Untuk itulah diperlukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.

## **Kesimpulan**

Arus globalisasi telah turut mengikis rasa loyalitas terhadap bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional mulai berkurang. Namun, sebagai seorang pendidik memiliki beban yang sangat besar untuk mengembalikan citra bahasa Indonesia pada generasi muda melalui pendidikan.

Tugas guru dalam pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pemertahanan bahasa Indonesia agar tidak tertindas oleh bahasa asing. Guru berkewajiban membimbing anak didiknya untuk selalu mencintai bahasa Indonesia. Guru selayaknya menjadi model atau contoh, artinya guru harus memberi contoh kepada peserta didik dalam menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Guru harus dapat mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia. Guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan bahasa dan kreatif selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk terampil berbahasa Indonesia. Terakhir, harus terampil membuat alat evaluasi yang tepat yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh siswanya.

Peran guru tersebut tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh berbagai pihak, di antaranya keluarga, masyarakat, bahkan

sampai pada para pemimpin bangsa. Semuanya harus bersama-sama mempunyai sikap berbahasa Indonesia sebagai identitas atau jati diri bangsa. Tanpa adanya kerja sama semua pihak dalam melestarikan bahasa Indonesia dari pengaruh globalisasi, usaha untuk mempertahankan bahasa Indonesia tersebut akan mengalami kegagalan.

### **Daftar Pustaka**

- Alwi, Hasan. 2003. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Groesjean, Francois. 1982. *LIFE WITH TWO LANGUAGES*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hinkel, Eli. 2011. *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Volume II*. New York: Routledge.
- Leclerc, Jaques. 1994. *Recueil des législations linguistiques dans le monde*, Quebec, Canada : Centre internationale de recherche en aménagement linguistique.
- Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romaine, Suzanne. 1989 *BILINGUALISM*. Oxford: Basil Blackwell.
- Rusyana, Yus. 1984. *BAHASA DAN SASTRA DALAM GAMITAN PENDIDIKAN: HIMPUNAN BAHASAN*. Penerbit: Diponegoro.
- Spolsky, Bernard. (2009). *Language management*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tolkson, J.W. 1991. *Planing Language, Planing Inequality: Language Policy in Cpmmunity*. New York: Lougman.

# **BAHASA DAN NEGARA: PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DALAM KERANGKA 65 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-TIONGKOK**

**Sudaryanto**

*Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*

*FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*

E-mail: sudaryanto82@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Tahun 2015 hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok memasuki usia 65 tahun. Selama enam dasawarsa lebih itu, pengajaran bahasa Indonesia di Tiongkok mengalami dinamika yang sejalan dengan dinamika hubungan kedua negara itu. Melalui studi pustaka dan wawancara, diperoleh dua hal. Pertama, hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok mengalami pasang-surut sejak mulai dibuka pada 1950 hingga 2015, seperti adanya pembekuan hubungan kedua negara akibat meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan terjalinnnya kembali hubungan diplomatik Jakarta-Beijing dalam Kemitraan Strategis pada 2005. Kedua, selama 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok telah berdiri sembilan universitas di Tiongkok yang membuka jurusan bahasa Indonesia, disertai pula catatan terkini*

*tentang para pengajar, mahasiswa, dan kegiatan pengajaran di tiap-tiap kampus tersebut.*

**Kata Kunci:** hubungan Indonesia-Tiongkok, pengajaran bahasa Indonesia

“Kita ingin memberikan makna lebih dalam sebagai mitra strategis komprehensif, dengan rangkaian kerja sama yang lebih nyata, memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat kedua negara.”

**Presiden RI Joko Widodo**

## **Pengantar**

Tahun 2015 hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok memasuki usia 65 tahun. Selama enam dasawarsa lebih itu, hubungan kedua negara itu mengalami pasang-surut. Hal serupa juga terjadi pada bidang pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok. Dengan demikian, hubungan diplomatik Jakarta-Beijing (dulu Jakarta-Peking) dapat dibilang memiliki relevansi dengan perkembangan pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok.

Minat mahasiswa Negeri Tirai Bambu itu untuk mendalami bahasa Indonesia kian berkembang. Salah satu buktinya ialah adanya penambahan jumlah universitas yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Universitas Peking tergolong kampus tertua yang memiliki jurusan bahasa Indonesia, yaitu sejak 1949 (Sudaryanto, 2015: 3). Di masa-masa berikutnya, berdiri Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing dan Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong.

Melalui kajian pustaka dan wawancara, maka tulisan ini disusun guna mengungkap dua hal pokok, yaitu (1) hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok selama 65 tahun (1950-2015) dan relevansinya dengan pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok, dan (2) catatan terkini tentang sembilan universitas di Tiongkok yang telah membuka jurusan bahasa dan budaya Indonesia melingkupi para pengajar, mahasiswa, dan kegiatan pengajarannya.

Adapun teori yang relevan dengan kedua hal pokok di atas ialah apa yang dikemukakan oleh Minhe (2011). Menurut Minhe (2011: 127), meningkatnya kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, terutama di bidang perdagangan dan industri pariwisata, membuat kemampuan berbahasa Indonesia kian dibutuhkan. Meskipun hubungan kedua negara mengalami pasang-surut, namun hal itu tidak mempengaruhi minat mahasiswa Tiongkok mempelajari bahasa Indonesia.



## Pembahasan

Hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok telah terjalin selama 65 tahun, sejak 1950 hingga 2015. Selama enam dasawarsa lebih itu, hubungan kedua negara itu mengalami kondisi pasang-surut. Dalam konteks tulisan ini, penulis membagi empat periode, yaitu periode I (1950-1970), II (1971-1991), III (1992-2012), dan IV (2013-2015). Pembagian masa periode itu dilakukan agar lebih mudah dalam membahas tiap-tiap periode tersebut.

Selain itu, hubungan Indonesia-Tiongkok selama 65 tahun dikaitkan dengan perkembangan pengajaran bahasa Indonesia pada kurun waktu tersebut. Hal menarik untuk dicermati ialah, bahwa tiap-tiap periode hubungan kedua negara itu berdampak secara langsung atau tidak terhadap proses perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Tiongkok. Termasuk di dalamnya pendirian sejumlah kampus di Tiongkok yang memiliki jurusan bahasa dan budaya Indonesia.

## Periodisasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok dan Pengajaran Bahasa Indonesia

### Periode I (1950-1970)

Ketika Indonesia dan Tiongkok (dulu dikenal dengan Republik Rakyat Cina/RRC) mulai membuka hubungan diplomatik pada 13 April 1950, di Tiongkok telah berdiri Universitas Peking (Peking University/gambar 1). Di kampus yang dikenal dengan julukan *Beida (Beijing Daxue)* itu telah dibuka jurusan bahasa Indonesia pada 1949. Awalnya bernama Jurusan Bahasa Melayu, tapi setahun kemudian namanya berganti menjadi Jurusan Bahasa Indonesia.

Pada 1950 itu, Liang Liji muda tengah belajar di Jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa-bahasa Timur Universitas Peking. Liji merupakan bagian dari gelombang pertama pelajar keturunan Tionghoa di Indonesia yang kembali ke tanah leluhur setelah berdirinya RRC pada 1949. Setelah lulus pada 1954, Liji pun mengajar bahasa Indonesia di almahaternya itu sampai pensiun. Liji memiliki banyak murid saat itu, antara lain, Kong Yuanzhi dan Liang Minhe.

Tahun 1961, Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing (Beijing Foreign Studies University/gambar 2) pun resmi membuka Jurusan Bahasa Indonesia (Sariyan, 2011: 34; Zhen, 2011: 51). Di kampus yang dikenal dengan sebutan *Beiwai (Beijing Wai Go Yu Daxue)* itu, ada seorang pengajar bernama Wu Wenxia. Prof. Wenxia dikenal sosok yang cinta Indonesia. Dia sering menceritakan kepada mahasiswanya tentang keindahan alam Indonesia yang asri.

Para mahasiswa Tiongkok yang pernah belajar di Indonesia

melalui pertukaran pelajar semasa pemerintahan Soekarno ikut berjasa menghidupkan hubungan Indonesia-Tiongkok, seperti halnya Liji dan Yuanzhi. Sebelum 1965, setiap tahun pemerintah Tiongkok mengirim mahasiswa ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Sebaliknya, banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim ke Tiongkok.

Hubungan kedua negara terus mengalami perkembangan, salah satunya terwujud pada ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kerja sama kebudayaan pada 1 April 1961. Kemudian, baik Indonesia maupun Tiongkok, juga sempat menjalin suatu kemitraan dalam membangun solidaritas di antara negara-negara New Emerging Forces (NEFO). Di masa-masa itu, hubungan kedua negara itu bisa dikatakan memiliki tren positif.

Jurusan Bahasa dan Sastra Tionghoa di Universitas Indonesia (UI) makin maju setelah kedatangan Prof. Dr. Tjan Tjoe Som, lulusan Leiden, Belanda, pada 1953. Ia memperkenalkan sejarah, sosiologi, dan kebudayaan serta memasukkan kuliah tentang Tiongkok modern dan linguistik ke dalam kurikulum yang sebelumnya lebih menekankan filsafat dan sejarah kuno. Di UI sendiri, tiap tahun sedikitnya empat mahasiswa asal Tiongkok belajar sastra Indonesia.

Kemajuan studi Tiongkok di Indonesia dan studi Indonesia di Tiongkok terhenti setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September pada 1965. Apalagi setelah pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa/Tiongkok. Bahkan, Prof. Tjan Tjoe Som, dipecat lantaran terlibat dalam Himpunan Sarjana Indonesia yang dianggap pro-PKI (Partai Komunis Indonesia). Studi tentang Tiongkok pun terhenti.

Namun, ketertutupan itu tidak terjadi di Tiongkok. Lantaran tak mungkin belajar langsung di Indonesia, banyak mahasiswa Tiongkok mengambil studi Indonesia di Universitas Leiden, Belanda. Mengutip Dahana (2011), berbeda dengan Indonesia yang menanggapi putusannya hubungan diplomatik dengan Tiongkok secara emosional dengan menutup akses terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Tiongkok, studi tentang Indonesia di Tiongkok justru menguat.

Salah seorang mahasiswa asal Tiongkok yang mengambil studi Indonesia di Belanda saat itu ialah Kong Yuanzhi. Yuanzhi menjadi salah satu pengajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Peking hingga pensiun. Bersama gurunya, Liang Liji, Yuanzhi terlibat dalam tim perkamusian Universitas Peking yang menerbitkan *Kamus Lengkap Indonesia-Tionghoa* (2000). Selain itu, Yuanzhi juga aktif melakukan penelitian dan publikasi tentang sosok Cheng Ho.

Salah seorang murid Liji, Liang Minhe, mulai belajar bahasa

Indonesia pada 1970. Minhe mengaku sejak remaja bercita-cita mengunjungi Indonesia. Dia juga mengaku sempat menyaksikan film yang memperlihatkan indahnya alam Indonesia. Minhe masih ingat, saat itu, mahasiswa seangkatannya di jurusan yang sama ada 24 orang. Selain di Universitas Peking, ada puluhan mahasiswa yang belajar di kampus lainnya, seperti Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong.

Pada 1970, berdiri Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong (Guangdong University of Foreign Studies/ gambar 3). Kampus yang memiliki sebutan *Guangwai* (*Guangdong Wai Yu Wai Mao Daxue*) itu terletak di Kota Guangzhou, ibukota Provinsi Guangdong. Di kampus tersebut tercatat sejumlah ahli Indonesia aktif mengajar dan meneliti, seperti halnya Xu Younian, Cai Jincheng, dan Zhu Gangqin.

Menurut Jincheng (2015), atas keputusan dari Presiden Tiongkok Mao Zedong dan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Zhou Enlai, akhirnya pihak GDUFSS resmi membuka jurusan bahasa Indonesia. Kendati saat itu hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok mengalami kebekuan. Tetap dibukanya jurusan itu, lanjut Jincheng kini pensiunan guru besar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang cukup besar dan banyak orang yang menggunakannya.

### Logo-logo Universitas yang Membuka Jurusan Bahasa Indonesia pada Periode 1950-1970

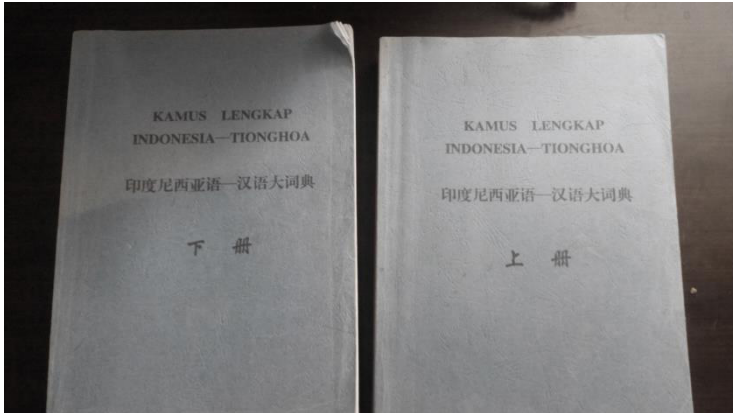
Gambar 1	Gambar 2	Gambar 3
		

### Periode II (1971-1991)

Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September pada 1965 ternyata berdampak pada bekunya hubungan Jakarta-Peking (dulu ibukota RRC) saat itu. Pada 1970-an, Liang Liji menjadi penanggung jawab Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Peking. Kendati hubungan Indonesia-RRC waktu itu beku, ia giat membentuk tim penyusun kamus Indonesia-

Tionghoa (gambar 4), dan menghabiskan sepuluh tahun untuk menyusun kamus besar yang kelak terbit di Tiongkok pada 1989.

**Gambar 4** *Kamus Lengkap Indonesia-Tionghoa* Susunan Tim Perkamusan Universitas Peking



Seiring dengan itu, pada 24 Februari 1989, Presiden Soeharto bertemu Menlu Tiongkok saat itu Qian Qichen dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo. Saat itu, kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara yang sudah lama membeku mulai dibahas. Pembahasan tersebut pun dilanjutkan pada 4 Oktober 1989 ketika Menlu RI Ali Alatas dan Qian Qichen mengadakan pertemuan di Tokyo.

Alhasil, pada Juli 1990, kedua menlu menandatangani Komunike Bersama “The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries” di Beijing, diikuti kunjungan PM Tiongkok Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990. Menyusul 14-18 November 1990, Presiden Soeharto melakukan kunjungan balasan dan menyaksikan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik.

### **Periode III (1992-2012)**

Tahun 1990-an merupakan masa pencairan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok setelah pembekuan hubungan pasca-peristiwa Gerakan 30 September pada 1965. Dalam masa pencairan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, terjadilah kunjungan antarpemimpin kedua negara. Selanjutnya, pada 2003, terjadi kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Beijing dan disambut oleh Presiden Tiongkok saat itu Jiang Zemin.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, “diplomasi dansa” menjadi ikon kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok. Saat kunjungan ke Beijing, Presiden Zemin mengajak Megawati berdansa sekitar enam menit dengan iringan musik orkestra, Minggu (24/3/2003), dalam acara jamuan makan malam kenegaraan di Balai Rakyat Agung, Beijing (Wibowo & Hadi, 2009). Sebanyak 100 undangan hadir tertegun melihat adegan yang sangat jarang terjadi itu.

Puncak hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok ialah ditandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis pada April 2005 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Hu Jintao. Dalam waktu bersamaan, berdiri jurusan bahasa dan budaya Indonesia di dua kampus, yaitu Universitas Kebangsaan Guangxi (gambar 5) di Kota Nanning, dan Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai (gambar 6) di Kota Shanghai (Xiaoqiang, 2014: 8).

Tahun 2007, berdiri jurusan bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Xiangsihu (gambar 7) di Kota Nanning, dan dua tahun kemudian berdiri lagi Universitas Normal Guangxi (gambar 8) di Kota Guilin, keduanya termasuk Provinsi Guangxi. Selanjutnya, pada 2011, jurusan bahasa dan budaya Indonesia kembali didirikan di Universitas Kebangsaan Yunnan (gambar 9) di Kota Kunming, Provinsi Yunnan. Hingga kini kelima universitas itu tetap eksis.

Meningkatnya kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, terutama di bidang perdagangan dan pariwisata, membuat kemampuan berbahasa Indonesia kian dibutuhkan. Alhasil, jumlah mahasiswa peminat studi tentang Indonesia terus meningkat. Sebagai gambaran, jumlah mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Kebangsaan Guangxi selalu meningkat tiap angkatannya, dari 18 orang (2011), 19 orang (2012), 23 orang (2013), hingga 25 orang (2014).

### Logo-logo Universitas yang Membuka Jurusan Bahasa Indonesia pada Periode 1992-2012

Gambar 5	Gambar 6	Gambar 7	Gambar 8	Gambar 9
				

## Periode IV (2013-2015)

Pada Oktober 2013, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok kian lama kian baik. Hal itu diwujudkan ke dalam penandatanganan dokumen Future Direction of Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnership, yang merupakan tindak lanjut dari Kemitraan Strategis Komprehensif pada 25 April 2005. Dengan penandatanganan itu, hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya kedua negara pun terus meningkat.

Di tahun yang sama, berdiri pula jurusan bahasa dan budaya Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin (gambar 10) di Kota Tianjin. Kampus yang mendapat julukan *Tianwai* ini menjadi kampus kesembilan yang membuka jurusan bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok. Sejak 2013, Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin resmi menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia.

Sementara itu, Presiden RI Jokowi hendak menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai visi pembangunan selama lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan Jalur Sutera Maritim yang digagas oleh pihak Tiongkok. Jalur Sutera Maritim Tiongkok akan melewati Selat Sunda yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Jawa, serta Selat Karimata yang menghubungkan Laut Jawa dan Laut Tiongkok Selatan.

Tahun ini, diplomasi Tiongkok akan fokus pada inisiatif “One Belt One Road” yang merupakan rencana pembangunan ekonomi yang terfokus pada peningkatan perdagangan, infrastruktur, dan konektivitas kawasan, dari Eropa melintasi Asia Tengah dan Barat, sementara di sisi selatan menghubungkan Asia Tenggara. Realisasi proyek tersebut akan dimulai tahun ini selama satu dekade ke depan bersama negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.

**Gambar 10** Logo Universitas yang Membuka Jurusan Bahasa Indonesia pada Periode 2013-2015



## Jurusan-jurusan Bahasa Indonesia di Tiongkok Terkini

Selama 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok terjalin, selama itu pula jurusan-jurusan Bahasa Indonesia di Tiongkok mengalami perkembangan yang sifatnya dinamis. Dalam bagian ini, sejumlah catatan tentang para pengajar, mahasiswa, dan kegiatan pengajarannya di sembilan universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia dipaparkan dengan merujuk sejumlah referensi dan informasi dari pihak yang diwawancarai oleh penulis.

Berikut ini adalah tabel tentang gambaran terkini jurusan-jurusan bahasa Indonesia di Tiongkok, terutama selama 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok terjalin. Data tentang jumlah pengajar diambil dari Xiaoqiang (2014: 7) dan diperbarui melalui wawancara penulis dengan sejumlah pihak yang terkait, seperti halnya kolega dosen, mahasiswa, dan staf Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing.

**Tabel 1** Gambaran Terkini Jurusan-jurusan Bahasa Indonesia di Tiongkok Periode 2014-2015

No.	Kampus	Tahun Berdiri	Jumlah Pengajar	Letak
1.	Universitas Peking (PKU)	1949	2	Kota Beijing
2.	Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing (BFSU)	1961	2	Kota Beijing
3.	Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong (GDUFS)	1970	5*	Kota Guangzhou
4.	Universitas Kebangsaan Guangxi (GXUN)	2005	4*	Kota Nanning
5.	Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai (SISU)	2005	2*	Kota Shanghai
6.	Universitas Xiangsihu (XSH)	2007	5*	Kota Nanning
7.	Universitas Keguruan Guangxi (GXNU)	2009	2*	Kota Guilin
8.	Universitas Kebangsaan Yunnan (YMU/YUN)	2011	2*	Kota Kunming
9.	Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin (TUFS)	2013	4*	Kota Tianjin

Keterangan: \* staf pengajar lokal dan asing/tamu dari Indonesia

### Universitas Peking (PKU)

Universitas Peking memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 1949 hingga sekarang. Jurusan tersebut setiap tahun menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia. Masa studi mahasiswa

sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Jumlah pengajar di jurusan tersebut terdiri dua orang, yaitu Dr. Qie Lisha (merangkap Ketua Jurusan) dan Dr. Luo Jie. Selain jenjang S-1, dibuka juga program kursus bahasa Indonesia (1 tahun) dan jenjang S-2.

Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Peking tidak memiliki staf pengajar asing/tamu dari Indonesia, baik sistem pendaftaran mandiri (*freelance*) maupun sistem kontrak kerjasama universitas (*MoU*). Selain itu, pola pembelajaran yang digunakan ialah “4+0”, artinya empat tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan tidak belajar di Indonesia. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pihak universitas di Tanah Air yang ingin menjalin kerja sama.

### **Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing (BFSU)**

Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 1961 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia empat tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Jumlah pengajar di jurusan tersebut terdiri dua orang, yaitu Wang Feiyu, M.A. (merangkap Ketua Jurusan) dan Wang Dandan, M.A.

Seperti halnya Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Peking, Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing juga tidak memiliki staf pengajar asing/tamu dari Indonesia. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi peluang bagi pihak universitas di Tanah Air yang ingin menjalin kerja sama.

### **Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong (GDUFS)**

Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 1970 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Yogyakarta (UNY).

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong terdiri lima orang, yaitu Yuan Hagiun, M.A. (merangkap Ketua Jurusan), Prof. Madya Zhu Gangqin, Prof. Madya Tan Xiao, Ge Rui, M.A., dan Dr. Suroso, M.Pd. (staf pengajar asing/tamu dari UNY). Masih ada dua staf pengajar lokal yang sedang cuti mengajar



di GDUFS karena bertugas di Konjen RRT Indonesia. Umumnya staf pengajar lokal pernah studi lanjut (S-2) di UGM.

### **Universitas Kebangsaan Guangxi (GXUN)**

Universitas Kebangsaan Guangxi memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 2005 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Yogyakarta (UAD).

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Kebangsaan Guangxi terdiri empat orang, yaitu Han Yanyan, M.A. (merangkap Ketua Jurusan), Wei Zhong Fulin, M.A., Chen Cheng, M.A., dan Sudaryanto, M.Pd. (staf pengajar asing/tamu dari UAD). Ketiga staf pengajar lokal pernah belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia, seperti halnya Han Yanyan (UGM), Wei Zhong Fulin (Unsrri), dan Chen Cheng (Unesa dan UAD).

### **Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai (SISU)**

Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 2005 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia.

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai terdiri dua orang, yaitu Huang Yuemin dan seorang pengajar asing/tamu dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Menurut Riyono, staf Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, para mahasiswa di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai cukup rutin dalam mengikuti melamar program Beasiswa Darmasiswa setiap tahunnya.

### **Universitas Xiangsihu (XSH)**

Universitas Xiangsihu memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 2007 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi

mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia (UAD dan/atau Unud).

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Xiangsihu terdiri lima orang, yaitu Tang Yanyi, M.A., He Rong, Sudaryanto, M.Pd., Arief Hidayat Muhtar, S.Pd.BI, dan Pradhika Nurul Huda, S.E.Akt (ketiganya staf pengajar asing/tamu dengan sistem kontrak per jam). Salah satu staf pengajar lokal, Tang Yanyi, M.A. pernah menempuh studi lanjut (S-2) bidang linguistik di UGM, Yogyakarta.

### **Universitas Keguruan Guangxi (GXNU)**

Universitas Keguruan Guangxi memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 2009 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia (UM).

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Keguruan Guangxi terdiri dua orang, yaitu seorang staf pengajar lokal dan Enny selaku staf pengajar asing/tamu dari Indonesia. Menurut Enny, jurusan tersebut akan resmi ditutup pada 2015 ini karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, sejak 2014 lalu jurusan tersebut tidak lagi menerima mahasiswa dan lebih berfokus untuk meluluskan mahasiswa yang saat ini masih belajar.

### **Universitas Kebangsaan Yunnan (YUN/YMU)**

Universitas Kebangsaan Yunnan memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 2011 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia (UNY).

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Kebangsaan Yunnan terdiri empat orang, yaitu Yan Yu, M.A. (merangkap Ketua Jurusan), Yang Yang, M.Hum, Zhang Huiye, M.A., dan Supardjo, M.Ed. (staf pengajar asing/tamu dari UNY). Untuk sementara ini, Yang Yang cuti mengajar karena bertugas mengajar bahasa Tionghoa

di Indonesia, sedangkan Zhang Huiye cuti mengajar karena sedang menempuh studi lanjut tingkat doktoral di Shanghai.

### **Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin (TFSU)**

Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin memiliki Jurusan Bahasa Indonesia sejak 2013 hingga sekarang. Jurusan tersebut menerima mahasiswa peminat studi bahasa dan budaya Indonesia setiap tahun sekali. Masa studi mahasiswa sarjana (S-1) mencapai 4 tahun. Pola pembelajaran yang digunakan ialah “3+1”, artinya tiga tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok dan satu tahun belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia (Unesa).

Jumlah pengajar di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin terdiri empat orang, yaitu Cao Jia (merangkap Ketua Jurusan), Han Xu, M.Hum, Dr. Xu Yunyu, dan Adam Damanhuri, M.A. (staf pengajar asing/tamu dari Unesa). Ketiga staf pengajar lokal itu memiliki pengalaman belajar di Indonesia, seperti halnya Cao Jia (penerima beasiswa Darmasiswa di UAD), Han Yu (studi S-2 di UPI), dan Xu Yunyu (studi S-3 di UGM).

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Selama 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok terjalin, selama itu pula terjadi dinamika pada aspek pengajaran bahasa Indonesia di Tiongkok. Dalam periode I (1950-1970) hanya berdiri tiga kampus di Tiongkok yang membuka Jurusan Bahasa Indonesia, dan periode II (1971-1991) tidak ada kampus di Tiongkok yang membuka Jurusan Bahasa Indonesia. Hal itu wajar mengingat hubungan diplomatik kedua negara sedang mengalami pembekuan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan pelarangan hal-hal yang berbau Tiongkok di zaman Orde Baru. Selanjutnya, pada periode III (1992-2012) berdiri lima kampus di Tiongkok yang membuka Jurusan Bahasa Indonesia seiring dengan penandatanganan dokumen Kemitraan Strategis pada April 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao, dan periode IV (2013-2015) berdiri kembali satu kampus di Tiongkok yang membuka Jurusan Bahasa Indonesia.

Selama 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok terjalin, telah berdiri sembilan kampus di Tiongkok yang memiliki Jurusan Bahasa Indonesia, yaitu Universitas Peking (1949), Universitas Bahasa-bahasa Asing Beijing (1961), Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong (1970),

Universitas Kebangsaan Guangxi (2005), Universitas Bahasa-bahasa Asing Shanghai (2005), Universitas Xiangsihu (2007), Universitas Keguruan Guangxi (2009; **ket.** akan ditutup tahun ini), Universitas Kebangsaan Yunnan (2011), dan Universitas Bahasa-bahasa Asing Tianjin (2013). Kesemua kampus itu memiliki jumlah pengajar sekitar 2-5 orang, ditambah staf pengajar asing/tamu dari Indonesia, serta sebagian telah memiliki kerja sama internasional dengan beberapa universitas di Indonesia, antara lain, Universitas Ahmad Dahlan (Yogyakarta), Universitas Negeri Yogyakarta (Yogyakarta), Universitas Udayana (Bali), Universitas Negeri Malang (Malang), dan Universitas Negeri Surabaya (Surabaya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Jincheng, Cai. 2015. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Provinsi Guangdong." *China Radio International (CRI) Bahasa Indonesia*, Edisi 23 April 2015.
- Liji, Liang, dkk. 2000. *Kamus Lengkap Indonesia-Tionghoa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- M, Indira. 2015. "Napak Tilas Perjalanan Diplomatik Indonesia-RRT." *China Radio International (CRI) Bahasa Indonesia*, Edisi 22 April 2015.
- Minhe, Liang. 2011. "Indonesia Selalu Menarik di Cina". *Tempo*, Edisi 14-20 November 2011, hal. 126-127.
- Sariyan, Awang. 2011. "Menjalin Persefahaman Antara Tamadun Melalui Pengajian Melayu: Gagasan Pelan Tindakan." Dalam Awang Sariyan (ed.). *Prof. Wu Zong Yu 50 Tahun dalam Pengembangan Bahasa Melayu di China* (Siri Monograf Pengajian Melayu Bilangan 2). Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bekerja sama dengan Beijing Foreign Studies University.
- Sudaryanto. 2015. "Hari Depan Bahasa Indonesia di Negeri Tirai Bambu: Beberapa Catatan dari Seorang Pengajar Tamu." Dalam Haryadi & Asruddin B. Tou (ed.). *Linguistik Terapan Seri I Bahasa dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Samudra Biru bekerja sama dengan AAPLT UNY Indonesia.
- Wibowo, I & Syamsul Hadi. 2009. *Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Xiaoqiang, Yang. 2014. "Eksistensi Bahasa Indonesia dalam Kemitraan Strategis RI-RRT: Perspektif Tiongkok". Dalam Rina Ratih Sri Sudaryani (ed.). *Prosiding Seminar Internasional PIBSI XXXVI Membangun Citra Indonesia di Mata Internasional Melalui Bahasa dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas

Ahmad Dahlan.

Zhen, Zhao Yue. 2011. "Dampak Pengajaran Bahasa Melayu di China." Dalam Awang Sariyan (ed.). *Prof. Wu Zong Yu 50 Tahun dalam Pengembangan Bahasa Melayu di China* (Siri Monograf Pengajian Melayu Bilangan 2). Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bekerja sama dengan Beijing Foreign Studies University.

# PENGEMBANGAN MATERI MEMBACA BIPA YANG TERINTEGRASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARNEGARA

**Laily Nurlina**  
**Siti Fathonah**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: *lailynurleena@gmail.com* dan *hen3\_dila@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

*Pembelajaran BIPA mulai terlihat di lembaga – lembaga pendidikan Indonesia sehingga materi pengajaran sangat penting dikembangkan sesuai kebutuhan mereka. Salah satu materi yang paling strategis untuk menjembatani kesulitan komunikasi adalah materi keterampilan membaca yang diintegrasikan dengan kearifan lokal. Melalui pemahaman kearifan lokal, mahasiswa asing akan mudah beradaptasi tinggal di Indonesia. Pengembangan materi membaca disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal masing – masing lembaga pendidikan karena bahasa tidak dapat dipisahkan dengan budaya itu sendiri. Mempelajari bahasa Indonesia artinya mempelajari budaya Indonesia. Kearifan lokal dapat diwakili oleh nilai – nilai yang dianut oleh orang Banyumas, misalnya, sopan – santun, tata krama, upacara tradisional, tari – tarian dan masih banyak lagi.*

**Kata kunci :** BIPA, materi membaca, kearifan lokal, komunikasi, penutur asing

## **Pendahuluan**

Saat ini dengan mudah kita melihat banyak mahasiswa asing belajar di Indonesia dengan dibukanya kran pendidikan antarnegara. Posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi menjadi relevan dengan dasar hukum yang telah ditetapkan pemerintah baik UU No. 24 Tahun 2009 maupun Bab VIII Pasal 45 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing sangat diminati dan dibutuhkan namun sayang sekali belum ada kurikulum yang baku yang bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan mempelajari bahasa Indonesia sangat bervariasi antara penutur asing yang satu dengan lainnya. Lembaga penyelenggara BIPA tidak dapat menggunakan satu materi ajar untuk seluruh peserta didiknya karena ada yang bertujuan hanya untuk komunikasi dengan teman sesama ekspatriat, untuk kepentingan studi atau pengantar pendidikan, kepentingan bekerja sehingga harus menguasai bagaimana memimpin rapat, membuat notulen dan kemampuan – kemampuan dasar lainnya.

Minat mempelajari bahasa Indonesia oleh penutur asing telah tumbuh sejak 1795 ketika sebuah institusi Prancis mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini tidak kurang 45 negara telah melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia melalui pendidikan formal di perguruan tinggi dan kursus – kursus. Negara – negara maju telah memasukkan bahasa Indonesia sebagai bagian dari mata kuliah yang diajarkan seperti Amerika Serikat ada sembilan universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia, Jerman terdapat enam universitas, Jepang ada 28 universitas dan Australia 13 perguruan tinggi serta 500 sekolah menengah juga mengajarkan bahasa Indonesia. Berkembangnya BIPA baik di Indonesia maupun di negara lain menuntut lembaga BIPA mempersiapkan pembelajaran sebaik – baiknya. Penutur asing mempunyai standar tinggi dalam menilai kualitas pendidikan sehingga lembaga BIPA tidak dapat mengajar tanpa standar mutu yang telah dinilai minimal oleh lembaga jaminan mutu di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Lembaga–lembaga BIPA telah mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajarnya dan apabila mereka belum mampu membuat maka akan berafiliasi dengan lembaga BIPA yang lebih dahulu berdiri. Heine (2010: 264) menjelaskan perbedaan antara penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua yang relevan diperlihatkan pada komunikasi verbal :

*The most prominent, and rather trivial, difference between both groups is that in the think-aloud protocols of the monolingual group only one, while in the protocols of the bilingual group two languages play a part. Therefore the bilingual learners have to face a special kind of linguistic problem solving, namely translation (cf. L2 text composition model by Krings 1996); thus, these processes are specific for the information processing of the bilingual learners.*

Perbedaan yang jelas antara bahasa pertama dan kedua yang paling mengemuka dan sepele adalah penutur asing sering menggunakan metode penterjemahan untuk menyelesaikan masalah linguistik dan masalah bahasa yang dihadapi. Hal ini bertentangan dengan metode – metode pembelajaran yang saat ini sedang dikembangkan yaitu pendekatan komunikasi dan kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode penterjemahan sebenarnya baik tetapi sering tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan dan membuat penutur asing mengalami kebingungan ketika menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari – hari.

Metode penterjemahan teks sangat lazim digunakan pengajar karena mudah dan tidak memerlukan persiapan media yang rumit. Penutur asing akan mudah mengalami kejenuhan apabila setiap hari harus menterjemahkan satu kata per kata lainnya apalagi mereka akan menemukan teks wacana yang panjang – panjang. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dikuasai pembelajar asing di samping berbicara, mendengar, dan menulis. Melalui kemampuan membaca, penutur asing akan bertambah kosakata, tata bahasa, dan pengetahuannya sehingga materi ajar membaca menjadi sangat penting untuk dibuat oleh lembaga BIPA khususnya pengajar BIPA. Beberapa materi membaca yang ada masih jauh dari pengenalan budaya sehingga pembelajaran sosial budaya seolah – olah terpisah dari pembelajaran dalam kelas. Tema – tema yang disampaikan antara lain pengenalan, kehidupan kampus, kehidupan di lingkungan rumah, benda – benda di sekitar rumah dan lain – lain sesuai dengan tingkat pembelajaran peserta didik.

## **Kemampuan Membaca Pemahaman**

Membaca adalah proses yang dilakukan dan digunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis (Nurgiyantoro:2001). Mahasiswa asing membaca teks bahasa Indonesia memerlukan proses yang lebih lama karena keterbatasan pengetahuan awal dan kemampuan kosakata mereka. Proses membaca menuntut agar kelompok kata terlihat dalam pandangan



sekilas dan setiap makna kata dipahami supaya pesan tersurat dan tersirat dapat ditangkap dan dipahami.

Tingkat hubungan antar makna yang hendak dikemukakan penulis dan penafsiran atau interpretasi pembaca turut menentukan ketepatan membaca. Makna bacaan terletak pada pikiran pembaca bukan pada teks yang disajikan. Penutur asing mempunyai makna berbeda pada sebuah bacaan dan pengalaman berbeda-beda untuk menginterpretasikan kata-kata.

Kegiatan membaca pemahaman dapat tumbuh diawali dengan pemberian motivasi yang baik sehingga mahasiswa asing tertarik untuk banyak membaca. Banyak mahasiswa asing membaca materi bacaan tetapi tidak memahami isi bacaan. Untuk itu, perlu dipahami ciri-ciri membaca seperti yang dikemukakan Carret (1998), membaca bukan proses yang pasif, pembaca harus memberi sumbangan secara aktif dan bermakna jika ia ingin memahami tulisan, segala segi membaca, mulai dari pengenalan huruf satu persatu atau kata demi kata, sampai pada pemahaman seluruh penggal, dapat dianggap sebagai pengurang keraguan. Membaca lancar mengharuskan pemanfaatan informasi yang disediakan oleh lebih dari satu sumber sehingga pengetahuan yang dimiliki pembaca akan memainkan peran yang penting, terutama di dalam mengurangi ketergantungan pada informasi visual. Kegiatan membaca dalam bahasa berbeda membutuhkan penguasaan kosakata dan makna – makna tersirat sehingga mahasiswa asing harus dilatih memahami teks bacaan tidak hanya yang tersurat.

Chittravelu et.al. (2004 : 87 – 89) mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca, di antaranya: (1) membaca memerlukan seperangkat pengetahuan tentang kaidah atau ketentuan membaca; (2) membaca memerlukan pemahaman arti dan pesan yang terkandung di dalam teks; (3) pemahaman terhadap teks memerlukan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan dalam penulisan teks ; (4) membaca merupakan suatu proses berfikir karena dalam membaca seseorang menduga, memprediksi dan mengambil kesimpulan ; (5) membaca merupakan proses interaksi; (6) membaca merupakan sistem kebutuhan hidup; (7) membaca bukan merupakan *single skill* akan tetapi merupakan *multiple skill* yang digunakan secara berbeda pada teks yang berbeda pula; dan (8) pengalaman membaca yang luas pada jenis teks yang beragam akan memudahkan seseorang dalam memahami teks yang dibacanya.

Teks wacana yang diberikan pada mahasiswa asing harus sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka dalam belajar bahasa Indonesia. Apabila pembelajar ingin menguasai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi maka pengajar menyediakan teks wacana yang berisi

dialog – dialog praktis dengan kosakata yang sering digunakan dan ditemui mereka termasuk bahasa gaul yang sering membingungkan. Pembelajaran yang bertujuan untuk melanjutkan kuliah diberikan teks wacana yang lebih berbobot dan sesuai dengan jurusan yang mereka ambil misalnya kedokteran, mahasiswa asing harus sering bersentuhan dengan wacana tentang dunia medis.

Bahasa Indonesia diajarkan pada mahasiswa asing untuk menunjang kemampuan komunikasi mereka dalam kehidupan sehari – hari. Mahasiswa asing yang akan kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia diajarkan bahasa Indonesia untuk menunjang kemampuan mereka menerima ilmu, dan mahasiswa yang mengambil jurusan lain pun harus dilatihkan membaca rujukan berbahasa Indonesia sehingga menunjang kemampuan mereka ketika membuat skripsi atau laporan akhir. Tujuan pengajaran membaca teks bahasa Indonesia berbeda – beda sehingga pengelolaannya juga harus dibedakan. Kegiatan membacanya sama tetapi cara membaca berbeda sesuai kebutuhan masing – masing.

Membaca pemahaman lebih menitikberatkan pada menggali informasi yang ada dalam teks yang tidak berupa tulisan saja tetapi bisa gambar, grafik, bagan, diagram, tabel dan lain sebagainya. Mahasiswa asing akan menemui banyak teks dalam perkuliahan sehingga pengajar dapat membiasakan dan mendekatkan pada tema – tema yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya : mahasiswa dibiasakan membaca teks – teks panjang bermuatan kearifan lokal sehingga ketika mereka harus kuliah kerja lapangan sudah mengetahui kondisi masyarakat setempat.

Banyak lembaga BIPA mengembangkan materi ajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa asing dan mengenalkan budaya dengan cara mengunjungi situs – situs atau tempat bersejarah. Hal ini sudah sangat bagus untuk dilaksanakan karena lebih mendekatkan mahasiswa asing dengan budaya Indonesia. Peneliti melihat adanya kekurangan dalam program yang sudah dilakukan oleh lembaga BIPA yang ada sehingga timbul sebuah gagasan untuk mengembangkan materi ajar membaca yang mengintegrasikan budaya dalam hal ini adalah kearifan lokal Banyumas. Mahasiswa asing akan mempelajari kearifan lokal Banyumas melalui materi – materi bacaan dan berdiskusi secara intensif sebelum mereka mengunjungi tempat – tempat yang dimaksudkan. Informasi yang telah didapatkan di dalam ruang pembelajaran akan lebih tepat guna dan bermanfaat ketika mereka mengunjungi tempat – tempat bersejarah dan dapat terlibat aktif ketika kegiatan luar kelas.

## Pembelajaran BIPA

Andayani (2014) menjelaskan beberapa tujuan pengajaran bahasa Indonesia: (1) memperluas pengalaman mahasiswa melalui media massa serta menyenangkan, (2) membantu mahasiswa agar mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara efektif sesuai dengan potensi masing-masing, (3) memperkenalkan kepada mahasiswa karya sastra yang bernilai, sehingga mereka tertarik dan terdorong untuk membacanya, (4) membantu dan membimbing mahasiswa agar memperoleh kemampuan dalam menyimak, berbicara, membaca dan menulis, (5) merangsang perhatian mahasiswa terhadap bahasa nasional serta menumbuhkan apresiasi yang baik dan mempunyai rasa tanggungjawab sehingga mempercepat keterampilan mereka dalam berbahasa Indonesia, (6) membantumahasiswa mengenai aturan bahasa Indonesia yang baik, serta mempunyai kemauan menggunakannya dalam berbahasa, baik ucapan maupun lisan, (7) membimbing mahasiswa agar mempunyai keberanian untuk menyatakan pendapat, serta memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dalam berbagai situasi dan (8) terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi dan juga kemampuan mengapresiasi sastra yang baik.

Dari penjelasan tersebut, mahasiswa asing yang belajar di Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi baik di perkuliahan maupun komunikasi sehari-hari. Mahasiswa dalam proses perkuliahan akan mengalami membuat tugas, makalah, presentasi, dan tugas akhir berbahasa Indonesia.

Penguasaan bahasa menjadi penting sehingga mahasiswa mampu mengungkapkan ide-ide dan pendapatnya dengan baik dan tepat. Pembelajaran BIPA harus dirancang sebaik-baiknya dengan analisis kebutuhan peserta didiknya bukan sekedar mengajarkan bahasa Indonesia dan menghadapi beberapa tantangan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai suku dan bahasa lokal yang berbeda sehingga pengajaran antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda dipengaruhi bahasa lokal yang ada di daerah tersebut.

Mahasiswa asing mempunyai *mindset* berbeda tentang pendidikan, mereka mempunyai standar tinggi sehingga ketika pembelajaran yang tidak sesuai akan membuat mereka tidak antusias belajar. Pengajar BIPAdapat menumbuhkan motivasi belajar dengan cara antara lain *satu*, penampilan guru yang hangat, menumbuhkan partisipasi positif sehingga peserta akan terbangun motivasinya dan terlibat dalam pembelajaran. *Kedua*, peserta mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran sehingga mereka akan terdorong aktif. *Ketiga*, lembaga BIPA menyediakan fasilitas, sumber

belajar, perpustakaan dan lingkungan belajar yang mendukung sehingga peserta merasa nyaman dan terpenuhi keingintahuannya. *Keempat*, pengajar mengakui keberadaan peserta dengan memberikan *reward* dan *punishment* sehingga mereka merasa dihargai setiap usaha belajarnya. *Kelima*, pengajar merancang jenis kegiatan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan menantang dan *terakhir*, penilaian hasil belajar yang dilakukan secara serius, objektif, terbuka, terukur dan penjelasan atas setiap kemajuan dalam belajar.

BIPA sebuah upaya pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau bahasa kedua bagi penutur asing yang ingin tinggal atau bekerja di Indonesia. Para penutur asing dari semula sudah menguasai bahasa ibunya sehingga ketika belajar bahasa Indonesia mengalami beberapa kendala seperti perbedaan pelafalan, makna, dan kendala lain termasuk budaya. Proses pembelajaran BIPA dikemas dengan pembelajaran komunikatif seperti kursus atau pelatihan bertujuan untuk memberikan penguasaan bahasa lisan dan tertulis kepada pembelajar. Para penutur asing yang belajar bahasa Indonesia diharapkan mampu mempergunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis dengan lancar dan sekaligus dapat mengerti bahasa yang dipergunakan penutur aslinya (Wojowasito, 1977:1).

Proses pembelajaran BIPA mengajarkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bukan sebagai materi bahasa (linguistik) yang dihafalkan atau dianalisis. Para pembelajar mempunyai tujuan belajar masing – masing sehingga lembaga BIPA harus mampu menggali sehingga materi lebih tepat sasaran dan kebutuhan. Materi tata bahasa diintegrasikan dalam pembelajaran sehingga tidak berat dan membebani pembelajar. Pengajar lebih menekankan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik di lingkungan kampus maupun masyarakat dimana mereka tinggal di Indonesia.

Van Eck menjelaskan pengajaran bahasa dengan tujuan komunikasi memerlukan komponen – komponen yakni (1) situasi yang melatarbelakangi penggunaan bahasa, meliputi peranan pembicara, latar, dan pokok bahasan yang dibicarakan, (2) kegiatan kebahasaan apa yang kelak perlu dilaksanakan oleh pembelajar, (3) fungsi bahasa yang akan dilaksanakan pembelajar dalam penggunaan bahasa kelak, (4) apa yang dapat dilaksanakan pembelajar terhadap setiap pokok bahasan, (5) nosi umum apa yang akan ditangani oleh pembelajar, (6) konsep khusus apa yang ditangani oleh pembelajar kelak, (7) bentuk bahasa apa yang dipakai oleh pembelajar, dan (8) tingkat keterampilan yang kelak dapat dimanifestasikan oleh pembelajar.

Krasen mengatakan bahwa teori pemerolehan bahasa kedua adalah

bagian dari linguistik teoretis karena sifatnya abstrak. Pada orang dewasa ketika melakukan kesalahan maka harus diberi latihan terus – menerus berbeda dengan pembelajar anak – anak yang belajar lewat lingkungan dimana mereka tinggal. Pembelajar BIPA di perguruan tinggi adalah orang – orang dewasa yang sudah sangat menguasai bahasa ibunya. Brundage dan MacKercher dalam Nunan (1988: 22 – 23 ) mengidentifikasi prinsip – prinsip belajar orang dewasa, antara lain: (1) orang dewasa menilai pengalamannya sebagai sumber untuk belajar lebih lanjut atau pengalamannya dinilai orang lain adalah pelajar yang lebih baik, (2) orang dewasa belajar paling baik kalau mereka terlibat dalam pengembangan tujuan belajar bagi mereka sendiri yang serupa dengan konsep diri saat ini dan yang diidamkan, (3) orang dewasa telah mengembangkan cara – cara yang teratur untuk memuaskan pengolahan informasi, (4) orang dewasa masuk ke dalam kegiatan belajar dengan serangkaian gambaran dan perasaan yang teratur tentang dirinya yang mempengaruhi proses belajar, dan (5) orang dewasa lebih berkepentingan dengan apakah mereka berubah ke arah konsep diri yang diidamkan mereka sendiri daripada apakah mereka menemukan standar dan tujuan dari orang lain.

Dari prinsip – prinsip di atas, maka pengelola BIPA harus faham betul apa yang dibutuhkan pembelajarnya di masing – masing kelas (tingkat). Pengelompokkan kelas dapat menggunakan CEFR (*Common European Frame of Reference*) diadaptasi dari *European Union Council Resolution*. Beberapa keunggulan CEFR adalah *Pertama*, CEFR dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat profisiensi pembelajar bahasa asing. *Kedua*, CEFR dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran bahasa asing menjadi lebih transparan dalam tataran internasional dan *Ketiga*, CEFR dapat digunakan untuk pembelajaran asing di masyarakat multilingual (Muliastuti, 2014).

Tujuan pembelajaran BIPA secara luas memperkuat eksistensi bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai alat komunikasi antarwarga dan antarbudaya, memperkenalkan tradisi dan menyebarkan budaya Indonesia termasuk di dalamnya kearifan lokal setiap daerah, dan memperkaya khasanah bahasa serta sastra Indonesia melalui pengembangan materi ajar membaca. Pembelajaran BIPA akan berjalan dengan lancar apabila persiapan materi ajar sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan konteks dimana penutur asing belajar. Mahasiswa asing akan terhindar dari gegar budaya dan *homesick* ketika mereka telah mampu membaaur dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan lancar. Peran pengajar dalam membuat materi ajar sangat diperlukan dan penting untuk merekayasa pembelajaran yang aktif, menarik, menantang dan menyenangkan.

## **Kearifan Lokal Banyumas**

Banyumas Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai ciri khas bahasa *blakasutha* – cara berbicara yang langsung tanpa tedeng eling-eling dan ngapak sehingga berbeda dengan daerah lain yang sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Kebudayaan Banyumas terbentuk melalui sikap para leluhur yang selalu berperilaku apa adanya tanpa harus menutup-nutupi, nilai-nilai luhur yang diturunkan dan seni yang terus-menerus dilestarikan. Pengertian kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu (Koentjaraningrat 1990:9).

Ratna (2011) mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan semen pengikat berbagai bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga disadari keberadaannya. Ia lahir dan hidup di dalam semesta yang bersangkutan, maka kearifan lokal diharapkan dapat dipelihara dan dikembangkan secara optimal. Kearifan lokal berfungsi memberikan sumbangan terhadap kebudayaan yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Karakter yang baik dapat dididik melalui pemahaman pada budaya dalam hal ini kearifan lokal sehingga sangat penting bagi peserta didik mempelajari dan memahami kekayaan apa yang ada di Banyumas–Jawa Tengah. Mahasiswa asing tinggal di Banyumas untuk menyelesaikan kuliahnya sekitar empat tahun dan ketika kembali kenegara asal maka mereka membawa oleh-oleh kenangan tentang hal-hal yang baik, indah dan adiluhung. Beberapa hal yang dapat digali pada nilai-nilai kearifan lokal Banyumas menurut Rochwidjatini (2012) sebagai berikut.

## **Bahasa Rakyat (Dialek Ngapak)**

Bahasa Jawa dialek Banyumasan merupakan salah satu dialek yang digunakan masyarakat Banyumas yang biasa disebut *ngapak*. Dialek *ngapak* digunakan sebagian besar masyarakat Banyumas yaitu orang yang dilahirkan, dibesarkan dan tinggal di wilayah Banyumas dan sebagai pendukung bahasa dialek Banyumas. Dialek ini agak berbeda dibandingkan dialek bahasa Jawa lainnya. Hal ini disebabkan bahasa Banyumas masih berhubungan erat dengan bahasa Jawa kuno. Dialek *ngapak* ditengarai sebagi logat bahasa Jawa yang paling tua.

Bahasa Jawa Banyumasan dengan dialek *ngapak* banyak digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat yang sepadan, sesama teman. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, bagi yang memahami sopan – santun menggunakan bahasa krama inggil tetapi bagi yang tidak , mereka tetap menggunakan bahasa Banyumasan yang dianggap egaliter. Fungsi bahasa rakyat menurut Danandjaya (2002) sedikitnya

ada empat yaitu a) memberi serta memperkokoh identitas *folknya* (*slang, cant, shop talk, argot, jargon*, nama gelar, bahasa bertingkat, *colloquial, onomatopoeic*, dan *onomastic*) ; b) melindungi *folk* pemilik folklor dari ancaman kolektif lain atau penguasa (*slank*, bahasa rahasia, dan *cant*); c) memperkokoh kedudukan folk pada jenjang pelapisan masyarakat (gelar dan bahasa bertingkat); dan d) memperkokoh kepercayaan rakyat dari folknya (sirkumlokusi dan julukan atau alias yang diberikan kepada anak – anak yang buruk kesehatannya). Keempat fungsi tsb membuat dialek ngapak Banyumas tetap ada dan tidak berubah. Dialek ngapak yang apa adanya atau *blakasutha*, tetap lestari, mencirikan masyarakat yang sederhana, lugu, diucapkan dengan nada relatif cepat dan keras.

### **Ungkapan Tradisional**

Masyarakat Banyumas masih memegang tradisi dengan kuat terbukti dengan banyaknya upacara yang dilaksanakan untuk menghormati gunung Slamet, jamasan keris atau tombak peninggalan leluhur, daerah – daerah yang dianggap keramat dan masih banyak lagi. Ada satu ungkapan yang biasa terdengar yaitu *ora ilok* yang berarti tidak baik bermakna larangan seperti anak gadis ora ilok duduk di pintu, nanti susah jodoh, *ora ilok* tangan menutupi kepala, nanti ibunya cepat meninggal dan masih banyak lagi. Semua ungkapan tradisional yang sekilas konyol tanpa arti sebenarnya mengandung makna dan nasihat bagi generasi muda.

### **Cerita Prosa Rakyat**

Kesusastraan rakyat banyak yang dituturkan dari mulut ke mulut dan diturunkan dari sesepuh kepada keturunannya. Cerita semacam ini diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lebih muda (Fang, 1991). Beberapa di antaranya adalah cerita-cerita, ungkapan, peribahasa, nyanyian, tarian, adat, undang- undang, teka-teki, permainan, kepercayaan dan perayaan.

Cerita prosa rakyat menurut Bascom dalam Danadjaya (2002) dibagi menjadi tiga yaitu mite , legenda dan dongeng. Cerita- cerita ini dapat ditulis kembali dan dijadikan materi bacaan bagi mahasiswa asing dengan bahasa yang mudah difahami. Materi ajar yang akan dikembangkan mengutamakan nilai- nilai moral yang dapat dicontoh dan diteladani sehingga mahasiswa pembelajar BIPA akan selalu mendapatkan kesan yang baik tentang Indonesia khususnya Banyumas, daerah dimana mereka menuntut ilmu.

## Modul Membaca BIPA Berbasis Kearifan Lokal Banyumas

Pembelajaran BIPA akan berjalan dengan baik apabila menggunakan pendekatan yang tepat dan pemilihan bahan ajar yang fungsional. Pemakaian materi otentik akan sangat membantu membangkitkan minat dan motivasi mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahan ajar fungsional berasal dari materi otentik akan memudahkan pembelajar memahami kebermaknaan materi karena mengalami langsung dalam kehidupan sehari – hari. Pengajar BIPA harus dapat memanfaatkan semua sumber belajar di lingkungan sekitar untuk mendukung pembelajaran.

Bahan ajar menurut Dick and Carey (1996:229) adalah seperangkat materi atau substansi pelajaran (*teaching material*) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1) motivasi belajar yang diinginkan, 2) kesesuaian materi yang diberikan, 3) mengikuti urutan yang benar, 4) berisi informasi yang dibutuhkan, 5) ada latihan praktek, 6) dapat memberi umpan balik, 7) tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, 8) tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap – tahap aktivitas yang dilakukan dan 10) dapat diingat dan ditransfer.

Materi ajar merupakan komponen pembelajaran bisa berupa *textbook*, paket dari sekolah, sesuatu yang dibuat sendiri oleh guru, yang dipakai sebagai dasar untuk memberi masukan (*input*) bagi siswa dalam kelas (Richard, 2003: 251). Untuk pengajar yang belum berpengalaman, materi ajar berfungsi sebagai latihan mengajar sebab guru harus memberikan ide bagaimana harus mengajarkannya, bagaimana format pembelajarannya, metode apa yang digunakan, bagaimana model evaluasinya dan lain sebagainya. Persiapan pembuatan modul membaca berbasis kearifan lokal Banyumas diwujudkan dengan mengidentifikasi kerangka komponen modul seperti yang dikemukakan oleh Graves (1996: 12) seperti di bawah ini.

No	Komponen	Penjelasan
1	<i>Needs assessment</i>	Mencari kebutuhan mahasiswa asing sehingga pengajar dapat mengembangkan modul dengan tepat.
2	<i>Determining goals and objectives</i>	Apa sebenarnya tujuan pembelajaran BIPA dan apa yang dibutuhkan mahasiswa asing atau bagaimana cara mahasiswa asing mencapai tujuan pembelajaran?



3	<i>Selecting and developing materials and activities</i>	Memilih dan mengembangkan materi membaca untuk dijadikan modul, bagaimana dan dengan cara apa pengajar mengajarkannya? Apa peran pengajar, apa peran mahasiswa?
4	<i>Organization of content and activities</i>	Bagaimana pengajar mengatur isi dan kegiatan dalam pembelajaran BIPA?
5	<i>Evaluation</i>	Bagaimana cara guru menilai apa yang sudah dipelajari mahasiswa asing? Bagaimana guru menilai keefektifan pembelajaran?
6	<i>Consideration of resources and constraints</i>	Pertimbangan dan sumber-sumber lain yang digunakan. Apa manfaat pembelajaran ?

Pengembangan keenam komponen di atas tidak lepas dari kepribadian individu (mahasiswa asing) yang selalu berkaitan erat dengan kebudayaan lingkungan tempat mereka hidup (Nasution, 2011: 10-11). Modul membaca berbasis kearifan lokal Banyumas lebih menekankan upaya peningkatan kemampuan membaca. Burnes et.al. (1985:45) mengungkapkan membaca adalah memahami sebuah tulisan. Membaca merupakan suatu proses interaktif dimana si pembaca terikat dan saling bertukar ide dengan si penulis melalui teks. Jadi, membaca adalah proses mendapatkan interaksi antara dosen, mahasiswa dan materi yang dibacanya (Burnes et.al. 1985: 117).

Pengembangan modul membaca berbasis kearifan lokal Banyumas memanfaatkan cerita – cerita rakyat yang telah mengakar kuat dan ditulis ulang sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran. Teks – teks yang digunakan dalam materi ajar ini tidak hanya cerita tetapi bisa menyangkut tentang kehidupan sehari – hari yang berisi kearifan lokal sehingga mendekatkan penutur asing pada budaya Banyumas.

Landasan pengembangan materi ajar berbasis kearifan lokal adalah etnopedagogi yaitu pendidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu ini memandang pengetahuan atau kearifan lokal (*local knowledge, local wisdom*) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk masyarakat sehingga layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan. Untuk itulah dipandang penting mengembangkan materi membaca berbasis kearifan lokal Banyumas untuk meningkatkan kemampuan membaca mahasiswa asing dan mendekatkan budaya Banyumas.

## Penutup

Pembelajaran BIPA sangat penting dikembangkan karena menjadi sarana komunikasi paling tepat dalam menghubungkan Indonesia dengan

negara lain. Banyak pengajar bahasa Indonesia diminta mengajar ke negara lain melalui program SAME BIPA, hal ini sangat strategis untuk menyebarkan politik bahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi antar negara. Materi membaca sangat membantu pengajar BIPA untuk memberikan pemahaman tentang budaya dan kearifan lokal sehingga penutur asing akan tertarik untuk datang ke Indonesia dan bagi penutur asing yang belajar di Indonesia akan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Ardika, I Gede. 2001. *Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) : Peluang dan Harapan*. Bali : KIPBIPA
- Borg, Borg and Gall. 2007. *Educational Research : An Introduction*. USA: Pearson Education
- Brennan.2005. *Technology and Testing Educational Measurement (4<sup>th</sup> Edition)*. Washington, DC: American Council on Education
- Bryam,M. 2008. *From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship: Essays and Reflections*. Clevedon: Multilingual Matters,Ltd.
- Cresswell, W.John. 2008. *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Canada: Pearson Education International
- Iskandar, Sunendar, et.al. 2009. *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Rosda
- Koentjaraningrat.1983. *Kebudayaan,Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia
- Lena, Heine.2010. *Problem Solving in a Foreign Language : A study in content and language integrated learning*. Germany: Hubert &Co.GmbH&Co.KG.Gottingen
- Muliastuti, Liliana. 2010. *Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing*. Kemendiknas : Semiloka Nasional Pengujian Bahasa Pusat Bahasa
- Nunan, David. 1991. *Language Teaching Methodology: A Textbook for Teacher*. UK : Prentice Hall
- Purpura, James. 2005. *Assessing Grammar* . UK: Cambridge University Press
- Rodgers, Theodore S and Richards, Jack C. 1986. *Approaches and Methods in Language Teaching : A description and analysis*. Australia: Syndicate of the University of Cambridge
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Antropologi Sastra- Peranan Unsur – Unsur Kebudayaan Dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Setiyadi, Bambang. 2006. *Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugono, Dendy. 2010. *Kebijakan Umum Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing*. Pusat Bahasa
- Y, Karmin. 2001. *Mengembangkan Kurikulum BIPA yang Ramah terhadap Pelajar*. Bali: KIPBIPA

# **PENGAJIAN BIDANG-BIDANG KESALAHAN PEBELAJAR BAHASA INDONESIA SEBAGAI B-2 MERUPAKAN SUATU UPAYA PEMERTEGUHAN POSISI STRATEGIS PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA**

**Eko Suroso**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: eko\_suroso45@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Seorang pebelajar bahasa Indonesia sebagai B-2 akan senantiasa melakukan kekeliruan (mistake) dan kesalahan (error). Kekeliruan (mistake) adalah suatu kesalahan yang disebabkan oleh kekhilafan semata. Kesalahan yang terjadi dalam hal ini kecil kemungkinannya akan terulang lagi sebab sebenarnya yang bersangkutan telah mengetahuinya, misalnya salah ucap. Kesalahan (Error) itu muncul dikarenakan kurangnya kemampuan (competence) dari pemakai bahasa. Oleh karenanya, kesalahan ini sering terjadi dan berulang-ulang. Kesalahan, sebagaimana telah disebutkan di atas akan senantiasa terjadi pada setiap pebelajar B2. Menurut teori netral, kesalahan (error) itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu (1) development error, (2) interferensi, dan (3) unique error. Development eror merupakan kesalahan yang terjadi seperti ketika seseorang dalam tahap perkembangan untuk*

memperoleh B1. Interferensi merupakan kesalahan yang terjadi ketika sistim B1 digunakan pada waktu berbicara dalam B2 sementara itu kedua sistim dari kedua bahasa tersebut jelas berbeda. *Unique error* merupakan kesalahan yang terjadi yang bukan disebabkan oleh adanya perkembangan maupun interferensi. Ada dua sumber utama penyebab kesalahan berbahasa yaitu **interlingual** dan **intralingual**. Kesalahan yang bersumber pada **interlingual** maksudnya adalah bahwa kesalahan itu disebabkan oleh adanya kontak antara dua bahasa. Kesalahan yang bersumber pada **intralingual** maksudnya adalah bahwa kesalahan pembelajar B2 itu disebabkan oleh kerumitan sistim B2 itu sendiri. Bidang-Bidang Kesalahan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai B2: 1) kesalahan bidang fonologi, 2) kesalahan bidang Leksikal, 3) kesalahan Bidang Morfologi, dan 4) kesalahan Bidang Sintaksis. Pendiskripsian bentuk-bentuk kesalahan yang kemungkinan dialami oleh pembelajar bahasa Indonesia sebagai B-2 penting untuk dilakukan sebab hal itu merupakan bukti bahwa bahasa Indonesia memiliki kaidah yang jelas.

## **Pendahuluan**

Dalam suatu usaha untuk mendapatkan bahasa ke-2, seorang pembelajar bahasa akan senantiasa melakukan kekeliruan (*mistake*) dan kesalahan (*error*). Kekeliruan (*mistake*) adalah suatu kesalahan yang disebabkan oleh kekhilafan semata. Oleh karenanya, kesalahan yang terjadi dalam hal ini kecil kemungkinannya akan terulang lagi sebab sebenarnya yang bersangkutan telah mengetahuinya, misalnya salah ucap. Kesalahan (*error*) itu muncul dikarenakan kurangnya kemampuan (*competence*) dari pemakai bahasa. Oleh karenanya, kesalahan ini sering terjadi dan berulang-ulang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mistake* merupakan kesalahan yang terjadi karena kekhilafan sehingga bersifat sementara, sedangkan *error* merupakan kesalahan yang terjadi karena kurangnya *competence* sehingga bersifat konsisten.

Ada tiga teori yang membicarakan masalah pembelajaran B2 ini. Teori pertama yakni teori behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran bahasa akan berpengaruh jika pembelajar bahasa memberikan respon secara aktif dan terus menerus terhadap rangsangan. Efek dari rangsangan itu adalah diperlukannya penguatan bagi pembelajar bahasa yang bersangkutan misalnya dengan pujian atau pemberian hadiah. Dalam mempelajari B2, teori behaviorisme menekankan bahwa kesulitan didefinisikan sebagai usaha-usaha yang diperlukan untuk mempelajari B2. Dalam hal itu dikatakan pula bahwa kontak yang terjadi antara B1 (sebagai bahasa yang telah dimiliki pembelajar bahasa) dengan B2 (bahasa yang sedang dipelajari pembelajar bahasa) akan mengakibatkan

adanya transfer. Transfer yang menyebabkan pebelajar semakin mudah atau yang memudahkan pebelajar dalam mempelajari B2 disebut transfer positif, sedangkan transfer yang menyebabkan pebelajar bahasa semakin mengalami kesulitan dalam mempelajari B2 disebut transfer negatif. Transfer positif terjadi bila sistim B1 sama dengan sistim B2, sedangkan transfer negatif terjadi bila sistim B1 berbeda dengan sistim B2. Perbedaan sistim inilah yang oleh teori behaviorisme disebut sebagai penyebab terjadinya error. Oleh behaviorisme, error ini dianggap mengganggu kesuksesan pebelajar bahasa karena kebiasaan buruk itu menghalangi pembentukan bahasa kedua (B2) yang benar.

Teori yang kedua adalah teori mentalisme. Teori ini membantah pandangan behavioris tersebut. Oleh Chomsky, teori tentang stimulus-respons dianggap sebagai sesuatu yang bohong. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang mempunyai B1 jarang sekali mendapat koreksi kesalahan dari orang tuanya. Seorang anak dapat memperoleh bahasa itu bukan karena adanya stimulus-respons melainkan karena si anak sudah memiliki piranti bahasa yang dibawanya sejak lahir yang oleh Chomsky disebut sebagai *Language Acquisition Device* (LAD).

Pertentangan kedua teori tersebut memunculkan teori yang ketiga yakni teori netral. Teori ini mengatakan bahwa transfer dan interferensi sangat erat kaitannya dengan teori-teori behaviorisme. Kesalahan yang terjadi dalam pemerolehan B2 tidak sepenuhnya disebabkan oleh bahasa pertama pebelajar B2. Oleh karena itu, teori netral ini kemudian memperkenalkan teori-teori yang memasukkan gejala utama tersebut seperti: transfer, interferensi, avoidance, dan aspek-aspek lainnya.

Menurut teori netral, kontak antara B1 dan B2 itu disebut dengan transfer. Transfer itu memiliki beberapa bentuk (perwujudan):

1. *Error* (kesalahan pebelajar B2 yang diakibatkan oleh adanya transfer negatif).
  - a. *Development error* (*error* yang sama dengan ketika pebelajar B2 memperoleh B1).
  - b. *Interferensi* (*error* yang berkaitan dengan perbedaan sistim B1 dan B2)
  - c. *Unique error* (*error* yang tidak mirip dengan *development* dan *interferensi*).
2. *Facilitation* (penunjang kemudahan pebelajar B2 yang diakibatkan oleh *transfer* positif).
3. *Avoidence* (penghindaran bentuk tertentu oleh pebelajar B2 karena bentuk tersebut dirasa menyulitkan dirinya).
4. *Over generalitation* (penggeneralisasian yang berlebihan dari suatu kaidah).

Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap pembelajar bahasa kedua (B2) itu akan senantiasa mengalami kesalahan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah 1) bidang-bidang kesalahan bahasa apa sajakah yang dialami oleh pembelajar bahasa Indonesia sebagai B2? dan 2) apakah pengkajian bidang-bidang kesalahan bahasa Indonesia sebagai B2 merupakan suatu upaya pemerteguhan posisi strategis pengembangan bahasa Indonesia?

### **Sumber Kesalahan Berbahasa**

Kesalahan, sebagaimana telah disebutkan di atas akan senantiasa terjadi pada setiap pembelajar B2. Menurut teori netral, kesalahan (*error*) itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu (1) *development error*, (2) *interferensi*, dan (3) *unique error*. *Development error* merupakan kesalahan yang terjadi seperti ketika seseorang dalam tahap perkembangan untuk memperoleh B1. *Interferensi* merupakan kesalahan yang terjadi ketika sistem B1 digunakan pada waktu berbicara dalam B2 sementara itu kedua sistem dari kedua bahasa tersebut jelas berbeda. *Unique error* merupakan kesalahan yang terjadi yang bukan disebabkan oleh adanya perkembangan maupun *interferensi*.

Ada dua sumber utama penyebab kesalahan berbahasa yaitu *interlingual* dan *intralingual*. Kesalahan yang bersumber pada *interlingual* adalah kesalahan yang disebabkan oleh adanya kontak antara dua bahasa. Kontak antara dua bahasa akan mengakibatkan adanya *transfer*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, *transfer* yang mengakibatkan pembelajar bahasa semakin mudah dalam mempelajari B2 (karena kebetulan kedua sistem bahasa tersebut memiliki sistem yang sama) disebut *transfer* positif, sedangkan apabila menyebabkan pembelajar B2 mengalami kesulitan disebut *transfer* negatif (sebab sistem kedua bahasa yang mengalami kontak tersebut memang tidak sama).

Sumber kesalahan yang kedua adalah *intralingual*. Kesalahan yang bersumber pada *intralingual* adalah kesalahan pembelajar B2 yang disebabkan oleh kerumitan sistem B2 itu sendiri. Karena ketidaktahuannya, seorang pembelajar B2 sangat dimungkinkan untuk mengucapkan kalimat *Pekerjaan itu adalah merupakan pekerjaan yang sia-sia*. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, kalimat tersebut termasuk kalimat yang salah sebab kata *adalah* dan *merupakan* pada kalimat tersebut adalah sama. Oleh karena itu, kedua kata itu cukup digunakan salah satunya saja. Namun demikian, bagi pembelajar bahasa Indonesia sebagai B2, hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk yang betul (padahal salah). Kesalahan itu terjadi karena kerumitan yang terjadi pada sistem B2 itu sendiri, bukan karena pengaruh sistem B1.

## Bidang-Bidang Kesalahan Pebelajar Bahasa Indonesia sebagai B2

### Kesalahan Bidang Fonologi

Kesalahan bidang fonologi merupakan kesalahan yang terjadi karena pebelajar B2 salah dalam hal pengucapan. Kesalahan pengucapan tersebut dimungkinkan karena si pebelajar *terinterferensi* logat B1-nya (bahasa daerah). Berikut ini adalah beberapa contoh kemungkinan kesalahan fonologi:

#### Laval Daerah

/males/ (Jawa)  
/diberiken/ (Jawa)  
/dapet/ (Jawa)  
/anem/ (Jawa)  
/memilik-i/ (Jawa)  
/mesra/ (Batak)  
/tenang/ (Batak)  
/pilEk/ (Batak)  
/tenthu/ (Bali)  
/Theman/ (Bali)

#### Laval Indonesia

/malas/  
/diberikan/  
/dapat/  
/enam/  
/memili-ki/  
/mesra/  
/tenang/  
/pasti/  
/tentu/  
/teman/

Contoh 01 sampai dengan 05 merupakan contoh kesalahan pengucapan yang disebabkan oleh *interferensi* bahasa Jawa. Bunyi /a/ diucapkan /e/ pepet sebagaimana pada kata /kelas/. Bunyi yang seharusnya diucapkan /ki/ tetapi karena terinterferensi bahasa Jawa, maka menjadi diucapkan /i/. Contoh 06 sampai dengan 08 merupakan contoh kesalahan pengucapan yang disebabkan oleh *interferensi* bahasa Batak. Bunyi /e/ pepet sebagaimana pada kata /kelas/ ada yang diucapkan dengan bunyi /e/ keras sebagaimana pada kata /sate/ dan /E/ sebagaimana pada kata /Eksport/. Contoh 09 sampai dengan 11 merupakan contoh kesalahan pengucapan yang disebabkan oleh *interferensi* bahasa Bali. Bunyi /t/ *apiko-alveolar* diucapkan /th/ *apiko-palatal*.

### Kesalahan Bidang Leksikal

Kesalahan bidang leksikal merupakan kesalahan yang terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa satu ke dalam kalimat bahasa lain. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan (1) pengaruh bahasa yang telah dikuasainya, (2) untuk tujuan bergaya, (3) untuk tujuan penghormatan (kesopanan). Bagi orang dewasa yang pernah hidup pada masa penjajahan Belanda dan dahulunya biasa menggunakan bahasa belanda, kosakata



belandanya biasanya masih muncul juga ketika mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bahasa yang (pernah) dikuasainya mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang sedang digunakannya.

+ “Bagaimana anak *jij* yang sulung itu? Apakah masih pemalu seperti dulu?”

- “Bagaimana ya, anak *ike* yang satu ini memang mempunyai sikap *minder*.”

(*jij* = Anda, Kamu, engkau. *Ike* = saya, aku. *Minder* = rendah diri)

Orang Jawa yang sudah kental dengan kejawaanya, dalam berbahasa Indonesiapun seringkali memasukkan leksikal bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia (yang sedang digunakan) dikarenakan leksikal bahasa Jawa tersebut merupakan idiom yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia.

+ “Orang hidup itu *sak drema nglakoni*, tidak perlu berbuat yang *neka-neka*.”

+ “Penjelasan orang itu *tumpang tindih*, sehingga sulit saya pahami.

Bagi remaja, biasanya dalam berbahasapun sering menggunakan leksikal bahasa lain (asing) dengan tujuan sekedar bergaya. Leksikal bahasa lain itu biasanya dimasukkan begitu saja ke dalam struktur kalimat bahasa yang sedang digunakannya.

+ “Bagi saya *oke-oke* saja, yang penting apa kata *boss*.”

- “*Good* kalau begitu, saya sependapat dengan *You*”

Di lingkungan masyarakat Jawa, kesopanan biasanya masih diutamakan. Hal demikian ini terbawa sampai ketika mereka harus berbahasa. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sebagai B2, biasanya leksikal bahasa Jawa dimasukkan juga untuk tujuan *kesopanan* atau *penghormatan*.

+ “*Nyuwun sewu* pak, Bapak diminta panita untuk memberikan sepatah-dua patah kata.

+ “Apabila tidak ada acara lain, Bapak saya minta untuk *rawuh* pada acara reuni nanti.

## Kesalahan Bidang Morfologi

Kesalahan pada bidang morfologi biasanya terjadi karena morfem-morfem tertentu pada B2 ada yang ditanggalkannya atau diganti dengan

morfem B1. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi karena **kuatnya pengaruh B1 (bahasa yang telah dikuasainya)** atau karena **over generalisasi**. Contoh-contoh kesalahan dalam bidang morfologi, antara lain:

1. Mereka sudah lama tidak *ketemu* (pengaruh B1, *ketemu*→ Jawa, *bertemu*→ Indonesia)
2. Hati-hati jangan sampai *kesepak* kuda. (pengaruh B1, *kesepak*→ Jawa, *tersepak*→ Indonesia).
3. Jam 2 siang nanti kita *kumpul* di ruang sidang (pengaruh B1, *kumpul*→ Jawa, *berkumpul* → Indonesia).
4. Ia ziarah ke *kuburan* moyangnya (pengaruh B1, *kuburan*→ Jawa, *kubur*→ Indonesia).
5. Ia sekarang *melola* usaha percetakan pamannya. (over generalisasi, dianggap dari kata dasar *lola* kemudian mendapat awalan *me-N* sebagaimana pada kata *melamar* dari kata *lamar* mendapat awalan *me-N*, padahal tidak demikian. Yang benar adalah *mengelola* dari kata dasar *kelola* mendapat imbuhan *me-N*).
6. Ia baru saja *menraktir* temannya. (overgeneralisasi, dianggap dari kata da-sar *traktir* kemudian mendapat awalan *me-N* sebagaimana pada kata *menu-lis* dari kata *tulis* mendapat awalan *me-N*, padahal tidak demikian. Yang benar adalah *mentraktir*. Kata dasar *traktir* mendapat imbuhan *me-N* tidak mengalami peluluhan sebab suku pertamanya terbentuk dari cluster *tr*).

## Kesalahan Bidang Sintaksis

Kesalahan pada bidang sintaksis ini juga dimungkinkan karena pengaruh B1 (*interlingual*) atau mungkin juga karena faktor dalam B2 itu sendiri (*intralingual*). Beberapa contoh kesalahan dalam bidang sintaksis adalah sebagai berikut.

1. **Bukunya** Anton terbawa oleh Tini.  
Bentuk *nya* pada kata *buku* merupakan bentukan yang kurang tepat sebab bentuk itu terpengaruh struktur kalimat bahasa Jawa (*Interlingual*) *Bukune Anton kegowo ning Tini*. Dalam struktur bahasa Indonesia, bentuk kepemilikan itu ditunjukkan dengan langsung disertakannya *pemilik* dibelakang kata yang menunjukkan yang dimiliki. Bentuk yang benar dari kalimat di atas adalah *Buku Anton terbawa oleh Tini*.
2. *Di dalam* masyarakat Madura mengenal juga dua golongan itu.  
Kalimat ini salah karena kerumitan dalam sistim bahasa itu sendiri (*Intralingual*). Kesalahan kalimat tersebut berkaitan dengan pengisi fungsi subjek. Berdasarkan analisis fungsional,

S yang dimaksudkan oleh penulis dalam kalimat tersebut adalah *masyarakat Madura*. Namun demikian, karena di depan *masyarakat Madura* diletakkan kata depan *di dalam* maka fungsi subjek pada kalimat tersebut menjadi kacau. Kalimat (2) tersebut dapat dikembalikan pada dua kalimat yang benar:

- 1) Di dalam masyarakat Madura dikenal juga dua golongan itu.
- 2) Masyarakat Madura mengenal juga dua golongan itu.

3. Rumah *di mana* ia tinggal sangat luas.

Kalimat ini kemungkinan besar dipengaruhi struktur bahasa asing khususnya bahasa Inggris (*Interlingual*). Bentuk *di mana* pada kalimat tersebut disejajarkan dengan penggunaan *where* pada kalimat bahasa Inggris *The house **where** he lives is very large*. Karena dalam bahasa Indonesia ada kata yang lebih tepat untuk digunakannya yaitu kata *tempat*, maka kalimat (3) itu dapat dibetulkan sehingga menjadi *Rumah **tempat** ia tinggal sangat luas*.

4. Ibu *daripada* anak itu sering sakit.”

Kesalahan kalimat ini termasuk kesalahan (*Intralingual*) sebab merupakan kesalahan yang ditimbulkan oleh kerumitan sistem bahasa itu sendiri. Kata *daripada* digunakan untuk membandingkan dua hal yang bertentangan misalnya *Ali lebih pandai daripada adiknya*. Pembetulan kalimat (4) itu adalah dengan menghilangkan kata *daripada* sehingga menjadi *Ibu anak itu sering sakit*.

5. Sektor pariwisata *yang mana* merupakan tulang punggung perekonomian negara harus senantiasa ditingkatkan.

Kesalahan kalimat ini disebabkan oleh penggunaan kata *yang mana*. Penggunaan kata *yang mana* dalam kalimat itu tampaknya disejajarkan dengan penggunaan *which* dalam bahasa Inggris pada kalimat *The tourism sector which is the economical backbone of the country must always be intensified*. (*Interlingual*). Namun demikian, karena dalam bahasa Indonesia sudah ada kata hubung yang lebih tepat yaitu kata *yang*, maka kalimat (5) di atas sebaiknya diperbaiki sehingga menjadi *Sektor pariwisata **yang** merupakan tulang punggung perekonomian negara harus senantiasa ditingkatkan*.

## Pemerteguhan Posisi Strategis Pengembangan Bahasa Indonesia

Sebagai bahasa yang berkembang, bahasa Indonesia selalu berbenah agar kelak dapat menjadi bahasa internasional. Bahasa internasional

merupakan suatu bahasa yang dipergunakan untuk komunikasi antar negara di seluruh dunia. Agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa Internasional ada beberapa persyaratan yang perlu dimiliki. Persyaratan pertama adalah bahasa itu dapat diterima oleh masyarakat dunia secara menyeluruh. Persyaratan yang kedua adalah bahasa itu memiliki kaidah (tata bahasa) yang jelas, daftar kosa kata sulit (kamus), dan tata ejaan (EYD).

Untuk memenuhi persyaratan pertama yaitu menjadi bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat dunia, bahasa Indonesia memerlukan proses yang panjang. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan yang perlu dimiliki oleh bahasa Indonesia. Persyaratan pertama adalah banyak penemuan baru dalam bidang *science* dan dalam bidang teknologi yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang kesemuanya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Persyaratan kedua adalah banyak kemajuan dalam bidang *science* dan teknologi yang dilaksanakan oleh negara Indonesia. Jika banyak penemuan baru dalam bidang *science* dan teknologi yang ditulis dalam bahasa Indonesia serta banyak kemajuan dalam bidang *science* dan teknologi yang dilaksanakan oleh negara Indonesia, dengan sendirinya banyak masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia dengan harapan dapat meyerap dan menerapkan *science* dan teknologi penemuan baru itu. Jika mereka belum bisa berbahasa Indonesia, mereka akan berusaha belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu atau minimal menerjemahkan tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia itu ke berbagai bahasa yang telah mereka miliki.

Persyaratan kedua yakni adanya tata bahasa, tata ejaan, dan kamus telah dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Dalam hal tata bahasa, bahasa Indonesia telah memiliki Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dalam hal tata ejaan, bahasa Indonesia telah memiliki Ejaan yang Disempurnakan. Dalam hal kamus, bahasa Indonesia telah memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendiskripsian bentuk-bentuk kesalahan yang kemungkinan dialami oleh pembelajar bahasa Indonesia sebagai B-2 merupakan suatu upaya strategis dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. Hal ini sangat berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kedua di atas. Pendiskripsian bentuk-bentuk kesalahan itu merupakan bukti bahwa bahasa Indonesia telah memiliki aturan atau kaidah yang jelas. Jika bahasa Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas, bahasa Indonesia tidak akan mampu mendiskripsikan bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, Pendiskripsian bentuk-bentuk kesalahan yang kemungkinan dialami oleh pembelajar bahasa Indonesia sebagai B-2 penting untuk dilakukan.

## Kesimpulan

1. Kontak antara B1 dan B2 akan menimbulkan terjadinya *transfer*.
2. Transfer itu memiliki beberapa bentuk (perwujudan):
  - 1) *Error* (karena adanya transfer negatif).
    - Development error
    - Interferensi
    - Unique error
  - 2) *Facilitation* (karena adanya transfer positif).
  - 3) *Avoidence* (penghindaran bentuk yang dirasa menyulitkan).
  - 4) *Over generalitation* (penggeneralisasian kaidah yang berlebihan).
3. Sumber kesalahan berbahasa itu ada dua: (1) Interlingual, dan (2) Intralingual.
4. Bidang-Bidang Kesalahan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai B2:
  - 1) Kesalahan bidang fonologi.
  - 2) Kesalahan bidang Leksikal.
  - 3) Kesalahan Bidang Morfologi.
  - 4) Kesalahan Bidang Sintaksis.
5. Pendiskripsian bentuk-bentuk kesalahan yang kemungkinan dialami oleh pembelajar bahasa Indonesia sebagai B-2 penting untuk dilakukan sebab hal itu merupakan bukti bahwa bahasa Indonesia memiliki kaidah yang jelas.

## Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan dkk, 2008. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badudu, J.S. 2012. *Pelik-pelik Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- Chaer, Abdul. 1998. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2015. *Sintaksis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Data, Mochtar. 2003. "Tindak Tutur Konstatif dalam Wacana Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*. Tahun 10 No 1.: 8-16
- Ellis, Rod. 1994. *The Study of Second Language Acquisition*. New York: Oxford University Press.
- Hastuti, S. 1989. *Sekitar Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya.
- Hayi, Abdul. 2009. *Tata Bahasa Diskriptif*. Yogyakarta: Wacana Wiyata.
- Kridalaksana, H. 2012. *Fungsi Bahasa dan Sikap bahasa*. Ende-Flores:

Nusa Indah.

- Keraf, Gorys. 2004. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Ende-Flores: Nusa Indah
- Lengkong, J. S. J. 2003. Dimensi-Dimensi Proses Pendidikan Guru. *Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*. Tahun 9 No 1.: 21-29.
- Rahardi, R. Kunjana 2013. *Dinamika Kebahasaan*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Ramlan. 2013. *Pengantar Sintaksis Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Ramlan dkk. 2010. *Bahasa Indonesia Yang Benar dan Yang Salah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rawis, J. A. M. 2003. Partisipasi Guru dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*. Tahun 9 No 1.: 11-20.
- Robins, R. H. (General Editor), 1976. *General Linguistik*. London: Longman Group Limited
- Sampson, Geoffrey. 1980. *Schools of Linguistics*. London: Hutchinson & Co.
- Samsuri. 2009. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Sasangka, Sry Satriya Tjatur Wisnu. 2013. *Jendela Bahasa Indonesia*. Jakarta: Elmatara.
- Smith, N. & Wilson D., 1985. *Modern Linguistik (The Results of Chomsky's Revolution)*. Bloomington: Indiana University Press.
- Soeparno. 2010. *Dasar-Dasar Linguistik*. Yogyakarta: DW.
- Sumarlam (Ed). 2003. *Analisis Wacana (Teori dan Praktek)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Sujarwanto. 1987. *Himpunan Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Wacana Wiyata.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Sintaksis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Thomas, Linda & Shan Wareing. 2006. *Language, Society and Power. An Introduction*. New York: Routledge.
- Verhar, J. W. M. 2014. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Widodo, A.I. 2003. Studi Manajemen Mutu Sekolah Menengah Kejuruan dengan Standart ISO 9000: Studi Kasus di SMK Katolik ST. Mikael Surakarta. *Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*. Tahun 9 No 1: 1-10.
- Winoto, Subadi. 2003. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SLTP Negeri 1 Pandaan Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*. Tahun 9 No 1: 30-37.

# STEREOTIP GENDER BAHASA: REKONSEPTUALISASI DAN REDEFINISI PEREMPUAN BANGSA ARAB

**Muhammad Ridwan, S.S., M.A.**

Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Sebelas Maret

## **ABSTRAK**

*Bahasa seksis muncul dikarenakan ketidaktepatan pemilihan kosakata/penggunaan kata yang maknanya tidak benar-benar inklusif. Penyebaran kosakata ini akan menuai kuasa di antara kosakata yang lain. Gender sebagai simbol sosial memerlukan pemahaman ulang dan peninjauan kembali. Kajian ini menelisik gender baik secara relasi formal (tataran tata bahasa) dan relasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa seksis membawa dampak yang serius dalam ranah diplomasi komunikasi. Oleh karena itu, pentingnya memikirkan bahasa yang inklusif gender.*

**Kata kunci:** *Gender, Bahasa Arab, Budaya Arab, Islam.*

## Pendahuluan

Kebudayaan Arab memiliki keyakinan yang mendalam dan mengakar tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berperilaku dan seharusnya berperilaku. Sebagian besar hal ini didasarkan pada bagaimana cara berbicara, yang kemudian berkembang menjadi bidang *'folklinguistics'*. Di kalangan bangsa barat, keyakinan ini diilustrasikan oleh Jack dan Strauss tahun 1911 dengan judul *"The Woman's Book: Contains Everything a Woman Ought to Know"*. Buku itu menunjukkan tentang orang-orang berfikir (berekspetasi) tentang perilaku perempuan. Ketika melihat buku tersebut jelas bahwa tujuan buku tersebut adalah untuk memengaruhi perilaku perempuan, sebagai "perilaku laki-laki yang tradisional yang dipandang sebagai norma dan tidak membutuhkan adanya saran tertentu atau perhatian".

Keyakinan melihat bahwa perempuan dalam beberapa cara itu abnormal dan inferior dalam perilaku mereka, terlebih lagi pada gaya bicara pada tulisan mereka memiliki bobot yang lebih ringan untuk dianalisis dari laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam bertutur seperti yang dikemukakan oleh Jespersen (1922) bahwa perempuan lebih halus dalam berbicara, menggunakan ekspresi yang tidak kasar dan kotor. Pandangan ini jelas menggambarkan bahwa perempuan dipandang memiliki kekurangan (bahasa) dibandingkan laki-laki.

Pandangan-pandangan mengenai perempuan yang semula 'abnormal' atau 'rendah' dalam gaya berbicara mereka menjadi berubah, para peneliti mulai meneliti bahasa secara rinci dan kesenjangan di dalamnya. Lakoff pada tulisannya (1975), melalui pengamatan bahasa, membahas perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan melihat mereka sebagai perbedaan, bukan kelainan. Pengamatan ini menjadikan serangkaian makalah yang dibuat untuk memeriksa klaim tersebut. Hal ini juga menjadi bagian diskusi mengenai dominasi laki-laki atas perempuan sebagai batas keyakinan *folklinguistics* yang membingungkan bahwa laki-laki diketahui untuk berbicara lebih daripada wanita dan mendominasi percakapan dalam serangkaian cara, seperti: "Interupsi dan hanya untuk berbicara lebih daripada wanita. Suatu percakapan campuran (laki-laki dan perempuan) ditemukan bahwa topik laki-laki yang lebih sering diikuti, sementara wanita memainkan peran 'pendukung'.

Bahasa adalah alat manusia yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi dan menunjukkan fungsi sosial bahasa. Selain itu, bahasa dapat menjadi identitas penutur baik secara individual maupun secara kelompok.

Bahasa merupakan produk budaya atau produk sosial. Sebagai



bagian dari produk sosial, bahasa menjadi wadah aspirasi sosial, kegiatan, dan perilaku masyarakat. Sebagai produk budaya, bahasa menjadi wadah penyingkapan budaya yang diciptakan oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Bahasa bisa dianggap sebagai cerminan zamannya dan hasil budayanya. Maksudnya, pada masa tertentu bahasa mewadahi hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa mengandung nilai-nilai masyarakat penuturnya.

Makalah ini menggunakan variabel “gender” dalam mendekonstruksikan penggunaan bahasa Arab untuk menunjukkan penggunaan gender sebagai alat analisis dalam mendekonstruksi hubungan kekuasaan laki-laki/perempuan sebagai pengguna bahasa Arab.

## **Pembahasan**

Interaksi bahasa Arab dan gender dapat dibuktikan pada dua tingkat, yaitu formal (tingkat gramatikal) dan sosiolinguistik (tingkat sosial/relasional). Pada tingkat formal, bahasa Arab menunjukkan gramatikal dan semantik dalam penggunaan gender yang dapat memenuhi syarat sebagai «androsentrik» (bias laki-laki) dan di tingkat sosiolinguistik, bahasa Arab lebih digunakan oleh kelompok laki-laki dibandingkan kelompok perempuan.

### **Bentuk Formal Bias Gender dalam bahasa Arab**

Ilmu gramatika bahasa Arab mengandung nilai ekstensif gender sebagai kategori gramatikal. Gender dalam gramatika bahasa Arab sering disajikan dalam bentuk androsentrik. Bahasa Arab menunjukkan dua tipe penanda jender yakni maskula dan femina. Tanda tersebut muncul pada kata kerja, kata benda, kata sifat, determinan, dan bilangan, dan dapat digunakan sebagai tanda kesepakatan gramatikal antara berbagai kategori. Dengan demikian, kata sifat umumnya ada pada kata benda yang berwujud dalam bentuk persona, nomor, dan gender seperti:

- (1) /muṣallimat-un ?aniiqat-un/  
Seorang guru (perempuan) yang anggun.
- (2) /?imra?at-un ṣaaḥiq-un/atun/  
Seorang kekasih (perempuan)
- (3) /baqarat-un ḥaluub-un/atun/  
Seekor sapi perah

Bentuk maskula ṣaaḥiq-un (قشاع) dan ḥaluub-un (ببولح) dalam (2) dan (3) adalah “lebih baik” daripada bentuk femina ṣaaḥiqatun dan ḥaluubatun karena bentuk ini menunjukkan “intensitas” dan “kelimpahan/*abundance*” yang biasanya ada pada bentuk maskula yang

lebih terkait dengan laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan tanda femininya.

Contoh lain dari *tatabahasa yang androsentrik* dibuktikan dalam lebih didahulukannya maskulin dari pada feminin dalam ekspresi dan kalimat, seperti *rajulun wa mra?ah*, *Tiflun wa Tiflah*, dll. Bukti bahwa maskulin mendahului feminin : “*qaa?im*” (berdiri-3MS) dan *qaa?imah* (berdiri-3FS), “*qaa?id* (duduk-3MS) dan “*qaa?idah* (duduk-3FS), *jaalis* (duduk-3MS) dan *jaalisah* (duduk-3FS).

Bias gender juga bisa ditemukan dalam kajian derivasi. Derivasi bahasa Arab menunjukkan adanya bias gender. Contohnya, kata *?imra?ah* ‘perempuan’ dalam bahasa Arab merupakan bentuk derivasi dari *mar?* ‘orang’, tetapi *mar?* secara umum digunakan untuk umum karena merupakan bentuk maskulin. Juga, kata seperti *al-IlmuwaaTin* ‘warga negara-SM’, *al-‘aamil* ‘pekerja-SM’, atau *al-?ustaad* ‘guru-SM’ digunakan secara umum meskipun ada setidaknya sejumlah perempuan sebagai warga negara, pekerja, dan guru, dan terlepas dari fakta bahwa bahasa Arab mengandung morfem gender bahkan dalam bentuk ganda.

Bahkan ini menunjukkan bahwa kekuatan simbolik sosial laki-laki dimasukkan ke bentuk maskulin dalam tata bahasa. dalam proses hierarki gramatikal. Lebih lanjut, untuk mendukung pandangan ini adalah penggunaan tata bahasa dari istilah *al-?Insaan* “orang”. Meskipun istilah ini dapat digunakan baik maskula maupun penanda gender femina dalam bentuk tunggal, hanya maskula muncul ketika istilah ini dalam bentuk jamak, misalnya *?insaana-tun* “*feminine singular/ FS*” tapi *?unaas-un* “*Maskuline Plural/ MP*” dan tidak \* *unaasaa-tun* “*femina plural/ FP*”. Selanjutnya, meskipun istilah *?Insaan-un* “Man/orang” yang digunakan secara umum, itu tidak dapat digunakan dengan penanda femina: \* *Qara?a-t l-?insaana* “ (tidak berterima secara gramatikal).

Demikian juga, meskipun *?insaana-un* memiliki bentuk femina *?insaana-tun*, sedangkan kata *fardun* tidak memiliki bentuk femina tersebut: \**Farda-tun* “*singular feminine/ SF*”. Memang, bentuk gramatikal individu (*singular*) lebih didominasi oleh laki-laki dalam budaya Arab; bentuk *ṣabdu rabbih*, adalah sebuah cara sederhana yang mengacu pada diri (seseorang), memiliki bentuk femina, *ṣabdatu rabbiha* yang tidak pernah digunakan. Alasannya adalah bahwa bentuk *ṣabdu rabbih* mulai digunakan di domain resmi publik semua laki-laki.

Pada tingkat sintaksis, kesepakatan penuh antara subjek dan verba ditemukan dalam keduanya baik VSO (Verb-Subyek-Obyek) dan SVO (Subjek-Verb-Object) kalimat dan bahkan di bentuk ganda dari nomina dan verba dalam bahasa Arab. Namun, ketika subjek dalam bentuk plural (jamak) bahasa Arab menunjukkan keistimewaan yang menarik:

(4) *jaa?-a Al-awlaad-u wa l-banaa t-u.*

(5) *jaa?-t al-Banaat-u wa l-?Awla ad-u.*

Gramatikal gender dalam bahasa Arab bisa jauh lebih kompleks (Wright 1981; Benmamoun 1996). Bahkan, penampilan fitur gender dalam bahasa ini tidak selalu bergantung pada oposisi bipolar pria/wanita seperti dalam contoh berikut:

(6) *qaala-t i l? Anbiyaa?U.*

Penanda gender fungsional tidak didasarkan pada pengertian “laki-laki vs perempuan”??? Dalam contoh (6) di atas, nomina maskula *l? Anbiyaa u* “para nabi” adalah fungsional femina karena sesuai dengan verba bentuk femina, tetapi secara gramatikal tidak dalam bentuk femina karena persesuaian/agreement tidak didasarkan pada laki-laki/perempuan melainkan berdasarkan fakta bahwa semua nabi adalah laki-laki. Hipotesa Ahli tata bahasa Arab berkata bahwa dalam kasus contoh (6) di atas, gender morfem *-t* mengacu *majmuuṣah* “kelompok”, yaitu untuk *majmuuṣah mina l? anbiya?* “Sekelompok Nabi”, di mana kesepakatan terjadi dengan *majmuṣah* yang femina (*ah* adalah morfem femina). Namun, di sini lagi, *majmuuṣah mina l? Anbiyaa?* tidak pernah bisa merujuk pada sekelompok perempuan, atau bahkan ke *campuran-sex-group* dari Nabi karena, sekali lagi, semua Nabi adalah laki-laki. Akibatnya, gender dalam bahasa Arab terkadang murni fungsional.

## **Bentuk Formal Bias Gender dalam bahasa Arab**

Secara keseluruhan, bias gender dalam bahasa Arab adalah terutama disebabkan oleh interpretasi bahwa gramatika bahasa Arab memberikan fenomena tata bahasa. Dua pertanyaan yang muncul pada saat ini adalah: Pertama, dengan cara apa spesifik *androcentricity* tata bahasa dalam bahasa Arab yang terkait dengan keseluruhan latar belakang sosial-politik bahasa ini digunakan saat ini? Kedua, apa hubungan umum dari bahasa Arab untuk muslimah Arab saat ini? Kemungkinan jawaban pertanyaan ini dan yang sejenis menunjukkan ke *androcentricity* sosiolinguistik dalam bahasa Arab.

Sosiolinguistik *Androcentricity* dalam bahasa Arab hanya dapat dipahami dalam kerangka sosial budaya secara keseluruhan yang menajdi wadah dibuat dan diabadikan (Badran et al, 2002; Sadiqi 2003b). Seperti semua masyarakat dan budaya saat ini, masyarakat dan budaya Arab-Islam adalah patriarkal. Namun, patriarki masih jauh dari seragam di seluruh budaya; hal itu berbeda dari budaya ke budaya. Patriarki Arab-Islam didasarkan pada gagasan ruang dikotomi (Saadawi 1980; Mernissi

1994): pria berhubungan dengan ruang publik dan wanita dengan ruang pribadi. Batas gagasan ini (*hudud* “batas”) tidak hanya mengenai ruang, tetapi linguistik dan simbolik. Dengan demikian, selain tempat-tempat umum yang berhubungan dengan laki-laki dan tempat-tempat pribadi dengan wanita, bahasa umum seperti bahasa Arab yang berhubungan dengan laki-laki dan bahasa ibu dengan wanita, dan ritual publik yang merupakan simbolik secara budaya seperti salat Jumat berhubungan dengan laki-laki dan yang pribadi seperti ritual kelahiran berhubungan dengan perempuan. Selanjutnya, spasial, linguistik dan simbolik ritual masyarakat berkaitan dengan atribut laki-laki rasionalitas dan akal.

Dampak dari ruang dikotomi gender adalah *multi-faced* dan *farreaching*: mereka tidak hanya mengasosiasikan ruang publik dengan luar/eksterior dan ruang pribadi dengan bagian dalam/interior, tetapi mereka juga menyiratkan bahwa di luar adalah tempat kekuasaan norma-norma sosial diproduksi dan di dalam adalah tempat di mana kekuatan ini dilaksanakan. Kedua ruang secara ketat berbasis gender dan berinteraksi dalam cara yang dinamis dalam arti bahwa salah satu tidak ada tanpa yang lain. Memang benar bahwa perempuan dapat berada di ruang publik, misalnya, di jalan, tetapi mereka tidak didorong untuk tinggal di sana sebagai laki-laki; bukan, mereka harus melakukan bisnis mereka dan melanjutkan. Juga, pria umumnya tidak menghabiskan waktu di dapur, misalnya, sehingga tabu bekerja untuk mereka, juga, meskipun dengan konsekuensi yang sangat berbeda.

Pada interaksi ini identitas gender yang dibangun dan kekuasaan dinegosiasikan. Ruang pribadi secara budaya terkait dengan orang-orang tidak berdaya (wanita dan anak-anak) dan subordinasi untuk ruang publik, yang secara kultural dikaitkan dengan laki-laki yang mendikte hukum, bisnis memimpin, mengelola negara, dan menguasai ekonomi, baik nasional maupun domestik. Memang benar bahwa dikotomi ruang masyarakat/ pribadi secara signifikan telah terganggu sejak perempuan mulai mengambil pekerjaan di luar rumah dari tahun 1960-an dan seterusnya (meskipun di daerah pedesaan wanita selalu bekerja di peternakan keluarga mereka), tetapi juga benar bahwa bahkan di ruang pribadi, di mana wanita dapat memiliki kekuatan nyata (Sadiqi 2003b), laki-laki “disisipkan” untuk memenuhi kebutuhan mereka (makanan, istirahat, penghasilan) dan beberapa yang paling penting pengalaman hidup laki-laki, seperti sunat dan pernikahan, berlangsung di ruang pribadi. Dengan demikian, pria Arab-Muslim secara sosial telah disetujui kekuatannya lebih baik ruang publik dan ruang pribadi yang mereka langung dan kontrol. Kontrol ini didukung oleh berbagai berbasis syariat hukum keluarga.

## Interaksi Gender Arab

Arab telah sangat berperan dalam dikotomi ruang gender ini. Faktanya, meskipun bahasa Arab hidup berdampingan dengan sejumlah bahasa pribumi dan asing lainnya pada masyarakat dan budaya Arab-Muslim kini, bahasa ini telah memiliki sosial khusus dalam masyarakat dan budaya sejak menjadi berkaitan dengan Islam dan diperkenalkan seperti itu oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Fungsi khusus bahasa ini Arab terbuat dari itu alat yang ampuh di tangan penguasa. Ini adalah fakta yang dominan dari sekumpulan pencapaian kekuatan dasar dalam suatu masyarakat melalui batasan bahasa yang tinggi, dan fungsi tersebut melewati batas yang mereka pastikan sebagai “ketaatan” dan “kesetiaan” bagian dari subordinat masyarakat.

Interaksi gender dalam bahasa Arab merupakan sarana yang tepat dalam hubungannya antara bahasa ini dan dari empat sisi dari kekuatan umum di kalangan orang Muslim Arab: agama, politik, hukum, dan melek huruf.

## Bahasa Arab, Agama dan Gender

Sebagai bahasa Alquran, bahasa Arab lebih mudah diterima, dan cukup penting bagi laki-laki dari pada perempuan. Oleh karena itu, bahasa Arab sebagai perantara yang diekspresikan dalam agama ini, mereka tidak sungguh-sungguh berpartisipasi di hadapan publik dalam mempraktekkan agama karena kebudayaan mereka tidak menganjurkan hal semacam itu. Banyak tuturan resmi termasuk isu-isu perempuan yang digunakan untuk mengingatkan orang-orang Arab dan Muslim bahwa sebuah *raison d'être* adalah rumah dan anaknya. Sebagai akibatnya, “agama” perempuan mempunyai ruang di negara Arab (melalui ekspresi agama) lebih terbatas dan membatasi di depan umum (Sadiqi 2003a). Sebagai contoh, meskipun fakta menunjukkan banyak perempuan terpelajar yang religius di kalangan orang muslim Arab, pendapat perempuan berarti tidak mempunyai kekuasaan dan di depan umum tidak jelas, seperti kasusnya Nawal Saadawi dan Amina Wadud. Secara keseluruhan perilaku negatif cenderung pada pendapat-pendapat perempuan dalam berbagai hal keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan tingkah laku, hal itu terlihat dari ketidakjelasan kepercayaan keagamaan mereka dari sudut pandang sosial. Sebagai reaksinya, para feminis (laki-laki dan perempuan) menghubungkan ketidakjelasan kekuasaan religius lebih condong pada laki-laki mengenai interpretasi Alquran dan Hadits dari pada pembelajaran utama dari Islam (Saadawi 1980, Memissi 1994, Wadud 1999).

Pada kenyataannya, perempuan di dunia Islam-Arab tidak

memimpin do'a di tempat umum, tidak berdo'a dengan suara keras, ataupun berdakwah dalam upacara-upacara keagamaan penting yang mana hal ini selalu diambil alih oleh kaum laki-laki dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi panutan masyarakat. Hal ini menunjukkan jarangya penggunaan kata *imama* (perempuan sebagai imam sholat), *faqiha* (konsultan agama perempuan), *muftiya* (hakim perempuan), *musaliya* (perempuan sebagai imam shalat), *muqri'ah* (qari'ah/ qari' perempuan), dan *mujewwida* (deklamator qur'an perempuan) dalam bahasa Arab yang walaupun kenyatannya dalam tata bahasanya kata tersebut bisa digunakan.

### **Bahasa Arab, Politik, dan Gender**

Secara politik, setelah bangsa Arab merdeka, bahasa Arab standar telah diatur oleh pemerintah. Hal ini mengacu pada semboyan “satu bangsa, satu agama, satu bahasa” yang menjadi kesatuan dan identitas budaya negara baru tersebut yang menunjukkan bahwa sebuah kesatuan itu menimbulkan rasa perpolitikan yang ikhlas.

Ini adalah dasar dari berbagai alasan bahwa bahasa Arab adalah bahasa semua bangsa Arab yang kemudian setelah merdeka bersekutu menjadi Liga/Perserikatan Arab dan bahasa Arab menjadi lingua franca. Maka dari itu, otomatis setelah kemerdekaan, perempuan menjadi tidak memiliki prioritas dalam agenda perpolitikan negara kesatuan Arab tersebut, walaupun dalam kenyataannya setiap negara mengedepankan bahasa Arab dan persoalan perempuan untuk menjanjikan “lebih keterbukaan” dan “lebih kesederajatan” sosial setelah merdeka.

Perempuan telah turut serta dalam perpolitikan dan dalam beberapa tahun terakhir berangsur-angsur memperoleh kepercayaan sosial. Karena beberapa sanak kerabat mereka berada dalam dunia politik, maka muncul kecenderungan untuk mengeliminasi perempuan berdasarkan kemampuan *public speaking*nya dalam masyarakat muslim-Arab, dan hal ini telah mulai berkembang. Fenomena ini telah menciptakan paradoks nyata dalam masyarakat negara tersebut bahwa perempuan itu diperhatikan secara konservatif bahwa mereka menjaga budaya lisan yang dituturkan oleh masyarakat pribumi seperti bahasa dan transfer nilai budaya, dan juga diperhatikan secara tidak konservatif karena mereka tidak menggunakan makna konservatif dari bahasa ekspresi masyarakat. Terlepas dari semua itu, dapat berpolitik di negara Arab adalah hal penting bagi status politik mereka baik melalui bahasa lisan maupun tulis. Hal ini benar adanya baik dalam bahasa Arab maupun bahasa lisan (seperti bahasa Barbar di Maroko) yang secara umum terkonservatiskan. Namun walaupun demikian, pada akhirnya kenyatannya bahasa Arab menjadi

bahasa kitab suci Al-Qur'an, kitab suci umat Islam di manapun berada.

## Kesimpulan

Pembahasan ini dibuat dengan memandang bahwa bahasa merupakan fenomena sosial dimana terdapat karakteristik fenomena sosial didalamnya. Bahasa saling berhubungan dengan hal-hal selainya (diluar bahasa) secara berkesinambungan, karena bahasa juga berkembang mengikuti anggota masyarakat, yang diwujudkan dalam berkomunikasi sehingga bahasa berhubungan erat dengan sosial masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, hubungan antara bahasa dan social itu sangat erat. Keterkaitan itu memunculkan/menciptakan bahasa dalam lingkungan masyarakat. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam jiwa, serta terdiri dari tanggapan penerima bahasa (*recipient*). Para linguist Arab mengakui adanya konteks yang digunakan dalam berbahasa, dan fakta sosial yang ada dalam fenomena bahasa. Telah dijelaskan bahwa inti dari perilaku bahasa tidak terjadi kecuali kembali pada keadaan sekitar yang terjadi dalam bertindak tutur. Perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan penutur, lingkungan sosial, gender, *setting* (tempat) tuturan itu berlangsung, pendengar (mitra tutur), dan struktur budaya. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam bentuk perilaku yang sesuai. Perbedaan antara kedua gender itu didukung oleh nilai-nilai masyarakat dan fakta budaya, bukan faktor psikologi maupun biologi. Hal tersebut didukung pada hal-hal yang telah dibahas dan dipelajari tentang perilaku bahasa dan sosial pada gender.

Dalam bahasa Arab, gender tidak menghadirkan klasifikasi, terutama dalam gender yang tidak nyata (*al-jinsul Majazi*). Maka tidak ada hubungan antara gender yang kodrati dan gender dalam gramatika. Mungkin inilah yang membentuk adanya penelitian-penelitian dengan menggunakan keadaan yang sama dalam mengklasifikasikannya. Tampak bahwa para linguist ketika mengkategorikan sesuatu berdasarkan intuisi bahasa dan persamaannya, dan tidak akan sesuai selain kedua hal tersebut, meskipun mereka memisahkan yang tidak nyata dari nomina-nomina yang berkategori jumlah tiga maka hal itu terlepas dari perdebatan (pendapat yang berbeda).

## Daftar Pustaka

- Badran, Margot, Sadiqi, Fatima and Rashidi, Linda. (eds). 2002. *Language and Gender in the Arab World*. Special Issue *Languages and Linguistics*. International Journal of Linguistics. Volume 9, 2002.
- Benmamoun, Elabbas. 1996. "Agreement asymmetries and the PF interface". *SOAS Working Papers in Linguistics* 6. 106-128
- Boumans, Louis. 1998. *The Syntax of Codeswitching: Analysing Moroccan Arabic/Dutch Conversation.*, Tilburg, Tilburg University Press
- Daher, Nazih. 1987. "Arabic Sociolinguistics: State of the Arts". *Al-Arabiyya* 20, p. 125- 159.
- El Ani, Salman. 1978. *Readings in Arabic linguistics*, Bloomington, Indiana University Linguistic Club.
- Ennaji, Moha (ed.). 1995. *Sociolinguistics in Morocco*. (*International Journal of the Sociology of Language* 112).
- Ferguson, Charles A. 1959. "Diglossia", *Word*. Journal of the Linguistic Circle of New York, Vol. 15, n<sup>o</sup> 2, pp. 325-340.
- Harrell, Richard S. 2004. *A Short Reference Grammar of Moroccan Arabic*. Georgetown University Press.
- Holes, Clive, 1995. "Community, dialect and urbanization in the Arabic-speaking Middle East". *BSOAS* 58, 2, p. 270-287.
- Holmes, Janet. 1995. *Women, Men and Politeness*. London and New York: Longman.
- Ibn Al-Anbari, Abu-Bakr Mohamed Ibn Qassem. 1978. *Kitab Al-Mudhakkar wa Al-Mu?annath* (The Book of the Masculine and the Feminine). Ascertained by Tariq Abd-Aoun Al-Janabi. Baghdad: Ministry of *Waqf* (Religious Affairs).
- Isbar, Muh}ammad Sa'i>d dan Bila>l Junaidi>. 1985. *Asy-sya>mil Mu'jam fi> 'Ulu>millugatil 'Arabiyyati wa Mus}t}alah}a>tih>*. Beirut: Da>rul 'Audah
- Kramarae, C. 1981. *Women and Men Speaking: Frameworks for Analysis*. London:Newbury House Pub., Inc.
- Lakoff, Robin. (1975) *Language and Woman's Place*, New York: Harper and Row.
- Mills, S. (2003) *Gender and Politeness*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Owens, Jonathan, 2001. "Arabic sociolinguistics". *Arabica* XLVIII, 4, p. 419-469. Rouchdy, Aleya (ed.) 2002. *Language Contact and Language Conflict in Arabic*, New York, Routledge- Curzon.
- Sadiqi, Fatima. 2003a. "Women and Linguistic Space in Morocco". in *Women and Language*. Spring .Vol. 26, No 1, pp 35-43.



- , 2003b. *Women, Gender and Language in Morocco*. Leiden and Boston: Brill Academic Publishers, 2003b.
- Sadiqi, Fatima and Moha Ennaji, 2006. "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco." *Journal of Middle East Women's Studies (JMEWS)*.
- Suleiman, Yassir. (ed). 1994. *Arabic Sociolinguistics : Issues and Perspectives*. London : Curzon.
- Versteegh, Kees, 1997, *The Arabic Language*, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Versteegh, Kees. 1997. *The Arabic Language*, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Wadud, Amina, 1999. *Qur'an and Woman. Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Wright, W. 1981 [1858, 1862]. *A grammar of the Arabic language*, 3rd ed. Cambridge: CUP.

# HUMOR SEBAGAI SIMBOL KEKERASAN SIMBOLIK (*SYMBOLIC VIOLENCE*) TERHADAP ETNIS MADURA

**Dwi Laily Sukmawati**

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Email: [sya\\_lal@yahoo.co.id](mailto:sya_lal@yahoo.co.id)

## **ABSTRAK**

Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan dengan media apapun. Salah satu bentuk kekerasan simbolik terjadi pada etnis Madura melalui humor yang ditemukan dalam media *online*, seperti *facebook* dan *blog*. Humor seharusnya membuat penonton atau pembaca tertawa karena mengandung kelucuan, bukan justru sebaliknya. Dalam artikel ini ditemukan beberapa humor yang mengandung unsur SARA terhadap etnis Madura. Humor tersebut semakin memperpanjang deretan stereotip negatif yang melekat kepada etnis Madura. Dalam artikel ini penulis menggunakan analisis wacana yang kemudian dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat Madura. Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang ditemukan dalam humor *online* tersebut antara lain: perilaku etnis Madura yang selalu erat dengan budaya ‘carok’, etnis Madura yang dianggap memiliki mau badan yang tidak sedap dan cenderung berbau ‘kambing’, serta etnis Madura yang dianggap tidak punya nyali alias penakut jika berhadapan dengan pejabat atau pegawai pemerintah.

**Kata kunci:** *kekerasan simbolik, etnis Madura, humor, media online, stereotip negatif*

## Pendahuluan

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menghilangkan rasa jenuh. Salah satunya dengan menonton film komedi atau membaca cerita lucu/humor. Humor selalu dikaitkan dengan sesuatu yang lucu, atau sebuah keadaan (dalam cerita dan sebagainya) yang menggelikan hati; kejenakaan; kelucuan (KBBI, 2008:512) sehingga dapat menyegarkan suasana. Humor bisa saja muncul karena disengaja maupun tidak disengaja dan biasanya menggunakan bahasa yang tidak lazim melalui permainan kata yang dapat memunculkan kelucuan, sehingga membuat orang tersenyum atau tertawa. Humor semakin menarik jika didukung dengan adanya tingkah laku atau mimik wajah yang lucu yang dapat menambahkan rasa humor ketika melihatnya. Selain untuk hiburan, humor juga dapat menghilangkan stres dan menimbulkan gejala baru karena humor juga dapat dijadikan sarana rekreasi yang dapat menyegarkan perasaan pembaca, pendengar, atau pun orang yang melihatnya. Humor tidak mengenal kelas sosial dan dapat bersumber dari berbagai aspek kehidupan. Lalu, bagaimanakah jika humor yang sejatinya dapat membuat siapa saja tertawa bahkan dapat menyegarkan suasana justru berdampak sebaliknya?, dan bagaimana pula jika tanpa disadari humor tersebut telah memunculkan kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang dapat mendeskriminasikan etnis tertentu?.

Saat ini sudah banyak berkembang di masyarakat mengenai humor Madura, baik yang bersifat positif, negatif, dan netral. Humor netral dan positif biasanya bertujuan untuk menghibur penonton atau pembacanya. Sebaliknya, humor yang bersifat negatif umumnya cenderung merendahkan atau melecehkan etnis Madura. Humor tersebut dianggap mengandung kekerasan simbolik (*symbolic violence*) karena setelah membacanya, bukan hanya membuat gelak tawa, tetapi memunculkan komentar miring dan stigma negatif terhadap etnis Madura. Apalagi humor tersebut sengaja dibuat oleh masyarakat nonmadura dengan tujuan-tujuan tertentu.

Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) berdasarkan konsep Bourdieu, berangkat dari pemikiran adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan sebuah seperangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu-sama lain dan menentukan distribusi budaya (*cultural*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Kekerasan simbolik dalam pengertiannya adalah sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok/ ras/ suku/ gender tertentu. Secara bergantian Bourdieu menggunakan istilah 'kekerasan simbolik' (*symbolic violence*), 'kuasa simbolik' (*symbolic power*) dan 'dominasi simbolik' (*symbolic dominance*) untuk merujuk hal

yang sama. Bourdieu merumuskan pengertian ketiganya sebagai ‘kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi kenyataan sosial secara semena – tapi yang kesemenaannya tidak disadari’. Dalam arti inilah kuasa simbolik merupakan ‘kuasa untuk mengubah dan menciptakan realitas yakni mengubah dan menciptakannya sebagai diakui dan dikenali secara absah’ (Bourdieu: 1995a:168 dalam Indi Aunullah: 2006:111).

Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Madura tersebut semakin menambah rentetan stigma negatif yang sudah melekat pada etnis Madura meskipun kondisi tersebut sudah terbantahkan oleh oleh Rifai (2007:127) dengan memerikan antara pandangan orang luar terhadap orang Madura, dan pandangan orang Madura terhadap kemaduraannya sendiri. Menurut Rifai, stereotip itu sebenarnya sangat bertentangan dengan asas/kaidah yang berlaku dalam masyarakat Madura sendiri, terutama bertumpu pada peribahasa yang berlaku, yang menjunjung nilai-nilai keluhuran dan keagungan.

Kajian mengenai kekerasan simbolik (*symbolic violence*) melalui media sudah banyak dilakukan. Beberapa contoh artikel yang masih relevan dengan artikel ini adalah “Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*) terhadap Suku Jawa dalam Program TV ‘Hidup Ini Indah’ di Trans TV” yang ditulis Nurul Hasfi. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bagaimana kekuatan media televisi memiliki peranan kuat dalam menyebarkan unsur kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Jawa melalui sebuah program “Hidup Ini Indah”. Sehingga tanpa disadari, program tersebut memunculkan stigma negatif dan deskriminasi terhadap etnis Jawa bagi siapa saja yang menontonnya. Sementara artikel lain yang serupa milik Citra Adisti Permatasari dan Yeni Yuniati yang berjudul “Humor Kekerasan dalam Film Kartun Anak “Bernard Bear” di ANTV. Artikel tersebut menemukan bahwa film “Bernard Bear” yang ditayangkan melalui televisi ternyata tidak hanya kekerasan simbolik (*symbolic violence*) tetapi juga kekerasan fisik (*physical violence*). Ironisnya sasaran dari film kartun tersebut adalah anak-anak yang seharusnya tidak dikenalkan kepada dunia kekerasan.

Kedua artikel tersebut memiliki persamaan, yakni mengkaji film yang mengandung unsur kekerasan, baik kekerasan simbolik (*symbolic violence*) dan kekerasan fisik (*physical violence*). Sementara dalam artikel ini, penulis juga membahas tentang kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Madura, namun objeknya berbeda, yaitu humor di media *online*, seperti akun *facebook*, *blog*, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: bagaimana bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Madura yang ada dalam humor?.

## Metode Analisis dan Kerangka Pemikiran

Humor yang beredar di masyarakat memiliki beragam bentuk dan fungsi. Dari bentuk, ada humor lisan, tulis, bahkan gambar yang biasa disebut karikatur. Humor yang berbentuk tulisan biasanya disampaikan dalam bentuk cerita humor dan teka-teki. Pada humor tulis ini hanya dapat dilihat aspek kebahasaan (verbal) yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Penggunaan bahasa seperti humor, dalam berbagai konteks komunikasi menyebabkan munculnya bentuk-bentuk wacana. Sehingga untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang ada dalam humor Madura dapat diteliti dengan teori analisis wacana. Analisis wacana ini dimaksudkan untuk mengungkap makna dan maksud-maksud tertentu dalam sebuah teks. Menurut Schiffrin, analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kajian terhadap suatu wacana dapat dilakukan secara struktural dengan menghubungkan antara teks dan konteks, serta melihat suatu wacana secara fungsional dengan menganalisis tindakan yang dilakukan seseorang untuk tujuan tertentu untuk memberikan makna kepada partisipan yang terlibat (2007:58).

Istilah analisis wacana merupakan istilah umum yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu dengan berbagai pengertian. Dalam studi linguistik, wacana menunjuk suatu kesatuan bahasa yang lengkap, yang umumnya lebih besar dari kalimat, baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Wacana adalah rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan proporsi satu dan yang lain, kalimat satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan. Kesatuan bahasa itu bisa panjang, bisa pendek. Sebagai sebuah teks, wacana bukan urutan kalimat yang tidak mempunyai ikatan sesamanya, bukan kalimat yang dideretkan begitu saja. Sementara analisis wacana berhubungan erat dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa.

Selain menggunakan teori analisis wacana, dalam menganalisis teks tulis berupa humor etnis Madura, penulis juga akan mengaitkan dengan teori sosiolinguistik yang akan mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan bahasa dan masyarakat, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi (Wardhaugh 1984: 4; Holmes 1993: 1; Hudson 1996: 2). Terdapat berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat dalam Chaer menjelaskan bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kalau kebudayaan itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan

adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi itu.

Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Dalam hal ini bahasa berhubungan erat dengan masyarakat suatu wilayah sebagai subyek atau pelaku berbahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dalam teori sosiolinguistik, bahasa tidak hanya dianggap sebagai gejala sosial melainkan juga gejala kebudayaan. Oleh karena itu dalam menganalisis teks humor, penulis menggunakan konsep analisis wacana (*discourse analysis*) dikaitkan dengan teori sosiolinguistik, yakni kaitan bahasa dengan budaya setempat.

## **Analisis Data**

Dari beberapa media *online* ditemukan beberapa humor yang mengandung unsur kekerasan simbolik terhadap etnis Madura. Dalam artikel ini, penulis hanya menyajikan beberapa humor terkait dengan kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Madura, seperti (1) perilaku etnis Madura yang selalu diidentikkan dengan budaya ‘carok’ karena sifat etnis Madura yang memiliki ‘tempramen keras dan mudah tersinggung’, (2) etnis Madura selalu diasosiasikan dengan “kambing”, sehingga muncul humor bahwa orang Madura memiliki mau badan yang tidak sedap dan cenderung berbau ‘kambing’, serta (3) etnis Madura yang dianggap tidak punya nyali alias takut jika berhadapan dengan pejabat atau pegawai pemerintah. Berikut akan dijelaskan analisis mengenai kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Madura secara mendetail.

### **1. Perilaku etnis Madura identik dengan kekerasan ‘carok’**

Stereotip negatif yang sering muncul ketika menyebut nama Madura adalah ‘carok’. Etnis Madura selalu digambarkan dengan perilaku keras, mudah tersinggung, pemaarah, pendendam, dan gampang melakukan ‘carok’. Bahkan Rifai menambahkan bahwa orang Madura selalu dilukiskan dengan watak kasar, tidak sopan, kurang ajar, ekstrover, blak-blakan menyuarakan pendapatnya, tidak tahu adat, dan tidak bersopan santun (2007: 135). Stereotip negatif tersebut dapat dilihat dari pilihan kata dalam dialog humor berikut ini.

#### **Tidak Pernah Tersinggung**

**Tono** : “Saya dengar, orang Madura temperamennya keras dan mudah tersinggung.”

**Tole** : “Salah, Ton. Orang Madura itu tidak pemah tersinggung oleh siapa pun.”

**Tono** : “Ah, yang benar saja.”

**Tole** : “Benar karena sebelum sempat tersinggung, lawannya sudah tergeletak kena clurit.”

<http://www.lontarmadura.com/kelucuan-humor-madura/#ixzz3qiY7QQGi>

Dari dialog di atas dapat dianalisis bagaimana Tono (sebagai sosok masyarakat nonmadura) memandang etnis Madura memiliki perilaku negatif. Hal tersebut tampak dari penggunaan istilah: “tempramen keras dan mudah tersinggung”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008: 1434), ‘temperamen’ bermakna sifat batin yang tetap memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran (periang, penyedih, dsb). Sementara ‘keras’ bermakna tidak lemah lembut (KBBI, 2008: 676). Dengan kata lain masyarakat Madura dianggap ‘kasar’.

Sementara Tole sebagai lawan bicara (mewakili masyarakat Madura) seolah-olah membenarkan bahwa ‘carok’ merupakan bagian bahkan budaya bagi etnis Madura. Hal tersebut dapat diamati dari kalimat: “**Benar** karena sebelum sempat tersinggung, lawannya sudah tergeletak **kena clurit**.”

Humor tersebut dianggap mengandung kekerasan simbolik (*symbolic violence*) karena secara tidak langsung menggambarkan atau menganggap kelompok tertentu dalam hal ini etnis Madura memiliki perilaku negatif, yaitu tempramen keras, dan mudah tersinggung, sehingga dengan mudah berkelahi yang pada akhirnya mengakibatkan lawannya mati terkena clurit. Dari konteks inilah dan muncul istilah ‘carok’.

Stigma negatif di atas terkait perilaku etnis Madura pada kenyataannya tidak sesuai dengan pepatah Madura, yaitu “etembhang pote mata ango’an pote tolang”. Artinya daripada hidup menanggung malu lebih baik mati berkalang tanah (Atmosoedirjo dalam Rifai: 2007: 137). Konon, pepatah ini muncul ketika laki-laki etnis Madura melakukan carok untuk menjaga kehormatan keluarga. Carok dilakukan laki-laki sebagai kepala keluarga dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga. Seorang laki-laki yang dianggap tidak bisa menjaga kehormatan keluarga (harga diri istri), maka ia memilih mati karena dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dari kondisi itulah muncul pepatah “etembhang pote mata ango’an pote tolang”.

Terkait istilah carok, Wiyata juga menegaskan bahwa kondisi carok ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya masalah sosial yang dibungkus oleh ‘harga diri’ orang Madura (Wiyata, 2006). Sehingga dalam konteks humor tersebut, istilah ‘carok’ atau ‘mati kena clurit’ tidak dapat disandingkan dengan makna ‘carok’ yang ada di Pulau Madura. Karena jika pilihan kata dalam humor tersebut benar adanya, maka dapat dipastikan

setiap hari akan ada pertumpahan darah di Pulau Madura akibat sifat masyarakat Madura yang “tempramen keras dan mudah tersinggung” sehingga muncul perkelahian dan ada korban akibat terkena clurit.

## 2. Etnis Madura (wanita) diasosiasikan dengan ‘bau tidak sedap’

Bagi sebagian orang khususnya kaum laki-laki, angka 35 (istilah Madura: *tello’ lema’*) mungkin sudah tidak asing lagi. Sering sekali ada guyonon atau candaan yang menyebut Etnis Madura selalu diidentikkan dengan angka 35. Jika ditelusuri maknanya melalui buku tafsir mimpi *online*, maka angka 35 berasal dari 35: 25-75-52-02 yang bermakna: ‘wanita-kambing-tinju-lambung-jalan-jalan-drupadi’. Angka tersebut selalu menjadi bahan candaan bagi masyarakat nonmadura terhadap etnis Madura, seperti yang tergambar dalam humor berikut ini.

Cowok : “Bapak kamu tukang sate ya?? “

cewek : “iya...kok kamu tau siih?? pasti aku udah menusuk2 hatimu ya beib...?? “GeeR

Cowok : “ bukan. **kamu bau kambing**”

<https://www.facebook.com/Pusat-Humor-Madura-147701151909968/>

Penggunaan istilah “kamu bau kambing” yang diucapkan oleh seorang cowok kepada cewek Madura dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik karena secara harafiah, istilah ‘kambing’ merujuk kepada binatang pemamah biak dan pemakan rumput (daun-daunan), berkuku genap, tanduknya bergeronggang, biasanya dipelihara sebagai hewan ternak untuk diambil daging, susu, kadang-kadang bulunya (KBBI, 208:611).

Pada kalimat sebelumnya yang diungkapkan sang cowok sebenarnya ada relevansinya antara ‘sate’ dengan ‘kambing’, akan tetapi kesantunan dalam berbahasa juga patut dijaga apalagi lawan tutur dalam percakapan adalah seorang wanita.

Stereotip tentang wanita Madura pada zaman kolonial tidak ada yang positif. Dibandingkan dengan wanita Jawa, wanita Madura dianggap terbelakang, kaku, gemuk, dan jelek. Bahkan Pendeta Katolik van der Linden dalam Rifai (1931-1932: 237) menganggap bahwa kecantikan wanita Madura berada jauh di bawah wanita Jawa Tengah dan Jawa Barat. Stereotip negatif tersebut semakin hari semakin berkembang sehingga muncul ‘bau kambing’ terhadap wanita Madura.

Jika dikaitkan antara angka 35 atau ‘kambing’ dengan kondisi masyarakat Madura sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bau badan seseorang. Akan tetapi, istilah kambing tersebut lebih merujuk kepada salah satu kuliner khas Madura yang sangat terkenal selain kaldu



*kokot*, yaitu 'sate-gulai kambing'. Makanan ini menjadi menu andalan masyarakat Madura apalagi jika hari raya Idul Adha. Selain rasanya yang kaya dengan bumbu/rempah racikan khas Madura, makanan ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti kurang darah, stres, demam, dan lain sebagainya. Meskipun di satu sisi, makanan ini juga tidak baik bagi para manula dan pengidap penyakit darah tinggi karena mengandung lemak yang tinggi. Karena makanan khas kuliner dari pulau Madura inilah, maka secara tidak langsung masyarakat nonmadura menganggap bahwa Madura terkenal dengan makanan khas yang terbuat dari kambing, yaitu 'sate-gulai kambing'. Sehingga dengan mudah diplesetkan "Madura tello' lema" (Madura 35).

### 3. Etnis Madura dianggap 'penakut'

Dalam humor yang lain, etnis Madura digambarkan sebagai sosok penakut atau tidak berani kepada pegawai dan pejabat pemerintah, seperti: polisi, angkatan darat, angkatan udara, kepala polisi, gubernur, walikota, dan presiden RI. Dalam contoh humor (1) perilaku etnis Madura berubah menjadi tidak sopan kepada orang yang baru saja dikenal setelah ia tahu bahwa orang yang menginjak kakinya bukan polisi, angkatan darat, maupun angkatan udara. Sementara pada contoh humor (2) juga menggambarkan sosok etnis Madura yang merasa bersalah karena telah memberhentikan sosok pejabat negara yang pada saat itu justru melanggar lalu lintas. Hal itu sebenarnya berkaitan dengan falsafah Madura yang berbunyi: *bhuppa'-bhabu'*, *ghuru, rato'* yang artinya 'orang tua, guru, dan ratu'. Istilah orang tua mengacu kepada orang tua yang merawat dan mendidik kita mulai dari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu apapun yang diinginkan dan diperintahkan orang tua kepada anak, sang anak wajib memenuhi dan melaksanakannya. Demikian pula yang diinginkan guru atau kiai yang dianggap sebagai panutan dalam kehidupan orang Madura. Istilah '*rato'*' merujuk kepada pemerintah atau dalam hal ini adalah pejabat seperti: presiden, walikota, gubernur, kepala polisi, polisi, angkatan darat, dan angkatan udara. Semua pejabat tersebut dianggap sebagai pemimpin yang kepentingannya dia atas segala-galanya (Sadik, 2014: 54). Perhatikan teks humor berikut ini.

#### 1) Orang Madura yang takut pada Tentara

Ada anekdot bahwa orang Madura banyak yang takut pada Tentara. Suatu saat, di sebuah bis kota yang penumpangnya berjubel seseorang bertanya kepada salah satu penumpang yang badannya kekar dan berambut pendek :

"Maaf pak, apakah sampiyan **Polisi** ? " (logat Madura)

"Bukan !"

“Apakah sampiyan **Angkatan Darat** ?”

“Bukan !”

“Angkatan Laut atau **Angkatan Udara** ya ??”

“Bukaaan...!”

“Kalau begitu jancuk sampiyan !”

“Lho kenapa ?”

“Ini sampiyan nginjak kaki saya “.

*<http://plat-m.com/buku-saku-kumpulan-humor-madura/>*

## 2) Orang Madura Takut pada Pejabat

Pada waktu SBY (RI1) sedang mengunjungi kab Sampang, ia diajak berkeliling kota naik mobil dengan ditemani seorang sopir. Karena si sopir ingin memberikan service terbaiknya dan juga untuk menunjukkan kebolehannya, ia berkata, “Bapak Presiden apapun yang Bapak inginkan, akan saya penuhi, sebutkan saja.”

“Well”, kata SBY, “Sebenarnya saya sudah lama ingin sekali mengendarai mobil sendiri. Di Jakarta saya tidak kemana-mana, dan walaupun saya harus keluar, selalu tersedia sopir dan mobil pribadi untuk saya. Saya ingin sekali menyetir sendiri, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya.”

“Wah,” kata si sopir, “Kalau hanya itu saja masalahnya, tidak jadi soal.” dan kemudian merekapun bertukar tempat. SBY menyetir dan si sopir duduk di belakangnya. Tetapi baru saja sampai ke persimpangan pertama, SBY lupa untuk berhenti di lampu merah, dan jalan terus. Segera polisi Sampang mengikuti mobil tersebut dan menghentikannya. Mobil menepi, polisi turun dari motornya, dan menghampiri mobil tersebut. Tetapi begitu ia mendekat, ia mengenali Presiden, dan ia segera kembali ke motornya dan segera mengontak atasannya.

“Pak”, kata Polisi itu, “Saya baru saja menyetop seorang pembesar.”

“Apa?” kata atasannya, “**Kepala Polisi?**”

“Bukan Pak, dia malah lebih tinggi dari **Walikota.**”

“Hei, kamu tidak menyetop **Gubernur** “kan?”

“Tidak Pak, dia malah lebih tinggi lagi.”

“So, jadi siapa yang kau stop itu?” tanya si atasan bingung.

“Tidak tahu Pak”, jawab Polisi, “tapi siapapun dia, sopirnya **saja SBY!**”

Berdasarkan contoh kedua humor di atas menunjukkan bahwa etnis Madura tidak memiliki nyali terhadap pejabat dan pegawai pemerintah. Selain itu, etnis Madura juga dianggap tidak memiliki sopan santun karena mengeluarkan kata makian bahkan terhadap orang yang baru dikenal sekalipun. Hal tersebut tampak dalam kalimat: “Kalau begitu jancuk sampiyan”. Sifat tersebut berbanding terbalik dengan falsafah yang ada di Madura, yang mana masyarakat Madura sangat memerhatikan siapa lawan tuturnya.

Seperti halnya bahasa daerah lainnya, bahasa Madura mengenal adanya tingkat tutur. Menurut Soegianto dalam Sofyan, secara umum tingkat tutur dalam bahasa Madura dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) tingkat tutur *Enjâ'Iyâ (E-I)*, yakni jenis tingkat tutur yang umumnya dipakai oleh (a) sesama teman yang sangat akrab dalam pergaulan sehari-hari dan (b) orang-orang yang menempatkan diri dalam status sosial “tinggi” terhadap orang-orang yang dianggap berstatus sosial “rendah”, misalnya orang tua kepada anaknya; (2) tingkat tutur *Engghi-Enten (E-E)*, yakni jenis tingkat tutur yang umumnya dipakai oleh: (a) orang yang status sosialnya lebih rendah terhadap orang yang dihormati dan (b) orang yang berkedudukan “sederajat”; 3) tingkat tutur *Engghi-Bhunten (E-B)*, yakni jenis tingkat tutur yang umumnya dipakai kepada orang yang sangat dihormati dengan jarak sosial yang cukup jauh, misalnya atasan kepada bawahan, atau menantu berbicara kepada mertua. Dalam masyarakat Madura, penggunaan tingkat tutur dihubungkan secara langsung dengan adat dan kesopanan yang merupakan norma sosial yang harus dipatuhi. Orang yang tidak dapat menggunakan tingkat tutur secara tepat akan *ta' tao abhasa* dikatakan ‘tidak bisa berbahasa’, sedangkan orang yang dapat menggunakan tingkat tutur dengan tepat akan dikatakan *penter abhasa* ‘pandai berbahasa’ atau *andhap asor* ‘santun’ (2008:8). Kedudukan tingkat tutur dalam bahasa Madura sangat penting karena terkait dengan tingkat kesopanan dan perilaku seseorang. Bahkan Kusumah menambahkan bahwa ciri-ciri orang Madura adalah sopan, hormat dan Islam (Kusumah, dalam Soegianto-ed, 2003: 1). Ciri-ciri itu menjadi identitas etnik yang muncul tanpa disadari oleh anggota masyarakat dan sudah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan unda-usuk tersebut, sifat tidak sopan dan tidak santun yang digambarkan kepada sosok etnis Madura dalam humor tersebut tidak sesuai dengan aturan yang di Madura. Karena setiap melakukan

tindak tutur, masyarakat Madura sangat memerhatikan siapa yang menjadi lawan tutur, kapan, dan di mana percakapan itu dilakukan. Hal itu terlihat dari pemilihan kata 'sampiyan' yang ditujukan kepada lawan tutur, meskipun berbaur dengan makian. Istilah 'sampiyan' bermakna 'kamu' dalam bahasa Madura. Namun istilah tersebut memiliki makna halus dibandingkan dengan kata 'ba'na (dialek Sumenep), be'en (dialek Pamekasan), hedeh (dialek Sampang), dan be'eng (dialek Bangkalan)'. Hanya saja penulisan istilah 'sampiyan' tidak sesuai dengan ejaan bahasa Madura yang disempurnakan. Seharusnya istilah tersebut ditulis menjadi 'sampèyan' meskipun dalam pengucapannya adalah 'sampiyan'.

Sementara kata 'jancuk' bagi orang Jawa Timur bukan merupakan istilah yang asing lagi. Jancok atau dancok adalah sebuah kata khas Surabaya yang telah banyak tersebar hingga meluas ke seantero Indonesia bahkan sudah mendunia. Warga Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan lain sebagainya turut andil dalam penyebaran kata ini. 'Jancok' berasal dari kata 'encuk' yang memiliki padanan kata bersetubuh. 'Jancuk' berasal dari frasa 'di-encuk' menjadi 'diancok' lalu 'dancok' hingga akhirnya menjadi kata 'jancok'. Makna asli kata tersebut sesuai dengan asal katanya yakni 'encuk' lebih mengarah ke kata kotor bila kita melihatnya secara umum. Istilah tersebut dipakai untuk menjadi kata umpatan pada saat emosi meledak, marah atau untuk membenci dan mengumpat seseorang. Seiring waktu, makna kata 'jancok' dan sejenisnya meluas hingga menjadi kata simbol keakraban dan persahabatan khas (sebagian) arek-arek Suroboyo.

Konteks humor pada nomor (1) di atas, istilah 'jancuk' dapat muncul karena alasan si Madura sudah lama dalam kondisi posisi kaki terinjak. Sehingga melalui berbagai macam pertanyaan ternyata si lawan tutur tidak ada respon, akhirnya muncul makian tersebut. Namun dalam realitas budaya Madura, istilah makian jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali untuk kondisi tertentu, misalnya perkelahian 'carok' di mana situasi keduanya memanas dan sama-sama emosi.

Kedua humor tersebut dianggap mengandung unsur kekerasan simbolik karena secara tidak langsung ada pilihan kata yang menggambarkan etnis Madura sebagai sosok lemah, penakut, dan tidak santun kepada lawan tutur. Hal tersebut tidak sesuai dengan falsafah Madura yang masih diyakini dan dipegang teguh sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Top of For Bottom of Form

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik simpulan bahwa kekerasan simbolik (*simbolik violence*) terhadap etnis Madura melalui media humor semakin memperpanjang deretan stereotip negatif yang

melekat kepada etnis Madura. Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis Madura yang ditemukan dalam humor *online* tersebut antara lain: (1) perilaku etnis Madura yang selalu diidentikkan dengan budaya ‘carok’ karena sifat masyarakatnya yang ‘tempramen keras dan mudah tersinggung’; (2) etnis Madura diasosiasikan dengan “kambing”, sehingga muncul humor bahwa orang Madura memiliki mau badan yang tidak sedap dan cenderung berbau ‘kambing’, serta (3) etnis Madura yang dianggap tidak punya nyali alias takut jika berhadapan dengan pejabat atau pegawai pemerintah.

Melalui media elektronik, baik media sosial, televisi, internet, radio, dan lain sebagainya segala informasi dapat disebarluaskan secara cepat termasuk informasi yang mengandung unsur kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap etnis tertentu. Sehingga tanpa disadari memengaruhi sudut pandang seseorang terhadap etnis tertentu dan memunculkan stigma negatif dan cenderung mendeiskriminasi/melecehkan. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap semua pihak yang memiliki akun di media *online* agar seimbang dalam menyampaikan pesan/informasi. Artinya informasi yang disajikan tidak mengandung unsur SARA dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi yang membuat humor tersebut bukan masyarakat Madura yang tidak paham betul mengenai budaya Madura. Humor yang sejatinya dapat membuat pembaca atau penonton tertawa, hendaknya tidak menimbulkan seseorang atau etnis tertentu merasa dilecehkan. Jika ini dibiarkan terus menerus, maka stereotip negatif tentang etnis Madura akan terus berkembang di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Aunullah, Indi. 2006. “Bahasa dan Kuasa Simbolik dalam Pandangan Pierre Bourdieu”. Yogyakarta: Hasil Skripsi, Universitas Gajah Mada.
- Chaer, Abdul, dan Agustina, Leonie. Juni 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Sadik, Sulaiman. 2014. *Memahami Jati Diri, Budaya, dan Kearifan Lokal Madura*. Surabaya: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- Schiffrin, Deborah. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegianto (ed).2003. *Kepercayaan, Magi dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda.

- Sofyan, Akhmad. 2008. *Variasi, Keunikan, dan Penggunaan Bahasa Madura*. Surabaya: Balai Bahasa Surabaya.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat*. Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Wiyata, A Latief. 2006. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LKiS.

## Laman

- <http://www.lontarmadura.com/kelucuan-humor-madura/#ixzz3qiY7QQG> diunduh pada tanggal 6 November pukul 19.15
- <https://www.facebook.com/Pusat-Humor-Madura-147701151909968/> diunduh pada tanggal 6 November pukul 19.15
- <http://plat-m.com/buku-saku-kumpulan-humor-madura/> diunduh pada tanggal 7 November pukul 16.00
- <http://machdyadanjohan.blogspot.co.id/>, diunduh tanggal 12 November, pukul 02.10
- <http://indonesiaindonesia.com/f/89024-asal-arti-kata-jancok/>, diunduh tanggal 12 November, pukul 04.20

# PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NOVEL KALATIDHA, KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA

**Sylvie Meiliana**

Email: *sylvie\_surya@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pelanggaran hak asasi manusia yang tercermin dalam novel “Kalatidha”. Dalam karya ini, pengarang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi pada peristiwa tahun 1965-1966. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi yang dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sumber data penelitian adalah novel Indonesia karya Seno Gumira Ajidarma berjudul “Kalatidha”. Karya ini berlatar pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi pada tahun 1965-1966. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, dalam peristiwa tahun 1965-1966 di Indonesia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua, Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan/memusnahkan PKI. Ketiga, kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan perampasan hak. Keempat, pengarang sebagai warga negara Indonesia berperan sebagai juru bicara kelompok korban kekerasan melalui pandangan dunianya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966.

**Kata Kunci:** Pelanggaran HAM, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, pandangan dunia pengarang, peristiwa tahun 1965-1966.

## Pendahuluan

Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan tonggak sejarah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Enam jenderal dan seorang letnan diculik serta dibunuh dan dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia, bahkan sebagai bangsa secara keseluruhan. Perekonomian porak poranda, dan ketegangan antara tentara dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, makin menjadi-jadi. Orang Indonesia membunuh sesama orang Indonesia dengan korban sampai ratusan ribu orang. Tak lama setelah aksi kelompok G30S, Jenderal Soeharto turun tangan, dia menuduh PKI mengotaki dan melakukan pembunuhan itu. Ia mengumumkan bahwa PKI harus diganyang untuk 'menyelamatkan bangsa'. Dalam langkah-langkah yang cekatan PKI dituduh atheis dan gila seks. Hal ini begitu membikin marah kalangan agama (muslim dan kristen), sehingga mereka beramai-ramai membantai tetangga sendiri (Wieringa, 2005).

Perempuan-perempuan muda yang ada di sekitar Lubang Buaya, tempat para perwira militer itu dibunuh dan ditimbun, dituduh telah mementaskan tarian cabul, bahkan merayu, memotong kemaluan serta membunuh, termasuk mencungkil mata para perwira itu. Mereka juga dituduh sebagai perempuan komunis bejad yang melacurkan diri serta memperkosa, memotong kemaluan dan merusak tubuh perwira militer begitu mereka ditembak mati oleh kelompok G30S. Secara umum propaganda atas perilaku para perempuan itu dipercaya, kemudian menggerakkan kalangan agama serta milisia kanan untuk melakukan pembunuhan massal (Wieringa, 2005).

Propaganda militer mulai disebar dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno (Karyawira, 2013).

Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian, bahkan angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Pembantaian di Indonesia 1965-1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada masa



setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membutuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI (Karyawira, 2013).

Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa. Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa, banyak orang yang dianggap PNI kiri dibunuh. Yang lainnya hanya dituduh atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik. Pada saat itu, ratusan ribu jiwa terenggut bersama hak asasi mereka, direnggut oleh saudara merah putih nya sendiri. (Karyawira, 2013)

Setelah melakukan penyelidikan selama hampir empat tahun terhadap peristiwa 1965, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup akan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Indikasi khususnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukti permulaan yang cukup menurut Nurkholis adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Menurut Nurkholis, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa. (Mardiani, 2012)

Peristiwa bersejarah yang 'kebenarannya' masih selalu dipertanyakan tersebut telah melahirkan banyak karya sastra yang berlatar peristiwa pasca G30S PKI tahun 1965. Sastra dapat merupakan pencerminan/penggambaran sebuah fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang dapat mengungkapkan problema kehidupan, dalam hal ini pengarang dapat menjadi juru bicara suatu kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, pengarang menjadi juru bicara korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1965-1966. Seorang pengarang/novelis dianggap mampu menggambarkan secara jernih dan ekspresif makna perubahan dalam kehidupan masyarakat yang merupakan kenyataan sosial. Kehidupan sosial penulisnya juga turut melatari penciptaan sebuah karya sastra (Swingewood, 1972: 91).

Untuk menjawab sejumlah masalah dalam penelitian ini digunakan teori strukturalisme genetik. Teori ini dibutuhkan untuk menjembatani

keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat yang terdapat di dalam data konkret dan kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam karya sastra melalui pandangan dunia si pengarang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis isi yang merujuk buku Analisis Data kualitatif karya Miles dan Huberman (1992:16-20) dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis isi diharapkan dapat mengungkap pesan-pesan yang tersembunyi di dalam teks, dan memahami ide pokok yang terdapat dalamnya.

Penelitian kualitatif ini didesain berdasarkan metode Wiersma (1982: 82-86), yaitu: (1) menentukan fokus penelitian, (2) mengajukan pertanyaan untuk penelitian, (3) mengumpulkan data, (4) melakukan keabsahan data, (5) menganalisis, menginterpretasi temuan penelitian, dan (6) instrumen penelitian. Tahap-tahap yang akan dijalani dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) membaca karya sastra dan mengidentifikasi berbagai motif cerita yang memungkinkan untuk diabstraksi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, (2) menganalisis kejahatan genosida, yaitu pembunuhan besar-besaran secara berencana/pembunuhan massal yang termuat di dalam karya tersebut, (3) menganalisis kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan, (4) menganalisis pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran HAM, (7) menginventarisasi semua data temuan ke dalam sebuah catatan, (8) menarik kesimpulan, dan (9) menyusun laporan penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah karya sastra yang mengungkapkan pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1965-1966. Data dan sumber data penelitian ditentukan secara *purposive* dan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Menurut Nasution (2007: 98), *purposive* sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan disain penelitian agar dalam (pilihan) itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Di samping itu, penentuan data dan sumber data tersebut berlandaskan pula pada (1) karya sastra yang menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan; (2) karya sastra yang melatar belakangi kehidupan pengarangnya, yaitu masyarakat Indonesia pada tahun 1965-1966 ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Unit data berupa kata, frase, atau kalimat yang mengandung informasi dan berkaitan dengan pelanggaran HAM sebagai pandangan

dunia pengarang.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui kegiatan kategorisasi, dan inferensi. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yaitu pelanggaran HAM, dan pandangan dunia pengarang mengenai pelanggaran HAM di Indonesia pada peristiwa tahun 1965. Inferensi digunakan untuk menginterpretasikan, memahami, dan menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini inferensi didasarkan pada kerangka teori strukturalisme genetik.

## Hasil dan Pembahasan

Sebuah karya sastra dapat merupakan sebuah media bagi pengarang untuk mengungkap pandangan dunianya mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks karya sastra sebagai struktur bermakna yang mewakili pandangan dunia (*vision du monde*) pengarangnya, penelitian ini mengungkapkan bagaimana pengarang bertindak sebagai juru bicara bangsa Indonesia, terutama kelompok para korban yang mengalami pelanggaran HAM dalam peristiwa tahun 1965-1966 yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI.

Mengenai hak asasi manusia, menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga diungkapkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Sementara kejahatan

kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Seperti diungkapkan di atas bahwa pelanggaran HAM mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, penelitian ini akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965-1966 dan pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran HAM tersebut yang terungkap dalam novelnya "Kalatidha".

Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebar, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua ini adalah PKI. Sebaliknya penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. (Karyawira, 2013). Dalam novelnya "Kalatidha", Seno Gumira Ajidarma mengungkapkan propaganda yang menyerukan pembersihan anggota PKI melalui cuplikan berita surat kabar "Angkatan Bersendjata" dengan judul berita "Sisa2 Gestapu Tetap Merupakan Bahaja" yang dilanjutkan dengan sub-judul "Masih Punja sendjata Gelap & ada tokoh2 jang luput & merembes kedalam organisasi2 lain" (Kalatidha, 2002: 36) serta pernyataan Brigjen Amir Machmud yang menjelaskan bahwa beberapa ratus senjata gelap masih berada di tangan Gestapu. Menutunya tokoh-tokoh PKI masih ada yang dapat menyelip masuk dalam organisasi-organisasi lain karena mereka luput dari pengejaran. Sementara penyangkalan PKI diungkapkan melalui cerita seorang anak yang menyaksikan pemburuan dan penyiksaan terhadap seseorang yang dituduh sebagai PKI.

"Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit. "He! Pemuda Rakyat! Menyerahlah!". ... Para pemburu serempak maju dan meringkusnya, ... seperti kambing yang menancapkan kakinya menolak disembelih. Salah seorang memukul kepalanya dengan pentungan besi. Ia langsung pingsan dengan darah mengalir di wajahnya ... Orang itu diseret dan sembari terseret ia ditendang dan digebuk begitu rupa sehingga kurasa

ia sebetulnya sudah mati”. (Kalatidha, 2002:19-20)

Dengan demikian “tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap “PKI” diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis” ( Karyawira, 2013). Keadaan ini digambarkan Seno melalui pernyataan seorang anak kecil sebagai berikut.

“ ... kulihat orang yang malang itu dilempar ke atas truk ... Di atas truk itu sudah terdapat sejumlah orang, lelaki maupun perempuan ...Suatu hari tetanggaku sekeluarga menghilang dan katanya mereka dicituk. Kemudian sangat sering kudengar cerita tentang pencidukan ini. Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor antara pukul dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah kemana – kini aku percaya jika dikatakan mereka dibunuh, ...(Kalatidha, 2002:21).

Keadaan ini juga diungkapkan anak kecil itu ketika ia mengikuti pelajaran menggambar di sekolah. “... semenjak berlangsung pencidukan di mana-mana, kami sekarang mempunyai gambar lain: itulah simbol bergambar belati pasukan komando baret merah yang menjadi pujaan di mana-mana” (Kalatidha, 2002:22). Namun ketika ia menggambar lambang ‘palu arit’, teman-temannya langsung memetraikannya sebagai anak PKI yang merupakan musuh mereka hingga bapak guru mengambil gambar tersebut dan menginterogasinya di kantor guru mengenai gambar yang ia ketahui hanya dari gambar peranko yang ia beli di toko.

“Wajah teman-temanku kurasa sudah sama ganasnya dengan orang-orang yang memburu orang sampai masuk kelas waktu itu. Bapakmu PKI, ya? Bapakmu PKI? Kamu PKI?. Memang sudah sering kudengar istilah PKI waktu itu. Suatu hari ada seorang anak yang tak pernah datang lagi ke sekolah dan penjelasan yang kudengar hanyalah, bapaknya PKI. Namun aku sungguh tidak tahu apa hubungan gambar palu arit itu dengan PKI”. (Kalatidha, 2002:22)

Setelah kejadian di sekolah tersebut, barulah anak kecil tersebut mengerti bahwa gambar yang dilukisnya itu dapat mencelakakan ia dan keluarganya. Dengan menggambar palu arit, ayahnya dapat dicurigai dan dituduh PKI serta ditangkap dan ditahan, bahkan dibunuh.

“ ...tetapi lama kemudian baru aku tahu betapa gawat dan nyaris sebetulnya keadaan semacam itu bagi jalan keluargaku. Hari-hari itu banyak orang dicituk tanpa

alasan yang jelas sama sekali, dan pastilah seorang anak menggambar palu arit di maksa pencidukan maka sudah terlalu banyak alasan untuk mencurigai dan menciduk bapaknya” (Kalatidha, 2002: 24).

Pelanggaran HAM terjadi pada orang-orang sipil yang hanya dituduh dan diduga sebagai komunis seperti diungkapkan Seno melalui tokoh anak kecil. Ketika ia pulang sekolah dan menyaksikan orang-orang mengepung dan membakar sebuah rumah yang kepala keluarganya dituduh dan diduga sebagai anggota PKI. Pelanggaran HAM tidak hanya membakar rumah orang sipil yang hanya diduga dan dituduh sebagai PKI, orang-orang tersebut juga menyiksa, bahkan membunuh orang yang jelas mengatakan bahwa ia bukan PKI.

“Hampir semua cerita tentang pencidukan hanya kudengar. Namun suatu hari kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri pencidukan pada siang hari bolong, yang sangat tidak mirip pencidukan sama sekali. Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung sebuah rumah yang terbakar. Orang-orang berteriak. ‘PKI! Keluar!’... ‘keluar kalian atau mati terbakar!’. Meskipun rumah itu telah dibakar, mereka tidak keluar. Seorang perempuan berteriak. ‘Ada anak-anak kecil di dalam rumah itu!’ ‘Masya Allah!’. ... saat itu dari dalam rumah muncul seorang lelaki menggandeng gadis kecil. ... ‘Saya bukan PKI!’... ia sudah jatuh menggelosor. Ia meluncur tengkurap di atas tanah. ... di punggungnya terdapat sebilah kapak menancap erat menembus daging mematahkan tulangnya walaupun ia tidak mati. ... kepalanya terangkat karena rambutnya dijambak ke atas, ...” (Kalatidha, 2002: 24-25).

Pelanggaran HAM terhadap orang-orang sipil juga diungkapkan Seno melalui tokoh anak kecil mengenai hutan jati yang sering dikunjunginya. Hutan jati itu adalah tempat penembakan dan penguburan orang-orang yang dituduh dan diduga PKI. Dalam hutan jati tersebut terdapat banyak gundukan-gundukan tanah yang merupakan kuburan orang-orang korban pelanggaran HAM karena mereka disiksa dan dibunuh dengan keji hanya karena difitnah sebagai PKI.

“Dari teman-teman sepermainanku kudengar cerita tentang hutan jati di luar kota tempat orang-orang yang dituduh itu ditembak mati dan dikuburkan. ‘Banyak orang dibunuh di sana,’ aku teringat temanku berbisik-bisik dalam kelas, ‘termasuk bapaknya si itu.’ Ia menunjuk bangku di depanku yang belakangan selalu kosong. ‘Kamu jangan menggambar palu arit lagi,’ katanya lagi, ‘nanti bapakmu

ditangkap dan dibawa ke hutan jati itu.” (Kalatidha, 2002: 43-44)

Diungkapkan Nurkholis dari Komnas HAM bahwa telah ditemukan bukti permulaan, seperti pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Pelanggaran HAM ini juga diungkapkan Seno dalam novelnya melalui tokoh perempuan yang menjadi menjadi gila atau dianggap gila setelah rumah tempat tinggalnya dan seluruh keluarganya dibakar karena ayahnya dituduh PKI.

Anak perempuan yang tinggal sebatang kara ini harus hidup sebagai gelandangan setelah rumahnya dibakar dan seluruh keluarganya dibunuh sebagai korban fitnah. Ia tidak mempunyai sanak saudara karena mereka takut mengakuinya sebagai saudara setelah keluarganya dituduh PKI dan dibantai serta rumahnya dibakar.

“Dengan tewasnya kedua orangtua dan kembarannya, sementara segenap dokumen terbakar bersama rumahnya, tiada sanak keluarga yang bisa dilacak, dan sanak saudara yang mana pun kemungkinan besar takut mengaku sebagai sanak saudara keluarga itu – keluarga yang rumahnya dikepung orang banyak sembari berteriak ‘Ganyang!’ bukanlah jenis keluarga yang mudah diakui sebagai sanak keluarga tanpa resiko diperlakukan sama.” (Kalatidha, 2002:46)

Pelanggaran HAM berupa pengusiran secara paksa dan perampasan diungkapkan melalui anak perempuan korban fitnah yang dilakukan oleh saudaranya sendiri sebangsa. Tanah bekas rumahnya yang dibakar telah dirampas dan dikuasai oleh seseorang yang berkuasa.

“Tanah di tempat bekas bangunan yang dibakar itu telah diambil alih oleh seseorang yang disebut–sebut berkuasa meski tak jelas bagaimana keberesan hak kepemilikannya. Telah dibangun sebuah rumah yang lebih kurang memang mirip dengan rumah yan semula, ...” (Kalatidha, 2002:46)

Pelanggaran HAM lainnya yang dialami oleh gadis yang dianggap gila ini berupa penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh para petugas dan dokter di rumah sakit jiwa ketika ia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada suatu hari, ketika perempuan yang disebut gila itu berdiri di sana datanglah ambulans berkerangkeng besi. Dari dalamnya keluar para petugas yang berseragam putih tetapi bertubuh kekar. Perempuan itu diringkus dan dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ia ditelanjangi dan dibawa

ke ruang untuk memandikan orang-orang yang disebut gila. Di sana ia disemprot dengan air yang memancar keras sekali, seperti semprotan cuci mobil – begitu kerasnya semprotan air itu sehingga yang disemprot terlihat kesakitan. ... Ia dicuci seperti kuda, disemprot, tubuhnya disiram air asepto dan digosok dengan sikat, rambutnya dikeramas dengan air perasan daun lidah buaya – bukan seperti melayani pelanggan di salon, tapi seperti memandikan binatang. Ia ditekan jongkok menggunakan kaki, disemprot seperti benda mati saja laiknya. Ia terkapar dan terguling-guling di lantai dan masih disemprot juga. Seusai mandi ia dikeringkan dengan handuk besar yang sangat kasar. Ia kemudian diberi seragam pasien rumah sakit jiwa yang bermotif garis-garis tebal terbuat dari kain belacu. Setelah itu ia diletakkan di sebuah kamar kosong di mana terdapat selapis kasur busa yang tidak berkulit dan tampak jelas sudah usang. Pada malam hari pintu besi yang terkunci itu berderit dan dokter jaga memasuki tempatnya tergolek di kasur busa. Ia hanya mendesis, ‘Mati mati mati...’ ketika dokter jaga itu menyetubuhinya. Setelah itu para petugas yang tadi menyemprotnya bergiliran melakukan hal yang sama. (Kalatidha, 2002: 50-52)

Pelanggaran HAM lainnya yang diungkapkan Seno dalam novelnya adalah pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang hanya diduga dan dituduh PKI. Mereka ditangkap, dipenjara belasan tahun tanpa diadili dan dibuktikan kesalahannya. Secara sewenang-wenang mereka disiksa dan dikucilkan dari masyarakat.

Salah satu dari mantan tahanan yang telah dibebaskan adalah seorang anggota Cakrabirawa. Ia ditangkap, disiksa, dan dipenjara belasan tahun hanya karena ia mengenal Untung padahal ia sama sekali tidak mengetahui peristiwa pembunuhan para jenderal. Ia menjadi korban fitnah seperti diungkapkannya “Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya soal Gestapu, Saya memang anggota Cakrabirawa dan kenal Untung – tapi apa salahnya kalau saya kenal Untung? Hampir setiap hari sebelum diberangkatkan ke Pulau Buru saya disiksa dan disuruh mengaku. Saya tidak tahu harus mengakui apa dan walaupun tahu kenapa saya harus mengaku? Katanya saya mengetahui rencana penculikan dan pembunuhan para jenderal. Tentu saja saya tidak tahu. Setiap hari punggung saya ditetesi lelehan ban sepeda yang dibakar. Jangan ditanya seperti apa rasanya. Sebagai anggota pasukan pengawal istana, saya bukan tidak dilatih untuk menahan penderitaan, yang saya tidak mengerti bagaimana orang-orang militer ini tahu betul berbagai cara penyiksaan. Mereka tidak pernah berhasil membuat saya mengaku ataupun pura-pura mengaku. Dua sampai empat orang setiap hari menyiksa sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Suatu kali masing-masing sepasang tangan dan kaki saya



ditindih empat kaki meja, dengan empat orang dewasa duduk onggang-onggang di atasnya. Saya tetap tidak bisa mengakui ataupun pura-pura mengaku. Dari saat ke saat say berjuang mengatasi penderitaan. Usaha bertahan dari rasa sakit menantang kemampuan saya. ... Karena segala siksaan takkan bisa membuka mulut saya, mereka menggunakan lain cara yang tidak pernah saya bayangkan ada. Saya masih ditindih ketika pengecut lain datang membawa seorang tahanan wanita. Ia sedang hamil dan katanya ia Gerwani. Saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dan kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan ke kemaluannya. Saya lihat sangkur itu sudah berdarah ... Wanita malang itu sudah sejak tadi pingsan. Saya kemudian tak tahu apa yang terjadi karena sebuah pentungan dari belakang juga membuat saya pingsan. ...Selama sebulan saya disekap di sel isolasi itu, kadang diberi makan dan kadang tidak, tetapi dari lubang kecil itulah kawan-kawan sesama tahanan bisa menyelundupkan makanan. ‘Saya dianggap gembong. Padahal sungguh mati tidak tahu apa-apa. Hanya karena kenal baik dengan Untung. Para interogator tidak pernah mau peduli bahwa kenal Untung itu tidak berarti tahu seluruh rencananya pada malam September 1965 itu. Saya memang seorang komandan, dalam setiap tingkatan saya menjadi komandan, tapi saya ini hanya korban- tanpa seorang pun yang barangkali sungguh-sungguh berniat mengorbankan saya ...’ (Kalatidha, 2002: 62-64).

Pelanggaran HAM juga diderita oleh mantan tahanan lainnya. Ia juga adalah korban padahal ia tidak tahu peristiwa pembunuhan para jenderal seperti diungkapkannya “Saya salah satu pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Saya ditahan setelah kembali dari luar negeri. Ditangkap begitu saja, seusai paspor dicap petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air. Saya ke luar negeri mewakili organisasi, tapi dalam seminar saya bicara dengan semangat mewakili Indonesia. Saya seorang nasionalis dan setelah kembali dikatakan mengkhianati negeri sendiri. Namun diri saya tidak penting, kisah saya tidak akan lebih hebat dari semua kawan yang ditangkap tanpa kesalahan yang jelas. Diadili saja tidak pernah. (Kalatidha, 2002: 64)

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1965- 1966 di Indonesia dalam novel “Kalatidha” karya Seno Gumira Ajidarma, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1965-1966 di Indonesia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua, Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan/memusnahkan PKI. Ketiga, kejahatan

kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan hak, dan penghilangan orang secara paksa. Keempat, pengarang sebagai warga negara Indonesia berperan sebagai juru bicara kelompok korban kekerasan melalui pandangan dunianya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966.

## DAFTAR PUSTAKA

- Karyawira, William. 2013. *1965-1966 pelanggaran HAM terbesar di Indonesia*. <https://wiliamz.wordpress.com/2013/04/19/1965-1966-pelanggaran-ham-terbesar-di-indonesia> (Diunduh 17 November 2015)
- Mardiani, Dewi. 2007. *Ditemukan Bukti Pelanggaran HAM Berat di Peristiwa 1965*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/24/m7nkvm-ditemukan-bukti-pelanggaran-ham-berat-di-peristiwa-1965> (Di unduh 15 November 2015)
- Miles, B. Matthew and Huberman Michael. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Seno Gumira Ajidarma, 2007. *Kalatidha*. Jakarta: Gramedia.
- Swingewood, Alan and Diana Laurenson. 1972. *The Sociology of Literature*. London: Collier MacMillan Publisher.
- Wieringa, Saskia. (2015) *Pelecehan Seksual terhadap Gerwani: Kisah Atikah – Djamilah dan Djemilah*. Retrieved September 15, 2015 from <http://1965tribunal.org/id/pelecehan-seksual-terhadap-gerwani-kisah-atikah-djamilah-dan-djemilah/>
- Wiersma, William. 1982. *Research Methods in Education: An Introduction*. Boston: Allyn and Bacon. Inc.

# PERMAINAN DAN BERNYANYI SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KREATIVITAS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA PADA ANAK USIA DINI

**Drs. Sarwidi, M Hum.**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

## **ABSTRAK**

*Pembelajaran bahasa pada anak usia dini dapat disampaikan melalui permainan dan juga bernyanyi. Pada dasarnya permainan maupun nyanyian merupakan kegiatan yang sangat digemari anak-anak bahkan remaja pun masih menyukainya. Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan keterampilan berbahasa misalnya berbicara khususnya bercerita. Hal tersebut akan meningkatkan daya kreatifitas anak dalam berimajinasi. Disamping itu permainan bahasa juga dapat dilakukan melalui bermain peran, dimana masing-masing anak diberi peran yang berbeda untuk membuat suatu percakapan pada situasi tertentu. Selain dengan bercerita juga dapat dilakukan lewat nyanyian, sehingga anak-anak akan hafal syairnya serta memahami makna kata-katanya dengan irama yang mereka dengarkan. Dengan demikian kata-kata dalam syair lagu yang berisi nasehat atau pesan moral yang terterkandung di dalamnya dapat diserap anak dengan baik. Jenis permainan bahasa yang dipilih dan*

*disajikan itu hendaknya disesuaikan dengan ketrampilan bahasa yang akan dilatihkan dan sesuai tujuan instruksional pembelajaran serta dapat pula memupuk rasa kesosialan, percaya diri, dan kejujuran anak*

**Kata Kunci** : Pembelajaran Bahasa anak; Bermain peran; Bernyanyi

## **Pendahuluan**

Masalah permainan hampir tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Bayi, anak-anak, ataupun orang dewasa semuanya menyukai permainan. Sudah barang tentu jenis dan sifat permainannya berbeda-beda sesuai dengan umur, jenis kelamin, minat dan bakatnya. Bayi yang baru berusia beberapa bulan saja sudah menyukai permainan, yaitu berupa benda-benda yang biasa dipegangkan atau digantungkan di atas tempat tidurnya. Anak-anak lelaki biasanya bermain layang-layang, kelereng, berkejar-kejaran dan berbeda halnya naka-anak perempuan dan sebagainya.

Dengan jalan bermain itu kita memperoleh kegembiraan atau kepuasan. Kegembiraan yang diperoleh dalam suatu permainan bukan saja karena telah memenangkan permainan tersebut, akan tetapi selama permainan itu berlangsung kita telah memperoleh suatu kegembiraan, menang atau kalah bukan merupakan tujuan utama dalam suatu permainan. Di balik kegembiraan itu sebenarnya kita pun telah memperoleh pula sejumlah keterampilan berbahasa. Di dalam setiap permainan, terdapat suatu tantangan yang harus dihadapi anak.

Untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan berbahasa dapat pula ditempuh melalui berbagai permainan, bernyanyi dan bercerita. Hal-hal tersebut berfungsi untuk melatih keterampilan berbahasa, tidak hanya keterampilan berbicara namun juga ketrampilan mendengarkan, itulah yang dinamakan permainan bahasa.

## **Tujuan Permainan Bahasa**

Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan memperoleh keterampilan tertentu dalam bidang kebahasaan, yaitu berbicara khususnya bercerita. Apabila ada jenis permainan yang menimbulkan kegembiraan tetapi tidak ada keterampilan berbahasa yang dilatihkan, maka permainan tersebut bukanlah permainan bahasa. Demikian juga, walaupun ada keterampilan bahasa yang dilatihkan tetapi kegiatan itu tidak menimbulkan kegembiraan, maka kegiatan itu tidak dapat pula dinamakan permainan bahasa.

Jenis permainan bahasa yang dipilih dan disajikan itu hendaknya

dise-suaikan dengan keterampilan yang akan dilatihkan. Disamping disesuaikan dengan umur, minat, bakat anak. Jadi, setiap permainan bahasa harus dapat mendukung tercapainya tujuan instruksional pembelajaran bahasa. Secara tidak langsung, permainan bahasa ini dapat pula memupuk rasa kesosialan, rasa percaya diri dan kejujuran, sehingga pendidikan moral dapat disampaikan melalui pembelajaran bahasa

Perlu kiranya diperhatikan bahwa pelaksanaan permainan bahasa ini bukannya diperuntukkan mengukur atau menilai (evaluasi) hasil belajar siswa, melainkan hanya untuk melatih keterampilan bahasa belaka. Hal ini disebabkan karena dalam setiap permainan selalu mengandung unsur-unsur kegembiraan.

## **Faktor-Faktor Yang Menentukan Permainan Bahasa**

### ***Situasi dan kondisi***

Sebenarnya dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun permainan bahasa dapat dilaksanakan. Akan tetapi, agar berdaya guna tinggi hendaknya pelaksanaan permainan bahasa dan bercerita tersebut selalu memperhatikan faktor situasi dan kondisi. Pada jam-jam pelajaran terakhir, pada umumnya siswa dalam keadaan letih dan lesu. Sesuai dengan tujuan untuk memperoleh kegembiraan, maka situasi demikian pelaksanaan permainan bahasa akan terasa sekali manfaatnya. Sebaliknya pada jam-jam permulaan, pada waktu para siswa masih dalam keadaan segar bugar dan penuh kegembiraan, maka pelaksanaan permainan bahasa akan kurang terasa manfaatnya.

Permainan bahasa dan bercerita hendaknya jangan terlalu sering dilaksanakan. Apabila terlalu sering dilaksanakan, permainan itu bukannya mendatangkan kegembiraan, akan tetapi justru menimbulkan kebosanan. Selain dari itu, permainan bahasa dan bercerita jangan terlalu lama, sebab akan menimbulkan kebosanan. Hendaknya setiap permainan diakhiri selagi siswa masih berminat. Dengan jalan begitu, para siswa menjadi sangat berhasrat dan mengharapkan permainan itu dilaksanakan lagi di lain waktu.

### ***Peraturan permainan***

Setiap permainan mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Peraturan-peraturan tersebut hendaknya jelas dan tegas, serta mengatur langkah-langkah permainan yang harus ditempuh maupun cara menilainya. Apabila peraturan kurang jelas dan kurang tegas, tidak mustahil terjadi kericuhan dalam permainan tersebut. Setiap pemain harus memahami,

menyetujui, dan mentaati benar-benar peraturan-peraturan itu. Guru sebagai pemimpin permainan mempunyai kewajiban untuk menjelaskan peraturan-peraturan permainan tersebut sebelum permainan dilaksanakan.

## **Pemain**

Dalam setiap permainan apapun diharapkan adanya :

### **1. Jiwa Sportivitas Pemain**

Permainan akan menjadi tidak sehat apabila ada di antara pemain berbuat curang. Oleh sebab itu, sportivitas pemain selalu ditekankan. Hendaknya disadarkan bahwa kejujuran tidak pula kalah pentingnya. Ambisi untuk menang memang harus ada, tetapi jangan sampai mendorong siswa untuk berbuat curang. Setiap kecurangan hendaknya diberi hukuman.

### **2. Keseriusan Pemain**

Keseriusan pemain perlu sekali mendapat perhatian, sebab permainan tidak akan berjalan dengan baik jika ada pemain yang tidak secara sungguh-sungguh melakukannya.

### **3. Kekuatan Pemain**

Dalam permainan yang berupa kompetisi bilateral, kekuatan di antara kedua belah pihak hendaknya diusahakan seimbang.

### **4. Keterlibatan Pemain**

Hendaknya diusahakan agar semua siswa terlibat dalam permainan. tidak hanya sebagai pemain, akan tetapi dapat juga sebagai wasit, atau pembantu wasit, atau pencatat nilai.

## **Macam-Macam Permainan Dalam Pembelajaran Bahasa**

Melalui makalah ini, penulis akan memberi 5 buah contoh permainan bahasa, yang barang kali bisa diterapkan sebagai strategi penyampaian pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran kosa kata. Adapun permainan-permainan bahasa termaksud di antaranya:

### **1. Bermain Peran**

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya orang sering bermain peran. Ini telah dimulai dari masa kanak-kanak misalnya seorang anak berperan menjadi ibu, yang lain menjadi ayah, seorang lagi menjadi anak, dan mereka asyik bermain dengan ucapan-ucapan yang biasa didengarnya diucapkan ibu dan ayahnya.

Waktu bermain peran siswa melakukan peranan seseorang dan menge-mukakan pendapat-pendapat orang yang diperankannya

sungguhpun pendapat tersebut bukan pendapat pribadi siswa yang memerankannya. Untuk mencapai hasil yang memuaskan kita harus mengingat dua faktor penting waktu bermain peran, yakni:

a. **Persiapan**

Murid harus mampu mempertimbangkan dan mendiskusikan pendapat yang dibawakan dengan murid lain sebelum disuruh maju. Disamping itu sebelum disuruh berdiskusi dalam permainan peran hendaknya murid harus menyesuaikan diri dengan beberapa hal tentang latar belakang dan kepribadian karakter yang akan dibawakannya.

b. **Pengaturan tempat untuk bermain peran**

Setelah menyetujui peran yang akan dimainkan, guru mengatur tempat bermain peran sesuai dengan situasi permainan yang akan dimainkan. Teknik bermain peran dalam pembelajaran bahasa dan bercerita sangat baik dalam meningkatkan kemahiran bahasa siswa khususnya dalam pengayaan kosa kata mereka.

Jika siswa tidak diberikan persiapan yang cukup, kemungkinan siswa akan tidak mampu melakukan peran yang akan dilakukan. Sebaiknya siswa dipersiapkan dengan mantap. Jika pelaksanaan di kelas siswa belum terbiasa dengan bermain peran, guru harus membimbing mereka dengan beberapa pertanyaan yang mengarahkan untuk memahami hal-hal yang harus dikuasai dan dilakukan para siswa.

## 2. **Bermain, Bernyanyi dan Bercerita**

a. **Bermain**

Pembelajaran bahasa dengan strategi bermain menurut hemat penulis tepat sekali diberikan untuk siswa sekolah taman kanak-kanak. Siswa seusia mereka yakni antara 3 – 5 tahun, merupakan awal mereka menuju penguasaan bahasa orang dewasa, walaupun kegemaran mereka adalah bermain, berlari-larian dan sebagainya.

b. **Bernyanyi**

Strategi pembelajaran bahasa dengan bernyanyi tentu sudah banyak dilakukan oleh para pendidik, khusus pendidikan di taman kanak-kanak. Anak-anak pasti tidak asing dengan lagu-lagu ; *Pelangi, Naik Delman, Bangun Tidur* dan sebagainya. Kita juga pasti mengenal dengan baik nama Bu Kasur, A. T. Mahmud dan yang lain. Mereka adalah tokoh pendidikan yang sangat perhatian terhadap dunia anak-anak. Mereka menanamkan pengertian, keagungan Tuhan, keindahan alam kepada anak-anak melalui nyanyian.

Berkaitan dengan hal ini penulis ingin memberikan sedikit sumbangan pemikiran, bagaimana pembelajaran kosa kata dengan melalui bernyanyi dan bermain pada usia kanak-kanak. Menurut hemat penulis dengan bermain, anak akan sehat dan dengan bernyanyi anak akan merasa gembira dan senang. Di sini akan penulis berikan contoh lagu yang bisa mendorong anak-anak untuk bermain sambil bernyanyi, dan menghafal nama-nama binatang: gajah,, katak, kupu-kupu dan sebagainya, guru harus berperan sebagai pendukung dan pengawas.

Syairnya adalah seperti ini:

Mari kawan berjalan-jalan lingkaran

Melihat seekor binatang di hutan

Binatang apakah itu?

Binatang apakah itu?

( Guru/ anak-anak ), menyebut satu nama binatang, misalnya:

GAJAH.

Gajah.....gajah..... namanya

Beginilah jalannya.....beginilah jalannya.....beginilah jalannya

( Anak-anak bersama-sama menirukan jalannya gajah )

Begitu seterusnya menyebut nama binatang lain yang sekiranya bisa ditirukan tingkah lakunya.

### c. Bercerita

Pada masa kanak-kanak kegiatan yang banyak dilakukan disamping bermain dan bernyanyi adalah mendengarkan cerita atau dongeng. Pada kebiasaan masyarakat kita budaya lisan atau bercerita. Namun sampai sekarang tidak banyak ahli bercerita atau pendongeng yang mumpuni.

Untuk itu para guru, khususnya para guru TK tentu dituntut untuk pandai bercerita atau mendongeng, sanggupkah Anda menjadi pendongeng yang baik bagi anak-anak ? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Cerita yang sangat digemari pada masa penulis masih kanak-kanak, cerita binatang adalah Kancil yang cerdas : Kancil Ketemu Buaya, Kancil Berpacu dengan Siput. Selain itu ada Cerita Rakyat seperti; Timun Mas, Ande-Ande Lumut, dan lain-lain.

## Penutup

Demikian uraian yang dapat penulis uraikan berkaitan upaya-upaya peningkatan pembelajaran bahasa, khususnya kosakata melalui



permainan, bernyanyi dan bercerita atau mendongeng. Strategi tersebut diharapkan mampu memberikan secercah harapan bagi pembelajaran bahasa pada masa kanak-kanak, dalam hal ini peran guru sangat dominan, guru harus pandai bermain, bernyanyi dan mendongeng serta harus memiliki kesabaran hati yang tinggi. Anak-anak di masa perkembangan bahasanya selalu ingin tahu apa yang ada di benaknya, guru di sekolah hendaknya bisa menjadi mentor yang baik di sekolah, sedangkan di rumah anak-anak akan dimentori oleh kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Orang tua yang sadar akan perkembangan bahasa dan kejiwaan anak, pasti akan selalu dekat dengan mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ahsin, 1981. *Pengajaran Menyimak Memilih dan Mngembangkan Bahan Pengajaran*. Jakarta: P3G.
- Dardjowidjojo, Soenjono, 2003. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fa Suzelena, 1997. *Radio in The Class Room*. Forum: Volume 35 Nomer 2, April Halaman: 54.
- Gorys Keraf, 1980. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Hartanto, John S., *Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum EYD*. Surabaya: Indah.
- Nurgiantoro, Burhan. 1988. *Penilaian dalam Pengajaran bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: BPEE.
- Penny,Ur. 1994.*Teaching Listening Comprehension*. London: Cambridde University.
- Sri Hastuti, PH. 1984. *Memperkenalkan Metode IKP ( makalah ) IKIP* Yogyakarta.
- Suparno. 1981. *Media Pengajaran Bahasa*. Proyek Peningkatan/ Pengembangan Perguruan Tinggi: IKIP Yogyakarta.



**NOTULEN**



# NOTULA SIDANG PARALEL 1A

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 1 (Ruang Sidang Utama PLA Lt. 3)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 1A:
  1. **Yoseph Yapi**  
“Taum: Bahasa, Wacana, dan Kekuasaan dalam Konstruksi G3OS PKI”
  2. **Esti Imawati**  
“Sastra sebagai Alat Mengkritisi Kekuasaan di Indonesia: Tinjauan dari Masa ke Masa”
  3. **Else Liliani**  
“Membaca Gerwani dalam Cerpen Indonesia”
- Moderator: Dr. Nurhadi, M.Hum.
- Notulis: Ari Listyorini, M.Hum.
- Acara dimulai pukul 13.30 WIB.

- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**  
**PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**  
**Khusnul (mahasiswa UNY)**

Bagaimana cara kita untuk menafsirkan apa yang kita dapat ke publik?  
(untuk Pak Yoseph Yapi)

**JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**  
**Bapak Yoseph Yapi**

Ketika merasa terpanggil untuk meluruskan sejarah masa lalu, kita harus memikirkan bagaimana menyiasatinya. Sebagai contoh banyak usulan orang yang meminta Jokowi minta maaf karena begitu banyak orang yang tidak tahu apa-apa, dan hal yang wajar kalau pemerintah minta maaf. Sudah saatnya menghilangkan masa lalu supaya kita kuat. Di Jerman mengubur masa lalu supaya jadi bangsa yang kuat.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PARALEL 1B

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 2 (Ruang 301 PLA Lt. 3)

- Pembicara Sidang Paralel 1B:
  1. **Ali Nuke**  
“Karya Sastra sebagai Praktik Kontestasi Kekuasaan Simbolis dan Kekuasaan Struktural Objektif”
  2. **Andi Batara Indra**  
“Wacana Kekuasaan dalam Karya Seno Gumira Ajidarma Penembak Misterius dan Saksi Mata”
  3. **Indah Imawati**  
“Penulisan Sejarah Sastra Indonesia di Jawa Timur”
  4. **Lalu Nasrullah**  
“Kandungan Sastra dalam Budaya *Bereqe* Sasak Lombok sebagai Upaya Pembangun Jati Diri Bangsa dan Mengkritisi Kekuasaan”
- Moderator: M. Thobroni
- Notulis: Ahmad Wahyudin, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 13.30 WIB.

- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

**PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**

**Yudistira (PBSI S2 UNY):**

Hal apa yang mendasari kontestasi dalam karya sastra itu? (untuk Pak Ali Nuke)

**Riska (Sasindo UNY)**

- a. Kekuasaan apa saja yang terdapat dalam karya sastra yang ada di Jatim? (untuk Bu Endah)
- b. Implementasi hasil penelitian ibu seperti apa? Apakah ada tindak lanjutnya? (untuk Bu Endah)

## **JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**

### **Ali Nuke**

Setiap segi kehidupan selalu ada kontestasi, begitu juga dalam karya sastra. Kontestasi dalam karya sastra bertujuan untuk legitimasi. Untuk mengungkap kesadaran palsu dengan cara mendekonstruksi.

### **Endah Imawati**

Ada dua jenis komunitas, yaitu: 1) panutan, kelompok ini menjadi motor/penggerak roda karya sastra. Ketika tidak bergerak, maka roda karya sastra tidak bergerak. Selain itu, ruang publik/sponsor juga menjadi roda penggerak karya sastra yang ada di Jatim. Ketika tidak ada sponsor, mereka bergerak sendiri di dalam komunitasnya, 2) tanpa panutan, kelompok ini jalan sendiri-sendiri.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PARALEL 1C

## SEMIAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 3 (Ruang 302 PLA Lt. 3)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 1C:
  1. **Afdhal Kusumanegara**  
“Struktur Mikro Pencitraan Politik di Media Massa”
  2. **Dwi Laily Sukmawati**  
“Humor sebagai Simbol Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*) terhadap Etnis Madura”
  3. **La Ode Gusman Nasiru**  
“Intimidasi Kuasa Kultural terhadap Perempuan dalam Cerpen Indonesia: Sebuah Analisis Mitos Kecantikan”
  4. **Ari Kusmiatun**  
“Pembentukan Kesadaran Multikultural melalui Bahasa Komedi: Studi Wacana Kritis *Stand Up Comedy* di Indonesia”
- Moderator: Dwi Budiyanto, M.Pd.
- Notulis: Dwi Hanti Rahayu, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 13.45 WIB.
- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

### PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

#### Faisal (mahasiswa PBSI FBS UNY)

Mengapa pejabat sering dikatakan melakukan pencitraan, padahal sebenarnya itu terlalu cepat dikatakan sebagai kesimpulan? Jadi, kalau hanya struktur mikro, itu masih terlalu sempit. (untuk Afdhal Kusumanegara)

### JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

#### Afdhal Kusumanegara

Praktik Sosial dan Teks. Di sini Fandic (1998) bisa membedakan proses dan analisis. Jadi, boleh saja jika hanya teks struktur mikronya yang dikaitkan dengan kondisi sosial yang ada.

--- oOo ---



# NOTULA SIDANG PARALEL 1D

## SEMIAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 4 (Ruang Sidang PLA Lt. 2)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 1D:
  1. **Jimat Susilo**  
“Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi: Permasalahan dan Solusi”
  2. **Sudaryanto:**  
“Bahasa dan Negara: Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Kerangka 65 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok”
  3. **Laily Nurlina dan Siti Fathonah**  
“Pengembangan Materi Membaca BIPA yang Terintegrasi Kearifan Lokal sebagai Jembatan”
  4. **Eko Suroso**  
“Pengkajian bidang-bidang Kesalahan Pebelajar Bahasa Indonesia sebagai b-2 merupakan Suatu Upaya Pemerteguhan Posisi Strategis Pengembangan Bahasa Indonesia”
- Moderator: Israr Nuryadi
- Notulis: Beniati Listyorini, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 13.30 WIB.
- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

### PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

1. **Asgahshag**  
Kearifan Lokal apa saja yang konkrit dan hikmahnya untuk masyarakat purwokerto?
2. **Satria (mahasiswa PPs UNY)**  
Presiden memegang kendali penting atas kuasa bahasa. Bahasa Indonesia dipelajari di LN. Harusnya gentian, kita mempelajari bahasa-bahasa lain.
3. **Miftakhul Rohman (mahasiswa PPs UNY)**  
Bagaimana peluang pengajar bahasa Indonesia di LN. Bagaimana tanggapan pemerintah, program apa saja?

**4. Elly Siti Julaeha**

Bagaimana mengajar BIPA di kota yang jarang memakai bahasa Indonesia?

Bahasa Indonesia oleh orang Indonesia sangat kacau.

**5. Reny (mahasiswa PPs UNY)**

Bagaimana motivasi para pembelajar BIPA? Menaklukkan bangsa dengan menguasai bahasanya.

**JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**

**Sudaryanto**

Motivasi ingin ke bali, menjadi guru itu tidak terpikir tapi ingin bekerja di perusahaan RI-Tiongkok. Dampak positif bagi Indonesia: ada penduduk Guachiau melestarikan budaya Indonesia. Ada program PPSDK untuk mengundang pengajar mengajar di LN nanti ditempatkan.

**Elly**

Program SAME untuk pengajar BIPA LN.

**Jimat Susilo**

Setuju presiden bisa menjadi kunci kuasa bahasa. Bahasa local memang menjadi pilihan penutur asli.

**Eko Suroso**

Justru menghimbau mahasiswa menciptakan bahasa sendiri selain bahasa pejabat. Guru kurang berani memberikan standar yang tepat dan baku. Guru terlalu toleran untuk meluluskan.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PARALEL 2A

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 1 (Ruang Sidang Utama PLA Lt. 3)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 2A:
  1. Ida Sukowati  
“Bahasa Kekuasaan dalam Karya Sastra (Perspektif Epistemologis Michel Foucault)”
  2. Juanda  
“*Linguistic Landscape*: Potret Benturan Kebahasaan”
  3. Tadkiroatun Musfiroh  
“Wacana Gosip sebagai Strategi Hegemoni”
- Moderator: Dr. Nurhadi, M.Hum.
- Notulis: Ari Listyorini, M.Hum.
- Acara dimulai pukul 15.00 WIB.
- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

### PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

#### Ayu (mahasiswa UNY)

- a. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan dalam pembelajaran, tetapi dalam penggunaan/ penamaan hotel tidak boleh. Alasannya apa? (untuk Pak Juanda)
- b. Di mata kuliah sosiologi sastra ada cerpen yang menghina nabi, Tuhan, sehingga isu-isu tersebut menutupi fakta. Akan tetapi, ada pula cerpen yang menguak fakta tertentu, dikritisi, yang akhirnya gosip menjadi tertutup. Bagaimana dengan hal ini? (untuk Ibu Tadkiroatun Musfiroh)

### JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

#### Bapak Juanda

Kita harus benar-benar memastikan dalam pembelajaran, bahasa asing digunakan untuk kebutuhan akademik sedangkan dalam publik harus

menggunakan bahasa Indonesia. Undang-undang yang mewajibkan ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang wajib digunakan bisa dilihat dalam undang-undang bahasa. Jadi jelas, apakah benar undang-undang ini sudah dijalankan dan ternyata belum.

### **Ibu Tadkiroatun Musfiroh**

Karya sastra ada proses kreatif yang dianalogikan dengan gosip, apakah orang yang menafsirkan benar-benar menafsirkan atau berdiri di atas tafsir sendiri..secara jujur..atau tafsir di atas tafsir. Oleh karena itu, kita harus melihat kembali fakta-faktanya. Contoh gosip tentang Monica Lewinsky didukung oleh fakta menjadi kuat.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PARALEL 2B

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 2 (Ruang 301 PLA Lt. 3)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 2B:
  1. **Silvie Meliana**  
“Pelanggaran Hak Azasi Manusia dalam Novel *Kalatida* Karya Sena Gumira Ajidarma”
  2. **Dwi Budianto**  
“Bahasa dan Realitas Kelas Menengah Indonesia”
  3. **Mu'minin**  
“Etika Dasar Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tokoh Ken Arok dalam Novel *Pararaton* Karya Wid Kusuma”
  4. **M. Thobroni dan Ridwan**  
“Perkembangan Wacana Karya Sastra Pascareformasi: Kasus Novel *Para Gus* Karya Sachree M. Daroini”
- Moderator: Ari Kusmiatun, M.Hum.
- Notulis: Dwi Hanti Rahayu, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 15.20 WIB.
- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

### PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

**Arif (mahasiswa PBSI FBS UNY)**

Mengapa pelanggaran HAM tidak lagi digubris pada masa sekarang ini? (untuk Selvie Meliana)

### JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

**Selvie Meliana**

Sebenarnya banyak masyarakat sudah berupaya, tetapi memang kebijakan tetap tidak atau belum berpihak.

--- oOo ---

**NOTULA SIDANG PARALEL 2C  
SEMIAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN  
KEKUASAAN”**

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 3 (Ruang 302 PLA Lt. 3)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 2C:
  1. **Rahmawati Aziz**  
“Kekuasaan dalam Novel *Stardust* Karya Neil Gaiman”
  2. **Kusmarwanti**  
“Representasi Penguasa Orde Baru dalam Lakon Wayang *“Bambang Indra Gentholek Takon Bapa”*”
  3. **Wijaya Heru Santoso**  
“Representasi Ideologi Kepriyayian dalam Novel *Para Priyayi, Canting, dan Gadis Tangsi*”
  4. **Suroso**  
“Etika Dasar Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tokoh Ken Arok Novel Pararaton Karya Wid Kusuma”
  
- Moderator: Esti Swastikasari, M.Hum.
- Notulis: Ahmad Wahyudin, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 14.50 WIB.
  
- **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

**PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**

1. **Yudistira (PBSI S2 UNY):**  
Apakah ideologi priyayi masih relevan pada kehidupan saat ini?
2. **Riska (Sasindo UNY)**
  - a. Mengapa sastra yang dipanggungkan seperti kehilangan esensi sastra itu sendiri?
  - b. Seberapa kuat orde baru masuk dalam wilayah sastra? (untuk Pak Suroso)

**JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**

?

Salah satu ciri ideologi priyayi adalah setia pada atasan, punya pangkat, punya kekayaan maka orang akan dihargai. Hal ini yang masih ada dalam kehidupan kita saat ini. Namun, memang ada orang yang memandang

negatif priyayi karena memanfaatkan kepriyaiannya untuk tujuan tertentu. Memang ada “orang biasa” yang dalam kehidupannya meniru gaya priyayi sehingga masyarakat menganggap kehidupan *mriyayi* sebagai suatu hal yang negatif.

### **Suroso**

Zaman Suharto (orde baru) ketika berkuasa memang mempunyai mata-mata untuk mengawasi ruang gerak masyarakat dan itu berlangsung lama sehingga dampaknya masih terasa pada saat ini.

Kekhawatiran Anda tentang sastra yang seolah-olah kehilangan esensi karena ada pakem disimpangkan. Ketika sastra dipanggungkan sebenarnya kita secara tidak langsung memperkenalkan sastra kepada masyarakat. Oleh karena itu, itu menjadi tugas kita bagaimana mengemas sastra sehingga bisa dinikmati masyarakat luas.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PARALEL 2D

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang 4 (Ruang Sidang PLA Lt. 2)

- Pembicara Pendamping dan Judul Makalah Sidang Paralel 2D:
  1. **Danang Rubidho**  
“Kekerasan simbolik (symbolic violence) terhadap warna kulit orang Indonesia pada iklan pencerah kulit *fair and lovely*”
  2. **Israr Nuryadi**  
“Analisis Pragmatik Bahasa Sandi dalam Wacana Korupsi”
  3. **Muh. Ridwan**  
“Stereotip Gender Bahasa, Rekonstruksi, dan Redefinisi Perempuan Bahasa Arab”
  4. **Ag. Andoyo Suliantoro**  
“Kontribusi Seni Tradisional Banyumasan terhadap Kekayaan Kesenian Tradisional Jawa”
- Moderator: Hartono, M.Hum.
- Notulis: Beniati Listyarini, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 14.50 WIB.
- **Tanya-jawab dalam Sesi Diskusi**

### PERTANYAAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:

1. ?
  - a. Bagaimana konsep muzakkar mu’annas dalam hegemoni laki-laki? Ternyata bukan hanya arab, tapi perempuan terdeskriminasi sejak awal. (untuk Pak Ridwan)
  - b. Korban iklan bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Yang putih orang Indonesia bukan? (untuk Pak Danang)
2. **Elin (mahasiswa PPs UNY)**
  - a. Iklan memang bagus untuk kajian kebahasaan (untuk Pak Danang)
  - b. Kesenian Banyumas masih terus ada, bukan terkikis. Masyarakat sudah sadar budaya (untuk Pak Andoyo). Bagaimana mengangkat Dieng sebagai destinasi utama di Jawa?



- c. Kenapa Pak Israr tertarik untuk mengangkat wacana tentang korupsi? (untuk Pak Israr)
3. **Hartono (Dosen PBSI UNY)**  
Menurut kacamata Pak Andoyo, mengapa Ahmad Tohari mengangkat budaya ronggeng?

**JAWABAN/KOMENTAR/TANGGAPAN:**

1. **Danang Rubidho**

Iklan memang konsumen yang dibidik. Ada ungkapan, jika ingin melihat orang Indonesia Asli lihatlah anak SMP ke bawah, SMA ke atas sudah bukan asli.

2. **Israr Nuryadi**

Alasannya karena percakapan tersebut tidak dipakai untuk umum. Kita sebagai orang bahasa harus peka terhadap apapun bahasa yang ada.

3. **Muh Ridwan**

Bahasa arab sebenarnya tidak mendeskriminasi wanita. Yang membuat perbedaan adalah budaya. Klasifikasi dan pertarungan wacana, pandangan hidup penutur. Namun karena munculnya tafsir patriarki maka muncul pula dominasi hegemoni patriarki.

4. **Andoyo**

Masukan mengangkat Dieng sebagai ikon Indonesia akan disampaikan. Munculnya kesenian sekarang ini karena ada permintaan, bukan karena ingin atau murni. Ahmad Tohari bermaksud untuk memperkenalkan budaya banyumas agar tidak sampai dicuri oleh negara lain.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PLENO I

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang Sidang Utama PLA Lt 3

- Pembicara Sidang Pleno I:
  1. Yudi Latif, Ph.D.
  2. Prof. Suminto A. Sayuti
- Moderator: Dr. Maman Suryaman, M.Pd.
- Notulis: Beniati Listyarini, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 09.30 WIB.
- **Isi Penyajian:**
  1. **Yudi Latif, Ph.D.**
    - Bahasa ilmu tertua
    - Dari 17 ribuan pulau, baru 5 ribuan yang bernama. Yang lain belum berbahasa.
    - Jika ingin membunuh bangsa, bunuhlah bahasanya
    - Bahasa adalah tanda. Jika berjalan pasti memperhatikan tanda.
    - Jika bangsa tidak memperhatikan tanda dalam mencapai tujuannya, bangsa akan tersesat.
    - Tanda ini harus sesuai dengan jati diri
    - Kuasa bahasa. Foucault: bahasa kuasa adalah permainan orang-orang merdeka.
    - Kapan masyarakat bahasa? Jika suatu orang/masyarakat memiliki kuasa modal, politik, budaya, ekonomi. Ada dominasi kekuatan.
    - Dunia intelektual pun gagal memproduksi cendekiawan2 publik.
    - Bahasa adalah hulunya. Jika hulu tidak dihormati, tidak kuat, bagaimana bangsa akan kuat.
    - Reformasi: kuasa kultural politik tidak berdaya. Kuasa modal yang berdaya: nama mall, hotel, acara televise LEMBAGA YANG MENENTUKAN/PENGENDALI DI INDONESIA SKRG (NELSON).
    - Demokrasi diikuti mediokrasi.
    - Dalam sidang: esensi tidak bicara

- Pencapaian kesepakatan “BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN” bukan perjuangan mudah.
- “PERJUANGAN BANGSAWAN PIKIRAN, BUKAN HANYA BANGSAWAN USUL”
- “BANGSAWAN PIKIRAN” kemudian dirubah menjadi “PEMUDA PELAJAR”
- Dunia kampus melahirkan tanda ini.

## 2. Prof. Suminto A. Sayuti

- *Legal standing*
- Masuk kerangkeng bahasa karena kuasanya. (scopus, webomatrik, dll)
- Sastra dalam kuasa, SASTRA UNTUK MENUMBUHKAN KUASA
- Serat BARATAYUDHA: bunuh membunuh antar saudara diizinkan selama itu untuk kebaikan.
- Perlawanan Trunojoyo: Mengejek dengan sastra
- Masa ORBA: sastra lakon bentuk perlawanan satu pihak dan pembelaan pihak lain.
- Lakon dadung ngamuk (PDI), pandu swargo (PPP) , wahyu waringin kencono (GOLKAR)
- SASTRAPERLAWANAN, SASTRAPEMBELAAN(MELEGITIMASI KEKUASAAN), SASTRA PERMINTAAN
- Sastra menjadi perlawanan tekstual terhadap kekuasaan
- Sastra untuk kampanye politik
- Politisi penguasa
- # MENEMPATKAN SASTRA SEBAGAI PERLAWANAN TEKSTUAL
- Di Perguruan Tinggi pun politisasi
- PUISI TAUFIK ISMAIL sejak tahun 70an: gambaran Indonesia masa depan
- Beberapa produk “diamankan”
- Memproduksi tanda baru melalui bahasa dan sastra.

## • Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi

### PERTANYAAN-PERTANYAAN

#### 1. M. Tobroni (Universitas Tarakan, Kalimantan)

- a. Sistem kapitalis tumpuannya pasar. Produksi ditentukan oleh pasar jadi kita sendiri yang menentukan. Jadi bagaimana? (untuk Pak Yudi Latif)
- b. Sastra seperti mengalami kebingungan sekarang. Produksi sastra banyak tetapi arahnya tidak jelas. Bagaimana? (untuk Pak Suminto)

## 2. **Sinta (Boda)**

Murid melihat tayangan Mata Najwa dan bertanya pada guru: “Bahasa bisa dipakai untuk alasan kekuasaan ya Bu?” Bagaimana guru, pengajar, calon guru membawa anak-anak dan menyikapi hal tersebut? (untuk Pak Yudi Latif dan Pak Suminto)

## 3. **Eko Suroso (UMP)**

- a. Bagaimana penafsiran bahasa pertama di dunia bahasa apa? (untuk Pak Yudi Latif)
- b. Adakah bukti-bukti sastra berhasil untuk perlawanan? (untuk Pak Suminto)
- c. Bagaimana strategi sastra Pak minto agar tidak masuk penjara? (untuk Pak Suminto)

## 4. **Sodiq**

Adakah fanatic kekuasaan yang baru? (untuk Pak Yudi Latif dan Pak Suminto)

## 5. **Fira (PPS UNY)**

Revolusi mental. Bagaimana langkah merevolusi mental? (untuk Pak Yudi Latif dan Pak Suminto)

## 6. **Yudhistira (mahasiswa PPs UNY)**

Ilustrasi bunuh bangsa bunuh bahasa. Apa rekomendasi Pak Yudi untuk memperbaiki bangsa dengan politik bahasa kita? (untuk Pak Yudi Latif)

## 7. **Supandi Syahrul**

Bahasa Indonesia tidak bisa dijadikan bahasa pers (pengalaman di RCTI SCTV). Bukan maksud pemilik kuasa modal ingin menghancurkan bahasa Indonesia tapi pasar. Lalu Bagaimana? (untuk Pak Yudi Latif dan Pak Suminto)

## **JAWABAN/TANGGAPAN PEMBICARA**

### **1. Pak Yudi Latif**

- Pasar netral, tidak hanya untuk kapitalisme saja. Tapi bagaimana memposisikan pasar. Pasar punya sistem sendiri, tidak bisa terlalu liberal dan tidak bisa terlalu diatur. Skrg Indonesia dikuasai modal asing. Skrg relasi konsumsi yang berkuasa, bukan produksi. Jumlah mobile phone 300 juta melebihi jumlah bangsa. Kredit sangat berjamur. Orang Indonesia lebih menekankan gaya hidup, bukan produksi. Konsumsi sangat kuat tapi produksi tidak ada.
- Kita bisa melahirkan sistem tanda sendiri. Negara harus menjadi institusi publik yang sesungguhnya.
- Bahasa pertama: rumpun bahasa di afrika. Migrasi orang afrika. Yang dilewati garis khatulistiwa: pusatnya bahasa lama. Temuan

baru: Diaspora bahasa Austronesia berasal dari Papua. DNA orang Indonesia ternyata lebih tua dari Taiwan. Kemungkinan bahasa Austronesia menjadi ibu dari bahasa dunia.

## 2. Pak Suminto A. Sayuti

- Sastra Indonesia adalah sastra local. "KITA MENAFSIR KITA ADA".
- Sekarang ini Struktur bahasa pun sudah berubah tidak jelas.
- Terpenjara bisa di mana saja. Kita cenderung alergi dulu terhadap sesuatu. Belum lakukan sesuatu sudah menghakimi sesuatu. Cobalah melawan dengan sastra. Banyak yang bisa diproduksi. Gunakan estetika plesetan untuk melawan, seperti puisi mbeling REMY SILADO atau wayang plesetan.

--- oOo ---

# NOTULA SIDANG PLENO II

## SEMINAR NASIONAL “BAHASA, SASTRA, DAN KEKUASAAN”

Kamis, 26 November 2015  
Ruang Sidang Utama PLA Lt 3

- Pembicara Sidang Pleno II:
  1. Dr. Wiyatmi, M.Hum.
  2. Dr. Teguh Setiawan, M.Hum.
- Moderator: Dr. Anwar Efendi
- Notulis: Ary Kristiyani, M.Pd.
- Acara dimulai pukul 11.30, selesai pukul 14.45 WIB.
  
- **Isi Penyajian:**
  1. **Dr. Wiyatmi, M.Hum.**
    - Sastra feminis adalah genre sastra yang mengusung pemikiran....
    - Patriarki menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas, dan mengeksplorasi superior. Perempuan inferior.
    - Profesi ilmuwan dan seniman disominasi oleh laki-laki.
    - Perempuan dicitrakan dengan stereotipe
    - Perempuan diposisikan sebagai objek, marginal, terpinggirkan, *liyan*.
    - Sastra feminisme melakukan kritik terhadap dominasi patriarki dan ketidaksetaraan, serta ketidakadilan gender.
    - Kemunculan sastra feminis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran dan gerakan feminisme di masyarakat yang merambah ke dunia sastra.
    - Feminisme: ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya.
    - Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, pelaku dari penindasan perempuan.
    - Feminisme lahir untuk mengakhiri dominasi laki-laki pada struktur budaya, seni, gereja, hukum, keluarga inti yang berdasarkan kekuasaan ayah dan negara.
    - Tokoh-tokoh sastra feminis: **Elaine Showaler** mengagagas fase

feminis, 1) fase feminis, 2) fase *feminist*, dan fase *female*. **Helene Cixous** menggagas praktik menulis feminin yang bertujuan untuk menyuarakan dan menulis tentang representasi positif tentang feminis.

- Berbagai tanggapan terhadap munculnya sastra feminis, seperti menghina dan mengkritisi, dan lain-lain.

## 2. **Dr. Teguh Setiawan, M.Hum.**

- Merefleksi Tahun 1928 munculnya kata “Indonesia” mengimplementasikan identitas bangsa dan kekuasaan.
- Sistem yang berlaku dan kita mengamininya sesungguhnya kita dalam kekuasaan tertentu.
- Identitas kata “Indonesia” diakui maka akan bahaya bagi Belanda. Pengakuan atas kata “Indonesia” artinya, pengakuan atas kedaulatan suatu negara.
- Akhirnya pada Tahun 1945 Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa.
- Orde Baru muncul kata “pembangunan” jika takut menjual tanah maka takut dianggap antipembangunan.
- Pada tahun 1998 muncul kata “reformasi” dan menjadi kata yang ampuh.
- Label “Cina” pada Orde Baru ampuh tetapi ada masa Reformasi menjadi “Tiong Hoa” dengan Kepres.
- Kekuasaan sosial muncul di media massa. Media memberikan pengaruh pikiran kpd pembaca, seperti kata akhir-akhir ini “mama minta pulsa” dan “papa minta saham”.
- Kata “minoritas” selalu ditindas maka mayoritas harus mengayomi minoritas.
- Kekuasaan dalam bentuk sistem kadang tidak kita sadari.
- Masing-masing individu memiliki kekuasaan dalam mengontrol diri sendiri.

### • **Tanya-jawab dalam Sessi Diskusi**

#### **PERTANYAAN-PERTANYAAN**

##### 1. **Muhammad Thobroni (Universitas Tarakan)**

- a. Apa yang menjadi pemicu perempuan yang tidak berdaya dan mengapa kebanyakan perempuan menyuarakan tentang kekuasaan laki-laki? (untuk Bu Wiyatmi)
- b. Bagaimana tanggapan Pak Teguh tentang situasi produksi kata di media massa? (untuk Pak Teguh)

## 2. **Reza (Jurnalis)**

Saat ini perempuan masih dijadikan objek seksualitas, peran sastra feminis saat ini seperti apa? (untuk Bu Wiyatmi)

## 3. **Wikar (mahasiswa PBSI angkatan 2015)**

Mohon pendapat Pak Teguh tentang dosen menggunakan kekuasaan untuk menundukkan mahasiswa? (untuk PakTeguh)

## 4. **Yudhistira (mahasiswa PPs UNY)**

- a. Apakah feminisme muncul akibat dari tokohnya atau ide dari tokoh tersebut? (untuk Bu Wiyatmi)
- b. Seberapa jauh peran negara terhadap feminisme? (untuk Bu Wiyatmi)

## **JAWABAN/TANGGAPAN PEMBICARA**

### 1. **Pak Teguh Setiawan**

- Kekuasaan tersembunyi, topik dan masalah yang ditayangkan tidak bisa diinginkan. Media massa memiliki kekuasaan untuk menentukan topik. Headland diunggah terus-menerus/berulang-ulang dan kita dapat terpengaruh maka kita masuk dalam kekuasaan. Gagasan yang ditayangkan dalam media massa banyak mempengaruhi masyarakat. (untuk M. Thobroni)
- Kuasa dosen adalah kuasa mengontrol dan mengendalikan mahasiswa/orang lain untuk berbicara dan diam dalam saat pembimbingan skripsi. Kuasa dapat diperoleh dengan diperjuangkan. (untuk Wikar)

### 2. **Bu Wiyatmi**

- Tidak semua perempuan feminis, banyak juga perempuan patriarki. Demikian juga sebaliknya, banyak laki-laki yang feminis. Banyak perempuan yang feminis tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Sejarah feminis masih didominasi kritik patriarki. (untuk M. Thobroni)
- Peran sastra feminis agar tidak selalu menjadi objek maka perempuan dan jurnalis terus-menerus mengakui eksistensi perempuan. (untuk Reza)
- Feminisme mulai dari ide-ide tokoh kemudian baru berkembang menjadi gerakan. Pengaruh kesetaraan gender di seluruh pendidikan di Indonesia maka DP2M memberikan dana penelitian untuk penelitian gender. (untuk Yudhistira)

--- oOo ---





PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
**BAHASA, SASTRA,**  
*dan* **KEKUASAAN**

Bahasa dan kesusastraan pada hakikatnya merupakan salah satu produk peradaban dan budaya masyarakat suatu bangsa. Oleh karenanya, eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang ada dalam masyarakat suatu bangsa, termasuk kekuasaan. Sejarah bahasa dan sastra Indonesia juga telah membuktikan hal tersebut. Pilihan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara dalam yang pertama kali dicetuskan dalam peristiwa Sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 dan kemudian dikukuhkan dalam UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menunjukkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara eksistensi bahasa dengan kekuasaan. Karya sastra, sebagai karya seni yang bermediakan bahasa, tentu juga tidak akan lepas dari kekuasaan. Dengan mempertimbangkan bahasa yang digunakan sebagai media karya, maka sejarah sastra Indonesia pun tidak akan terlepas dari kekuasaan. Dalam hal ini pengakuan dan perkembangan sastra akan selalui berkaitan dengan kekuasaan. Pada periode tertentu, dengan alasan politik kekuasaan karya sastra dilarang dipublikasikan dan dibaca masyarakat. Sebagai gantinya, muncul gerakan untuk menerbitkan karya sastra tertentu yang dianggap bermanfaat bahkan mendukung kekuasaan tertentu.

**Diterbitkan oleh:**

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNY  
Bekerjasama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa  
dan Sastra Indonesia S2, Program Pascasarjana UNY



Berbah, Sleman, Yogyakarta  
Telp: 0815 7881 5027

**interlude**

interludepenerbit@gmail.com

